Mimbar PENERANGAN

BATANGHARI

TAHUN KE XIII No. 1-2 DJANUARI/PEBRUARI 1962

MIMBAR PENERANGAN

madjalah untuk djurupenerang — diterbitkan oleh Deppen Djaka

Berkala bulanan
Untuk Djurupenerang
Diselenggarakan oleh :
Direktorat Publisitet &
Penerangan Daerah
Deppen

Dibantu oleh:

Para Djurupenerang Pusat dan Daerah serta Para Pemuka dan Peminat Masalah-masalah Penerangan.

Alamat:
Redaksi/Administrasi
Merdeka Barat No. 9
Djakarta

Redaksi: G. 820 pes. 3
Administrasi: O. P. 11

DALAM NOMOR INI

GAMBAR KULIT

Sukarelawan Pembebasan Irian Barat gelom-bang pertama, menudju Medan Bakti.

MEMASUKI TAHUN BARU 1962

Pada peringatan Dwi-Windu Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1961 P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno telah menjampaikan kepada Bangsa Indonesia dan seluruh dunia amanat beliau jang berdjudul „RESOPIM" jang merupakan kelengkapan doktrin Revolusi Bangsa Indonesia.

Kemudian setelah itu, hampir dengan serentak sebagian terbesar daripada pimpinan PRRI-Permesta dengan pasukan2nja telah kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, jang menjebabkan pula pulihnja keamanan di-daerah2 jang dahulu lazim disebut daerah2 PRRI-Permesta. Pulihnja keamanan didaerah jang luas itu berarti memperkuat „home-front" kita.

Amatlah penting dalam perdjoangan Bangsa Indonesia tahun 1961, muhibah politik dan perdjoangan P.J.M. Presiden diluar negeri, dalam mana P.J.M. Presiden selaku penjambung lidah Rakjat dan Bangsa Indonesia, telah menjebabkan Indonesia dengan aktif ikut berbitjara dalam pertjaturan politik dunia.

Dan achirnja, pada tanggal 19 Desember 1961, terdjadilah apa jang telah lama di-tunggu2 oleh rakjat Indonesia dalam perdjoangannja mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Pada hari jang bersedjarah itu, P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi dengan pihak Belanda, melantangkan Komando Rakjatnja, ialah:

I. Gagalkanlah pembentukan „Negara Boneka Papua" buatan Belanda kolonial.
II. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
III. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Kini kita ada diambang pintu tahun 1962.

Baiklah kiranja kita men-tjamkan hal2 apakah jang harus kita laksanakan, tugas-kewadjiban apakah jang harus kita djalankan sebagai Bangsa Indonesia.

Dalam tahun jang akan datang ini adalah mendjadi tugas-kewa-

djiban kita sekalian sebagai Bangsa Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia; adalah mendjadi tugas-kewadjiban kita merealiseer Tri-Program Pemerintah, dan adalah tugas-kewadjiban kita pula menjelenggarakan Asian Games ke-IV di Ibu-Kota Djakarta.

Untuk mentjapai hasil2 jang lebih besar dalam daja-upaja kita dalam tahun 1962 nanti, maka kita harus:

a. mengkonsolideer dan menjempurnakan hasil2 Revolusi jang telah tertjapai, jaitu: keamanan jang telah pulih kembali didaerah2 pemberontakan dahulu, stabiliteit politik jang telah terwudjud, dan kedudukan internasional Indonesia jang kuat dirintis oleh P.J.M. Presiden.

b. mengambil peladjaran dari pengalaman jang kurang baik dan kekurangan2 kita untuk disempurnakan dalam bidang2 pembangunan, ekonomi-keuangan, dan disiplin nasional.

c. mengobarkan semangat PERDJOANGAN, djiwa AMANAT PENDERITAAN RAKJAT dan memperkokoh PERSATUAN NASIONAL. Untuk ini kita harus meresapkan doktrin2 Revolusi: Manipol/Usdek, Djarek, Resopim dan Pantjasila.

d. KEWASPADAAN NASIONAL terhadap musuh2 Revolusi, jaitu neo-imperialisme dan neo-kolonialisme harus kita pertinggi dan perhebat.

e. Retooling disegala bidang harus kita teruskan dengan konsekwen.

Saudara2 sekalian,

Sekianlah sambutan saja pada penutupan tahun 1961.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkati perdjoangan Bangsa kita dalam Tahun 1962. Terima Kasih.

Sekali Merdeka, Tetap Merdeka!

Menteri Penerangan R.I.
MALADI.

TRI-KOMANDO BERDJALAN TERUS *)

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarakatuh!

Saudara-saudara, malam ini kita mengadakan peringatan Nuzulul Qur'an, nuzulnja Qur'an digedung Negara buat kesekian kalinja.

Saudara-saudara semuanja tentu telah mengetahui, bahwa seperti diuraikan oleh Bapak Zainul Arifin, Bapak Djenderal Nasution, Bapak Muljadi Djojomartono, bahwa Qur'an dinuzulkan dalam bulan Paasa — bulan sekarang ini — sehingga bulan Ramadhan, bulan Puasa, mendjadi suatu bulan jang amat, amat, amat penting dan keramat bagi seluruh ummat Islam dipermukaan bumi.

Djikalau saja sekarang hendak memberi amanat kepada Saudara-saudara sekalian, jaitu kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, dalam bulan jang sekarang ini, bulan Ramadhan, maka saja ingat kepada apa jang terdjadi dalam bulan Ramadhan tahun 1947, pada waktu kita di Jogjakarta. Pada waktu itu, didalam bulan Ramadhan, telah sampai tanda2 kepada kami, bahwa pihak Belanda akan mengadakan aksi militer terhadap kepada Republik Indonesia. Pada waktu itu bertachta digedung ini, digedung Istana Negara namanja sekarang, dan Istana Merdeka namanja sekarang, pihak Belanda dipimpin oleh van Mook.

Tatkala saja didalam bulan Djuni 1947 itu mendapat bukti2 jang njata, bahwa pihak Belanda hendak mengadakan aksi militer terhadap kepada Republik Indonesia, — dan ini adalah rahasia jang sekarang saja buka —, saja kirim tilgram kepada van Mook. Ja, van Mook jang sekarang dinegeri Belanda dipanggil oleh Belanda dari Amerika; sekarang ia berada dinegeri Belanda, boleh men-check utjapan saja sekarang ini. Saja kirim tilgram dari Jogjakarta kepada van Mook, memperingatkan van Mook. „Van Mook", saja berkata, „ingat, ini adalah bulan sutji. Ini adalah bulan Puasa, ini adalah bulan Ramadhan. Saja mendapat bukti jang njata, bahwa pihak Belanda hendak mengadakan aksi militer terhadap kepada Republik Indo-

*) Amanat Presiden Soekarno, pada Hari Peringatan Nuzulul Qur'an tgl. 21-2-1962 di Istana Negara

nesia. Saja peringatkan, bahwa djikalau pihak Belanda mengadakan aksi militer terhadap kepada Republik Indonesia jang ummatnja buat sebagian besar adalah beragama Islam, pihak Belanda akan kalah, hantjur-lebur".

Saja katakan dalam tilgram itu, Saudara2, bahwa mengadakan sesuatu tindakan militer terhadap kepada Republik Indonesia dalam satu bulan jang sutji akan melukai hati ummat Islam Indonesia sampai kedalam tulang2 dan sungsum2 dan saja peringatkan bahwa agama Islam sebagai tadi dikatakan oleh Pak Muljadi Djojomartono, mensutjikan peperangan, mensutjikan perlawanan, djikalau diserang, djikalau dirampas kemerdekaannja. Nah Saudara, peringatan saja ini rupanja tidak diindahkan oleh van Mook. Tidak diindahkan oleh pihak Belanda. Pada tanggal 21 Djuli '47 Belanda mengadakan aksi militer pertama kepada Republik Indosesia. Sedjarah dunia telah melihat buktinja. Meskipun kemudian ia mengadakan aksi militer lagi pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap kepada Republik Indonesia, meskipun dus kedua kali menghudjani Republik Indonesia dan Ummat Islam dari Republik Indonesia ini dengan api jang tiada berhenti-hentinja, achirnja Saudara2, Belanda tekuk lutut, imperialisme Belanda gugur dari pada tachtanja, dan Repubik Indonesia berdiri tegak kembali, sebagai jang disumpahkan oleh rakjat Indonesia: „Sekali merdeka tetap merdeka".

Sekarang Saudara2, kita mengalami lagi saat2 jang penting didalam sedjarah kita. Saudara mengerti bahwa jang saja hendak bitjarakan ini ialah persoalan Irian Barat, persoalan antara Republik Indonesia dan negeri Belanda. Ada satu hal jang selalu salah tangkap dipihak luar negeri, pertama-tama mereka itu mengatakan bahwa persoalan Irian Barat atau claim Indonesia atas Irian Barat tak lain dan tak bukan ialah digembar-gemborkan oleh Presiden Sukarno sadja. Tetapi berulang-ulang sudah saja katakan dan berulang-ulang sudah ada bukti jang njata bahwa claim memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia bukanlah sekadar suatu claim jang diutjapkan atau digemborkan oleh Presiden Sukarno sadja, tetapi adalah kehendak dari seluruh rakjat Indonesia.

Nabi Muhammad S.A.W., Saudara2, didjadikan rasul oleh Allah Subhanahuwata'ala, malahan bukan sekadar didjadikan rasul, beliaupun diberi mu'djizat-

mu'djizat oleh Allah S.W.T. Nabi Muhammad S.A.W. sekadar adalah utusan, „sadrema" kata orang Djawa, mendjalankan, mengemban apa jang dititahkan oleh Allah S.W.T. kepadanja. Sebenarnja bukan kehendak Nabi sendiri sebagai manusia an sich bahwa dia menggerakkan seluruh ummat, jang kemudian dinamakan ummat Islam, menggerakkan didalam lapangan pengorbanan, menggerakkan didalam pekerdjaan, menggerakkan dilapangan perdjoangan, tetapi tak lain dan tak bukan oleh karena Muhammad S.A.W. mendapat perintah, mendapat titah daripada Tuhan seru sekalian alam.

Demikian pula, Saudara2, djikalau dikatakan bahwa claim Irian Barat adalah sekadar Sukarno jang menggembar-gemborkan, sekadar Sukarno jang membakar2 hati rakjat Indonesia, saja sudah selalu berkata:

„Saja ini bukan apa2, saja sekadar penjambung lidah daripada rakjat Indonesia". Apa jang saja katakan sebenarnja adalah telah terkandung dalam kalbunja rakjat Indonesia.

Manakala Nabi Muhammad S.A.W. mendapat wahju daripada Allah S.W.T., mendapat perintah dari Allah S.W.T., saja sekadar mendjadi penjambung lidah daripada rasa hati rakjat Indonesia itu. Saja sekadar menjampaikan kedunia luar apa jang dikehendaki oleh rakjat Indonesia, oleh seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jang tua, jang muda, jang kaja jang miskin, jang laki, jang perempuan, jaitu supaja Irian Barat lekas dikembalikan kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Bukan saja an sich sebagai Sukarno mengadakan tuntutan agar I. B. dimasukkan kedalam wilajah kekuasaan Republik kembali. Tidak! Saja „ngemban dawuh" daripada rakjat Indonesia. Sjukur Alhamdulillah, saja ini barangkali bisa merasakan segala perasaan2 daripada rakjat Indonesia lebih daripada orang lain. Mungkin itu, tetapi saja merasa sjukur Saudara2, bahwa saja diberi oleh rakjat Indonesia satu tugas menjampaikan rasa hatinja kepada dunia luar, menjambung lidahnja kepada dunia luar.

Claim Irian Barat bukanlah claimnja Sukarno. Claim Irian Barat adalah claim rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Claim Irian Barat adalah claim sedjarah, claim anti imperialisme.

Dan oleh karena claim ini adalah claim sedjarah, maka saja berkata: „Siapa jang bisa mero-

bah djalannja matahari dan bulan, dia akan bisa menolak Irian Barat masuk kedalam Republik kembali".

Nah Saudara2, didalam mendjalankan claim ini, agar supaja claim ini bisa terkabul, ternjata mendjadi satu fakta, mendjadi satu fact. — Saudara2 telah mengenal sedjarahnja —, kita mengadakan revolusi bersendjata dari tahun '45 sampai tahun '50. Kita mengadakan diplomasi habis2an; kita kemudian oleh karena diplomasi habis2an ini tidak dapat membawa hasil, kita lantas mengadakan politik jang dinamakan politik konfrontasi, jang Saudara2 semuanja telah mengetahui. Konfrontasi diatas lapangan politik, diatas lapangan ekonomi, diatas lapangan militer.

Nah, kita pada saat sekarang ini Saudara2, sampai kepada titik mengadakan konfrontasi total terhadap kepada tenaga2 imperialis Belanda.

Luns, onze beste goede vriend Luns, Saudara2, tidak pernah membuat kebohongan jang segedé gadjah seperti tatkala ia berkata beberapa waktu jang lalu ini, bahwa „jah, kami pihak Belanda ini selalu menghendaki perundingan": kami fihak Belanda jang selalu menghendaki perundingan, padahal kenjataannja ialah bahwa pihak Indonesia jang selalu mengadjak berunding, selalu mengadjak berunding. Tetapi oleh karena perundingan2 malah ditolak, Saudara2, kami achirnja mendjalankan politik konfrontasi. Djuga sampai saat sekarang ini saja katakan kepada seluruh dunia luar bahwa kita lebih senang memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik tanpa pertumpahan darah daripada menumpahkan darah.

Saja minta ditjatat oleh wartawan2 asing jang duduk disitu: Kami fihak Indonesia hendak dan senang sekali mengadakan perundingan dengan fihak Belanda memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik dengan djalan damai. Tetapi, nah tetapi perundingan itu harus ada dasarnja. Sebagai tempo hari sudah saja katakan bukan perundingan sebagai "ins Blaue hinein" bukan perundingan tanpa dasar tetapi perundingan jang dengan njata merundingkan tjara2 bagaimana fihak Belanda itu menjerahkan administration, jaitu kekuasaan dari fihak Belanda kepada Republik Indonesia atas Irian Barat.

Dan saja ulangi buat keseratuskalinja, hai tjatat wartawan2: Kita bersedia berunding bahkan mengadjak Belanda berunding atas dasar itu. Djangan dikata-

kan bahwa kita tidak mau berunding. Tidak! Saja masih menghendaki agar perundingan itu lekas didjalankan oleh fihak Belanda dengan kita atas dasar penjerahan kekuasaan Irian Barat dari fihak Belanda kepada kita.

Saudara-saudara, ada fihak jang berkata: mbok ja perundingan itu tanpa sjarat lebih dahulu. Saudara-saudara mengerti bahwa djikalau kita berkata „kita mau berunding dan mengadjak berunding atas dasar menjerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada Indonesia", bahwa itu adalah satu sjarat. Memang, kita menghendaki perundingan dengan sjarat. Sjarat apa? Sjarat bahwa perundingan itu membitjarakan tjara penjerahan pemerintahan atas Irian Barat dari tangan fihak Belanda kepada Indonesia.

Ada jang mengatakan : é, lha ja mbok sudah, zonder sjarat, berunding ja sudah, berunding thok, berundinglah - berundinglah, berundinglah, tanpa sjarat. Nanti kalau sudah berunding, sudah duduk dimedja hidjau, „en mekaar toelachen", senjum satu sama lain, ha, nanti kan beres, katanja.

Kita tidak mau! Tegas kita tidak mau berunding tanpa sjarat; tidak mau berunding „ins Blaue hinein"!

Ada jang berkata, sudah, begini sadja, djangan memakai sjarat, nanti masukkan dalam agenda, katanja. Adakan perundingan dengan fihak Belanda tanpa sjarat, tetapi diagenda ditulislah bagai mana hal penjerahan kekuasaan atas Irian Barat dari tangan Belanda ke Republik Indonesia.

Saudara pikirkan sebentar : dus, ada perbedaan antara perundingan atas dasar penjerahan kekuasaan kepada Republik Indonesia dari tangan Belanda dengan perundingan tanpa sjarat tetapi diagendanja ditulis hal penjerahan pemerintahan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Djuga didalam hal ini kami berkata dengan tegas, — minta ditjatat oleh wartawan-wartawan: kami tidak mau berunding dengan tjara demikian itu ! Kami mau berunding atas dasar menjerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Republik. Tidak mau berunding kalau sekadar masuk dalam agenda! Ja, masuk agenda. Saja bisa berunding dengan Pak Muljadi Djojomartono. Hajo Pak Muljadi kita berunding bagaimana kita berdua bisa naik kapsul mendarat dibulan. Ja, bisa sadja kita masukkan didalam agenda. Mari kita berunding. Pak Muljadi dengan

saja membitjarakan bagaimana kita bisa mendarat dibulan bersama-sama. Pak Muljadi bergandeng-gandengan dengan Sukarno. Ha, barangkali kita lantas berunding berpuluh-puluh tahun, Saudara-saudara dengan Pak Muljadi ini sebelum kita bisa mendarat dibulan bersama-sama.

Maka oleh karena itu saja berkata dengan tegas tidak, tidak! Djikalau kita berunding dan itu kita kehendaki, harus satu perundingan jang dengan persepektif, harus satu perundingan jang bisa membawa hasil, harus perundingan jang njata merundingkan tjara bagaimana menjerahkan pemerintahan atas Irian Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia. Hanja jang demikian itu kita terima.

Sementara itu Saudara-saudara, saja sudah memberi perintah kepada rakjat Indonesia pada tgl. 19 Desember 1961 jang terkenal sebagai Komando Rakjat. Dan saja berkata dengan tegas kepada dunia luar dan kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tri-Komando berdjalan terus, tetap terus, terus, terus, terus, tidak ada satu menit setop.

Djangan orang kata: oo, Tri-Komanlo itu akan direm akan diberhentikan. Tidak, tidak, Tri-Komando berdjalan terus, Saudara-saudara.

Nah, kalau itu berarti, dus sekarang hendak mengadakan pertempuran, tidak berarti demikian.

Malahan tepat apa jang dikatakan oleh Saudara Achmadi, Menteri Transkopemada. Tatkala Saudara Achmadi ikut dengan saja ke Sulawesi Selatan didalam pidatonja di Pare-Pare beliau berkata: „Kasihan Presiden Sukarno ini. Presiden Sukarno selalu dituduh oleh dunia luar bahwa beliau adalah satu penghasut perang. Pres. Sukarna dikatakan dialah jang membakar hal Irian Barat, dialah jang menghasut rakjat Indonesia, dialah jang mendjadi „war-monger", penghasut perang. Tetapi kenjataannja apa? Apa kata Saudara Achmadi didalam pidatonja di Pare-Pare itu? Beliau berkata bahwa „Presiden Sukarno itu malahan selalu mengerem. Kalau umpamanja tidak direm oleh Presiden Sukarno, barangkali rakjat sudah menjerbu ke Irian Barat. Tetapi Pres. Sukarno masih selalu mengerem, menahan, menahan, menahan, karena Pres. Sukarno lebih suka I.B. itu masuk kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik dengan perundingan, dengan djalan damai.

Dan memang keadaannja adalah demikian. Saja ulangi apa jg. saja katakan tadi itu: saja menghendaki, lebih menghendaki, lebih senang Irian Barat itu bisa dikembalikan kepada kita dengan tjara perundingan, tetapi perundingan dengan dasar jang njata, jaitu menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Saudara-saudara, ada lagi jang berkata: Presiden Sukarno ini maunja tjuma mau menghina sadja. Ja, pihak Belanda ada jang berkata demikian. Maka Presiden Sukarno sekarang ini petentang-petenteng hendak memaksa Belanda untuk menjerahkan Irian Barat kepada kekuasaan Republik, sebenarnja" het is hem te doen alleen om ons te vernederen".

Artinja, Presiden Sukarno itu maksudnja sekadar untuk menghina, menistakan Belanda, merendahkan Belanda, „vernederen" Belanda, bahasa Inggerisnja „humiliate" Belanda.

Ini dituduhkan kepada saja. Bahwa maksud saja tak lain dan tak bukan ialah sekadar hendak meng-„humiliate" Belanda, „vernederen" Belanda.

Tidak! Hai, wartawan-wartawan luar negeri, tjatatlah. Saja tidak mau „humiliate" Belanda „I am not going to humiliate the Dutch. Tidak, tidak! Sama sekali tidak! Saja sekadar menjampaikan isi hati rakjat, jaitu supaja Irian Barat lekas masuk kedalam kekuasaan Republik, malahan isi hati rakjat itu berkata: supaja wilajah Irian Barat itu masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik dalam tahun 1962 ini djuga. Itu saja sampaikan.

Nah, saja sebagai pemikul, pengemban Amanat Penderitaan Rakjat, pemikul pengemban daripada rasa hati rakjat, saja berkata: ja, saja menghendaki atas nama rakjat Indonesia, agar supaja Irian Barat dikembalikan ke pada kita dalam tahun ini djuga, tahun 1962.

Tetapi tidak untuk humiliate Belanda, boleh Saudara2 tjatat. Sajalah jang berkata di Pare2, djikalau Belanda manjerahkan Irian Barat dengan tjara baik2 kepada kita, sajalah manusia Indonesia jang pertama jang akan berkata kepada pihak Belanda: „Ik dank U wel, mijnheer". Saja banjak terima kasih.

Malahan pernah saja djandjikan, insja Allah Subhanahu wata'ala, kepada pihak Belanda, djikalau Irian Barat diserahkan kepada Indonesia kembali dengan tjara jang baik2, I shall be the first to visit Holland. Saja akan

datang kenegeri Belanda sebagai kawan dan saja akan mengutjap atas nama rakjat Indonesia: „I thank you, Sir". Dan saja akan berdjabat tangan dengan rakjat Belanda dinegeri Belanda itu.

Djikalau tuduhan terhadap saja katanja saja mau humiliate Belanda, saja mau vernederen Belanda, saja mau menghina Belanda, saja mau menistakan Belanda, itu adalah satu omong kosong jang segede gadjah. Lebih besar daripada gadjah.

Tidak, saja ini tjuma hendak menjatakan the trend of history, djalannja sedjarah. Dan djalannja sedjarah inilah jang saja hendak, saja ingin sekali dimengerti oleh pihak Belanda, dimengerti oleh semua negara2 jang lain, dan terutama sekali sudah barang tentu dimengerti oleh rakjat Indonesia sendiri. Saja menghendaki, the trend of history ini dimengerti oleh Negara Persatuan Arab, dimengerti oleh Iran, dimengerti oleh Djepang, dimengerti oleh Belanda, dimengerti oleh Australia, dimengerti oleh Inggeris, dimengerti oleh Amerika, dimengerti oleh Kanada, dimengerti oleh seluruh dunia, bahwa the trend of history, djalannja sedjarah ialah lenjapnja kolonialisme dari seluruh muka bumi. Tidak boleh tidak satu waktu akan datang jang kolonialisme akan hilang dari permukaan bumi ini. Tidak boleh tidak, satu waktu akan datang jang Irian Barat kembali kepada wilajah kekuasaan Republik.

Dan itu adalah bukan satu humiliation, djikalau Belanda mengerti akan trend of history ini. Malahan saja djuga dengan tegas berkata, maksud kami pihak Indonesia, agar supaja persoalan Irian Barat ini lekas selesai jaitu, I.B. lekas diserahkan kepada wilajah kekuasaan R.I. kembali dengan tjara baik. Bukan untuk balas dendam. Tidak! Meskipun tiap2 orang mengetahui bahwa kita menderita 350 tahun daripada imperialisme Belanda di Indonesia ini, tetapi sudah, kami akan melupakan. Meskipun ada pepatah Belanda sendiri, ada pepatah Belanda, bunjinja begini: De herinnering aan geleden onrecht duurt lang, gedaan onrecht wordt spoedig vergeten". Artinja, ingatan kita kepada satu kezaliman jang pernah dilakukan orang kepada kita, dan kita jang menderita, ingatan itu lama sekali. De herinnering aan geleden onrecht duurt lang, gedaan onrecht wordt spoedig vergeten, tetapi satu kezaliman jang didjalankan, artinja umpamanja kita mendjalankan kezaliman kesitu, kita lekas melupakan kezaliman itu. Geleden onrecht, de

herinnering ervan duurt lang, gedaan onrecht wordt spoedig vergeten.

Tetapi saja berkata lagi, sudah, sudah, sudah. Jang 350 tahun jang lalu itu sudah kami lupakan. Malahan kami ingin normalise the relations between the Netherlands and Indonesia, ingin menormalisir kembali hubungan antara negeri Belanda dengan Indonesia. Normalisir artinja, ja seperti hubungan kami dengan negar2 jang lain2. Bukan normalisir kembali itu berarti bahwa kita mau didjadjah kembali oleh pihak Belanda kepada kita. Tidak! Sama sekali tidak! Tetapi sekadar hubungan supaja hubungan negeri Belanda dengan kita itu normal, seperti hubungan Indonesia dengan negara2 jang lain. Djangan hubungan jang berdasarkan atas exploitation de l'homme par l'homme, exploitation de nation par nation. — exploitation de nation par nation.

Ini jang kita kehendaki. Djadi djanganlah dikatakan bahwa pihak Indonesia itu adalah satu pihak war monger, bahwa pihak Indonesia itu ingin memasukkan Irian Barat itu dalam wilajah kekuasaan Republik hanja dengan kekuasaan sendjata sadja. Tidak!

Tetapi, ja, kalau kita dikatakan bahwa kita tidak boleh memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan kita dengan djalan lain2, itupun salah. Tempo hari pernah saja berpidato disini, menolak tuduhan bahwa kita mendjalankan breach of faith. Sebab dulu pernah kita berkata, ja memang kita ingin sekali memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik dengan djalan damai, dengan djalan perundingan. Itu memang pernah kita utjapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa dus sampai lebur kiamat kita harus ja, berunding, berunding, berunding, berunding, damai, damai, damai, damai, berunding, berunding, berunding, damai, damai, damai, dan Irian Barat tidak masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik. Tidak. Djikalau kita mendjalankan Trikomando Rakjat, djikalau pada sesuatu saat dengan djalan jang tidak dengan perundinfan, jang tidak dengan tjara talks negotiations, tidak dmeidja bundar, I. B. oleh rakjat Indonesia dimasukkan kedalam wilajah kekua saan Republik, dengan djalan lain daripada negotiations, djanganlah berkata, bahwa itu adalah satu „breath of faith". Saja berkata, kami sudah ber-puluh2 tahun sabar. Sedjak tahun 1945 kita sabar, tahun 1950 lebih lagi kita sabar, sabar, sabar, oleh karena kami pertjaja bahwa dida-

lam satu tahun, dalam tahun 1950 itu Irian Barat akan dikembalikan kepada wilajah kekuasaan Republik. Tapi tidak berhasil, sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi, malahan kami mengadjak berunding, mengadjak berunding, Belanda malahan tidak mau berunding.

Achirnja, Saudara-saudara, pada tahun 1957 kita mendjalankan politik konfrontasi. Dan politik konfrontasi ini memuntjak, memuntjak, memuntjak, memuntjak, dan saat sekarang Saudara2, kita mengalami saat2 jang historis.

Saja minta ditjatat oleh wartawan2, ini adalah bulan sutji, bulan Puasa, ini adalah bulan sutji Ramadhan, bulan jang dikeramatkan oleh 90% daripada rakjat Indonesia. Rakjat Indonesia 96 djuta banjaknja, 90% daripada 96 djuta ialah 83 djuta, — dikeramatkan, disutjikan oleh 83 djuta rakjat Indonesia. Ingat peringatan saja kepada van Mook dalam tahun 1947, saja mengharap benar didalam bulan sutji ini, tinggal 12 á 13 hari lagi, saja mengharap benar didalam bulan sutji Ramadhan ini, didalam bulan keramat Ramadhan ini, didalam bulan keramat Puasa ini, saja mengharap benar mendapat pernjataan dari Den Haag, bahwa pihak Belanda bersedia mengadakan perundingan dengan kita atas dasar memasukkan Irian Barat kembali kepada wilajah kekuasaan Republik. „I am waiting for that statement". Saja menghendaki benar, agar supaja didalam bulan sutji ini ada satu kabar baik. Saja katakan kabar baik dari negeri Belanda, dari Den Haag: ja, kami pihak Belanda bersedia berunding dengan Republik Indonesia atas dasar penjerahan Irian Barat kembali kedalam wilajah kekuasaannja, kepada Republik Indonesia.

Djikalau didalam bulan Ramadhan ini ada pernjataan jang demikian itu, sajalah manusia jang pertama jang akan berkata: Alhamdulillah „God zij dank". Dan kita akan mengadakan perundingan itu, perundingan atas dasar penjerahan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik. Dan kami akan mendjalankan goodwill se-banjak2nja didalam perundingan2 itu, goodwill jang sepenuh2nja. Tetapi pihak Belanda pun djangan mengulur-ulur. Sebab kamipun telah bersumpah kepada diri kita sendiri, Sukarno bersumpah kepada Sukarno, Pak Muljadi bersumpah kepada Pak Muljadi, Subandrio bersumpah kepada Subandrio, Leimena bersumpah kepada Leimena, Chaerul Saleh bersumpah kepada Chaerul Saleh, atas nama Tuhan Jang

Maha Esa, Nasution bersumpah kepada Nasution, Djuanda bersumpah kepada Djuanda, Yamin bersumpah kepada Yamin, Ipik Gandamana bersumpah kepada Ipik Gandamana, Notohamiprodjo bersumpah kepada Notohamiprodjo Sadjarwo bersumpah kepada Sadjarwo, seluruh rakjat Indonesia sudah bersumpah kepada dirinja sendiri disaksikan oleh Tuhan Jang Maha Esa, memohon kepada Allah S. W.T., agar supaja Irian Barat dalam tahun 1962 ini masuk kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik. Kami akan mendjalankan goodwill jang se-luas2nja, tetapi pihak Belandapun djangan mengulur-ulur waktu.

Mari kita berunding, berunding selekas mungkin. Kalau bisa pernjataan didalam bulan Puasa ini, oleh karena bulan Puasa ini adalah bulan keramat bagi 90% rakjat Indonesia. Pernjataan dari Den Haag, bahwa Den Haag bersedia berunding dengan kami, dengan pihak Republik atas dasar penjerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat kepada kami Republik Indonesia. Dan agar supaja sebagai hasil dari perundingan itu dengan selekas-lekasnja tertjapailah apa jang telah disumpahkan oleh rakjat Indonesia kepada dirinja sendiri itu, jaitu dalam tahun ini Irian Barat masuk kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik.

Saja memberi peringatan: bulan Puasa, bulan sutji, sebagai jang sudah saja katakan kepada van Mook. Djangan main api didalam bulan Puasa. Demikian pula, Saudara2, pada waktu jang sekarang ini kita berada kembali didalam bulan Puasa, bulan jang kita benar2 harus menjatukan batin kita terhadap kepada Allah S.W.T. Bulan jang segenap kita punja kehendak jang kita mohonkan kepada Allah S. W.T., harus kita konsentrirkan sedalam-dalamnja. Bulan jang harus kita tjamkan didalamnja, bahwa perdjuangan memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik adalah satu perdjuangan jang sutji. Bulan jang kita harus menjakinkan dan jakin pula, bahwa meskipun peperangan tetapi peperangan atas dasar kita diperangi. Peperangan atas dasar sebahagian wilajah kita diduduki dgn. kekuatan sendjata. Peperangan jang demikian itu adalah satu peperangan jang sutji, jang malahan tadi dikatakan oleh Pak Muljadi Djojomartono, tiap2 orang jang gugur didalam peperangan demikian itu, satu peperangan jang sutji. adalah sjahid, satu peperangan dari pada sjuhada-sjuhada.

Didalam bulan jang demikian ini saja minta agar supaja pihak Belanda sadarlah kembali, sadarlah kembali, sadarah kembali, sebab bangsa Indonesia sekarang ini sudah sampai kepada tekad, tekad sebagai jang dikatakan oleh orang Amerika jang bersedjarah, Patrick Henry. Patrick Henry didalam revolusi Amerika melepaskan diri daripada imperialisme Inggeris telah berkata: „Give me liberty or give me death", berilah kepada kami kemerdekaan atau beri kepada kami mati, artinja merdeka atau mati.

Dan ketahuilah, hai luar negeri, bahwa pada saat sekarang ini, didalam bulan Ramadhan sekarang ini, se:bagian besar daripada rakjat Indonesia telah hidup didalam suasana dan tekad dan semangat jang demikian itu. „Gipe us liberty or give us death", merdeka atau mati. Sebagian besar daripada rakjat Indonesia sekarang ini bersemangat jang demikian itu, bukan oleh karena Sukarno, bukan oleh karena hasutan Nasution, bukan oleh karena hasutan Subandrio, bukan oleh karena hasutan Kolonel Umar Wirahadikusumah, bukan oleh karena hasutan Djuanda, bukan oleh karena hasutan daripada Pak Muljadi Djojomartono. Bukan, tetapi ialah timbul daripada semangat ketjintaan kepada kemerdekaan kita sendiri, bahwa kita didalam bulan seperti sekarang ini benar2 siap-sedia untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik dengan djalan apapun djuga jang halal.

Nah, Saudara2, tadi sore saja membatja dengan persetudjuan jang penuh utjapan daripada Dr Roeslan Abdulgani terhadap kepada pemuda2, jaitu utjapan bahwa perdjuangan Irian Barat ini adalah satu perdjuangan jang berisi pertaruhan, jang berisi "risk". "Yes, this battle is a battle of risk". Saja akui dan saja benarkan utjapan daripada Pak Roeslan Abdulgani, bahwa kita dilahirkan didalam risk, dilahirkan didalam pertaruhan. Saja benarkan utjapan dari Pak Roeslan Abdulgani, bahwa kita dibesarkan didalam pertaruhan. „We were born in risk and we became mature in risk". Memang, tidak ada satu bangsa bisa mendjadi satu bangsa jang besar tanpa risk. Bangsa Amerika mendjadi besar karena berani memikul risk, bangsa Sovjet Uni bisa mendjadi besar oleh karena berani memikul risk. Dulu Madjapahit dilahirkan oleh karena apa? Oleh karena rakjat Indonesia pada waktu itu dibawah pimpinan Widjaja berani mengambil risk. Ke-

radjaan Mataram bisa berdiri dan kemudian mendjadi agung dibawah pimpinan Sultan Agung Hanjokrokusumo oleh karena apa? Oleh karena Panembahan Senopati berani mengambil risk dan mengadjak seluruh rakjatnja untuk mengambil risk.

Republik Indonesia lahir didalam risk. 17 Agustus 1945 adalah satu Proklamasi didalam risk, didalam pertaruhan, tatkala segenap tenaga imperialisme sebenarnja masih siap sedia untuk meng hudjankan api diatas tubuh kita, menghudjankan api diatas seluruh tubuhnja rakjat Indonesia jang pada waktu itu 72 djuta. Toch kita pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mengadakan Proklamasi Republik Indonesia jang sampai sekarang kita anggap sebagai keramat dan bahkan Insja Allah S.W.T. sampai achir djaman kita akan anggap satu Proklamasi jang keramat pula. Memang tidak satu bangsa bisa mendjadi besar, djikalau bangsa itu tidak bisa dan tidak berani mengambil risk. Proklamasi risk.

Sekarang perdjuangan memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia adalah perdjuangan risk.

Sebagai tadi saja katakan, Amerika mendjadi besar karena risk, Sovjet Uni mendjadi besar karena risk, India mendjadi besar karena risk, Mesir mendjadi besar karena risk, tidak ada satu bangsa didunia ini bisa mendjadi besar tanpa risk.

Maka oleh karena itu, hai rakjat Indonesia seluruhnja dari Sabang sampai ke Merauke, mari kita hadapi risk ini.

Dalam pada itu, Saudara2, tetap kami mendo'a kepada Allah S.W.T., agar supaja pihak Belanda sedapat mungkin didalam bulan Ramadhan, bulan sutji sekarang ini mengadakan satu pernjataan: Ja, mau berunding dengan Republik Indonesia atas dasar penjerahan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Sekianlah, Saudara2, sambutan saja. Tak lupa saja menutup sambutan saja ini dengan memandjatkan do'a kehadlirat Allah S.W.T. agar supaja Allah memberi berkat-rahmat kepada seluruh bangsa Indonesia, memberi berkat-rahmat kepada perdjuangan rakjat Indonesia ini, memberi berkat-rahmat kepada perdjuangan rakjat Indonesia jang hebat-hebatan disegala bidang untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan negaranja.

Sekian, terima kasih.

PELANTIKAN TEAM GERAK TJEPAT PENERANGAN IRIAN BARAT.

Departemen Penerangan dengan Djawatan²nja tidak pernah berhenti memberikan penerangan mengenai Irian Barat, Usaha² penerangan itu berdjalan terus tingkatan demi tingkatan sesuai dengan irama dan suasana perdjuangan jang sedang dilakukan oleh Pemerintah chususnja dan bangsa Indonesia umumnja.

Dengan dikeluarkannja Komando Rakjat oleh Presidan/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat tanggal 19 Des. 1961, maka Penerangan Irian Barat ditingkatkan pula dengan pembentukan Komando Penerangan Irian Barat jang langsung dipimpin oleh Menteri Penerangan sendiri. Untuk melaksanakan tugas Komando ini telah dibentuk dua regu Kesatuan Gerak Tjepat Penerangan masing²nja terdiri dari 12 orang, jang diambil dari Deppen dan Djawatan R.R.I., meliputi para Djurupenerang, Djuru-kamera, Djurupotret, Penjair dan reporter.

Ke 24 orang ini telah mendapat kehormatan lebih dahulu untuk dilantik dan masuk Training Centre, jang diresmikan pembukaannja pada tanggal 25 Djanuari 1962.

Tugas Komando Penerangan Irian Barat

Didalam pidato pelantikannja, Komandan Pelaksana Komando Penerangan Irian Barat, Sadono Dibjowirojo, menerangkan tentang tugas Komando ini, antara lain beliau berkata sbb:

„Kami mengutjapkan sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa bahwa pada hari ini hari Kemis Legi tgl. 25 Djanuari 1962, kami dapat menambah usaha2 kami daam bidang penerangan mengenai pembebasan Irian Barat.

Departemen Penerangan dengan Djawatan2nja tidak pernah berhenti memberikan penerangan sedjak Irian Barat mendjadi sengketa antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan tingkat2 jang kita hadapi.

Pada tgl. 14 September 1961, Pimpinan Departemen Penerangan telah dapat merasai, bahwa perdjuangan merebut kekuasaan atas Irian Barat akan semakin gawat dan oleh karenanja pada Konperensi Departemen Penera-

ngan dan R.R.I. seluruh Indonesia jang diadakan pada tgl. 11 s/d 14 Des. 1961, antara lain telah disusun program penerangan Irian Barat jang lengkap dengan Irian Barat jang lengkap dengan pembentukan Staf Chusus Panitya Irian Barat.

Dan setelah dikeluarkan Komando Rakjat oleh P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Panlima Besar Pembebasan Irian Barat pada tgl. 19 Desember 1961, maka Penerangan Irian Barat ditingkatkan sesuai dengan djiwa Komando Rakjat itu dan amanat P.J.M. Presiden.

Dibentuklah di Departemen Penerangan, Komando Penerangan Irian Barat dengan S.K. Menpen No. 1/1962, dimana Sdr. Mempen sendiri mendjadi Komandan. Tugas Komando Penerangan Irian Barat didalam surat keputusan tersebut ditegaskan sebagai berikut:

— Mengobarkan tekad dan keberanian seluruh Rakjat diwilajah Irian Barat supaja bergerak untuk menggelorakan pengibaran Sang Merah Putih didaerah Irian Barat sampai ditiap djengkal tanah dipelosok-pelosok desa dan menegakkan terus berkibarnja Sang Merah Putih terhadap siapapun jang hendak menurunkannja dengan segenap djiwa raga.
— Menggerakkan seluruh Rakjat didaratan Irian Barat untuk melaksanakan segala Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan hanja mengakui U.U.D. 1945 sebagai satu-satunja Undang-undang Dasar jang sjah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas antaranja dibentuk satu Komando jang bertugas menjiapkan tenaga2, regu2 Penerangan Irian Barat. Sebelum berangkat kemedan tugas mereka, saudara2 itu lebih dahulu dilatih didalam Trainng Centre. Pada hari ini latihan itu dapat kita mulai dengan 2 regu Penerangan.

Dengan sekadar kata pendahuluan ini, maka pada hati ini kami resmikan pembukaan: Training Centre Regu Penerangan Irian Barat dan kami lantik.

Kepada saudara2 jang telah dengan kesadaran menggabungkan diri dalam regu2 ini, kami mengutjap banjak terima kasih.

Dengan tekad dan kebulatan Pemerintah, Irian Barat tahun ini harus kembali pada Republik Indonesia. Kita akan memberikan sumbangsih kita dengan semboján „Djer Basuki Mawa Beja".

Achirnja marilah kita mendoa kehadirat Tuhan Jang Maha Esa semoga kita sekalian selalu diberi taufik dan hidajat".

AMANAT MENPEN MALADI

Menteri Penerangan Maladi dalam amanatnja kepada Team Gerak Tjepat Penerangan ini, menerangkan, bahwa bahasa Revolusi jang kini kita gunakan untuk menjelesaikan sengketa kita gunakan untuk menjelesaikan sengketa kita dengan Belanda mengenai Irian Barat bukanlah bergantung kepada perundingan.

Perundingan andaikatapun itu diadakan harus berdasarkan dan sedjalan dengan bahasa Revolusi jang telah kita tjetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan jang tetap mendjadi pedoman kita dalam menjelesaikan Irian Barat sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh DPA dalam tahun 1960.

Menteri Penerangan mengemukakan beberapa tjontoh pengalaman dimasa silam seperti sesudah perundingan Linggardjati dan Renville, jang membuktikan bahwa Belanda senantiasa menggunakan kesempatan berunding itu untuk memperkuat dirinja sendiri agar dapat mempertahankan kedudukan kolonialnja.

Mengingat pengalaman2 tersebut, beliau berkata: „Kita bisa sadja berunding, bisa ber-senjum2
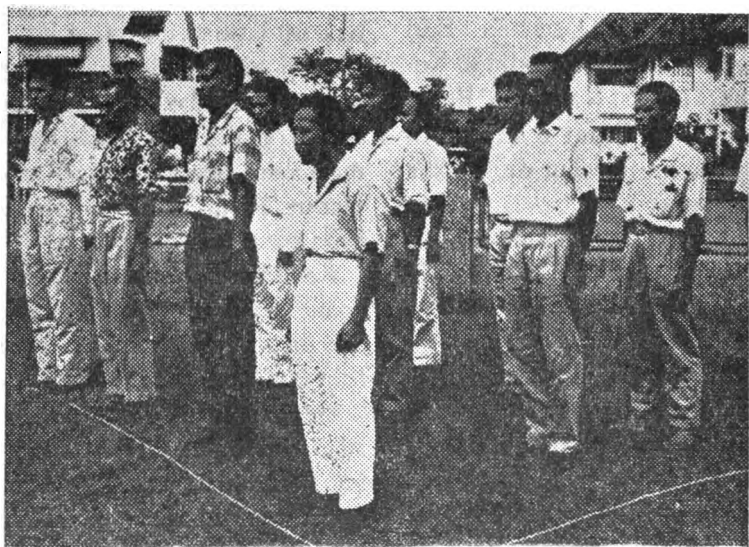
Team Gerak Tjepat Penerangan siap menudju medan bakti.

dengan mereka, tetapi harus hati2 terhadap mereka. Bahasa revolusi tidak mengharapkan bahwa perundingan itulah se-mata2 jang akan membawa hasil".

„Penugasan team2 tersebut tidaklah baru disiapkan sesudah Tri Komando Rakjat diutjapkan oleh Presiden tgl. 19 Desember jang lalu, tapi pola komando penerangan Irian Barat sudah dipersiapkan oleh Deppen semendjak adanja aksi Irian Barat tahun 1957. Garis persiapan2 itu sedjak semula sudah meliputi wilajah Irian Barat sendiri. Sedjak kita memperoleh ketegasan dari Tri Komando Rakjat, maka segala penerangan dikongkretisasikan guna pelaksanaan Tri Komando itu".

Selandjutnja Menteri Penerangan Maladi berseru kepada kesatuan2 penerangan agar supaja menjadari se-dalam2nja bahwa keberangkatan mereka itu keseluruhannja adalah pengabdian. Diserukan lagi agar mereka melenjapkan pikiran2 se-olah2 mereka akan mendjumpai kondisi2 jang sama di Irian Barat seperti jang dialami se-hari2 disini.

Dimaksudkan bahwa sesudah dilatih dan mendapat gemblengan ketenteraan, maka dalam waktu singkat kedua regu Team Gerak Tjepat Penerangan tersebut akan diserahkan seluruhnja kepada Panglima Mandala.

R A L A T

Didalam Mimbar Penerangan No. 12 (Desember 1961), halaman 1163, baris ke 8, terdapat kalimat : Sdr. Harjoto (Pembantu Utama Menteri Penerangan), seharusnja dibatja : Sdr. Harjoto, Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Penerangan.

Redaksi.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK PERSATUAN ARAB MARSEKAL ABDUL HAKIM AMER.

Sebagaimana kita maklum pada tgl. 16 Djanuari 1962 jang baru ini, kita telah menerima kundjungan kenegaraan Wakil Presiden/Panglima Besar Angkatan bersendjata Marsekal Abdul Hakim Amer. Tamu negara tsb. beserta rombongannja tinggal di Indonesia selama k.l. sepuluh hari dan telah mengadakan kundjungan ke berbagai daerah di Indonesia.

Guna lebih mengenal Tamu Agung tsb. beserta negaranja, madjalah ini diuraikan riwajat hidup beliau dan beberapa hal mengenai negara RPA.

Kundjungan kenegaraan dan persahabatan dari negara RPA ini, penting, guna mempererat persahabatan RPA dan Indonesia jang sudah berlangsung selama ini.

RIWAJAT HIDUP MARSEKAL ABDUL HAKIM AMER PANGLIMA BESAR ANGKATAN BERSENDJATA/WAKIL PRESIDEN R.P.A.

— Beliau dilahirkan pada tgl. 11 Des. 1919 didesa „Astal". Distrik Samalut propinsi „Elminya", Mesir.

— Pada tahun 1939 beliau telah menjelesaikan peladjaran pada Akademi Militer.

— Setelah itu, beliau ditugaskan memimpin pasukan infanteri jang pada waktu itu ditempatkan didekat kota Alexandrie.

— Pada bulan Djanuari 1940 beliau dipindahkan ke Sudan dan disanalah beliau bertemu dengan seorang perwira jaitu Gamal Abdel Nasser; sedjak itu pula telah berulang kali mereka itu bertemu dan bertukar pikir tentang nasib Negara dan bangsa. Kemudian terdjadi hubungan jang akrab sekali antara kedua beliau itu.

— Pada th. 1941 beliau dipindahkan ke Sekolah Pusat Latihan Perwira di „Mankabaad" selama satu setengah tahun. Selama satu setengah tahun itu berkenanlah beliau meneropong dan mengikuti dari djauh perkembangan2 keadaan dalam negeri (Mesir), dan untuk pertama kalinja beliau men dengar desas-desus tentang group2 dan kantong2 rahasia.

— Dari „Mankabaad", beliau dipindahkan ke Cairo kembali pada sekolah Administrasi Militer, disana beliau bertemu kembali dengan Gamal Abdel Nasser jang pada masa itu sedang bertugas memberi kuliah tetap di Akademi Militer (letak sekolah itu berdekatan). Pertemuan kembali antara kedua teman seperdjuangan dan senasib pada waktu itu telah mempererat dan memperkokoh hubungan jang akrab sekali.

— Pada th. 1948 beliau dengan semangat jang menjala-njala laksana api jang tak kundjung padam berkenan memenuhi panggilan sutji di Palestina, dan berkesempatanlah beliau merentjanakan dan memimpin langsung operasi militer jang dilantjarkan oleh pasukan Arab sektor Mesir terhadap distrik „Beit Slim" (jang diduduki oleh Israel), serangan mana berahir dengan dibebaskannja „Beit Slim" dari belenggu Israel.

— Tatkala revolusi Mesir meletus pada 23 Djuli 1952, maka pada tgl. 1 Maret 1953 beliau diangkat mendjadi Panglima Besar Angkatan Perang Mesir. Dan pada tgl. 22 April 1956 Marsekal Amer diangkat mendjadi Panglima Besar Gabungan Angkatan Perang (Mesir-Siria-Saudi Arabia dan Jaman).

Wakil Presiden Republik Persatuan Arab, Abdul Hakim Amer.

Pada tgl. 6 Maret 1959 Marsekal Amer diangkat mendjadi wakil Presiden Republik Persatuan Arab.

Dunia pertanian.

Menurut Statistik terachir, dan berdasarkan hasil penjelidikan jang seksama, maka ternjata lebih dari 60% dari djumlah penduduk Republik Persatuan Arab adalah petani2 dan orang2 jang berketjimpung dalam dunia pertanian. Djumlah export hasil2

pertanian jang diexport oleh R. P.A. mentjapai 90% dari djumlah export negara R.P.A. seluruhnja, sedangkan djumlah fabrik2 jang mengolah pertanian itu mentjapai 27% dari djumlah fabrik2 jang ada di R.P.A.

Dalam pada itu oleh pemerintah R.P.A. telah disiapkan suatu rentjana pertanian jang berdjangka pendek dan pandjang, rentjana mana sedang dilaksanakan dengan giatnja hal mana telah menjebabkan bertambahnja hasil produksi.

Bertambahnja hasil produksi sangat terasa dlm mentjukupi kebutuhan dalam negeri, dimana dapat diperketjil djumlah Import negara dan diperbesarnja djumlah export.

Menurut statistik tsb. djumlah devisen jang didapat oleh negara R.P.A. dari export hasil-hasil pertanian dalam tahun 1958, berdjumlah 148 djuta pounds. Dan oleh Pemerintah djumlah import hasil2 pertanian dapat dikurangi dari 59 djuta pounds pada tahun 1952 mendjadi hanja 42 djuta pounds pada tahun 1958.

Bendungan Aswan.

Bendungan Aswan jang sedang dalam taraf pembangunannja, dan jg merupakan salah satu pekerdjaan raksasa di R.P.A. menurut rentjana jang konkrit Bendungan Aswan tsb. akan dapat mengairi sedjuta faddan (atau 1/6 dari luas tanah pertanian, jang dipergunakan dewasa ini) dan akan dapat mengairi tanah pertanian jang tidak teratur pengairannja seluas 700 ribu faddan. Bendungan Aswan itu akan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mempergunakan tanah seluas 700 ribu ha itu untuk ditanami beras. Beras jang dihasilkan tiap2 tahun dari 700 ribu ha itu berdjumlah 400 ribu ton, djumlah mana merupakan kelebihan dari kebutuhan dalam negeri.

Pengolahan Sahara.

Langkah jang partama untuk menghidjaukan sahara (padang pasir) telah dimulai sedjak beberapa waktu disebuah daerah jang dinamakan daerah pertjobaan (MADIRIJAH EL-TAHRIR). Rentjana penghidjauan sahara di Madirijah El-Tahrir itu telah berdjalan dengan sangat memuaskan, dimana tanah seluas 21.100 faddan telah dapat diratakan.

Sebagian besar tanah jang sudah diratakan itu, jaitu seluas 16.600 faddan telah dapat dipergunakan untuk pertanian, dian-

taranja untuk penanaman buah-buahan seluas 3000 faddan.

Dunia perindustrian di R.P.A.

Produksi perindustrian dalam tahun 1960 adalah seharga 655 djuta pounds Mesir, dan apabila ditambah dengan hasil industri pertambangan-minjak, maka angka tsb. diatas akan berobah mendjadi 1.189 djuta pounds Mesir.

Dari hasil perindustrian pendapatan negara pada th. 1960 telah mendapat tambahan sebanjak 273 djuta pounds, dan di harapkan „berdasarkan angka2 jang konkrit", tambahan itu pada tahun 1964 akan berdjumlah 540 pounds.

Tambahan pendapatan nasional tsb. oleh pemerintah akan dipergunakan untuk membiajai rentjana2 industri rakjat dan industri berat. Rentjana tsb. diharapkan akan melipat gandakan pendapatan Nasional masa delapan tahun.

Tambahan pandapatan nasional itu adalah disebabkan karena perkembangan2 baru dan kemadjuan jang dialami oleh dunia perindustrian terutama setelah di bangun beberapa Industri jang baru, seperti industri2 mobil, motor diesel, gerbong kereta api, kabel2 listrik dan industri barang petjah belah, rabuk, bahan bangunan, tekstil, lemari es, radio televisi dan mobil, kabel2 telepon, makanan kaleng dan lain sebagainja.

Disambut dengan meriah dan gegap gempita di Kemajoran.

Export hasil Industri dalam negeri.

Export hasil industri dalam negeri pada tahun 1960 berdjumlah seharga 25,35 djuta pounds, sedangkan pada tahun 1959 hanja seharga 13 djuta pounds. Keadaan jang demikian itu sangat besar artinja dalam memperkokoh devisen Negara.

Rentjana Pembangunan 5 tahun.

Rentjana lima tahun pertama jang dimulai sedjak tahun 1957 sampai dengan 1960, telah selesai dilaksanakan dengan sukses, dimana telah dilaksanakan 504 rentjana, jang biajanja berdjumlah 331 djuta pounds. Sedangkan dewasa ini oleh pemerintah sedang disiapkan rentjana lima tahun kedua, dimana dikerdjakan 733 rentjana, jang akan dapat menampung tenaga pekerdja sebanjak 193 ribu orang.

Serba-serbi tentang televisi di R.P.A.

Republik Persatuan Arab pada hari ulang tahun revolusinja jang ke IX jaitu pada tgl. 23 Djuli 1960, telah dimeriahkan dengan dibukanja dan dimulainja siaran televisi R.P.A. Sedangkan pusat pemantjar televisi itu telah dibangun dipuntjak gunung „El-Maktam" di Cairo, jaitu disebuah tempat jang terletak 300 m diatas daratan kota Cairo.

Dan pada bulan April 1961 didirikan pula sebuah pemantjar televisi di Alexandaria, jang diserahkan pendiriannja oleh pemerintah kepada Insinjur2 bangsa Arab, dimana ahli tsb. telah dapat membangunnja dengan sangat sempurna. Demikian pula rentjana untuk mendirikan beberapa pemantjar televisi lagi dipelbagai kota sedang dalam pengerdjaan, jaitu di-kota2 El-Mansjura Tanta, Port Said, Souhaq dan Aswan. Pemantjar tsb. diharapkan akan memulai siarannja pada waktu jang dekat. Adapun kekuatan televisi R.P.A. dalam hal teknik penjelenggaraan sudah agak madju beberapa langkah kedepan, hal mana dapat dibuktikan dari betapa djelasnja penjelenggaraan siaran itu, sehingga orang2 jang berada di Libanon dapat menjaksikan siaran televisi R.P.A. dengan djelas sekali.

Pesawat televisi jang telah didjual pada rakjat di R.P.A. ada sebanjak 350 ribu buah, sedangkan daftar nama2 peminat (pembeli) masih mengalir. Dewasa ini pesawat2 televisi sudah dapat di produksi didalam negeri dengan tenaga2 bangsa Arab. dan salah satu perusahaan industri pesawat-pesawat televisi jang besar ada-

lah perusahaan „El-Nasr". Perusahaan tsb. telah dapat melajani kebutuhan nasional akan pesawat2 televisi. radio dan lain sebagainja dengan harga jang rendah dibanding dengan harga luar negeri.

•

Siaran televisi di R.P.A. dimulai dari djam 4 sore sampai dgn. djam 12 tengah malam setiap hari, dan pada Kamis dan Djum'at dari djam satu tengah hari sampai dengan djam 12 tengah malam.

Oleh pemerintah siaran2 televisi itu dipergunakan sebagai salah satu alat penerangan jang sangat penting untuk pendidikan dan mempertinggi kesadaran nasional serta untuk memberikan hiburan jang bermutu tinggi bagi rakjatnja. Maka untuk memberikan kesempatan bagi rakjat jang kiranja belum mampu membeli pesawat itu, oleh pemerintah telah disediakan lajar2 televisi jang berukuran lebar sekali di beberapa taman2 atraksi dan lapangan jang penting dalam mengikuti perdjuagan R.P.A.

Penggunaan televisi bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat djuga tidak ditinggalkan. Dalam hal ini wartawan antara dari Cairo mengabarkan bahwa pemerintah

. . . . „Rakjat dan Pemerintah R.P.A. menjokong sepenuhnja perdjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat". Demikian Wkl. Presiden R.P.A. Abdul Hakim Amer.

serta rakjat R.P.A. sangat bersimpati terhadap perdjuangan bangsa Indonesia dalam usahanja mengembalikan Irian Barat kedalam kekuasaan R.I. dan menjokong penuh tuntutan Indonesia jang adil itu.

Selandjutnja oleh wartawan Antara tsb. dikatakan bahwa televisi R.P.A. dengan tjara berge-

lombang telah menjiarkan dan memberikan gambaran jang sangat djelas tentang adilnja tuntutan Indonesia itu.

Kesiap-siagaan Angkatan Perang R.P.A.

Tatkala diadakan parade Militer berkenaan dengan hari ulang tahun revolusi Mesir jang ke IX pada tanggal 23 Djuli 1961 jang baru lalu. telah didjelaskan oleh Marsekal Abdel Hakim Amer. Panglima Besar Angkatan Bersendjata/Wakil Presiden R.P.A. telah mentjapai taraf pendidikan dan teknik jang dapat dibanggakan diantara Angkatan2 bersendjata negara2 lain jang bermutu tinggi dalam pendidikannja dan teknik kemiliterannja. Dan bahwasanja Angkatan bersendjata R.P.A. selalu dalam keadaan siap siaga menangkis dan membalas setiap serangan mendadak jang dilantjarkan oleh pihak imperialis terutama jang dilakukan oleh Israel.

Dewasa ini sudah mendjadi kebanggaan Republik Persatuan Arab, serta segenap patriot bangsa Arab bahwa oleh pemerintah R.P.A. telah dilengkapi angkatan bersendjatanja oleh (dengan) sendjata2 jang termodern.

Diudara angkatan udara R.P.A. diperlengkapi dengan pesawat jet jang terbaru jang ketjepatannja melebihi ketjepatan suara, sedangkan pesawat2 pelatih jang dipergunakan oleh teruna2 penerbang di Akademi penerbangan adalah pesawat2 biasa dengan pesawat jet, jang dibuat di R.P.A.

Dilautan, Angkatan laut R.P.A. telah dilengkapi dengan sedjumlah kapal perang jang terbaru, hal mana telah menempatkan armada R.P.A. sebagai armada jang terkuat didaerah timur laut tengah.

Disamping itu pabrik2 sendjata di R.P.A. adalah pabrik2 jang dapat melajani kebutuhan Angkatan bersendjata dalam perlengkapan perang R.P.A. dan negara2 Arab lainnja.

FUNGSI PERS INDONESIA DALAM ALAM MANIPOL

Selama satu minggu (30/1 s/d 5/2-'62) di Tjipajung dekat Bogor diadakan coaching ilmiah indoktrinasi Manipol/Usdek bagi karyawan pers, dipimpin oleh Menteri/Wakil Ketua DPA Dr. H. Roeslan Abdulgani selaku Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi.

Coaching tersebut diikuti oleh 212 peserta dari seluruh Indonesia, jaitu 166 orang adalah Pimpinan Umum dan Pimpinan Redaksi kantor² berita dan surat² kabar, 30 orang adalah pedjabat publicrelation dari instansi2 pemerintah dan 16 orang guru2 besar dan lektor2 dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Indonesia. Pembukaan coaching tersebut dihadiri a.l. oleh Menteri PTIP Prof. Mr. Iwa Kusumasumantri, Kolonel Wilujo Puspojudo jang mewakili MKN/KASAD Djenderal A.H. Nasution dan Pembantu Utama Departemen Penerangan Sdr. W.J. Latumeten dan lainnja.

Sambutan tertulis Menteri Penerangan Maladi disampaikan oleh Sdr. W.J. Latumeten jang lengkapnja dimuat dibawah ini.

J.M. Menteri Pertama,

J.M. Menteri Keamanan Nasional Ketua Panitya Retooling Apparatuur Negara.

J.M. Menteri/Wakil Ketua D.P.A. Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi.

Saudara2 Karyawan Wartawan dan Saudara2 hadlirin sekalian.

Saja merasa sjukur, bahwa tibalah saatnja dimana golongan Karyawan jang menduduki tempat jang penting dalam revolusi kita, jakni Karyawan Wartawan, mendapat gilirannja untuk mengikuti coaching ilmiah indoktrinasi Manipol/USDEK.

Penting djuga untuk disadari, bahwa coaching ini diadakan ditengah2 suasana jang me-luap2 untuk membebaskan Irian Barat.

Kita berada dalam babakan daripada Revolusi, dimana bagian penting dari tiga segi kerangka Manifesto Politik menghadapi pelaksanaannja.

Jakni „Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke". Untuk mengamalkan tugas Revolusi itulah maka segenap Rakjat

Indonesia dewasa ini digelorakan semangat dan kehendaknja untuk membebaskan Irian Barat atas korbananan dan penderitaan jang bagaimanapun besar nja.

Revolusi kita belum selesai.

Berulang kali kita bangsa Indonesia dihadapkan kepada kenjataan2 konkrit jang mendjadi bukti, bahwa benar2 revolusi ki ta belum selesai! Kali ini perdjoangan pembebasan Irian Barat.

Sebelum itu, baru sadja kita mengachiri penumpasan pemberontakan PRRI/Permesta. Dan di bidang politik bisa kita tjatat kedjadian2 jang membawa peruba han2 dan perombakan2 setjara fundamentil diatas garis2 dan hukum2 Revolusi. Ter-lebih2 sedjak Dekrit jang dikeluarkan pada tanggal 5 Djuli 1959.

Siapapun jang berada dibumi Indonesia bisa menjaksikan, mendengar dan merasakan dengan djelasnja geteran dan pasang surutnja Revolusi Indonesia jang hingga sekarang masih berlangsung terus. Baiklah hal ini disadari oleh oknum2 jang dipenuhi oleh cynisme seolah2 kita hanja men-tjari2 alasan sadja dalam kata2 „Revolusi belum selesai".

Dan selama tudjuan dari Revolusi belum tertjapai, djangan diharapkan Revolusi kita akan mandeg. Dia akan terus. Momentum jang ditjapai sekarang ini akan menelan siapa sadja jang meng-halang2i djalannja Revolusi kita.

Hendaknja djangan lagi diantara kita masih her-tanja2 dimana saja berdiri". Sebab dasar tudjuan Revolusi kita sudah tegas dirumuskan didalam Konsepsi Revolusi jakni Manifesto Politik, jg setjara menjeluruh memuat segala segi Revolusi kita dalam 5 bab. Jaitu dasar tudjuan dan kewadjiban2nja. Kekuatan2 sosialnja, sifatnja jang nasional dan anti-imperialis-kolonialis, Hari depannja dan Musuh2nja. Konsepsi Revolusi jang tegas itu telah melenjapkan segala dualisme dan keragu-raguan jang pernah memetjah2 kita tentang dasar, tudjuan dan kewadjiban2 jang harus ditunaikan oleh bangsa dan negara. Lenjapnja pertentangan2 jang telah banjak menghambur-hamburkan potensi nasional dan banjak waktu jang berharga itu, dan tertjapainja platform perdjuangan jang kita pergunakan untuk memupuk kesatuan pendapat, kesatuan semangat, kesatuan kemauan dan kesatuan perbuatan. Dalam hubungan ini djelaslah mengapa coaching jang kita lakukan sekarang ini mempunjai arti jang begitu penting.

Kemerdekaan pers.

Marilah kita tingkatkan atjara ini pada persoalan pers Indonesia. Sering orang luaran mereflekteer persoalan ini pada persoalan pers pada umumnja. Dan meng-konfronteernja dengan kemerdekaan pers sebagaimana kita mengenalnja sepandjang konsepsi-konsepsi jang berlaku dan jang masih dianut dibagian dunia, jang masjarakatnja masih hidup dalam alam liberalisme. Disana sudah tentu norma2 jang dilekatkan pada kemerdekaan pers adalah norma2 liberalisme, jang memang sudah inhaerent dengan way of life serta way of thinking daripada bangsa2 jang bersangkutan.

Berbeda keadaannja di Indonesia. Kita masih berada dalam kantjah Revolusi. Suatu Revolusi jg mempunjai tudjuan jang tertentu, jakni untuk mentjapai masjarakat Sosialis Indonesia, untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Oleh karena itu, maka jang berlaku terhadap kemerdekaan pers Indonesia adalah norma2 jang berlaku didalam Revolusi kita, sebagaimana telah ditetapkan dalam Konsepsi Revolusi, jakni didalam Manipol/USDEK. Dan tidak bisa lain!

Sebab sedjak permulaan daripada sedjarah pers nasional kita, pers senantiasa merupakan bagian daripada pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pers jang diamanatkan oleh Revolusi kita adalah pers jang ikut-serta menjumbang kepada tertjapainja masjarakat Sosialis Indonesia. Dus *pers Sosialis Indonesia!* Dan bukan pers lain! Bukan pers liberal, jang dengan „sak-kersa2nja" main hantam-kromo seperti kita dapati dalam periode survival antara tahun 1950 dan 1955.

Diwaktu itu pers diabadikan kepada golongan2 tertentu, sungguhpun berselimut dibelakang kepentingan nasional. Kemerdekaan pers waktu itu hanja sekedar kedok untuk dengan bebas menghantam lawan dan membela kawan.

Pers Sosialis Indonesia bukan pula pers diktatur atau pers fascis, jang dikendalikan oleh satu tangan atau satu golongan jang sedang berkuasa dan jang tidak berpegang pada falsafah politik jang dianut rakjat banjak.

Dalam hubungan ini, baiklah kita ulangi persjaratan mental jang diadjukan oleh Presiden Sukarno terhadap para Wartawan. Dalam pidato didepan mahasiswa publizitik tanggal 12 Desember 1959 beliau kemukakan.

Manakala dahulu didalam zaman sebelum pendudukan Djepang kita bersembojan „lebih dahulu nasionalis, kemudian Wartawan", manakala dahulu didalam djamannja physical revolution kita bersembojan „lebih dahulu Republikein dan Unitaris, kemudian Wartawan"; maka didalam zaman sekarang ini, jang dengan tegas kita menjatakan bahwa kita hendak menjusun satu masjarakat jang adil dan makmur, dengan tegas menjatakan bahwa kita hendak menjusun Sosialisme á la Indonesia, sembojan kita harus: *„Lebih dahulu Sosialis Indonesia, kemudian Wartawan!"*

Wartawan adalah pedjuang pena.

Sudah djelaslah, bahwa para Wartawan pedjuang2 pena dalam tiap2 periode dalam Revolusi kita selalu memberikan response jang sesuai dengan tuntutan Revolusi untuk periode itu masing2. Naluri jang demikian ini sekarang harus dipegang terus dalam mendjalankan tugas sebagai. Wartawan. Apabila seorang Wartawan terlebih dahulu Sosialis Indonesia, beralam-fikiran, berpandangan-hidup, ja, seolah-olah bahkan bermimpikan Sosialisme Indonesia, maka nistjajalah hasil karya jang terlukis dan terpantjar dari pena Wartawan akan pula didjiwai dan digetari oleh tjita2 Sosialisme Indonesia.

Ambillah misalnja soal penjadjian berita. Dalam penjadjian berita itu, sepandjang konsepsi djurnalistik jang kita batja dalam textbook2, bahwa azas-azas tertentu jang bersifat elementer wadjib dipenuhi. Misalnja sjarat *objektiviteit,* sjarat *lengkapnja* dan tidak ter-potong2nja penjadjian facts, dan djawaban se-djudjur2nja terhadap *lima „W"* (who, what, when, where, why), semuanja memang azas2 jang patut kita hargai. Tetapi hasil karya jang keluar setelah melewati sjarat2 itu, akan berbeda pada wartawan jang beralam-fikiran liberal dan pada Wartawan jang terlebih dahulu adalah seorang jang sepenuhnja beralam-fikiran Sosialisme Indonesia, berway of life Pantja Sila, berdjiwa Manipol/USDEK.

Penjadjian facts oleh Wartawan jang Sosialis Indonesia akan sendirinja didjiwai oleh tjita2 Sosialsme Indonesa, Pantja Sila, Manipol/USDEK.

Itu baru mengenai penjadjian facts, berita2. Ter-lebih2 hasil-karya jang berupa tadjuk-rentjana, tindjauan2 politik, ekonomi, sosial dan kulturil, bahkan seluruh

isi pers akan lebih langsung lagi merupakan manifestasi daripada konsepsi2 Sosialisme Indonesia, Pantja Sila dan Manipol/USDEK. Inilah taraf jang hendak kita tjapai dengan pers Sosialis Indonesia.

Unsur Susialisme Indonesia/ Manipol Usdek dalam pers Indonesia.

Memang ada pihak2 luaran jang menuduh, bahwa pers Indonesia meluntjur kebawah dan meninggalkan kemerdekaan pers, kemerdekaan informasia jang terterkenal sebagai „the touchstone of all the freedoms". Mungkin jang menjebabkan hal ini adalah attribute „Sosialis Indonesia" jang ditambahkan pada perkataan „pers".

Dalam hal demikian baiklah kita ulangi apa jang diutjapkan Presiden Sukarno dalam pidato „For freedom and justice" di Los Angeles pada tanggal 21 April 1961. Sungguhpun utjapan itu tidak chusus ditudjukan terhadap pembelaan pers Sosialis Indonesia, toh berisi pula pembenaran pemasukan unsur Sosialisme Indonesia atau Manipol/USDEK kedalam dunia pers Indonesia.

Demikian:

Semua Negara, sebenarnja, memang mengadakan beberapa tuntutan mental serta tuntutan djasmani terhadap rakjat dari Negara itu. Negara menuntut supaja warganegara2nja menerima dasar2 pokok jang tertentu, dan bekerdja serta hidup sesuai dengan Konstitusi. Ja, menuntut hak untuk menjingkirkan anasir2 jang menentang dasar2 pokok itu, bahkan menuntut supaja semua warganegara setjara aktif ikut-serta dalam mentjapai tjita2 Negara. Demikianlah halnja dengan Amerika Serikat, dengan Sovjet Uni, dengan Indonesia, dan sesungguhnja dengan semua Negara. Kemungkinan jang lain ialah anarchi, jang sebenarnja bertentangan dengan faham Negara itu sendiri.

Kami dari Indonesia, sebagaimana tuan2 djuga, minta supaja semua warganegara menerima faham2 pokok jang tertentu, dan supaja kegiatan politik dibatasi dalam bidang faham2 itu. Ini bukan meng-halang2i kegiatan politik, melainkan, lebih tepat, memberikan kemungkinan untuk itu.

Fungsi pers Sosialis Indonesia adalah fungsi sosial.

Sebagai kesimpulan dapatlah sekarang saja kemukakan bahwa fungsi pers Sosialis Indonesia adalah fungsi sosial.

Ia harus menemui fungsi dibidang-bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudajaan, penerangan dan kritik serta koreksi, dalam batas2 jang ditentukan oleh Manipol/USDEK. Dalam memenuhi fungsi-fungsi itu, pers mempunjai tugas-kewadjiban jang djelas jakni sbb.:

1. ikut serta dalam perdjuangan untuk menjelesaikan Revolusi;
2. mendukung, melaksanakan dan membela Pantja-Sila, Garis-garis besar haluan Negara/Manifesto Politik, Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia;
3. menjebarkan dan menanam kesadaran akan segala gagasan dan adjaran Pemimpin Besar Revolusi;
4. menggalang kekuatan2 Revolusi dan menentang imperialisme dan kolonialisme.
5. membangkitkan semangat Rakjat dan menggerakkan aksi2 massa setjara revolusioner;
6. membantu serta mendampingi Pemimpin Besar Revolusi;
7. mampertinggi kewaspadaan nasional dan membantu tertjiptanja ketenangan politik;
8. memadjukan persahabatan antara bangsa-bangsa.

Tugas2 jang saja sebutkan itu adalah akibat jang logis daripada kedudukan pers Indonesia sebagai alat Revolusi.

Pers & pelaksanaan Tri-komando.

Menghadapi pelaksanaan Tri-Komando untuk membebaskan Irian Barat, dapat disaksikan ikut sertanja pers dalam kampanje. Seluruh pers Indonesia dengan tiada ketjualinja memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnja. Pengerahan tenaga sukarelawan jang sekarang ini berdjumlah 5 djuta, tidaklah dapat dilepaskan dari kegiatan bidang pers, jang ber-sama2 dengan Pemerintah ikut mengelorakan semangat, kehendak dan perbuatan massa. Dj kalau orang ingin mengukur kehebatan gelora tuntutan rakjat terhadap pembebasan Irian Barat, maka pers nasional melukiskan sepenuhnja semangat itu.

Gerakan terus semangat membebaskan Irian Barat.

Marilah semangat itu kita gelorakan terus.

Insja Allah tahun ini djuga Irian Barat masuk dalam lingkungan keluarga kita, dalam nikmat kehidupan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai penutup sambutan saja jang sederhana ini saja utjapkan sukses jang se-besar2nja dan semoga Coaching indoktrinasi ini membawakan ketegasan sikap hidup ber-Pantja Sila jang lebih kuat, kejakinan, Sosialisme Indonesia jang lebih mendalam dan kesatuan tjita2, tekad dan kemauan jang lebih bulat kepada seluruh karyawan Wartawan didalam mengemban dan melaksanakan amanat Penderitaan Rakjat.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

DWI WINDU P.W.I. *)

Tepat pada tanggal 10 Pebruari 1962 ini Persatuan Wartawan Indonesia tlh mentjapai usia genap dua windu. Selama dua windu jang baru silam itu P.W.I. telah memberikan sumbangan2 serta dharma-baktinja kepada perdjuangan nusa dan bangsa, perdjoangan jang diamanatkan oleh penderitaan Rakjat untuk membebaskan negara dan bangsa kita, dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme.

Saja jakin, bahwa P.W.I. akan terus memupuk tradisi perdjoangannja, akan tetap terus melandjutkan perdjoangannja sampai revolusi kita mentjapai titik terachir daripada tudjuannja, jaitu terwudjudnja masjarakat Sosialis Indonesia.

Suatu realita jang tidak dapat kita sangkal, bahwa P.W.I. tidak pernah absen dalam perdjoangan nasional, bahkan P.W.I. sesungguhnja memberikan saham jang besar dalam perdjoangan untuk menjelesaikan Revolusi Nasional.

Sekarang, ulang tahun P.W.I. jang ke-16 ini diperingati, dirajakan di-tengah2 perdjoangan Revolusi jang sedang menghebat dan sedang mentjapai klimaksnja pada perdjoangan pembebasan Irian Barat suatu perdjoangan jang sutji untuk mentjapai keutuhan wilajah nasional kita.

Revolusi akan berdjalan terus, dan masih berdjalan terus sampai tudjuan Revolusi tertjapai. Tertjapai-tidaknja tudjuan Revolusi kita itu adalah terutama sekali tergantung kepada kekuatan kita sendiri. Djangan se-kali2 kita menggantungkan kekuatan kita itu pada bantuan dari luar.

Dan untuk menggalang kekuatan nasional itu, maka perlu adanja konsentrasi dari semua kekuatan nasional, konsentrasi kekuatan disegala bidang: politik, ekonomi, sosial dan mental, pendeknja konsentrasi daripada segala potensi nasional untuk kita konfrontasi terhadap kekuatan imperialis-kolonialis.

Pengalaman telah menundjukkan, bahwa kekuatan imperialis-kolonialisme tidak dapat dihadapi dengan kekuatan jang terpisah-pisah, ia harus kita hadapi dengan kekuatan total. Hanja dengan konsentrasi kokuatan nasional-lah ia akan lumpuh, dan achirnja akan hantjur-luluh.

*) Sambutan tertulis Menpen Maladi pada peringatan Dwi Windu P.W.I. tanggal 10-2-1962.

Dalam hubungan itu, kita semua mengetahui betapa besar sumbangan jang dapat diberikan oleh Pers, oleh Karya Wartawan dan P.W.I. Dan kita jakin sumbangan itu pasti terus diberikan, sesuai dengan garis perdjoangan Pers dimasa lampau.

Sebagai alat revolusi Pers dapat menggerakkan massa actie setjara revolusioner, ia dapat digunakan untuk mempersatukan segenap potensi nasional; ia dapat didjadikan sebagai alat untuk menghantam kekuatan2 musuh2 revolusi, tetapi sebaliknja iapun dapat dipergunakan sebagai alat untuk memetjah-belah persatuan, ia dapat digunakan sebagai alat untuk mematikan semangat perdjoangan. Pendeknja semuanja itu tergantung kepada: Siapa „Peradjurit2 dibelakan pena" itu.

Kita sekarang merasa bersjukur, bahwa sedjak Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 kita telah kembali kepada U.U.D. '45, kita telah kembali kepada relnja revolusi jang sebelum itu diselewengkan. Dan sedjak tanggal 17 Agustus 1959 kita telah pula mempunjai Konsepsi Revolusi jg tegas, jaitu Manifesto Politik, Djarek, Resopim dan Membangun Dunia kembali. Pedoman Revolusi jang tegas itu telah menjelamatkan kita dari penjelewengan2 jang membahajakan keselamatan bangsa dan negara.

Pedoman revolusi itu telah diterima oleh segenap rakjat, telah mendjadi milik kita bersama, mendjadi milik Pers Nasional djuga.

Tinggallah sekarang bagaimana kita harus melaksanakannja, dan mengamalkannja, sebab tidaklah tjukup hanja sekedar dipeladjari dan dipahami.

Maka tepat sekalilah keputusan jang diambil oleh Karyawan Pers dalam upatjara penutupan Coaching Indoktrinasi Manipol-Usdek Karyawan Pers di Tjipajung jang baru lalu untuk mendirikan *„Lembaga Pelaksanaan Manipol-Usdek"*. Terbentuknja Lembaga tersebut saja sambut dengan rasa bersjukur dengan diiringi doa serta harapan semoga berhasillah Lembaga tersebut dan melaksanakan tugasnja sebagaimana jang diharapkan.

Dengan demikian perdjoangan Karyawan Pers sekarang lebih meningkat lebih madju dan lebih progressif. Lebih progresif saja katakan, oleh karena Karyawan Pers telah madju kedepan memelopori pembentukan sebuah Lembaga jang bertudjuan merealisasikan Manipol-Usdek. Rasanja pada peringatan Dwi Windu P.W.I. ini, patut ditjatat modal2

jang sekarang dimiliki oleh Pers Nasional, jaitu berupa:

1. Landasan *idiil* bagi Pers, jang ditegakkan atas dasar Pantjasila dan Manipol dengan intinja berupa USDEK beserta pedoman2 pelaksanaannja. Dengan demikian pers Nasional bergerak diatas satu platform.
2. Dasar strukturil bagi Pers berupa *Perundang-undangan Pers* jang sekarang dalam tingkat persiapan, bertjorak Sosialisme Indonesia, dan disamping tugas kewadjiban djuga menetapkan hak2 Pers dan Wartawan.
3. Dasar etika bagi wartawan, dirumuskan dalam Kode Ketatasusilaan Djurnalis, jang menggoreskan garis2 pembinaan mental,
4. Organisasi P.W.I. jang bertjita2 satu.
5. Organisasi Persurat kabaran, jang melandaskan diri pada azas2 Sosialisme Indonesia.
6. Pengakuan status Wartawan sebagai Karyawan dan diwakili dalam Lembaga2 ketatanegaraan kita.

Keenam modal diatas perlu terus disadari, dibina, dipertumbuhkan, dan dipergunakan dengan se-baik2nja untuk mentjapai tudjuan terachir, jakni Pers Sosialis Indonesia dalam makna jang sepenuh-penuhnja, baik disegi materiilnja maupun segi idiilnja.

Tentang landasan idiil dalam angka 1 diatas, ditambah dengan Lampiran A Ketetapan MPRS/1960, dapat dikatakan, bahwa landasan ini adalah dasar jang mendjiwai modal2 lainnja. Selandjutnja, dalam praktek djurnalistik se-hari2, landasan ini merupakan Idee jang senantiasa memberi bimbingan dalam mempertimbangkan pengisian pers. Sebab tegas, bahwa dengan adanja bimbingan idiil ini, pertanjaan jang kita hadapi dalam pekerdjaan praktek se-hari2 ialah: *menguntungkan ataukah merugikan Revolusi?* Djika menguntungkan, kita muat; djika merugikan kita sisihkan.

Per-undang2an Pers sebagai modal jang kedua, akan memberikan sendi2 diatas mana Pers Nasional disusun dan dibangun. Apabila landasan strukturil ini tertjipta, maka tertjiptalah pula pegangan jang kekal bagi Pers, bagi Pemerintah, bagi lembaga2 Negara dan bagi masjarakat seluruhnja dalam persoalan pers. Akan terhindarlah keadaan, dimana pers dapat diombang-ambingkan oleh golongan2 dan kepentingan2 tertentu jang tidak

bertanggung djawab, halmana djelas diberikan tjontohnja dimasa penjelewengan dari Revolusi kita.

Selandjutnja sifat hubungan antara Pers dan Pemerintah serta badan2 ketatanegaraan lainnja dapat diletakkan didalamnja. Hubungan itu tidak bisa lain melainkan atas dasar azas Gotong-Rojong. Azas ini pulalah jang berlaku sekarang ini antara DPR dan Pemerintah serta lembaga2 negara jang lain. Pers dan Pemerintah hubungannja bimbing-membimbing, isi-mengisi, ada „feed" dan „feed-back", tenggang-menenggang dan djaga-mendjaga kewibawaannja masing-masing.

Inilah hakekatnja maksud Gotong-Rojong. Djuga dalam mempergunakan hak pers untuk koreksi dan kritik perlu diartikan dalam batas2 Gotong-Rojong jang demikian itu. Martabat Pers sungguh tidak ditentukan oleh kemampuannja untuk menjebarkan dan membongkar soal2 „terpendam" dengan tjara2 jang sensasionil seperti jang pernah terdjadi dimasa liberalisme meradjalela antara tahun 1950 — 1959. Tetapi martabat itu ditentukan oleh tingkat kemampuan seberapa djauh pers dapat mengkoreksi suatu keadaan dengan tjara2 dan batas2 kegotong-rojongan. Effek terhadap masjarakat dari suatu pemberitaan, kritik atau koreksi perlu dipertimbangkan benar2, apakah dengan itu timbul kegaduhan jang tiada menentu jang hanja merugikan perdjoangan kearah tertjapainja tudjuan — Revolusi. Ataukah bisa membangkitkan fikiran2 konstruktif dikalangan masjarakat. Sebab masjarakat dan rakjat kita adalah masjarakat dan rakjat miliknja Pers sendiri djuga, jang keselamatannja harus ikut dirasakan dan diderita pula oleh Pers.

Mengenai modal jang berupa organisasi, jakni Organisasi Kewartawanan dan Organisasi Persuratkabaran, kita berhadapan dengan dua segi dari Pers. Jakni segi idiil dan segi materiil. Hal ini djangan disalah-tafsirkan seolah2 organsasi jang satu *hanja* mewakili segi idiil sedang jang lain hanja segi materiil. Pandangan jang demikian adalah pandangan jang pintjang. Pembagian mendjadi dua segi itu adalah sekedar suatu abstraksi jang dapat dibedakan satu sama lain hanja didalam alam fikiran. Tetapi sebenarnja bagi Pers Nasional kedua segi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanja harus mendjiwai kedua-dua organisasi tersebut.

Segi idiil dan segi materiil-komersiil adalah laksana *djiwanja* dan *badannja, rochnja* dan *djasmaninja* Pers. Dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan kedua organisasi merupakan dwi-tunggal, jang harus bergerak setjara „synchroom".

Demikianlah antara segi kewartawanan dan segi perusahaan harus ada kegotong-rojongan jang subur.

Apabila antara perusahaan dan kewartawanan berlaku azas kerdja sama bergotong-rojong, maka bagi perusahaan itu sendiripun, sesuai dengan Sosialisme Indonesia, harus berlaku azas kolektif jang berupa pemilikan bersama antara karyawan usaha dan karyawan wartawan. Hubungan sematjam itulah jang hakekatnja mendjdi tjiri dari Pers kita ketika memulai sedjarahnja pada permulaan Revolusi.

Demikianlah beberapa hal pokok jang perlu saja kemukakan dalam rangka memperingati Dwi Windu berdirinja P.W.I. dan dalam rangka menindjau langkah kedepan.

Selamat berdjuang dan sekali merdeka tetap merdeka.

.... saja *menghendaki, lebih menghendaki, lebih senang Irian Barat itu bisa dikembalikan kepada kita dengan tjara perundingan dengan dasar jang njata, jaitu menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia.*

Presiden Sukarno,
Diutjapkan pada hari peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara pada tanggal 21 Pebruari 1962

DJURU PENERANG TETAP DJADI PELOPOR

Kita telah sama mengetahui, bahwa dengan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3/1961 disjahkan/ditetapkan pada tanggal 4 April 1961 pegawai negeri dan setiap Apparatur Negara telah mempunjai pedoman hidup jang disebut „Pantja Setia" sebagai pegangan, jang wadjib diutjapkan bersama sekurang²nja sekali dalam satu minggu.

Bagi kita warga Departemen Penerangan hal ini dilaksanakan setiap hari Senin dalam lingkungannja masing2 dan setiap tanggal 17 diadakan upatjara tersebut setjara keseluruhan.

Pada kesempatan ini dari fihak Pimpinan Deppen selalu disampaikan amanat berharga guna didjadikan pegangan bagi kita warga Deppen dalam melakukan tugasnja.

Dibawah ini dimuat selengkapnja amanat Pembantu Utama Menpen Sdr. W.J. Latumeten jang mewakili Pimpinan Departemen Penerangan pada upatjara tanggal 17 Pebruari 1962.

Pada tiap tanggal 17 kita bersama2 memperingati detik Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 jang ditjetuskan di Pegangsaan Timur 56, pada tempat dimana sekarang sedang dibangun Gedung Pola.

Sedjak saat jang bersedjarah itu, tahun demi tahun telah liwat, tetapi samangat Revolusi jang mendorong rakjat Indonesia ke Proklamasi Kemerdekaan tersebut, tetap tidak padam. Malahan pada saat ini dalam pelaksanaan Tri Komando Rakjat, semangat Revolusi itu meluap-luap. Meluap-luap walaupun rakjat banjak dihinggapi kesulitan2 besar, berupa bentjana2 alam, membubung tinggi harga bahan2 keperluan sehari-hari, d.l.l.

Kami mengetahui, bahwa ada jang mengeluh karena kesulitan2 itu, tetapi kami ingin memperingatkan disini bahwa pada waktu 17 Agustus 1945 keadaan umum djauh lebih sulit lagi daripada waktu sekarang ini.

Pada saat itu ada pula orang jang mengeluh, tetapi sebagai keseluruhan kita bertekad untuk merdeka, bagaimanapun djuga kesulitan2. Djuga sekarang mulai njata tekad itu.

Ja, kini semangat Revolusi dari masjarakat kita mulai menjerupai keadaan pada tgl. 17 Agustus 1945.

Dan kita warga Departemen Penerangan, baik dipusat sini, maupun di-daerah2, seperti didalam periode 1945 — 1950, dengan sendirinja berada dibarisan paling depan. Dimedan peperangan dahulu dan mungkin tidak lama lagi didalam perdjuangan fisik merebut Irian Barat warga2 Departemen Penerangan akan mendjadi pelopor pula. Tetapi dibelakang medan peperangan, di Home Front pun warga2 Departemen Penerangan harus mendjadi pelopor.

Kita semuanja mendjadi djuru penerang sebab bekerdja didalam lingkungan Departemen Penerangan. Tidak mungkin kita dapat memberi penerangan kepada masjarakat umum, djika kita sendiri tidak insjaf tentang sutjinja Proklamasi Kemerdekaan jang ditjetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Ja, insjaf tentang kesulitan2 jang kita semuanja hadapi sekarang ini. Insjaf, bahwa mungkin kesulitan2 itu di-hari2 depan jang dekat ini akan meningkat, akan tetapi insjaf pula, bahwa pada achirnja tudjuan/tekad kita, ialah Merdeka 100% dari Sabang sampai Merauke akan kita tjapai tahun ini pula Dan dengan mentjapai Merdeka 100% itu, maka baru djalan terbuka menudju kekeadaan masjarakat Adil dan Makmur.

Djika ada jang mengatakan, bahwa untuk mentjapai Masjarakat Adil dan Makmur diperlukan suatu waktu jang lama sekali. Maka memang demikian, malahan mungkin kita disini ini, sendiri tidak akan menikmatinja. Tetapi, pastilah anak2 kita, pastilah anak2 tjutju kita dan seterusnja.

Dengan keinsjafan akan hal ini, maka tidak beratlah kita mendjadi pelopor, seperti tiap djuru penerang, djadi pelopor sedjak tanggal 17 Agustus 1945, dengan berpegang pada pedoman „Djanganlah mempermanis apa jang pahit, tetapi pula djanganlah memperpahit apa jang manis"! „Pahit" sekarang adalah kesulitan-kesulitan jang dihadapi masjarakat kita. „Manis" adalah Kemerdekaan 100% dan Masjarakat Adil dan Makmur jang kita idam2kan waktu kita dengung2kan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu.

MUSJAWARAH KOPERASI KONSUMSI KE-I SELURUH INDONESIA

Pada tanggal 29 s/d 31 Djanuari 1962 di Djakarta dilangsungkan Musjawarah Koperasi Konsumsi seluruh Indonesia.

Musjawarah itu dihadliri oleh berbagai wakil instansi pemerintah dan wakil2 gerakan koperasi dari seluruh Indonesia, wakil organisasi massa serta wakil2 BPU perusahaan2 dagang negara dan lainnja.

Sambutan Ketua Panitia Musjawarah Direktur BPU-PDN, Let. Kol. Sukamto Sajidiman selaku Ketua Panitia Musjawarah dalam sambutannja jang lengkapnja sbb.:

Dibidang penjaluran barang2 pokok keperluan masjarakat dirasakan perlunja untuk dapat memperoleh pemetjahan jang lebih sempurna. Maka untuk itulah kami menjelenggarakan musjawarah jang Mulia ini untuk dapat melahirkan dan membentuk Induk Koperasi Konsumsi Seluruh Indonesia. Dari Induk Koperasi Konsumsi inilah kami mengharapkan timbulnja suatu dinamika didalam menjempurnakan penjaluran barang2 pokok kaperluan masjarakat tersebut. Dan kami menjadari bahwa pemerintah telah membuka djalan kearah ini.

Suatu langkah jang sangat bersedjarah untuk perkembangan gerakan perkoperasian ditanah air kita ialah dengan telah dikeluarkannja P.P. 140 Th. 1961. Keputusan tersebut mengandung inti pengertian jang sangat bidjaksana, mana bagi gerakan koperasi sendiri berarti suatu komando untuk madju kedepan. Madju dalam arti bukan sadja untuk menjempurnakan diri, tetapi terutama mampu memperlihatkan wadjah jang bersih dan dapat dipertjajai sebagai ilham Sosialisme Indonesia dengan keadilan jang merata dan dapat selalu menghidupkan djiwa pusaka gotong-rojong.

Manfaat jang besar jang dapat ditarik dalam hal ini ialah sebagai usaha untuk menghilangkan akibat buruk antri-antrian di sepandjang djalan, jang pada hakekatnja merupakan tjatjat nasional jang perlu segera dihilangkan.

Setjara vertikal sedjalan dengan konsekwensi diatas perlu sekali segera disempurnakannja Organisasi Koperasi dari tingkat

pusat sampai ke-daerah2, sampai pada R.T./R.K. berdasarkan P.P. no. 60 Tahun 1959 sesuai dengan pokok2 pemikiran jang telah digariskan oleh Musjawarah Nasional Koperasi ke-I tahun 1960.

Pada waktu ini kita sudah mempunjai organisasi koperasi dari tingkat bawah jaitu koperasi2 primair jang tersebar diseluruh pelosok tanah air, kemudian tingkat kabupaten jaitu pusat2 koperasi dan achirnja kita sudah pula mempunjai gabungan2 koperasi ditingkat propinsi. Jang dirasai sebagai kekurangan pada dewasa ini ialah belum terbentuknja Induk Koperasi Konsumsi sebagai organisasi koperasi ditingkat nasional. Oleh karena itulah pada kesempatan ini harus dapat diusahakan terbentuknja Induk Koperasi Konsumsi jang terutama dengan maksud melengkapkan organisasi koperasi konsumsi sebagai wadah untuk menampung kebidjaksanaan pemerintah dalam keputusan2nja jang telah dikeluarkan diantaranja P.P. 140/1961 Didalam rangka realisasi P.P. 140/1961 tsb. menjusullah keputusan2 bersama Ment. Transkopemada dengan Ment. Perdagangan tentang pelaksanaan P.P. 140/1961 dan Pola Bersama tentang pelaksanaan Kebidjaksanaan pokok, jang mana keputusan2 tsb. merupakan dorongan jang besar bagi pertumbuhan gerakan Koperasi Konsumsi.

Pilot-Project.

Untuk memenuhi hal ini maka lahirlah Pilot-Project kerdja sama Perusahaan Dagang Negara dengan koperasi, dengan maksud sebagai, langkah pendahuluan jang merintis realisasi P.P. 140/1961 dan memupuk pertumbuhan kerdjasama P.D.N. — Koperasi sedjiwa dengan keputusan bersama Menteri Transkopemada dengan Menteri Perdagangan.

Pilot-Project tersebut ternjata mempunjai effect mendorong terhadap pertumbuhan gerakan Koperasi diseluruh Indonesia dan telah memperlihatkan hasil2nja jang njata, antara lain dengan tumbuh meratanja gerakan koperasi konsumsi diseluruh tanah air djika dilihat dari sudut kwantitet, serta bertambah madjunja dan rapinja organisasi/administrasi mereka djika dilihat dari sudut kwalitet, bahkan kekuatan permodalan koperasi dari bulan-kebulan tampak sekali kemadjuannja, hal mana dapat dilihat dari progress report2 dari koordinator2 pilot-project diseluruh tanah-air. Kami akan menjebutkan beberapa tjontoh:

a. Pada pilot-project Djawa Timur bulan Oktober 1961 terdapat 109 pusat2 Koperasi Konsum-

si dengan realisasi penjaluran barang sebesar Rp. 5,5 djuta. Pada bulan Nopember 1961, djadi sebulan kemudian terdapat 136 pusat2 Koperasi Konsumsi dengan realisasi penjaluran barang sebesar Rp. 5,5 djuta. Pada bulan Nopember 1961, djadi sebulan kemudian terdapat 136 pusat2 koperasi dengan realisasi penjaluran barang sebesar Rp. 27,- djuta sebulan, seluruhnja berdasarkan atas pembajaran cash and carry.

b. Pada Pilot-Project daerah Palembang telah terdjadi realisasi penjaluran barang2 berturut-turut untuk bulan Oktober, Nopember, Desember 1961 sebesar masing2 Rp. 6,5 djuta, Rp. Rp. 5 djuta dan Rp. 8 djuta.

c. Pada pilot-project Djawa Tengah jang setjara kebetulan merupakan pula daerah pilot-project dari Djawatan Koperasi serta Bank Indonesia, tampak sekali kemadjuannja. Djawatan Koperasi telah berusaha membangun koperasi2 primair sampai kepelosok2 desa, disamping itu pihak Bank Indonesia menjediakan kredit sebesar Rp. 50 djuta, sedangkan P.D.N.2 berusaha mengisi wadah2 perkoperasian terutama dengan barang2 pokok, dan ternjata mereka telah sanggup menjalurkan barang2 melebihi ketentuan pokok 25%.

d. Pada pilot-project daerah Menado bahkan gerakan koperasi telah sanggup untuk menjalurkan 50% dari seluruh persediaan barang2 P.D.N.

Dan jang sangat menggembirakan didaerah ini adalah bahwa realisasi kerdja sama P.D.N. Koperasi telah mentjapai taraf lebih madju lagi, jaitu disatu pihak P.D.N. menjediakan barang2 keperluan rakjat, dilain pihak gerakan Koperasi telah berusaha membantu mengumpulkan hasil ekspor.

Begitulah dilain2 daerah pilot-project tampak sekali perkembangan gerakan koperasi kearah jang sangat menggembirakan dan melegakan hati. Hal2 tersebut diatas, dimungkinkan oleh adanja perasaan tanggung djawab jang besar bukan, sadja dimiliki oleh pedjabat2 negara jang langsung berhubungan dengan persoalan2 dagang dan Koperasi, bahkan djuga bantuan jang besar telah diberikan pula oleh bapak2 Kepala Daerah beserta tjatur tunggalnja serta kesadaran jang ada dikalangan rakjat sendiri.

Pada saat ini telah hadir para utusan daripada Gabungan2 Koperasi Konsumsi dari pelbagai daerah ditanah air untuk mengikuti musjawarah ini dengan membawa harapan penuh dan pokok tudjuan, memetjahkan persoalan2 jg. dihadapi oleh perkembangan

Koperasi Konsumsi dewasa ini, selaras dengan garis djalan tunggal Komando Presiden R.I. didalam memenuhi amanat penderitaan rakjat. Dalam bidang organisasi musjawarah bermaksud membentuk Induk Koperasi Konsumsi Seluruh Indonesia. Urgensi daripada terbentuknja organisasi tersebut pada pokoknja adalah untuk melantjarkan pelaksanaan daripada Program Pemerintah dibidang sandang pangan dimana tahun 1962 merupakan tahun sandang pangan jang harus berhasil.

Sedjadjar dengan perdjoangan Pembebasan Irian Barat, maka adalah mendjadi kewadjiban bersama untuk setekat dan sependirian turut berusaha memperkuat Home Front kita sesuai dengan garis kabidjaksanaan pemerintah.

Pada musjawarah itu diantaranja telah menjampaikan prasaran Menteri Transkopemada Achmadi, Menteri2 Distribusi, Perdagangan, Keuangan, Perdatam, Perhubungan Darat Pos Telekomunikasi dan pariwisata perindra dan Ketua Denaskop-Kepala Djawatan Koperasi Pusat Mr. Subiakto.

Menteri Transkopemada Achmadi selaku ketua umum Koperasi Konsumsi seluruh Indonesia (KOKSI) dalam prasarannja itu a.l. mengatakan, bahwa koperasi bertugas membantu pemerintah dan rakjat dalam bidang distribusi jang baik agar mendapatkan manfaat dari koperasi.

Selandjutnja oleh Menteri ditegaskan bahwa tugas koperasi tidaklah semata-mata dalam bidang distribusi sadja, dengan membagi2kan barang2 jang didapat dari pemerintah, tetapi koperasi harus berusaha pula mendapatkan barang2 sendiri, bahkan dalam rentjana djangka pandjang koperasi harus menguasai unit2 produksi agar dapat memenuhi kebutuhan masjarakat.

Lambat laun koperasi harus menudju kepada usaha2 import dan export. Menteri Achmadi mengatakan, bahwa memang itu suatu jang ideal, tetapi usaha menudju kearah itu dapat tertjapai dengan kegiatan gerakan koperasi sendiri.

Selandjutnja Menteri mendjelaskan, bahwa dalam tjara pembiajaan koperasi haruslah lebih effisien dengan mempergunakan bank2 koperasi.

Koperasi dan Irian Barat.

Menteri Achmadi selaku sekretaris umum Depertan mendjelaskan, bahwa perdjuangan Irian Barat bukanlah suatu masalah militer sadja, tetapi membutuhkan pula konfrontasi segala bi-

dang. Demikian pula konfrontasi ekonomi, dimana KOKSI hendaknja merupakan suatu barisan jang kompak. Dalam hal ini hendaknja gerakan koperasi diatur sebaik mungkin, sehingga membentuk kekuatan dalam bidang ekonomi.

Induk koperasi konsumsi.

Dalam pelaksanaan koperasi untuk djangka pendek akan diusahakan membentuk induk koperasi konsumsi jang pelantikan pengurusnja akan dilakukan pada tanggal 31 Djanuari 1962.

Dengan demikian dapat diusahakan tjara jang tjepat dan praktis untuk melaksanakan usaha2 koperasi konsumsi.

Menteri Achmadi mengatakan, bahwa pengurus induk koperasi tsb. haruslah mendjuruskan seluruh pikirannja kearah penjempurnaan konsumsi.

Ditegaskasnja pula, bahwa pengurus induk koperasi konsumsi harus aktip dan berusaha mendapatkan tjara2 jang praktis untuk menjelesaikan masalah konsumsi bagi masjarakat.

Pengurus merupakan kuntji baik buruknja koperasi, oleh karena itu, Menteri mengharapkan agar diadakan penertiban dan keseragaman tatakerdja koperasi sedjak dari induk hingga kepada tingkatan primair. Keseragaman organisasi dan tata kerdja koperasi berarti mendjuruskan koperasi kearah uniformitet, sehingga merupakan satu organisasi jang kuat.

Team pengawas.

Menteri Achmadi menegaskan pula, bahwa dalam masa pertumbuhan koperasi dewasa ini hendaknja ada team pengawas jang mengawasi kerdja koperasi, sehingga tidak akan ada penjelewengan dan kerdja koperasi dapat diawasi, agar djangan terulang kembali tjara2 pengurus jang tidak baik jang terdjadi dimasa lampau. Hal ini dapat menjebabkan tidak pertjajanja masjarakat kepada koperasi.

Team pengawas tsb. harus dibentuk setjara kerdja sama antara berbagai instansi pemerintah, swasta dan koperasi. Team pengawas ini bertugas mengawasi dan menertibkan pekerdjaan pengurus koperasi.

Djangka pandjang koperasi.

Usaha2 djangka pendek dan djangka pandjang dari koperasi haruslah disynchronisir dan gerakan koperasi hendaknja djangan tenggelam dalam kesulitan2 dewasa ini tetapi melandaskannja untuk rentjana djangka pandjang.

Koperasi tidak hanja bergerak dalam bidang pembagian atau distribusi barang2 dari pemerintah kepada masjarakat, tetapi harus mengarahkan usahanja kepada penguasaan unit2 produksi dan pengatur pembiajaan melalui bank2 koperasi.

Menteri Achmadi djuga menegaskan, bahwa dewasa ini kita telah mempunjai pegangan jang kuat ialah: UUD 45, ketetapan2 MPRS dengan targetnja 8 tahun sebagai langkah pertama dan hasil Munas Koperasi I di Surabaja.

Keputusan2.

Musjawarah jang berlangsung selama tiga hari itu a.l. telah memutuskan membentuk Induk Koperasi Konsumsi atau singkatnja I.K.K. jang berkedudukan di Djakarta. Lebih landjut dapat dikemukakan dasar pembiajaan koperasi konsumsi Indonesia adalah bersendikan swadaja dan kekuasaan sendiri dgn. djalan: simpanan pokok dan wadjib, transaksi/penjaluran dan usaha2 lain.

Sementara itu dalam memasuki masa peralihan (transisi) dianggap perlu adanja bantuan kredit dari pemerintah. Untuk mentjegah agar kredit tidak memperbesar peredaran uang jang akan mengakibatkan inflasi, maka penggunaan menurut sistim djaminan kredit (supervizing credit) sangat diharapkan. Mengingat masa pertumbuhan gerakan koperasi jad., musjawarah selandjutnja berpendapat perlu adanja perlindungan dari pemerintah.

Pengumpulan modal.

Induk Koperasi Konsumsi akan mengadakan pengumpulan modal jang bersendikan swadaja kekuatan sendiri meliputi usaha2 sebagai berikut:

1. Simpanan pokok anggota kepada Induk diwadjibkan sebesar Rp. 100.000,— jang dapat diangsur se-lama2nja 5 bulan dalam 5 kali angsuran tiap2 bulan.
2. Simpanan wadjib anggota tetap kepada Induk ditetapkan sesuai dengan perimbangan suara sesuai dengan anggaran dasar pasal 29, jaitu Rp. 500.— sebulan bagi tiap suara.
3. Simpanan wadjib pembelian atas barang2 jang diperdapat dari induk sebesar ¼%.
4. Pembagian selisih harga dari pada barang2 jang diperdapat dari induk sebesar 4%.
5. Simpanan wadjib lainnja diatur dalam peraturan chusus.

Mengenai tehnik pembiajaan, selandjutnja mendesak kepada Bank Koperasi Tani dan Nelajan

agar supaja segera melaksanakan tugasnja sesuai dengan Perpu No. 41/1960:

Susunan pengurus Induk Koperasi Konsumsi.

Musjawarah telah berhasil menjusun pengurus Induk Koperasi Konsumsi jang terdiri dari pengurus Harian, Komisaris Daerah, Dewan Penasehat dan Dewan Pemeriksa. Adapun pengurus harian dipimpin oleh LetKol. Soekamto Sajidiman (Ketua Umum), Major Soehardiman (Ketua I), Njonja Ratjih Natawidjaja (Ketua II) dan Atot S. (Ketua III).

Menteri Pertama Ir. H. Djuanda pada penutupan Musjawarah itu telah menjampaikan pidato sambutannja jang diutjapkan oleh Kepala Biro Finek Mr. Saubari jang pada pokoknja a.l. menjatakan, bahwa koperasi konsumsi harus bergerak dilapangan apa sadja seluas-luasnja. Ditandaskan pula, berkenaan dengan itu maka segala apparatuur negara sebagai penegak alat sosialisme Indonesia harus segera dibangun dan diperkuat. Dalam hubungan ini Menteri Pertama Djuanda menjangkal pendapat jang mengatakan bahwa koperasi konsumsi belum dapat diberi tugas jang besar dan berat dikarenakan kurang kuat.

Selandjutnja beliau menegaskan dalam bidang penjaluran barang2 tidak ada djalan lain jang lebih aman ketjuai distribusi melalui sistim koperasi, demikian a.l. pokok sambutan Menteri Pertama Djuanda.

Setelah Musjawarah itu selesai Bagian Hubungan Masjarakat Departemen Transkopemada diantaranja menerangkan sebagai berikut: Musjawarah Koperasi Konsumsi seluruh Indonesia jang dilangsungkan pada tanggal 29 s/d 31 Djanuari 1962, selain telah berhasil mengambil keputusan mengenai pembentukan Induk Koperasi dan menetapkan pengurusnja, musjawarah tsb. teah mewadjibkan kerdjasama bahkan berpaduan antara Perusahaan2 Dagang Negara dan B.P.U.-nja disatu pihak, dan Gerakan2 Koperasi dipihak lain.

Hal ini terlihat dari aktifnja pimpinan P.D.N.2 mengikuti musjawarah sampai terbentuknja Induk Koperasi Konsumsi dengan pengurus2 jang terdiri tidak hanja dari orang2 pergerakan, tetapi djuga dari B.P.U.-P.D.N.2. Seperti diketahui Ketua Umum I.K.K. adalah Presiden Direktur dari B.P.U. sendiri Letnan Kolonel Soekamto Sajidiman. Perpaduan tenaga antara Gerakan Koperasi dan P.D.N.2 ini sangatlah penting artinja didalam periode

transisi sekarang ini, dimana koperasi memerlukan bantuan langsung dari instansi2 jang berhubungan dengan soal koperasi terutama petugas2 pemerintah sendiri.

Didalam keputusan M.P.R.S., telah ditetapkan, bahwa dalam tahapan pertama pola pembangunan semesta itu, hendaknja penjalur2 kebutuhan bahan2 pokok rakjat jang bukan Perusahaan Negara atau koperasi, hendaknja sudah akan hapus. Hal ini telah dibahas pula dalam Munaskop ke-1 di Surabaja jang telah bertekad akan berusaha menjelesaikannja pada achir tahun 1965, djadi lebih tjepat dari waktu jang ditetapkan oleh MPRS sendiri. Untuk mentjapai ini masalah pengorganisasian djuga telah mendapat penjorotan dari musjawarah, jang direntjanakan achir tahun 1963, disemua desa dan RK2 sudah akan terbentuk koperasi konsumsi.

Oleh karenanja , adalah penting sekali artinja kerdjasama kedua instansi ini (P.D.N. dan Gerakan Koperasi) untuk lebih mengintensifkan kerdja sama dalam mendistribusikan bahan2 kebutuhan pokok jang sekarang ini dan diharapkan pula adanja perbaikan2.

Sudah tentu, hal ini tidak akan dapat diartikan setjara berkelebih2an misalnja dengan adanja Induk Koperasi Konsumsi ini distribusi sudah beres sekaligus. Tidak demikian halnja, karena semuanja tidak tergantung kepada koperasi dan P.D.N. jang tergabung dlm. BPU. Misalnja sadja soal beras, J.U.B.M.-lah jang menentukan, gula ditentukan oleh Nivas, minjak oleh Stanvac/Shell, dan lain sebagainja.Tetapi Gerakan Koperasi telah madju selangkah kedepan. Kini koperasi2 konsumsi jang selama ini tumbuh di-daerah2 dengan pesatnja, telah berdjuang dengan segala energie jang ada, tetapi tidak mendapat penjelesaian seperti diharapkan. Sekarang adanja Induk Koperasi Konsumsi akan lebih mudah diketahui, sebab2 utama atau kuntji2 jang menjebabkan tidak lantjarnja distribusi ini setjara nasional.

Demikian Bagian Hubungan Masjarakat Departemen Transkopemada.

Sambutan Gubernur.

Gubernur Sumarno dalam kata sambutan tertulisnja a.l. menjatakan, bahwa sekarang ini Koperasi Konsumsi mempunjai tempat jang penting sekali, chususnja berkenaan dengan memetjahkan perdjuangan Irian Barat dengan dikeluarkannja Tri-Komando Rakjat.

Perdjuangan itu pasti tidak hanja menjangkut front depan, front belakang djuga, chususnja sandang pangan tidak kurang pentingnja untuk memelihara „moral" jang tinggi diantara penduduk sebagai pendukung dari pedjuang2 digaris depan.

Semoga dengan Pelantikan Pengurus-pengurus Induk Koperasi Konsumsi ini jang musjawarah dukung, menandakan kemadjuan pesat dalam bidang berkoperasi dan dengan demikian dipertebalnja semangat berdjuang dalam rangka pembebasan Irian Barat.

Terimalah uluran tangan kami memberi selamat disertai adjakan untuk bersama-sama membanting tulang, memeras keringat membina masjarakat dalam bidang Koperasi Konsumsi.

.... „Mengapa pemuda² Indonesia begitu antusias terhadap Manipol dan Ideologi Negara, adalah karena Manipol mentjerminkan harapan untuk hari depan.

Masa depan adalah masa keadilan dan kemakmuran, sedang masa lampau adalah masa feodal dan ketidak adilan ....".

Dr. Roeslan Abdulgani
(Diutjapkan dalam pertemuan ramah-tamah dengan delegasi Rumania, 13 Maret 1962).

Komando Rakjat jang ditjanangkan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tgl. 19 Des. 1961 di Jogjakarta mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh, baik dari segenap lapisan masjarakat maupun dari pelbagai organisasi rakjat. Djuga dari luar negeri terutama dari negara² sahabat kita. Bagi kita Komando Rakjat itu memang telah lama dinanti-nantikan dengan penuh kesabaran dan dengan kepala jang dingin, walaupun sebenarnja hati kita panas, ingin segera menjelesaikan/memasukan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Dibawah ini kami muat berturut² beberapa pernjataan dan dukungan² itu.

Berhubung pernjataan² dan dukungan² terhadap Komando Rakjat ini masih terus mengalir, maka akan kami hidangkan selandjutnja dalam nomor² jang akan datang.

*

Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia (IPPI) telah siap menjusun daftar kader² mereka jang akan diserahkan pada F.N. Djuga dikeluarkan seruan kepada pemuda peladjar untuk mendaftarkan diri dalam rangka mobilisasi umum.

*

Pernimpunan Sardjana Indonesia menjatakan dukungan sepenuhnja Tri-komando Rakjat, serta menjerukan kepada segenap anggotanja dan para tjendekiawan Indonesia supaja membantu menggalang persatuan nasional dan supaja senantiasa dalam keadaan siap siaga didalam lapang pekerdjaan masing².

*

Dewan Partai „Partai Murba" telah menginstruksikan dimana diserukan, agar mobilisasi umum seluruh kaum Murba Indonesia untuk melaksanakan Komando Rakjat dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Ranting² Partai diseluruh Indonesia diwadjibkan membentuk panitya² pendaftaran dan menjusun regu² terdiri dari 15 orang dipimpin oleh petugas² tjabang partai dalam lingkungannja masing².

*

Dewan Harian Pusat Angkatan '45 telah mengirimkan instruksi kepada Angkatan '45 seluruh Indonesia. Instruksi mana sbb:

a. soal pelaksanaan pendaftaran tenaga² sukarela untuk pembebasan Irian Barat.

b. Pedoman² dalam bidang pengamanan objek² vital untuk me-

njelamatkan perusahaan[2] vital dari aksi[2] sabot oleh musuh[2] revolusi.

e. soal[2] penting jang lain jang bertalian dengan situasi negara pada umumnja.

Diserukan pula kepada seluruh warga Angkatan 45 dimanapun mereka berada supaja setiap waktu segera memenuhi tugas negara, mentaati setiap Komando jang akan diberikan lebih landjut mengenai pembebasan Irian Barat oleh Presiden Sukarno Panglima Besar Pembebasan Irian Barat.

*

Persatuan Guru Katolik telah menjatakan siap sedia setiap saat melaksanakan „Tri Komando Rakjat" dan menjerukan kepada semua guru Katolik diseluruh Indonesia untuk melaksanakan Komando Rakjat dan siap sedia berangkat ke Irian Barat.

*

Propinsi Irian Barat („gaja baru") dibentuk.

Rapat Dewan Pertahanan Nasional dengan dihadiri oleh „Staf Operasi" Pembebasan Irian Barat, jang diadakan di Istana Bogor tgl. 31 Desember 1961 telah memutuskan membentuk Propinsi Irian Barat („gaja baru"), jang terdiri dari wilajah Irian Barat jang masih diduduki oleh Belanda dan jang dikenal sebagai „Residentie Nieuw Guinea" konsepsi Van Mook.

Sebagai Gubernur akan ditundjuk kemudian, ja'ni seorang putera Irian Barat.

*

Panglima Mandala untuk Irian Barat.

Kepala Negara telah menentukan Brigadir Djenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala. (Dengan keputusan Presiden no. 72/1962 beliau dinaikkan pangkatnja mendjadi major Djenderal) Ketentuan tsb. diambil didalam sebuah rapat Presiden dengan staf Operasi Komando Pembebasan Irian Barat pada hari Selasa tgl. 9 Djanuari 1962 di Istana Merdeka.

Brigdjen Soeharto dalam rangka mendjalankan tugasnja jang baru bermarkas besar di Makassar dengan didampingi oleh seorang dari Angkatan Laut dan seorang dari Angkatan Udara.

*

Rapat samudra rakjat Semarang.

Didalam suatu rapat samudra jang diadakan pada tgl. 30 Desember 1961 rakjat Semarang telah mengemukakan suatu pernjataan sbb:

a. Siap sedia melaksanakan Tri Komando Rakjat dengan segala konsekwensinja termasuk

menjiapkan pasukan sukarela.

b. Mendukung sepenuhnja pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan pengangkatan Presiden Sukarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi pembebasan Irian Barat.

c. Dalam rangka kesiapan perdjuangan pembebasan Irian Barat dan bersihnja Tanah air Indonesia dari sisa² kekuasaan kolonialisme Belanda, pentingnja diambil langkah² jang lebih progressif dan revolusioner, baik didalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan.

Pernjataan ini disampaikan kepada Presiden Sukarno, semua Menteri Kabinet R.I. di Djakarta serta pendjabat² resmi.

*

Instruksi Front Pemuda Djawa Barat.

Bertalian dengan ditjanangkannja Komando Rakjat oleh Presiden/Panglima Tertinggi Pembebasan Irain Barat Bung Karno pada tgl. 19 Desember jl di Jogjakarta, maka Front Pemuda Djawa Barat telah menginstruksikan kepada seluruh organisasi anggota Front Pemuda di Djawa Barat dan seluruh massa pemuda/peladjar/mahasiswa pendukung Proklamasi Agustus '45, supaja:

a. bergerak melaksanakan Komando Rakjat.

b. djangan bertindak sendiri², melainkan mengikuti pimpinan masing² dan pimpinan pelaksana komando didaerah masing².

c. lebih mempererat kesatuan dikalangan pemuda chususnja.

d. menjediakan diri untuk mempelopori revolusi pelaksanaan gerakan Komando Rakjat sebagai putera-puteri revolusi.

e. mendjadikan diri sebagai kekuatan fisik dari revolusi dan kali ini untuk melepaskan Irian Barat dari tjengkeraman kolonialis Belanda.

f. mengadakan kampanje dengan berbagai tjara dikalangan massa pemuda untuk menggerakkan seluruh kekuatan.

g. mengawasi setiap anasir jang akan melemparkan atau menghalangi terlaksananja Komando Rakjat.

h. mempersiapkan diri bilamana nanti mobilisasi umum dilaksanakan.

i. menjatukan diri dengan Front Pemuda dimana berada.

j. supaja organisasi² massa pemuda, terutama organisasi² massa pemuda jang mendjadi pendukung dari Front Pemuda mempelopori berdirinja Front Pemuda didaerah masing².

Instruksi tentang Organisasi Pertahanan Sipil.

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI-A-06303-1961 tertanggal 30 Desember 1961 tentang diwilajah Indonesia, maka guna pembentukan pertahanan sipil kelantjaran djalannja pembentukan serta melaksanakan Organisasi Pertahanan Sipil diwilajah Angkatan Darat tingkat DEP AD dan KODAM², Kepala Staf Angkatan Darat, Djenderal A. H. Nasution telah mengeluarkan instruksi No. 10-225-I tertanggal 30 Desember 1961 tentang ketentuan² jang harus dilaksanakan.

*

Obat²an untuk pembebasan Irian Barat.

Pada tanggal 6 Djanuari 1962 oleh para karyawan pharmasi telah disumbangkan sedjumlah obat²an kepada Palang Merah Indonesia untuk merealisasikan Komando Rakjat.

*

Pelantikan Komando Pembebasan Irian Barat untuk daerah Maluku.

Pada tanggal 4 Djanuari 1962 Panglima daerah militer XV, Pattimura, Letnan Kolonel Busiri telah melantik dengan resmi Komando Pembebasan Irian Barat untuk daerah Maluku.

Persendjataan² mengalir terus.

Kongres Persatuan Pemuda Taman Siswa (PPTS) di Jogjakarta telah mengambil keputusan mendukung Komando Rakjat dan menjatakan pula kesediaan pemuda² Taman Siswa untuk masuk training-centre guna mendapat didikan² kemiliteran untuk membebaskan Irian Barat.

Partisan² peladjar Sulawesi Tengah jang tergabung dalam IPPI menjatakan siap sedia diberangkatkan ke Irian Barat. Partisan² peladjar tersebut adalah bekas anggota Pasukan Partisan jang pernah bertempur membasmi pemberontak.

*

Rakjat Djember mendesak mobilisasi umum.

Dalam suatu rapat didaerah Djember baru² ini jang dihadiri oleh lebih kurang 100.000 orang mendesak supaja Presiden Sukarno segera memerintahkan pelaksanaan mobilisasi umum. Menurut wartawan „Antara" disana telah mentjatat 4.465 orang didaerah Djember jang telah mendaftarkan diri untuk mobilisasi umum, sedang anggota² Pemuda Demokrat Djember telah mempersiapkan 2500 anggotanja untuk segera diberangkatkan ke Irian Barat. Sementara itu se-

djumlah 1.221 anak sekolah telah siap pula berangkat untuk mengusir Belanda di Irian Barat.

40 Pemuda gelandangan siap dikirim ke Irian Barat

Berita dari Jogjakarta menjatakan, bahwa 40 pemuda tunawisma (gelandangan) dikota tersebut mendaftarkan diri sebagai Pasukan Sukarela jang setiap saat siap sedia dikirim ke Irian Barat.

*

Ramai² mendaftarkan diri untuk mendjadi Pasukan Sukarela

Kongres ke-1 Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) jang berlangsung di Jogjakarta pada achir tahun 1961 telah memutuskan, bahwa seluruh peserta kongres mendaftarkan diri kepada Front Nasional Jogjakarta, untuk mendjadi Pasukan Sukarela Pembebasan Irian Barat.

*

Seruan Pimpinan Umum Pusat „Persaudaraan Keluarga Sulawesi"

Pimpinan Umum Pusat „Persaudaraan Keluarga Sulawesi" menjerukan kepada seluruh anggotanja dan putera² Sulawesi umumnja supaja ikut mendjadi pelopor jang konsekwen dalam pelaksanaan Komando 19 Desember, serta mendaftarkan diri untuk mobilisasi umum bagi pembebasan Irian Barat.

Buruh siap laksanakan Tri-Komando

Konperensi Kerdja ke-I Pusat Pendidikan Buruh (PPB) jang berlangsung dari tgl. 4 sampai 19 Djanuari 1962 di Tjipajung (Djawa Barat) telah mengeluarkan pernjataan bahwa Pusat Pendidikan Buruh telah siap sedia melaksanakan Komando Rakjat.

*

Wakil² Panglima Mandala

Didalam rapat gabungan antara Gabungan Kepala² Staf dan Staf Operasi Pembebasan Irian Barat pada tgl. 11 Djanuari 1962 Kolonel Udara Omar Dani dan Kolonel Pelaut Subono masing² telah ditundjuk sebagai Wakil Panglima Mandala I dan II. Kolonel Omar Dani (kemudian diangkat mendjadi KSAU dengan pangkat Laksamana Muda dan sebagai gantinja ditundjuk Letkol Leo Wattimena).

*

Korps wartawan perang dibentuk

Pengurus Pusat Harian Persatuan Wartawan Indonesia dalam rapatnja tgl. 13 Djanuari 1962 telah mengambil keputusan untuk menginstruksikan kepada tjabang²/Perwakilan² PWI guna membentuk seksi luar biasa

Korps Wartawan Perang sebagai follow-up dukungan PWI atas Komando Rakjat.

Mahasiswa² tak mau ketinggalan

Sebanjak 65.000 mahasiswa Indonesia jang tergabung dalam 53 Dewan² dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi/Universitas/Instituut/Akademi, baik Negeri maupun Swasta seluruh Indonesia telah mulai melaksanakan Tri Komando. Langkah² permulaan telah dilaksanakan dan selandjutnja mereka menanti instruksi dari Pimpinan.

Dalam hubungan ini, Presidium beserta Madjelis Mahasiswa Indonesia (MMI) telah chusus menemui Kol Sokowati, Irdjentepra, untuk membitjarakan follow-up instruksi/radiogram KASAD dalam soal mobilisasi mahasiswa.

•

Karyawan buruh memenuhi panggilan Komando Rakjat

Pada tgl. 15 Djanuari 1962 Menteri/Sekdjen Pengurus Besar Front Nasional, Sudibjo telah menerima sedjumlah kurang lebih 600 orang anggota delegasi karyawan buruh SOBSI jang mewakili 10.000 pendaftar sukarelawan pembebasan Irian Barat.

*

Mengikuti latihan militer

Pada tanggal 25 Djanuari 1962 di Ungaran telah dilangsungkan pembukaan latihan kemiliteran bagi para wartawan Djawa Tengah. 40 Orang wartawan, termasuk djurupenerang, bagian pers pada djawatan² penerangan Djawa Tengah serta pegawai² RRI mengikuti latihan² ini dengan berpakaian seragam lengkap.

*

Bataljon Mahasiswa dilantik

MKN/KASAD Djenderal A. H. Nasution baru² ini telah melantik bataljon mahasiswa pertama jang terdiri dari 3 kompi mahasiswa jang terlatih dan 4 kompi jang belum terlatih dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Indonesia di Salemba 4 Djakarta.

> *Tidak ada satu bangsa bisa mendjadi satu bangsa jang besar tanpa risk.*
>
> *PRESIDEN SUKARNO.*
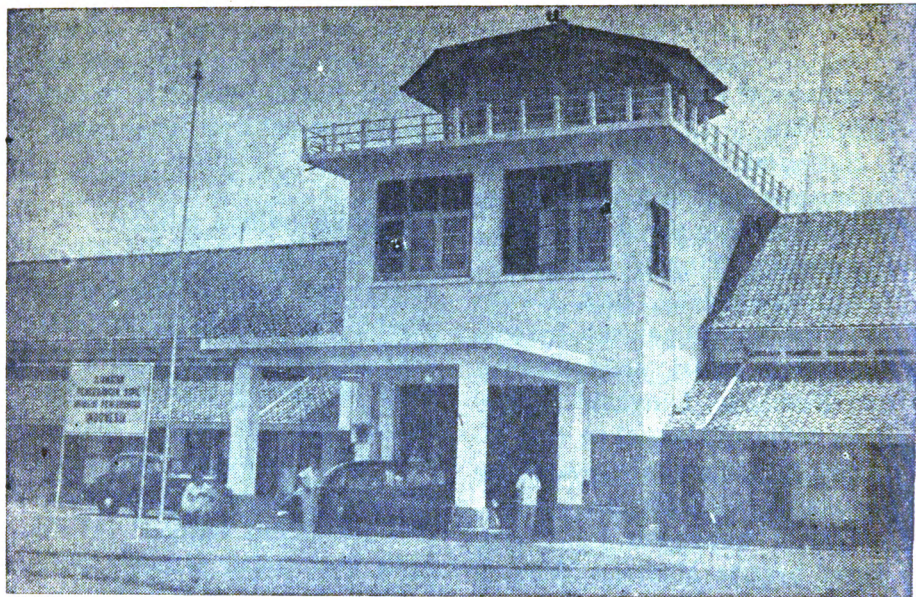
Gedung Akademi Penerbangan Indonesia di Tjurug, Tanggerang.

MEMPERKUAT BENTENG UDARA

KITA sama mengetahui, bahwa kita sebagai satu bangsa jang tadinja beratus-ratus tahun tidak merdeka, beratus-ratus tahun didjadjah orang lain, masjarakat beratus-ratus tahun dikotjar-katjirkan, beratus-ratus tahun didjadikan suatu bangsa jang papa-sengsara, kita jang kemudian dari pada itu mengadakan satu gerakan nasional jang telah meminta korban seberat-beratnja dari pada masjarakat Bangsa Indonesia dan achirnja sjukur alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mentjapai kemerdekaan.

Kemerdekaan dari pada Bangsa Indonesia itu adalah suatu djembatan untuk menudju kepada dan achirnja mentjapai tjita^2 Bangsa Indonesia jang pokok, jaitu satu masjarakat jang adil dan makmur, suatu masjarakat jang tiap^2 warga negara dapat hidup sedjahtera didalamnja, satu masjarakat tanpa penindasan, satu masjarakat tanpa exploitation de l'homme par l' homme, satu masjarakat jang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Tugas kita antara 17 Agustus

1945 sampai kepada kini berupa pada hakekatnja tak lain dan tak bukan menjempurnakan djembatan itu.

Kemerdekaan jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mengandung pesanan luhur supaja diisi dengan pembangunan. Membangun mempunjai arti jang sangat luas, jaitu membangun dalam segala bidang kehidupan Negara dan masjarakat, membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebudajaan.

Untuk memenuhi pesanan luhur ini Djawatan Penerbangan Sipil telah lama berbuat dan bertindak. Salah satu dari usahanja itu ialah mendirikan Akademi Penerbangan Indonesia di Tjurug, Tangerang.

Pada tanggal 10 Djanuari 1962 telah dilakukan upatjara pemberian idjazah kepada para siswanja jang telah berhasil lulus dibidang tehnik penerbangan. Hadlir a.l. Menteri Perhubungan Udara, Kepala Djawatan Penerbangan Sipil, para wartawan dan undangan lainnja. Pada upatjara pemberian idjazah itu Kepala Djawatan Penerbangan Sipil, Ir. Soetomo Adisasmito telah menjampaikan pidato sambutannja a.l. sebagai berikut: „Pada hari ini kita menjaksikan peristiwa jang penting, jang mengisi lembaran baru daripada tahun 1962, jaitu dengan selesainja pendidikan daripada sedjumlah kader-kader tehnik penerbangan, jang akan mengisi dan memperkuat benteng-benteng udara dipelbagai bidang, jaitu dibidang tehnik telekomunikasi, aircraft engineering mechanic, aircraft electrical mechanic dan bidang perhubungan radio. Mereka ini akan merupakan team operasionil didaratan jang tidak akan kurang pentingnja dengan team operasionil diudara, karena mereka turut partisipasi dalam usaha membina keselamatan dan keamanan navigasi udara menudju penerbangan jang sempurna.

Selandjutnja dikatakan, sebagaimana telah maklum, bahwa keadaan alamiah telah mejakinkan manusia untuk memilih perhubungan udara sebagai alat penghubung jang terbaik, terpraktis dan tertjepat dalam usaha memperkokoh dan memperdekat hubungan antar manusia, antar daerah, antar pulau, antar negara, antar benua dan bahkan antar pelanit dimasa jang akan datang.

Demikian pula tanah air kita jang geografis terdiri dari pulau2 jang berserakan dan terdiri dari daerah² pegunungan jang sukar dihubungkan dengan djalan daratan, mejakinkan kita untuk memilih perhubungan udara sebagai alat-perhubungan jang sesuai dan jang

segera dapat memperbaiki perekonomian negara untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat menudju negara jang adil dan makmur.

Pembangunan dibidang penerbangan sipil harus bergerak tidak hanja seirama dengan roda revolusi kita jang harus segera diselesaikan untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. tapi djuga sedjalan dengan roda revolusi dunia penerbangan jang sangat berpengaruh.

Kedua roda ini, kata Ir. Soetomo akan mendjelmakan kreasi2 gabungan jang mewudjudkan perpaduan antara kebutuhan2 nasional dan internasional jang tentunja menuntut keuletan, ketabahan terutama kwalita2 mental jang revolusioner dialektis dalam usaha sinkronisasi kedua tantangan itu.

Uraian² tadi kiranja akan dapat memberikan gambaran kepada mereka jang segera akan terdjun kedalam masjarakat, kearah mana perdjalanan kita akan menudju serta dengan ketjepatan berapa kita harus berlari.

Selandjutnja beliau berpesan pula, bahwa dalam orientasi penghidupan baru didalam masjarakat hendaknja dilakukan dengan segala kerelaan, pengertian dan keinsjafan sehingga saudara² tidak akan menemui banjak kesukaran² selama menjeberangi djembatan-peralihan menudju kepenghidupan baru.

Achirnja beliau menjerukan: „amalkanlah ilmu-pengetahuan jg.
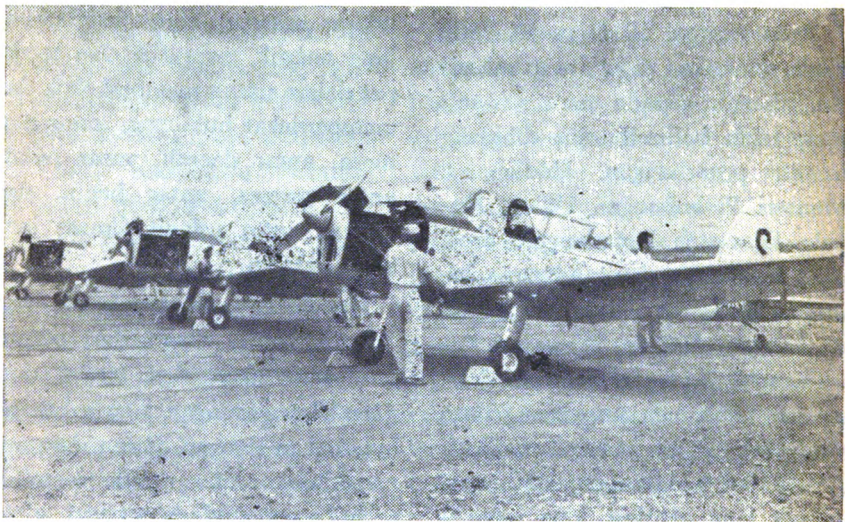
Pesawat-pesawat terbang jang digunakan untuk berlatih.

telah diperoleh dari pendidikan itu untuk kepentingan masjarakat, hindarkanlah exces2 dan tindakan2 jg. hanja untuk kepentingan2 pribadi. Djadilah orang2 jang berdjiwa besar, berdjiwa patriotik jang akan banjak memberikan arti terhadap nusa dan bangsa kita". Dan tak lupa pula beliau mengutjapkan:

„Selamat" kepada jang baru lulus dan terima kasih kepada para instructors.

Menteri Perhubungan Udara Komodor Iskandar dalam kata sambutannja a.l. menekankan pentingnja arti perhubungan udara dewasa ini, terutama dalam hubungannja dengan Trikomando Rakjat untuk merebut Irian Barat dari tangan kolonialis Belanda.

Terhadap para Siswa2 API jang baru lulus Menteri mengandjurkan adanja kerelaan untuk berkorban setiap saat. Kita harus menjokong kejakinan pemerintah dalam usahanja untuk membebaskan Irian Barat. Dalam arti kesiap siagaan dimaksudkan bahwa Siswa2 API sudah siap dalam tugasnja melaksanakan pengangkutan2 udara setiap waktu untuk mengangkut pasukan2 sukarela ke Irian Barat.

Kepada Siswa2 jang kini masih mengikuti pendidikan Menteri mengandjurkan supaja mereka beladjar dengan giat dan bertekun. Kita sedang dalam taraf revolusi udara untuk mentjapai suatu perhubungan udara jang lebih baik setaraf dengan dunia lainnja. Karena itu terletak pada saudara2lah mundur madjunja usaha ini. Demikian Menteri Perhubungan Udara Komodor Iskandar.

Sebelum itu lebih dahulu telah mengutjapkan pidato pengantarnja Direktur Akademi Penerbangan Indonesia antara lain mendjelaskan sekelumit riwajat dari Akademi itu sedjak berdirinja hingga kini diantaranja demikian".

Akademi Penerbangan Indonesia ini didirikan pada tanggal 1 Djuni 1952 dengan bantuan tenaga2 pengadjar asing jang mendapat bantuan dari I.C.A.O., Colomboplan maupun dengan direct contract perseorangan."

Pada saat ini, menurut keterangan Direktur Akademi tersebut, masih ada 3 orang Instr. Asing jaitu masing2 dari I.C.A.O., Colomboplan India dan Colomboplan Canada.

Bantuan2 jang diterima oleh Akademi itu, baik moril maupun materiil dari instansi2 lainnja ba-
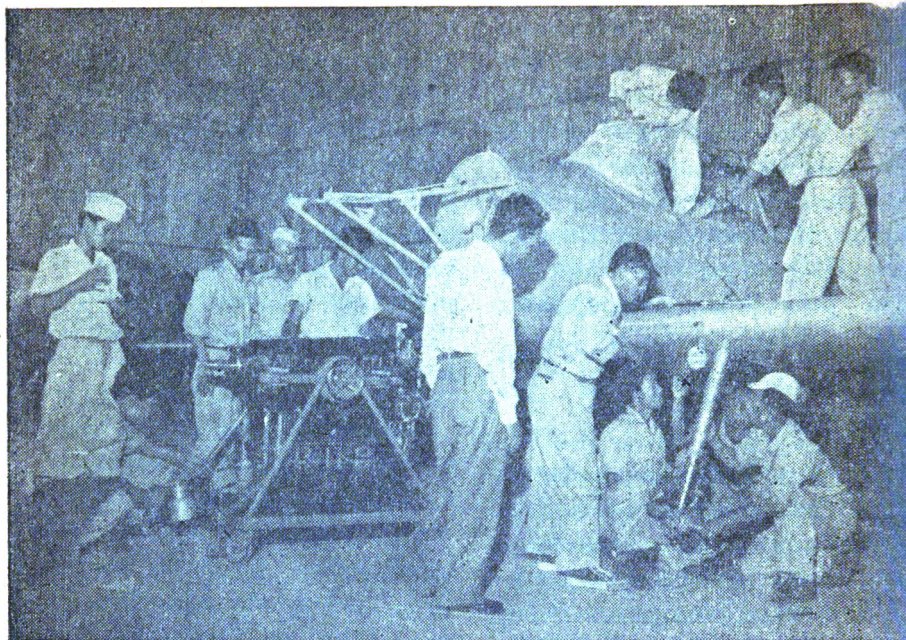
Para siswa dengan giat mempeladjari membongkar/menjetel mesin-mesin pesawat.

njak sekali, terutama dari I.C.A.O., Colomboplan India, Australia, Canada, Stanvac, P.N. Garuda. Djuga dari AURI diantaranja berupa pesawat2 terbang pelatih dan sebuah pesawat terbang Dakota, dan bantuan dari pihak kepolisian.

Pendidikan jang diadakan pada Akademi Penerbangan Indonesia ini ada 13 matjam jang meliputi hampir semua matjam pendidikan jang dibutuhkan dalam dunia penerbangan sipil jaitu:

1. Penerbang. 2. Sjahbandar. 3. A.T.C. 4. Air. Eng. Eng. 5. Radio Eng. 6. Eng. Instr. Co. 7. Pilot Gv. I. Co. 8. As. E. Mech. 9. A.E.L. 10. R.M. 11. R.O. 12. T.P. 13. Nav. Course.

Mengenai hasil2 pendidikan sedjak berdirinja tahun 1952 hingga 1961 adalah sebagai berikut:

1. Pilot I — VII — 99 orang — twin Eng. — 10 orang — Single Eng.
2. Sjahbandar Ud. I —II — 30 orang.
3. A.T.C.I/VII — 108 orang.

4. A. & Eng. I — 28 orang.
5. Radio E I — 26 orang.
6. Eng. Instr. Co I — 11 orang.
7. Pilot Gv. Instr. Co I — 2 orang.
8. A. & E. I/VI — 96 orang.
9. A.E.L. I — 12 orang.
10. R.M. I/V — 99 orang.
11. R.O. I/IV termasuk Upgr. — 46 orang.
12. T.P. — 137 orang.

Djumlah 704 orang.

Dinjatakan pula oleh Direktur Akademi Penerbangan Indonesia, bahwa pada hari itu diberikan idjazah kepada para siswa:

1. Radio Mechanic Co V — 30 orang.
2. Aircr. Eng. Mech. Co VI — 16 orang.
3. Aircr. Electr. Mech. Co I — 12 orang.
4. Radio Operators Up. Co II — 8 orang.

Selain itu sebagai tambahan diberi pula idjazah kepada Aircraft & Engine Instructors Course sebanjak 11 orang.

Demikian a.l. pendjelasan singkat dari Direktur Akademi Penerbangan Indonesia.

Untuk djelasnja dimuat pula disini nama2 siswa jang telah lulus dari masing2 djurusan.

RADIO MECHANIC CO V (R.M. V).

No. Urut Kepandaian	N a m a	Berasal dari
A. Jang lulus pada udjian pertama (22 orang).		
1.	A. Dahlan	Surabaja
2.	A. Hamzah Effendi	Tarakan
3.	S a h a n a	Kertosono
4.	D o m o	Sumedang
5.	S w a r t o	Bodjonegoro
6.	I Made Elya	Denpassar
7.	S u j o k o	Djakarta
8.	Mudzakkir	M a l a n g
9.	P a l u w i	L a w a n g
10.	Tohawi Jahja	Palembang.
11.	R. Sukarsono	Purwokerto

12.	Norong Gurusinga	M e d a n
13.	Awan Setiawan	Tjiamis
14.	Boedijono	M a d i u n
15.	Prihadi	Bandung
16.	Terangate Purba	M e d a n
17.	M. Toha Ramdani	Bandung
18.	S i s w o j o	Kebumen
19.	Subuh Ismangil	Tjilatjap
20.	Trimurtijanto	Bojolali
21.	S u j o n o	Karanganjar
22.	Jusuf Suwandi	Bandung

B. *Jang lulus setelah udjian ke dua (8 orang).*

1.	M u l j o n o	M a l a n g
2.	Eddy Hartono	Wonosobo
3.	Muchaimin	Tjirebon
4.	Djamzuri	S o l o
5.	Victor Gultom	Pematang Siantar
6.	S u m e d i	Bandung
7.	Hadiwalujo	Banjumas
8.	Anang Marsidik	Bandung

AIRCRAFT ENGINE MECHANIC CO VI (A.E.M. VI)

No. Urut Kepandaian	N a m a	Berasal dari
1.	I Njoman Sukadana	Tabanan
2.	Moh. Sajuti	Surabaja
3.	Muchlas Apendis	B o g o r
4.	Soetirto	Denpassar
5.	R. Soedarsono	Djogja
6.	Zakaria H. Talib	Bangka
7.	Hadi Prijono	Kertosono
8.	Udansjah	G a r u t
9.	Entje Jahja	Banjuwangi
10.	Kundarto	Purwokerto
11.	Sawaluddin	Denpassar
12.	Sukandar	Djakarta

13.	Antonius M.	Surabaja
14.	Budi Sukamto	Semarang
15.	S u p a r	S o l o
16.	Nam Hardani	Kediri

AIRCRAFT ELECTRICAL M ECHANIC CO. I (A. EL. M. I)

No. Urut Kepandaian	N a m a	Berasal dari
1.	Joeharso	Purwokerto
2.	R i d w a n	Kediri
3.	Siradjuddin T.	Gorontalo
4.	I. Margijanto	T j e p u
5.	F. S. Macawalang	Menado
6.	S o e t o m o	S o l o
7.	I Made Rebik	Denpassar
8.	Ag. Sukarno	Malang
9.	Risnadi	K u d u s
10.	Achmad Basuki	Djogja
11.	Mat Adji	Probolinggo
12.	Harjogo	T j e p u

UPGRADING RADIO OPERATOR CO. II (U.R.O. II)

No. Urut Lulus	N a m a	Berasal dari
1.	K u s n a n	Tandjung Karang
2.	Soemiran	M a d i u n
3.	Sahid Sunan	Bengkulu
4.	U'ung Huraerah	Djakarta
5.	Moch. Sjukur	Kertosono
6.	Soeranto	Semarang
7.	Soemarsono	B l i t a r
8.	Musa Manik	Tapanuli

ALMARHUM MOHD. HUSNI THAMRIN

MOHD. HOESNI THAMRIN Almarhum, namanja dikenal tidak sadja oleh kaum pergerakan — putera-puteri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pula oleh dunia luar. Lebih2 lagi bagi „anak2 Djakarta" dari golongan atasan sampai kepada golongan bawahan sama mengenalnja. Pintu rumahnja terbuka lebar bagi siapa sadja, karena memang Almarhum orang jang suka bergaul-peramah dan periang. Disamping itu seorang sosiawan, orator ulung, pedjuang/pahlawan dan tokoh Nasional kaliber besar.

Tanggal 11 Djanuari bulan ini, 21 Tahun sudah ia meninggalkan kita untuk selama-lamanja pulang ke Rahmatullah. Namun djasa-djasanja jang sangat besar itu terhadap masjarakat Indonesia pada umumnja dan pada masjarakat Djakarta Raya pada chususnja tidak dapat diabaikan begitu sadja. Beliau adalah seorang tokoh Nasional Indonesia kaliber besar jang dalam hidupnja banjak mentjurahkan tenaga dan pikiran untuk perdjuangan Nusa dan Bangsa dalam mentjapai kemerdekaan Negaranja. Sebagaimana diketahui, bahwa Almarhum Thamrin bukan berdjuang di Dewan Gemeenteraad dan Volksraad sadja, bahkan diluar Dewanpun Almarhum telah memperdjuangkan nasib masjarakat pada umumnja dan anak2 Djakarta pada chususnja.

Sebelum Almarhum mentjeburkan dirinja dalam Parindra, aktief dalam Perkumpulan Kaum Betawi (PKB), sehingga Almarhum pernah mendjadi Ketua pergerakan Persatuan Partai Politik Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.) mewakili kaum Betawi. Setelah Budi Oetomo dan P.B.I. dilebur mendjadi Parindra, Almarhum aktief dalam Gapi dan mendjadi Ketua Departemen Politik Parindra.

Almarhum mulai mendjedjakkan kakinja dalam Dewan Gemeenteraad pada tahun 1919 ialah diwaktu terdjadinja pemilihan anggauta Gemeenteraad Betawi, dan pada waktu itu Almarhum telah terpilih mewakili Kaum Betawi. Sedjak itulah kelihatan tanda2 ketjakapannja dan ketangkasannja. Pidatonja jang tadjam dan berapi-api, houdingnja jang gagah dan sifatnja jang berterus-terang dan pantang mundur sehingga Almarhum mendjadi Populair karenanja. Kemudian pada tahun 1927 mulailah Almarhum menduduki Gedung Volksraad dimana sedjak waktu itu tidak lepas2 lagi dari tangannja. Pada pemilihan periode kedua (tahun 1931). periode ketiga (tahun 1935) dan periode keempat (tahun 1939) Almarhum tetap terpilih, bahkan dari satu periode kesatu periode, kepertjajaan orang kepadanja sebagai wakil rakjat jang akan membela dan mempertahankan hak dan kepentingan mereka bertambah-tambah tebal dan besar. Pada waktu Almarhum wafat, selain tetap mendjadi anggauta Volksraad pun kepada Almarhum dipertjajakan memegang djabatan Vice-Voorzitter Volksraad dan College van Gedelegeerden.

Sdr. R.P. Suroso, salah seorang kawan seperdjuangan Almarhum dalam suatu peringatan hari ulang tahun wafatnja Almarhum Mohd. Hoesni Thamrin dalam pidato sambutannja pernah mengatakan diantaranja demikian: „Pernah kedjadian selama debat dalam Volksraad, jang tidak mudah saja lupakan, jaitu pada waktu pihak Fraksi Nasional membela tudjuannja, Indonesia merdeka, terlepas dari negeri Belanda, terdengar pertanjaan dari pihak anggota Belanda, ialah apakah terlepas dari „Oranje", serta didjawab, sudah tentu terlepas dari „Oranje", maka gaduhlah dipihak anggota Belanda, kelihatan mereka itu marah betul. Sebaliknja pada Fraksi Nasional tersenjum dengan tenang.

Pada waktu Bung Karno dipindahkan tempat pembuangannja dari Flores ke Bengkulu, singgah di Djakarta dan mampir dirumah saudara Thamrin, jang menerima Bung Karno dengan tidak ragu2, sehingga pada waktu politik internasional sudah mendjadi hangat dan telah dekat pada perang dunia kedua, saudara Thamrin berani menerima seorang mahasiswa dari Djepang, jang membikin bertambah tjemburunja Pemerintah Belanda kepada saudara Thamrin.

Mengingat keadaan politik pada waktu itu adalah berani perbuatan saudara Thamrin dan me-

ngandung banjak risiko. Tetapi risiko sedemikian itu bagi pedjuang kemerdekaan sudah bukan soal lagi.

Tidaklah heran, bahwa gerak-geriknja saudara Thamrin diamat-amati dengan amat teliti oleh prokrul djenderal Belanda.

Orang hendaknja dapat mengetahui djuga, bahwa saudara Thamrin diluar Volksraad bekerdja aktief djuga dalam lapangan politik. Dengan giat sekali saudara Thamrin berusaha mempersatukan gerakan nasional. supaja mendjadi kuat menghadapi Pemerintah Belanda.

Saudara Thamrin dengan siasatnja dalam memperdjuangkan kemerdekaan tanah air kita, sungguh telah berdjasa besar. Djika kiranja beliau dikaruniai pandjang umur, sehingga dapat mengikuti sepenuhnja perdjuangan kita hingga sekarang, maka saja pertjaja, bahwa saudara Thamrin akan dapat berbuat lebih berdjasa lagi bagi nusa dan bangsa kita".

Baiklah disitir pula disini perkataan Jang Mulia Menteri Pertama Ir. H. Djuanda, djuga sebagai salah seorang kawan seperdjuangan Almarhum, dalam peringatan hari wafatnja Almarhum Mohd. Hoesni Thamrin a.l. demikian: „Dalam memperingati hari wafatnja Almarhum Mohamad Hoesni Thamrin terkenanglah pada saja masa Beliau masih ditengah-tengah kita sebagai pengandjur dan pemimpin pergerakan Bangsa Indonesia. Saja merasa sjukur telah dapat mengenal Beliau itu dari dekat. Dari th. '33 sampai 1937 bersama-sama kami duduk sebagi anggotaGemeenteraad. Dalam gerakan P.P.P.K.I saja dapat mengenal Beliau sebagai pemimpin jang pandai tangkas dan berani. Beliau bukan sadja seorang jang pandai berpidato dimuka rapat-rapat raksasa, pula ketadjaman Beliau sebagai pemimpin sangat mengagumkan, dan kami jang berdekatan dengan Beliau senantiasa merasa mendapat bimbingan dan peladjaran sebaik baiknja.".

Untuk kepentingan perdjuangan, disamping tenaga dan pikiran pula ta' segan-segan Almarhum mengorbankan hartanja, baik berupa uang maupun benda. Bagi setiap orang pergerakan chususnja dan masjarakat Indonesia umumnja kenal Gedung Pertemuan Umum Gang Kenari sumbangannja. Selain itu mendjadi Bendahara Fonds Nasional dan Pendiri Internaat „Batavia" dan sebagai Pelindung Perguruan Taman Siswa.

Sebagai seorang Nasionalis Almarhum menggempur habis-ha

bisan dalam sidang Volksraad mengenai masalah Poenale Sanctie. Sebelum tjita-tjita tertjapai Almarhum djatuh ditengah djalan dipanggil kembali oleh Tuhan Jang Maha Esa. Benar djuga kata pribahasa asing jang demikian bunjinja: „Man proposes, God disposes" — Manusia hanja dapat merentjanakan, tetapi Tuhan menentukan.

Sebagai penghargaan kepada Almarhum, maka oleh Presiden Republik Indonesia dalam keputusannja no. 175 tgl. 28 Djuli '60 Almarhum Mohammad Hoesni Thamrin telah dinjatakan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dan dianugerahi setjara anumerta „Bintang Mahaputra tingkat II".

Bertepatan dengan Hari Pahlawan 1961 telah dikeluarkan perangko seri Pahlawan dimana diantaranja termasuk Almarhum Mohd. Hoesni Thamrin.

Penghargaan kepada Beliau tak hanja sampai disitu sadja. Namanja diabadikan pula oleh Gubernur Sumarno dengan dibentuknja Badan Koordinasi Universitas Mohamad Hoesni Tahmrin, dimana bertepatan dengan hari wafatnja, P.J.M. Presiden Soekarno memberikan kuliahnja jang pertama.

Selain itu telah dibentuk pula sebuah jajasan jang diberi nama „Jajasan Mohd. Hoesni Thamrin", atau disingkat „Jajasan Thamrin", jang diketuai oleh Jang Mulia Menteri Kesehatan, Kol. Dr. Abdul Azis Saleh.

Dalam Anggaran Dasarnja, Pasal 3 tudjuan jajasan adalah: „Mendjalankan usaha-usaha pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan untuk Rakjat di Daerah Kotapradja Djakarta Raya chususnja, Republik Indonesia umumnja, sesuai dengan tjita-tjita Almarhum Mohamad Hoesni Tham rin".

Dalam kita memperingati hari wafatnja Almarhum Mohamad Hoesni Thamrin, mengenangkan djasa-djasanja kepada Bangsa dan Negara, marilah kita mendo'a semoga arwahnja diterima Tuhan Jang Maha Esa dan mendapat tempat jang selajaknja.

Mohamad Husni Thamrin telah pergi untuk selama-lamanja. Tetapi djasanja tetap tertulis dengan tinta emas dihalaman sedjarah.

Djasadnja boleh hilang dari pemandangan; tetapi semangat dan djasanja tetap mendjadi kenangan.

Tjita2nja tetap hidup terus mendjadi tjita2 kita.

PERKEMBANGAN FILM DALAM REVOLUSI NASIONAL

Oleh: MARDHANI SARJONO DIPO, M.A.
Kepala bagian produksi merangkap pimpinan harian P.F.N.

Pengaruh film.

Setelah menempuh djalan sedjarahnja selama 50 hingga 60 tahun hingga sekarang ini, film telah dapat mentjapai kedudukannja jang sangat penting didalam masjarakat, baik dinegara-negara sosialis, negara2 Barat, dan di Asia-Afrika. Kebutuhan akan film dirasakan benar oleh segala lapisan rakjat didalam masjarakat. Di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan antara lain, bahwa rakjat dan fihak2 jang berwenang didaerah-daerah menghendaki dan berusaha agar sistim distribusi dan penjelenggara-pemutaran film lebih diawasi oleh Pemerintah, sehingga film2 Indonesia jang bermutu, baik produksi P.F.N. maupun perusahaan2 swasta, dapat disampaikan kepada rakjat diseluruh Indonesia. Selain itu, djuga kepada P.F.N. pada achir-alhir ini makin bertambah datangnja permintaan2 dari pelbagai kalangan untuk pembikinan film dan permintaan atau pemindjaman film2.

Diluar negeri, kebutuhan rakjat akan film dapat dibuktikan dengan makin banjaknja djumlah pengusaha2 film dan makin berkembangnja perusahaan2 film itu.

Sudah mendjadi pengertian umum, bahwa film kini merupapakan *Mass-media* jang sangat besar *pengaruhnja* terhadap masjarakat. Pengaruh itu ternjata lebih kuat dan lebih tjepat effeknja dari pada pengaruh2 jang ditimbulkan oleh pers dan radio. Pengaruh jang dibawakan atau ditimbulkan oleh film adalah pengaruh *kedjiwaan.*

Djustru karena adanja pengaruh kedjiwaan pada film, maka film dinjatakan sebagai mass-media jang terpenting, didalam pembentukan opini dan djiwa masjarakat.

Pengertian sematjam ini telah lama ada dinegeri Sovjet, Amerika, Djerman, Djepang dan lain2 negara jang telah madju. Di *Rusia,* setelah berhasilnja Revolusi 1917, segera dalam tahun 1919 seluruh perusahaan dan studio dinasionalisir dan ditempatkan di bawah pimpinan serta pengawasan negara. Sementara itu untuk

dapat memberikan pengertian baru mengenai perfilman dan untuk menanamkan serta menjebarkan semangat dan djiwa revolusi 1917, segera didirikan Sekolah Tinggi atau Akademi Cinematography di Moskow, dan mulai dididiklah kader2 muda perfilman jang sangat diperlukan oleh masjarakat dan negara pada waktu itu.

Djika kita melihat sedjarah perfilman di Sovjet Unie terbukti benar bahwa film merupakan *pentjerminan* dari keadaan masjarakat dan djiwa rakjat. Hal ini diakui oleh para ahli perfilman diseluruh dunia, terutama sekali setelah mereka menjaksikan beberapa film produksi Sovjet pada tahun2 sehabis 1919, seperti BATTLE SHIP POTEMKIN, TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD, MOTHER dan lain2 hasil karya tokoh2 film Sovjet, S.M Eisenstein dan Pudovkin.

Tindakan2 jang progressif di Sovjet itu, didjiwai oleh pemimpin rakjat, Lenin, jang telah mengatakan antara lain mengenai film: *„When the masses take possession of the film and it comes into the hands of true supporters of socialist culture, it will become one of the most powerful means of eduiating the masses."*

Di *Amerika*, kegunaan dan kepentingannja bagi masjarakat sudah mulai terasa dan disadari disekitar thn. '07, sewaktu film masih merupakan „baji". Pada waktu itu negeri tersebut kebandjiran kaum imigrant dari Eropa. Mereka itu umumnja masih buta huruf dan tidak mengerti bahasa Inggeris, bahasa jang berlaku di Amerika. Tapi dengan perantaraan film, jang pada waktu itu terkenal dengan nama *nickelo*- waktu jang singkat dapat menjesuaikan diri dengan keadaan masjarakat setempat.

Di *Indonesia*, perkembangan film ketaraf pengertian jg. lebih luas, dimulai pada permulaan tahun 1942, jakni dalam masa pendudukan Pemerintahan Tentara Djepang. Untuk berhasilnja propaganda peperangan „Asia Timur Raya", perfilman di Indonesia ditempatkan dibawah Barisan Propaganda atau sendenbu dari Pemerintah Pendudukan Djepang. Semua studio dan perusahaan ditutup. sedang semua alat-alatnja dipusatkan dalam satu perusahaan jang disebut Nippon Eiga Sha. Semendjak itu produksi dan distribusinja langsung diatur oleh Pemerintah Pendudukan Djepang, jang langsung mendapat petundjuk-petundjuk dan ketentuan dari Tokio. (Pada

waktu itu tjara jang demikian berlaku pula di Djepang).

Film tjerita dan dokumenter.

Kalau kami berbitjara tentang film dan perfilman, hendaknja djangan dimaksudkan hanja mengenai film2 tjerita dan film2 jang semata-mata disaksikan dibioskop-bioskop untuk umum dibios-Anggapan jang sempit dan tidak benar itu harus dihilangkan. Hendaknja diketahui, bahwa disamping adanja dunia *film tjerita,* terdapat pula *dunia film dokumenter.* Kedua matjam film ini mempunjai sedjarah perkembangannja masing2. Keduanja mempunjai sifat dan persoalan jang tidak sama, meskipun sifat2nja jang chas sebagai film tetap tidak berlainan, jakni sebagai expressi dari pada tjita-rasa seorang seniman, dan dua2nja adalah mengandung pengaruh kedjiwaan terhadap peminatnja (penonton, masjarakat, atau rakjat).

Bagaimanakah perkembangan film tjeritera di Indonesia?

Djika kita menoleh kembali dan menelaah perkembangan film tjerita dari tahun2 setelah penjerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia hingga sekarang ini boleh dikatakan dan kita harus berani mengakui, bahwa perkembangan film tjerita tidak mentjapai kemadjuan jang memuaskan bila ditindjau dari sudut ***tehnik, isi atau thema, artistik, organisasi, dan sudut komersiilnja.***

Ini semua sudah pasti disebabkan karena adanja beberapa hal. Umpamanja karena adanja kesulitan bahan2 baku dan alat2 cinematografi, kurangnja tenaga ahli, tidak lantjarnja distribusi dan penjelenggaraannja di-bioskop2, dan lain sebagainja. Tapi sebab utama jang mendjadi sebab tidak lantjarnja perkembangan film di Indonesia adalah sama dengan apa jang terdjadi dibeberapa negara, jakni karena *situasi politik dan ekonomi didalam negeri,* dan lagi karena belum adanja *garis jg tegas* dari fihak Pemerintah jg dapat dan harus mendjadi *pegangan* bagi setiap pengusaha film di Indonesia. Umumnja perhatian hanja ditudjukan kepada segi2 *komersiil.* Ini terutama dilakukan oleh para pengusaha film jang bukan nasional, tapi djustru jang djumlah dan kekuatan modal usahanja lebih besar dari pada pengusaha2 film nasional. Mereka itu adalah se-mata2 melangsungkan tradisi dan riwajat lama jang ditempuhnja sedjak zaman pendjadjahan. Mereka mengabaikan dan tidak mau mengerti akan tjita2 untuk

mengangkat deradjat manusia Indonesia menudju kepada kebudajaan Indonesia jang baru. Dan, last but not least, mereka telah mengabaikan tjita2 untuk perkembangan dunia film Indonesia sendiri.

Kalau seandainja ada pengakuan bahwa tudjuan jang utama dari pada perfilman Indonesia adalah komersiil, maka itupun kami sangsikan akan kemungkinan akan berhasilnja. Sebab, pada waktu itu, dan mungkin sekarang ini djuga belum banjak perubahan. terdapat Peraturan2 Pemerintah jang kurang sesuai dan bahkan memberatkan pengusaha film untuk dapat mentjapai tudjuan-tudjuan komersiil.

Usaha dibidang perfilman memang memerlukan biaja jang tidak ketjil. Dan untuk dapat melangsungkan hidupnja perusahaan memang harus ada keuntungan. Tapi, kalau keuntungan semata2 jang mendjadi pangkal bertolak dan tudjuan jang terachir, maka film hanja akan meru pakan barang dagangan semata-mata. Bila film telah didjadikan barang perdagangan se-mata2 maka itu adalah suatu tanda bahwa kemerosotan moral pasti akan terdjadi dikalangan rakjat. Ini jang bukan kita kehendaki dan harus diusahakan dengan segala daja agar supaja tidak terdjadi.

Kemudian, bagaimanakah perkembangan *film dokumenter* di Indonesia selama ini? Dari sudut komersiil, nasib film dokumenter djauh ketinggalan dari pada apa jang ditjapai oleh film tjerita. Ini bukan karena mutu tehnik film dokumenter masih kurang sempurna atau karena rakjat tidak menjukai film dokumenter, tapi sebab jang utama adalah karena:

a. Belum adanja peraturan jang tegas mengenai sjarat2 tentang pemutaran film2 dokumenter dibioskop2.
b. Belum adanja bioskop2 chusus jang hanja menjelenggarakan pemutaran film2 dokumenter.
c. Didalam masjarakat, ketjuali dibioskop2 umum, masih sedikit sekali djumlah projector jang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pemutaran film2 oleh badan2, perkumpulan2 penggemar film. murid2 sekolah, mahasiswa2, dan lain-lain kelompok atau golongan rakjat, dan
d. Karena kurang dipupuknja pengertian mengenai pentingnja film dokumenter dalam masjarakat Indonesia.

Produksi film dokumenter di Indonesia dilakukan terutama oleh Perusahaan Film Negara di Djakarta. Sampai pada waktu ini

telah ratusan djumlah film jang telah dihasilkan, pandjang dan pendek serta ber-matjam2 sifatnja. Tapi, sangat kami sajangkan, bahwa karena adanja faktor-faktor tersebut a sampai d diatas, dan lagi karena kurang diusahakannja *tjara2* mengenai peredaran dan pemutarannja pada waktu jang lampau, maka film2 berharga jang dengan susah-pajah diprodusirnja itu kurang dapat mentjapai *target-nja*, sehingga dengan sendirinja tidak membawa hasil jang memuaskan.

Betapa besar dan banjaknja kesulitan, namun harus terus diperdjoangkan agar film dokumenter tetap ada dan berkembang sampai dapat mentjapai kedudukan jang semestinja, mengingat kegunaannja jang sangat besar dalam usaha mengembangkan *kebudajaan bangsa*. Bagi bangsa Indonesia, bangsa baru jang tengah menjelesaikan revolusi nasionalnja, film dokumenter selain penting sebagai suatu *tjatatan sedjarah*, djuga merupakan *mass-media* utama untuk membimbing dan mendorong serta mendjiwai rakjat agar tetap patuh dan setia kepada *tjita2 revolusi*.

Kebidjaksanaan Pemerintah.

Situasi perfilman di Indonesia jang kurang memberikan harapan perkembangan jang djelas dihari kemudian itu, tidak akan dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah. Demi hubungannja dgn tjita2 meninggikan dan memadjukan kebudajaan nasional, lagi pula untuk lebih dapat menempatkan funksi film dalam revolusi nasional jang masih bergelora dewasa ini, maka Pemerintah telah mulai mengambil langkah jang sangat bidjaksana. Tindakan Pemerintah untuk menertibkan dan menjempurnakan proces perkembangan film di Indonesia, dimulai dengan dikeluarkan *Penetapan Presiden* no. 548 tahun 1961. Penetapan ini menjatakan, bahwa segala kegiatan perfilman di Indonesia, baik jg menjangkut bidang produksi, distribusi, exhibisi, export-import film bahan baku, peralatan dan lain2, diurus dan diatur oleh BADAN URUSAN PERFILMAN. Badan ini berada dibawah Menteri Pertama dan diketuai oleh Menteri Penerangan, jang djuga mendjabat Wakil Ketua II Dewan Kebudajaan Nasional.

Keputusan MPRS.

Tindakan tegas Pemerintah dibidang perfilman tersebut, tidak lain adalah follow-up dari pada keputusan2 jang telah disjahkan MPRS, jang antara lain menetapkan bahwa *film bukan semata2 barang dagangan, melainkan alat*

pendidikan dan penerangan. Seterusnja film dimasukkan dalam bidang pembangunan mental Agama, kerochanian dan penelitian, chususnja Penerangan Massa.

Dengan demikian sudah djelaslah sekarang garis jang harus diarahkan bagi perkembangan perfilman Indonesia selandjutnja. Film telah didudukkan pada tempatnja jang penting dalam revolusi nasional. sehingga film tidak lagi merupakan barang hiburan jang kosong dan barang dagangan semata-mata.

Dengan adanja garis jang tegas tersebut, maka rakjat akan dapat mengharapkan djumlah produksi film dlm. negeri jg tjukup dan dengan mutu jang baik serta bernafaskan Amanat Penderitaan Rakjat dengan semangat Manipol/Usdek.

Theori2 jang revolusionair.

Sebagai penutup dari pada uraian kami, ingin kami mengemukakan kepada Saudara2 amanat dari P.J.M. Presiden Sukarno dalam kongres Persatuan Sardjana Hukum di Jogjakarta pada tanggal 26 Desember. „Untuk duduk atau ikut dalam revolusi, kita harus berani menggunakan theori2 jang revolusionair". Sesuai dengan amanat tersebut, maka dibidang perfilman-pun kita harus berfikir, bertindak dan berusaha sesuai dengan djiwa proklamasi nasional jang sedang berdjalan sekarang ini.

Untuk kelandjutan perkembangan perfilman di Indonesia, faktor kader tidak boleh diabaikan. Kita harus berusaha mendidik kader-kader perfilman mulai sekarang sebanjak-banjaknja. Mudah-mudahan dengan adanja tenaga2 jang terdidik dan terpeladjar jang bersemangatkan Manipol/Usdek, perkembangan perfilman Indonesia akan memperoleh kemadjuan2 jang pesat dan dapat melakukan perannja jang penting dalam perdjoangan bangsa menjelesaikan revolusi nasional.

HASIL-HASIL SENSUS PENDUDUK TAHUN 1961

Angka2 sementara mengenai djumlah penduduk di Indonesia.

Nama Propinsi	DJUMLAH PENDUDUK PROPINSI	DAERAH (Kepulauan)
1. Djakarta	2.922.000	
2. Djawa Barat	17.504.000	
3. Djawa Tengah	18.331.000	
4. Djogjakarta	2.184.000	
5. Djawa Timur	21.792.000	
DJAWA DAN MADURA		62.733.000
6. Sumatera Selatan	4.826.000	
7. Riau	1.232,000	
8. Djambi	656.000	
9. Sumatera Barat	2.311.000	
10. Sumatera Utara	4.912.000	
11. Atjeh	1.502.000	
SUMATERA		15.439.000
12. Bali	1.775.000	
13. Nusa Tenggara Barat	1.804.000	
14. Nusa Tenggara Timur	1.942.000	
BALI & NUSATENGGARA		5.521.000
15. Kalimantan Selatan	1.515.000	
16. Kalimantan Barat	1.569.000	
17. Kalimantan Timur	507.000	
18. Kalimantan Tengah	476.000	
KALIMANTAN		4.067.000
19. Sulawesi Utara	1.954.000	
20. Sulawesi Selatan	4.617.000	
SULAWESI		6.571.000

21.	Maluku	797.000
22.	Irian Barat	761.000

MALUKU DAN IRIAN BARAT	1.558.000
INDONESIA	95.889.000

PENDJELASAN :

Dalam djumlah seluruh penduduk belum termasuk djumlah anggauta2 Angkatan Bersendjata beserta keluarganja, jang tinggal dalam asrama/kesatrian jang tertutup untuk umum.

Dalam djumlah penduduk Irian Barat terdapat 700.000 djiwa (taksiran kasar) di wilajah jang diduduki Belanda.

Djakarta, 27 Desember 1961.
Biro Pusat Statistik
Seksi Sampling/Kompilasi.

DJUMLAH PENDUDUK SEBAGAI HASIL SEMENTARA DARI SENSUS 1961, PER KABUPATEN

I. Djakarta Raya

Perwakilan	Djumlah Penduduk
1. Djakarta Utara	942.304
2. Djakarta Tengah	824.459
3. Djakarta Selatan	1.155.078
DJK. RAYA:	2.922.000

II. Prop.: Djawa-Barat

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten:	
1. Pandeglang	439.122
2. Serang	715.805
3. Lebak	426.791
4. Bekasi	690.739
5. Krawang	832.478
6. Purwakarta	1.078.841
7. Tangerang	847.259
8. Bogor	1.301.679
9. Sukabumi	960.317
10. Tjiandjur	894.413
11. Bandung	1.570.520
12. Sumedang	526.175
13. Garut	918.819
14. Tasikmalaja	1.014.187
15. Tjiamis	1.011.589
16. Tjirebon	902.682
17. Kuningan	525.859

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah penduduk
18. Indramaju	861.376
19. Madjalengka	639.619
Kotapradja:	
1. Bogor	146.907
2. Sukabumi	78.806
3. Bandung	966.359
4. Tjirebon	153.405
DJAWA-BARAT	17.504000

III. Prop.: Djawa Tengah

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah penduduk
Kabupaten:	
1. Banjumas	905.032
2. Purbolinggo	513.394
3. Tjilatjap	906.733
4. Bandjarnegara	519.380
5. Magelang	713.427
6. Temanggung	381.948
7. Wonosobo	425.411
8. Purworedjo	548.068
9. Kebumen	830.509
10. Pekalongan	850.020
11. Pemalang	698.347
12. Tegal	758.819
13. Brebes	893.088
14. Semarang	568.770
15. Kendal	528.503
16. Demak	467.840
17. Grobogan	689.226
18. Pati	695.490
19. Djepara	488.784
20. Rembang	295.062
21. Blora	506.461
22. Kudus	373.017
23. Klaten	821.750
24. Bojolali	603.466
25. Sragen	529.473
26. Sukohardjo	403.146
27. Karanganjar	416.870
28. Wonogiri	811.899
Kotapradja:	
1. Magelang	91.636
2. Pekalongan	100.261
3. Tegal	89.953
4. Semarang	487.006
5. Salatiga	53.706
6. Surakarta	363.167
DJAWA-TENGAH:	18.331.000

IV. Prop.: Djokjakarta:

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah penduduk
Kabupaten:	
1. Bantul	449.104
2. Sleman	517.112
3. Gunungkidul	571.833
4. Kulonprogo	337.155
Kotapradja:	
1. Djogjakarta	308.530
DJOGJAKARTA:	2.184.000

V. Prop.: Djawa-Timur:

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah penduduk
Kabupaten:	
1. Surabaja	665.401
2. Sidoardjo	540.037
3. Modjokerto	492.465
4. Djombang	686.206
5. Bodjonegoro	705.476
6. Tuban	637.752
7. Lamongan	771.954
8. Madiun	509.053
9. Ngawi	582.206
10. Magetan	496.704
11. Ponorogo	698.153
12. Patjitan	429.946
13. Kediri	917.708
14. Ngandjuk	676.573
15. Blitar	839.918
16. Tulungagung	675.349

V. Prop.: Djawa-Timur

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten:	
17. Trenggalek	438.957
18. Malang	1.468.508
19. Pasuruan	728.564
20. Probolinggo	655.788
21. Lumadjang	656.838
22. Bondowoso	502.585
23. Panarukan	431.408
24. Djember	1.496.374
25. Banjuwangi	1.092.920
26. Pamekasan	396.063
27. Sampang	484.853
28. Sumenep	694.365
29. Bangkalan	573.420
Kotapradja:	
1. Surabaja	989.734
2. Modjokerto	50.308
3. Madiun	122.801
4. Kediri	158.682
5. Blitar	61.979
6. Malang	332.023
7. Pasuruan	62.872
8. Probolinggo	68.378
Djawa Timur:	21.792.000

VI. *Prop.: Sumatera Selatan:*

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Musi Banjuasin	315.729
2. Ogan Komering Ilir	377.408
3. Ogan Komering Ulu	380.632
4. Muara Enim	325.799
5. Lahat	307.620
6. Bengkulu Utara	86.854
7. Bengkulu Selatan	139.160
8. Musi Rawas	185.146
9. Redjang Lebong	152.326
10. Lampung Selatan	682.423
11. Lampung Tengah	513.243
12. Lampung Utara	333.542
13. Bangka	250.452
14. Belitung	102.050
Kotapradja :	
1. Palembang	458.661
2. Bengkulu	24.912
3. Tg. Karang/ Tlk. Betung	132.312
4. Pangkalpinang	58.540
Sumatera Selatan:	4.826.000

VII. *Prop. : Djambi :*

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Batanghari	207.100
2. Merangin	184.600
3. Kerintji	155.874
Kotapradja :	
1. Djambi	108.834
DJAMBI :	656.000

VIII. *Prop.: Riau:*

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Kampar	205.288
2. Indragiri	384.408
3. Bengkalis	297.709
4. Kep. Riau	275.464
Kotapradja :	
1. Pakanbaru	69.147
R i a u :	1.232.000

IX. *Prop. : Sumatera Barat:*

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. A g a m	303.168
2. Pasaman	210.469

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
3. Limapupuh Kota	250.703
4. S o l o k	271.082
5. Padangpariaman	442.721
6. Pesisir Selatan	221.439
7. Tanah Datar	246.454
8. Sawahlunto/ Sidjundjung	131.882
Kotapradja:	
1. Bukittinggi	51.587
2. Padang	143.615
3. Sawahlunto	12.295
4. Padangpandjang	25.509
Sumatera Barat:	2.311.000

X. Prop.: Sumatera Utara:

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten:	
1. Labuhan Batu	254.412
2. Tapanuli Utara	557.567
3. Tapanuli Tengah	100.002
4. Tapanuli Selatan	493.026
5. N i a s	316.598
6. Dairi	136.220
7. Deli Serdang	962.080
8. Langkat	339.501
9. K a r o	145.243
10. Simelungun	492.628
11. Asahan	404.229
Kotapradja:	
1. Medan	466.370
2. Pematangsiantar	112.687
3. Tdj. Balai	27.315
4. Bindjai	41.887
5. Tebingtinggi	24.826
6. Sibolga	37.171
Sumatera Utara:	4.912.000

XI. Prop.: Atjeh:

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten:	
1. Atjeh Besar	155.000
2. Atjeh Utara	375.200
3. Atjeh Timur	236.721
4. Atjeh Barat	176.800
5. Atjeh Selatan	19[illegible].800
6. Atjeh Tengah	71.393
7. Pidie	258.792
Kotapradja.	
1. Kotaradja	34.207
A T J E H:	1.502.000

XII. Prop.: B a l i.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten:	
1. Buleleng	321.831
2. Djembrana	129.149
3. Tabanan	272.569
4. Badung	307.326
5. Gianjar	232.177
6. Klungkung	127.914
7. Bangli	123.799
8. Karangasem	260.503
B A L I:	1.775.000

XIII. Prop.: Nusatenggara Barat.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten:	
1. Lombok Barat	409.710
2. Lombok Tengah	394.633
3. Lombok Timur	493.180
4. Sumbawa	194.819
5. Dompu	56.188
6. Bima	255.441
NUSATENGGARA BARAT:	1.804.000

XIV. Prop.: Nusatenggara Timur.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Sumba Timur	94.352
2. Sumba Barat	156.500
3. Manggarai	251.100
4. Ngada	122.200
5. E n d e	163.520
6. Sikka	166.800
7. Flores	178.200
8. Kupang	264.427
9. Timor Tengah Selatan	203.200
10. Timur Tengah Utara	102.300
11. B e l u	128.600
12. A l o r	110.600
NUSATENGGARA TIMUR:	1.942.000

XV. Prop.: Kalimantan Selatan.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Barito Kuala	88.732
2. Bandjar	310.568
3. Hulu Sungai Tengah	182.914
4. Hulu Sungai Selatan	236.118
5. Hulu Sungai Utara	322.460
6. Kota Baru	116.821
7. Pasir	45.128
Kotapradja :	
1. Bandjarmasin	212.683
KALIMANTAN SELATAN	1.515.000

XVI. Prop.: Kalimantan Barat.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Pontianak	375.901
2. Sambas	407.800
3. Ketapang	155.640
4. Sanggau	219.603
5. Sintang	176.039
6. Kapuas Hulu	87.492
Kotapradja :	
1. Pontianak	146.547
KALIMANTAN BARAT:	1.569.000

XVII. Prop.: Kalimantan Timur.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Kutai	218.598
2. Berau	28.334
3. Bulongan	103.000
Kotapradja :	
1. Balikpapan	88.534
2. Samarinda	68.095
KALIMANTAN TIMUR:	507.000

XVIII. Prop.: Kalimantan Tengah.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Kapuas	135.800
2. Barito Utara)	134.200
3. Barito Selatan)	
4. Kotawaringin Barat)	206.000
5. Kotawaringin Timur)	
KALIMANTAN TENGAH:	476.000

XIX. Prop.: Sulawesi Utara.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Sangir Talaud	188.900
2. Minahasa	438.149
3. Bolaang Mongondow	121.600
4. Gorontalo	311.669
5. Bual Toli2	82.457
6. Donggala	298.812
7. Poso	173.100
8. Banggai	140.000
Kotapradja:	
1. Menado	127.614
2. Gorontalo	71.232
SULAWESI UTARA	1.954.000

XX. Prop.: Sulawesi Selatan.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Mamudju	60.000
2. Luwu	130.715
3. Madjene	43.996
4. Polewali/Mamasa	226.732
5. Tanah Toradja	273.106
6. Pinrang	213.516
7. Enrekang	66.461
8. Sidenreng	135.451
9. Wadjo	267.212
10. Soppeng	186.015
11. Barru	103.108
12. Pangkadjene	166.189
13. B o n e	577.900
14. Maros	143.218
15. G o w a	288.991
16. Sindjai	105.240
17. Bulukumba	209.511
18. Bonthain	71.277
19. Djeneponto	183.443
20. Takalar	132.571
21. Selajar	86.966
22. Kolaka	19.583
23. Kendari	129.756
24. M u n a	111.766
25. B u t o n	253.265
Kotapradja:	
1. Makassar	367.882
2. Pare-Pare	62.683
SULAWESI SELATAN	4.617.000

XXI Prop.: Maluku.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Kabupaten :	
1. Maluku Utara	218.300
2. Maluku Tengah	319.900
3. Maluku Tenggara	203.400
Kotapradja:	
1. Ambon	55.263
M A L U K U	797.000

XXII. Prop.: Irian Barat.

Kabupaten/ Kotapradja	Djumlah Penduduk
Propinsi:	
1. Irian Barat (Tidore)	61.000
2. Irian Barat (jang diduduki Belanda	700.000
IRIAN BARAT	761.000

TJATATAN :

Semua angka2 Propinsi dibulatkan sampai tiga nol.

Djakarta, 27 Desember 1961
BIRO PUSAT STATISTIK
Seksi Sampling/Kompilasi

SENSUS PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA TH. 1961 ANGKA2 SEMENTARA MENGENAI KEPADATAN PENDUDUK

Daerah Tingkat I	Luas (Km2)	Djumlah Penduduk (X 1000)	Djumlah Penduduk Tiap 1 Km2
Djakarta — Raya	577	2.922	5.064
Djawa — Barat	46.317	17.504	378
Djawa — Tengah	34.206	18.331	536
Djogjakarta	3.169	2.184	689
Djawa — Timur	47.922	21.792	455
DJAWA dan MADURA	132.174	62.733	475
Sumatera Selatan	158.163	4.826	31
Riau	94.562	1.232	13
Djambi	44.924	656	15
Sumatera — Barat	49.778	2.311	46
Sumatera Utara	70.787	4.912	69
Atjeh	55.392	1.502	27
SUMATERA	473.606	15.439	33
Bali	5.561	1.775	319
Nusatenggara Barat	20.177	1.804	89
Nusatenggara Timur	47.876	1.942	41
BALI dan NUSATENGGARA	73.614	5.521	75
Kalimantan Selatan	37.660	1.515	40
Kalimantan Barat	146.760	1.569	11
Kalimantan Timur	202.440	507	2,5
Kalimantan Tengah	152.600	476	3.1
KALIMANTAN	539.460	4.057	7,5
Sulawesi Utara	88.578	1.954	22
Sulawesi Selatan	100.457	4.617	46
SULAWESI	189.035	6.571	35
Maluku	74.505	797	11
Irian Barat	421.951	761	1,8
INDONESIA	1.904.345	95.889	50

BERITA KELUARGA

Telah berpulang kerachmatullah, Saudara-saudara :

DJAMIN MANURUNG,

Djuru Warta Kepala (B 2/III) pada Djawatan Penerangan Ketjamatan Lumbandjulu Kabupaten Tapanuli Utara, pada tgl. 27 Desember 1961.

ADMINI,

Pengatur Penerangan (D 2/II) pada Penerangan Ketjamatan Madjalengka, Kabupaten Madjalengka pada tgl. 5 Djuli 1961.

Inna lillahi wa inna Ilaihi radjiun.
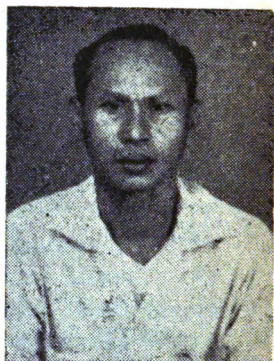
Sdr. MUHADI.

TURUT BERDUKATJITA

Staf Redaksi dan Administrasi Mimbar Penerangan, dengan ini menjatakan turut berdukatjita, atas meninggalnja:

Sdr. MUHADI

Salah seorang warga (opmaker) Mimbar Penerangan, jang meninggal pada tanggal 9 Djanuari 1962.

Semoga arwahnja mendapat tempat jang wadjar di Hadirat Tuhan.

Djakarta 9 Djanuari 1962.

Inna Lillahi wainna Ilaihi rodjiun !

Telah pulang kerahmatullah :

TOHIRAN SASTROWARDOJO

Kepala Djawatan Penerangan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya, tanggal 18 Pebruari 1962 minggu malam djam 01.00 dirumahnja, disebabkan penjakit jang mendadak

Tinggalkan isteri dan 11 orang anak.

Beliau mendjabat sebagai Kepala Djawatan Penerangan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya sedjak tahun 1958 dan hingga sekarang sudah 4 tahun lamanja. Beliau meninggalkan seorang isteri dan 11 orang anak serta seorang diantaranja masih melandjutkan peladjarannja di Fakultas Pertanian Bogor.

Riwajat hidup singkat.

Beliau dilahirkan di Blora pada tahun 1911, pendidikan Mulo dan Elementary English Course. Sedjak zaman pendjadjahan Belanda pernah mendjadi pegawai pada Burgerlyk Openbare Werken (BOW) dari tanggal 1-1-1928 s/d 1-10-1928 di Semarang. Kemudian dari tanggal 4-10-1928 s/d 1-3-1942 mendjadi wartawan harian "De Lokomotief" Semarang. Pada zaman pendudukan Djepang wartawan harian „Sinar Baru" Semarang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dari tanggal 30-8-1945 s/d 8-1-1946 mendjadi wartawan dari harian „Duta Masarakat" di Kudus. Mulai tgl. 1-8-1947 beliau meninggalkan lapangan djurnalistik lalu terdjun dalam lingkungan Departemen Penerangan hingga achir hajatnja dan djabatan jang terachir sebagai Kepala Djawatan Penerangan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.

Dengan ini WARGA DEPARTEMEN PENERANGAN umumnja dan chususnja WARGA MIMBAR PENERANGAN merasa kehilangan seorang tokoh penerangan, dan menjatakan :

— TURUT BERDUKA — TJITA —

semoga arwah beliau mendapat tempat jang wadjar dialam baqa setimpal dengan amal ibadatnja.
Kepada keluarganja jang ditinggalkan semoga mendapat bimbingan dari Tuhan dan diteguhkan imannja.

MENGIKUTI KONPERENSI KERDJA DJAPEN SE-NUSATENGGARA BARAT DI BIMA.

Sedjak tanggal 16 s/d 19 Nopember 1962, telah dilangsungkan konperensi kerdja Djapen se-Nusatenggara Barat di Bima.

Pada tanggal 13 Nopember 1961 telah berangkat dari Mataram satu rombongan jang terdiri : Dari Djapen Tk. I Nusa Tenggara Barat
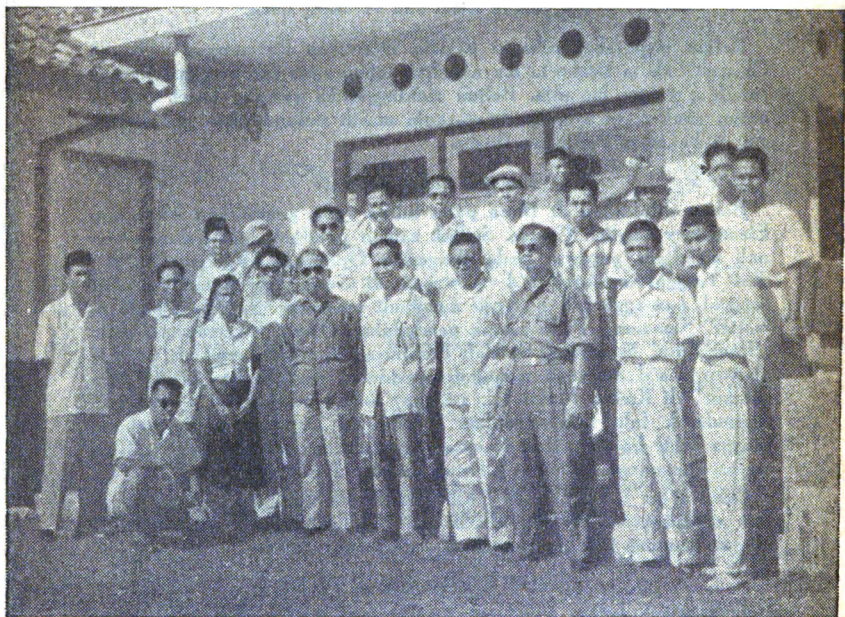
Para peserta konperensi kerdja Djapenpro Nusa Tenggara Barat di Bima.

5 orang. Kepala² Djapen Tk. II Lombok 3 orang. dan Kepala Studio RRI Mataraman Harsojo, menudju Bima dan telah tiba di Bima pada tanggal 14 Nopember 1961 djam 24.00.

Setelah beristirahat selama satu hari, maka pada tanggal 16-11-1961 djam 8.00 konperensi kerdja tersebut dimulai/dibuka, oleh Kep. Djapen Tk. I Nusatenggara Barat A.J. Binol, bertempat digedung Pemerintah Bima. Upatjara pembukaan tersebut dihadiri oleh para pembesar Sipil, Militer dan Tjatur Tunggal Bima. Djuga Kepala Staf KOREM 162 Nusa Tenggara Barat Majoor Sugeng Widjaja turut hadir dan pada kesempatan itu telah memberikan tjeramah mengenai Front Nasional dan Pramuka. Komandan KODIM 1616 Sumbawa jang baru, Majoor Harjono, turut pula memberikan kata sambutannja. Sajang Bupati Kepala Daerah Bima saat ini tidak dapat hadir, karena sedang bertugas keluar Daerah.

Djam 9.30 upatjara pembukaan berachir, dan dilandjutkan dengan konperensi kerdja jang dihadiri oleh 15 orang dari Djapen se-Nusa-Tenggara Barat termasuk para penindjau.

Konperensi Kerdja jang berlangsung sedjak tgl. 16 s/d 19 itu berdjalan dengan lantjar, dan diliputi rasa kekeluargaan, sehingga konperensi tadi telah berhasil merumuskan pedoman dan program kerdja tahun 1962. Program tersebut memuat intensifikasi dari penerangan mengenai Tri-program Pemerintah jang dititik beratkan pada SSB, Landreform, persoalan Irian Barat dan Indoktrinasi Manipol/Usdek.

Mengenai intern rapat kerdja telah berhasil mengambil kesimpulan² tentang soal² penjempurnaan organisasi dan perlengkapan Djapen² Tk. II sesuai dengan pengesahan Menteri Penerangan Maladi tgl. 21 September 1961.

Setelah selesai konperensi kerdja, malam tanggal 19-11-1961 diadakan pertemuan ramah tamah dengan masjarakat kota Bima, chususnja para instansi Sipil dan Militer jang berlangsung dalam suasana sangat meriah dan berkesan.

Pada tanggal 20-11-1961 rombongan kepala Djapen Tk. I Nusa-Tenggara Barat berangkat meninggalkan Bima menudju Dompu, dan disini pun diadakan pula malam perkenalan dengan pedjabat² Sipil dan Militer setempat. Dan sebelum meninggalkan Bima rombongan tidak

lupa pula menjaksikan keindahan dan kemesraan Taman Lawata, satu-satunja objek pariwisataan jang paling indah di Bima. Dan masjarakat Bima nistjaja merasa sangat bangga memiliki objek pariwisataan jang seindah itu. Tanggal 22-11-1961 rombongan tiba kembali dengan selamat di Mataraman.

(Djapen Daerah tk. I Nusatenggara Barat Sukri Gusti).

***

LATIHAN TEAM INDOKTRINASI MANIPOL DJAWATAN PENERANGAN DJAMBI

Baru[2] ini telah dilangsungkan Latihan Team Indoktrinasi Manipol Djawatan[2] Penerangan Propinsi, Kotapradja Djambi serta Kabupaten Batanghari dengan mengambil tempat diruangan atas Kantor Djawatan Penerangan Kotapradja Djambi.

Penjelenggaraan Latihan tersebut jang dipimpin oleh Sdr. Mohamad BA., Kepala Bagian Penerangan Mobil Djapen Propinsi dengan dibantu oleh sebuah Sekretariaat dan beberapa tenaga pengadjar, adalah didalam rangka *pengisian dan penjempurnaan lebih landjut* pelaksanaan Sk. Menpen tgl. 26 Djanuari 1961, No. 2/Sk/M/'61, tentang: Pembentukan Team[2] Indoktrinasi Manipol dan bertudjuan untuk:

1. Lebih memperkokoh semangat dan kejakinan para petugas Indoktrinasi terhadap kebenaran tentang dasar, sifat serta tudjuan revolusi Indonesia jang bersumber atas djiwa Patriotisme.

2. Memperoleh keseragaman dalam memberikan arti serta tafsiran terhadap materi[2] bahan[2] indoktrinasi.

3. Lebih menjempurnakan tjara penjampaian indoktrinasi kepada massa, sehingga benar[2] tepat terarah kepada sasaran jang ditudjunja.

Berdasarkan atas pertimbangan praktis dan penghemat pembiajaan, maka penjelenggaraan latihan tersebut sekaligus diperuntukkan 3 (tiga) Djawatan bersama-sama, jang di-ikuti oleh 25 orang peserta, terdiri dari:

1. Anggota[2] Team Djapen[2] Daerah Tk. I. Djambi, Daerah Tk. II Kotapradja Djambi dan Daerah Tk. II Kabupaten Batanghari.

2. Pegawai² (tjalon Kader² Djurupenerang) jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan masing².

Djenis mata-peladjaran jang diberikan adalah sbb.:

1. Bahan² Indoktrinasi dan Ilmu Penerangan, diberikan sdr. Mohamad B.A., Kep. bg. Penmob Djapenpro Djambi.

2. Sosiologi, dari sdr. Sutadji, Kep. Djapenko Djambi.
3. Hukum Tatanegara R.I., dari Sdr. Dachjar D, Kep. Seksi Publikasi Djapenpro Djambi.

4. Tjeramah Agama, dari sdr. Djalaludin Hajat, Kep. Seksi Organisasi Djapenpro Djambi.

Upatjara penutupan Latihan Team Indoktrinasi tersebut di gedung Nasional Djambi dihadiri oleh Wakil Tritunggal Daerah Tk. I, Djambi, Ketua serta anggota Panitia Retooling Apparatuur Negara Daerah Tk. I Djambi. Anggota² M.P.R.S. (jang ada di Djambi). Pedjabat sipil/
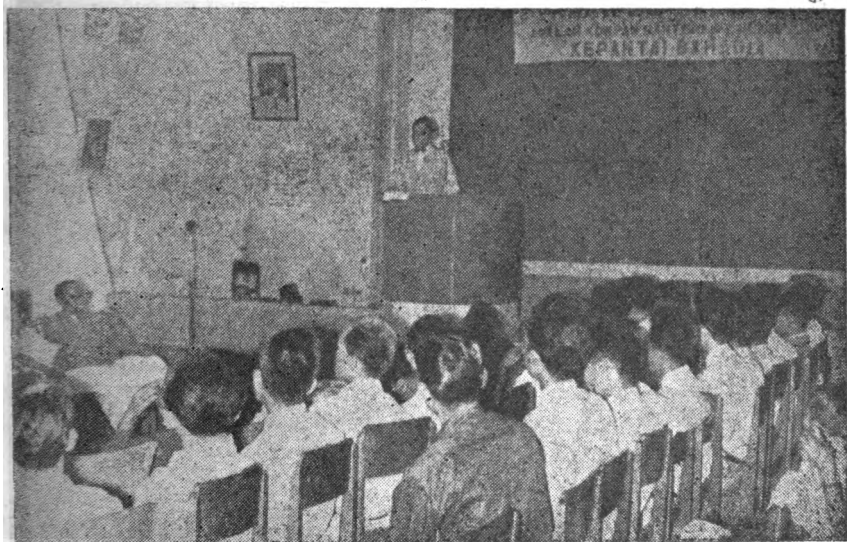
Ketua Penjelenggara latihan Indoktrinasi Manipol Djambi Moehamad B.A., menjampaikan laporan tentang djalannja latihan pada upatjara penutupan.

Militer dan tamu² undangan lainnja dan segenap Pegawai Djawatan² Penerangan Propinsi, Kotapradja Djambi dan Kabupaten Batanghari.

Penjelenggaraan Latihan Team Indoktrinasi sematjam itu untuk Djapen² Daerah Tk. II Kabupaten Merangin dan Kerintji akan dilaksanakan kemudian dalam waktu jang singkat.

Indoktrinasi jang bersifat umum kepada segenap Pegawai Kantor Djawatan Penerangan Propinsi diadakan setiap pagi antara djam 7.30 — 8.15 dan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun.

Dan telah di-instruksikan pula oleh Kepala Djawatan Penerangan Propinsi kepada Djapen² Daerah Tk. II dalam lingkungan Daerah Propinsi Djambi untuk melaksanakan tindakan seperti tersebut diatas.

(Djapen Propinsi Djambi kep. Bgn. Penmob Muhammad BA).

Masjarakat di Bukittinggi, dengan perhatian jang besar, mengikuti Coaching Manipol/Usdek jang diselenggarakan oleh Team Indoktrinasi.

USAHA-USAHA TEAM INDOKTRINASI DAERAH TK. I SUMATERA BARAT DI BUKITTINGGI.

Pada tgl. 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Nopember 1961 siang hari bertempat di Bioskop Sovia Bukittingi telah dilangsungkan coaching Manipol/Usdek oleh Team Indoktrinasi Daerah Tk. I Sumatera Barat jang di-ikuti lk. oleh 1000 orang tiap² kalinja, terdiri dari para guru² pria/wanita, guru² PGA, RS, SMP dan para P.S.².

Sedang malam harinja pada tanggal² jang sama bertempat di Gedung Nasional tiap² coaching di-ikuti oleh lk. 500 orang terdiri dari instansi sipil/militer, Djawatan² niveau Kotapradja Bukittingi dan Kabupaten Agam.

Adapun coaching² jang diberikan adalah berdasarkan coaching jang diterima di Tjibogo, jaitu : Tentang retooling, kupasan Pantjasila, kupasan lengkap mengenai Manipol/Usdek dan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, jang diberikan oleh Daranin anggota Team Indoktrinasi Manipol Daerah Tk. I Sumatera Barat.

Kesan² jang diperoleh adalah, bahwa coaching di-ikuti dengan minat dan penuh perhatian, djuga tampak selalu hadir Komandan Korem 32 Sumatera Barat Utara. (Kep. Djapen Prop. Sumatera Barat Daranin)

.... „Kuntji daripada perdjuangan Irian Barat untuk memasukkan kembali Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia adalah persatuan bangsa dan kesatuan bangsa".

Dr. J. Leimena

Diutjapkan pada hari sumpah pemuda 28-10-61.

Perundang-undangan-Peraturan dan Pengumuman

Isi :

1. *S.K. Menteri penerangan No. 1/SK/M/62 tentang Komando Penerangan Irian Barat.*

2. *S.K. Menteri Penerangan No. 3/SK/M/61 tentang penundjukan para petugas dalam Komando Penerangan Irian Barat.*

3. *S.K. Menteri Penerangan R.I. No. 38/SK/M/61, tentang pembentukan Djapenkab Barito dan Kota Waringin Barat.*

4. *Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI/A/00305/1961 tentang pembentukan organisasi pertahanan sipil dalam rangka mempertinggi serta menggalang kewaspadaan Nasional.*

5. *Instruksi tentang pelaksanaan Organisasi Pertahanan Sipil.*

6. *Peraturan Pemerintah pengganti Undang² No. 1/1962 tentang pemanggilan dan pengerahan semua warga negara dalam rangka mobilisasi umum.*

7. *Perintah harian Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I.*

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 1/S.K./M/62.

TENTANG

KOMANDO PENERANGAN IRIAN BARAT

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA:

Menimbang:

1. bahwa Revolusi Indonesia pada segi nasionalnja kini sedang menghadapi saat2 jang menentukan, oleh karena Belanda masih tetap mau melandjutkan kolonialisme di Tanah Air kita Irian Barat, dengan memetjah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia;
2. bahwa Tri-komando Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat tertanggal 19 Desember 1961 wadjib dilaksanakan oleh segenap Rakjat Indonesia, djuga jang berada didaerah Irian Barat;
3. bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas perlu dibentuk Komando Penerangan Irian Barat Departemen Penerangan guna menjelenggarakan segala sesuatu jang perlu dibidang Penerangan.

Mengingat:

1. Proklamasi 17 Agustus 1945, U.U.D. 1945, Amanat Penderitaan Rakjat, Manifesto Politik/USDEK/,,Djarek" dan ,,Resopim".
2. Triprogram Kabinet Kerdja;
3. Komando Rakjat tertanggal 19 Desember 1961;
4. Piagam Penerangan 1 Pebruari 1961;
5. Ikrar Departemen Penerangan jang termaktub dalam ,,API NAN TAK KUNDJUNG PADAM".
6. Hasil Konperensi Kerdja Departemen Penerangan jang diadakan di Djakarta pada tanggal 11 s/d 15 September 1961 tentang: ,,Penerangan Pembebasan Irian Barat".

Mendengar:

Musjawarah Pimpinan Departemen Penerangan tertanggal 21 Desember 1961 dan tertanggal 22 Desember 1961 jang dihadliri oleh Menteri Penerangan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

Pasal 1.

Membentuk:

a. Komando Pusat dengan nama „KOMANDO PENERANGAN IRIAN BARAT" di Departemen Penerangan Pusat, jang memimpin Penerangan Irian Barat.

b. Komando Wilajah dengan nama „KOMANDO PENERANGAN IRIAN BARAT WILAJAH", di Makassar;

c. „Komando Sub Wilajah" di Ambon dan Menado;

d. „Komando Daerah" di Soa-Sio, Tual dan Morotai.

Pasal 2.

Susunan.

(1) „Komando Pusat" tersusun sbb.:

a. Komandan: Menteri Penerangan.
Kepala Staf: Pembantu Utama.
Komandan Pelaksana: Direktorat Publisitet dan Penerangan Daerah.
Deputy Komandan Pelaksana Staf Komando: Djawatan R.R.I.
1. Seorang Pembantu Utama.
2. Seorang Pedjabat Kabinet Menteri Penerangan.
3. Direktorat Perfilman Negara.
4. Direktorat Tata Usaha.
5. Direksi Tehnik R.R.I.
6. Bagian Publikasi.
7. Bagian Hukum Perundang-undangan.

b. Komando I (Pengobaran Semangat dan psywar): Sub Komandan dan Staf.
Komando II (Pengerahan Tenaga): Sub Komandan dan Staf.
Komando III (Perlengkapan dan materiil): Sub Komandan dan Staf.
Komando IV (Training Centre): Sub Komandan dan Staf.

c. Sekretariat terdiri: 1 orang Sekretaris dan Staf.

(2) „KOMANDO WILAJAH TERSUSUN SBB.:

a. seorang Komandan
seorang Deputy Komandan
seorang Kepala Staf.
Staf Komando jang terdiri dari 5 orang:

b. Komando I (Pengoperan Semangat dan psywar): Sub Komandan dan Staf.
Komando II (Pengerahan Tenaga): Sub Komandan dan Staf.

Komando III (Perlengkapan dan materiil) : Sub Komandan dan Staf.
Komando IV (Training Centre) : Sub Komandan dan Staf.

(3) „KOMANDO SUB WILAJAH" TERSUSUN SBB.:

a. Seorang Komandan
Seorang Deputy Komandan
Seorang Kepala Staf.
Staf Komando jang terdiri dari 5 orang:
b. Kesatuan Gerak Tjepat terdiri dari petugas2 dibidang:
1. Radio.
2. Publikasi.
3. Film.
4. Foto.
5. Penerangan lisan.

(4) „KOMANDO DAERAH" TERSUSUN SBB.:

a. Seorang Komandan
Seorang Kepala Staf
Staf Komando jang terdiri dari 5 orang.
b. Kesatuan Gerak Tjepat terdiri dari petugas2 dibidang:
1. Radio.
2. Publikasi.
3. Film.
4. Foto.
5. Penerangan lisan.

Pasal 3.
Tugas.

Tugas Komando Perangan Irian Barat ialah:

1. Menggelorakan semangat pembebasan Irian Barat sesesuai dengan djiwa dan sesemangat Komando Rakjat 19 Desember 1961.
2. Mempersiapkan setjara mental dan spirituil seluruh Rakjat untuk melaksanakan Komando Rakjat dengan djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.
3. Membakar semangat kebangsaan dan api pemberontakan Rakjat diwilajah Irian Barat jang masih ditindas oleh kekuasaan pendjadjah Belanda.
4. Mengobarkan tekad dan keberanian seluruh Rakjat diwilajah Irian Barat supaja bergerak untuk menggelorakan pengibaran Sang Merah Putih didaerah Irian Barat sampai ditiap djengkal tanah di-peloksok2 desa dan menegakkan terus berkibarnja Sang Merah Putih terhadap siapapun jang hendak menurunkannja dengan segenap djiwa raga.
5. Menggerakkan seluruh Rakjat didaratan Irian Barat untuk melaksanakan segala Undang2 dan Peraturan2 Pemerintah Republik Indonesia dan hanja mengakui U.U.D. 1945 sebagai satu2nja Undang2 Dasar jang sjah.

Pasal 4.

Program Kerdja.

Program Kerdja dalam waktu 3 (tiga) bulan adalah

1. Pembentukan:
   Komando Pusat.
   Komando Wilajah.
   Komando2 Sub Wilajah.
   Komando2 Daerah.
   Kesatuan2 GERAK TJEPAT.
2. Memperlengkapi Komando2 Sub Wilajah dan Daerah dengan tenaga dan alat-alat.
3. Membentuk Training Centre di Pusat dan Makassar.
4. Menggerakkan Kesatuan2 Gerak Tjepat di:
   Ambon.
   Menado.
   Soa-sio.
   Tual dan Morotai.

Pasal 5.

Pembiajaan.

Untuk keperluan Komando Penerangan Irian Barat diusahakan anggaran chusus.

Pasal 6.

Lain-lain.

1. Pendaftaran dan Pengerahan Tenaga harus sudah selesai dalam waktu satu bulan.
2. Sjarat-sjarat untuk tenaga dalam Komando adalah sbb.:
   a. Setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945.
   b. Bersih dalam soal2 politik, materiil dan moril.
   c. Memiliki ketjakapan jang diperlukan.
   d. Berbadan sehat.
3. Training Centre di Pusat supaja sudah dimulai awal bulan Pebruari 1962.
4. Jang segera harus dilakukan ialah:
   a. Kesatuan Gerak Tjepat di Ambon dan Soa-Sio.
   b. Perlengkapan dan beaja minimal untuk Komando Sub Wilajah di Ambon dan Komando Daerah di Soa-Sio.
   c. Memperhebat siaran radio dari Ambon, Soa-Sio, Menado dan Makassar dengan pedoman petundjuk serta tema Penerangan dari Pusat.
5. Hal2 lain jang tidak disebut dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 7.

Penutup.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Desember 1961.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 18 Djanuari 1962.

MENTERI PENERANGAN

M A L A D I.

*

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 3/S.K./M/62.

TENTANG

PENUNDJUKAN PARA PETUGAS DALAM KOMANDO PENERANGAN IRIAN BARAT.

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan surat keputusan Menteri Penerangan No. 1/SK/M|62 tanggal 18 Djanuari 1962. perlu mengangkat pemimpin dan anggota-anggota Staf Komando Penerangan Irian Barat di Pusat maupun didaerah;

Mendengar :

Musjawarah Pimpinan Departemen Penerangan tanggal 21 dan 22 Desember 1961;

Mengingat :

Surat Keputusan Menteri Pertama No. 50/M.P./1961 tanggal 31 Djanuari 1961 jo RALAT No. 3740/61 tanggal 17 Pebruari 1961;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pasal 1.

Menundjuk Saudara-saudara jang namanja tersebut dibawah ini untuk mendjalankan tugas dalam Komando Penerangan Irian Barat, disamping pekerdjaan routine sehari-hari :

A. Kepala Staf Sdr. Soetardi Bardjoloekito.

Komandan Pelaksana — Sdr. Sadono Dibjowirojo.

Deputy Komandan Pelaksana — Sdr. Soekirman.

Staf Komando — 1. Sdr. Wim Latumeten, 2. Sdr. Soelam Siswopranoto, 3. Sdr. Soetarto, 4. Sdr. Sarwono, 5. Sdr. Soenarjo, 6. Sdr. Ishak Soerjodipoetro, 7. Sdr. Mr. M.D. Siregar.

B. Komando I.

(Pengobaran Semangat dan psywar).

Sub. Komandan — M. Arief.

Staf — 1. Sdr, Soebari, 2. Sdr. M.S. Dipo N.A., 3. Sdr. Soedarso Wirokoesoemo, 4. Sdr. Soejarman.

Komando II.

(Pengerahan tenaga)

Sub. Komandan — Sdr. Soejono.

Staf — 1. Sdr. Soetedjo Dirdjosoebroto, 2. Sdr. Badarulzaman.

Komando III.

Perlengkapan dan Materiil).

Sub. Komandan — Sdr. Soedjadi.

Staf — 1. Sdr. Engkon, 2. Sdr. Soesatyo.

Komando IV.

(Training Centre).

Sub Komandan — Sdr. Drs. Trisno Djojosoewarno.

Staf — 1. Sdr. Harto, 2. Sdr. Moedjiman, 3. Sdr. Soenarto, 4. Sdr. Marwoto, 5. Sdr. Drs. F. Rachmadi.

C. Sekretariat:

Sekretaris — Sdr. Soekamto.

Staf — Sdr. Arifin Soedarjo, 2. Sdr. Soegiatno, 3. Sdr. Gerung, 4. Sdr. Malikun, 5. Sdr. Soelistihardjo, 6. Sdr. M.A. Tjatja.

Pasal 2.

Penetapan ini menurut keadaan dan kebutuhan sewaktu-waktu dapat diadakan perobahan.

Pasal 3.

Hal-hal lain jang tidak disebut dalam Sudat Keputusan ini diatur kemudian.

Pasal 4.

Penutup.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 21 Desember 1961.

Ditetapkan di Djakarta,

pada tanggal 26 Djanuari 1962.

MENTERI PENERANGAN

M A L A D I.

*

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN R.I. NO. 38/SK/M/61.

TENTANG.

PEMBENTUKAN DJAWATAN PENERANGAN KABUPATEN BARITO SELATAN DAN KOTA WARINGIN BARAT.

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membatja:

Surat usul dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 26 September 1959 No. Urda/I/2696|KT/59 tentang pembentukan Djawatan Penerangan Kabupaten baru;

Menimbang:

Bahwa guna kelantjaran usaha2 Penerangan dan indoktrinasi MANIPOL/USDEK dalam rangka stabilisasi dan penjempurnaan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah chususnja serta Pembangunan Negara dan Bangsa pada umumnja, perlu dibentuk Djawatan Penerangan Daerah tingkat II Barito Selatan dan Kotawaringin Barat;

Mengingat:

1. Undang2 No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah2 tingkat II di Kalimantan;
2. Surat Keputusan Menteri Pe-

nerangan tanggal 18 Djuni 1957 No. 115/S.K/S.D|57 tentang pembentukan Djawatan-Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Kesatu: Membentuk Djawatan Penerangan Daerah tingkat II:

1. Barito Selatan di Buntok,

2. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

Kedua: Segala sesuatu mengenai pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diatur lebih landjut oleh Kepala Djawatan Penerangan Kalimantan Tengah dengan persetudjuan Menteri Penerangan.

Ketiga: Biaja untuk keperluan dan perlengkapan Djawatan Penerangan tersebut dibebankan pada anggaran jang bersangkutan dari anggaran belandja Departemen Penerangan.

Keempat: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Desember 1961
MENTERI PENERANGAN

(M A L A D I)

KEPUTUSAN MENTERI KEAMANAN NASIONAL No. MI/A|00305|1961,

tentang

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DALAM RANGKA MEMPERTINGGI SERTA MENGGALANG KEWASPADAAN NASIONAL

MENTERI KEAMANAN NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa untuk mempertinggi serta menggalang Kewaspadaan Nasional, dalam rangka Keamanan dan Pertahanan Negara, perlu mengalirkan segala kekuatan (nationale potentie) dari masjarakat kita kearah perdjoangan Negara dan mempersatukan serta menggerakkan (mengcoordinir dan mengactivir) tenaga sipil, sesuai dengan program Pemerintah serta sifat dan azas dari Pertahanan Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa untuk dapat berhasilnja pertahanan total, maka perlu disamping pertahanan defacto militer, djuga harus didjalankan pertahanan defacto pemerintah dan pelaksanaan kesedjahteraan rakjat, sehingga pertahanan defacto Republik Indonesia dalam rangka Perang Wilajah dengan

sistim wehrkreisse, desa demi desa, distrik demi distrik, daerah demi daerah serta sistim kantong2 jang flexible, benar2 dapat terlaksana;

3. Bahwa untuk persiapan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekan dan kesatuan tanah-air dan bangsa serta untuk menjalurkan spontaniteit rakjat guna menjiapkan diri setjara sukarela untuk turut aktip dalam usaha Pembebasan Irian Barat, maka untuk mentjegah terdjadinja kesimpang siuran dalam penjelenggaraannja, perlu adanja suatu koordinasi jang se-baik2nja jang langsung dibawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional sesuai dengan perintah Presiden/ Panglima Tertinggi kepada Menteri Keamanan Nasional untuk menampung mobilisasi tersebut;

4. Bahwa berhubung dengan hal2 tersebut di ad 1, 2 dan 3, dirasa perlu segera adanja suatu Organisasi Pertahanan Sipil diseluruh wilajah kekuasaan hukum Negara Republik Indonesia guna menampung serta melaksanakan tugas2 tersebut diatas.

Mengingat:

a. Komando Rakjat tanggal 19 Desember 1961:
   1. Gagalkanlah pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
   2. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia.
   3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 tahun 1961 tanggal 11 Desember 1961 tentang pembentukan DEWAN PERTAHANAN NASIONAL.

c. U.U.D. 1945 bab XII Pertaranan Negara pasal 30 mengenai setiap Warga Negara wadjib ikut-serta dalam usaha membela Negara.

d. Ketetapan M.P.R.S. No. I tahun 1960 tentang perintjian „F" MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA mengenai bidang keaman.

e. Ketetapan M.P.R.S. No. II tahun 1960 dalam perintjian buku kesatu djilid ke II bab 30 mengenai keamanan dan pertahanan.

f. Undang2 Pokok Pertahanan No. 29 tahun 1954.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Membentuk Organisasi Pertahanan Sipil diseluruh wilajah ke-

kuasaan hukum Negara Republik Indonesia:

a. jang mempunjai unsur pertahanan non-militer dan merupakan suatu bagian integral daripada sistim Pertahanan Nasional jang ada;
b. jang menjelenggarakan pengerahan seluruh sumber potensi jang terdapat didalam Negara, dibawah pimpinan Pemerintah Pusat maupun daerah guna turut-serta mendjamin Keamanan dan memperkuat Pertahanan kita;
c. jang dilakukan / didjalankan oleh setiap unsur masjarakat Indonesia jang setjara tidak langsung diikut — sertakan dalam pertahanan aftif — Pemerintah - Perdagangan - Industri-Sekolah2 dan Rumah Tangga, terhadap Bentjana Perang atau Bentjana-Alam dan lain sebagainja.

Ke-dua:

Pemikiran, penjelenggaraan dan pelaksanaan ditingkat Pusat jang berkenaan dengan ad pertama diserahkan kepada Menteri Deputy MKN cc Asisten Umum Staf keamanan Nasional.

Ke-tiga :

Penjelenggaraan dan pelaksanaan di tingkat wilajah Angkatan jang berkenaan dengan ad pertama, chusus bagi wilajah Angkatan Darat, mengingat kepentingannja jang mendesak untuk mempertinggi serta menggalang kewaspadaan Nasional dalam rangka Keamanan dan Pertahanan Negara, maka pelaksanaan pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil harus terbentuk dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan jg. dikeluarkan oleh KASAD, mendahului ketentuan2 beserta pedoman jang akan diatur lebih landjut oleh Ment. Deputy M.K.N.

Ke-empat :

Organisasi Pertahanan Sipil diunit Departemen2, Dinas2, Djawatan2, Perguruan-Tinggi2/Universitas, Perusahaan2 Negara, Perusahaan2 Swasta jang vitaal dan lain sebagainja sambil menunggu ketentuan2 lebih landjut dari DEPERTAN cq. Instansi Pertahanan jang ditentukan, maka dalam rangka pelaksanaan Pertahanan Sipil tersebut di koordinir oleh Organisasi Pertahanan Sipil wijalah Angkatan Darat, tingkat DEPAD dan KODAM2.

Ke-lima :

Ketentuan2 beserta pedoman untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Deputy MKN setelah mendengar pertimbangan2 dari masing2 Angkatan.

Ke-enam :

Pembiajaan atas pelaksanaan penjelenggaraan Pertahanan Sipli keseluruhannja dibebankan kepada Menteri Keamanan Nasional.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dikeluarkannja.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 30-12-1961.
Menteri Keamanan Nasional,

A.H. N A S U T I O N.
Djenderal T.N.I.

•

INSTRUKSI TENTANG PELAKSANAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL.

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka Pembinaan Wilajah serta penjusunan Pertahanan Rakjat Total jang kokoh-kuat serta memperkuat home-front, potensi rakjat mempunjai peranan jang penting terutama dibidang kegiatan territoriaal didalam segala keadaan.

2. Bahwa untuk mempertinggi serta menggalang Kewaspadaan Nasional, dalam rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu mengalirkan segala Potensi Nasional dari masjarakat kita kearah perdjuangan Negara dan mempersatukan serta menggerakkan (mengkoördinir dan mengaktivir) tenaga sipil sesuai dengan program pemerintah serta sifat dan asas dari pertahanan Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa sementara menunggu instruksi lebih landjut dari Dewan Pertahanan Nasional cq Instansi Pertahanan jang ditundjuk perlu melaksanakan pembentukan serta penjelenggaraan Organisasi Pertahanan Sipil diwilajah Angkatan Darat, ditingkat DEPAD dan KODAM2, mengingat urgensinja untuk mempertinggi serta menggalang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Keamanan dan Pertahanan Negara.

Mengingat:

Keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI|A 00305|1961 tanggal 30-12-1961 ad 3 ad 4

MENGINSTRUKSIKAN :

Guna kelantjaran djalannja pembentukan serta pelaksanaan Organisasi Pertahanan Sipil di wilajah Angkatan Darat tingkat DEPAD dan KODAM2 sesuai Surat keputusan Menteri Keamanan Nasional No. MI'A 00305| 1961 tanggal 30-12-1961, supaja dilaksanankan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. PENGERTIAN:

a. Pertahanan sipil adalah pertahanan *non-militer* dan meru-

pakan suatu bagian integral daripada sistim Pertahanan Nasional jang ada, jang menjelenggarakan pengerahan seluruh sumber kekajaan jang terdapat dalam Negara, Masjarakat dan Bangsa kita, dibawah pimpinan Pusat maupun tingkat Daerah untuk memperkuat Pertahanan Negara kita.

b. Didalam rangka Pertahanan Sipil terdapat dua unsur perlawanan jang dilakukan oleh:
   1. Sipil Biasa.
   2. Sipil Wilajah.

1) Sipil Biasa adalah sebagian besar rakjat jang tidak setjara langsung diikut sertakan dalam pertahanan aktip.

2) Sipil Wilajah adalah satuan2 Perlawanan Rakjat jang langsung membantu kesatuan2 Angkatan Perang jang merupakan inti pertahanan dalam melakukan pertempuran.

2. TUGAS POKOK:

Dalam rangka pembinaan serta pengendalian wilajah dan penjusunan Petahanan Rakjat Total menghimpun seluruh potensi nasional supaja terwudjud home front jang kokoh kuat, maka fungsi utama dari pada Organisasi Pertahanan Sipil meliputi 2 (dua) bidang sbb:

a. *Bidang Kewaspadaan Pertahanan:* ,

1). Tindakan/usaha2 untuk mendjamin keamanan didalam Negeri maupun tindakan/usaha2 pertahanan guna mentjegah segala kemungkinan pengatjauan dan sabotase baik jang datangnja dari luar maupun dari dalam.

2). Tindakan/usaha2 pertahanan guna menangkis serangan2 musuh dari luar.

3. Tindakan dari usaha2 tersebut 1 dan 2 diatas tidak dapat dipisah-pisahkan, karena sifat dari gangguan keamanan didjaman modern ini, baik jang timbul didalam negeri ada hubungannja dengan luar negeri maupun dalam suatu serangan musuh dari luar negeri selalu dida hului dengan pengatjau maupun sabotase dari dalam negeri.

4). Pertahanan Rakjat Total dalam rangka perang wilajah dengan sistim wehrkreisse harus tetap adanja:

a). pertahanan de facto militer.
b). pertahanan de facto pemerintahan.
c.). penglaksanaan kesedjahteraan rakjat.

5) Pertahanan de facto militer adalah suatu tindakan/usaha2 untuk tetap adanja pertahanan de facto militer dengan ada-

nja pasukan territoriaal dan seluruh rakjat umumnja dalam rangka mobilisasi umum untuk mengerahkan semua tenaga.

— Pertahanan de facto pemerintahan adalah suatu tindakan/usaha untuk dapat tetap suatu pertahanan jang dapat dirasakan oleh rakjat dan harus diatur sedemikian rupa supaja de facto Pemerintah Republik Indonesia tetap tegak kekuasaannja (desa demi desa, distrik demi distrik via sistim kantong2 jang flexible).

— Pelaksanaan kesedjahteraan Rakjat adalah bahwa untuk perdjoangan jang lama (diepte dalam perdjoangan) perlulah digerakkan tindakan/usaha2 untuk kesedjahteraan rakjat, karena rakjat, mesti mengetahui dan merasa bahwa kemerdekaan adalah kebahagian baginja, untuk itu ia harus bangun dan ia pertahankan dengan darah dan keringatnja sendiri.

Kalau tidak demikian tak akan bisa dimobilisir tenaga sepenuhnja untuk perdjoangan lama jang berat itu.

6). Tindakan/usaha2 tersebut diatas marupakan gerakan jang luas untuk mentjapai kekuatan pertahanan dengan doktrin Perang Wilajah.

a. *Bidang sosial dan tehnis:*

1). Ekonomi jang meliputi produksi, distribusi, angkutan/perdagangan dan moneter.

2). Sosial kesedjahteraan meliputi pemberantasan penganguran, pelatjuran dan perbantuan2.

3). Pendidikan. kebudajaan dan agama/kepertjajaan.

4). Kesehatan rakjat dan hygiene.

5). Perlindungan masjarakat (bidang technis):

a). Bahaja udara.
b). Bahaja radiasi dan bacteriologi.
c). Dinas Donor Daerah.
d). Evakuasi.
e). Hospitalisasi.
f). Keamanan lalu-lintas.
g). Resque dan salvage.
h). Dan lain sebagainja.

3. *O R G A N I S A S I :*

Mengingat bahwa tugas pokok Pertahanan Sipil ditentukan dalam dua bidang, maka organisasi Pertahanan Sipil diselenggarakan dalam bentuk unit2 jang berkedudukan sebagai badan pengolah kebidjaksanaan, perentjanaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan.

Unit2 ini harus:

a. Meliputi unit regional desa.
b. Meliputi unit kantor2 Depar-

temen, Instansi, Djawatan, Perguruan - Tinggi|Universitas, perusahaan Negara, Perusahaan Swasta jang vitaal dan lain sebagainja.

c. Meliputi Unit chusus pengawasan pantai.

d. Dan lain sebagainja distsuaikan menurut keadaan setempat.

4. PIMPINAN:

a. Tingkat DEPAD:

1). Ditingkat Departemen Angkatan Darat. IRDJENTERPRA cq. As. II IRDJENTERPRA memegang PIMPINAN selaku INSPEKTUR PERTAHANAN SIPIL dan dalam mendjalankan tugas kewadjibannja dibantu oleh suatu STAF PERTAHANAN SIPIL TINGKAT DEPAD.

2). Dalam kedudukannja sebagai INSPEKTUR PERTAHANAN SIPIL TINGKAT DEPAD dibantu oleh tenaga2 technis daripada Departemen2, Instansi2 dan Djawatan2 Pemerintah dan lain2 ditingkat Pusat jang diperlukan sesuai dengan tugasnja diantaranja dari Departemen D.N.O.D., Departemen Kepolisian, Departemen Kesedjahteraan Sosial, Departemen Kesehatan dan lain sebagainja.

3). Didalam pimpinan technis verticaal kebawah harus ada koordinasi dari pada Departemen2 jang dikoordinir oleh Inspektur Pertahanan Sipil DEPAD.

4). Kekuasaan dan tanggung djawab Inspektur Pertahanan Sipil tingkat DEPAD meliputi pekerdjaan2 perentjanaan, pengawasan, koordinasi dan pimpinan technis daripada kegiatan-kegiatan dalam lapangan Pertahanan Sipil ditingkat wilajah Angkatan Darat.

b. Tingkat KODAM (DASWATI I):

1). Ditingkat Komando Daerah Militer (DASWATI-I), IRTERPRA cq. As. II IRTERPRA atas nama PANGDAM, memegang PIMPINAN selaku Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODAM dan dalam mendjalankan tugas kewadjibannja dibantu oleh suatu Markas Pertahanan Sipil tingkat KODAM.

2). Dalam kedudukannja sebagai Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODAM dibantu oleh tenaga2 technis dari Instansi2, Djawatan2 Pemerintah dan lain2 ditingkat KODAM jang diperlukan sesuai dengan tugasnja diantaranja dari Pemerintah Sipil, Kepolisian, Sosial, Kesehatan dan lain sebagainja.

3). Didalam pimpinan technis verticaal kebawah harus ada ko-

ordinasi daripada Instansi dan Djawatan Pemerintah tingkat KODAM jang dikoordinir oleh Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODAM.

4). Kekuasaan dan tanggung djawab Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODAM meliputi pekerdjaan2 perentjanaan, pengawasan, koordinasi dan pimpinan technis daripada kegiatan2 dalam lapangan Pertahanan Sipil ditingkat KODAM.

c. Tingkat KOREM (KARESIDENAN):

1. Ditingkat Komandan Resort Militer (Karesidenan), P. IRTERPRA cq. As. II P. IRTERPRA atas nama DANREM sebagai Koordinator daripada Markas2 Pertahanan Sipil ditingkat KODIM (Kabupaten) jang termasuk dalam lingkungan kekuasaannja dan susunannja dibentuk menurut keadaan setempat.

2). Ditingkat KOREM dimana daerahnja merupakan daerah swatantra tingkat I, maka susunan pimpinan Markas Pertahanan Sipil konform tingkat KODAM dengan ketentuan bahwa hyrarchi DANREM tetap bertanggung djawab kepada PANGDAM.

d. Tingkat KODIM (DASWATI-II):

1). Ditingkat Komando Distrik Militer (Kabupaten) Perwira SKODIM-II atas nama DANDIM memegang PIMPINAN selaku Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODIM dan dalam mendjalankan tugas kewadjibannja dibantu oleh suatu Markas Pertahanan Sipil tingkat KODIM.

2). Dalam kedudukannja sebagai Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODIM dibantu oleh tenaga2 technis dari Instansi2, Djawatan2 Pemerintah dan lain2 ditingkat KODIM. jang diperlukan sesuai dengan tugasnja, diantaranja dari Pemerintah Sipil, Kepolisian, Sosial, Kesehatan dan lain sebagainja.

3). Didalam pimpinan technis verticaal kebawah harus ada koordinasi daripada Instansi2, Djawatan2 Pemerintah ditingkat KODIM jang dikoordinir oleh Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODIM.

4). Kekuasaan dan tanggung djawab Komandan Markas Pertahanan Sipil tingkat KODIM meliputi perkerdjaan2 perentjanaan, pengawasan, koordinasi dan pimpinan ttchnis daripada kegiatan2 dalam lapangan pertahanan sipil ditingkat KODIM.

e. Tingkat KAWEDANAN (DISTRIK):

Ditingkat Kawedanan (distrik) bila dianggap perlu BUTERPRA bertindak sebagai koordinator daripada Markas2 Pertahanan Sipil ditingkat Ketjamatan dan susunannja dibentuk menurut keadaan setempat.

f. Tingkat Ketjamatan:

Ditingkat Ketjamatan, BUTERPRA memegang pimpinan Markas Pertahanan Sipil dengan dibantu disamping tenaga2 militer dari Staf BUTERPRA, djuga pegawai2 dari Instansi2, Djawatan2 dilingkungan Ketjamatan.

g. Tingkat Desa:

Ditingkat Desa/Kelurahan|Negeri, Kepala Desa/Lurah memegang pimpinan Markas Pertahanan Sipil dengan dibantu oleh Komandan O.P.R. dan beberapa tenaga dari ponggawa desa/kelurahan/Negeri jang dianggap perlu.

5. HUBUNGAN DAN KOMANDO:

a. Hubungan antara Staf Pertahanan Sipil tingkat DEPAD dengan Markas2 Pertahanan Sipil ditingkat KODAM dan seterusnja bersifat technis.

b. Hubungan Komando KASAD ke PANGDAM dan seterusnja kebawah bersifat administratief organisatoris/taktis.

6. PERALATAN DAN PEMBIAJAAN:

Kebutuhan peralatan dan pembiajaan jang bersifat administrasi routine, dibebankan kepada anggaran belandja M.K.N. jang dalam hal ini diadjukan anggaran chusus melalui saluran hierarchie dari Organisasi Pertahanan Sipil.

7. KETENTUAN2 LAIN:

a. Instruksi ini untuk dipergunakan sebagai pegangan/dasar dalam penjusunan dan penjelenggaraan Pertahanan Sipil ditingkat DEPAD maupun ditingkat KODAM (Daerah), dan stterusnja dengan disesuaikan menurut keadaan setempat.

b. Pelaksanaan daripada ketentuan ini untuk daerah dipertanggungdjawabkan kepada para PANGDAM, kerdjasama dengan Lembaga2 Kenegaraan, Pemerintahan dan Kemasjarakatan (FRONT NASIONAL DLL), mengingat peranan mereka dalam organisasi Pertahanan Sipil tersebut.

c. Ketentuan2 administratief dan lain2 jang belum termuat dalam instruksi ini, akan dikeluarkan tersendiri berupa

Keputusan2 atau petundjuk2 Instruksi ini berlaku mulai hari dan tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 30-12-1961

Kepala Staf Angkatan Darat,
A. H. NASUTION
Djenderal TNI.

*

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG² No. 1 TAHUN 1962,

TENTANG

PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

1. bahwa untuk mempertinggi serta menggalang kewaspadaan Nasional dalam rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu menggalang dan mengerahkan semua potensi nasional dari seluruh lapisan masjarakat kearah perdjoangan Negara, sesuai dengan program Pemerintah serta sifat dan azas pertahanan Negara, jaitu pertahanan rakjat total, jang terlatih dan teratur dibawah pimpinan Pemerintah;
2. bahwa untuk mewudjudkan penggalangan dan pengerahan segala potensi nasional tersebut perls dipersiapkan mobilisasi umum, jang mengatur tentang pengerahan, penggalangan dan penggunaan segala potensi jang diperlukan, serta untuk menjalurkan spontanitet rakjat guna menjiapkan diri setjara sukarela turut aktif dalam usaha pembebasan Irian Barat pada chususnja dan dalam usaha pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara pada umumnja;
3. bahwa untuk memperoleh hasil jang sebesar-besarnja semua tenaga dan kekuatan jang dikerahkan perlu dilatih terlebih dahulu, baik untuk kepentingan perlawanan aktif, maupun untuk tjadangan umum;
4. bahwa berhubung dengan itu dirasa perlu segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan jang mengatur pemanggilan dan pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara;
5. bahwa karena keadaan jang memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

a. Undang-undang Dasar pasal 22 dan 30;

b. Ketetapan MPRS R.I. No. II/MPRS/1960 Lampiran A Bab III No. 54, 60, dan 61;

c. Tri Komando Rakjat tanggal 19 Desember 1961;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 tahun 1961 tanggal 11 Desember 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional;

Mendengar :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 24 Djanuari 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I.
TUDJUAN DAN KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Presiden/Panglima Tertinggi Anggatan Perang Repuplik Indonesia setelah mendengar Dewan Pertahanan Nasional menjatakan Mobilisasi Umum dan memerintahkan pemanggilan dan pengerahan Warga Negara untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara.

Pasal 2.

Pemanggilan dan pengerahan Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara termaksud pada pasal 1 bertudjuan :

a. mengikut-sertakan rakjat dalam pertahanan Negara;

b. mempersiapkan perlawanan rakjat aktif dan tjadangan umum jang teratur dan terlatih untuk membantu kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada chususnja dan Angkatan Bersendjata pada umumnja jang merupakan inti pertahanan, baik didalam melakukan pertempuran-pertempuran, maupun dalam usaha dibidang pertahanan sipil;

c. memberikan latihan-latihan kepada mereka itu mengenai hal-hal jang bersangkutan dengan tudjuan kewadjiban dan persiapan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas.

Pasal 3.

(1) Setiap Warga Negara Indonesia, baik-laki-laki maupun, wanita, jang berumur antara 18 sampai dengan 48 tahun, dapat diwadjibkan untuk mendjalankan kewadjiban-kewadjiban dalam rang

ka penjelenggaraan pertahanan sipil, serta kewadjiban untuk mengikuti latihan-latihan jang berhubungan dengan kewadjiban itu.

(2) Setiap Warga Negara baik laki-laki maupun wanita, jang berumur antara 18 sampai dengan 40 tarun, dapat diwadjibkan mendjalankan kewadjiban-kewadjiban untuk membantu Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada chususnja dan Angkatan Bersendjata pada umumnja dalam melakukan pertempuran-pertempuran, baik dalam bentuk perlawanan rakjat aktif, maupun dalam bentuk tjadangan umum jang terlatih dan teratur, berikut segala kewadjiban guna mengikuti segala latihan-latinan jang diperlukan.

Pasal 4.

Kewadjiban-kewadjiban sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewadjiban beladjar, merugikan mata pentjaharian btau merugikan vitalita sesuatu perusahaan atau badan.

BAB II.
PELAKSANAAN.

Pasal 5.

(1) Mereka jang tersebut dalam pasal 3 ajat (1) dapat dipanggil mendjalankan kewadjiban-kewadjiban dalam penjelenggaraan pertahanan sipil, baik pekerdjaan-pekerdjaaan dibidang kewaspadaan keamanan/pertahanan maupun didang sosial dan tehnis jang bermaksud:

a. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk menangkis, mengatasi dan/atau memperketjil akibat-akibat dari pada serang-serangan pihak lawan, baik jang timbul dari dalam, maupun dari luar;

b. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kelandjutan dan kelantjaran roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum;

c. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kesedjahteraan rakjat pada umumnja;

d. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kelandjutan kelantjaran roda perekonomian;

e. Tindakan-tindakan/usaha-usaha dalam rangka perlindungan masjarakat.

Pekerdjaan-pekerdjaan dalam pepenjelenggaraan pertahanan sipil ini setjara chusus dan terperintji akan ditentukan dalam ketentuan pelaksanaan pertahanan sipil tersendiri.

(2) Mereka jang tersebut dalam pasal 3 ajat (2) dapat dipanggil untuk mendjalankan kewadjiban-kewadjiban baik dalam hubungan dengan tugas-tugas perlawan-

an aktif jang berupa gerilja, infiltrasi, sabotase dan lain sebagainja, maupun bantuan setjara langsung terhadap tugas-tugas tempur kepada Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada chususnja dan Angkatan Bersendjata pada umumnja.

Pasal 6.

(1) Pemanggilan dan penerimaan terhadap mereka jang tersebut dalam pasal 3, dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional jang daaam pelaksanaannja menurut keadaannja dapat membentuk suatu badan chusus untuk keperluan itu.

(2) Untuk kelantjaran pemanggilan dan penerimaan tersebut dalam ajat (1) pasal ini, di Daerah-daerah Tingkat I dan II dibentuk pula suatu badan chusus sesuai dengan ajat (1) pasal ini dan ditingkat Ketjamatan menurut keadaan setempat dapat dibentuk pula suatu badan chusus tadi.

(3) Susunan, tugas dan tanggung-djawab daripada badan chusus tersebut akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(4) Tata tjara pemanggilan, penerimaan, pendaftaran dan penjaringan akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan tersendiri.

Pasal 7.

Para pemimpin sekolah/perguruan tinggi/universitas, pimpinan djawatan/badan/perusahaan, madjikan dan lain-lainnja jang membawahi mereka tersebut dalam pasal 3, wadjib membantu terlaksananja segalala ketentuan jang diperuntukkan bagi mereka pada waktu mereka menerima panggilan sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 5.

BAB III.

P E N G G U N A A N

Pasal 8.

(1) Mereka jang dipanggil tersebut dalam pasal 5 ajat (1), penggunaannja dapat dibagi-bagi dalam rombongan-rombongan ataupun dibagi dalam regu-regu penugasan, sesuai dengan pekerdjaan-pekerdjaan dan tugas-tugas jang diperlukan didalam penjelenggaraan pertahanan sipil jang akan diatur kemudian dalam suatu ketentuan pelaksanaan pertahanan sipil tersendiri.

(2) Mereka jang dipanggil tersebut dalam pasal 5 ajat (2), penggunaannja dapat dibagi-bagi dalam rombongan-rombongan jang diperlukan dan akan ditugaskan membantu Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada chususnja dan Angkatan Bersendjata pada umumnja. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini akan diatur tersendiri.

BAB IV.

POKOK-POKOK PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Pasal 9.

(1) Mereka jang dipanggil

untuk penggunaan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ajat (1), diberikan latihan-latihan:

a. Dasar-dasar keperdjuritan jang meliputi latihan physik dan mental;
b. Latihan-latihan chusus sesuai dengan pembagian regu-regu penugasan pertahanan sipil.

(2) Mereka jang dipanggil untuk penggunaan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ajat (2), diberikan latihan-latihan:

a. Dasar-dasar Infanteri atau dasar-dasar pokok sesuai dengan sifat masing-masing Angkatan;

b. Latihan-latihan chusus jang sesuai pula dengan pekerdjaan-pekerdjaan chusus jang diperlukan.

(3) Dalam penjelenggaraan pendidikan dan latihan dipergunakan pelatih-pelatih dan alat perlengkapan latihan dari lingkungan Angkatan Perang pada chususnja dan Angkatan Bersendjata pada umumnja dan tenaga-tenaga sipil dalam lingkungan departemen/djawatan jang ada didaerah-daerah. Pelaksanaan dan koordinasi mengenai pendidikan dan latihan diselenggarakan oleh Penguasa Perang Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah/Gubernur Kepala Daerah dimasing-masing daerah.

BAB V.
ADMINISTRASI DAN PEMBIAJAAN.

Pasal 10.

(1) Pembiajaan untuk keperluan pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belandja chusus.

(2) Hal-hal lain jang berhubungan dengan administrasi, chusus untuk pelaksanaan peraturan ini, akan diatur tersendiri.

BAB VI.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 11.

(1) Peraturan-peraturan hukum pidana tentara dan disiplin tentara berlaku untuk mereka jang disebut pada pasal 3 dari sedjak mereka dipanggil dan selama mereka mengikuti/mendjalani latihan-latihan/pekerdjaan-pekerdjaan/kewadjiban-kewadjiban seperti termaksud pada pasal 5.

(2) Apabila seseorang tersebut pada ajat (1) pasal ini dalam masa tersebut dalam ajat itu melakukan sesuatu tindak pidana, maka ia diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Pasal 12.

(1) Mereka jang tersebut pada pasal 7, ialah pemimpin sekolah/Perguruan tinggi/Universitas, pim

pinan djawatan/ badan/perusahaan, madjikan dan lain-lainnja, jang membawahi mereka tersebut pada pasal 3, jang dengan sengadja tidak mau membantu atau dengan sengadja menghalang-halangi terlaksananja ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 5 berhubungan dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman pendjara 5 tahun.

(2) Tindak pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini adalah kedjahatan.

BAB VII.

P E N U T U P.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 19 Desember 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tgl. 6 Pebruari 1962.
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
S U K A R N O.

Diundangkan di Djakarta
pada tgl. 6 Pebruari 1962.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MOHD. ICHSAN.

Lembaran Negara th. 1962 no. 8.

*

PERINTAH HARIAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

Kepada segenap anggota Angkatan Bersendjata pada umumnja, anggota Angkatan Udara pada chususnja.

Pada hari Djum'at, tanggal 19 Djanuari 1962 kami telah memutuskan untuk memberhentikan Laksamana Udara S. Suryadarma selaku Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara dan menetapkan Laksamana Muda Udara Omar Dani sebagai penggantinja.

Berhubung dengan tugas jang sedang kita hadapi untuk membebaskan Irian Barat, kami meng anggap perlu untuk mengeluarkan Perintah Harian ini.

Pemberhentian Laksamana Udara S. Suryadarma dengan hormat selaku Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara adalah berhubungan dengan pengangkatannja sebagai Menteri/Penasehat Urusan Militer, sedang pengangkatan Laksamana Muda Uda-

ra Omar Dani sebagai penggantinja adalah dalam rangka peremadjaan Angkata Udara.

Djauhilah tafsiran-tafsiran jang lain daripada itu.

Laksanakan dengan tenang tugas jang telah diberikan kepadamu ditempat-mu masing-masing.

Djagalah keutuhan dan persatuan Angkatan Udara sebagai alat revolusi jang telah membuktikan djasa-djasanja.

Dikeluarkan di Bogor
pada tanggal 20 Djanuari 1962

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG R. I.
SUKARNO

Sekian Perintah Harian saja.
Laksanakan !

.... „Kita telah menjatakan kepada dunia dan kepada pihak Belanda bahwa soal Irian Barat adalah sengketa antara Belanda dan Indonesia. Tiap-tiap penjelesaian daripada soal Irian Barat tanpa Indonesia bukan suatu penjelesaian. Dan kalau Belanda mau menjelesaikan soal Irian Barat ini tanpa Indonesia, Indonesia telah bersedia menjelesaikan Irian Barat tanpa Belanda."

Dr. J. Leimena

Diutjapkan pada hari sumpah pemuda 28/10-'61.

Mimbar PENERANGAN

...ERGIAT TRI KOMANDO RAKJAT

...AHUN KE XIII No. 3 MARET 1962

MIMBAR PENERANGAN

madjalah untuk djurupenerang

diterbitkan oleh Deppen Djakar

Berkala bulanan
Untuk Djurupenerang
Diselenggarakan oleh :
Penerangan Daerah
Direktorat Publisitet &
Deppen

Dibantu oleh:

Para Djurupenerangan Pusat dan Daerah serta Para Pemuka dan Peminat masalah-masalah Penerangan

Alamat:
Redaksi/Administras
Merdeka Barat No. 9
Djakarta
Redaksi': G. 820 pes. 3
Administrasi : O.P. 119

DALAM NOMOR INI

GAMBAR KULIT

„Saat X" akan tiba. . . . .

„Trikomando Rakjat berdjalan terus! Saja tak pernah mentjabut Trikomando Rakjat", kata Presiden dalam amanatnja pada hari Raja Idulfitri baru-baru ini.

MENJAMBUT HARI RAYA 'IDULFITRI 1 SJAWAL 1381 H.

SEGALA pudji dan sjukur kita pandjatkan kehadhirat Allah S.W.T. jg. telah memberikan kita kekuatan dan bimbingan terutama dalam memperdjuangkan pembebasan I.B. jang dipertegas wilajah kekuasaan Republik Indonesia jang dewasa ini telah memuntjak dan meminta perhatian seluruhnja dari bangsa kita. Berbahagialah mereka jang telah dapat menunaikan ibadah puasanja sebulan penuh dengan segala kesabaran serta chusju'.

Sebagaimana diketahui, bahwa puasa itu memang telah diwadjibkan bagi kita semua Muslimin dan Muslimat. Hal ini dapat dibatja dalam surat Baqarah ajat 183 jang artinja dalam bahasa Indonesia demikian:

„Wahai segala manusia jang telah mengaku ber-Tuhan. Dimestikan (diwadjibkan) kepada-

mu berpuasa, sebagai jang telah dimestikan djuga kepada ummat manusia jang sebelum kamu, supaja kamu djuga mendjadi orang jg. patuh, berbudi atau Taqwa".

Kita wadjib bersjukur kepada Allah, bahwa kita masih dapat mengalami Hari Raya jang mulia ini dan Insja Allah dapat mengalami pada tahun2 jang mendatang.

Djanganlah hendaknja dilupakan disamping kita merajakan Hari Raya 'Idulfitri ini, djuga akan tugas kita jang sedang kita hadapi dan laksanakan dewasa ini ialah melaksanakan Tri Program Kabinet, teristimewa program Kabinet ketiga, jaitu pembebasan Irian Barat jang dipertegas serta diperkuat lagi dalam Trikomando Rakjat.

Dibawah ini kami muat tiga buah pidato penting jang masing-masing diutjapkan dalam menjambut Hari Raya 'Idulfitri tahun ini.

Seperti tahun2 jang lampau djuga tahun ini sembahjang Ied diadakan dihalaman Istana Negara-Merdeka jang diikuti oleh ribuan muslimin dan muslimat diantaranja Presiden Sukarno dan diimami oleh ketua DPRGR H. Zainul Arifin.

Sambutan Presiden Panglima Tertinggi

Presiden-Panglima Tertinggi Sukarno dalam amanatnja sesudah selesai sembahjang Idulfitri itu a.l. sebagai berikut:

„Lebih dahulu Presiden meminta ma'af kepada segenap rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas segala kechilafan2 baik jang diketahui maupun jang tidak diketahui. Selandjutnja Presiden meminta agar kita semua merenungkan dan mentjamkan sedalam-dalamnja bahwa pada dewasa ini kita dalam keadaan perdjuangan, pemerasan keringat untuk memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Bahwa kita disamping sedang mendjalankan kewadjiban untuk kita sendiri, djuga mendjalankan kewadjiban untuk Nusa dan Bangsa. Banjak kewadjiban jang belum kita selesaikan, kata Presiden.

Presiden menandaskan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia tjinta damai. Dan sebagaimana diutjapkan oleh Presiden, pada pidato Nuzulul Qur'an merupakan adjakan dan tawaran kepada bangsa Belanda untuk menjelesaikan masalah Irian Barat dengan tjara damai. Jaitu djangan

sampai terdjadi ada satu tetes darahpun.

Tetapi adjakan untuk berunding itu ialah atas dasar penjerahan kekuasaan atas daerah Irian Barat kepada Republik Indonesia. Bukan penjerahan kepada PBB atau siapapun djuga, tetapi kepada Republik Indonesia.

Ditegaskan pula oleh Presiden bahwa dalam pidato pada Nuzulul Qur'an itu djuga ditandaskan bahwa sekalipun ada uluran tangan pihak Indonesia, namun Trikomando Rakjat djalan terus. Saja tak pernah mentjabut Trikomando Rakjat. Malahan saja perintahkan kepada seluruh Angkatan Perang R.I. untuk bersiap2 diri guna setiap waktu menerima perintah membebaskan Irian Barat dengan djalan apapun djuga jang halal. Djalan itu ialah ber-matjam2, kata Presiden. Djalan infiltrasi, djalan pertempuran ketjil djalan pertempuran besar, kalau perlu djalan perang total. Kita bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membebaskan Irian Barat dengan djalan apapun djuga jang halal.

Sekarang kata Presiden, saja umumkan terang-terangan dimuka saudara2 dan seluruh ummat didunia, bahwa sedjak pidato pada Nuzulul Qur'an tersebut saja mendapat keterangan bahwa ada tanda2 mengenai ketjondongan2 dari pihak Belanda untuk mengadakan persiapan2 untuk perundingan formil. Demikian Presiden, tetapi masih belum bundar, djelas dan tegas bagi saja, bahwa perundingan formil itu didasarkan atas hanja tjara penjerahan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia. Mungkin ada ketjondongan kearah itu. Tetapi kata Presiden selandjutnja. Trikomando Rakjat belum saja tjabut. Ingat, tahun 1962 ini djuga Irian Barat harus sudah masuk dalam wilajah kekuasaan R.I. Pintu tetap masih terbuka bagi fihak Belanda untuk mengadakan perundingan mengenai penjelesaian masalah Irian Barat setjara damai.

„Let us have a peaceful solution. Djangan ada setitik darah jang menetes"!

Selandjutnja Presiden mengingatkan kepada segenap rakjat Indonesia betapa ribuan rakjat Irian Barat jang meringkuk dalam pendjara2 kolonialis Belanda di Irian Barat. Sebagian daripada bangsa Indonesia rakjat Irian Barat ditindas oleh kolonialis Belanda, mereka terbungkam tak dapat bersuara. Dan mereka menunggu2 pembebasan dan ban-

tuan dari saudara2nja. Guna pembebasan ini Presiden Sukarno kemudian dalam amanatnja memerintahkan kepada segenap rakjat Indonesia untuk mempergiat pelaksanaan Trikomando Rakjat".

Djika kita membebaskan Irian Barat selekas mungkin, dengan djalan apapun, maka kita diridhoi oleh Allah S.W.T.

Demikian Presiden Sukarno.

Sambutan Menteri Agama.

Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuchri dalam menjambut Hari Raya 'Idulfitri tahun ini diantaranja sebagai berikut: „Berbahagialah kaum Muslimin jang setelah dapat asrornja (bahasa Arab, artinja rahasia2nja. Red.) berpuasa, lebih meresapi arti lapar, lalu dengan keinsjafan sendiri melipat gandakan sumbangannja dalam membantu meratakan kemakmuran masjarakat dengan turut menertibkan djalannja lalu-lintas sandang pangan rakjat, menjingkirkan segala kepentingan jang bisa merugikan orang lain.

Diserukan pula, supaja kita lebih mempererat persatuan, saling mema'afkan segala kesalahan, serta menghapus segala rasa dendam perorangan, agar dengan demikian tetap utuh dan bulatlah kesatuan potensi kita lahir bathin. Hal itu penting dalam tingkat perdjuangan kita dewasa ini, untuk terselenggaranja masjarakat adil dan makmur, untuk utuhnja kedaulatan dan wilajah tanah air, jang bebas dari kekuasaan dan gangguan kolonialisme dalam segala bentuknja, semua itu kita selenggarakan dibawah naungan keridlaan Tuhan jang Maha Esa.

Selandjutnja beliau menjatakan harapan kehadhirat Tuhan, semoga kaum Muslimin dan Muslimat jang telah menunaikan ibadah puasa selama sebulan dimasukkan kedalam golongan orang-orang jang berhasil telah bisa memetik buah dan hikmah jang terkandung didalam bulan Ramadhan, jaitu rahasia2 besar jang keutamaannja akan mendatangkan rachmat sebesar-besarnja bagi rakjat Indonesia pada umumnja.

Dan sebagai bangsa jang sedang berdjuang, kita mengharapkan pula,semoga kita memperoleh tambahan bekal iman, bathin jang bertambat kuat, supaja dengan itu mendjadi bertambahlah kebulatan hati kita bahwa biar bagaimana dan dalam keadaan apapun, kita tetap menerus-

kan perdjuangan jang belum selesai ini.

'Idulfithri bukanlah mertju suar tanda telah berachirnja suatu tugas untuk memulai melaksanakan tugas2 lain, baik setjara tingkat demi tingkat, maupun serentak.

Demikian a.l. pokok2 sambutan Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuchri.

Sambutan Djend. Nasution

Wakil Menteri Pertama urusan pertahanan keamanan Djendral A.H. Nasution dalam sambutannja pada hari raja 'Idulfithri ini diantaranja menjatakan, bahwa 'Idulfithri jang sutji ini selalu mendjiwai kita untuk mentjapai tjita2 dan memulai tugas jang kita hadapi itu.

Selandjutnja dikatakan, bahwa tahun 1962 jang kita hadapi ini adalah tahun jang sungguh berat, karena kita sekaligus hendak menjelesaikan Triprogram dan Trikomando jaitu pemulihan keamanan, sandang-pangan dan persoalan Irian Barat.

Persoalan Irian Barat pada tahun ini berada dalam taraf jang menentukan atas claim nasional kita, serta persoalan keamanan di Djawa Barat akan kita selesaikan dalam tahun ini djuga. Persoalan menudju Swa Sambada Beras harus dapat direalisasikan dengan mengerahkan sebahagian besar tenaga kearah pembangunan.

Untuk menghadapi persoalan2 ini, kata beliau selandjutnja, kita memerlukan persatuan jang bulat. Penghematan dalam segala bidang perlu diadakan.

Kita semuanja supaja hidup sederhana, belum waktunja untuk segolongan hidup berlebih-lebihan sedangkan golongan lainnja
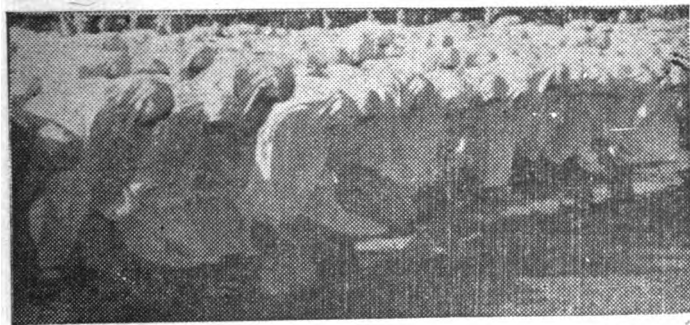
Kaum Muslimat sedang mendjalankan perintah Tuhan melakukan sembahjang.

masih menderita. Dan saja tekan-kan sekali lagi bahwa penghe-matan bukanlah berarti kemela-ratan dan kesengsaraan.

Diserukan pula agar seluruh warga masjarakat turut memban-tu Pemerintah dalam segala usa-ha untuk melaksanakan Tripro-gram pemerintah ini jang menen-tukan kebahagian hari depan kita.

Achirnja Djendral Nasution mengutjapkan „Selamat Hari Raya 'Idulfithri" ma'af lahir ba-thin atas segala kekurangan dan kelalaian.

Pada bulan baik hari baik ini kamipun dari segenap pengasuh „Mimbar Penerangan" dengan perantaraan madjalah ini mohon ma'af sebanjak-banjaknja, karena kita ini manusia tak luput dari pada segala kekeliruan, kechi-lafan dan kesalahan. Tiada ga-ding jang tak retak.

Minal 'aidin wal faizin.
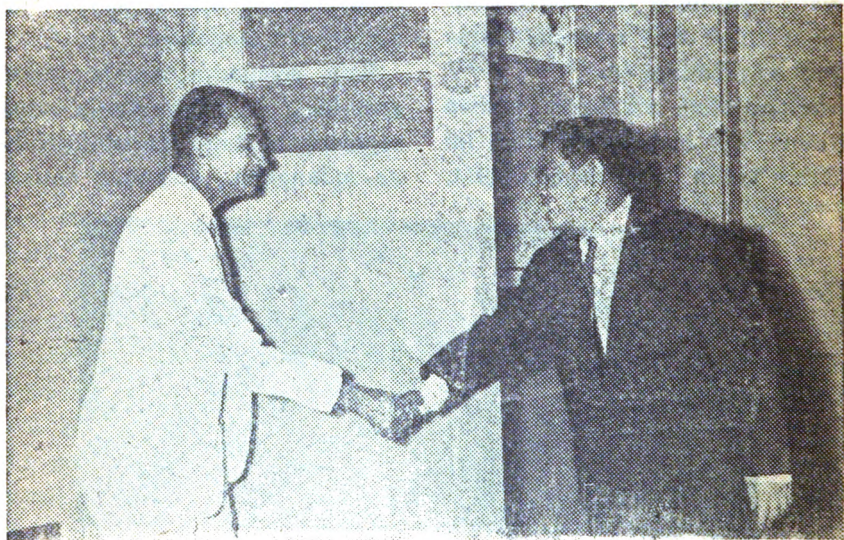
Wakil M.P. Urusan Chusus]Menteri Penerangan Muhd. Yamin mene-rima kundjungan Atase Pers Kedutaan Besar Inggris. Mr. G.R. Gauntlet.
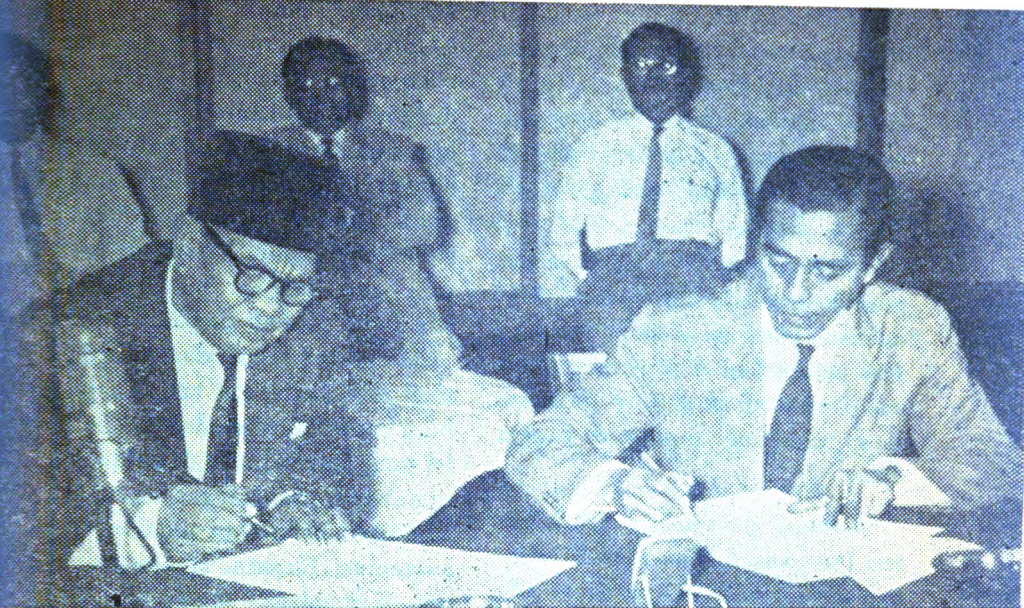
Menteri Penerangan lama Maladi (kanan) menjerahkan . . . .
dan Menteri Penerangan Baru Muhd. Yamin (kiri) menerima . . . . .

Timbang terima :

PIMPINAN DEPARTEMEN PENERANGAN

Dari Menteri Maladi kepada Menteri Muhd. Yamin

Pada hari Rabu pagi tanggal 14 Maret 1962 bertempat distudio V Radio Republik Indonesia Djalan Merdeka Barat Djakarta diadakan upatjara timbang terima Pimpinan Departemen Penerangan dari Menteri Penerangan lama Maladi (jang diangkat mendjadi Menteri Olah Raga) kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Chusus/Menteri Penerangan baru Muhd. Yamin.

Upatjara timbang terima itu selain dihadiri oleh Kepala² Djawatan/Direktorat/Bagian, Seksi dalam lingkungan Deppen dan lainnja djuga para undangan.

Surat keputusan Presiden mengenai pengangkatan Menteri Penerangan baru Muhd. Yamin itu dibatjakan oleh Kepala Bagian Urusan

Pegawai Deppen Sujono jang kemudian setelah itu dibatjakan pula naskah timbang terima. Setelah mana naskah tersebut ditandatangani, mula-mula oleh Menteri Maladi kemudian oleh Menteri Muhd. Yamin.

Sebagaimana terdapat pada adat bangsa kita atau dalam peribahasa kita dikatakan „Datang memperlihatkan muka dan pergi menampakkan punggung", hal ini tetap dipegang teguh oleh bangsa kita.

Demikian pula halnja oleh Menteri Penerangan lama Maladi, sebelum meninggalkan Departemen Penerangan, lebih dahulu mengadakan pertemuan perpisahan dan menimbang terimakan djabatannja kepada penggantinja jang baru jaitu Muhd. Yamin.

Menteri Penerangan lama Maladi dalam kata perpisahannja itu diantaranja sbb:

Jang hadlir disini adalah kawan2 dari Depart. Penerangan, jaitu kepala2 Djaw., Direktorat, Biro serta Bagian2 dan staf masing2, anggota2 Kabinet Menteri, jang selama hampir tiga tahun ini telah membantu saja dalam mengemudikan Dapartemen Penerangan. Mereka sekarang hadlir untuk menjaksikan timbang terima antara Menteri Penerangan jang lama dengan Menteri Penerangan jang baru.

Upatjara timbang terima ini dengan disertai satu naskah, perlu saja beritahukan, bahwa ini adalah jang pertama kali mendjadi tradisi daripada Departemen Penerangan, karena di-waktu2 jang lampau belum pernah ada suatu naskah timbang terima.

Mungkin sekali dalam redaksinja ada beberapa kalimat jang baru pula tetapi mudah-mudahan isi jang maksudnja tidak lain menjatakan adanja pergantian itu, mendjadi keresmian didalam dokumentasi Negara. Hanja itu sadja maksudnja, supaja didalam Departemen Penerangan ada satu dokumentasi tentang beberapa peralihan2 dan pergantian2 pimpinan.

Pula didalam pada itu dilampirkan djuga satu ichtisar ringkas daripada keadaan Departemen Penerangan, jang boleh djuga dianggap sebagai satu progress report daripada pekerdjaan2 Departemen Penerangan selama ini. Tetapi sengadja saja hanja mengambil beberapa pokok jang penting sadja untuk diketahui oleh Sdr. Menteri Penerangan, sehingga didalam kelandjutan Departemen Penerangan ini Bapak Muhammad Yamin telah mengetahui setjara agak djelas hal2

jang penting dari pekerdjaan jg. telah kami lakukan.

Baiklah saja batjakan sebentar ichtisar ringkas tentang keadaan Departemen Penerangan pada saat timbang terima, jaitu pada tanggal 14 Maret 1962.

Pendahuluan.

Dengan didekritkannja kembali U.U.D. 1945 pada tanggal 5 Djuli 1959 oleh P.J.M. Presiden Sukarno sebagai U.U.D. Repubik Indonesia, dan diamanatkannja oleh beliau Manifesto Politik Republik Indonesia pada tg. 17 Agustus 1959 sebagai Pedoman resmi perdjuangan kita, jang kemudian diperkuat sebagai garis2 besar Haluan Negara oleh M.P.R.S., dan jang harus dipeladjari, difahami dan dijakini oleh setiap warga negara Indonesia, maka untuk dapat melaksanakan tugasnja sebagai alat penggerak aksi2 massa setjara revolusioner, Departemen Penerangan memerlukan kelengkapan2 seperti dibawah.

I. Pedoman dan Sistim penerangan Manipol/Usdek.

Dengan mengambil peladjaran-peladjaran dari pengalaman2 oleh djuru penerang didalam memberikan penerangan2 tentang Manipol/Usdek sedjak tgl. 17 Agustus 1959, dan dengan memperhatikan hasil musjawarah Djawatan djawatan Penerangan seluruh Indonesia di Djakarta dalam bulan Oktober 1960 mengenai Sistim Penerangan Manipol/Usdek, ditetapkanlah pada tanggal 1 Pebruari 1961 *Piagam Penerangan Manifesto Politik*, sebagai Pedoman bagi tiap2 djuru-penerang didalam melakukan tugasnja mengadakan indoktrinasi-massa.

Piagam Penerangan tersebut menggariskan dasar2 pokok:

1. Haluan Penerangan,
jg bersumber pada Manifesto Politik sendiri dan berlandasan pada adjaran Bung Karno dalam kitab2 „Indonesia Menggugat" dan „Mentjapai Indonesia Merdeka", dan mengandung 5 pokok pikiran, jaitu:

a. Djiwa Proklamasi, sebagai *djiwa* jang harus dibina.

b. Trimurti, sebagai *tjara* untuk membangkitkan dan membina djiwa itu.

c. Empat Shakti, sebagai *sendjata* penerangan untuk mempertahankan sifat antithese dan anti-imperialisme, kolonialisme, dan menggalang konsentrasi kekuatan nasional.

d. Penerangan massa, sebagai *sifat* penerangan dalam Re-

volusi jang adalah Revolusi massa.

e. Trilogi tjaturlogi, sebagai ge-*rak* penerangan, untuk mempersatukan rakjat dalam fikiran, semangat, kemauan dan perbuatan.

2. Sistim indoktrinasi Manipol,

jang menguraikan tentang:

a. arti sistim
b. tudjuan penerangan
c. isi penerangan
d. bahan2/tema penerangan
e. siapa jang diberi penerangan
f. organisasi (team2 penerangan dan personalianja)
g. penggunaan media penerangan
h. strategie penerangan
i. koordinasi penerangan
j. kader penerangan.

Dengan adanja Piagam Penerangan tersebut, maka semua kegiatan penerangan diseluruh Indonesia dapat diselenggarakan menurut satu policy, dengan satu kesatuan tafsir serta setjara terpimpin dan berentjana.

II. Apparatuur jang strijdvaardig dan strijdwaardig.

Departemen Penerangan harus mendjadi satu alat jang dapat bergerak setjara tjepat, dinamis dalam fikiran dan geraknja, serta merupakan one coordinated unit jang satu dalam policy, konsepsi dan strategie.

Untuk itu perlu disempurnakan:

1. Organisasi,

jang sederhana dan dititikberatkan kepada fieldwork.

Dengan surat keputusan Menteri Muda Penerangan No. 1/SK/M/59 tgl. 1 Desember 1959 ditetapkanlah susunan organisasi Departemen Penerangan sbb.:

a. Pusat Departemen.
   Pimpinan: Menteri Penerangan dibantu oleh 3 orang Pembantu Utama, jang mempunjai Sekretariat Menteri dan Kabinet Menteri.
   Badan2 pembantu pimpinan.
   Direktorat Tata Usaha.
   Biro Hubungan Pers dan Masjarakat.
   Direktorat Publisitet dan Penerangan Daerah.
   Biro Urusan Chusus .
   Djawatan/Direktorat.
   Djawatan Radio dengan Studio2 R.R.I. didaerah.
   Direktorat Perfilman Negara
   Direktorat Pertjetakan Negara dan Urusan Grafika dgn. Pertjetakan2 Daerah.
   Akademi Penerangan.
   Lembaga Pers dan Pendapat Umum.

b. Daerah.
- Djawatan Penerangan Daerah, di Daswati I, Daswati II dan Ketjamatan.
- Studio R.R.I. Nusantara, Regional I, Regional II dan Lokal.
- Pertjetakan Daerah dibeberapa tempat terpentjil seperti Kutaradja, Ambon, Soa Siu, Manado, Balikpapan dan Bandjarmasin.
- Perusahaan Piringan-hitam „LOKANANTA" di Surakarta.

2. Personalia.

Tenaga pimpinan, seperti Kepala Djawatan/Direktorat, Biro, Bagian dan Seksi dan untuk djabatan2 penting lainnja, harus memenuhi sjarat2:

a. berdjiwa Pantja-Sila dan me jakini masjarakat Sosialis Indonesia,
b. setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945,
c. djudjur, dari segi politis, moreel dan materieel.
d. kapabel dan akseptabel.

3. Media penerangan/mass communication jang lengkap.

Dengan sekuat tenaga oleh Pimpinan Departemen Penerangan telah dapat diperdjuangkan dimasukkannja projek2 penerangan jg. vital dalam rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 8 tahun dengan Ketetapan No. II/MPRS|1960 (Lampiran A).

Projek2 tersebut ialah:
a. Indoktrinasi Manipol.
b. Penjempurnaan dan pembinaan Pers.
c. Penjempurnaan dan perluasan dalam bidang Perfilman.
d. Penjempurnaan dan modernisasi siaran radio.
e. Perluasan dan modernisasi Pabrik piringan-hitam.
f. Pembangunan siaran televisi.
g. Pembangunan grafika nasional.
h. Pendidikan kader Manipol.
i. Pengabadian sumber Idee dan inspirasi Revolusi dalam *„Pusaka Revolusi"*.

Apabila projek2 tersebut dapat dilaksanakan maka Departemen Penerangan akan mempunjai satu apparatuur jang mampu menunaikan tugasnja sebagai alat Revolusi dengan se-baik2nja.

III. Usaha-usaha jang sedang didjalankan.

1. Undang-undang Pers.

Pada tanggal 20 Mei 1961 oleh Pemerintah telah disampaikan

satu rentjana U.U. Pokok Pers kepada D.P.R. G.R., R.U.U. tersebut kemudian disempurnakan berdasarkan usul2 D.P.A. pada tanggal 27 Djuli 1961 dan sekarang rentjana jang telah disempurnakan itu telah diserahkan kepada P.J.M. Presiden untuk kemudian disampaikan kepada D. P.R. G.R.

2. Pembangunan televisi.

Siaran televisi jang pertama di Indonesia akan diselenggarakan tepat pada waktu Asian Games IV dimulai dalam bulan Agustus 1962. Persiapan2 kearah itu sedang diselenggarakan dan perlengkapan pemantjar televisi didatangkan dari Djepang seharga k.l. US $ 1.000.000.—.

3. Komando Penerangan Irian Barat.

Di Departemen Penerangan telah dibentuk Komando Penerangan Irian Barat, jang ditugaskan chusus untuk melaksanakan Trikomando Rakjat Presiden/ Panglima Tertinggi pada tanggal 19 Desember 1961.

Komando tersebut mempunjai komando2 di Makasar (komando wilajah), di Manado dan Ambon (komando daerah) dan Team2 gerak-tjepat (3 unit). Satu unit team gerak-tjepat, jang dilengkapi dengan pemantjar dan alat2 penerangan lainnja telah berada diperbatasan Irian Barat sedjak bulan Nopember 1961, sedang 2 unit lainnja sedang digembleng setjara militer didaerah Bogor dan dalam waktu singkat akan diberangkatkan kedaerah perbatasan. Biaja untuk Komando Penerangan Irian Barat Deppen diterima dari Staf Operasi Panglima Besar.

4. Kegiatan lainnja.

a. Sedjumlah pegawai Departemen Penerangan sedjak tahun 1960 diperbantukan kepada Dewan Asian Games Indonesia untuk mempersiapkan dan menjelenggarakan penerangan Asian Games IV, jang meliputi urusan publicity, pers, radio, film, televisi, pertjetakan dan Municipal Committee.

b. Pelbagai pedjabat tinggi diperbantukan kepada badan2/ organisasi2 jang bertugas dilapangan self supporting beras, kooperasi, Pameran Nasional, pertahanan sipil, Badan pembina dan pengendalian fungsi pers, landreform, Panitia Retooling Apparatuur Negara dlsb.

c. Pelbagai Panitia ad hoc ditugaskan untuk menjelenggarakan pekerdjaan2:

— memberi bantuan kepada pers, berupa idzin kertas dan bantuan untuk balai wartawan,
— merentjanakan dan menjelenggarakan pembagian rumah untuk pegawai
— merentjanakan dan menjelenggarakan pembelian buku-buku,
— mempertimbangkan reformasi/mutasi pegawai kepada Menteri.

d. Penjelesaian projek2 jang telah dimulai.
— Gedung Akademi Penerangan, jang akan selesai dalam tahun ini.
— Gedung tenaga listrik di P.F.N. jang akan selesai dalam tahun ini.
— Gedung2 studio R.R.I. di beberapa daerah.
— Gedung baru pabrik piringan-hitam Lokananta di Surakarta.
— Beberapa gedung pertjetakan daerah a.l. di Kutaradja.
— Beberapa kantor Djawatan Penerangan Kabupaten.
— Pembangunan rumah2 pegawai di Djakarta (± 30 buah).

e. Sebuah Staf Chusus telah dibentuk untuk diserahi tugas chusus, jaitu soal2 jang berhubungan dengan indoktrinasi dan penerbitan „Siaran Pemerintah".

IV. Beberapa hal jang perlu mendapat perhatian.

1. Pelaksanaan rentjana pembangunan 8 tahun.

Dalam tahun 1961 baru dapat dimulai dengan 2 projek, jaitu:

a. Gedung Akademi Penerangan dengan anggaran belandja Rp. 15.000.000.—.
b. Gedung baru „Lokananta" dengan anggaran biaja Rp. 20.000.000.—.

Untuk tahun 1962 hanja disediakan anggaran sebesar Rp. 10.000.000— untuk pembangunan.

2. Projek2 penerangan jang dimaksudkan dalam bidang kewenangan instansi lain.

a. indoktrinasi massa,
b. Pusaka Revolusi,
c. kader penerangan Manipol

3 projek tersebut dimasukkan dalam bidang Wk. Ketua D.P.A. dan Ketua Panitia Retooling Apparatuur Negara.

3. Mobile unit untuk daerah.

Rentjana penjelenggaraan mobile unit adalah sebagian dari

indoktrinasi massa. Dengan dimasukkannja indoktrinasi massa dalam bidang kewenangan instansi lain, maka usaha menjelenggarakan mobile unit ini mengalami kematjetan.

4. Kantor2 Djawatan Penerangan Daerah.

Demikian djuga pembangunan kantor2 Djapen di-daerah2 jang adalah sebagian dari projek „Pusaka Revolusi" tidak dapat dilaksanakan, karena projek tsb. dimasukkan dalam bidang kewenangan instansi lain.

5. Penerbitan dalam rangka indoktrinasi djuga tidak dapat dilaksanakan, karena usaha tersebut dimasukkan dalam bidang kewenangan instansi lain.

Demikianlah kiranja setjara ringkas hal2 jang perlu diketahui oleh J.M. Menteri Penerangan tentang keadaan Departemen Penerangan. Tentunja masih banjak urusan2 lain jang perlu mendapat perhatian, tapi sekedar disini saja kutip beberapa hal2 jang penting sadja hingga setidak-tidaknja saudara Menteri Penerangan akan sudah mempunjai gambaran bagaimana keadaannja, bagaimana kelandjutan sebaiknja dari Departemen Penerangan itu, berdasarkan laporan singkat ini.

Dan disamping itu kami lampirkan susunan personalia daripada Departemen Penerangan mulai dari pembantu utama sampai kepala2 bagian daripada tiap Biro maupun Djawatan atau organisasi. Djuga daftar nama2 pegawai jang diperbantukan kepada a.l. Asian Games, karena pegawai2 didalam pekerdjaan Asian Games itu djumlahnja k.l. ada 30 sampai 35. Kalau di badan2 lain djumlahnja hanja 2—3 orang, tetapi untuk Asian Games itu ada sekian banjaknja djumlah pegawai jang diperbantukan. Sebagai full-timers hanja 5 orang, tetapi lain2nja itu bekerdja sebagai part-times, artinja urusan penerangan Asian Games itu dari sebagian besar pegawai2 dari Departemen Penerangan, dari perfilman, dari radio, dari publistet, pers dan sebagainja. Inipun kami lampirkan supaja saudara Menteri mendapat gambaran tentang pegawai2 jang djuga mengerdjakan untuk Asian Games setjara aktif.

Dan perkenankanlah saja sekarang sekedar menjampaikan beberapa kata kepada kawan2 pimpinan disini, jang pertama kali saja mengutjapkan terima-kasih atas segala bantuan dan segala semangat, jang telah diberikan selama ini bersama-sama

saja untuk mendjalankan pekerdjaan penerangan. Kita semua tahu bahwa kita menghadapi banjak kesulitan. Pertama tentunja karena usaha penerangan sebelum dekrit dan sesudah dekrit itu setjara fundamentil harus berobah. Kalau dimasa jang lampau, misalnja sadja dalam Pantja Bhakti penerangan tertjantum untuk djuga membangkitkan kritische zin pada rakjat. Jang achirnja pada waktu pemberontakan PRRI-PERMESTA itu pasal ini dipakai oleh beberapa pegawai penerangan didaerah untuk menjatakan, bahwa mereka tetap masih mendjalankan Pantja Bhakti dengan mempropagandakan, misalnja sadja rentjana2 perdjuangan PERMESTA — PRRI, tidak bisa dikatakan menjeleweng, karena ditafsirkan bahwa membangkitkan kritische zin itu djuga kritische zin mengenai soal2 lain daripada politik pemerintah. Djadi politik lawanpun djuga disiarkan, untuk diketahui oleh rakjat, untuk bisa dibanding, mana policy jang baik, apa Pemerintah Republik apa Pemerintah jang lain. Dimasa sebelum dekrit memang ternjata dimungkinkan atau memang mendjadi suatu fakta. Dengan pengalaman itu, perlu kita mempunjai satu pedoman jang tidak bisa ditafsirkan lain daripada menurut Manifesto Politik. Itulah sebabnja kami perlukan Piagam Penerangan. Dalam hal ini saja utjapkan terimakasih atas, misalnja sadja, beberapa kawan jang sangat memperdalam didalam Manifesto Politik, dalam menjusun Piagam Penerangan, sehingga Piagam Penerangan itu jang tentunja basisnja pula Pantja Bhakti Penerangan, akan sangat mendjadi pegangan jang kuat, karena dengan itu ada uniformiteit, ada satu policynja, ada satu pandangan, satu pikiran, satu konsepsi tentang bagaimana tjara kita mendjalankan penerangan. Saja utjapkan terimakasih kepada kawan2, jang telah membantu untuk menghasilkan Piagam Penerangan itu .

Kesulitan2 kemudian jang kita ketahui adalah, seperti saja katakan, usaha2 penerangan sesudah dekrit memang harus kita sesuaikan dengan pergantian daripada policy Pemerintah, dan djuga djalannja repolusi. Ini semuanja achirnja kita bisa menemukan beberapa pedoman, jang perlu kita pakai didalam kelandjutan perdjuangan.

Dan saja sendiri, dengan adanja regrouping dari Kabinet Kerdja ini, mendapatkan tugas baru

jaitu untuk memimpin suatu Departemen baru, Departemen Olah Raga. Ini adalah Departemen baru sama sekali. Pada saat ini saja belum mempunjai staf satupun, belum mempunjai gedung satupun, djadi satu bangunan baru jang samasekali masih harus disusun dan diselenggarakan. Dan Departemen Olah Raga ini adalah, saja kira, masih tetap bergerak didalam bidang jang djuga bidang penerangan. Karena olah ragapun, menurut kejakinan saja, djuga alat penerangan jang sangat baik. Saudara2 tahu, bahwa tiap kali Indonesia itu dalam olah raga mentjapai kemenangan, kebanggaan masjarakat Indonesia meluas. Dan sekaligus luar negeri lebih kenal kepada Indonesia. Djadi olah raga adalah djuga alat penerangan negara kita, diluar maupun didalam negeri. Djadi bidang inipun djuga tidak begitu djauh daripada bidang penerangan, karena olah ragapun dianggap djuga sebagai alat penerangan. Maka sekaligus saja harus melakukan tugas lain, tetapi rasanja didalam perdjuangan itu bidang2 adalah sekedar pembagian tugas sadja. Pada hakekatnja kita sekalian bergerak didalam satu bidang, jaitu menjelesaikan revolusi. Dan kita tentu akan tetap berhubungan, tetap bertemu dan kita akan tetap bergaul dimana sadja dan kapanpun, karena revolusi kita belum selesai dan kita masih tetap memerlukan satu sama lain. Saja pertjaja bahwa Saudara Menteri Penerangan, Bapak Muhd. Yamin djuga memberi bantuan kepada saja didalam saja menjelenggarakan keolahragaan dalam rangka nation building. Sebaliknja pula djuga kawan2 dan Saudara Menteri Penerangan, dimana memerlukan bantuan dari Departemen Olah Raga itu, tentu dengan segala senang hati saja akan memberikan. Dan inilah jang sekedar saja sampaikan sebagai penutup daripada sambutan saja pada upatjara timbang terima ini.

Sekali lagi saja utjapkan terimakasih dan saja harap Saudara2 tetap melakukan kegiatan dengan segala semangat, membantu Saudara Menteri Penerangan jang baru ini, dengan segala semangat enthousiasme seperti Saudara2 djuga memberikan kepada saja atau kepada Menteri manapun. Tiap pegawai tetap memberikan sumbangannja, memberikan tenaganja sepenuhnja, agar Menteri bisa mendjalankan tugasnja, konsepsinja, se-baik2nja, karena tidak ada satu orang Menteri

jang dapat menjelenggarakan pimpinannja, manakala beliau tidak dibantu oleh pegawai2-nja. Djadi inipun saja minta supaja saudara2 meneruskan dengan segala kegiatan dan terutama dalam rangka Trikomando Rakjat itu tentu tenaga Saudara akan lebih diperlukan lagi, sehingga dengan demikian maka kita sekalian akan bisa menjumbangkan tenaga dan fikiran kita masing2.

Dengan ini kami tutup, dan kepada Saudara Menteri saja harapkan, bahwa dibawah pimpinan Saudara nanti Penerangan dapat berkembang pesat, lebih pesat dan lebih madju dan mudah-mudahan apa jang kami lapoikan itu bisa dipakai sebagai bahan2 untuk diperbaiki atau disempurnakan atau didjalankan mana jang perlu, dan mana jang tidak.

Demikian Menteri Maladi.

Menteri Penerangan baru Muhd. Yamin dalam amanatnja itu diantara lain menjatakan, bahwa tugas pedjabat² Departemen Penerangan dewasa ini ialah memberi penerangan tentang tiga buah konsepsi besar, jaitu:

Pertama :

Konsepsi pemeliharaan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai hasil perdjuangan revolusi dibidang ketata-negaraan dan politik.

Kedua :

Konsepsi sosialisme Indonesia, jaitu membentuk masjarakat sosialisme Indonesia berdasarkan adjaran Pantja Sila dengan berdasar pula Rentjana Pembangunan Semesta karya Depernas jang telah disjahkan oleh MPRS.

Ketiga :

Konsepsi pembebasan Irian Barat jang bersifat anti kolonialisme dan anti imperialisme.

Selandjutnja oleh Menteri Yamin diterangkan, bahwa ketiga konsepsi tugas besar itu sedjalan dengan pelaksanaan Triprogram Kabinet, sedangkan program Kabinet ketiga, jaitu pembebasan Irian Barat, telah dipertegas lagi dalam Trikomondo Rakjat.

Maksud dari pembentukan pemerintah Kabinet Kerdja wadjah baru ialah untuk mempertinggi daja guna serta effisiensi kerdja dari Departemen² Republik Indonesia termasuk Departemen Penerangan.

Dinjatakan pula oleh Menteri Yamin, bahwa dalam waktu jang pendek ini beliau banjak mendengar dari kiri-kanan, baik dari kekeluargaan Departemen Penerangan ataupun dari pihak Pemerintah dan dari rakjat tentang

harusnja Departemen Penerangan pada hari jang akan datang. Hal ini disampaikan kepada beliau, dalam berpuluh-puluh tilgram dari seluruh podjok tanah air Indonesia dan surat ada pula dengan lisan. Sudah tentu ini beliau akan pertimbangkan benar² karena hal itu disampaikan kepadanja setjara ichlas, untuk kepentingan umum terutama terhadap kepada Departemen Penerangan jang akan beliau pimpin.

Beliau mengemukakan pula didepan kekeluargaan Departemen Penerangan ini, jaitu bahwa saja sebagai Menteri Penerangan, kata Menteri Yamin, tidak akan mengadakan perobahan besar-besaran setjara prinsipiil dalam dasar dan organisasi kekeluargaan Departemen Penerangan.

Achirnja beliau menjerukan, bahwa kita harus melaksanakan utjapan daripada pemimpin kita bahwa Revolusi belum selesai dan kitalah jang akan menjelesaikannja, dengan meneruskan konsepsi raksasa jang tiga itu, dengan menempuh djalan Tri-program dan tunduk kepada Tri-komando.

Beliau jakin, bahwa ini dapat dikerdjakan oleh Departemen Penerangan, karena mengingat sumbangan Departemen Penerangan kepada revolusi masa kita di Djakarta apalagi masa kita dalam pusat revolusi waktu ketika Negara Kesatuan berpusat dikota Mataram.

Sekarang kita bekerdja dalam suasana jang djauh lebih sempurna dari pada waktu kita bekerdja di Djokja dahulu.

Menteri Yamin mengachiri amanatnja itu dengan harapan hendaknja kita keluarga Departemen Penerangan tetap membantu Pemerintah Kabinet Kerdja berwadjah baru ini dengan penuh tenaga seperti dimasa-masa jang lampau, bahkan lebih giat lagi karena revolusi menghendaki demikian.

Berbahagialah kita mendapat kesempatan ini untuk menjumbangkan tenaga sebagai gandjaran dari pada perintah Pemerintah turun dari atas kebawah, dan kita balas dengan kebaktian dan kesetiaan dari bawah keatas dan kita sangat berbahagia dalam hal ini dapat memberi gandjaran hidup kepada Pemimpin Besar kita jaitu Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno jang memimpin Negara, memimpin revolusi jang sedang bergolak ini.

Menteri Yamin pun tak lupa mengutjapkan terima kasihnja kepada Sdr. Maladi bekas Menteri Penerangan, jang kini Menteri Olah Raga, jang telah hampir tiga

tahun mengasuh/membimbing Departemen Penerangan. Dan kepada keluarga Departemen Penerangan diserukan sekali lagi, marilah kita landjutkan sebaik-baiknja pekerdjaan ini. Demikian Menteri Yamin.

Sebagai lazimnja dan hal inipun memang telah mendjadi tradisi bangsa kita sesuai dengan adat asli Timur, selesai upatjara itu kemudian hadirin memberi selamat kepada kedua Menteri tersebut sambil beramah-tamah a la kadarnja.

Dengan demikian selesailah sudah upatjara timbang terima itu dan mulai saat itu Departemen Penerangan dengan Menteri baru kembali membuka halaman baru dalam sedjarahnja.

Kepada Menteri Penerangan baru Muhd. Yamin kami utjapkan selamat datang dan selamat bekerdja dalam memangku tugasnja itu.

Semoga dibawah Pimpinan/Asuhan/dan Bimbingan beliau tugas Departemen Penerangan jang tidak ringan itu baik kedalam maupun keluar tetap lantjar dan effisien bahkan lebih dari itu dalam melakukan dharma baktinja demi kepentingan Negara chususnja dan bangsa Indonesia umumnja jang dewasa ini sedang mendjalankan Triprogram Pemerintah dan Trikomando Rakjat. Dan Kepada bekas Menteri Penerangan Maladi jang telah diangkat mendjadi Menteri Olah Raga itu kami utjapkan selamat melakukan tugasnja ditempatnja jang baru itu, selamat djalan dan selamat „berpisah". Walaupun djauh dimata, tapi dekat dihati. Sebagaimana kata Menteri Maladi sendiri; kita tentu akan tetap berhubungan, tetap bertemu dan tetap bergaul, karena revolusi kita belum selesai dan kita masih tetap memerlukan satu sama lain.

Memang didunia ini tak ada jang langgeng (kekal). suatu waktu pasti berubah (ditinggalkan). Roda sedjarah berdjalan terus kadangkala pula mengalami „up and down". Demikian pula halnja dengan kita manusia. ada masa datang dan ada pula masa pergi.

Kepada kedua beliau itu semoga Tuhan jang Maha Esa senantiasa tetap memberikan kekuatan, bimbingan dan perlindungannja, dalam menjumbangkan menunaikan baktinja demi keagungan dan kemadjuan negara dan bangsa Indonesia.

Wakil Menteri Pertama Urusan Chusus/Menteri Penerangan Muhd. Yamin, menerima utjapan selamat hari raja 'Idulfitri; diantaranja dari Menteri/Sekdjen Pengurus Besar Front Nasional Sudibyo dan Menteri lainnja.

HALAL BIHALAL WARGA PENERANGAN

WALAUPUN hudjan dan udara terasa amat dingin, namun ini tak mengurangi semangat warga penerangan bersama keluarganja datang membandjir untuk ber-Halal Bihalal bersama Bapak Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan Muhammad Yamin dan Ibu, jang diselenggarakan oleh Panitia malam Halal Bihalal Departemen Penerangan jang diketuai oleh Sdr. Soelam Siswopranoto, pada hari Rabu malam tanggal 21 Maret 1962 di Gedung Olah Raga, Djalan Merdeka Selatan Djakarta.

Malam Halal Bihalal itu djuga dihadiri oleh Menteri² jang termasuk dalam Bidang Chusus Kabinet Kerdja, ja'ni Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas Rumambi dan Ibu, Menteri/Sekdjen Front Nasional Sudibjo dan Menteri Penghubung Alim Ulama Fattah Jasin dan Ibu serta lainnja, sehingga Gedung Olah Raga jang tjukup luas itu penuh sesak karenanja.

Malam Halal Bihalal itu dimeriahkan oleh musik „Gumarang" dengan para biduan terkenalnja diantaranja Nurseha jang tak asing lagi. Turut pula tak ketinggalan meriahkan malam Halal Bihalal itu Dagelan „Tjepot-Udel" jng tjukup dikenal kedjenakaannja dan kelutjuannja untuk

menghibur kita dan memaksa kita mau tak mau untuk sama-sama bergerak-ria dan mengendorkan urat-urat kita jang kentjang, jang pada siang harinja bekerdja keras dengan sepenuh tenaga dan fikiran, demi keagungan dan kedjajaan negara kita menudju masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, Manipol Usdek dan Triprogram Pemerintah.

Kata Pembukaan Ketua Panitia

Sdr. Soelam Siswopranoto selaku Ketua Panitia Halal Bihalal setelah mengutjapkan terima kasih kepada para hadlirin jang telah memenuhi undangannja, terutama kepada Jang Mulia Menteri Penerangan Muhammad Yamin dan Ibu, Jang Mulia Menteri/Sekdjen Front Nasional Sudibjo dan Ibu, Jang Mulia Menteri Penghubung MPR/DPA/DPR]Depernas Rumambi dan Ibu, Jang Mulia Menteri Penghubung Alim Ulama Fattah Jasin dan Ibu dan para tamu lainnja, serta memerlukan hadir pada malam Halal Bihalal jang berbahagia ini. Djuga tak lupa disampaikan utjapan terima kasih kepada Pengurus Ikada, PSSI dan T.C. jang sudah membantu sekuat-kuatnja memindjamkan Stadion-Barat Ikada jang tidak djadi dipergunakan untuk malam ini; Pengurus Gedung Olah Raga, Pimpinan U.S.I.S. Pimpinan T.C. dan instansi² lainnja jang membantu Panitia, sehingga malam ini warga Departemen Penerangan dapat bersilatul-rachmi di Gedung Olah Raga ini; saudara² Pemain musik Gumarang, para Seniman dan Seniwati jang memberi hiburan dan kegembiraan kepada para hadlirin; Pimpinan Dinas di Pusat, R.R.I. Pertjetakan Negara, P.F.N. dan sebagainja beserta para Saudara² pembantunja semua jang membanting tulang untuk melaksanakan malam silatur-rachmi ini; para Saudara² dan organisasi jang memberikan sumbangan berupa bunga dan sebagainja sehingga memungkinkan terselenggaranja malam Halal Bihalal ini.

Selandjutnja beliau menjatakan, bahwa maksud daripada pertemuan malam ini ialah: Pertama: Bersama-sama bersilatur-rachmi dengan Bapak Menteri Penerangan dan Ibu berhubung dengan Sjawalan 1381 H, dimana kita bersama-sama saling ma'af mema'afkan dan mengeratkan rasa kekeluragaan kita; Kedua: Berhubung dengan Bapak Muhammad Yamin disamping mendjadi Wakil Menteri -Pertama Urusan Chusus, djuga sebagai Menteri Penerangan kita jang baru, maka malam ini dipergunakan sebaik-baiknja untuk berkenalan dengan para Warga Departemen Penerangan Chususnja dan para Undangan jang terhormat lainnja.

Achirnja beliau atas nama Panitia mohon diberi ma'af sebesar-besarnja atas segala kekurangan kesempurnaan dalam penerimaan, pelajanan dan hidangan, pula bila mungkin ada kechilafan dari pada para petugas jang tak tersengadja. Dan berseru semoga dengan malam silaturrachmi ini, tali kekeluargaan warga Departemen Penerangan dapat dipulihkan kembali seperti sediakala, sehingga akan memberi dorongan jang besar sekali dalam pelaksanaan tugas para warga Departemen Penerangan sehari-hari.

Amanat Menpen Muhd. Yamin

Wakil Menteri Pertama-Menteri Penerangan Muhd. Yamin dalam amanatnja jang sangat berharga itu diantaranja mengharapkan Lebaran tahun 1963 nanti hendaknja dapat kita rajakan bersama dengan saudara² dari Irian Barat di Irian Barat.

Selandjutnja Menteri Muhd. Yamin menjatakan, bahwa djaman sekarang adalah djaman pasang surutnja imperialisme dan pasang-naiknja perdjuangan nasional, maka dengan kejakinan harus dapat ditebusnja Tri Komando Rakjat, Menteri harapkan pula hendaknja pada tanggal 17 Agustus jang akan datang sudah ada kabar baik bahwa Irian Barat masuk dalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Oleh Menteri Muhd. Yamin didjelaskan pula beberapa hal mengenai „wadjah baru" Kabinet Kerdja dan tentang akan dimasukannja berbagai lembaga kedalam Urusan Chusus jang dipimpinnja. Beliau pun menjinggung-njinggung pula kesukaran² jang dihadapi rakjat kini dalam soal sandang-pangan, dan mengharapkan djanganlah terlalu memikirkan soal ini, karena rakjat Indonesia pernah mengalami kesukaran² jang djauh lebih berat lagi, jaitu ketika dikepung oleh Belanda.

Sudah tentu kata Menteri Muhd. Yamin, segala usaha harus dilakukan untuk menormalisasikan keadaan, antara lain dengan mempergiat koperasi², demikian Menteri Muhd. Yamin.

Sambutan Wakil Seluruh Pegawai Deppen

Sdr. Harjoto selaku Wakil seluruh pegawai Departemen Penerangan a.l. menjatakan, bahwa ini adalah untuk pertama kalinja diadakan malam Halal Bihalal oleh segenap pegawai Departemen Penerangan jang ada di Djakarta beserta keluarganja dengan meriah. Pristiwa ini tidak

Suasana pada malam Halal Bihalal keluarga Departemen Penerangan.

pernah terdjadi sedjak lahirnja Departemen Penerangan di Djalan Tjilatjap 4 Djakarta, kemudian berhidjrah ke Jogjakarta dan kembali ke Ibukota Djakarta. Peristiwa ini menimbulkan rasa kegembiraan jang sulit dilukiskan dengan kata², tetapi meresap dihati sanubari warga Departemen Penerangan di Djakarta chususnja dan berkumandang keseluruh peloksok dimana ada petugas penerangan, djuga di Irian Barat.

Kegembiraan itu mendjadi sempurna dengan adanja Tridharma Deppen sekarang ini, jaitu menerangkan Trikonsepsi besar perwudjudan tjita-tjita amanat penderitaan rakjat.

Untuk melaksanakan itu sudah tentu diperlukan kerdja sama jang erat dan baik dari atas kebawah dan dari bawah keatas sesuai dengan adagium „Titah uminsor. Bhakti maluhur" jg. diadjarkan pada kita pada waktu timbang terima Pimpinan Deppen baru-baru ini, maupun didaerah-daerah telah siap-siaga melaksanakan Program Pemerintah dan Trikomando Rakjat.

Pada achirnja Sdr. Harjoto mengadjak seluruh warga Departemen Penerangan bersatu padu berdiri, siap-siaga dibelakang Pimpinan Menteri Penerngan Muhammad Yamin.

Malam Halal Bihalal itu berlangsung hingga djauh malam dan ramah-tamah serta penuh kenang-kenangan jang tetap membekas dalam hati setiap warga Penerangan dan hadlirin lainnja jang tak dapat dilupakannja.

Djamuan a'la kadarnja jang disadjikan itu tak mendjadi soal, jang penting ialah bersilatur-rachmi setjara kekeluargaan antara warga Penerangan beserta keluarganja itu jang harus tetap utuh, terutama dalam tugas² jang sedang dihadapi dewasa ini mendjalankan Triprogram Pemerintah dan Trikomando Rakjat jang mendjadi beban kita bersama.

Mari pergiatlah terus Trikomando Rakjat itu, selama Belanda masih bertjokol di Irian Barat dan kobarkan terus semangat rakjat untuk membebaskan Irian Barat tahun ini djuga.

Dalam melakukan tugas sutji ini Tuhan tetap mendampingi dan berada dipihak kita jang benar dan diridhoi.

Hai manusia sesungguhnja kami mendjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami djadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaja kamu berkenalan satu dengan jang lain, sesungguhnja semulia-mulia kamu pada sisi Allah ialah jang paling taqwa diantara kamu. sesungguhnja Tuhan itu maha mengetahui dan maha pintar.

Surat Elhudjurat ajat 12

Presiden Sukarno melantik lima Menteri baru, Mr. Sartono, Kadarusman, Sudjono Djuned Pusponegoro, Nj. Rusiah Sardjono dan Thojib Hadiwidjaja tgl. 8 Maret 1962 di Istana Negara.

KABINET KERDJA WADJAH BARU

Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 1962 Presiden Sukarno mengumumkan susunan dan regrouping baru Kabinet Kerdja. Jang dimaksudkan regrouping ialah Kabinet Kerdja ini dibagi dalam beberapa group atau bidang.

Bidang-bidang itu sbb: 1. Bidang Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri. 2. Bidang Dalam Negeri. 3. Bidang Pertahanan/Keamanan. 4. Bidang Produksi. 5. Bidang Distribusi. 6. Bidang Keuangan. 7. Bidang Kesedjahteraan Rakjat dan 8. Bidang Chusus.

Dalam susunan baru ini, Menteri Pertama tetap dipegang oleh H. Djuanda, sedang para Wakil Menteri Pertama seluruhnja berdjumlah 12 pedjabat (11 orang). Tiap2 bidang mempunjai beberapa Departemen dan tiap2 Departemen dipimpin oleh seorang Menteri.

Tiap2 bidang dipimpin oleh seorang Wakil Menteri Pertama sebagai koordinator daripada Departemen2 c.q. Menteri2 dalam bidangnja itu. Bidang pertama, jaitu bidang luar negeri/hubungan ekonomi luar negeri merupakan pengetjualian, jaitu hanja terdiri dari satu departemen dan dipimpin oleh Wk. Menteri Pertama Subandrio.

PERSONALIA.

A. Presiden/Perdana Menteri — Sukarno.

B. Menteri Pertama — Djuanda.

C. Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri merangkap Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri — Subandrio.

D. Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri — Sahardjo.

Ia mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah — Ipik Gandamana,
2. Menteri Kehakiman — Sahardjo dan
3. Menteri/Ketua Mahkamah Agung — Wirjono Prodjodikoro.

E. Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan — A. H. Nasution.

Ia mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri/KASAD — A. H. Nasution,
2. Menteri/KSAL — E. Martadinata,
3. Menteri/KSAU — Omar Dani,
4. Menteri/KKN — Sukarno Djojonagoro,
5. Menteri/Djaksa Agung — Kadarusman,
6. Menteri Urusan Veteran — Sambas Atmadinata, dan
7. Menteri diperbantukan pada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan — Hidajat.

F. Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi — Suprajogi.

Ia mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Agraria/Pertanian — Sadjarwo,
2. Menteri Perburuhan — Ahem Erningpradja,
3. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga — Suprajogi,
4. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan — Chaerul Saleh,
5. Menteri Perindustrian Rakjat — Azis Saleh dan
6. Menteri Research Nasional — Sudjono Djuned Pusponegoro.

2. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Par:wisata — Djat:kusumo,

3. Menteri Perhubungan Laut — Abdulmutalib Danuningrat,

4. Menteri Perhubungan Udara — Iskandar dan

g. Menteri Koperasi — Ahmadi.

H. Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan — Notohamiprodjo.

dan

3. Menteri Urusan Bank Sentral — Sumarno.

I. Wak:l Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat — Muljadi Djojomartono.

Ia mengkoordin:r pekerdjaan:

1. Menter: Agama — Saifudin Zuhri,

2. Menteri Sosial — Rusiah Sardjono,

3. Menteri Kesehatan — Satrijo,

4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan — Prijono,
5. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan — Tojib, dan

6. Menteri Olahraga — Maladi.

J. Wakil Menteri Pertama Urusan Chusus — Muhammad Yamin.

Ia mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Penerangan — Muhammad Yamin,

2. Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA|Depernas — W. J. Rumambi,

3. Menteri Penghubung Alim Ulama — Fattah Jasin dan

4. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional — Sudibjo.

Selandjutnja dapatlah diberitahukan disini bahwa *Sdr. Leimena dan Sdr. Subandrio,* disamping djabatannja sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi dan Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri masing2 telah ditundjuk sebagai Wakil Menteri Pertama kesatu dan Wakil Menteri Pertama kedua, jaitu untuk mewakili Menteri Pertama apabila ia berhalangan.

Selain dari pada itu Sdr. Iwa Kusumasumantri telah ditundjuk sebagai Menteri Negara chusus diperbantukan pada Presiden.

Oleh Presiden djuga diumumkan, bahwa Pd. Ketua MPRS Chaerul Saleh telah ditetapkan mendjadi Ketua MPRS dan Sartono ditetapkan mendjadi Menteri/Wk. Ketua DPA. Sedang Ketua DPRGR dan Ketua Depernas tetap jaitu H. Zainul Arifin dan Muhammad Yamin.

Ketua MPRS, Wk. Ketua DPA, Ketua DPRGR dan Ketua Depernas masing2 diberi kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama dan hadir dalam musjawarah2 Kabinet Kerdja serta pula hadir dalam musjawarah2 Pimpinan Negara. Dalam musjawarah Pimpinan Negara ini jang hadir ialah Presiden, Menteri Pertama, semua Wakil2 Menteri pertama, djuga Ketua MPRS, Ketua DPR GR, Wakil Ketua DPA dan Ketua Depernas. Selain itu akan hadir pula semua Wakil2 Ketua MPRS dan DPRGR selaku kedudukan Menteri.

MUKA2 BARU DALAM KABINET INI.

Dalam susunan Kabinet Kerdja wadjah baru ini terdapat 6 orang Menteri baru, jaitu Menteri Sosial Nj. Rusiah Sardjono, Sudjono Djuned Pusponegoro (Ketua Presidium Universitas Indonesia). Menteri PTIP Thojib Hadiwidjaja (Gurubesar Fak. Pert. Bogor), Wk. MP/Ketua DPRGR H. Zainul Arifin, Menteri/Djaksa Agung Kadarusman (Djaksa Agung Muda) dan Wk. MP/Wk. Ketua DPA Sartono (bekas Ketua Parlemen). Departemen2 baru dalam Kabinet ini ialah Departemen2 Olah Raga, Research Nasional, Pendapatan/Pembiajaan dan Pengawasan, Anggaran Negara dan Urusan Bank Sentral.

Nj. Rusiah Sardjono

Menteri2 jang tidak lagi duduk dalam Kabinet Kerdja wadjah baru ini ialah Gunawan, Roeslan Abdulgani, Dipokusumo dan Sudjono.

Ketua DPRGR H. Zainul Arifin diangkat dengan kedudukan sebagai Wk. MP dan para wakil Ketua DPRGR Arudji Kartawinata, Subamia, M.H. Lukman Letkol. Mursalim Daeng Mamangung dan para Wakil Ketua MPRS Ali Sastroamidjojo, K. H. Idham Chalid, D.N. Aidit dan Brigdjen Wilujo Puspojudo diangkat dengan kedudukan sebagai Menteri. Sedang Ketua MPRS Chaerul Saleh dengan kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian dan Pertambangan.

Bertepatan dengan Hari Raya 'Idilfitri pada hari Kemis tanggal 8 Maret 1962 di Istana Merdeka, sesudah melakukan sembahjang Ied, Presiden Sukarno telah melantik dan mengambil sumpahnja lima orang Menteri baru dalam Kabinet Kerdja wadjah baru ini, jang telah mengalami perobahan dan „regrouping" itu.

Kelima orang Menteri itu adalah Sartono jang diambil sumpah-

Thojib Hadiwidjaja

nja dua kali sebagai Wakil Ketua DPA dan sebagai Menteri, Kadarusman sebagai Menteri Djaksa Agung, Soedjono Djuned Pusponegoro sebagai Menteri Research Nasional, Nj. Roesiah Sardjono sebagai Menteri Sosial dan Tojib Hadiwidjaja sebagai Menteri PTIP.

Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno dalam amanatnja setelah mengambil sumpah Menteri2 baru itu diantaranja menjatakan, bahwa pelantikan itu merupakan demonstrasi dari amanat beliau pada sembahjang Ied baru sadja, jaitu bahwa Hari Raya 'Idilfitri bukan hari nganggur, tetapi hari mulia dan penting.

Pada hari Raya 'Idilfitri dan 'Idiladha sebenarnja kita tidak dibebaskan dari kerdja, demikian Presiden.

Oleh karena itu saja adakan demonstrasi dengan mengambil sumpah. Demonstrasi inipun akan dilandjutkan besok Djum'at.

Arhirnja Presiden mendo'akan agar Kabinet wadjah baru dengan susunan dan regrouping baru itu mendapat berkat dari Tuhan jang Maha Kuasa.

Sesudah itu pada hari Djum-'at-nja tgl. 9 Maret 1962 Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno telah melantik dan mengambil sumpah Ketua DPRGR Zainul Arifin dan Wakil2 Ketua DPR GR Arudji Kartawinata. Subamia, Lukman, Kol. Mursalim serta Wakil2 Ketua MPRS Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid, D.N. Aidit dan Brigdjen Wilujo Puspojudo sebagai Menteri. .

Dalam amanatnja pada upatjara pelantikan itu Presiden Sukarno diantaranja menjatakan, bahwa dengan susunan kabinet seperti sekarang ini kita mendapatkan tjara jang effisien guna daja usaha baik bagi pemerintah maupun bagi rakjat dalam menghadapi banjak tantangan. Kita kini menghadapi tantangan ekonomi

jang harus diatur sedemikian rupa agar rakjat dapat mengetjap sandang pangan. Dalam mendjawab tantangan keamanan kita telah dapat mengatasinja sehingga dalam tahun 1962 ini keamanan pulih seluruhnja. Tantangan imperialisme di Irian Barat masih harus diatasi dimana dalam tahun ini djuga kita harus memasukkan Irian Barat dalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Presiden kemudian menandaskan bahwa semua tantangan2 itu tidak dapat diatasi apabila pemerintah dan rakjat tidak merupakan kesatuan jaitu kesatuan usaha, kesatuan tekad, dan bahkan djuga kesatuan tempur. Oleh karena itu kata Presiden, Pimpinan Negara harus merupakan kesatuan dari segala tenaga.

Presiden kemudian mengharapkan agar seluruh purna lengkap susunan Menteri2 dalam Kabinet Kerdja sekarang ini dalam menunaikan tugasnja se-hari2 mengerahkan seluruh tenaga untuk mendjawab tantangan2 itu jang dibeberapa tempat telah kita djawab dan kita penuhi. Sedjak tgl. 17 Agustus 1945 kita telah bertekad untuk menjelsaikan revolusi jang terdiri dari tumpukan2 revolusi dalam satu generasi sadja. Demikian Presiden Sukarno.

Mengenai regrouping Kabinet Kerdja ini Menteri Pertama Djuanda dalam permulaan sidang Dewan Perwakian Rakjat Gotong Rojong hari Senen tangal 19 Maret 1962 pagi telah menjampaikan keterangan pemerintah, diantaranja sebagai berikut:

„Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang mulja.

Atas nama Pemerintah saja mengutjapkan terima kasih untuk kesempatan memberikan keterangan mengenai perubahan susunan atau „regrouping" Kabinet

Sudjono Djuned Pusponegoro

Kerdja pada permulaan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong hari ini.

Kadarusman

Sedjak beberapa waktu Paduka Jang Mulia Presiden bermaksud mengadakan perubahan dalam susunan dan tjara kerdja Pemerintah guna mempertinggi effisiensi dalam pemerintahan Negara dan daja tempur Kabinet Kerdja.

1. TUGAS PANITIA 6.

Berhubung dengan itu maka dalam sidang Kabinet pada tanggal 15 Djanuari 1962 Paduka Jang Mulia Presiden membentuk suatu Panitia ad hoc, jang dikenal sebagai Panitia 6, jang terdiri atas Menteri Pertama, Menteri Keamanan Nasional. Menteri Wakil Ketua D.P.A., Menteri Ketua Depernas, Menteri Pembangunan dan Menteri Keuangan, dan jang diberi tugas menjampaikan kepada Presiden usul2 jang konkrit guna menjempurnakan organisasi dan administrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi.

Panitia 6 membuat suatu Laporan tertulis tertanggal 30 Djanuari 1962, jang disampaikan kepada Presiden pada tanggal 13 Pebruari 1962.

Penjelesaian soal penjempurnaan organisasi dan administrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi itu agak terhambat karena penerimaan Tamu2 Negara, jaitu Wakil Presiden Republik Persatuan Arab Abdul Hakim Amer (dari tanggal 16 sampai tanggal 24 Djanuari 1962) dan Pangeran Mahkota Djepang Akihito (dari tanggal 30 Djanuari sampai tanggal 10 Pebruari 1962).

Dalam menunaikan tugasnja Panitia 6 bekerdja setjara objektif, tanpa menindjau soal personalia, jang mendjadi hak prerogatif Presiden.

Tudjuan Panitia 6 dalam penjempurnaan Aparatur Negara pada tingkat tertinggi itu ialah agar supaja terbentuk suatu team Pembantu2 Presiden jang baik dan tertjapai effisiensi kerdja dan hasil karya jang maximal.

Sebenarnja saat jang sebaiknja untuk menjempurnakan Aparatur Negara pada tingkat tertinggi itu ialah sebelum perdjoangan membebaskan Irian Barat memuntjak seperti sekarang, ataupun sesudah waktu jang diberikan kepada Kabinet Kerdja untuk menjelesaikan Programnja berachir.

Namun demikian penjempurnaan Kabinet Kerdja pada waktu ini dapat djuga dipertanggung djawabkan berdasarkan pertimbangan:

1. untuk menjesuaikan sedjauh mungkin organisasinja, jang ditentukan pada tahun 1959, dengan Ketetapan M.P.R.S. no. II tahun 1960.
2. untuk merubah susunan-tempurnja (slagorde) berhubung dengan Komando Rakjat, jang diutjapkan oleh Presiden di Jogpakarta pada tanggal 19 Desember 1961.

Penjempurnaan Kabinet Kerdja itu kemudian dilakukan dengan Keputusan Presiden no. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerdja.

Berhubung Kabinet kini sedang menghadapi tahun ke-3 daripada pelaksanaan Programnja jang mentjapai taraf jang penting/genting, kiranja tidak pada tempatnja untuk mengadakan perubahan2 jg berat/mendalam dalam organisasi/personalia jang sekarang, sehingga *scope usaha penjempurnaan ini terbatas kepada penjempurnaan tata-kerdja, regrouping dan lain2 untuk effisiensi jang lebih tinggi.*

Pula waktu jang pendek tidak memungkinkan Panitia 6 menelaah masalah jang penting ini setjara mendalam.

Untuk memungkinkan span of control Presiden guna pimpinan jang effektif dan effisien, maka prinsip jang dianut dalam regrouping Kabinet Kerdja itu ialah dengan pembagian seluruh wilajah pimpinan Negara kepada beberapa bidang, dalam mana seluruh wilajah tadi dibagi habis (opgedeeld) dan ditiap bidang Presiden diwakili oleh seorang Deputy dari Presiden dengan penuh.

Djika dulu terdapat beberapa Menteri Inti jang tidak termasuk sesuatu bidang, maka sekarang semua Menteri digolongkan dalam salahsatu bidang.

II. DASAR KONSTITUSI.

Penjusunan baru Kabinet Kerdja tetap didasarkan Undang2 Dasar 1945 pasal 17 tentang Ke-

menterian Negara. dengan mengingat:

1. Keputusan Dewan Nasional dalam sidangnja ke-V pada tanggal 26 Mei 1959, berisikan nasehat kepada Presiden tentang djumlah, tugas dan organisasi Kementerian, djika Undang2 Dasar 1945 telah belaku kembali (dalam pada itu diusulkan adanja seorang Menteri Pertama, 4 orang Wakil Menteri Pertama dan 19 orang Menteri, djadi djumlah 24 orang Menteri).
2. Mukaddimah dan beberapa pasal dalam Undang2 Dasar 1945 menngenai pemerintahan Negara;
3. Ketetapan M.P.R.S. no. II thn. 1960 pasal 4, lampiran A (Bidang III), lampiran B (Bidang III) dan Lampiran C (Bidang II) mengenai pemerintahan;
4. Keputusan2 Presiden no. 153 dan no. 154 tahun 1959, no. 21 tahun 1960 dan no. 97 serta no. 130 tahun 1961 mengenai susunan Kabinet Kerdja;
5. perkembangan keadaan dan pengalaman (experience) dalam ketatanegaraan jang diperoleh dimasa Kabinet Kerdja sesudah Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang diutjapkan pada tanggal 5 Djuli 1959.

Disamping memperbaharui susunan Kabinet Kerdja diusahakan pula integrasi daripada Badan2 Kenegaraan Tertinggi jang ada sekarang, berdasarkan Undang2 Dasar ataupun Peraturan2 Negara lainnja, setjara pyramidal dengan Presiden pada putjuknja.

Integrasi tersebut diharapkan tertjapai dengan mengikut-sertakan pimpinan Badan2 termaksud dalam musjawarah Kabinet Kerdja, tidak sebagai wakil daripada Badan2 jang dipimpinnja, masing2, melainkan untuk ikut dalam musjawarah para Pembantu Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, dan selandjutnja untuk meneruskan dan mengamankan policy Pemerintah dalam Badan jang dipimpinnja masing-masing.

Dengan Badan2 Kenegaraan Tertinggi tersebut dimaksudkan:

1. M.P.R.S. (kekuasaan menentukan haluan Negara).
2. D.P.R.-G.R. (kekuasaan membentuk Undang2).

3. D.P.A. (kekuasaan penasehat) dan
4. Depernas (kekuasaan perentjanaan).

Dalam mengikut-sertakan pimpinan Badan2 itu dalam musjawarah Kabinet Kerdja ada jang diberikan kedudukan Wakil Menteri Pertama (Ketua M.P.R.S., Ketua D.P.R.-G.R. Wakil Ketua D.P.A. dan Ketua Depernas) dan ada pula jang diberikan kedudukan Menteri (para Wakil Ketua M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R.).

Disamping mengadakan integrasi Badan2 Kenegaraan Tertinggi tsb. akan *dihapuskan Dewan Pembangun Pembantu Presiden* (D.P.3) dan *Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara* (Bapekan).

III. SUSUNAN KEMENTERIAN NEGARA.

Penjempurnaan organisasi dan administrasi Kabinet Kerdja dilakukan berdasarkan beberapa pokok fikiran sebagai berikut:

1. Kekuasaan pemerintahan diselenggarakan oleh Presiden dengan bantuan Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama menurut Undang2 Dasar pasal 4 ajat 1, pasal 5 dan pasal 7.

Presiden menetapkan policy Pemerintahan, sedang pekerdjaan se-hari2/routine/administratif dilakukan oleh Menteri Pertama menurut Undang2 Dasar pasal 17 ajat 2.

Menteri Pertama mewakili Presiden dalam segala pekerdjaan Presiden sehari-hari.

2. Dalam menunaikan tugasnja sehari-hari, jaitu terutama mengkoordinir pekerdjaan para Wakil Menteri Pertama, maka Menteri Pertama dapat mengadakan:

— *musjawarah Kabinet,* jaitu pertemuan dengan semua Wakil Menteri Pertama, atau :

— *rapat kerdja Kabinet,* jaitu pertemuan dengan seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama jang berkepentingan, djika perlu dengan meminta hadirnja Menteri/Menteri2 atau fihak lain jang bersangkutan.

Musjawarah dan rapat kerdja Kabinet tersebut dengan sendirinja dapat diadakan, dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden.

Dalam musjawarah atau rapat kerdja Kabinet itulah dapat di-

petjahkan dengan tjepat masalah2 politis, militer, sosial-kulturil, sosial-ekonomis dan lain2 jang prinsipiil serta diambil putusan dengan segera mengenai persoalan2 jang penting seperti misalnja Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara.

Dengan demikian dapatlah:

— dibatasi/dikurangi djumlah *Musjawarah paripurna Kabinet* (musjawarah Kabinet Pleno), jang diadakan oleh Presiden atau Menteri Pertama dengan semua Wakil Menteri Pertama dan Menteri dibawah pimpinan Presiden atau Menteri Pertama;
— diselesaikan segala pekerdjaan jang dulu dibebankan kepada Dewan Menteri dan pelbagai Dewan tingkat Menteri seperti Dewan Moneter, Dewan Ekonomi dan Pembangunan dan lain2.

3. Dalam menunaikan tugasnja se-hari2, jaitu mengurus sesuatu bidang, jang masing2 meliputi beberapa Departemen, maka tiap2 Wakil Menteri Pertama dapat mengadakan *rapat kerdja Menteri*, jaitu pertemuan dengan semua, beberapa orang atau seorang Menteri jang termasuk dalam bidang masing2 Wakil Menteri Pertama.

Untuk memperlantjar pekerdjaan maka Wakil Menteri Pertama dapat mengundang dalam rapat kerdja Menteri itu:

— seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama lain jang berkepentingan, djika perlu dengan disertai seorang atau beberapa orang Menteri dalam bidangnja masing2 jang bersangkutan;
— fihak2 lain jang berkepentingan.

Rapat2 kerdja Menteri tersebut dengan sendirinja dapat diadakan, dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden dan/atau Menteri Pertama.

Dalam rapat2 kerdja Menteri itulah dapat diselesaikan dengan tjepat pelbagai pekerdjaan routine/administratif jang penting dapat digolongkan dalam pekerdjaan se-hari2 beberapa orang Wakil Menteri Pertama atau beberapa Departemen.

Dengan demikian dapatlah dihindarkan pula diadjukannja pelbagai persoalan jang kurang/tidak penting oleh Menteri jang berkepentingan tanpa melalui Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan:

— kepada musjawarah dan rapat kerdja Kabinet atau mu-

sjawarah paripurna Kabinet tsb. diatas guna memperoleh putusan, atau:

— kepada Presiden atau Menteri Pertama guna memperoleh disposisi, jang semuanja itu dapat menimbulkan salahfaham jang tidak perlu dan dapat mengganggu „teamwork" Kabinet Kerdja berdasarkan semangat gotong-rojong dan persaudaraan.

4. Pekerdjaan kepaniteraan Kabinet Kerdja diselenggarakan oleh Sekretariat Negara, dengan melebur didalamnja Kabinet Menteri Pertama/Sekretariat Dewan Menteri.

Dibawah Sekretaris Negara dapatlah diangkat:

— seorang/beberapa orang Sekretaris Presiden,
— seorang/beberapa orang Sekretaris Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama dan
— seorang Sekretaris Kabinet.

Pembantu2 lain jang diperlukan oleh Presiden, Menteri Pertama atau masing2 Wakil Menteri Pertama, begitu pula pembantu2 jang diperlukan oleh Sekretaris2 tsb. diatas, harus diambil dari (atau didjadikan) pegawai Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara ditempatkan langsung dibawah Presiden.

Karena Menteri Pertama memimpin pekerdjaan sehari-hari/routine/administratif Pemerintah dan harus mengetahui pula segala soal lain (non-routine, non-administratif) maka Menteri Pertama ikut-serta memimpin dan mengawasi Sekretariat Negara.

5. Pada prinsipnja Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama tidak diperkenankan merangkap:

a. mendjadi Menteri-pemimpin Departemen;

b. djabatan pimpinan Badan2 Kenegaraan Tertinggi.

Rangkapan seperti diuraikan diatas dibatasi kepada sekedar flexibilitet bagi Presiden untuk memenuhi keperluan personalia jang luar biasa dan telah dilakukan misalnja terhadap:

ad a: Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri jang merangkap mendjadi Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

ad b: Wakil Menteri Pertama Urusan Chusus jang merangkap mendjadi Ketua Depernas.

6. Mengingat uraian pada angka 1 sampai/dengan angka 5 diatas. maka perlu kiranja ditetapkan kelak suatu *Pedoman Kerdja Administratif* (Peraturan Tata-tertib) Kabinet Kerdja, jang harus ditaati oleh segenap Anggota Kabinet Kerdja beserta Sekretariat Negara dalam menunaikan tugasnja se-hari2 (routine).

7. Kabinet Kerdja meneruskan penjelenggaraan *Triprogram nja* dalam tahun 1962 dengan perubahan aksentuasi berhubung dengan kemadjuan jang tertjapai dalam pelaksanaan pasal mengenai keamanan dan berhubung dengan Trikomando Rakjat mengenai pembebasan Irian Barat sebagai berikut:

(1) Program sandang-pangan harus diperhebat.

(2) Program keamanan dirampungkan dengan memperhebat operasi di Djawa Barat dan intensifikasi follow-up disemua daerah.

(3) Program anti-imperialisme dan kolonialisme serta pembebasan Irian Barat, ditekankan kepada pelaksanaan Trikomando Rakjat, jang dalam keseluruhan Triprogram diberi *prioritas ke-1*, jang harus didukung oleh semua kegiatan lain.

Program ini memperhitungkan/mempersiapkan kemungkinan clash bersendjata.

8. Berhubung dengan pergeseran aksen dalam pelaksanaan Program Kabinet Kerdja seperti diuraikan diatas, maka susunan Kabinet Kerdja perlu diubah guna mendjamin penjelesaian sebaik2nja dari Program tersebut.

Perbedaan antara susunan Kabinet Kerdja lama dengan jang baru tidak diletakkan pada djumlah Menteri atau Departemen, tetapi hanja pada *penjempurnaan pimpinan koordinasi|integrasi dan dengan itu pada regrouping jang se-baik2nja untuk mentjapai susunan-tempur jang se-baik2nja untuk pelaksanaan dalam tahun terachir dari Triprogram Kabinet Kerdja dengan peralihan titik berat kepada Trikomando Rakjat.*

Perbaikan struktur jang pokok harus ditunda sampai saat jang lebih sesuai dimasa depan, djika waktu sudah lebih leluasa untuk penelaahan jang seksama/mendalam dan djika taraf genting dari Triprogram Kabinet Kerdja. chusus Trikomando Rakjat, telah liwat.

Tegasnja perbedaan-perbedaan termaksud adalah sebagai berikut:

a. Penghapusan institut „Menteri Inti Kabinet Kerdja" dan diintrodusirnja institut „Wakil Menteri Pertama", jang mengurus sesuatu bidang tertentu, guna mempertjepat tjara bekerdja;

b. Pengurangan djumlah bidang dari 13 (jang diurus oleh Menteri-Menteri Inti Kabinet Kerdja dulu) mendjadi 8 (jang diurus oleh Wakil-Wakil Menteri Pertama sekarang). jaitu bidang-bidang:

— luar negeri.

— dalam negeri,

— pertahanan/keamanan,

— produksi,

— distribusi,

— keuangan,

— kesedjahteraan rakjat dan

— chusus.

Dalam memberi nama bidang-bidang tersebut diikuti sedjauh mungkin nomenclatur jang dipergunakan dalam Ketetapan M.P.R.S. no. II tahun 1960 dan Keputusan2 Presiden no. 153 dan no. 154 tahun 1959 (pembentukan Kabinet Kerdja), dengan tjatatan bahwa:

— nama „dalam negeri" dipakai karena adanja „luar negeri" dan begitu pula sebaliknja;

— nama „kesedjahteraan rakjat" dipakai untuk menghindarkan pemakaian nama jang pandjang, jaitu „mental agama/kerochanian|sosial/kulturil";

— nama „chusus" dipakai untuk urusan-urusan jang bersifat chusus dan/atau tidak atau sukar dimasukkan dalam bidang-bidang lain.

c. Penggolongan Menteri/Departemen dalam masing-masing bidang, jang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

— Taraf dan titik berat penjelesaian Triprogram Kabinet Kerdja chususnja Trikomando Rakjat dalam tahun 1962 telah ditegaskan diatas; dibidang keamanan masih ada operasi-operasi tempur jang menghebat di Djawa Barat dan dalam penjelesaian di Sumatera Selatan dan Ceram; tetapi dibidang follow-up rehabilitasi|pembangunan dalam rangka konsolidasi/stabilisasi teritorial meningkat pada tahun 1962 untuk merampungkan pemulihan keamanan diseluruh Indonesia; titik berat telah beralih dari operasi-

operasi tempur kepada operasi-operasi territorial/follow-up, dan berarti pula peralihan berangsur-angsur tugas keamanan dari alat-alat militer kepada alat-alat sipil (Pamong-Pradja, Polisi Kedjaksaan); untuk kelantjaran chususnja dalam tahun 1962 masih perlu alat-alat keamanan sipil ini dikendalikan dibidang Pertahanan/Keamanan setjara integrasi setelah selesai maka *sesudah achir 1962 dapatlah Menteri Departemen Kedjaksaan dipertimbangkan pindah kebidang „Dalam Negeri";* tentang *Kepolisian* jang amfibious antara sipil-militer perlu diperhatikan perkembangan Departemen ini dan perdjuangan jang sudah terdjadi didalam kepolisian, jang sekarang sudah resmi diakui sebagai *Angkatan Bersendjata,* disamping Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam bidang keamanan nasional.

Berbeda dengan bidang-bidang para Wakil Menteri Pertama lainnja, jang sehari-hari mewakili Presiden disuatu bidang, maka dibidang Wakil Menteri Pertama urusan Pertahanan/Keamanan ada susunan-susunan lain, sehingga dalam bidang ini ada 3 djenis/tingkat sebagai berikut:

(A) Integrasi pertahanan ditingkat nasional (politik, ekonomi, militer) dalam bentuk *Dewan Pertahanan Nasional* atau Depertan (dalam mana perlu di-inkorporasikan Penguasa Perang Tertinggi atau Peperti), jang diketuai langsung oleh Presiden dan diwakili oleh Menteri Pertama dan Menteri Keamanan Nasional sekarang Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan|Keamanan; kini Kepala Staf Peperti sudah ditempatkan dibawah Kepala Staf Operasionil Pembebasan Irian Barat;

(B) *Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia,* dibantu oleh para Panglima Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara/Polisi dengan staf gabungan; dalam instituut ini masih perlu di-inkorporasikan Wakil Menteri Pertama urusan Pertahanan/Keamanan; sistim G.K.S. ala Barat sebaiknja diganti dengan sistim integrasi ala negara-negara sosialis, dengan mengkonsolidasi sistim komando tertinggi dengan staf gabungan jang ditetapkan terachir oleh Depertan;

(C) Management Angkatan Bersendjata, jang dilaksanakan oleh Departemen-departemen Angkatan, dibidang mana Wakil Menteri Pertama urusan Pertahanan/Keamanan mewakili pula

Presiden sehari-hari dalam memberikan pimpinan.

Keadaan sekarang masih simpang-siur, sehingga dalam penjempurnaan dewasa ini, dengan mengingat maksud mengeffisiensikan dalam 3 bidang/tingkat tadi, Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan mewakili sepenuhnja Presiden (dalam sub A dan C) dan Panglima Tertinggi (dalam sub B) sehari-hari, sebagaimana ditjontohkan oleh negara-negara sosialis jang *meng*-integrasikan, beda dari negara-negara liberal Barat.

Soal tersebut diatas masih memerlukan perhatian dan penelitian lebih landjut dihari-hari jang akan datang.

— Berhubung dengan kemadjuan jang tertjapai dalam pemulihan keamanan seperti diuraikan terlebih dahulu maka Menteri/Departemen Kehakiman dan Menteri/Ketua Mahkamah Agung (serta kelak pada achir 1962 djuga Menteri/Departemen Kedjaksaan) digolongkan kedalam bidang Wakil Menteri Pertama urusan Dalam Negeri, disamping Menteri/Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Departemen dalam Negeri dan Otonomi daerah dulu).

— Untuk memperbesar kesempatan bagi Menteri Pertama mengkoordinir pekerdjaan para Wakil Menteri Pertama, maka „bidang Menteri Pertama" jang ada pada Kabinet Kerdja dulu diserahkan sedjauh mungkin kepada seorang „Wakil Menteri Pertama urusan Chusus", jang dapat diserahi pula pekerdjaan-pekerdjaan jang tidak termasuk bidang Wakil Menteri Pertama lainnja atau jang chusus dipertjajakan kepadanja oleh Presiden dan Menteri Pertama.

(D) Guna mempertinggi effisiensi kerdja telah diadakan selandjutnja:

— Penghapusan beberapa Menteri/Departemen, misalnja: Menteri Penghubung Organisasi Rakjat, karena kini sudah ada Front Nasional, jang merupakan djembatan antara Pemerintah dan organisasi2 Rakjat;
— Penggabungan beberapa Departemen, misalnja: Departemen Pertanian dan Departemen Agraria dulu digabungkan dalam Departemen Pertanian/Agraria, jang digolongkan dalam bidang Produksi;
— Pembentukan Departemen2 baru, misalnja:

Departemen Research Nasional jang digolongkan dalam bidang Produksi;
Departemen Olahraga jang digolongkan dalam bidang Kesedjahteraan Rakjat.

9. Mengingat uraian diatas maka dengan Keputusan Presiden no. 94 tahun 1962 ditetapkan *susunan Kabinet Kerdja baru* dalam rangka Kementerian Negara sebagai berikut:

(1) Presiden/Perdana Menteri, jang memegang pimpinan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang2 Dasar 1945 pasal 4, 5 dan 17.

(2) Menteri Pertama, jang:

(a) memberikan *pimpinan seharihari/routine atas nama Presiden/Perdana Menteri;*

(b) mengkoordinir pekerdjaan para Wakil Menteri Pertama.

(3) Wakil Menteri Pertama Urusan Luar Negeri, jang mengurus pekerdjaan:

Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, jang memimpin Departemen L.N. dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

(4) Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
2. Menteri Kehakiman dan
3. Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

(5) Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri/KASAD,
2. Menteri/KSAL,
3. Menteri/KSAU,
4. Menteri/KKN,
5. Menteri/Djaksa Agung,
6. Menteri Urusan Veteran dan
7. Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan.

(6) Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Pertanian/Agraria,
2. Menteri Perburuhan,
3. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
4. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
5. Menteri Perindustrian Rakjat dan
6. Menteri Research Nasional.

(7) Wakil Menteri Pertama Urusan Distribusi, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Perdagangan,
2. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
3. Menteri Perhubungan Laut.
4. Menteri Perhubungan Udara dan
5. Menteri Koperasi.

(8) Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
2. Menteri Urusan Anggaran Negara dan
3. Menteri Urusan Bank Sentral.

(9) Wakil Menteri Pertama Urusan Kesedjahteraan Rakjat, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Agama,
2. Menteri Sosial,
3. Menteri Kesehatan,
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan,
5. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan
6. Menteri Olahraga.

(10) Wakil Menteri Pertama Urusan Chusus, jang mengkoordinir pekerdjaan:

1. Menteri Penerangan,
2. Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas,
3. Menteri/Sekretaris-Djendral Front Nasional dan
4. Menteri Penghubung Alim Ulama,

serta menjelesaikan lain2 pekerdjaan jang ditugaskan oleh Presiden atau Menteri Pertama kepadanja.

10. Berhubung dengan regrouping Kabinet Kerdja seperti diuraikan tadi maka dihari-hari jang akan datang perlu diadakan regrouping pula daripada beberapa Badan. jang dulu untuk bagian terbesar dimasukkan dalam „Bidang Menteri Pertama".

Badan-badan termaksud ialah:

(1) Badan Pemeriksa Keuangan, jang Ketuanja djika dianggap perlu dapat diminta menghadiri musjawarah dan rapat kerdja Kabinet, musjawarah paripurna Kabinet atau rapat kerdja Menteri;

(2) Badan Pusat Intelligence, jang hingga sekarang dikepalai oleh Menteri Luar Negeri;

(3) Djawatan Sandi;

(4) Biro Tanda-tanda Kehormatan.

(5) Dewan Film,

(6) Direktorat Pengukuran dan Penggambaran Peta,

(7) Perusahaan Negara „Aerial Survey",

(8) Kantor Urusan Pegawai,

(9) Lembaga Administrasi Negara,

(10) Lembaga Tenaga Atom,

(11) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (sekarang: Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan

(12) Biro Pusat Statistik.

IV. MUSJAWARAH PIMPINAN NEGARA.

Pada waktu2 jang dianggap perlu dapat diadakan Musjawarah Pimpinan Negara dibawah pimpinan Presiden sendiri.

Musjawarah itu beranggota:

1. Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama,
2. Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S.,
3. Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R. — G.R.,
4. Wakil Ketua D.P.A. dan
5. Ketua Depernas.

Musjawarah membitjarakan soal2 politik nasional dan internasional jang dianut atau mengenai pimpinan umum Negara Republik Indonesia.

Sekianlah keterangan Pemerintah mengenai regrouping Kabinet Kerdja, jang telah diresmikan dengan Keputusan Presiden no. 94 tahun 1962.

•

Dengan adanja regrouping dari Kabinet Kerdja ini, tugas kita Penerangan hendaknja lebih di perhebat dan dipergiat lagi dalam mendjalankan Triprogram Pemerintah dan melaksanakan Trikomando Rakjat dan menurut istilah Presiden Sukarno jang telah merupakan „rolling snowball" — „bola saldju" jang menggelinding makin lama makin besar, dan tak dapat ditahan oleh tenaga siapapun, terutama bagian kedua dari Triprogram Pemerintah jaitu memperdjuangkan pembebasan Irian Barat jang dewasa ini telah sampai pada puntjak terachir dan gawat itu, jang diharapkan selesai dalam tahun 1962 ini.

Duta Besar Adam Malik disertai wakil Menteri Pertama II/Menteri Luar Negeri, Subandrio, memberi laporan kepada Presiden Sukarno mengenai perundingan rahasia informil dengan Belanda.

TRIKOMANDO RAKJAT DAN PERUNDINGAN

Alternatip damai-perang

Didalam menjelesaikan suatu perselisihan antara negara dengan negara djalan peperangan memang sering dipakai. Tetapi peperangan merupakan alternatip terachir apabila djalan lain setjara damai seperti perundingan, diplomasi dsb. ternjata telah tidak berhasil mengatasi perselisihan itu.

Didalam soal Irian Barat, antara kita dan pihak Belanda pada saat ini alternatipnja ialah damai atau perang; Belanda menjerahkan Irian Barat kepada Indonesia setjara damai atau menjerahkan dengan paksaan kekerasan peperangan; menjerahkan Irian Barat kepada Indonesia setjara terhormat atau meninggalkan Irian Barat karena kita pukul.

Didalam persoalan Irian Barat alternatip peperangan memang makin tampak madju kemuka, karena berbagai usaha damai berupa perundingan² bilateral maupun lewat Perserikatan Bangsa² ternjata gagal, bahkan Belanda telah me-

ngambil alternatip sendiri setjara sepihak jang mendekatkan kepada alternatip perang. Untuk mengambil sadja beberapa tindakan Belanda setjara sepihak, seperti dimasukkannja Irian Barat setjara konstitutionil didalam wilajah keradjaan Belanda, jang berarti mentjaplok daerah negara orang lain, menduduki setjara tidak sah daerah negara lain dan achir2 ini dengan rentjana mendirikan suatu negara Papua akan merubah kedudukan suatu daerah negara lain.

Maka tidak mengherankan, kalau rakjat Indonesia, jang habis kesabarannja mempergunakan kekerasan sebagai djalan penjelesaian soal Irian Barat.

Trikomando Rakjat.

Didalam sedjarah perdjuangan Irian Barat, didalam sedjarah bangsa Indonesia, 19 Desember 1961 adalah suatu peristiwa penting, peristiwa diutjapkannja Trikomando Rakjat oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia.

Trikomando Rakjat itu jang menurut kata²nja berbunji:

— gagalkanlah pembentukan negara boneka Papua, buatan Belanda kolonial.
— kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat. Tanah-air Indonesia.
— bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah-air dan Bangsa,

pada hakekatnja adalah merupakan komando pembebasan Irian Barat. Trikomando ini bukan sadja merupakan konfrontasi politik menghadapi tindakan politik Belanda mendirikan negara Papua, tetapi dengan perintah pengibaran bendera Merah Putih di Irian Barat, maka daadwerkelijk, dengan njata, kita harus merebut kembali wilajah Irian Barat, bagian tanah-air kita jang diduduki oleh Belanda.

Memang, pada waktu rakjat Indonesa pada tanggal 19 Desember pagi bersiap-siap mendengarkan diutjapkannja Trikomando, rakjat sudah mengharapkan komando „madju perang!".

Tetapi sebenarnja Trikomando adalah lebih luas daripada itu. Didalam pidato sehabis salat Id pada hari Lebaran jang lalu, Presiden Sukarno mendjelaskan, bahwa didalam mendjalankan Trikomando kita harus menempuh segala djalan jang halal dalam membebaskan Irian Barat. „Djalan itu apa?", tanja Presiden. Didjawab oleh beliau: „Bisa dengan infiltrasi. Bisa dengan djalan pertempuran ketjil. Bisa dengan djalan pertempuran² besar. Bisa dengan djalan perang total."

Djadi Trikomando adalah djelas, tidak usah kita ragukan makna maksudnja. Dan kita semua melihat pula, bahwa rakjat Indonesia jang berada dalam limit kesabarannja menjambut dengan hangat Trikomando itu. Dewan² dan badan² komando dibentuk, sukarelawan² membandjir. Persiapan² serta latihan² dipelbagai bidang diadakan. Pendek kata, mobilisasi disegala bidang dilakukan didalam rangka pembebasan Irian Barat.

Perkataan damai belum dihapus dari kamus bangsa Indonesia.

Didalam segala kegiatan dan kesibukan usaha pembebasan Irian Barat dewasa ini, bangsa Indonesia belum menghapus perkataan damai dari kamusnja. Memang mendjadi suatu prinsip bagi bangsa Indonesia jang tjinta damai, bahwa segala

Sidang Gabungan Staf Operasi dan Kepala² Staf Angkatan Perang R.I. dipimpin oleh Presiden Sukarno, dimana diantaranja dibitjarakan laporan Dubes Adam Malik mengenai masalah Irian Barat.

persoalan, segala pertikaian harus dipetjahkan dengan djalan damai. Oleh karenanja Presiden Sukarno didalam segala kesempatan selalu menjatakan, bahwa bangsa Indonesia menghendaki penjelesaian Irian Barat dengan djalan damai.

Didalam hal ini selalu dinjatakan, bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah menutup pintu perundingan. Pemerintah Indonesia selalu bersedia melakukan perundingan dengan pihak Belanda mengenai soal Irian Barat. Tetapi kesediaan Pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda itu mesti disertai ketentuan hasil jang akan ditjapai. Kita bersedia berunding dengan Belanda dengan sjarat perundingan itu harus berdasarkan penjerahan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia.

Perundingan rahasia tidak formil.

Diketahui bahwa persoalan Irian Barat itu mendjadi perhatian internasional. Negara² lain menghendaki agar tentang Irian Barat itu ada penjelesaian. Dan pada umumnja negara² itu menginginkan agar dalam penjelesaian Irian Barat itu ditempuh djalan damai, karena suatu peperangan terdjadi dibagian mana pun didunia ini dapat mengganggu perdamaian dunia dalam keseluruhannja. Maka terdapatlah diantaranja negara² jang dengan serieus berusaha agar kedua pihak jang berselisih bertemu dan berbitjara.

Dalam hal ini kita ketahui, bahwa sewaktu Djaksa Agung Amerika Serikat, Robert Kennedy, pada pertengahan bulan Pebruari jang lalu berkundjung ke Indonesia, soal Irian Barat tidak lepas dari atjara pembitjaraannja dengan berbagai pembesar Indonesia, disamping ia menjaksikan sendiri tekad dan semangat bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat.

Demikianlah pada tanggal 20 Maret 1962 wakil² Pemerintah Indonesia dan wakil² pemerintah Belanda bertemu didalam suatu perundingan rahasia tidak formil. jang diadakan disuatu tempat dekat Washington. Delegasi Indonesia jang diketuai oleh Duta Besar Adam Malik dan delegasi Belanda jang diketuai oleh J.H van Roijen bertemu tiga kali dalam perundingan² tidak formil, dimana pada hari ketiga hadlir djuga pihak ketiga ialah Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat.

Setelah itu perundingan dihentikan; menurut keterangan perundingan² ber-recess untuk memberi kesempatan kepada delegasi masing² mengadakan konsultasi dengan pemerintahnja masing².

Duta Besar Adam Malik telah memberikan laporan kepada Presiden Sukarno dan Presiden kemu-

dian mengambil keputusan untuk sementara waktu tidak mengirim kembali wakil² Indonesia keperundingan dengan Belanda.

Dari keputusan itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa perundingan rahasia tidak formil sedikitpun tidak memberikan hasil seperti diharapkan pihak Indonesia, sekurang-kurangnja belum ada tanda-tanda, bahwa Nederland bersedia menjerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia diwaktu dekat maupun diwaktu djauh.

Selandjutnja didalam suatu keterangan kepada pers Presiden Sukarno antara lain menerangkan, bahwa pihak Belanda sendiri begitu pun Ellsworth Bunker sebagai pihak ketiga mengetahui betul persoalannja dan mengetahui betul pendirian pihak Indonesia. Sekarang soalnja tinggal bagaimana sikap dan djawaban Belanda terhadap pertanjaan, mau apa tidak Belanda berunding setjara formil tjara penjerahan pemerintahan atas Irian Barat kepada Indonesia.

Didalam situasi sekarang ini kiranja keterangan Presiden itu menghilangkan segala keragu-raguan mengenai sikap kita menghadapi pihak Belanda. Djadi dalam pokoknja pihak Indonesia hanja bersedia berunding dengan atjara pokok membitjarakan penjerahan pemerintahan atas Irian Barat kepada Indonesia.

Belanda mempersiapkan perang.

Berbareng dengan segala kegiatan dari semua pihak untuk menempuh djalan damai, maka pihak Belanda mengiatkan activiteit militernja untuk mempertahankan dan memperkuat kedudukannja di Irian Barat. Pengiriman bala bantuan militer ke Irian Barat diperbesar. Waktu wadjib militer Belanda di Irian Barat diperpandjang. Segala matjam kapal perangnja dikerahkan. Pemerintah Belanda berusaha sekuatnja untuk menginsjafkan parlemennja, bahwa tindakan memperkuat pertahanan di Irian Barat adalah perlu.

Dengan demikian Belanda terang hendak mendjauhkan alternatip damai untuk memilih alternatip perang. Terhadap segala persiapan perang jang dilakukan oleh Belanda itu, kita tidak usah gusar. Rakjat Indonesia insjaf dan tahu benar, bahwa didalam masalah Irian Barat pada saat ini ada alternatip dengan djalan damai atau dengan kekerasan. Oleh karenanja segala persiapan perang Belanda itu hanja akan meninggikan semangat rakjat Indonesia untuk membebaskan wilajah Irian Barat dari pendudukan asing.

Maka didalam situasi perdjuangan sekarang ini, sungguhpun

pintu kedjalan damai belum tertutup, sungguhpun tjara² damai melalui perundingan jang tegas masih mungkin, kegiatan melaksanakan Trikomando Rakjat sedikitpun tidak boleh kendur, bahkan harus lebih dipergiat. Mempergiat pelaksanaan Trikomando itu harus meliputi segala bidang, garis depan maupun garis belakang, bidang militer maupun bidang ekonomi dan kehidupan rakjat.
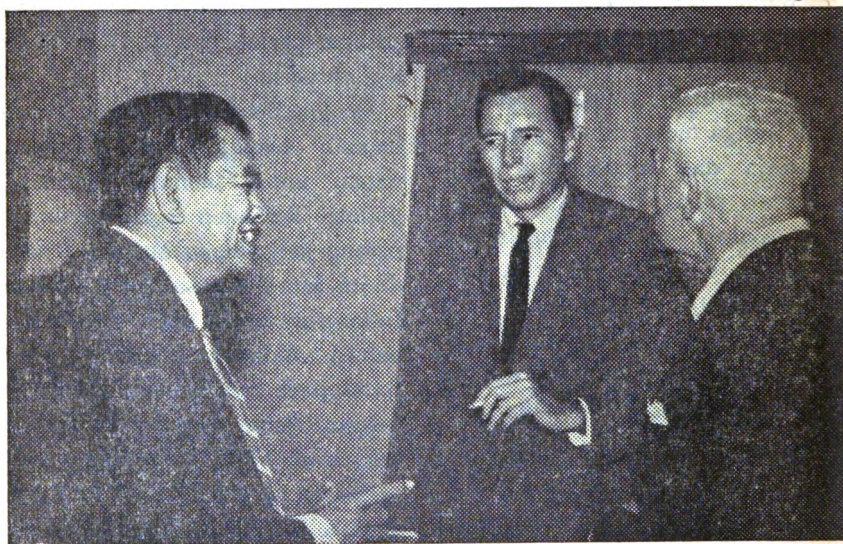
Kundjungan Deputy Director United States Information Agency (U.S.I.A.) Washington, Mr. Donald M. Wilson (tengah) disertai Mr. Flenegin dari U.S.I.S. Djakarta (kanan) pada Menteri Penerangan Muhd. Yamin, ditempat kediamannja.

SIDANG ECAFE KE-18 DI TOKYO

DALAM usaha2nja mentjiptakan kerdja-sama ekonomi dan sosial diantara negara2 anggotanja, PBB melalui berbagai badan dan organisasinja selalu berichtiar memupuk dan menjalurkan kerdja-sama itu dengan sebaik-baiknja. Dibagian dunia kita ini, jaitu di Asia-Tmur Djauh telah dibentuk apa jang dinamakan „Economic Comission for Asia and the Far-East" (Ecafe) jang dari tgl. 6 s/d 19 Maret 1962 mengadakan sidangnja ke-18 di Tokio, dimana Indonesia djuga turut serta mengambil bagian. Apa jang mendjadi hasil selengkapnja dari sidang ke-18 ini akan diuraikan kemudian.

Pada pokoknja atjara2 jang dibahas dalam sidang ke-18 ini jalah: menindjau situasi ekonomi Asia pada umumnja—memadjukan perdaganan antara negara2 anggota Ecafe — perkembangan industri dan sumber2 alam negara2 Ecafe — bantuan2 technik, dana2 chusus dan lain2. Sebelum sidang ke-18 ini, dalam bulan jang lalu telah diadakan apa jang dinamakan „Inter-regional Trade Promotion Talk" di Bangkok, jang telah mentjapai hasil2 jang positif bagi perluasan antar negara, dibagian dunia kita ini.

Dalam sidang ke-18 Indonesia telah mengirimkan suatu delegasi jang kuat dibawah pimpinan Sekdjen Deparlu, Swito Kusumowidagdo, guna menghadapi segala usaha negara-negara kolonial seperti Belanda jang masih terselip dalam Ecafe. Seperti telah dimaklumi, keanggotaan Ecafe sedjak semulanja telah meliputi djuga beberapa negara anggota non-Asia, seperti Amerika, Inggeris, Perantjis dan Belanda, jang karena pengalaman, hubungan perdagangan dan lain2 telah diperkenankan duduk dalam Ecafe. Bagi Indonesia adanja Belanda dalam Ecafe dengan sendiri ditentang, apalagi kalau Belanda dengan siasat jang litjin dari Menlunja Luns, jang dikenal sebagai seorang pendekar ulung dalam mempertahankan kolonialisme disebagian wilajah negara kita, jaitu Irian Barat, menondjolkan Belanda sebagai suatu Pacific-Power dan mentjoba mengelabui mata dunia dengan mengatakan mewakili daerah Irian Barat jang mesih didjadjah Belanda.

Sidang Ecafe di Tokio diikuti oleh wakil2 dari negara2 anggota dan selama 2 minggu jang mendjadi pokok pembitjaraan ja-

lah kerdja-sama jang lebih besar dalam bidang ekonomi. Ketua delegasi Indonesia, Suwito, jang telah terpilih sebagai Wakil Ketua Sidang atau Wakil Ketua II dalam sambutannja a.l. telah mengemukakan, bahwa jang penting dibitjarakan oleh sidang adalah perkembangan perdagangan dan bukan penjimpangan perdagangan. Oleh Suwito dikatakan djuga, bahwa usaha2 untuk memperkembangkan ekonomi dan perdagangan itu penting, lebih2 bagi negara2 jang baru mentjapai kemerdekaan. Untuk ini diperlukan ditjiptakannja suatu Lembaga Perkembangan Ekonomi jang sebaiknja berkedudukan di Bangkok, dalam lembaga mana duduk wakil negara2 seperti Djepang, Afganistan, Muang Thai dan Singapore.

Soal jang dihadapi negara2 Asia jang baru mentjapai kemerdekaannja ialah melenjapkan kolonialisme. Selama kolonialisme masih bertjokol, maka hal ini akan menimbulkan ketegangan2 dan perpetjahan. Sebagai tjontoh, di Indonesia sebagian dari Asia. Ini dapat mengakibatkan perpetjahan2 dan pengaruhnja akan mengakibatkan penjewengan2 serta penjimpangan2 dalam perdagangan. Karenanja jang penting jalah perkembangan perdagangan dan bukan penjimpangan perdagangan. Demikian Suwito Kusumowidagdo ketua delegasi Indonesia kesidang Ecafe ke-18 di Tokio. Sebagai ketua Sidang telah terpilih, Aichiro Fujiyama, dari Djepang.

Djepang keberatan Kerdjasama Ekonomi Asia.

Menurut U Nyun, Sekretaris Eksekutif. Ecafe, keengganan beberapa anggota seperti Djepang, akan menjebabkan tertundanja pembentukan suatu organisasi kerdja-sama dilapangan ekonomi untuk Asia, sampai kesidang Ecafe ke-19 dalam tahun 1963 di Manilla.

Djurubitjara2 resmi pemerintah Djepang dengan terang2an telah mengetjam gagasan penggabungan negara2 Asia dilapangan ekonomi sampai negara2 ini mentjapai suatu taraf perkemkembangan jang lebih tinggi. Mereka djuga telah menjatakan kechawatiran, bahwa turut sertanja Djepang dalam suatu blok ekonomi Asia akan dapat membahajakan usaha dalam mendekati Pasaran Bersama Eropah.

Salah satu pokok jang penting dalam Sidang Ekafe ke-18 jalah dibahasnja Djalan Raya Asia jang kini sudah, mentjapai taraf

penjelesaian bagian terachir, sepandjang 300 kilometer, selandjutnja pembangunan Lembah Mekong, suatu Pameran Dagang Asia, jang sudah disanggupi penjelenggaraannja oleh Pakistan dan pendirian sebuah Lembaga Perkembangan Ekonomi Asia jang dilengkapi dengan rentjana2 pendidikan, dan pemberian nasehat jang ditudjukan kearah kebutuhan daerah2 jang mendesak.

Dalam pesannja kepada Sidang Ecafe ke-18 di Tokio Pd. Sekdjen PBB U Thant a.l. menganjurkan, agar negara2 Asia-Afrika mengadakan hubungan ekonomi jang lebih erat lagi, sementara meningkatkan kegunaan tjara2 perentjanaan modern. Kesadaran akan perlunja kerdjasama dan tindakan serempak ini, menurut U Thant, merupakan kuntji dari pada pekerdjaan Ecafe. U Thant membenarkan usaha2 mentjari bantuan asing. Tapi sambungnja, usaha2 dengan tjara sendiri djangan diabaikan. Setiap negara anggota Ecafe memiliki sumber2 jang belum didjamah, manusia maupun bahan. Karena negara2 anggota Ecafe masih dalam taraf agrikultuur, maka harus diatur tjara bertani dan landreform serasionil dan seproduktif mungkin. Demikian U Thant.

Putusan2 penting Sidang Ecafe ke-18 di Tokio.

Sidang Ecafe jang ke-18, jang dihadiri oleh 300 orang dari 44 negara, dalam bentuknja jang merupakan suatu „parlemen ekonomi untuk Asia" telah membitjarakan soal2 jang bertalian dengan perdagangan, industri, transfer, rentjana pembangunan, statistik, agraria, bantuan technik, pembangunan masjarakat dan memperkuat media penerangan.

Perhatian chusus oleh sidang telah diberikan untuk perkembangan koperasi2 didaerah setempat, sebagai suatu tjara untuk memadjukan beberapa tahapan pembangunan ekonomi dan untuk peranan jang semakin besar dari Ecafe dan sekretariatnja dalam bidang kegiatan2 ekonomi dan sosial PBB.

Putusan2 penting jang telah diambil antara lain termasuk pendirian sebuah Lembaga untuk Perkembangan Ekonomi jang nantinja akan digabung dengan Ecafe di Bangkok. Ecafe mengundang semua anggotanja untuk mengambil tindakan bersama guna mendjamin agar negara2 jang kurang berkembang diberikan bagian jang pantas dan adil dalam perdagangan dunia. Dalam

sidang djuga telah diminta kepada „Special Fund PBB" agar memberikan bantuan untuk lebih mempertjepat penjelesaian djaringan Djalan Raya Asia (Asian Highway Network). Seperti diketahui Indonesia sebagai negara anggota Ecafe telah meminta untuk diturut-sertakan dalam Asian Highway Network ini. Apabila sudah selesai, highway ini akan penting artinja bagi dunia pariwisata. Dalam Sidang Ecafe ke-18 ini telah djuga diberikan perhatian chusus kepada pengaruh2 Pasaran Bersama Eropah atas beberapa negara.

Mengenai Sidang Ecafe jang ke-19, telah diputuskan untuk diadakan di Manila dalam tahun 1963 dan jang ke-20 di Iran dalam tahun 1964.

. . . . „Djikalau Belanda tetap mengungkungi Irian Barat atas kekerasan sendjata — dan Belanda menggunakan kekerasan sendjata, maka kita mempunjai hak pula mendjalankan kekerasan sendjata".

Presiden Sukarno

Kuliah dihadapan para Mahasiswa Djakarta, tanggal 10 Djanuari 1962.

Pidato radio Menteri Pertama Djuanda :

MEMPERLANTJAR IMPOR DAN EKSPOR

MENTERI Pertama H. Djuanda atas nama Presiden pada Senin malam tanggal 5 Maret 1962 melalui tjorong Radio Republik Indonesia telah mengumumkan keputusan2 Pemerintah, mengeluarkan beberapa Peraturan dalam rangka kepentingan kegiatan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnja, chususnja guna melantjarkan usaha2 dibidang impor dan ekspor.

Peraturan2 tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Para eksportir jang menutup kontrak valuta asing mulai tanggal 20 Pebruari 1962 dan selandjutnja, akan diberi izin untuk menggunakan 15 pCt dari djumlah valuta asing, jaitu hasil f.o.b. jang wadjib diserahkan oleh jang berkepentingan menurut izin dan/atau kontrak valuta kepada negara. Izin tersebut akan diberikan oleh Dana Devisen dan akan disebut „Surat Izin Valuta Asing" atau pendeknja „SIVA".

Kedua: „Surat Izin Valuta Asing" atau SIVA akan dapat diperdagangkan dengan bebas untuk satu kali melalui bank2 devisen diseluruh Indonesia, artinja baik dipusat maupun di-daerah2.

Pembeli2 SIVA adalah importir jang namanja tertjatat pada Departemen Perdagangan dan Biro Devisen Perdagangan, eksportir lainnja, dan selandjutnja pemegang2 izin LAAPLN.

Djangka waktu berlakunja SIVA adalah enam bulan.

Ketiga: Pemilik Surat Izin Valuta Asing atau SIVA berhak dan diharuskan menggunakan SIVA tsb. untuk meng-impor barang2 di Indonesia seperti ditentukan oleh Menteri Perdagangan.

Barang2 jang dapat diimpor di Indonesia adalah semua barang dari golongan A dan B, ketjuali 9 barang esensiil, jang hanja dapat diimpor setelah diperoleh izin chusus dari Departemen Perdagangan dan LAAPLN.

SIVA pun dapat mendatangkan barang2 dari golongan C, seperti terperintji dalam suatu daftar jang ditentukan oleh Menteri Perdagangan.

Achirnja SIVA dapat digunakan pula dalam batas2 jang ter-

tentu untuk membiajai „invisibles" atau djasa, setelah diperoleh izin dari LAAPLN.

Keempat: Prosedur impor pada pokoknja adalah sama dengan prosedur impor biasa.

Setelah oleh Dana Devisen dikeluarkan SIVA, maka kemudian pemilik SIVA itu harus mengadjukan „Surat Izin Penggunaan Valuta Asing atau „SIPVA kepada LAAPLN.

Masa lakunja SIPVA adalah satu bulan.

Sesudah itu, jang berkepentingan mengadjukan Permohonan Izin Impor kepada Biro Devisen Perdagangan berdasarkan SIPVA, jang dikeluarkan oleh LAAPLN.

Pada umumnja perbedaan antara impor biasa dan impor melalui SIVA ialah, bahwa dalam hal impor dengan SIVA penutupan kontrak valuta tidak diperlukan, karena valutanja telah disediakan oleh Dana Devisen.

Kelima: Apabila SIVA dalam djangka waktu seperti ditentukan, jaitu 6 bulan, tidak digunakan; maka izin harus dikembalikan kepada Dana Devisen.

Hal ini berlaku pula terhadap SIPVA jang tidak digunakan dalam masa lakunja, jaitu 1 bulan.

Dalam kedua hal para pemilik akan diberikan penggantian nilai lawan valuta asing dalam bentuk rupiah, berdasarkan nilai resmi.

Keenam: Hingga kini pada para eksportir diberi izin untuk memotong dari djumlah hasil ekspornja suatu persentase komisi, jang djumlahnja berlainan untuk tiap djenis barang ekspor.

Mulai tanggal 5 Maret 1962 Pemerintah memutuskan untuk menentukan djumlah potongan itu setjara pro-rata, jaitu dua persen untuk segala barang ekspor Indonesia.

Djumlah tersebut setjara resmi dapat dipakai untuk membajar segala biaja jang diperlukan, sedangkan biaja ada sisanja, maka sisa itu dapat tetapi tidak diharuskan - dipakai untuk mengimpor barang2 dan selandjutnja dapat dipakai pula untuk pembiajaan djasa2.

Pemakaian devisen semātjam ini tidak dibatasi djangka waktunja.

Dengan sendirinja izin-izin LAAPLN diperlukan.

Demikianlah dengan singkat keputusan2 jang telah diambil oleh Pemerintah pada hari ini.

Sebagai pendjelasan sapat dikemukakan hal2 sebagai berikut:

Dengan pemberian izin kepada eksportir untuk menggunakan sebagian tertentu dari hasil eksportirnja untuk mengimpor barang2 di Indoiesia, maka diharapkan bahwa pers eksportir pada umumnja akan lebih mungkin melaksanakan ekspor berhubung dengan penerimaan barang2 impor jang akan dapat menambah pendapatan rupiah-nja dan dengan demikian meniadakan atau mengurangi selisih antara harga djual dan harga beli barang2 ekspor kita.

Disampingnja itu chususnja produsen2 jang mengekspor sendiri, jaitu produsen2-eksportir jang kini masih melakukan pendjualan2 setempat, akan lebih terdorong untuk melakukan ekspor, karena sebagian hasil devisennja dapat digunakan oleh mereka sendiri, untuk kepentingan alat produksinja.

Sebelumnja peraturan2 pemberian SIVA maka para produsen-eksportir senantiasa bergantung pada pendjatahan untuk memperbaiki atau memperlengkapi alat2 produksinja, dan dengan demikian mempertinggi daja produksinja dan dengan sendirinja djumlah eksepornja.

Dalam rangka ini Pemerintah berpendapat, bahwa djatah2 jang biasanja diberikan kepada para produsen-eksportir, tidak perlu diberikan lagi, oleh karena untuk mereka sudah tersedia devisen melalui SIVA. Para produsen-eksportir jang berbentuk perusahaan Negara pada pokoknja tidak diperkenankan memindah-tangankan SIVA, ketjuali bila diberikan izin chusus dan hanja melalui Bank Sentral, jaitu Bank Indonesia.

Disampingnja kenaikan ekspor dapat diharapkan bertambahnja kelantjaran impor, bahkan kenaikan impor itu selaras dengan perkembangan ekspor.

Impor jang kini perlu dibatasi berhubung dengan kesulitan dan kekurangan ekspor, dengan demikian lebih terpelihara.

Eksportir2 jang tidak memprodusir sendiri akan dapat menggunakan SIVA-nja untuk mendatangkan barang2 jang diperlukan oleh alat2 produksi kita atau mendjual SIVA tersebut kepada jang berkepentingan akan barang2 impor.

Apabila pada umumnja Pemerintah ingin memberi kelonggaran kepada ekspor dan impor, maka dalam rangka ini Pemerintah tidak melupakan kepentingan masing2 daerah jang meru-

pakan sentra produksi barang2 ekspor.

Pertama, pemindah-tanganan SIVA melalui bank2 devisen diizinkan disalurkan melalui bank2 devisen dimanapun djuga; hal ini berarti, bahwa perdagangan SIVA dapat ran akan dilakukan didaerah pula.

Selandjutnja, Pemerintah telah mengambil keputusan supaja dari devisen jang dapat dipindahtangankan melalui bank2 devisen itu dan jang seperti dikemukakan berdjumlah 15%, separoh dari itu — ialah 7½% — harus dipakai utk impor didaerah masing2, berdasarkan daftar2 barang2 seperti berlaku untuk impor berdasarkan SIVA; pemasukan barang2 impor berdasarkan SIVA untuk daerah itu dapat dilakukan melalui Biro Devisen Perdagangan setempat.

Dengan demikian maka peraturan SIVA ini tidak sadja memenuhi kepentingan umum Negara, tetapi memenuhi pula kepentingan daerah, dengan mengizinkan pemindah-taganan SIVA didaerahnja, dan pemakaian dari separoh atau 7½% dari SIVA, jang dapat diperdakangkan untuk kepentingan daerah sendiri.

Disamping itu Pemerintah masih akan ikut memelihara keperluan daerah menurut daja kekuatan devisen kita.

Dengan mengadakan peraturan2 impor melalui SIVA sebagai kemungkinan impor tambahan disampingnja impor biasa dan selandjutnja oleh karena devisen jang tidak tertjatat sebagai kekajaan Negara dapat dianggap habis digunakan untuk mengimpor barang2, maka tidak dianggap perlu pula untuk meneruskan impor chusus lainnja, jang disebut „Impor dengan devisen bebas".

Mulai tanggal Djuli 1961 Surat Izin Impor Chusus tidak akan diberikan lagi oleh Panitya jang bersangkutan, dengan tjatatan bahwa pelaksanaan daripada Surat Izin Impor Chusus harus selesai sebelum tgl. 1 Djanuari '63.

Disampingnja impor melalui devisen bebas, maka ada impor chusus lainnja, jaitu impor jang dilakukan oleh beberapa daerah (jaitu Daerah Tingkat I Riau, ketjuali kepulauan Riau diluar daerah pabean, daerah sekitar pelabuhan Kwala Tungkal dari Daerah Tingkat I Djambi, Daerah Tingkat I Atjeh dan pulau2 Nias, Simeulur dan Tello), jang disebut „Konsinjasi dengan counter-impor", seperti ditjantumkan dalam Surat Edaran LAAPLN C No. 819.

Dengan diberikannja SIVA dan dengan mengingat akan kepentingan daerah seperti telah dikemukakan maka sistim Konsinjasi dengan counter-impor itu tidak dianggap perlu pula dan, untuk kesatuan peraturan Negara, maka sistim Konsinjasi deng an counter-impor itu akan dihentikan pada achir tahun ini.

Dengan demikian maka tertjapailah keseragaman dalam peraran2 impor untuk semua daerah di Indonesia, termasuk kemudian daerah Irian Barat.

Dengan mengadakan peraturan2 seperti diterangkan dan ditegaskan kepada saudara2 tadi Pemerintah jakin, bahwa belum semua kesulitan dibidang ini, jang kini dihadapi oleh Negara akan diatasi.

Soalnja ialah bahwa selama kestabilan moneter intern belum dapat ditjapai, maka kegiatan dan perkembangan ekonomi tanah air kita masih berlangsung dibawah tekanan2 moneter.

Seperti diketahui, maka keadaan seperti dialami sekarang ini, untuk sebagian disebabkan karena perdjuangan Negara kita belum selesai, sehingga dalam menghadapi penjelesaian soal Irian Barat, Negara memerlukan pengeluaran2 uang, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk devisen, jang sukar dielakkan.

Untuk sebagian lain sebab2 jang mempengaruhi kestabilan moneter kita adalah bertalian dengan pembangunan.

Dalam hal ini Pemerintah terus-menerus mennjelenggarakan pembangunan kita berdasarkan kekuatan Negara jang riil, disamping mengambil segala tindakan jang dapat menghemat pengeluaran dan mempertinggi penghasilan Negara.

Pemerintah mengetanui bahwa sekarang dirasakan banjak kesulitan, jang merupakan rintangan untuk mentjapai tudjuan sosialisme Indonesia, jaitu mentjiptakan suatu masjarakat jang adil dan makmur, dalam mana kita sekelian dapat menikmati tjara hidup jang memberi djaminan akan barang2 keperluan sehari-hari dan lebih dari itu.

Pemerintah mengetahui bahwa untuk mentjapai tjita2 nasional itu seluruh rakjat Indonesia memikul beban2 jang tidak ringan. Maka dari itu Pemerintah berusaha keras untuk meringankan beban2 jang dirasakan oleh rakjat, tetapi dalam pada itu perlu diinsjafi, bahwa selama kita masih berdjuang untuk mengembali-

kan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia, maka landasan atau dasar normal ekonomi kita, jaitu kestabilan moneter, masih sukar ditjapai.

Tri Komando Rakjat untuk membebaskan Irian Barat harus dilaksanakan dalam waktu jang singkat, baik untuk kepentingan kesatuan dan kebulatan Negara kita tetapi djuga untuk kepentingan iklim pembangunan jang memerlukan suasana normal.

Peraturan2 seperti diumumkan pada hari ini tidak bermaksud untuk menghapuskan segala beban rakjat dalam sekedjap mata, karena tidak mungkin mengatasi sekaligus segala kesulitan jang kini dihadapi oleh Negara. Akan tetapi Pemerintah jakin bahwa dengan melantjarkan ekspor dan impor akan ditjapai keringanan dibeberapa bidang.

Langkah kedjurusan normalisasi ini dilakukan dalam suasana perdjuangan untuk melenjapkan sisa2 kolonialisme dari bumi Indonesia. Apabila perdjuangan kita berhasil, dan kita sekalian jakin akan berhasilnja perdjuangan kita itu, maka dengan sendirinja pengeluaran2 chusus tidak akan diperlukan laki, sehingga terbitlah kemungkinan untuk meletakkan kestabilan moneter, baik intern maupun ekstern.

Sambil menantikan saat itu Pemerintah tidak akan berhenti berusaha mentjapai keringanan2 dimana mungkin.

Saja jakin dan pertjaja bahwa dalam masa sekarang ini, jang merupakan masa udjian untuk kita sekalian, bangsa Indonesia akan tjukup kuat, tjukup vital, tjukup bersemangat, untuk mengatasi segala rintangan, kesulitan dan penderitaan, sampai pada suatu waktu Negara dapat melaksanakan pembangunan dan melakukan kegiatan ekonomi dalam suasana kestabilan disegala bidang dan dengan demikian akan mentjapai tudjuan seperti ditjantumkan dalam Undang2 Dasar 1945: jaitu suatu masjarakat jang adil dan makmur, berdasarkan Pantja Sila.

Demikian pidato Menteri Pertama H. Djuanda.

AMANAT KEUANGAN PRESIDEN 1962

Pada hari Kamis tgl. 29 Maret 1962 djam 9.00 pagi, didepan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, oleh Wakil Menteri Pertama I J. Leimena, telah dibatjakan amanat keuangan Presiden 1962, jang lengkapnja dimuat dibawah ini.

Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang Mulia,

Sidang Jang terhormat.

Pada 30 Djanuari 1961, waktu saja mengutjapkan Amanat keuangan 1961 dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang terhormat, saja telah mengatakan bahwa dengan Rachmat Allah s.w.t. Revolusi kita telah mentjapai taraf baru jakni taraf pembangunan.

Dan saja katakan pula, bahwa diwaktu kita mulai memasuki taraf pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama itu. Belanda melantjarkan tantangannja mengenai Irian Barat jang merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia.

Para anggauta jth. sudah mengetahui, bahkan sudah mendukung sepenuhnja keputusan Pemerintah jang saja pimpin ini untuk mendjawab tantangan2 tersebut dengan politik konfrontasi disegala bidang, jang sedjak 19 Desember 1961 telah memuntjak dengan Tri-komando Rakjat.

Demikian maka djalannja realisasi Anggaran Belandja Negara tahun 1961 djuga memperlihatkan adanja politik konfrontasi serta Tri-komando Rakjat itu.

Dan hari in saja kembali memesankan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang terhormat untuk minta bantuan Saudara2 agar menentukan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1962 dalam waktu jang sesingkat mungkin.

Saudara2 jang terhormat dapat membatja dalam Rantjangan Undang2 tentang Pendapatan dan Belandja Negara nanti bahwa pendapatan dalam tahun 1962 akan berdjumlah kurang lebih Rp. 61 miljar.

Bahwa pengeluaran2 Negara akan meliputi djumlah Rp. 97,9 miljar, sehingga perbedaan antara pendapatan dan belandja ada-

lah sebanjak Rp. 36,9 miljar, (pengluaran2 untuk Irian Barat belum diperhitungkan). Angka Rp. 36,9 miljar sebagai perbedaan antara Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1962 sebagian akan ditutup dengan pembeajaan jang dilakukan oleh Bank Pembangunan Indonesia sebesar Rp. 12,2 miljar untuk projek2 pembangunan jang sifatnja selfliquidating.

Saja tegaskan dalam sidang ini bahwa Pemerintah jang saja pimpin jakin benar akan beratnja tugas jang sedang dihadapinja, bersama dengan Rakjat seluruh Indonesia, jang menginginkan supaja masalah Irian Barat kita selesaikan setjara bersamaan dan simultan dengan pembangunan Nasional semesta berentjana.

Sudah barang tentu ini adalah berat sekali, dan batas2 kemampuan kita bersama mengharuskan adanja penentuan tentang prioritas2.

Demikianlah maka masalah Irian Barat dalam Triprogram Pemerintah mempunjai prioritas pertama dalam tahun 1962 sedangkan dibidang pembangunan Pemerintah akan mengkonsolidasikan projek2 jasg sudah dimulai.

Dalam tahun 1961 jang baru lalu telah diperoleh pengalaman2 jang sangat berharga dan bahan2 jang menentukan garis kebidjaksanaan Pemerintah untuk tahun 1962 dilapangan ekonomi — keuangan.

Pemerintah telah memutuskan untuk sekuat tenaga mengurangi pengeluaran2 jang menambah tekanan inflasi dan akan mengambil tindakan2 sawadjarnja untuk menekan kenaikan djumlah uang jang beredar.

Dalam rangka usaha2 itu Pemerintah sudah menentukan mengadakan koordinasi jang lebih tegas dan efisiensi jang lebih besar dibidang pelaksanaan pembangunan, sehingga lebih banjak dapat dihindarkan adanja pemborosan modal dan tenaga. Untuk maksud inilah maka saja pada permulaan bulan ini telah mengadakan „regrouping" dari kabinet kerdja.

Saja minta kepada para anggota jth. supaja meneliti dan menentukan Rantjangan Undang2 Pendapatan dan Belandja untuk tahun 1962 ini bekerdja sesuai dengan djiwa Revolusi — tjepat — tegas dan bergotong-rojong dengan Pemerintah.

Saja memandang perlu menandaskan lagi bahwa kita sedang menghadapi masa pertjobaan jang maha hebat. Irian Barat ha-

rus kembali kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dalam tahun 1962 ini djuga.

Akibat2 bentjana alam jang mengganggu produksi pangan kita harus segera kita atasi — landasan2 bagi pembangunan nasional jang bertudjuan sosialisme pantjasila harus sedjauh mungkin dilaksanakan.

Dalam menghadapi semua ini kita tidak boleh ragu2, kita tidak boleh berhenti, kita harus madju terus, bersama2 dengan Rakjat kita.

Rantjangan Undang2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara 1962 menggambarkan apa jang saja uraikan diatas tadi.

Kepada Menteri2 — pembantu saja sudah saja perintahkan untuk memberi pendjelasan2 kepada D.P.R.-G.R. dimana perlu.

Saja minta supaja lebih2 lagi dari tahun jang sudah, para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong bekerdja sama dengan para Menteri dalam suasana bantu-membantu demi pelaksanaan tjita2 Bangsa Indonesia, dengan semangat jang menjala2 dan tekad jang bulat.

Tugas jang dihadapi ini adalah tugas kita bersama jang harus kita selesaikan bersama agar tertjapailah achirnja masjarakat Indonesia jang adil dan makmur.

Marilah kita ber-sama2 memandjatkan do'a kehadirat Tuhan jang Maha Kuasa supaja dengan bantuan — lindungan-Nja, tugas jang berat ini dapat kita lakukan se-baik2nja demi kesedjahteraan Bangsa Indonesia.

Sekdjen D.H.P. Angkatan 45 Harjoto Joedoatmodjo

FAKTOR2 JANG MEMPENGARUHI PASANG SURUTNJA GERAK ANGKATAN 45

Pengantar Redaksi :

Dalam Sidang Dewan Perwakilan Angkatan 45 seluruh Indonesia di Djakarta dari tanggal 27]29 Maret 1962, bertalian dgn. ulang tahun ke-II Musjawarah Besar Angkatan 45 bulan Maret 1960, Sekdjen DHP Angkatan 45 Sdr. Harjoto Joedoatmodjo telah menjampaikan uraian pendahuluan dari ichtisar usaha-usaha DHP Angkatan 45 selama periode Maret 1960 — Maret 1962.

Pada hemat kami uraian pendahuluan ini perlu diketahui oleh para warga Penerangan. baik di Pusat Maupun di Daerah, mengingat apa jang tersirat didalamnja ada sangkut pautnja dengan tugas kita selaku Djurupenerang. Oleh sebab itu kami memandang perlu untuk memuat uraian ini dlm. „Mimbar Penerangan".

KURANG LEBIH dua tahun telah berlaku sedjak Musjawarah Besar Angkatan 45 antara tanggal 15 — 20 Maret 1960 melahirkan Definisi Angkatan 45, organisasi Badan Musjawarah Angkatan 45 serta Program Perdjuangannja. Hasil-hasil jang ditjapai oleh Musjawarah Besar tersebut merintis djalan dan memberi dasar jang kokoh kepada geraknja Angkatan 45 dalam keinginannja mendjadi pelopor dan sebagai inti dalam penjelesaian Revolusi Nasional. Proses penjusunan landasan dan penentuan djedjak selandjutnja oleh Musjawarah Besar terdjadi ditengah-tengah iklim jang sangat menguntungkan dipandang dari segi idiil, sebab beberapa bulan sebelumnja telah dikeluarkan Dekrit 5 Djuli 1959, jang disusul dengan pentjetusan Konsepsi Revolusi, jakni Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Suasana pada saat-saat itu diliputi oleh djiwa kesadaran. Jakni kesadaran akan adanja penjelewengan Revolusi kita kearah alam liberalisme, kesadaran bahwa tidak lagi ada dualisme antara „revolusi belum selesai" ataukah „sudah selesai", kesadaran bahwa Pimpinan Revolusi dan Pimpinan Pemerintahan harus disatu tangan. Semuanja itu telah menghidupkan kembali Api Revolusi, mengobarkan lagi Djiwa Proklamasi jang dengan ketjepatan luar biasa membawa Revolusi kita pada momentum jang memungkinkan ia terus
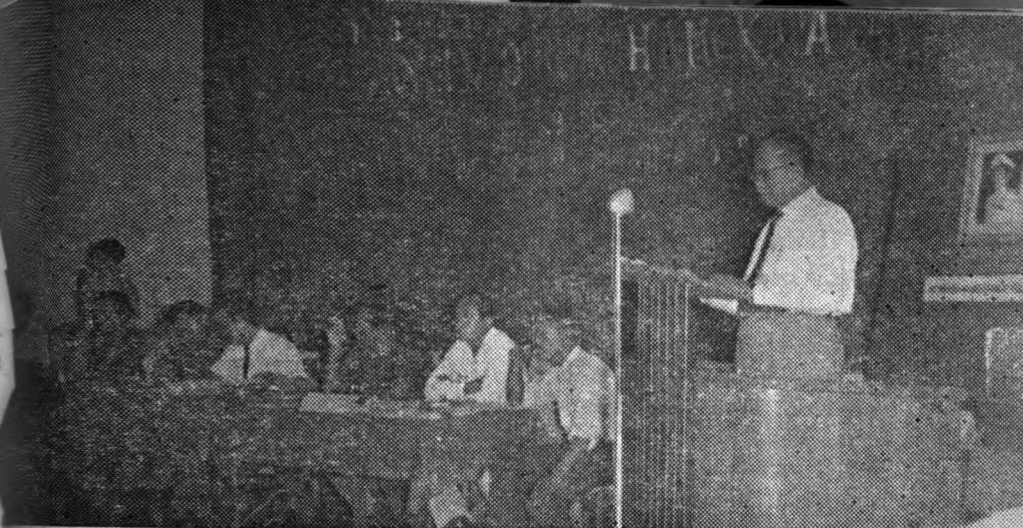
Sekdjen Dewan Harian Pusat Angkatan 45 Harjoto Joedoatmodjo, — menjampaikan uraian pendahuluan dari ichtisar usaha² DHP Angkatan 45 selama periode Maret 1960 — Maret 1962 didepan sidang Dewan Perwakilan Angkatan '45 se-Indonesia.

bergerak madju dan pantang surut. Revolusi kita memperoleh élan baru. Tetapi Revolusi kita tidaklah mengamuk kembali tanpa arah atau hanja main hantam-kromo kekiri dan kekanan tanpa suatu dasar jang dalam. Revolusi kita memperoleh djuga "diepte", memperoleh pengisian!
Pertama, karena Pantja Sila bangun kembali, tidak lagi dipersoalkan kebenarannja seperti kita alami semasa Konstituante ramai berdebat.
Kedua, karena UUD 45, jakni UUD jang merupakan refleksi jang spontaan daripada djiwa revolusioner pada tanggal 17 Agustus 1945 dan keluar dari hati nurani jang sedalam-dalamnja dari Bangsa Indonesia, UUD 45 itu berlaku kembali.

Ketiga, Konsepsi Revolusi — jakni Manifesto Politik — dirumuskan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1959, 7 bulan sebelum Musjawarah Besar Angkatan 45 berlangsung.

Perkembangan ini tidak ketjil artinja, bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kulturil. Pengaruhnja terhadap kehidupan politik terasa baik dalam alam fikiran dan konsepsi-konsepsi politik jang ada pada waktu itu, maupun dalam organisasi-organisasi politik jang telah memperintji dan menggolong-golongkan seluruh masjarakat kita dalam berbagai "groupings". Ada jang mendjadi anggota partai-partai atau orga-

nisasi-organisasi politik ada pula bagian besar jang tidak mendjadi anggota, tetapi dalam alam fikirannja dapat digolongkan dalam partai-partai atau organisasi-organisasi politik jang ada, dengan sadar atau tidak sadar, sebagai simpatisan jang njata ataupun tidak terang-terangan.

Terbaginja seluruh alam fikiran masjarakat dalam berbagai golongan itu, pada dirinja bukanlah sesuatu jang tertjela, bahkan sebaliknja merupakan pengorganisasian jang mendjadi sjarat mutlak bagi masjarakat modern, jang ingin berkembang madju. Jang destruktif adalah keadaan dimana tidak terdapat satu "guiding idea" (tjita² kepemimpinan red.), atau satu "specie" (djenis red.) pemersatu, atau satu "platform". Jang pada saat² setelah Dekrit 5 Djuli 1959 mendjadi tjtri jang sangat menondjol dalam kebangunan kembali kehidupan politik adalah kesadaran, bahwa dua pilihan terbentang didepan kita. Jakni berdiri diatas satu platform serta membawa Revolusi pada tudjuan dengan selamat, atau berdjalan sendiri-sendiri dan runtuh bersama.

Dengan berlakunja kembali UUD 45 sebagai landasan strukturil, dengan Pantja Sila sebagai landasan idiil, dan dengan Manifesto Politik sebagai Konsepsi Revolusi, maka platform bersama telah terbentuk. Kebenaran dari pada UUD 45, Pantja Sila dan Manifesto Politik mendapat pengakuan setjara umum. Inilah satu kemenangan jang telah ditjapai Revolusi kita dibidang mental, dibidang tjita-tjita.

Kemenangan itu berarti kekuatan mental jang baru, memberi modal perdjuangan jang baru kepada perdjalanan Bangsa Indonesia. Sebaliknja ia mentjegah berlangsungnja pemborosan 'energie' akibat adu kekuatan antara kita lawan kita, antara ideologi lawan ideologi, antara kepentingan golongan dengan golongan, antara rakjat dengan rakjat.

Diatas dasar platform idiil jang sama, maka segala masalah dibidang materiil, dibidang politik, sosial, ekonomi dan kulturil dapat diberi djawaban dan pemetjahan jang sama isinja.

Diatas platform bersama itu, kehidupan politik menjusun dirinja kembali. Terdjadilah pergeseran-pergeseran, jang mengaksentueer perlunja dibentuk kesatuan kemauan serta tindakan. Hal ini mengarah kepada pembentukan persatuan dengan mengekang kepentingan-kepentingan ideologi masing-masing, melantjarkan proses integrasi dari kekuatan-kekuatan politik dan sosial, jang tadinja — dalam alam liberal — tertjerai-berai. Tertjerai-berai karena tidak mempunjai satu platform bersama, karena berbeda-beda dasar jang dipakai landasan; berbeda-beda tudjuan, tjara, dan tafsir mengenai Revolusi kita. Platform bersama itu berarti

lontjeng kematian bagi semua konflik-konflik ideologi jang sangat memuntjak, dekat sebelum Dekrit dan Manifesto Politik. Segenap ideologi, aliran politik dan golongan bernaung dibawah atapnja UUD 45 — Pantja Sila — Manifesto Politik, dan bertemu diatas persadanja platform pemersatu. Kita dapati suatu situasi jang serupa dengan situasi sekitar tahun 1945, bahkan lebih djelas arahnja berkat adanja Konsepsi Revolusi 17 Agustus 1959, jang belum dirumuskan pada tahun 1945 itu.

Konvergensi (Penjatuan red.) kekuatan-perdjuangan dari segenap partai-partai, aliran dan golongan itu terdjadi baru dalam taraf alam mental. Jang terdjadi adalah pertemuan dan persamaan kesadaran, bahwa Revolusi dapat dilaksanakan sebaik-baiknja, hanja dengan menjisihkan perbedaan-perbedaan dan kepentingan-kepentingan partai dan golongan, dan hanja dengan memakai platform jang satu. Tidak dapat diragukan bahwa hal ini adalah penting, karena alam mental itu merupakan faktor penentuan dalam perkembangan selandjut-

Menteri Chairul Saleh selaku ketua Badan Musjawarah Angkatan 45 — mendjelaskan mengenai perdjuangan pembebasan Irian Barat, disamping diplomasi, Trikora tetap didjalankan, agar Irian Barat kembali dalam tahun ini djuga.

nja. Tetapi masih diperlukan lagi konvergensi jang konkrit untuk melaksanakan dan mewudjudkan apa jang ditjita-tjitakan itu, masih diperlukan suatu wadah, suatu bangunan jang dapat menampung dan menggotong-rojongkan kekuatan-kekuatan jang penuh semangat dan hasrat untuk bergabung dan melangkah madju bersama.

Ditengah-tengah suasana itulah Musjawarah Besar Angkatan 45 berlangsung antara tanggal 15 s/d 20 Maret 1960. Mudah dipahami bahwa Musjawarah Besar itu mendapat response (sambutan red.) jang sangat baik dari kekuatan-kekuatan "centripetal" (mentjari titik pusat. red.), jang djustru sedang mentjari-tjari satu pusat bersama, satu induk untuk bernaung. Itulah sebabnja maka Musjawarah mentjapai hasil-hasil jang gemilang dan menelorkan dasar-dasar ideologi dan dasar-dasar pengorganisasian jang bebas dari kepentingan dan keuntungan partai, organisasi atau golongan. Ja, bahkan bebas dari permainan "machtsvorming" (pembentukan kekuasaan. red.) dari golongan-golongan.

Waktu dua tahun berdjalan dengan tjepat, tetapi djuga peristiwa-peristiwa dan perobahan-perobahan dalam pandangan orang berdjalan dengan tjepat pula.

Kehidupan kepartaian telah disehatkan dan tinggallah partai-partai jang tegas mendjadi unsur-unsur kekuatan dalam penjelesaian Revolusi. Semuanja bergerak dan berdjuang diatas platform jang satu. Tetapi sudah tentu perdjuangan ideologi masing-masing berdjalan terus pula, sebab Manifesto Politik memang menjediakan ruang bergerak untuk perdjuangan ideologi masing-masing itu, sungguhpun tugas pokok dari partai, jakni ikut-serta menjelesaikan Revolusi berdasarkan UUD 45, Pantja Sila dan Manipol/USDEK, tidak boleh ditinggalkan. Perdjuangan ideologi partai itu makin menegas, meskipun hal itu tidak nampak djelas dalam lahirnja ataupun dalam pernjataan-pernjataan kepada umum. Djuga mengingat pemilihan umum, jang lambat ataupun tjepat pasti akan datang nanti, maka usaha "machtsvorming" tiap-tiap partai dalam arti jang sebaik-baiknja tidak dapat dihindarkan.

Demikian kenjataan jang kita konstatir dalam kehidupan kepartaian dan organisasi sekarang. Dasar-tudjuan-kewadjiban Revolusi tetap mendjadi dasar-tudjuan-kewadjiban partai-partai dan organisasi-organisasi tetapi disamping itu masing-masing partai atau organisasi terikat oleh unsur jang mendjadi dasar berdirinja, jang memberikan kepadanja "bestaansrecht"-nja dan jang membedakan partai jang satu dari partai jang lain, jakni ideologinja masing-masing. Djadi ada dua hal jang

diperdjuangkan oleh partai[2], jakni: *pertama*, dasar-tudjuan-kewadjiban partai jang identik (serupa. red) dengan dasar-tudjuan-kewadjiban Revolusi dan jang sama bagi semua partai, dan *kedua*, perdjuangan ideologi partai. Meskipun dua hal itu tidaklah kontradiktoir, bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun dua hal itu bisa dibedakan dalam praktek sehari-hari.

Jang pertama tadi, jakni dasar-tudjuan-kewadjiban Revolusi jang harus pula mendjadi dasar-tudjuan-kewadjiban partai, menekankan kepada segenap partai agar tetap berdiri diatas satu platform dan menjelesaikan Revolusi dengan kekuatan jang terpusat. Hal jang kedua, jakni perdjuangan ideologi partai, apabila *salah* dalam pelaksanaannja, bisa mengurangi arti atau mengurangi usaha-usaha daripada dasar-tudjuan-kewadjiban pokok dari partai jang identik dengan dasar-tudjuan-kewadjiban partai jang identik (serupa, red.) dengan dasar-tudjuan-kewadjiban kewadjiban Revolusi akan diselewengkan tetapi jang mendjadi soal ialah *perimbangan* daripada kegiatan usaha dalam melaksanakan kedua hal tadi.

Berdasarkan pertimbangan itulah, maka Angkatan 45, jang tidak mempunjai dasar perdjuangan lain ketjuali dasar-tudjuan-kewadjiban Revolusi, wadjib memelihara dan mempertahankan perimbangan jang demikian setjara sehat. Angkatan 45 wadjib mendjadi pendjaga, pelindung daripada rochnja Revolusi, agar roch itu hidup terus, *pertama*, hidup terus dalam kalangan Angkatan 45 sendiri, dan *kedua*, hidup terus dikalangan masjarakat umumnja dan dalam kehidupan politik chususnja. Kita telah mengenal penjelewengan jang pernah terdjadi dalam Revolusi kita. Marilah kita semua waspada terhadap kemungkinan penjelewengan jang kedua.

Itulah arti jang pokok daripada kwalifikasi Angkatan 45 sebagai pelopor, sebagai inti, sebagai „putjuk" daripada *Front Nasional*. Angkatan 45 sebagai djiwa, Front Nasional sebagai tubuh! Partai-partai dan organisasi-organisasi tergabung dalam Front Nasional, bersama-sama dengan Angkatan 45. Angkatan 45 sebagai organisasi jang tidak mengenal ideologi lain daripada ideologi Revolusi Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak mempunjai kepentingan atau "interest" lain daripada kepentingan Revolusi, ada dalam posisi jang sedemikian rupa, sehingga ia bisa melaksanakan kewadjibannja sebagai inti. Langkah-langkah telah dilakukan kearah itu, dan hubungan langsung dengan Front Nasional telah diadakan.
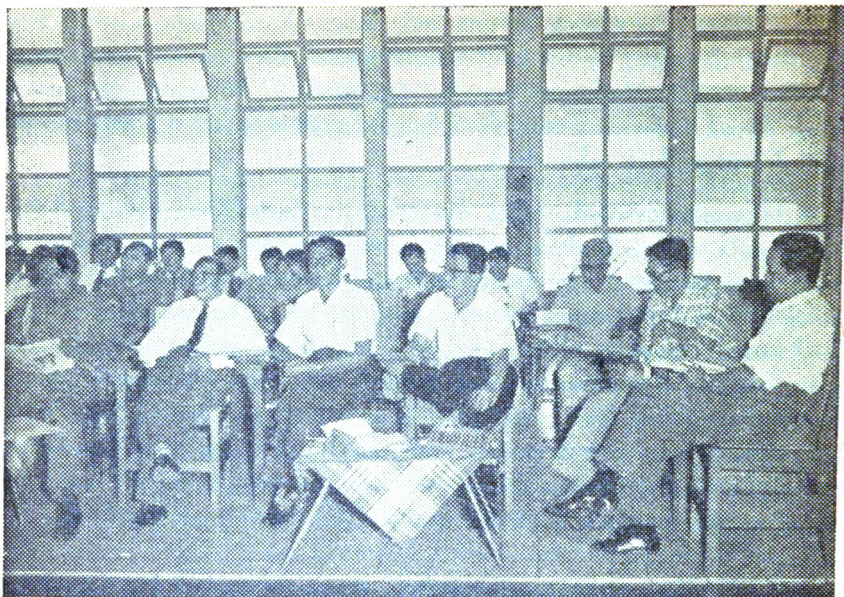
Para wakil Daerah² se Indonesia dengan penuh perhatian dan minat mendengarkan dan mentjatat segala uraian² dari pembitjara-pembitjara.

Telah dikatakan tadi, bahwa untuk menghindarkan penjelewengan lagi, rochnja Revolusi harus kita pelihara, pertama-tama dikalangan 45 sendiri. Hilangnja roch Revolusi dalam kalangan kita sendiri dan masuknja ideologi chusus atau kepentingan-kepentingan lain dikalangan kita sendiri akan berarti hilangnja "bestaanrecht" kita, dan hilangnja peranan kita sebagai inti. Pernjataan ini kami utjapkan tidak sekedar sebagai pernjataan kemungkinan belaka! Tetapi kita berdjuang terus untuk menghindarkan meluntjurnja organisasi ini kebawah mendjadi alat "machtsvorming" dari ideologi chusus ataupun kepentingan lain. Angkatan 45 wadjib tetap berdiri diatas segala ideologi chusus dan diatas "interests", mendjauhkan diri dari setiap sikap berfihak atau berkiblat.

Ini tidak berarti bahwa Angkatan 45 bersikap netral terhadap ideologi-ideologi chusus jang ada, atau atjuh-tak-atjuh terhadap kepentingan golongan-golongan. Peranan Angkatan 45 adalah aktif. Aktif mengusahakan, agar dalam ideologi-ideologi chusus itu tetap dipelihara hidupnja dasar-tudjuan-kewadjiban Revolusi jang berdiri diatas ideologi-ideologi

chusus itu. Mendjaga suburnja segala dimensi dari Revolusi agar „diepte" dari Revolusi tetap mendjadi "guiding principle" (azas jg. memimpin, red.).

Apabila hal ini kita hubungkan dengan machtsvorming Angkatan 45 di kalangan *massa*, maka timbullah masalah, apakah kita dengan usaha menarik massa kepihak kita itu bertudjuan membuat massa tidak berideologi? Apakah kita dengan menarik massa kepihak kita itu bertudjuan untuk mentjiptakan suatu masjarakat jang „ideologi-loos", tanpa ideologi? Tidak! Sebab kita tidak memusuhi ideologi chusus apapun, asal berdiri diatas satu platform bersama-sama lain-lain ideologi dan corps Angkatan 45. Keanggotaan Angkatan 45 tidaklah ,incompatible" (tak dapat disatukan. red.) dengan penganutan sesuatu ideologi chusus. Ideologi² chusus jang hidup ditanah air kita sekarang adalah ideologi² jang sudah disaring, dimurnikan, dan disinari dengan Ideologi Revolusi, dengan Konsepsi Revolusi. Setjara juridis penjaringan itu dilakukan dengan Penpres. no. 7 dan Perpres. no. 13. Karena Angkatan 45 hanja mengenal satu dasar jakni Ideologi Revolusi, maka ia tidak bertentangan dengan ideologi² chusus itu. Perbedaan hanjalah, bahwa Angkatan 45 sepenuhnja mengkonsentreer usaha²nja pada pelaksanaan Ideologi Revolusi, dan agar organisasi² lain tetap bergerak diatas satu platform, tetap didjiwai oleh Konsepsi Revolusi. Kita hanja menghendaki, agar supaja setiap anggota Angkatan 45, sementara ia melakukan pekerdjaannja *selaku* petugas Angkatan 45, melepaskan badja kepentingan golongan atau ideologinja chusus masing², dan hanja berdiri atas Ideologi Revolusi Proklamasi 17 Agustus 1945,serta hanja berfikir dan bitjara atas nama Amanat Penderitaan Rakjat.

Pengertian tentang azas Angkatan 45 dan hubungannja dengan ideologi² lain itu perlu kita djelaskan kepada massa agar mereka jang telah menganut sesuatu ideologie tidak ragu² bergabung dengan Angkatan 45. Pernjataan² jang selama dua tahun ini dikeluarkan oleh Angkatan 45 meliputi masalah² politik, sosial dan ekonomi, jang kesemuanja bersumber dan berdjiwa kepentingan nasional, kepentingan Revolusi, dan bukan kepentingan salah satu ideologi chusus sehingga djelas bagi massa, bahwa Angkatan 45 tidak menindjau peristiwa² nasional dari salah satu segi sadja. Terbukti pernjataan² itu berkumandang dalam sanubari massa.

Tadi dikatakan, bahwa Angkatan 45 berdiri *diatas* semua ideologi chusus, bahwa massa jang ditarik kedalam Angkatan 45 harus diangkat

pula *diatas* semua ideologi chusus itu. Hal ini paralel benar dengan kadudukan Bung Karno sebagai *Pemimpin Besar Revolusi.* Relasi Pemimpin Besar Revolusi terhadap ideologi² chusus jang hidup adalah konkruèn (serupa red.) dengan relasi Angkatan 45 dengan ideologi² tersebut. Dengan demikian, apabila kita berhasil mengerahkan massa, maka kekuatan massa ini akan mendjadi tulang-punggung dari Pemimpin Besar Revolusi mendjadi kekuatan revolusioner jang njata² dapat „dihanteer" (dilakukan. red.) oleh Pemimpin Besar Revolusi. Evaluasi Bung Karno terhadap Angkatan 45 akan didasarkan atas pertimbangan, seberapa djauh Angkatan 45 dapat diandalkan sebagai kekuatan riil. Oleh karena itu perlu kita rantjangkan lebih teliti usaha² kita kearah penbentukan kekuatan massa jang njata itu, dengan memakai segala tjara „persuasion" (menarik red.) jang djitu, dan dengan thema pokok bahwa adanja massa Angkatan 45 adalah suatu „Notwendigheit" (keharusan red.). Demi keselamatan, Revolusi, demi tertjiptanja masjarakat jang adil dan makmur, dan demi pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat !

TRIKOMANDO RAKJAT

I. **Gagalkanlah pembentukan „Negara Boneka Papua" buatan Belanda kolonial.**

II. **Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.**

III. **Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.**

Kota Mekkah atau „Tanah Sutji"

Dimana terletak ka'bah jang mendjadi qiblah kaum Muslimin dan Muslimat se-Dunia.

KE TANAH SUTJI

Sjukur dan Pudji bagi Allah jang memiliki semuanja 'alam dan salawat serta salam atas penghulu kita Muhammad s.a.w. dan atas ahlinja serta sahabatnja semua.

Firman Tuhan. *Wa lillahi 'alannasi hidjdjul baiti manistatha'a ilaihi sabilaa.* Artinja: *Dan wadjiblah atas manusia mengerdjakan Hadji ke Baitullah, siapa-siapa jang kuasa mengundjunginja, tertentu untuk Allah.*

Seperti diketahui pergi mengerdjakan Hadji itu termasuk dalam

salah satu rukun Islam jang lima. Setiap tahun beratus ribu kaum Muslimin segala bangsa dari segala pendjuru dunia datang membandjir ke Tanah Sutji ja'ni Mekkah, berkumpul bersatu dengan aneka ragam warna kulit dan bahasa sama-sama mengerdjakan Hadji.

Pengangkutan djemaah Hadji dari Indonesia itu dilakukan dalam dua gelombang dengan menggunakan 4 buah kapal, masing² :

A. Gelombong pertama :

1. K.M. Ambulombo — 1000 orang.
2. K.A. Gunungdjati — 2000 orang.

Djumlah : 3000 orang.

B. Gelombang kedua :

1. K.M. Ambulombo — 1000 orang.
2. K.A. Gunungdjati — 2000 orang.
3. K.M. Tampomas — 750 orang.
4. K.M. Tjokroaminoto — 750 orang.

Djumlah : 4500 orang.

Menurut rentjana perdjalanan kembali dari Tanah Sutji akan diangkut dengan menggunakan 3 buah kapal, masing² :

A. Gelombang pertama :

1. K.M. Ambulombo — 1000 orang.
2. K.A. Gunungdjati — 2000 orang.
3. K.M. Tampomas — 750 orang.

B. Gelombang kedua :

1. K.M. Ambulombo — 1000 orang.
2. K.A. Gunungdjati — 2000 orang.
3. K.M. Tampomas — 750 orang.

Djumlah : 3750 orang.

Dan tambahan Djemaah Hadji sebanjak 300 orang itu djuga diberangkatkan dalam gelombang kedua itu. Djadi djumlah Djemaah Hadji tahun ini semuanja ada 7850 orang.

Pulangnja direntjanakan: A. Gelombang pertama pada pekan terachir bulan Mei 1962 dan B. Gelombang kedua pada pekan terachir bulan Djuni 1962. Dalam djumlah tersebut sudah termasuk para anggota Madjelis Pimpinan Hadji Indonesia beserta para officials.

Dengan persetudjuan Presiden Sukarno, Menteri Penghubung Alim Ulama K.H.A. Fattah Jasin oleh Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuchri ditetapkan mendjadi Amirul Hadj. pada tahun ini.

Pemerintah menginsjafi bahwa tingkat perdjuangan bangsa dan negara kita pada hari² terachir ini

sedemikian memuntjaknja, sehingga perlu ditempuh suatu kebidjaksanaan jang lebih mendekati harapan kita bersama.

Sekalipun persiapan² tehnis berupa persediaan devisen dan kapasitas perkapalan telah sampai dipuntjak tingkat maksimum, namun pemerintah berdaja upaja untuk sedjauh mungkin mengurangi penderitaan² rakjat, chususnja para tjalon Hadji, walaupun hal itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan jang ada.

Berhubung dengan itu atas persetudjuan Menteri Pertama H. Djuanda, Menteri Perhubungan Laut Abdulmutalib dan Menteri Agama, K.H. Sjaifuddin Zuchri ditetapkan bahwa kotum Hadji tahun ini dinaikkan dari 7500 mendjadi 7850 (termasuk madjelis pimpinan hadji, officials, Amirul Hadj dan sebagainja).

Dalam perdjuangan kita membebaskan Irian Barat dan mendjalankan Trikomando Rakjat, djuga kepada para Djemaah Hadji Indonesia, Menteri Luar Negeri Subandrio dan Menteri Agama K.H. Sjaifuddin Zuchri telah mengirimkan pesan bersama kepada Duta

Madinah Al Munawwarah

Dikota inilah Nabi Muhammad s.a.w. dimakamkan.

Besar RI di Djedah K.H. Moh. Iljas agar supaja dibawah pimpinannja penjelenggaraan ibadat para Djemaah Hadji Indonesia dapat dilakukan dengan sebaik-baiknja, disamping itu supaja dilakukan pula upatjara chusus berupa ibadat do'a ditempat² dan disaat² jang mustadjab untuk memohon kepada Tuhan jang Maha Esa agar memberkati dan memberi pertolongan kepada bangsa Indonesia dalam rangka perdjuangan Irian Barat.

Kepada para Djemaah Hadji Indonesia jang telah beruntung dapat pergi Hadji ke Tanah Sutji tahun ini jang telah ditakdirkan dan mendapat rachmat Tuhan, semoga Allah memberi taufik dan hidajatNja, perlindungan dan kesehatan pergi pulangnja dan mendjadi Hadji jang Mabrur.

„Triprogram Pemerintah dan Trikomando Rakjat harus selesai tahun 1962 ini, sehingga pada ajam berkokok tanggal 1 Djanuari 1963, menjingsinglah fadjar jang terang."

Wakil M.P. Urusan Distribusi
J. Leimena
pada upatjara timbang-terima
Menteri Pendagangan tanggal
14 Maret 1962.
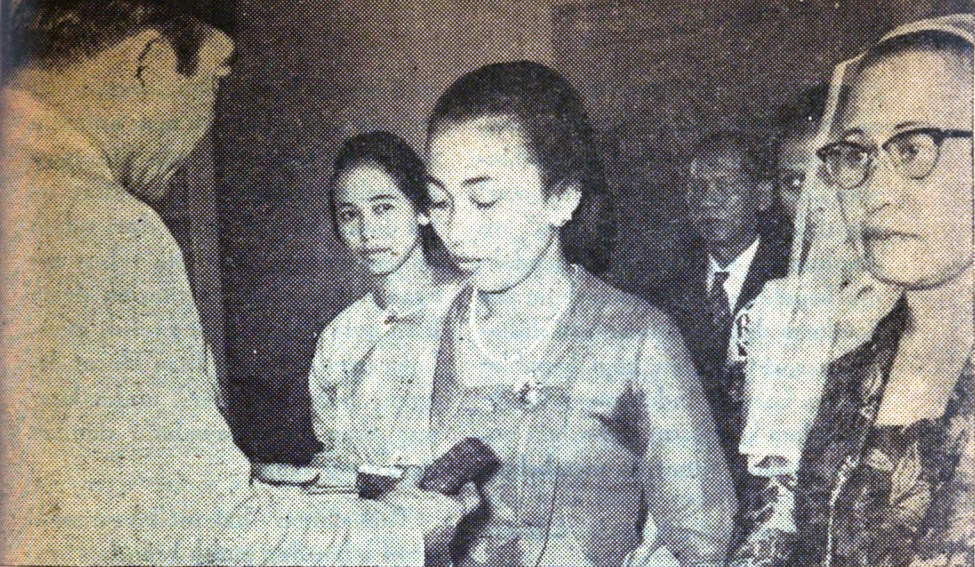
Penjerahan tanda² mata berupa tjintjin bermata berlian dan liontin masing² kepada Nj. almarhum Komodor Jos Soedarso (kiri) dan Nj. almarhum Djendral Sudirman (kanan), oleh Presiden Sukarno dalam suatu upatjara di Istana Merdeka tgl. 27 Maret 1962.

TAK ADA PERDJUANGAN TANPA PENGORBANAN

Peristiwa pertempuran laut diperairan Aru baru² ini antara anak buah MTB „Matjan Tutul" ,jang diserang setjara mendadak oleh angkatan laut/udara Belanda jang djauh lebih besar dan tak seimbang itu, ketika melakukan tugas patroli disana dan mengakibatkan gugurnja Komodor Jos Soedarso. Deputy KSAL dan Kapten Wiratno sebagai pahlawan dan kusuma bangsa setelah bersama-sama anak buahnja melakukan perlawanan sengit dan gigih kemudian tenggelam bersama-sama „Matjan Tutul", demi keselamatan MTB² ALRI lainnja jang waktu itu ikut bersama² berpatroli, tetapi anak buahnja selamat dan ditawan Belanda di Irian Barat.

Saluut kepada almarhum Komodor Jos Soedarso dan Kapten Wiratno jang telah membuktikan kedjantanannja. kepahlawanannja dan kepemimpinannja tanpa memikirkan kepentingan dirinja sendiri mendjadi korban asal anak buahnja selamat. Patut mendjadi tjontoh bagi kita.

Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi APRI pada upatjara

pelantikan Laksamana Muda Udara Omar Dani selaku KSAU baru, berkenaan dengan gugurnja pahlawan Jos Soedarso dengan kawan²nja dalam ,,pertempuran Aru" itu diantaranja menjatakan, ,,hendaknja kepahlawanan almarhum Jos Soedarso dengan kawan²nja didjadikan suri-tauladan bagi kepahlawanan bangsa Indonesia seluruhnja dalam kesediaan kerborban untuk mentjapai tjita-tjita membebaskan wilajah Irian Barat dan menempatkannja dibawah kibaran Sang Saka Merah Putih".

Tindakan sangat heroik Komodor Jos Soedarso serta komandan dan anak buah ,,RI-Matjan-Tutul" ini akan tetap tertjatat dengan tinta emas dan penuh kehormatan dalam sedjarah perdjuangan bangsa Indonesia.

,,Agresi Aru" ini menambah membangkitkan amarah rakjat Indonesia terhadap Belanda jang setjara membabi buta dan diluar rasa perikemanusiaan menjerang kapal patroli kita jang djauh lebih ketjil itu.

Hutang djiwa harus dibajar dengan djiwa pula, kata peribahasa kita.

Kolonel Pelaut Sjaaf dalam suatu upatjara appel besar Garnizun Djakarta Raya baru² ini mengin-sjafi benar² hal ini dan dengan hati terbuka mengeluarkan rasa amarahnja itu terhadap Belanda diantaranja beliau menjatakan: ,,Setiap tetes darah jang mengalir dari tubuh pahlawan kita akan kita tebus dengan tindakan jang setimpal, demikian pula Belanda jang telah membuka persengketaan Irian Barat dengan ,,bahasa militer", maka kitapun akan mendjawabnja dengan tjara jang sama".,

Tapi dalam hal ini kita masih tetap sabar dan patuh kepada Pimpinan, karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa jang tjinta damai, tetapi lebih tjinta lagi kemerdekaan. Karena kita adalah bangsa jang tjinta damai, maka hal ini kita salurkan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa.

Djuga kepada Palang Merah Internasional diminta bantuannja untuk menghubungi pihak Belanda guna memperoleh keterangan² daripada anak buah ,,Matjan Tutul" jang ditawan Belanda itu.

Presiden Soekarno dalam surat kawat kepada Sekdjen PBB U Thant mengenai hal ini diantaranja mengatakan ,,betapa amarah rakjat Indonesia bangkit meluap oleh penjerangan Belanda terhadap patroli ALRI diperairan Aru dan tekad rakjat Indonesia untuk membalas serangan² itu.

Tetapi Presiden mendjamin kepada Sekdjen PBB: „akan berusaha keras untuk mengendalikan emosi-emosi demikian itu dalam batasnja".

Presiden djuga telah menginstruksikan kepada wakil tetap RI di PBB Sukardjo Wirjopranoto untuk memelihara hubungan jang rapat dengan U Thant untuk „mem bitjarakan kemungkinan mendapatkan penjelesaian setjara damai seluruh masalahnja sesuai dengan tudjuan dan dasar piagam PBB".

Djurubitjara Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut, Major Pelaut Ambardy dalam pendjelasannja mengenai peristiwa ini a.l. sebagai berikut :

Pertempuran laut antara Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Laut Belanda telah terdjadi pada tgl. 15 Djanuari 1962 djam 21.00, 25 mil sebelah Barat Daja Irian Barat, dimana kesatuan² patroli kita telah diserang setjara mendadak dan dengan kekuatan musuh jang lebih besar.

Menurut Major Ambardy, bhw. bagi kita bukanlah merupakan suatu hal jang sulit untuk membalas kelitjikan Belanda ini. Djika perin-

51 Orang anak buah kapal „Matjan Tutul" tiba di Djakarta tgl. 11 Maret 1962.

tah konfrontasi militer telah harus kita laksanakan, sea front kita tentunja tidak berkisar disekitar perairan Irian Barat sadja dalam menghantjurkan kekuatan musuh.

Pertempuran ini njata dikobarkan oleh Belanda. Pahlawan² Samudera kita telah menjambutnja dengan gagah berani. Inilah jang mendorong kita, kata Major Ambardy, untuk tetap konsekwen melaksanakan komando pembebasan

Sebagai mana telah diuraikan diatas, anak² buah kapal patroli kita „Matjan Tutul" itu ditawan oleh kolonialis Belanda di Kotabaru Irian Barat selama hampir satu bulan lebih dan berkat bantuan Perserikatan Bangsa² dan usaha Palang Merah Internasional jang kita minta itu, maka mereka itu sebanjak 51 orang telah dikembalikan ditanah air kita dengan selamat.

Agar lebih djelas diketahui oleh masjarakat, chususnja para keluarga anak buah R.I. Matjan Tutul· Pusat Penerangan Angkatan Laut mengumumkan nama-nama anak buah jang gugur dan telah kembali itu pada tanggal 11 Maret 1962 bulan ini sebagai berikut:

1. *Jang gugur:*

1. Klasi II Banurijadi.
2. Rekrut Niki.
3. Klasi II K. Ekson.

2. *Jang telah kembali:*

1. Pembantu Letnan Francisons Soeprapto dari Jogjakarta.
2. Letnan Muda Machfud Abdulhamid dari Gurah, Kediri.
3. Adjudan Slamet Djumadi dari Klaten.
4. Sersan Major Johannes Nelwan dari Tondano, Menado.
5. Kopral Edy Sutopo dari Modjokerto.
6. Kopral Njoman Tjang dari Blimbingan ,Bali.
7. Kopral Soetrisno Sastrodiredjo dari Tjimahi.
8. Klasi II Sutarmo Partosalimin dari Madiun.
9. Klasi Dua Soekarno Reksokromo dari Kediri.
10. Klasi Dua Abdullah Arsad dari Palembang.
11. Klasi Satu Mohamad Saleh bin Mohamad Iska dari Modjokerto.
12. Klasi Dua Soebowo Notoatmodjo dari Surabaja.
13. Klasi Dua Danusuminta dari Krawang.
14. Klasi Dua Soeharmadji dari Malang.
15. Klasi Dua Soeprapto Prodjosubroto dari Kediri.
16. Klasi Dua Tarmudji Mattaslim dari Kediri.
17. Klasi Dua Andrean Karjokardjiman dari Djombang.
18. Klasi Dua Kasijanto Riskan dari Malang.

19. Klasi Dua Santa Sukiman dari Purwakarta.
20. Klasi Dua Suparman Sijo dari Malang.
21. Klasi Dua Njoman Toja dari Singaradja, Bali.
22. Klasi Dua Sukirman Surip dari Pati.
23. Klasi Dua Petrus Matitaputi dari Kisar, Maluku Tenggara.
24. Klasi Dua Djamani Medjo dari Bogor .
25. Sersan Tugimun Suwarna dari Tjiamis.
26. Kopral Dullah Aman bin Nusa dari Indragiri.
27. Kopral Achmad Iding Sarmawi dari Tjiamis.
28. Kelasi Satu Martinus Singgih dari Serui.
29. Kelasi Dua Charles Papilaja dari Amboina.
30. Kelasi Dua Hidajat Madohir dari Djatinegara.
31. Kelasi Dua Saulus Sembra dari Kotabaru.
32. Kelasi Dua Samson Inaga dari Serui.
33. Kelasi Dua Rontai Patai dari Ternate.
34. Kelasi Dua Djaeman Supardi dari Kai, Maluku Tenggara.
35. Rekrut Patricius Baljanan dari Gebe, Seram.
36. Rekrut Ibrahim Abdulsamad dari Gebe, Seram.
37. Rekrut Nurbertus Renjaan dari Kai, Maluku Tenggara.
38. Rekrut Justus Senandi dari pulau Moar.
39. Rekrut Luther Bindesano dari Serui.
40. Rekrut Mochamad Sadi dari Pelabuhan Ratu .
41. Rekrut Daniel Kasdi dari Dobo.
42. Rekrut Hasan Hehakaja dari Fakfak.
43. Rekrut Deminggus Jamlean dari pulau Mapi.
44. Rekrut Bedewen Jeblo dari Sausapor.
45. Rekrut Andi Runggiari dari Serui.
46. Rekrut Jesse Senere dari Serui.
47. Rekrut Batjo Tataroman dari Tual.
48. Rekrut Dolfinus Mudumi dari Serui.
49. Rekrut Jumias Rapami dari Serui.
50. Rekrut Anton Rahawarin dari Kai, Maluku Tenggara.
51. Rekrut Djum'at Adjapaih dari Babo.

Berkenaan dengan tiba kembalinja 51 orang anak buah R.I. Matjan Tutul jang tertawan oleh Belanda itu sedjak terdjadinja „pertempuran" laut diperairan Aru tgl. 15 Djanuari 1962. pada hari Minggu pagi tgl. 11 Maret bulan ini bertempat di Markas Besar Angkatan Laut diadakan penerimaan penjerahan setjara resmi oleh Menteri/KSAL R.E. Martadinata dan

Brigadir Djenderal Dr. Sumarno selaku wakil Palang Merah Indonesia dalam suatu upatjara, dimana telah menunggu para keluarga mereka.

Menteri/KSAL Laksamana Muda R.E. Martadinata atas nama Angkatan Perang dan Pemerintah mengutjapkan selamat datang ditanah air. Diharap pula agar mereka djangan berketjil hati dengan pengalaman jang pahit. Selandjutnja dikatakan, bahwa sesuatu tugas untuk negara merupakan suatu tjontoh bagi kita.

Dengan suara agak terharu Laksamana Martadinata berkata. walaupun pengalaman² dalam perdjuangan menegakkan nama Negara jang telah mereka peroleh adalah sangat pahit dan berat, hal itu sungguh besar artinja bagi bangsa dan tanah air.

Dibawah pimpinan Laksamana Martadinata sendiri dilakukan upatjara mengheningkan tjipta untuk mengigatkan dan mengenangkan djasa² besar serta arwah² para Pahlawan R.I. Matjan Tutul lainnja jang telah gugur dalam pertempuran.

Pengalaman selama ditawan.

Didalam keterangannja dihadapan para wartawan dalam dan luar negeri ditempat peristirahatan ALRI di Tjipajung dekat Bogor dapat kita menarik kesimpulan, bahwa selama mereka mendjadi tawanan Belanda didaratan Irian Barat betul-betul merasakan tekanan² jang berat baik tekanan bathin ataupun siksaan badan, sebab selama mereka ditawan dipaksa kerdja berat tanpa istirahat, ditanjai siang malam dengan pukulan² serta antjaman² sendjata dan didjaga dengan keras sekali sehingga tidurpun sangat kurang sekali djuga tanpa diberi bantal dan selimut. Selain itu tiap keluar kamar tangan dibelenggu dengan mata ditutup. Pendeknja mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak Belanda.

Dalam hal ini pihak Belanda terang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perdjandjian Djenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang.

Dari pengalaman² jang dialami oleh para anak buah R.I. Matjan Tutul itu hendaknja mendjadi tjermin dan tjambuk lebih membulatkan tekad kita lagi untuk membebaskan Irian Barat dan memasukannja kedalam wilajah kekuasaan Ripublik Indonesia sesegera mungkin.

Amarah rakjat Indonesia dewasa ini telah begitu memuntjak terhadap kolonialis Belanda jang telah memperlakukan sewenang-wenang

terhadap para anak buah R.I. Matjan Tutul itu.

Dan pada saatnja pasti meledak karena tak tahan lagi mendengar saudara-saudara sebangsa sertanah air di Irian Barat diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak kolonialis Belanda.

Kita dapat mengerti bagaimana perasaan hati Sdr. J.A. Dimara (putera Irian Barat asli) jang kini mendjadi anggauta Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Umum Gerakan Rakjat Irian Barat/Operasi Irian (OPI), mengatakan bahwa „pertempuran" antara kesatuan[2] angkatan laut Indonesia dan Belanda disekitar kepulauan Aru telah menggemparkan rakjat Irian Barat dan berkenaan dengan itu pergolakan serta gerakan-gerakan pembebasan rakjat di Irian Barat sendiri dalam menentang kolonialisme Belanda kini bahkan makin menghebat.

Dimara mengatakan bahwa dalam usaha mengusir pendjadjah dari wilajah Indonesia kita harus berani berkorban dan pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Kita harus berpegangan pada pepatah : „Patah tumbuh hilang berganti". Demikian Dimara.

Sebagai penutup marilah kita lebih pergiat Trikomando rakjat dan tetap siap-siaga, waspada dibidang masing-masing.

Para anak buah kapal MTD „Matjan Tutul" R.I. mentjeriterakan pengalaman[2] pahit selama ditawan Belanda di Irian Barat kepada pers dalam dan luar negeri.

RIWAJAT HIDUP JOS SOEDARSO

Komodor Laut Josaphat Soedarso memulai karirnja sebagai pelaut tatkala masih berusia 19 tahun didjaman Djepang. Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan beliau bersama pemuda² lainnja menggabungkan diri dengan BKR Laut. Terus menerus sampai saat ini beliau mengabdikan dirinja kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Jos Soedarso jang berperawakan tidak begitu besar dilahirkan di Salatiga tanggal 24 Nopember 1925 dari keluarga beragama Katholik jang taat. Beliau menikah dengan nona Siti Kustini dalam tahun 1955, dan dianugerahi 5 orang anak, dua orang telah meninggal dunia, diantaranja seorang baji jang meninggal dunia bulan Desember 1961 jl.

Jos Soedarso melewatkan masa² pendidikannja di SR, SLP, SLA, Sekolah Pelajaran Tinggi Semarang dan kemudian mengikuti pendidikan dan latihan Perwira Laut didjaman Djepang dan setelah kemerdekaan masuk sebagai kadet di Kalibakung, dan latihan Spesial Operasi di Sarangan.

Dalam usia 19 tahun Jos Soedarso sudah mendjadi Mualim II pada Gyo Osamu Butai, dan setelah masuk BKR Laut mendjabat sebagai Perwira Penjelidik Militer Chusus, kemudian ber-turut² sebagai Perwira Field Preparation, Perwira SO III, Perwira Penghubung pada Central Joint Board dan kemudian sebagai Perwira diperbantukan pada kabinet KSAP di Jogjakarta sampai bulan Desember 1949.

Selagi perang kemerdekaan melawan Belanda berketjamuk diberbagai tempat di Indonesia, Jos Soedarso dan kawan-kawannja dengan menggunakan sebuah perahu menerobos blokade Belanda menudju ke Maluku. Sampai di Bali perahu tsb. mendapat serangan dari Belanda, sehingga rentjana ke Maluku tidak dapat terlaksana.

Setelah penjerahan kedaulatan Jos Soedarso adalah salah seorang dari pemuda² Indonesia jang pertama mengambil oper pimpinan dan tugas atas kapal² perang Belanda. Beliau waktu itu mendjabat sebagai Navigator R.I. Pati Unus, kemudian di R.I. Banteng, Perwira R.I. Gadjah Mada, Komandan R.I. Radjawali, Komandan R.I. Alu-alu, Perwira SO IV, dan dinas terachir dilaut sebagai Komandan R.I. Pattimura.

Diantara tugas² dikapal tsb. dalam tahun 1958 Jos Soedarso mengikuti pendidikan Sendjata Dalam Air diluar negeri dan Kursus Ulangan Tambahan Perwira di Surabaja.

Tahun 1958 Jos Soedarso diangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara seluruh Indonesia.

Satahun kemudian beliau diangkat sebagai Deputy I KSAL dan sedjak bulan Agustus 1960 sebagai Deputy KSAL dengan pangkat Komodor sedjak bulan April 1961.

Komodor Jos Soedarso, Perwira jang selalu dekat dengan bawahannja itu, atas djasa²nja terhadap ALRI serta Nusa dan Bangsa, telah dianugerahi 11 bintang dan Satya Lentjana, jaitu: Bintang Djasa Darma, Bintang Gerilja, Bintang Sewindu AP, Satya Lentjana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lentjana Perang kemerdekaan ke I dan ke II, Satya Lentjana Gerakan Operasi Militer ke-I sampai dengan ke-IV, dan Satya Lentjana Saptamarga.

Disamping Djabatannja sebagai Deputy KSAL djuga mendjadi anggota Depernas dan MPRS sebagai wakil golongan Angkatan Laut.
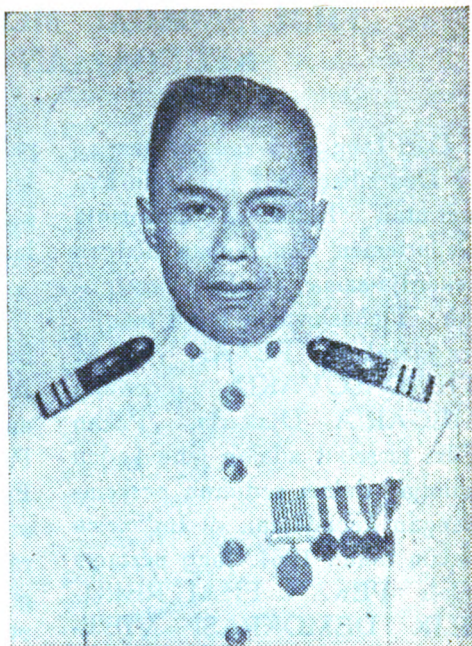
. . . . . „Untuk dapat memenangkan perdjuangan pembebasan Irian Barat, kita harus berada ditempat jang kuat. Djalan berunding, boleh, kekerasan, boleh, keduanja adalah halal. Peladjaran revolusi kalau berunding harus atas dasar kemerdekaan 100%. Tetapi, walaupun berunding, Trikomando Rakjat harus djalan terus" . . . .

Wakil MP/Menteri Penerangan Muhd. Yamin.

Diutjapkan dalam malam ramah tamah para anggota Dewan Pertimbangan Angkatan '45 dengan para peserta Musjawarah kerdja Dewan Perwakilan Angkatan '45 seluruh Indonesia.

FILM SEBAGAI MEDIA PENJEBAR KEBUDAJAAN BANGSA

Dari tanggal 5 sampai dengan 11 Desember 1961 jang lalu Pemerintah Indonesia chususnja Departemen Penerangan dengan bekerdja-sama dengan Pemerintah Tjekoslovakia telah menjelenggarakan PEKAN FILM TJEKOSLOVAKIA digedung MEGARIA Djakarta. Pekan Film tersebut adalah jang kedua kalinja dalam sedjarah perkembangan kebudajaan di Indonesia dalam tahun 1961. Jang pertama ialah PEKAN FILM REPUBLIK DEMOKRASI VIETNAM jang telah berlangsung beberapa bulan jang lalu digedung bioskop MENTENG Djakarta. Maksud dan tudjuan Pekan Film tersebut telah djelas, sebagai realisasi dari kerangka ketiga jang tertjantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesia.

Penjelenggaraan pekan-pekan film tersebut, adalah suatu pelaksanaan atau usaha kelandjutan dari pada Perdjandjian Kebudajaan dibidang film jang telah ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa negara sahabat. Pekan2 film sematjam ini akan diselenggarakan di Indonesia, dan sebaliknja pekan film Indonesia akan diselenggarakan pula di Tjekaslovakia dan dinegaranegara sahabat lainnja.

Dalam pidato pembukaannja Sdr. Mardhani Sarjono Dipo M. A. Kepala Produksi dan Pimpinan Harian P.F.N., selaku Ketua Panitya Penjelenggara Pekan Film Tjekoslovakia mengatakan antara lain: „Pekan Film ini kami rasa sangat besar manfaatnja bagi kedua bangsa jang ingin memperkokoh rantai persahabatannja. Dari film jang dipertundjukkan, kita akan memperoleh gambaran tentang kehidupan dan perdjoangan rakjat Tjekoslovakia. Bagi karyawan2 film Indonesia chususnja, film jang akan dihidangkan dalam pekan film ini, akan merupakan bahan2 perbandingan dalam usaha memadjukan teknik perfilman di Indonesia. Kesempatan ini sesuatu jang benar2 menggembirakan, karena djustru telah sedjak lama kita mengharapkan untuk dapat menjaksikan film2 Tjekoslovakia, jang telah sedjak lama pula kita ketahui akan taraf dan nilainja jang sudah tinggi didunia Internasional. Mudah2an dengan diadakannja

hubungan Internasional jang lebih luas dibidang perfilman ini, karyawan film akan memperoleh kesempatan jang luas pula untuk dapat memberikan darma baktinja dalam mentjiptakan kerdja sama dan persahabatan diantara bangsa2 didunia untuk membentuk Dunia Baru jang bersih dari Imperialisme dan Kolonialisme menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna.

Dari film2 jang dipertundjukkan, kita dapat menjaksikan beberapa adegan jang memang sesuai dengan suasana politik dinegara kita disamping tjerita film itu sendiri. Film perang pada umumnja lebih tjotjok dengan suasana sekarang daripada film2 lainnja jang banjak menimbulkan nafsu sex bagi penontonnja. Kita sekarang sedang giat2nja memperdjoangkan kembalinja IRIAN BARAT kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Dalam keadaan demikian kita memerlukan, disamping persatuan nasional jang harus kita bina, dan memupuk rasa pertjaja kepada kemampuan sendiri, djuga perlu me ngobar2kan semangat untuk berani merebut Irian Barat dari kolonialis imperialis Belanda jang masih bertjokol disana.

Pekan Film tersebut selain film2nja boleh dikatakan tjotjok/ sesuai dengan suasananja, djuga timingnja sangat tepat, jakni diselenggarakan mendjelang komando rakjat. Didalam film „Five Branded women" kita dapat menjaksikan semangat kepahlawanan jang meluap-luap dari lima orang gadis, karena membela haknja dan menentang ke-sewenang-wenangan. Mereka dengan segala daja upajanja berusaha melepaskan diri dari tawanan mu suh, dan berusaha mendapatkan sendjata untuk madju berperang. Dalam film tersebut kita djuga mendapat didikan tentang disiplin, jang dalam segala hal dapat kita djadikan teladan. Dalam keadaan dimana pasukannja menghadapi bahaja serangan dari musuh, seorang pemuda dan seorang gadis (dalam satu pasukan) bersenang-senang, berkasih-kasihan, bertjumbu-tjumbuan. Achirnja mereka didjatuhi hukuman tembak, karena dianggap melanggar disiplin militer.

Film tersebut memang dapat membangkitkan semangat bagi pemuda dan pemudi jang sedang melihatnja. Dan ini ada manfaatnja untuk membantu perdjoangan pengembalian Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan demikian „FILM" telah memenuhi fungsinja sebagai alat perdjoangan, sebagai alat pelaksana Manipol.

Dan kerdjasama dengan Tjekoslovakia ini bukan sadja kerdjasama dalam bidang kebudajaan, akan tetapi langsung atau tidak langsung dapat kita katakan suatu bantuan dalam perdjoangan pengembalian Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. Sekarang ini segala kegiatan kita dibidang apapun tidak bisa kita pisahkan dari perdjoangan pengembalian Irian Barat. Dalam perfilmanpun demikian. Kita djuga dapat mengambil teladan/peladjaran2 jang berguna bagi perdjoangan Irian Barat, dari film2 jang kita lihat. Dalam pidatonja pada Hari Ibu, Bung Karno antara lain mentjeritakan: „Saja tempo hari melihat film Spartakus. Kepada Spartakus jang ditjeritakan ini, sebab dia bertempur, berusaha, berichtiar, membanting tulang berdjoang mati-matian, menumbangkan kepada perbudakan. Dia ingin supaja manusia itu tidak didjadikan budak. Ingin supaja manusia merdeka". Selandjutnja Bung Karno mentjeritakan: „Nah, saja melihat didalam Spartakus itu sesuai dengan apa jang sudah saja batja, di kitab2 sedjarah gerakan proletor, pengerahan, peng-organisasian, pelatihan, sehingga ahirnja Spartakus jang tadinja berdiri sendiri, membesar, membesar. membesar ia punja pengikut2 mendjadi satu lawine jang hebat sekali dari pada orang-orang jang tjinta kemerdekaan, ingin menumbangkan kekuasaan dari pada Roma jang dikepalai oleh Crasus. Nah ini sdr2, satu pengadjaran jang baik bagi bangsa Indonesia, bagi wanita Indonesia".

Pekan film tersebut mendapat perhatian jang tjukup besar. Ketua panitya penjelenggara, dalam pidato penutupnja, tak lupa mengutjapkan terima kasih kepada masjarakat ibu kota atas perhatiannja kepada pekan film ini. Djuga menguraikan harapan-harapannja dengan singkat tentang perkembangan perfilman di Indonesia sebagai berikut :

Dengan diselenggarakannja Pekan Film sebagai realisasi dari pada perdjandjian Kebudajaan antara kedua negara ini, membuktikan, bahwa kedua belah fihak, baik pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Tjekoslovakia telah menjadari akan pentingnja film sebagai media penjebar dan penjubur kebudajaan bangsa. Dengan djalan film inilah akan dapat ditanamkan pengertian-pengertian baik dari kedua belah pihak, baik jang mengenai tjara kehidupan, djalan pikiran, pembangunan dan perdjoangan rakjat kedua negara. Mengingat fungsi

film bagi negara sangat penting dalam hubungan internasional dibidang kebudajaan itu, maka sudah selajaknja apabila Pemerintah Indonesia berusaha untuk meninggikan mutu produksi film didalam negeri, sehingga djika film-film Indonesia dipertundjukkan dimana sadja, film-film tersebut benar-benar dapat merupakan pentjerminan daripada masjarakat Indonesia jang telah merdeka dan sedang menjelesaikan revolusi nasionalnja. Untuk meninggikan mutu dan djumlah produksi film didalam negeri, perlu dilaksanakannja penindjauan kembali mengenai situasi perfilman di Indonesia setjara integral, baik jang langsung bersangkutan dengan soal produksi, maupun mengenai peraturan-peraturan distribusi, exhibisi, export-import, sensor dan lain sebagainja. Struktuur organisasi perfilman jang bersimpang siur akan dapat menghambat perkembangan perfilman di Indonesia sendiri.

Berhubung dengan itu, untuk menertibkan kembali situasi perfilman di Indonesia, jang berarti pula untuk mempertjepat proses perkembangannja menudju ketaraf jang lebih tinggi dan sempurna, Pemerintah telah membentuk Badan Urusan Perfilman dengan ketetapan P.J.M. Presiden nomor 548 tahun 1961. Dengan langkah langkah jang telah diambil oleh pemerintah pada waktu jang arhir-arhir ini dibidang perfilman, kami jakin, bahwa pembangunan dibidang perfilman akan dapat diselenggarakan bersama-sama dengan pelbagai matjam pembangunan, sesuai dengan keputusan-keputusan jang telah disjahkan oleh M.P.R.S. Keinginan rakjat Indonesia untuk dapat menjelenggarakan Pekan-pekan Film dari negara-negara sahabat, kini telah merupakan kenjataan. Dan tiba waktunja bagi kita untuk memikirkan agar dapat menjelenggarakan Pekan-pekan Film Indonesia dipelbagai negara sahabat diseluruh dunia.

Demikian ketua Panitia Penjelenggara.
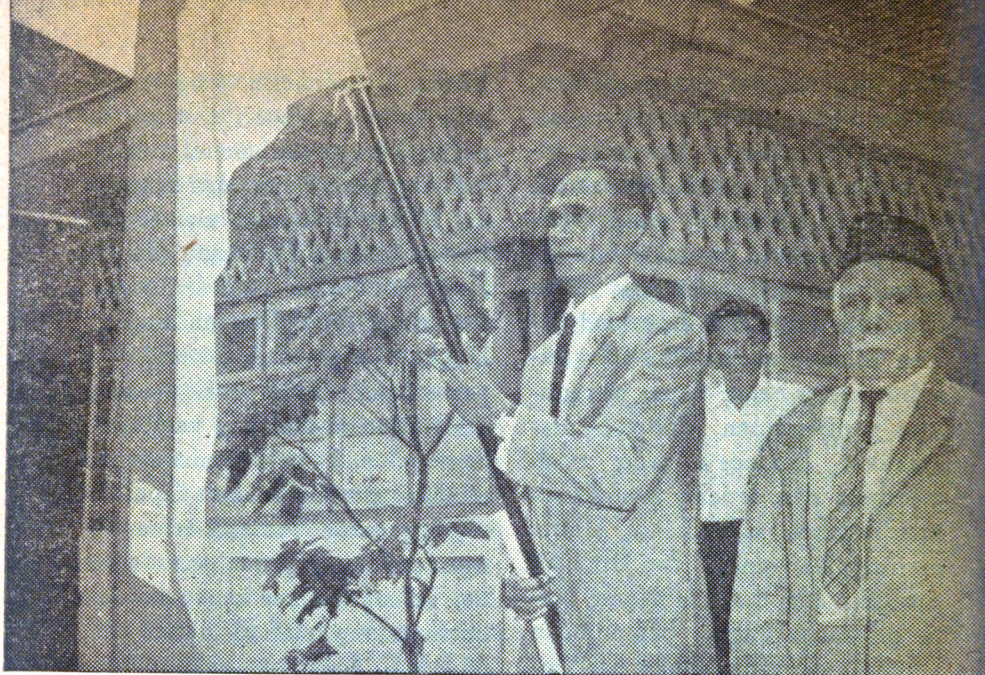
J.A. Dimara membawa Sang Dwiwarna untuk dikibarkan di Irian Barat.

PELAKSANAAN TRIKOMANDO RAKJAT

10.000 Sukarelawan kemedan djuang. Pada tanggal 10 Pebruari jang lalu telah bertolak dari pelabuhan Tandjung Priok 10.000 sukarelawan pembebasan Irian Barat gelombang pertama menudju ke Irian Barat.

*

98 peleton mahasiswa pemuda dilatih. 98 Peleton terdiri dari 4.410 pewadjib latih mahasiswa dan pemuda dari Kotapradja Surakarta setjara berangsur-angsur mendapat latihan kemiliteran.

*

Sukarelawan mengalir di Peking. Surat² permintaan mendjadi sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat kini terus mengalir di Kedutaan Besar RI di Peking. Diantara ratusan sukarelawan jang telah tertjatat itu terdapat pula wanita.

*

Sukarelawan Republik Persatuan Arab. Ratusan pemuda Republik Persatuan Arab telah

menjatakan keinginannja untuk setjara sukarela mendjadi anggauta barisan pedjuang Indonesia membebaskan Irian Barat. Pemuda² RPA itu telah datang ke-Kedutaan Besar RI di Cairo guna menjampaikan hasratnja itu.

*

Sukarelawan Baturadja. Diantara 1650 orang jang tertjatat sebagai sukarelawan pembebasan Irian Barat didaerah Baturadja dan sekitarnja terdapat 84 orang Sukarelawati jang segera akan disalurkan dalam latihan².

Rapa dan Bima siap siaga. Hingga sekarang di Rapa dan Bima telah ada 2.000 orang pegawai jang mengikuti latihan² kemiliteran dalam rangka kesiap-siagaan melaksanakan Trikomando Rakjat. Dengan djumlah ini diseluruh daerah tingkat II Bima dan Rapa sudah terbentuk 32 peleton pasukan² sukarela jang terlatih, diantaranja 3 peleton wanita. Mereka siap diberangkatkan kegaris depan untuk pembebasan Irian Barat.

Di Atjeh terdaftar 26.000 sukarelawan. Sampai Rabu tgl. 21 Pebruari 1962 para sukarelawan pembebasan Irian Barat jang sudah terdaftar didaerah Atjeh telah mentjapai djumlah 26.000 orang.

*

700.000 penduduk Djepang dukung pembebasan Irian Barat. Sebuah delegasi dipimpin oleh Tetsuo Ikoyama jang mewakili 700.000 orang penduduk daerah Otaku di Tokio baru² ini mengundjungi Kedutaaan Besar RI disana untuk menjatakan dukungaan sepenuhnja terhadap perdjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dan disamping itu mereka menjatakan protesnja atas pendaratan pesawat² KLM dilapangan terbang Haneda jang mengangkut serdadu² Belanda ke Irian Barat.

*

Regu Trikomando Depertan. Dalam rangka memperhebat pelaksanaan Trikomando Rakjat, Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) telah membentuk suatu regu indoktrinasi Trikomando Rakjat jang diketuai oleh anggauta DPA J. Tumakaka.

*

Dua ribu anggota Perintis Irian Barat siap. Menurut Ketua Umum Perintis Irian Barat Soejatno dua ribu anggota Perintis Irian Barat jang terlatih segera akan diberangkatkan dengan para sukarelawan lainnja kedaerah perbatasan. Ini adalah ge-
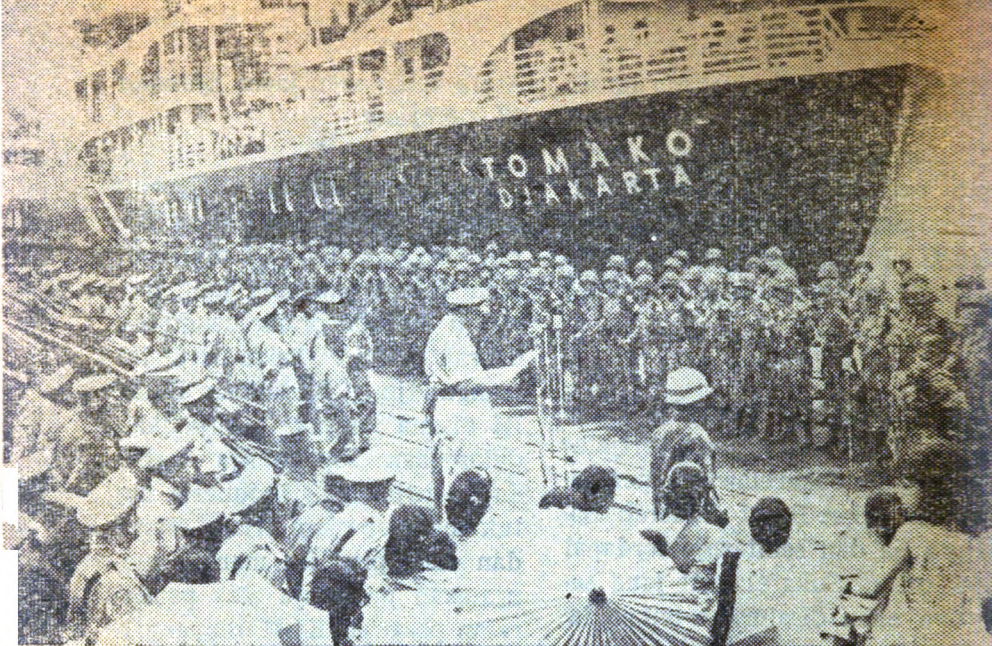
Dua bataljon RTP Brimob (Resimen Team Pertempuran Brigade Mobil), sesaat sebelum menudju Irian Barat untuk menghadapi tugas tempur setiap saat Komando diberikan, menerima amanat dari Menteri/KKN Sukarno Djojonegoro dan disertai do'a restu Presiden Sukarno.

lombang kedua, sedangkan gelombang pertama sebanjak 500 orang sudah berada didaerah perbatasan.

1500 sukarelawan putera Malaya siap kegaris depan. Hingga kini telah terdaftar 1500 orang sukarelawan Malaya untuk pembebasan Irian Barat, dan para pendaftar masih terus mengalir pada Kedutaan Besar diibukota Persekutuan Tanah Melaju.

Sebagian besar dari putera2 Malaya jang telah mendaftar itu adalah bekas anggota Pasukan „Home Guard" dan Pasukan „Polisi Radja". Mereka mohon segera diberangkatkan kegaris depan.

Wartawan2 Sri Langka setiakawan. Persatuan Wartawan Sri Langka telah menjatakan setiakawan mutlak dengan perdjuangan rakjat Indonesia untuk menlikwidasi imperialisme Belanda di Irian Barat.

Rela mati untuk bebaskan Irian Barat. 1.000 orang pemuda tani dan peladjar di Dati II Tanah Toradja menjatakan

rela mati untuk pembebasan Irian Barat.

Pernjataan itu disampaikan kepada pemerintah melalui pihak penguasa setempat. Dalam waktu singkat oleh penguasa disana akan bentuk 2 Jon sukarelawan.

*

Pasukan Penjerbu Irian Barat dibentuk. J. A. Dimara dalam appel kehormatan di Tulehu tgl. 14 jl telah mengumumkan terbentuknja Pasukan Penjerbu Irian Barat jang berpusat di Maluku dan dipelopori sebagian besar pedjuang² Irian Barat.

Pasukan² Brigade Tempur Perintis Irian Barat dilebur mendjadi Pasukan Penjerbu Irian Barat.

Perlu diketahui, Sdr. J. A. Dimara adalah anggauta Depertan dan Ketua Gerakan Rakjat Irian Barat.

Dalam sambutannja itu diantaranja beliau menjatakan, bahwa djika dalam waktu singkat ini Belanda belum djuga mau menjerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia, maka Pasukan Penjerbu akan mengusir mereka dari bumi Irian Barat.

*

Balikpapan siap dengan pasukan berani matinja. Dalam lingkungan Kotapradja Balikpapan telah terdaftar sebanjak 4.243 orang sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat. Diantara mana terdapat 198 orang wanita, 3 orang wanita diantaranja telah menjatakan diri pada barisan berani mati. Dalam daftar pasukan berani mati ini sebelumnja telah tertjatat sebanjak 69 orang pria.

*

Sukarelawan di Sumatera Utara. Menurut Pendam II/Bukit Barisan, bahwa sampai dengan tgl. 10/3-'62 djumlah sukarelawan pembebasan Irian Barat di Sumatera Utara terdaftar 427.825 orang, diantaranja terdapat 233 orang wanita dan 66 orang warga negara keturunan asing.

*

Ambon dan bataljon² sukarelawan. Baru² ini oleh Kodam X/Maluku/Irian Barat Letkol. Abdul Fatah diumumkan terbentuknja Bataljon² Sukarelawan mahasiswa, Pegawai Negeri dan Bataljon LKPS untuk Daerah Kotapradja Ambon.

*

Pemuda Morotai giat berlatih. Tidak kurang dari 100 orang pemuda² di Morotai dewasa ini

telah memperoleh latihan² dasar kemiliteran. Hingga saat ini didaerah Maluku Utara terdaftar tidak kurang dari 10.000 orang sukarelawan antaranja satu Bataljon Wanita.

Siap sedia membangun Irian Barat. Bekas Peladjar Pedjuang Bersendjata dalam lingkungan Departemen Perdatam menjedia kan tenaga dan fikiran untuk membangun Irian Barat dalam rangka pelaksanaan Trikomando Rakjat.

Dua Bataljon pertempuran Brimob berangkat kemedan djuang. Pada tanggal 8 Maret 1962 tepat pada hari raya 'Idulfitri telah berangkat dari pelabuhan Tandjung Priok dua Bataljon Resimen Team Pertempuran Brigade mobile menudju Irian Barat. Keberangkatan bataljon² RTP Brimob itu disertai doa restu Presiden Soekarno, diantarkan oleh sanak keluarga mereka, Menteri/KKN, para Perwira wakil² dari Angkatan² Bersendjata RI, pedjabat² pemerintahan dan lainnja, dalam suatu upatjara.

*

Peladjar² Indonesia di Eropah siap sedia. Wakil² dari Perhimpunan² Peladjar Indonesia di Eropah Barat dan Timur telah mengirimkan pernjataan kepada Presiden Soekarno dan siap sedia setiap waktu dikirim sebagai sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat.

*

Sukarelawan Magelang siap. 55.000 Sukarelawan penduduk daerah kota/kabupaten Magelang kini telah siap sedia memanggul sendjata menudju ke Irian Barat.

*

Warganegara turunan India/Pakistan siap. Sedjumlah 130 orang anggauta Persatuan Warganegara Indonesia Turunan India dan Pakistan (Perwati) di Medan, jang tergabung dalam Badan Pelaksana Pendaftaran Sukarelawan Irian Barat siap sedia untuk dilatih guna membebaskan Irian Barat.

*

Kemedan bakti. Pada tgl. 12 Maret bulan ini telah berangkat dari Pontianak menudju medan bakti, Baterai Anti serangan Udara untuk melaksanakan Trikomando rakjat, dalam suatu upatjara jang dilakukan didepan Kodim 1207 Pontianak dengan dihadiri oleh segenap perwira Angkatan Darat, pedjabat² pemerintah sipil dan kepolisian serta masjarakat umum.

PERLOMBAAN TANAM PADI MENUDJU SELF-SUPPORTING BERAS

Hardjosumarto

Seperti kita maklumi bersama bahwa guna mewudjudkan program Pemerintah dalam bidang pangan menudju self-supporting beras, sampai saat ini kita telah mengadakan bermatjam-matjam langkah, seperti intensifikasi penanaman padi, peremadjaan tanaman kelapa, pemeliharaan kebun bibit djenis unggul dan perlombaan² penanaman padi. Untuk maksud jang sama di Daerah Tingkat II Sleman dalam masa tanaman tahun 60/61 telah menjelenggarakan perlombaan² penanaman padi baik setjara perseorangan maupun per Kelurahan.

Perlombaan ini ternjata mendapat sambutan jang baik dari masjarakat tani pada umumnja. Dalam berlomba, mereka kelihatan benar² mentjurahkan perhatiannja, sehingga tertjapailah prestasi hasil jang memuaskan bagi daerah ini.

Hasil tertinggi dalam perlombaan tersebut ialah 125,75 kw/ha jang dihasilkan oleh Sdr. Hardjosoemarto sebagai pengikut perlombaan perseorangan dari Kelurahan Sumberarum Kap. Mojudan. Dalam hal ini Sdr. tersebut dapat menggondol hadiah sebagai pemenang I, sedang pemegang hadiah ke II dan ke III djatuh pada Sdr.² Martodijono dari Kap. Turi dan Sdr. H. Masjur dari Kap. Nganglik masing² dengan hasil 108 kw/ha dan 103 kw/ha.

Sementara itu upatjara pemberian surat penghargaan dan hadiah bagi para pemenang telah di lakukan baru[2] ini dengan mengambil tempat di Istana Ambarukmo.

Dengan ditjapainja hasil itu, untuk daerah ini mentjatat lagi tambahan pahlawan padi sebanjak 3 orang.

Perlu di ketahui hasil jang ditjapai Sdr. Hardjosoemarto sebanjak 125,75 kw/ha, sampai saat ini merupakan hasil tertinggi bagi seluruh daerah Istimewa Jogjakarta.

Dengan demikian Sdr. tersebut tertjatat sebagai pemenang pertama baik bagi Daerah Tingkat II Sleman maupun bagi Dearah Tingkat I Jogjakarta. *(Kp. Djapen Kab. Sleman Sastrowardojo).*

*

COACHING INDOKTRINASI MANIPOL/USDEK DI ATJEH TIMUR.

Pada tanggal 22 s/d 26 Djanuari 1962 bertempat di gedung D.P.R.D. Tk. II Atjeh Timur, oleh Team Indoktrinasi Tk. II Atjeh Timur, bersama dengan Djawatan Penerangan disana telah dilaksanakan coaching Indoktrinasi untuk kader[2] Kepolisian, Kepala[2] Djawatan/Dinas dan anggota-

Setelah selesai coaching pengikut, penjelenggara, serta lainnja diabadikan bersama-sama.

B.P.H. serta seluruh Perwira Kodim 0104 Atjeh Timur termasuk Perwira Bataljon 136 dan para Buterpra² se Kabupaten Atjeh Timur.

Setjara populer sdr. Mansjur Zainu'ddin salah seorang anggota Team Indoktrinasi Tk. II Atjeh Timur, menerangkan tentang situasi di Tanah Air sampai pada Dekrit Presiden 5 Djuli 1959, sehingga pengikut coaching merasa puas.

Tusbasja selaku Ketua Team Indoktrinasi dalam kata pembukaannja, memberikan pendjelasan tentang tudjuan coaching, serta mengadjak seluruh peserta untuk mengamalkan Manipol dan setia kepada Pantjasila

Didjelaskan lagi, bahwa Manipol akan dapat berdjalan dengan baik, djika kita sama² merupakan akar², sebagai faktor untuk mendjadikan suburnja pohon dari Negara Rep. Indonesia.

Sebelumnja terlebih dulu dibatjakan pidato tertulis MKN/KASAD Djen. A.H. Nasution, dihadapan para pengikut coaching. Dan selandjutnja kepada tiap² pengikut dibagi²kan teks lengkap dari pidato itu jang disertai schema Manipol untuk dipeladjari.

Indoktrinasi dilaksanakan berturut², jaitu :

1. Dari tgl. 22 s/d 23 untuk kader² Kepolisian.
2. Dari tgl. 24 s/d 25 untuk Kepala² Djawatan/Dinas dan anggota² B.P.H.
3. Pada tgl. 26 untuk Perwira² Kodim 0104 Atjeh Timur dan Perwira² Bataljon 136 serta Buterpra² se Kab. Atjeh Timur.

Pada penutupan coaching tersebut telah berbitjara antara lain :

Wakil Kepolisian Rest. Sdr. Abd. Azis, jang menerangkan bahwa dengan adanja Coaching ini semua petugas Kepolisian telah dapat mengetahui sekitar haluan Negara.

T. Sulaiman Effendi mewakili Bupati antara lain mengatakan bahwa dengan adanja coaching ini, maka seluruh dari isi Manipol telah dapat dikuasai oleh apparatuur Negara.

Majoor Usman Njak Gade selaku mewakili Perwira² antara lain sangat berterima kasih atas berlangsungnja coaching ini, karena dengan adanja coaching ini para Perwira telah dapat menguasai Manipol, dan berdjandji akan mengamalkannja.

Coaching ditutup dengan perasaan puas dari peserta-pesertanja.

(Djapen Kab. Atjeh Timur T. Usman Basjah-Tusbasja)

Sedjak 15 s/d. 20 Djanuari 1962. Team Territorial Pemerintah Daerah Kabupaten Redjang Lebong, telah berkundjung ke-desa² pedalam daerah Kawedanaan Redjang Lebong.

Disamping menindjau keadaan² pembangunan jang sudah dan sedang berdjalan, maupun jang sudah selesai disana, telah diadakan pula Penerangan² pada tempat² jang dikundjungi.

Pada kesempatan ini telah dilantjarkan penerangan² tentang Tri Komando Rakjat Pembebasan Irian Barat, dalam rangka Tri Program Pemerintah. Tentang Penambahan bahan² makanan dan Mobilisasi umum. Penerangan² diberikan oleh Kepala Djapen Redjang Lebong A. Aziz Masjhur Wedana R. Anom Chan, mewakili Bupati serta petugas² lainnja.

Selama 5 hari berturut² telah diadakan penerangan² jang diikuti oleh kira² 3500 orang dengan penuh perhatian. *(Djapenkab. Redjang Lebong Kep. Bgn. Pewartaan M. Sani).*
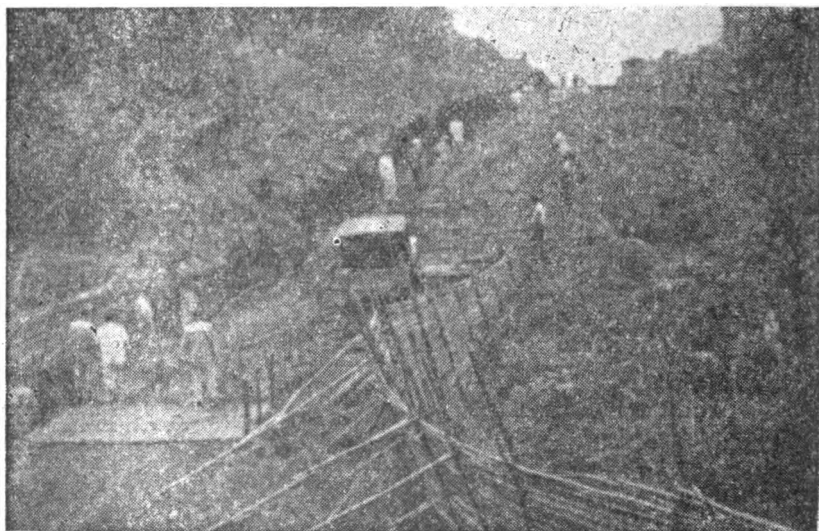
Rakjat di Marga Sepuluh Lebong, membangun djalan dgn gotong-rojong

Penjuntikan rakjat dusun Atas Tebing Lebong (kanan). Dan Taruna Tani dari dusun Kotadolok Lebong Selatan (kiri).

RAKJAT BERAU, MENDUKUNG TRIKOMANDO RAKJAT

Dalam rangka Pembebasan IRIAN BARAT, Rakjat Berau tak ketinggalan, dimana pada RAPAT RAKSASA jang diadakan oleh Front Nasional, telah dikeluarkan *Pernjataan* jang mendukung Tri Komando Rakjat jang diutjapkan oleh PJM Presiden/Panglima Tertinggi APRI

Masjarakat Berau dlm. rapat Raksasa „Mendukung Trikomando Rakjat".

Sukarelawan pembebasan Irian Barat dari Kabupaten Berau, siap siaga menggempur kolonialis Belanda dan mengenjahkannja dari Irian Barat.

dan Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 19 Desember 1961 jl. di Djojakarta.

Dalam rapat raksasa tanggal 21-12-1961 itu, jang di hadiri lebih 10.000 orang, oleh Panitya 9 Front Nasional telah diserahkan Surat Pernjataan tsb. pada Komandan Kodim 0902 Berau, jang akan meneruskannja nanti pada Pemerintah Pusat di Djakarta. Dalam kata sambutannja Dan Dim 0902 Berau Major Ngaspin Sugihardjo menjatakan terima kasih dan terharu melihat sambutan dan semangat Rakjat Berau. Memang kolonialisme dan Imperialisme dimana sadja dan dalam bentuk apapun, adalah musuh seluruh Rakjat Indonesia. Demikian ditegaskan oleh beliau Rapat raksana ini berdjalan tertib dan penuh semangat. Dan hari itu djuga telah mendaftarkan diri untuk mendjadi Pasukan Berani mati semua anggauta-anggauta Wadjib Latih, dan pemuda-pemuda/pemudi-pemudi jang pada hari itu sadja berdjumlah 1000 orang lebih. *(Djapenkab Berau Kap. Bag. Penmob Adji Rachmatsjah).*

BERITA KELUARGA

Telah pulang ke Rachmatullah.

SULEMAN HUDUM

Pengatur Penerangan Tk. I pada Diapen Propinsi Riau, Pakan Baru pada malam tanggal 12/13 Nopember 1961.
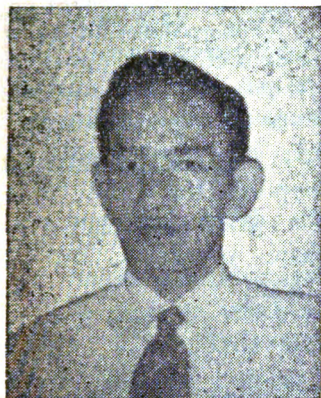
Suleman Hudum

F. Soeparno

. R. MOHD. SALEH.

Kepala Djawatan Penerangan Ketjamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15 Maret 1962.

R. Moh. Saleh

F. SOEPARNO.

Kepala Bagian Penerangan Mobil Djawatan Penerangan Kabupaten Klaten, pada tanggal 5 Maret 1962.

Inna lillahi wa inna ilaihi rodjiun

Perundang-undangan, Peraturan dan Pengumuman

Isi :

a. *Peraturan Pemerintah No. 1/1962 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertjetakan Negara.*

b. *Keputusan Presiden No. 659/1961, tentang penjelesaian Administratip dan penjaluran terhadap pemberontak dan gerombolan jang menjerah/tertangkap dan berasal dari pegawai Negeri/Daerah, anggota Kepolisian Negara dan anggota Angkatan Perang R.I. beserta para pensiunan.*

PERATURAN PEMERINTAH
No. 1 TAHUN 1962
TENTANG

PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERTJETAKAN NEGARA.

Presiden Republik Indonesia,

MENIMBANG :

a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan negara jang berada dibawah lingkungan Departemen Penerangan;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum jang diserahi tugas menjelenggarakan pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara jang berusaha dalam lapangan pentjetakan, penerbitan dan periklanan;

MENGINGAT :

1. pasal 5 ajat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 (L.N. 1960 No. 59) pasal 20 ajat (1) huruf a jo. pasal 22 ajat (1) huruf a;

MENDENGAR :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Oktober 1960;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERTJETAKAN NEGARA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertjetakan Negara — selandjutnja disebut B.P.U. Perusahaan Pertjetakan Negara — didirikan suatu Badan Pimpinan Umum jang diserahi tugas menjelenggarakan pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara sebagai termaksud pada pasal 20 ajat (1) huruf *a* Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

(2) Perusahaan-perusahaan negara jang namanja tersebut dibawah ini :

a. Pertjetakan Negara dahulu „Landsdrukkerij" jang ditundjuk sebagai perusahaan negara dalam arti pasal 2 „Indische Bedrijvenwet" dan berkedudukan di Djakarta;

b. Pertjetakan Negara dahulu „N.V. de Unie jang sedjak 3 Desember 1957 dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 123) dan berkedudukan di Djakarta;

c. Pertjetakan Negara di Bandjarbaru, jang didirikan berdasarkan „Indische Comptabiliteitswet;

dengan ini dilebur kedalam B.P.U. Perusahaan Pertjetakan Negara termaksud dalam ajat (1).

(3) Segala hak dan kewadjiban, perlengkapan dan kekajaan serta usaha dari :

1. Pertjetakan Negara dahulu „Landsdrukkerij" di Djakarta;
2. Pertjetakan Negara dahulu „N.V. de Unie" di Djakarta;
3. „Pertjetakan Negara di Bandjar-baru,

beralih kepada B.P.U. Perusahaan Pertjetakan Negara.

(4) Pelaksanaan peleburan termaksud pada ajat (2) dan ajat (3) diatur oleh Menteri Penerangan.

(5) Badan Pimpinan Umum tersebut pada ajat (1) diserahi pula tugas :

a. mengadakan kerdjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus (pasal 20 ajat (1) huruf *c* Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960);

b. mengawasi pekerdjaan menguasai dan mengurus (pasal 20 ajat (1) huruf *d* Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960).

Perusahaan-perusahaan Pertjetakan Negara dalam lingkungan Departemen Penerangan jang telah/atau

akan didirikan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) B.P.U. Perusahaan Pertjetakan Negara adalah badan hukum jang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini jang dimaksudkan dengan :

a. „Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b. „Menteri" ialah Menteri Penerangan;
c. „Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Pertjetakan Negara;
d. „Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Djakarta dan dapat mempunjai kantor-kantor tjabang, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden didalam negeri dengan persetudjuan Menteri, dan diluar negeri dengan persetudjuan Pemerintah.

Tudjuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketenteraman serta kesenangan kerdja dalam Perusahaan, menudju masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan' pentjetakan, penerbitan dan periklanan jang diperintji dan diatur sebagai berikut :

a. menjelenggarakan pekerdjaan tjetak-mentjetak, penerbitan, periklanan dan lain-lain keperluan jang sama dari Departemen-departemen, Djawatan-djawatan serta lain-lain instansi Pemerintah dan dimana perlu djuga dari pihak swasta;
b. mengatur pertjetakan pekerdjaan tjetak-mentjetak untuk Departemen-departemen, Djawatan-djawatan dan lain-lain instansi Pemerintah pada pertjetakan-pertjetakan lain daripada Perusahaan, apabila Perusahaan tidak dapat menger-

djakannja sendiri pekerdjaan tersebut.

Modal

Pasal 7.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 83.000.000.—

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(3) Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ajat (1).

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi jang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanjak-banjaknja 6 (enam) orang Direktur jang bertanggung djawab atas bidangnja masing-masing.

(2) Presiden-Direktur bertanggung djawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-djawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gadji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warganegara Indonesia.

Pasal 10.

(1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai deradjat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termaksud menantu dan ipar, ketjuali djika diizinkan oleh Pemerintah.

Djika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan jang terlarang itu, maka untuk dapat melandjutkan djabatannja diperlukan izin pemerintah.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap djabatan lain, ketjuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah djabatan jang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanja.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunjai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang bertudjuan mentjari laba.

Pasal 11.

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selamalamanja lima tahun. Setelah waktu itu berachir anggota jang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhen-

tikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ajat (1) belum berachir;

a. atas permintaan sendiri;
b. karena tindakan jang merugikan Perusahaan;
c. karena tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (2) huruf *b* dan huruf *c*, djika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (2) huruf *b* dan huruf *c* dilakukan anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama persoalan tersebut pada ajat (4) belum diputuskan, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan. Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara didjatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannja lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 12.

(1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.

(2) Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ajat (1) kepada seorang anggota Direksi jang chusus ditundjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

(1) Direksi menentukan kebidjaksanaan Perusahaan.

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekajaan Perusahaan.

(3) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerdjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi.

Tanggung djawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 14.

(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam

kedudukan selaku demikian, jang tidak dibebani tugas penjimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, jang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewadjiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwadjibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnja terhadap pegawai Perusahaan.

(3) Semua pegawai Perusahaan jang dibebani tugas penjimpanan pembajaran atau penjerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan jang disimpan dalam gudang atau tempat penjimpanan jang chusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwadjibkan mengirimkan pertanggungan djawab tentang pelaksanaan tugasnja kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Pegawai termaksud pada ajat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-djawab mengenai tjara pengurusannja kapada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan jang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan jang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewadjiban mengirimkan pertanggungan-djawab mengenai tjara mengurusnja.

(5) Semua surat bukti dan surat lainnja bagaimanapun djuga sifatnja jang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain jang ditundjuk oleh Menteri, ketjuali djika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnja perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan padjak dan kontrol akuntan pada umumnja surat bukti dan surat lainnja termaksud pada ajat (5) untuk sementara dipindahkan ke Djawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian

Pasal 15.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian jang disetudjui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian jang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun-Buku

Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan

Pasal 17.

(1) Selambat-lambatnja tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetudjuan kepada Menteri.

(2) Ketjuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak projek jang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnja.

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran jang terdjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 19.

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi. Neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diadjukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 20.

(1) Dari laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 19 disisihkan untuk :

a. dana pembangunan semesta 55%,
b. tjadangan umum sebesar 20% sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal perusahaan,
c. sumbangan ganti-rugi sebesar 3%, sedangkan sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan djasa-produksi, jang djumlah persen-

tasinja masing-masing akan ditentukan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum dan ganti-rugi bilamana telah tertjapai tudjuannja, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada pasal 18 ajat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran

Pasal 21.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi mendjadi milik Negara.

(3) Pertanggungan-djawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri jang memberi pembebasan tanggung-djawab tentang pekerdjaan jang telah diselesaikan olehnja.

BAB III

Ketentuan Penutup.

Pasal 22.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di DJAKARTA
pada tgl. 18 Djanuari 1962.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tgl. 18 Djanuari 1962.
Sekretaris Negara,
ttd.
MOHD. ICHSAN.

Lembaran Negara Th. 1962 No. 6.

*

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 659 TAHUN 1961 TENTANG PENJELESAIAN ADMINISTRATIP DAN PENJALURAN TERHADAP PEMBERONTAKAN DAN GEROMBOLAN JG MENJERAH / TERTANGKAP DAN BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI / DAERAH. ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA BESERTA PARA PENSIUNAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa pemberian amnesti dan abolisi jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 dan pemberian grasi jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 568 tahun 1961 tidaklah mengandung pengertian rehabilitasi;
2. bahwa oleh karena itu terhadap mereka perlu adanja tindakan penjelesaian administratip dalam hubungannja dengan kedudukan mereka sbg bagai bekas pegawai Negeri/Daerah, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ataupun sebagai bekas pensiunan, sesuai dengan rangka usaha penjaluran menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1961;

Mengingat :

1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 18 Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74 — Tambahan Lembaran Negara No. 305) tentang Pensiunan Pegawai Negeri sipil;
3. UndangUndang No. 2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 4) tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang Peraturan pemberian pensiun onder-stand kepada para anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara tahun 195 No. 28) sebagaimana kemudi an telah diubah ditambah, pu Undang-undang Darurat No 28 tahun 1950 (Lembaran Ne gara tahun 1950 No. 50) Undang-undang Darurat No 11 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 76), Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 7) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 54), sebagai Undang-undang;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 265) tentang Garis kebidjaksanaan terhadap pemberontakan dan gerombolan jang menjerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 270) tentang Panitia penjelesaian masalah pemberontakan dan gerombolan jang menjerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 568 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 294) tentang Tindakan imbangan terhadap pemberian amnesti dan abolisi kepada pemberontak / gerombolan, jang menjerah tanpa sjarat menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 ;

MEMUTUSKAN

PERTAMA :

Anggota-anggota pemberontak dan gerombolan jang menjerah/tertangkap dan berasal dari pegawai Negeri/Daerah, Angota Kepolisian Negara dan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia jang terkena Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 272) ataupun Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 568 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 294), terhadapnja diputuskan telah berhenti dari djabatan Negeri terhitung mulai saat jang bersangkutan turut serta dalam pemberontakan atau terhitung mulai saat jang ditetapkan dalam Keputusan Pengadilan.

KEDUA :

Dalam rangka usaha penjaluran mereka tersebut dalam ketentuan PERTAMA ke pelbagai lapangan hidup jang bermanfaat bagi Negara dan Bangsa dengan tetap mengindahkan keseimbangan susunan sosial dari masjarakat jang selalu setia kepada Revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi, diambil kebidjaksaan sebagai berikut:

1. Mereka jang sebelum turut serta dlm pemberontakan telah memenuhi sjarat untuk mendapatkan hak pensiun, disalurkan dengan usaha pemulangan ketempat asal/jang diinginkan dengan tidak disertai pemberian lapangan kerdja dalam dinas Pemerintahan. Kepadanja diberikan uang tundjangan bulanan terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 jang pelaksanaannja didasarkan atas aturan-aturan pensiun jang berlaku:

2. Mereka jang menurut ketentuan-ketentuan dalam aturan-aturan pensiun jang berlaku dilingkutngannja masing-masing belum memenuhi sjarat-sjarat untuk mendapatkan hak pensiun, dapat disalurkan dengan usaha pemberian lapangan kerdja dinas Pemerintahan apabila telah memenuhi persjaratan-persjaratan dan ketentuan-ketentuan kepegawaian jang berlaku, dihubungkan dengan dasar kebutuhan dan kepentingan Negara. Dalam hal itu kepadanja diberikan pernilaian tahun bekerdja permulaan, baik untuk menetapkan perhitungan gadji, maupun untuk perhitungan masa pangkat kemudian, dengan ketentuan bahwa pemberian kepangkatannja adalah setinggi²nja satu tingkat lebih rendah daripada pangkat sebelum mereka turut dalam pemberontakan. Masa kerdja sebelum mereka turut serta dalam pemberontakan diperhitungkan untuk masa kerdja pensiun, tetapi tidak berlaku bagi perhitungan gadji dan masa pangkat tersebut;

3. Mereka jang sebelum turut serta dalam pemberontakan berkedudukan sebagai „pensiunan pegawai Negeri/Dae-

rah/Kepolisian Nengara/Angkatan Perang Republik Indonesia" kepadanja diberikan pembajaran pensiun terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 dengan ketentuan bahwa uang pensiunnja semendjak jang bersangkutan turut serta dalam pemberontakan sampai dengan achir bulan Desember 1961 tidak dibajarkan.

KETIGA:

Mereka jang telah mendapat penjelesaian administratip maupun mereka jang belum/sedang dalam penjelesaian atas dasar surat Edaran Deputy Penguasa Perang Tertinggi No. 0767/Peperti/1960 tanggal 27 September 1960 dan Surat Edaran Menteri Pertama No. 10/RI/1961 tanggal 31 Mei 1961, diselesaikan administrasinja menurut Keputusan Presiden ini, dengan ketentuan bahwa pendapatan-pendapatan jang telah diterima oleh jang bersangkutan sebelum tanggal 1 Djanuari 1962 atau pendapatan-pendapatan jang diperuntukkan masa sebelum tanggal 1 Djanuari 1962 tidak diadakan perhitungan.

KEEMPAT :

Pelaksanaan daripada ketentu-an-ketentuan Keputusan Presi-den ini ditugaskan dan diper-tanggung-djawabkan kepada Ins-tansi-instansi jang berwenan[g] mengangkat / memberhentika[n] pegawai Negeri/Daerah, anggot[a] Kepolisian Negara atau Anggo-ta Angkatan Perang Republi[k] Indonesia jang bersangkutan.

KELIMA :

Didalam hal-hal jang bersifa[t] chusus, Pemerintah dapat memberikan keputusan-keputusan tersendiri bersandar pernilaian baru atas dasar pertimbangan keadaan jang lampau dari pribadi jang bersangkutan dengan dasar kebutuhan dan kepentingan Negara.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1962.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Desember 1961

Presiden Republik
Indonesia

SUKARNO.

DENGAN TJARA APAPUN
IRIAN BARAT
HARUS SEGERA
DITANGAN KITA
PERANG
BESAR
PERANG
INFILTRASI
SERAHKAN
SETJARA DAMAI

Indonesia Kementerian penerangan

Mimbar ENERANGAN
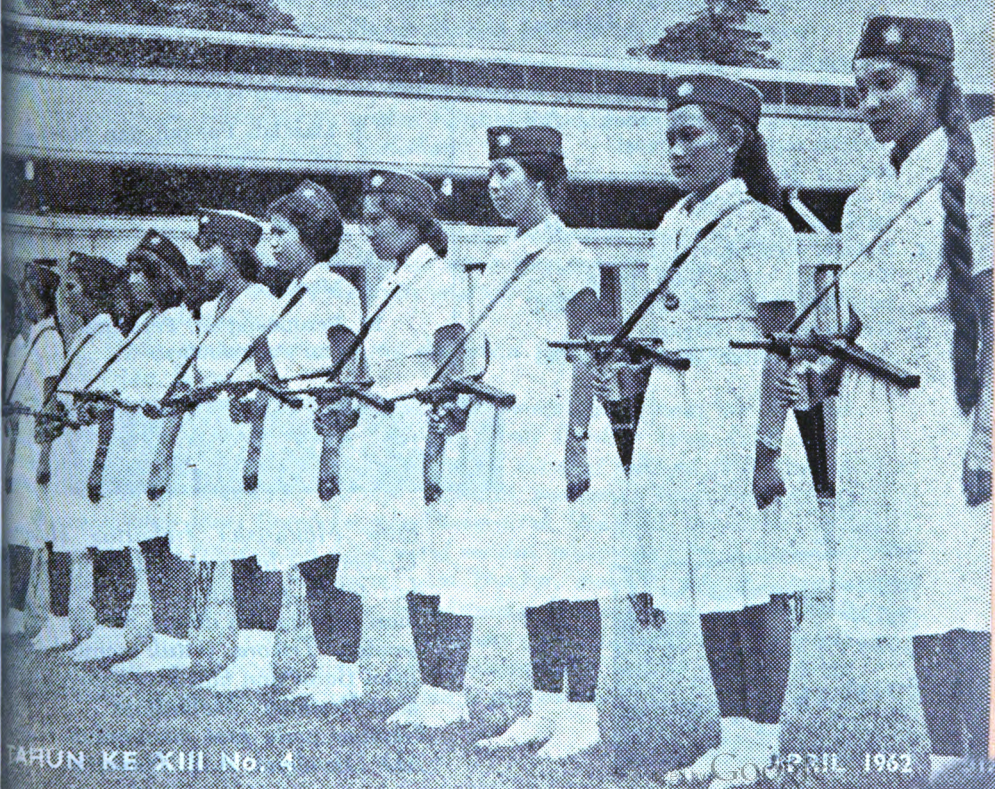
TAHUN KE XIII No. 4 APRIL 1962

MIMBAR PENERANGAN

madjalah untuk djurupenerang — diterbitkan oleh Deppen Djakarta

Berkala bulanan
Untuk Djurupenerang
Diselenggarakan oleh :
Direktorat Publisitet &
Penerangan Daerah
Deppen

Dibantu oleh:

Para Djurupenerangan Pusat dan Daerah serta Para Pemuka dan Peminat masalah-masalah Penerangan

Alamat:
Redaksi/Administrasi
Merdeka Barat No. 9
Djakarta
Telef.
Redaksi': G. 820 pes. 34
Administrasi : O.P. 1190

DALAM NOMOR INI

GAMBAR KULIT

Para Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disamping giat dan tekun menuntut ilmu djuga tak mau ketinggalan dalam rangka pelaksanaan Trikora untuk membebaskan Irian Barat dan kini bergabung dalam satu Resimen ..Mahadjaja".
Gambar pada saat menjambut KASAD Djenderal A.H. Nasution.

Tadjuk:

PERUNDINGAN — PEMBEBASAN IRIAN BARAT — HOME FRONT.

Perundingan:

Kita ketahui, bahwa semendjak wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil pemerintah Belanda bertemu dalam perundingan rahasia tidak formil, jang diadakan pada tanggal 20 Maret 1962 didekat Washington, hingga kini belum lagi dibuka perundingan antara kedua pihak, perundingan formil maupun informil.

Sebabnja tidak lain, karena tidak ada kemauan dari pihak Belanda.

Didalam perundingan rahasia tidak formil jang lalu itu memang tidak ditemukan suatu titik pun jang terang, jang memungkinkan adanja perundingan-perundingan lebih landjut. Sama sekali tidak didapat tanda-tanda, bahwa pihak Belanda bersedia menjerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia diwaktu dekat maupun diwaktu djauh, melainkan Belanda berkemauan keras memaksakan penjelesaian sepihak dengan suatu „negara Papua".

Kita berpendapat : Apa guna mengadakan perundingan dengan pihak Belanda, kalau toh sama sekali tidak ada kemungkinan diserahkannja kekuasaan atas Irian Barat kepada kita melalui perundingan.

Dalam pada itu Ellsworth Bunker, sebagai pihak ketiga mengemukakan usulnja, jang ia harapkan dapat dipakai sebagai dasar untuk adanja perundingan selandjutnja antara Republik Indonesia dan Nederland. Dalam pokoknja usul Bunker berisikan :

> *Masa peralihan selama 2 tahun bagi Irian Barat dibawah pengawasan PBB. Dalam tahun pertama, Nederland akan menarik kembali pasukan-pasukan militer dan pegawai-pegawai sipilnja dan pegawai-pegawai sipil Indonesia akan menggantikannja.*
>
> *Pada achir masa peralihan wilajah Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia.*
>
> *Pada suatu waktu harus diadakan referendum diantara rakjat asli Irian Barat.*

Pemerintah Republik Indonesia telah menjatakan dapat menjetudjui dalam prinsipnja usul Bunker tersebut. Usul Bunker, jang didalamnja ada unsur penjerahan kekuasaan, dapatlah dipakai sebagai dasar untuk mengadakan perundingan dengan Belanda mengenai tjara penjerahan kekuasaan atas Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tetapi dari pemerintah Nederland sendiri sebegitu djauh belum ada suatu pernjataan dapat menerima usul Bunker, melainkan jang tampak ialah kegiatan-kegiatan Belanda mengirimkan kekuatan-kekuatan militernja ke Irian Barat. Djadi teranglah, kemauan dari pihaknja Belanda untuk mengadakan perundingan tidak ada, sungguhpun sudah dikemukakan dasar-dasar guna memungkinkan adanja perudingan.

Oleh karenanja maka Presiden Sukarno didalam pidatonja dirapa umum di Medan pada tanggal 27 April 1962 menandaskan, bahwa ka lau Belanda terus-menerus mengirimkan bala-bantuan ke Irian Bara Pemerintah sama sekali tidak bersedia mengadakan perundingan apapun

Sikap Pemerintah Republik Indonesia, menurut jang dinjataka oleh Presiden itu, pintu perundingan belum sama sekali tertutup. Kit bersedia mengadakan perundingan tentang tjara penjerahan kekuasaa atas Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia diatas dasa prinsip usul Bunker, hanja kalau Belanda mengachiri pengiriman bala bantuan ke Irian Barat.

Pembebasan Irian Barat:

Tri-komando Rakjat sekali diutjapkan, berdjalan terus sampai men tjapai tudjuannja.

Membebaskan Irian Barat adalah kewadjiban mutlak bagi bangs Indonesia. Kewadjiban bangsa Indonesia untuk membebaskan sebagia wilajah tanah-airnja, jang diduduki orang lain, jang didjadjah negar lain.

Pelaksanaan Tri-komando Rakjat sedang berdjalan dengan hanga nja.

Didaratan Irian Barat sendiri rakjat sudah bergolak dengan njata

Clash-clash bersendjata terdjadi diberbagai tempat. Pendaratan pendaratan sukarelawan terus-menerus dilakukan. Pangkalan-pangkala kita sekitar daratan Irian Barat siap semua. Diseluruh tanah-air penjiap an dan penggemblengan tenaga digiatkan.

Dari negara-negara luar pun, simpati dan dukungan politis, mor dan materiil, mengalir terus. Semuanja itu membenarkan usaha rakja Indonesia untuk membebaskan wilajah Irian Barat. Dan usaha mem bebaskan Irian Barat itu memang tidak bisa disalahkan, karena mengena wilajah kita sendiri jang sedang diduduki oleh orang lain.

Home Front:

Didalam usaha pembebasan Irian Barat, tidak sadja garis depa jang bersendjata adalah penting, tapi garis belakang atau home fron adalah penting djuga. Kadang-kadang home front adalah lebih pentin karena kekuatan garis depan sedikit banjak tergantung pada kekuata garis belakang. Keperluan dan perbekalan garis depan dipersiapkan da disediakan digaris belakang.

Dalam bidangnja, home front meliputi berbagai tjabang kehidupa produksi dan ekonomi. Didalam hal ini kita sambut dengan baik adanj komando tersendiri jang meliputi ekonomi dan produksi, ialah Komand Tertinggi Operasi Ekonomi. Dan didalam rangka perdjuangan pembe basan Irian Barat, para pedjuang jang tempatnja ada di home fron harus djuga memiliki semangat jang bernjala-njala, agar garis depan da garis belakang bergerak dengan imbangan jang baik.

Garis depan dan garis belakang didalam totalitetnja adalah satu ja'ni ...... Irian Barat harus bebas dalam tahun ini djuga.

* * *

Kelima Perdana Menteri Negara² Penjelenggara Konferensi A.A. duduk dimedja pimpinan.

*

TUDJUH TAHUN SETELAH KONPERENSI A A

TUDJUH tahun jang lalu jaitu pada tanggal 18 April s/d 24 April 1955 telah berlangsung Konperensi AA di Bandung jang menggemparkan seluruh dunia. Turut hadir dalam konperensi jang bersedjarah ini 29 delegasi negara2 Asia-Afrika jang merdeka dan pengaruh jang terasa dari hasil2 konperensi ini jalah bahwa dewasa ini hampir semua bekas daerah djadjahan di Afrika dan Asia kini telah merdeka dan merupakan suatu kekuatan baru dalam pertjaturan politik dunia.

Untuk mengenangkan djasa dan pengaruh Konperensi AA baiklah kiranja kalau diperhatikan kembali keputusan2 jang telah diambil oleh konperensi dalam bidang2 kerdja-sama ekono-

Amanat Presiden Soekarno pada pembukaan Konperensi Asia Afrik
dan tetap mendjiwai bangsa-ban

mi dan kebudajaan, tentang hak2 manusia dan penentuan nasib sendiri, masalah bangsa2 tak merdeka, serta masalah2 lain. Keputusan ini telah disimpulkan dalam dasa-sila Konperensi AA jang berbunji sebagai berikut:

1. Menghormati hak2 azasi manusia dan tudjuan2 serta prinsip2 Piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan kebulatan teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua bangsa dan persamaan semua negara besar dan ketjil.
4. Menghindarkan intervensi dan tjampur-tangan dalam soal2 dalam negeri dari negara2 lain.

juh tahun jang lampau, hingga saat ini, masih terasa pengaruhnja
ang masih terdjadjah diseluruh Dunia.

⁂

5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri dengan tenaga sendiri atau kollektif, sesuai dedengan Piagam PBB.

6. Menghindarkan,

   a. penggunaan susunan-susunan pertahanan kollektif, jang melajani kepentingan tertentu dari negara2 besar manapun sadja;

   b. negara mana sadja jang mengadakan tekanan terhadap negara2 lain.

7. Mendjauhkan diri dari perbuatan2 atau antjaman2 agresi atau pemakaian kekerasan terhadap keutuhan te-

ritorial atau kemerdekaan politik dari setiap negara.

8. Penjelesaian segala pertikaian2 internasional dengan djalan damai, seperti dengan djalan perundingan2, berdamai, arbitrase atau penjelesaian menurut hukum maupun dengan tjara2 damai sebagai jang dipilih oleh fihak2 jang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memadjukan kepentingan2 bersama dan kerdja sama.
10. Menghormati pengadilan dan perdjandjian2 internasional.

Demikianlah keputusan2 jang telah diambil oleh Konperensi AA dengan menjatakan kejakinannja, bahwa kerdja-sama setjara persahabatan sesuai dengan prinsip2 tersebut diatas akan memberi sumbangan jang effektif bagi pemeliharaan dan usaha memadjukan perdamaian dan keamanan internasional, sedang kerdja-sama dalam lapangan2

Kesibukan-kesibukan dalam pressroom waktu Konferensi A.A.

Pimpinan Konferensi A.A. Sedang berunding.

ekonomi, sosial dan kebudajaan akan membantu mendatangkan kemakmuran bersama dan kesedjahteraan semua.

Untuk mentjamkan betapa pentingnja Konperensi AA 7 tahun jang lalu itu baiklah diperhatikan sari2 pidato Presiden Sukarno jang berdjudul „Lahirkanlah Asia-Afrika jang baru"., ketika membuka konperensi. Beliau antara lain mengemukakan, bahwa Konperensi AA adalah hasil pengorbanan jang telah diberikan oleh nenek-mojang kita (rakjat AA — Red.), oleh rakjat dari generasi sekarang dan generasi jang lebih muda. Baginja jang berkumpul diantara gedung2 konperensi bukanlah hanja pemimpin2 rakjat Asia-Afrika, tetapi terdapat djuga djiwa jang kekal, jang baka, jang selalu djaja dari mereka jang telah mendahului kita. Pengorbanan dan perdjuangan merekalah jang telah meratakan djalan kearah Konperensi AA, pertemuan antara wakil2

tertinggi bangsa2 Asia-Afrika jang merdeka dan berdaulat, didua benua jang terbesar diatas bumi kita ini. Selandjutnja Presiden Sukarno djuga menjatakan bahwa untuk beberapa generasi lamanja, rakjat Asia-Afrika termasuk jang tidak boleh bersuara didunia, rakjat jang dihina, jang nasibnja ditentukan oleh orang lain jang mempunjai banjak kepentingan atas rakjat dan negara2 kita, rakjat jang hidup dalam kemelaratan dan kehinaan. Lalu rakjat Asia-Afrika menuntut, malahan berdjuang untuk kemerdekaan dan mentjapai kemerdekaan itu, serta dengan kemerdekaan itu datanglah kewadjiban2, tanggung-djawab jang berat terhadap negara2 kita sendiri dan dunia, serta terhadap generasi2 jang belum dilahirkan, tetapi kita tidak menjesal karenanja.

Setelah mengemukakan, bahwa memang telah mengamuk taufan diatas Asia dan Afrika, jang telah membawa perobahan2 besar, seperti antara lain bangunnja bangsa2 serta bangkitnja negara-

Delegasi Indonesia.

negara dari tidur jang ber-abad2 lamanja, Presiden menandaskan, bahwa memang abad ke-20 adalah suatu periode jang sangat dinamis, melihat kepada perkembangan2 serta kemadjuan2 jang antara lain telah ditjapai. dalam bidang tehnik selama 50 tahun belakangan ini. Manusia telah mampu menghadapi bahaja2 jang pernah mengantjamnja, mendekati djarak2 jang djauh serta me-

nemukan rahasia untuk menguasai alam sekelilingnja. Tetapi apakah ketjakapan politik jang dimiliki manusia telah sebanding dengan ketjakapan jang telah diperoleh dalam bidang tehnik, karena apa jang telah dihasilkan belum tentu dapat diawasi, sebab manusia berada dalam ketjemasan.
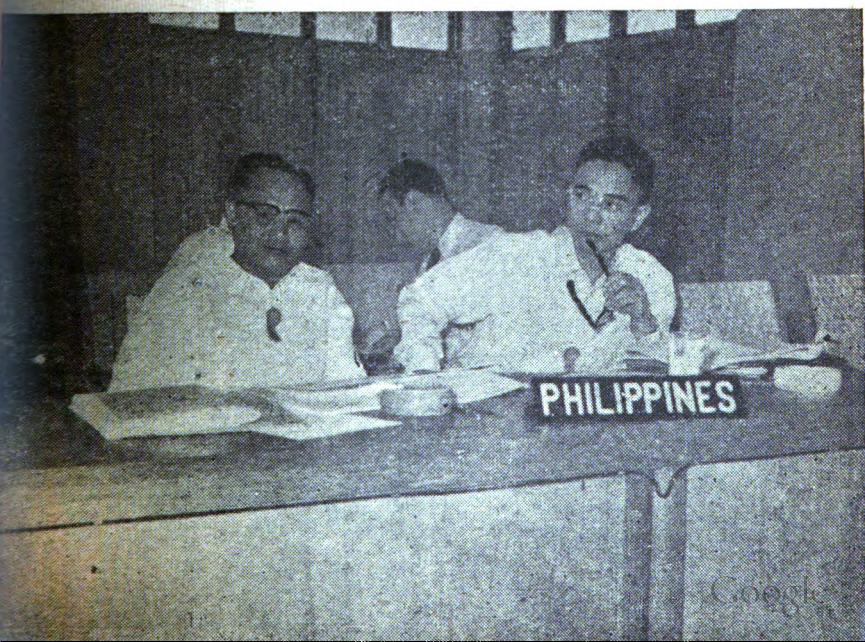
Manusia dengan nafas terputus-putus mentjari keselamatan dan moralitas. Mungkin untuk dewasa ini, masjarakat, pemerintahan dan ketatanegaraan perlu didasarkan atas kode jang luhur tentang moralitas. Kode moralitas jang terluhur adalah menundukkan segala sesuatunja kepada kedjajaan umat manusia. Tetapi dewasa ini kita dihadapi oleh suatu keadaan dimana kedjajaan
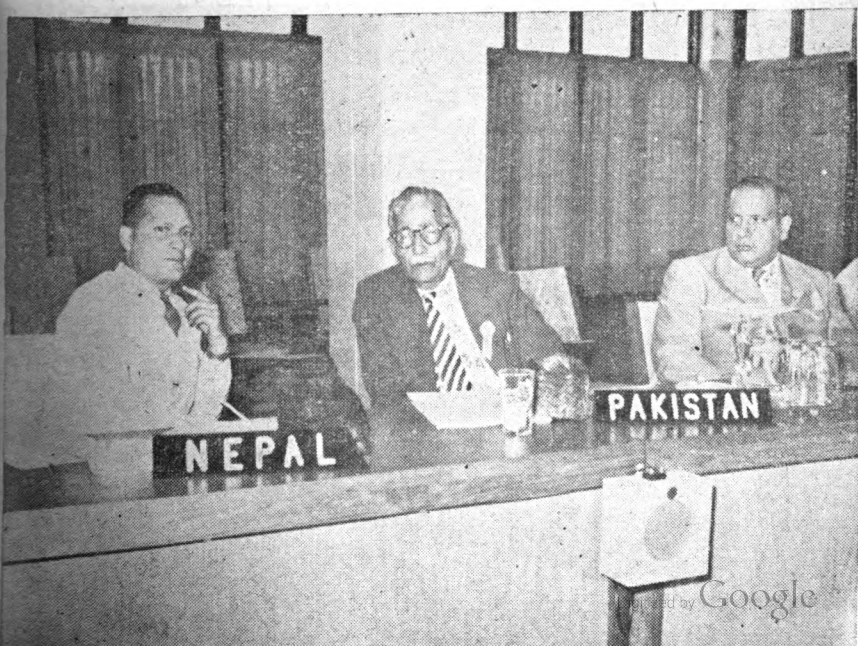
tidak selamanja mendapat perhatian jang utama. Banjak orang jang mempunjai kekuasaan besar, malahan memikirkan bagaimana dapat menguasai dunia.

Presiden selandjutnja menjatakan, bahwa memang manusia hidup dalam ketjemasan, takut kepada bom zat-air, idiologi2 jang semuanja memahitkan penghidu-

pan serta hari-depannja. Mungkin ketjemasan jang dikandung ini, lebih berbahaja. Pertentangan2 jang kini terdapat bukanlah disebabkan karena perbedaan warna-kulit, djuga tidak karena perbedaan agama, tetapi karena *perbedaan keinginan*. Presiden jakin, bahwa bangsa2 Asia-Afrika bersatu karena faktor2 jang lebih penting dari pada faktor2 jang dapat memisahkan. Kita bersatu misalnja, karena sikap jang sama terhadap segala bentuk kolonialisme dan rasialisme dan karena suatu tudjuan bersama, jaitu untuk mempertahankan serta memperkokoh perdamaian dunia. Betapa tidak mungkin kita tinggal diam terhadap kolonialisme, karena sebagaian besar bangsa2 Asia-Afrika telah mengalami serta merasakan kolonialisme itu dan akibat dari kolonialisme, setelah dapat dilenjapkan oleh kehendak sedjarah jang tak dapat ditahan. Karena belum seluruh daerah Asia-Afrika bebas dari genggaman kolonialisme dan dimana rakjat Asia-Afrika dibeberapa bagian tidak diwakili dalam Konperensi A.A. ini, masih hidup dalam penderitaan, adalah mendjadi sebab me-

ngapa kita belum dapat merasakan, bahwa tudjuan perdjuangan kita telah tertjapai. Tidak ada seseorang merasakan dirinja merdeka, kalau masih ada bagian2 dari tanah airnja belum merdeka. Sama halnja dgn. perdamaian, kemerdekaanpun tak dapat dibagi-bagi. Tidak ada sesuatu jang setengah merdeka, seperti djuga tidak sesuatu jang setengah hidup. Djanganlah kita tertipu oleh utjapan jang mengatakan, bahwa kolonialisme sudah mati, karena bagaimana dapat dikatakan bahwa kolonialisme sudah mati, sedangkan masih ada bagian2 jang luas dari Asia-Afrika belum merdeka. Presiden memperingatkan agar djangan memperhatikan kolonialisme dalam bentuknja jang klasik sadja, tetapi djuga dalam bentuknja jang baru, seperti pengawasan atas ekonomi, pengawasan intelektuil dan materiil jang langsung oleh segolongan ketjil masjarakat asing. Kolonialisme merupakan musuh jang litjin dan tabah, serta timbul dalam segala bentuk jang dengan tidak mudah mau melepaskan mangsanja. Dimana, bilamana

atau dengan tjara bagaimanapun djuga kolonialisme muntjul, kolonialisme adalah sesuatu jang djahat, jang harus dilenjapkan dari muka bumi ini.

Presiden Sukarno djuga menandaskan, bahwa Konperensi AA jang mewakili 1.400.000.000. djiwa, lebih dari separoh penduduk dunia, dapat menjusun apa jang beliau sebut *„Paksaan Moril Bangsa2"* untuk kepentingan perdamaian. Kita dapat memperlihatkan kepada minoritas dari dunia ini, jang hidup di-benua2 lain, bahwa kita golongan majoritas adalah pro-perdamaian, bukan pro-perang, dan semua kekuatan jang ada pada kita akan selalu kita pertaruhkan difihak pardamaian.

Presiden Sukarno dalam achir pidato pembukaan Konperensi A.A., mengandjurkan agar rakjat Asia-Afrika mengutamakan prinsip jang biasanja disebut „Hidup dan biarkan hidup", karena Asia-Afrika merupakan tempat asal lahirnja kepertjaan2 serta filsafat2 hidup jang telah
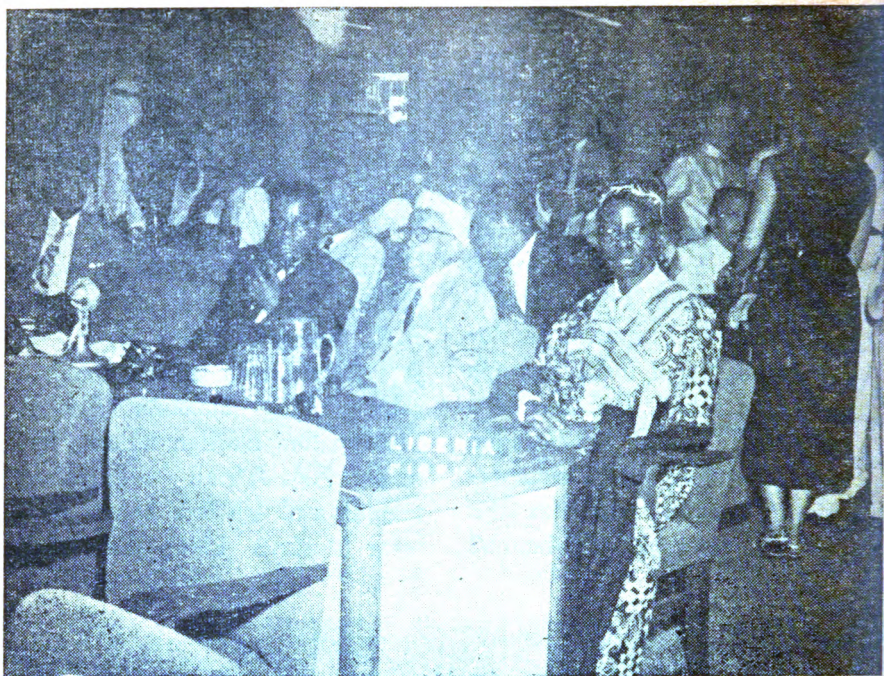
tersebar keseluruh dunia dan tiap-tiap agama jang besar adalah sama dalam adjarannja, jaitu untuk mengutamakan toleransi dan berisi andjuran untuk mengamalkan prinsip „Hidup dan biarkan hidup". Demikian a.l. Presiden Sukarno ketika membuka Konperensi A.A. 7 tahun jang lalu.

Sedjarah pergolakan Asia-Afrika telah membuktikan, bahwa Konperensi A.A. telah meratakan djalan bagi tertjapainja kemerdekaan bangsa2 Afrika dan bahwa blok A.A. dalam P.B.B. sekarang adalah sesuatu kekuatan baru dalam perimbangan kekuasaan dunia sekarang, jang tak dapat diabaikan begitu sadja.

9 APRIL HARI PENERBANGAN NASIONAL

9 APRIL adalah suatu hari didalam sedjarah bangsa Indonesia jang tidak kurang pentingnja dari hari² nasional lainnja dan jang oleh karenanja patut kita peringati, jakni disebabkan karena dua hal jang sangat erat hubungannja dengan peri-kehidupan Bangsa.

Pertama: pada hari itu, tepat dua windu jang lalu telah lahir Angkatan Udara Republik Indonesia berdasarkan dekrit Presiden Republik Indonesia tertanggal 9 April 1946 sebagai alat pertahanan Negara jang ketiga disamping telah adanja Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Kedua: pada saat dilahirkannja AURI itu djuga, maka untuk pertama² kalinja di dalam sedjarah Bangsa Indonesia kita telah berhasil memperluas ruang gerak kita dari jang 2-dimensi mendjadi 3-dimensi. dengan lain perkataan: Bangsa Indonesia telah berhasil memperluas ruang geraknja dari permukaan bumi keruang udara atau ruang angkasa, berkat adanja AURI sebagai instansi Penerbangan Nasional jang pertama.

Laksamana Muda Omar Dani

Sedjak saat itu djuga ruang udara mulai memegang peranannja jang njata dalam berbagai segi pandangan hidup Bangsa kita. Udara bagi kita tidak lagi berarti sebagai air bagi ikan semata². Kita tidak lagi menempatkan masalah udara ini dalam arti pertama, pada tingkat „animal"nja manusia, dus jang berkenaan dengan sifat² biologischnja, tetapi kita kini menempatkan masalah udara ini, da-

lam arti kedua, pada „homo sapiens"nja manusia, dus jang berkenaan dengan sifat² kulturilnja dalam arti anthropologisnja.

Penilaian akan pentingnja udara dalam hubungannja dengan Penerbangan pada umumnja dan Kekuatan Nasional di Udara chususnja, haruslah ditindjau sebagai masalah dalam arti jang kedua itu.

Sedjak pesawat terbang jang pertama² didunia ini membentangkan sajapnja diudara dalam tahun 1903, manusia telah menempatkan masalah udara ini dalam arti jang kedua, sebagai jang diuraikan diatas. Ditambahkan pula bahwa sedjak berkobarnja Perang Dunia I antara tahun 1914 — 1916, pada waktu mana pesawat² terbang mulai dipergunakan dalam pertempuran² udara, sedjak saat² itulah maka dibalik angkasa jang biru djernih manusia melihat adanja sesuatu jang mengandung bahaja dan antjaman jang latent terhadap ummat manusia. Orang menundjukkan kewaspadaannja kearah angkasa terhadap serangan² udara dan membentuk angkatan² udara.

Di Negeri kita penggunaan medium udara bagi tugas² pertahanan Negara baru terdjadi sedjak lahirnja AURI. Walaupun baru dua windu usianja sedjak lahirnja

Pesawat TJURENG, jang telah ikut membom Ambarawa dalam Clash I.
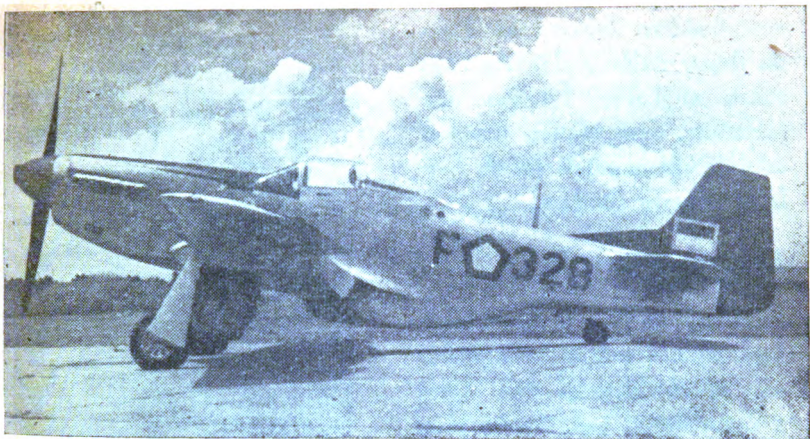
Pesawat „Pemburu" P. 51 (Mustang)

* * *

AURI tidak terlepas dari matjam^2 udjian jang bertubi^2 seakan^2 harus mengalami masa penggemblengan terlebih dahulu sebelum dihadapkan dengan Belanda dalam tekad keramat kita, untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kita.

Walaupun djasa^2 AURI terhadap Nusa dan Bangsa selama 16 tahun itu tjukup sudah diketahui Rakjat, namun AURI sebagai Angkatan Udara sadja sebenarnja belum memenuhi apa jang ditjita^{2}kan sedjak lahirnja.

Dalam memikirkan AURI serta pembangunannja tidak boleh tidak penggagasan harus pula ditudjukan kepada pentjapaian suatu kekuatan nasional diudara. Tudjuan ini hingga sekarang tidak pernah dilepaskan sebagai pedoman dalam menjusun dan membangun AURI.

Pada hakekatnja, kekuatan nasional diudara itu adalah suatu fenomena. jang didalam tubuhnja mempunjai tjiri^2 dan watak^2 jang tertentu.

Kekuatan nasional diudara itu penting sekali. Kemampuan^2 termaksud dapat didjelaskan sebagai berikut:

a. *Kemampuan jang pertama.*
   Kemampuan jang pertama adalah kemampuan untuk dapat terbang dalam suatu kendara-

an, atau kemampuan untuk menjebabkan sesuatu kendaraan dapat terbang diudara atau ruang angkasa. Dengan lain perkataan kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu diudara.

b. *Kemampuan jang kedua.*

Kemampuan jang kedua adalah kemampuan untuk menghasilkan taktik, strategi dan tjara pengangkutan jang baru, jang didasarkan kepada ketjepatan, djarak, mobilitet dan fleksibilitet.

c. *Kemampuan jang ketiga.*

Kemampuan jang ketiga adalah kemampuan untuk mendjadikan kedua kemampuan tersebut diatas mendjadi satu faktor jang memaksa diperhitungkannja dalam persoalan² politik, diplomasi, militer, kulturil dan ekonomi. Mengingat definisi dari sudut kemampuan jang pertama kekuatan nasional diudara setjara praktisnja merupakan suatu organisasi jang berkomposisikan pasukan² angkatan udara serta unsur² lain jang setjara langsung atau tidak langsung mendukung pasukan² angkatan udara itu. Djelasnja maka kekuatan nasional diudara itu merupakan pengorganisasian atau

Alm. Laksamana Muda Udara S. Adisutjipto, Bapak Penerbang AURI.

*

penggemblengan atau perpaduan antara unsur²:

a. Penerbangan Militer, dalam hal kita adalah AURI beserta segala kelengkapannja;
b. Penerbangan Sipil; didalam Negara kita termasuk „Garuda Indonesian Airways", dinas² pengontrol lalu-lintas udaranja, dinas² meteor, sistim² komunikasi, dsb;
c. Aero-Industri, jang meliputi usaha² pembantu pesawat terbang sendiri, industri bahan-bakar, dsb;
d. Aeronautical-Research, jang meliputi usaha² research dalam bidang² jang essensiil, misalnja dalam bidang elektronika dan

Alm. Laksamana Muda Udara Prof Dr Abdulrachman Saleh.

* * *

persendjataan, dalam bidang roket dan peluru kendali, dalam bidang bahan-bakar, dalam bidang minjak dan pelumas dalam bidang tenaga inti dsb.;

e. Aero-Sport pada umumnja meliputi pembinaan air-mindedness memberi dorongan dan dukungan dalam mendirikan perkumpulan² penerbangan olah raga dengan motor, dengan pesawat-lajang, aermodellers dsb.

Didalam Kabinet Kerdja jang telah disusun kembali ini tertjermin sudah hari kemudian jang baik bagi pengalaman Kekuatan Nasional di Udara, karena djustru semua unsur jang mendjadi sendi²nja kekuatan nasional diudara itu, masing² berturut² pendjelmaannja dapat disalurkan melalui:

a. Departemen Angkatan Udara R.I.
b. Departemen Perhubungan Udara
c. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.
d. Departemen Research Nasional, dan
e. Departemen Olah Raga.

SWA BHUANA PAKSA

Didalam pembangunan Semesta Berentjana telah pula difikirkan

Alm. Laksamana Muda Udara Halim Perdanakusuma.
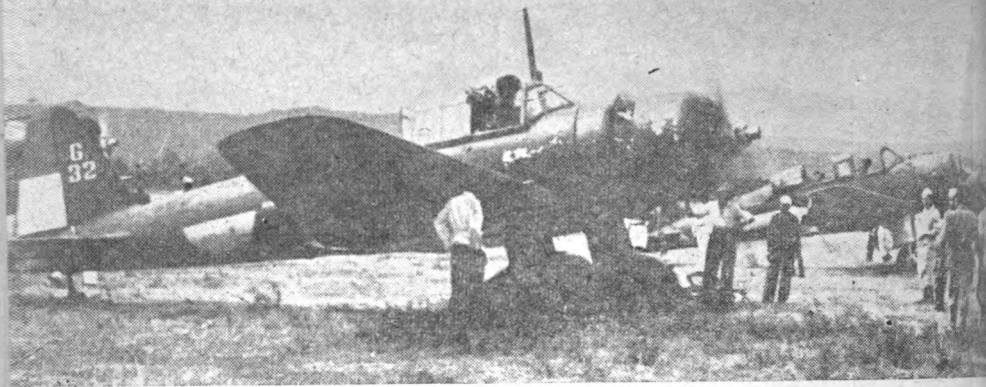
Pesawat „GUNTEI" ini pernah membom Belanda difront Semarang pada Clash I

*

dan dimasukkan pembinaan lebih landjut dari pada unsur^2 pendukung Kekuatan Nasional di Udara. Tanpa adanja unsur^2 jang kuat, maka mustahillah untuk menjusun dan membangun kekuatan bagi sesuatu Angkatan jang bersifat begitu teknis dan kompleks seperti AURI kita ini.

Marilah kita insjafi bersama akan pentingnja kekuatan nasional diudara, jang dapat diartikan sebagai memakai udara untuk melaksanakan dengan gigih kehendak nasional, oleh karena kekuatan nasional diudara adalah faktor jang menentukan didalam perang modern.

SINGKATAN SEDJARAH AURI.

1946 Angkatan Udara Republik Indonesia didirikan dengan Kepala Staf Komodor Udara R. Suryadi Suryadarma, dan wakil Kepala Staf Komodor Muda Udara S. Adisutjipto. Hanja bermodalkan sedikit tenaga ahli dan pesawat2 rosokan peninggalan Djepang, pembangunannja dimulai. Dan disamping itu, AURI telah sanggup mendidik pemuda2 untuk djadi penerbang, ahli teknik udara, pelontjat pajung dan lain sebagainja.

1947 Blokade Udara Belanda jang kuat dapat diterobos berkat propaganda seorang Opsir AURI jang dapat menjelundup keluar negeri.

Ketika Clash Pertama meletus pangkalan2 udara AURI di Djawa djadi sasaran serangan udara pesawat2 Belanda dan mengalami kerusakan2 hebat.

Pesawat VT-CLA India ditembak djatuh oleh pesawat pemburu Belanda diatas Maguwo. Awak pesawat dan penumpang2nja tewas. Diantaranja terdapat Komodor Udara S. Adisutjipto dan Komodor Udara Prof. Dr. Abdulrachman Saleh. Hari ini (29 Djuli) didjadikan hari Berkabung Angkatan Udara Republik Indonesia.

1948 Di Atjeh dalam waktu dua hari dapat dikumpulkan uang tjukup untuk membeli sebuah Dakota (RI—001 „Seulawah").

Dalam Clash kedua hampir seluruh lapangan2 terbang AURI di Djawa dan Sumatera djadi sasaran serangan udara Belanda. Akibatnja usaha AURI selama ber-tahun2 hantjur musnah. Anggauta AURI ber-sama2 angkatan lain dan rakjat bergerilja.

1949 Ibu kota R.I. Jogjakarta jang selama Clash kedua diduduki Belanda kembali ketangan Republik Indonesia dan AURI kembali berpusat di ibu kota (1 Djuli).

Di Birma oleh pimpinan pesawat RI—001 „Seulawah" dibentuk „Indonesian Airways".

Achir tahun, KSAU bertolak ke- Nederland mengikuti Konfe-

Laksamana R. S. Suryadarma, menjampaikan selamat kepada penggantinja Lks. Muda Omar Dani.

rensi Medja Bundar sebagai penasehat urusan penerbangan. AURI mendjadi AURIS (Angkatan Udara Republik Indonesia Serikat).

1950 Timbang terima ML kepada AURI. Pangkalan demi pangkalan beserta 10.000 anggauta, pesawat2 terbang dan perlengkapannja diserahkan kepada AURI. Tepat enam bulan penjerahan selesai, jang terachir dengan penjerahan Hoofdkwartier M.L. di Djakarta.

Squadron I dan II dibentuk jang terdiri dari ber-matjam2 type pesawat2 terbang.

KSAU bertolak ke Birma menjerahkan pesawat RI—007 atas nama Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Birma sebagai tanda djasa kepada mereka jang telah membantu perdjuangan bangsa Indonesia.

1951 Missi AURI berkundjung ke India, Birma dan Thailand menindjau pelbagai objek penerbangan.

Squadron I dan II dibubarkan dan dibentuk Squadron I s/d V terdiri dari pemburu, pengangkut, pembom, pengintai darat dan pengintai laut. Disamping Djawatan Penerangan jang telah ada jang bertugas menjebarkan kesadaran udara dibentuk pula Biro Aeroclub.
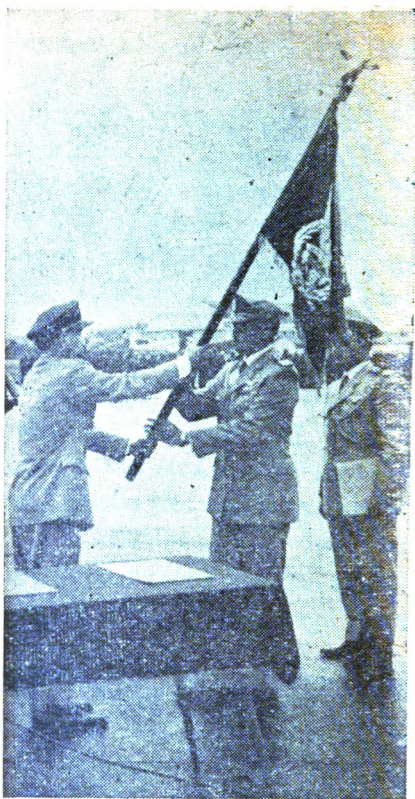
Penjerahan pandji² AURI dari Laksamana R.S. Suryadarma kepada Lks. Muda Omar Dani.

1952 Pada hari Angkatan Perang, penerimaan pandji AURI dari Panglima Tertinggi.

Untuk memperingati para pahlawan udara, maka mulai pada hari ulang tahun R.I. ke-6, Ko-
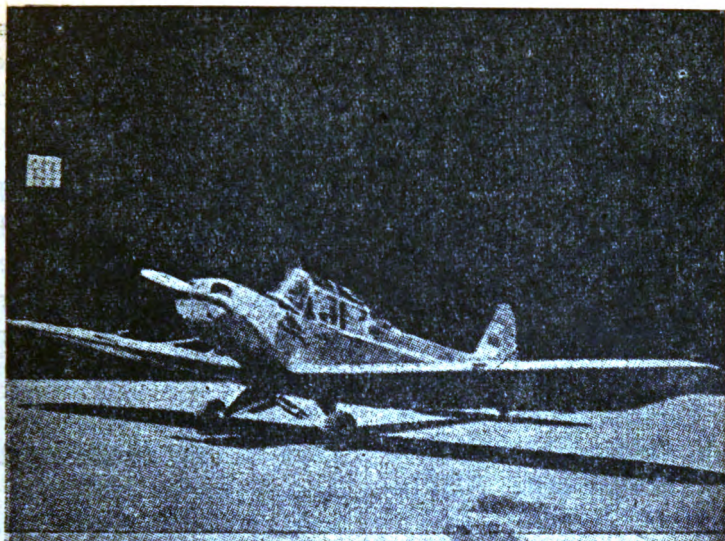
Belalang (Pesawat latih AURI Buatan LPTP).

*
**

mando Pangkalan2 Udara Tjililitan, Andir, Maguwo, Bugis dan Kotaradja dirobah namanja berturut2 mendjadi KPU. Halim perdanakusuma, Husein Sasteranegara, S. Adisutjipto, Abdulrachman Saleh dan Maimum Saleh.

1953 Disamping tugas2 operasi, pesawat AURI melakukan tugas2 sosial antaranja penindjauan objek tanah dari udara di Kalimantan pemotretan gunung2 merapi dan lain-lain.

Aeroclub Nasional Aviantara di Bandung didirikan. Menjusul kemudian Aeroclub Nasional Djakarta.

1954 KSAU Komodor Udara R.S. Suryadarma oleh panglima Tertinggi dilantik mendjadi Laksamana Muda Udara.

AURI berusia sewindu.

Penerbangan pertama pesawat buatan AURI NU—200 Si Kumbang X—01 berhasil baik.

Penempatan Attase Udara pertama untuk India. Missi Angkatan Udara India mengundjungi AURI.

Pengiriman obat2an dengan Dakota T—453 ke Jogja untuk korban gunung berapi.

1955 Courier flight pertama dari AURI ke India.

Pemberian brevet oleh KSAU kepada 12 orang anggauta Aeroclub Nasional Djakarta dan 1 anggauta Pemudara Jogja a.l. terdapat Sutan Sjahrir.

Pemerintah India menghadiahkan pesawat HT—2 Trainer (hasil pabrik India) kepada Pemerintah Indonesia.

1956 Penerbangan pesawat Kurier Pertama Indian Air Force tiba di Indonesia Penanda tanganan kerdja sama AURI—IAF.

Indian Air Force Advisory Group dibawah pimpinan Group Captain A.A. Nayarannan mulai bekerdja pada AURI.

1957 Kesatuan Pantjargas AURI diresmikan berdirinja dengan Komandannja Kapten Udara Penerbang L. Wattimena.

Pesawat Iljushin 14 „Dolok Martimbang" pemberian Pemerintah Rusia kepada Presiden Soekarno, oleh Duta Besar Sovyet di Indonesia diserahkan kepada AURI.

Squadron XI Pantjargas didirikan, disusul dengan pembentukan Squadron Helicopter dibawah pimpinan Komando Squadron jang pertama Kapten Udara Penerbang S. Soemarsono.

KSAU turut Musjawarah Nasional.
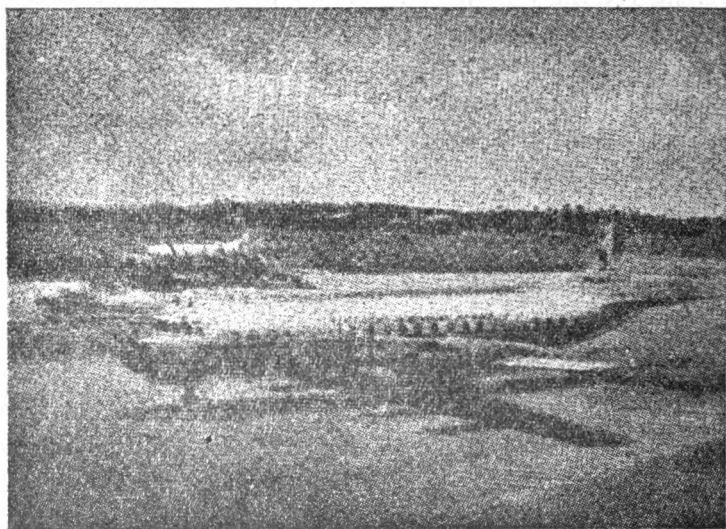
Lockheed Electra (Pesawat Penumpang Garuda).

Pangkalan Angkatan Udara Laha dirobah namanja mendjadi P.A.U. Pattimura.

1958 AURI genap 12 tahun pada tanggal 9 April.

AURI turut aktip dalam operasi2 militer membasmi pemberontakan PRRI/Permesta.

Sambil beroperasi AURI terus membangun.

KSAU Laksamana Muda Udara S. Suryadarma, dinaikan pangkatnja mendjadi Laksamana Madya Udara.

Squadron XI mendapat tambahan pesawat2 pantjargas baru: UTI—MIG—15 dan IL—28.

Pembukaan djembatan udara dipedalaman Kalimantan dengan pesawat2 De Havilland „Otter".

1959 Penambahan pesawat2 pantjargas baru jaitu MIG—17 kepada Squadron XI.

Letkol. Udara/Penerbang Nurtanio terima Surat Penghargaan dari Menteri Pertahanan atas djasanja membuat pesawat NU—25 "Kunang".

Misi Muhibbah Angkatan Udara India dibawah pimpinan Laks. Madya Udara S. Mukerjee berkundjung ke Indonesia.

1960 KSAU S. Suryadarma dinaikan pangkatnja dari Laksamana Madya Udara mendjadi Laksamana Udara.

Perletakan Batu pertama pembangunan Akademi AURI di Jogjakarta.

Pangkalan Angkatan Udara Maospati dirobah namanja djadi P.A.U. Iswahjudi.

Pembentukan2 Squadron 21 pembom jet terdiri dari pesawat2 IL—28, Squadron Pertjobaan Pengangkut Djarak Djauh dengan

TU-16 (Pembom Strategis AURI).
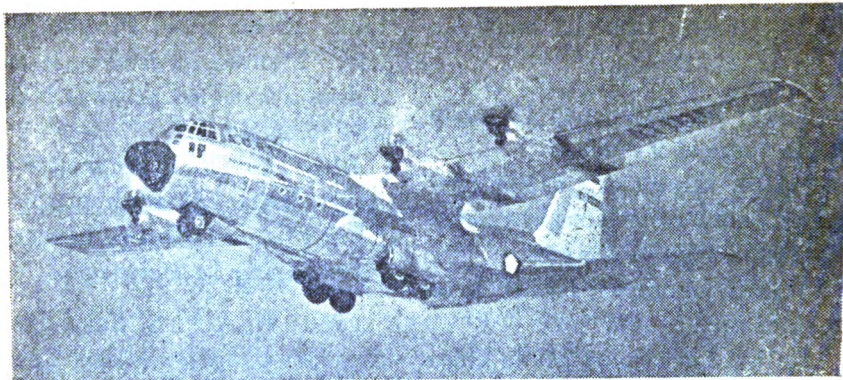
Hercules C-130B (Pesawat Angkut Djarak Djauh AURI).

mempergunakan pesawat2 Hercules, penjerahan pesawat helicopter MI—4 pada Squadron helicopter dan pembentukan Lembaga Aerial Survey.

Djembatan Udara di Kalimantan dengan mempergunakan pesawat2 D.H. Otter berusia genap 1 tahun.

KSAU turut dalam Missi Negara ke USSR.

1961 AURI dan Angkatan Darat mengadakan latihan bersama dalam rangka kewaspadaan Nasional.

Commanding General P.A.F. Brigadier General Pedro Q Molina mengundjungi Indonesia.

Pesawat pembom djarak djauh AURI tiba di Indonesia.

AURI turut serta dalam melantjarkan pembagian bahan makanan untuk daerah2 terpentjil (pedalaman).

Anggauta2 AURI gelombang pertama dianugerahi Bintang Sakti dan Bintang Darma.

KSAU Muang Thai Air Flight Marshal Yajanama mengundjungi Indonesia.

AURI menerima 50 buah pesawat latih T—34 Mentor dari Pemerintah Amerika Serikat.

AURI turut aktip dalam pembasmian wabah colera.

KSAU Birma mengundjungi Indonesia.

1962 AURI membentuk Komando2 Regional Udara dalam rangka Tri Komando Rakjat. Presiden/Panglima Tertinggi melantik Kolonel Udara Penerbang
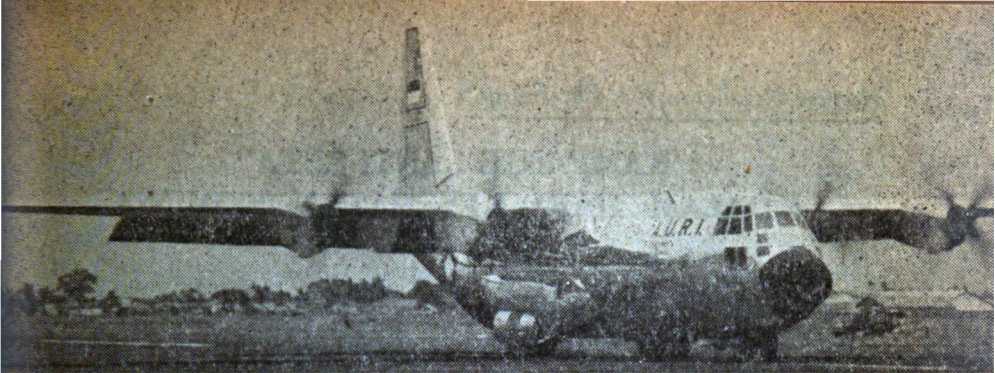
Pesawat Hercules.

*
**

Omar Dani mendjadi Menteri/KSAU dengan pangkat Laksamana Muda Udara dan mengangkat Laksamana Udara S. Suryadarma sebagai Menteri Penasihat Militer Presiden/Panglima Tertinggi. Timbang-terima djabatan Menteri/KSAU dilakukan pada tanggal 30 Djanuari di PAU Halim Perdanakusumah.

Menteri/KSAU berangkat ke Moskow dengan tugas chusus atas perintah Presiden/Panglima Tertinggi.

Pada tanggal 9 April 1962 AU RI genap berusia DUA WINDU.

* * *
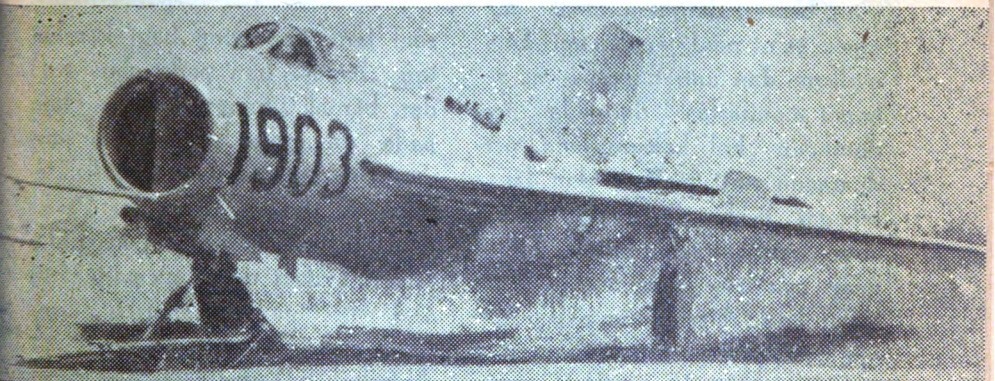
Mig. 19, Pesawat tempur jet terbaru AURI, jang ketjepatannja melebihi ketjepatan suara.

Menteri Kesehatan R.I. Dr. Satrijo :

KAMPANJE „ANTI-BUTA" DALAM HARI KESEHATAN SEDUNIA

PADA tahun 1962 ini kita menjambut Hari Kesehatan Sedunia dalam suasana perdjuangan, perdjuangan untuk menghabiskan riwajat pendjadjahan di Indonesia dan perdjuangan untuk mentjapai taraf hidup jang lajak bagi seluruh bangsa, bahkan perdjuangan untuk melindungi rakjat dan bangsa kita dari serangan² jang bertubi-tubi oleh penjakit² menular dan penjakit² lain.

Pada hakekatnja perdjuangan² tersebut diatas adalah refleksi daripada perdjuangan daripada sebagian besar daripada umat manusia, ja'ni perdjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme sebagai manifestasi daripada perdjuangan hak kemanusiaan, perdjuangan anti melarat dan lapar sebagai usaha "struggle for life" atau perdjuangan untuk hidup umat manusia jang makin lama makin besar djumlahnja, dan achirnja perdjuangan anti wabah jang meliputi seluruh umat manusia antara Kutub Utara dan Kutub Selatan.

Memang tidak dapat di-ingkari, bahwa pada masa sekarang ini

Menteri Kesehatan Dr. Satrijo

soal jang terpenting bagi kesehatan bangsa kita pada chususnja dan banjak bangsa-bangsa lain pada umumnja adalah soal *sandang-pangan* dan *soal wabah*. Pemerintah dengan pimpinan Presiden kita jang bidjaksana berusaha sekuat tenaga untuk memetjahkan soal persediaan makanan bagi seluruh bangsa agar supaja dapat dihindarkan penjakit² defisiensi atau penjakit² karena kurang makan, sebagai avitaminosis (kurang vitamin) atau *busung lapar* (kurang segala-galanja, termasuk pro-

tein dan vitamin[2]). Meningkatnja djumlah penderita busung-lapar pada achir tahun 1961 dan permulaan tahun 1962 sebagai akibat dari defisiensi tersebut sangat diperhatikan oleh pimpinan negara dan Departemen Kesehatan. Salah satu faktor jang penting dipandang dari sudut ilmu gizi dan logistik makanan ialah bahwa perlu tjukup variasi dalam menu bangsa kita untuk dapat menggunakan segala matjam karbohidrat, protein, lemak dan vitamin jang dapat kita produksikan sendiri dibumi Indonesia, sehingga tidak terlalu sensitif terhadap gangguan² produksi dan distribusi jang belum tjukup dapat diamankan dengan organisasi jang tjukup baik dan persediaan reserve jang tjukup besar untuk 100 djuta manusia Indonesia dalam tahun² j.ad.

Soal w a b a h, jang djuga sering kita batja dan dengar tentang timbulnja dipelbagai negara, influenza di Djepang, paracholera di Philipina, tjatjar dibeberapa negara Eropah Barat, pun tidak asing bagi telinga Indonesia jang menghadapinja dengan penuh ketabahan hati dan tindakan² jang tegas.
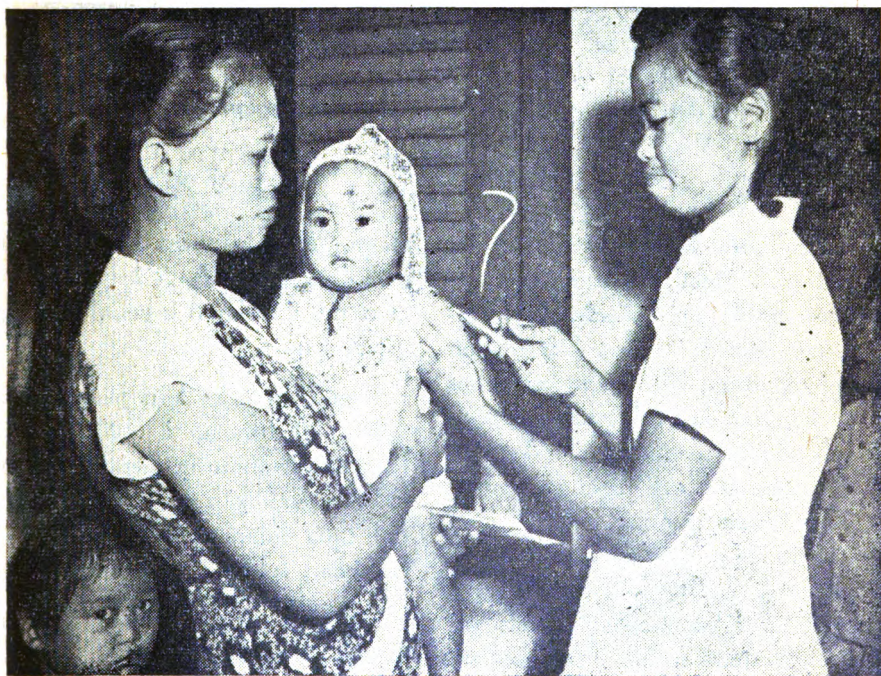
Penjuntikan umum T.C.D. pada anak-anak ketjil.

Anak-anak sekolah ini emoh dihinggapi tbc.

Pembasmian wabah tjatjar di Sulawesi telah berlangsung dengan hasil jang memuaskan sehingga untuk pertama kali setelah perang dunia ke-2 Sulawesi bebas dari tjatjar dan tidak lagi merupakan sumber penularan. Akan tetapi ternjata masih ada sumber^{2} jang tjukup penting, ja'ni Sumatera Selatan jang beberapa bulan j.l. telah dihinggapi wabah, dan sisa^{2}nja sekarang mendjalar kedaerah Banten dan mengantjam penduduk Djawa Barat, djika kita tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keluarga kita dengan mentjatjarkan seluruh keluarga kita untuk mendapat kekebalan jang diperlukan.

Seminggu jang lalu pemerintah telah mengirimkan k.l. 200 orang team antiwabah kedaerah Banten untuk melakukan *operasi anti wabah* jang dalam waktu 1 bulan diharapkan selesai.

Pada hari itu pula kepada Resimen Mahasiswa Djakarta Raja telah diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk suatu

tugas chusus, ja'ni pentjatjaran umum seluruh KODAM DJAJA, dengan tjermat dan teliti dalam waktu satu minggu dengan bantuan seluruh alat² kekuasaan negara, organisasi² masjarakat dan dengan pengertian dan keinsjafan seluruh masjarakat. Seluruh Karjawan pembangunan ASIAN GAMES, HOTEL INDONESIA, MONUMEN NASIONAL, MESDJID ISTIQLAL, DJAKARTA BY-PASS, d.l.l. sudah ditjatjar semuanja dan mulai 7 April 1962, Hari Kesehatan Sedunia akan dimulai pentjatjaran oleh Resimen Mahasiswa *disemua* R.K. diseluruh Djakarta Raya.

Berhubung dengan itu maka saja menjerukan kepada seluruh masjarakat Djakarta Raja untuk mendengarkan instruksi² dan petundjuk² KODAM DJAJA staf operasi wabah tjatjar melalui R.R.I.

Dan kepada seluruh pedjabat pemerintah dan kesehatan di-daerah², terutama daerah Djawa Barat dan Sumatera Selatan, dokter² karesidenan, dokter kabupaten,
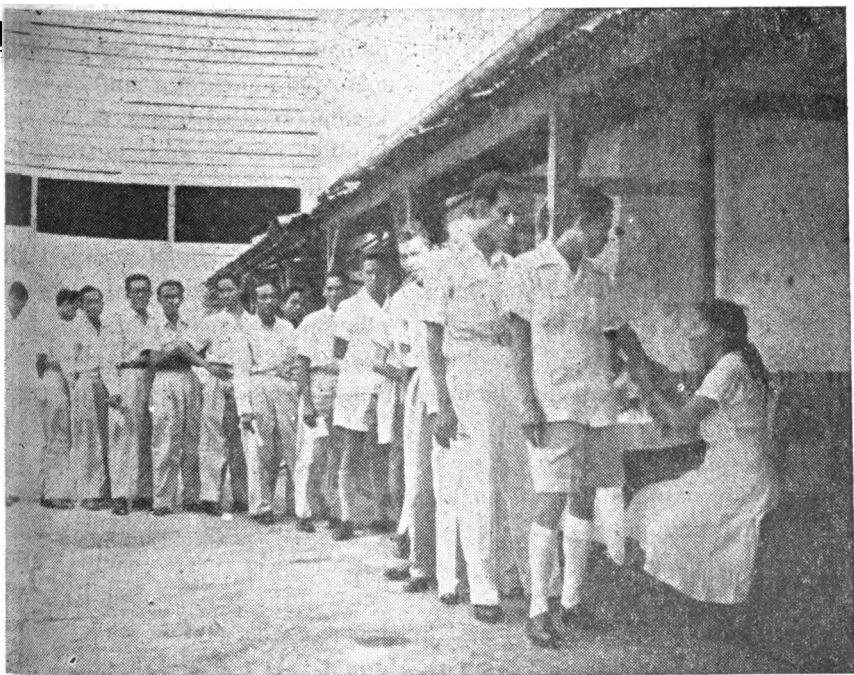
Para pegawaipun membentengi diri terhadap serangan wabah.

dokter kawedanaan, dokter² kesatuan² angkatan bersendjata, kesatuan² produksi dan lain², saja serukan untuk memeriksa keadaan kekebalan penduduk atau kesatuannja mengenai kekebalan tjatjar ini dan djika ternjata kurang atau kurang aman, segera bertindak, agar supaja pada achir tahun 1962 ini tidak hanja Irian Barat kembali ketangan R.I., dan keamanan umum pulih kembali, tetapi djuga keamanan ditindjau dari sudut wabah², teristimewa p e s dan t j a t j a r.

PERDJUANGAN ANTI BUTA

Sebenarnja, soal jang dipentingkan oleh Markas Besar W.H.O. pada tahun ini adalah soal perdjuangan *anti buta* suatu hal jang minta perhatian seluruh dunia dan minta pula perhatian dari bangsa Indonesia.

Di Indonesia banjak orang jang buta atau tuna netra, jang mendjadi persoalan bagi Djawatan² Sosial dan masjarakat pada umumnja.

Sebab² dari *tuna netra* itu pada hakekatnja dapat dikembalikan kepada 2 faktor jang telah disebut pada permulaan pidato ini, ja'ni *defisiensi makanan* teristimewa kekurangan vitamin A dan *penjakit menular*, teristimewa *t r a c h o m a*. Dua sebab tuna netra ini harus mendapat perhatian sepenuhnja dari fihak pemerintah daerah, teristimewa para *T j a m a t* jang mempunjai *peranan-terpenting* dalam memetjahkan soal² ini bersama-sama dengan Kepala² Desa (negeri) dibantu oleh seluruh masjarakat.

Ja, memetjahkan soal² kesehatan bukanlah semata-mata kewadjiban dokter², atau petugas kesehatan sadja, akan tetapi djustru dalam banjak hal merupakan soal jang *kuntjinja* terletak pada pamongpradja dan alat² pemerintahan setempat lainnja.

Kekurangan Vitamin A, terutama pada anak², dapat dihindarkan dengan makanan² jang umumnja mengandung carotin jang berwarna kuning, sebagai tomat, papaja, ubi kuning, wortel, d.l.l. jang dapat ditanam dihalaman sendiri. Ketjuali itu B.K.I.A.² jang terdapat diketjamatan² djuga memberi nasehat² dan dimana perlu memberi vitamin A kepada mereka jang memerlukannja. Para Tjamat dibantu dengan petugas² setempat, baik militer maupun sipil, serta seluruh barisan *Pramuka* setanah air. (Menteri Kesehatan adalah anggauta Pengurus Besar Pramuka di Pusat) perlu segera mengusahakan *penanaman papaja* dan *tomat* sebagai usaha utama guna melindungi rakjat dari kebutaan serta perlu memberi tjontoh sendiri kepada chalajak ramai.

Kemudian sebab jang kedua, ja'ni *trachoma*, pemberantasannja terutama terletak pada usaha² *kebersihan disekolah²*, disurau² (langgar), di mesdjid² atau tempat ibadah lainnja, dibioskop², dirumah² d.l.l., dan djangan lupa, *air bersih adalah suatu hal jang maha-penting.* Pemerintah djuga berusaha untuk mengobati mereka jang telah sakit trachoma dengan obat jang sedjitu-djitunja baik di poliklinik² maupun disekolah-sekolah, akan tetapi *kuntji utama* dari pada persoalan ini adalah ditangan T j a m a t dan Kepala Desa pula, kebersihan *didesa* jang meliputi *air*, kebiasaan² *mentjutji tangan* daripada anak², menggunakan pakaian bersih, d.l.l. usaha² dalam lapangan kesehatan.

Penjelidikan tentang penjakit mata jang telah dilakukan di Indonesia antara tahun 1957 dan 1958 jang meliputi 15.000 djiwa didaerah Den Pasar, Surabaja, Madiun, Semarang, Bandung, Tjirebon dan Tandjungkarang menundjukkan, bahwa sebagian besar dari mereka mendapat gangguan penglihatannja, telah menderita kurang gizi atau undernutrition atau malnutrition dan komplekasi radang selaput mata, hanja 14% disebabkan oleh trachoma.

Dari pemeriksaan jang telah dilakukan di Bandung dalam tahun 1959 ternjata bahwa perusakan mata 29% disebabkan oleh Xerophthalmia (kurang Vitamin A), 19% karena trachoma dan 20% oleh Gonorrhoea (penjakit kelamin).

Penjakit Xerophtalmia disebabkan kekurangan Vitamin A didalam makanan. Gedjala pertama adalah buta-sendja, buta di waktu sore, kemudian dimata bagian putih timbul sematjam busa. Apabila kekurangan vitamin A berlangsung terus, pada cornea timbul luka, jang dalam beberapa hari dapat membesar sedemikian, sehingga cornea petjah atau hantjur seluruhnja, dengan akibat kebutaan jang tak dapat ditolong lagi, dengan djalan apapun djuga. 80% dari penderita Xerophthalmia terdapat pada anak² berumur 2 — 5 tahun.

Kami tidak mempunjai angka² jang pasti dari djumlah tuna-netra. Akan tetapi menurut perkiraan djumlah korban dari dua matjam penjakit ini sedikit²nja bertambah 10.000 orang tiap tahunnja.

Gonoblennorrhoe adalah penjakit kelamin kentjing-nanah jang menular kemata, penjebabnja kuman gonococcis. Sesungguhnja gonoblennorrhoe bukan penjakit mata primair, misalnja kuman gonococcus didalam mata tak dapat meradja-lela, biasanja sesudah satu bulan kuman ini lenjap dengan sendirinja, djuga tanpa pe-

ngobatan. Akan tetapi dalam waktu jang sangat singkat itu akibatnja bagi mata sangat hebat. Seorang ibu dengan kentjing-nanah diwaktu melahirkan dapat menulari bajinja, sehingga baji jang baru lahir itu dapat mendjadi buta untuk se-umur-hidup, sebelum melihat.

Tjara penularan sematjam ini sebelum perang banjak djuga didjumpai.

Sukurlah bahwa selama tahun 1961 kita hanja mendjumpai satu baji jang buta karena gonoblennorrhoe.

Tjara penularan jang biasa terdjadi para orang² dewasa adalah oleh tangan sipenderita kentjing-nanah sendiri. Dalam minggu pertama setelah penularan terdjadi, sungguhpun sipenderita benar² merasakan menderita, (nampak pada air-mata dan matanja jang tak dapat dibuka karena bengkaknja sedangkan nanah dan air mata terus mengalir, akan tetapi pada bidji mata belum timbul kerusakan). Dalam mingu kedua bengkak mengurang, mata sedikit dapat dibuka, akan tetapi rasa pegel menambah serta silau. Ini karena timbulnja luka pada cornea, jaitu bagian jang mengkilap dari bidji mata. Sesudah dua mingu biasanja sebagian besar atau seluruh cornea sudah hantjur. Untuk kerusakan sematjam ini tidak ada obat atau tjara guna mengembalikan keadaan semula, sehingga sikorban kehilangan penglihatannja untuk seumur-hidup. Tidak ada penjakit mata lain jang sehebat gonoblennorrhoe, *jang hanja memerlukan waktu tiga minggu* untuk menghantjurkan mata; sedangkan penjakit trachoma memerlukan waktu beberapa tahun untuk membuat mata mendjadi buta.

Lain² hal jang menjebabkan kebutaan seperti ketjelakaan² perusahaan, tjatjar, umur landjut d b., djauh lebih sedikit djumlahnja, akan tetapi perlu pula diperhatikan sepenuhnja.

Achirnja saja menjerukan kepada seluruh masjarakat Indonesia, supaja dalam rangka perdjuangan bangsa Indonesia dan dalam rangka pembinaan bangsa Indonesia sebagaimana kita idam²kan sesuai dengan pantjasila dan M a n i p o l, disamping pelaksanaan TRI-KOMANDO RAKJAT jang sedang bergelora, seluruh masjarakat ikut serta setjara aktip dalam

gerakan² perbaikan makanan,
gerakan² kebersihan,
gerakan² anti wabah, dan
gerakan² anti buta.

Selamat berdjuang.

* * *

KONPERENSI 17 NEGARA TENTANG PERLUTJUTAN SENDJATA

PADA tanggal 14 Maret 1962 telah dimulai Konperensi 17 negara tentang perlutjutan sendjata di Djenewa. Semula 18 negara jang akan ambil bagian, tetapi karena penolakan usul Presiden de Gaulle jang mengusulkan suatu konperensi 4 negara besar, jaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Sovjet dan Perantjis mengenai perlutjutan sendjata nuklir jang bertudjuan penghapusan dengan segera, pelarangan dan pengawasan atas semua alat pembawa sendjata² nuklir, karena de Gaulle tidak melihat manfaat diadakannja suatu konperensi dengan negara² non-nuklir jang tidak memikul tanggung djawab dalam bidang persendjataan nuklir, maka Perantjis menarik diri dari perundingan² di Djenewa tersebut.

Uni Sovjet semula mengusulkan agar konperensi diadakan pada tingkat tertinggi, jaitu diadakan antara para kepala pemerintahan atau kepala negara, namun fihak Barat lebih menjukai agar konperensi 18 negara ini diadakan atas tingkat menlu masing² negara peserta dan sebelumnja diadakan pertemuan pendahuluan antara menlu Amerika Serikat, Inggeris dan Uni Sovjet agar dapat menjesuaikan rentjana masing². Pada achirnja jaitu pada tanggal 18 Djanuari 1962 diumumkan oleh Amerika Serikat dan Uni Sovjet dengan resmi, bahwa konperensi 18 negara mengenai perlutjutan sendjata akan dimulai pada tanggal 14 Maret 1962.

Sebelumnja, jaitu pada tanggal 13 Desember 1961, Komisi Politik Madjelis Umum PBB ke-16 dengan suara bulat telah menerima resolusi jang berasal dari Amerika Serikat dan Uni Sovjet tentang pembentukan sebuah panitia PBB jang beranggotakan 18 negara untuk membahas perlutjutan sendjata, resolusi mana kemudian diterima djuga dengan suara bulat pada tanggal 20 Desember '61 oleh sidang pleno M.U.-PBB.

Seperti telah diketahui masalah perlutjutan sendjata timbul segera setelah berachirnja Perang Dunia ke-2 dengan diterimanja prinsip penghapusan Bom Atom dan pelaksanaan perlutjutan sendjata umum oleh semua negara² besar.

Dalam tahun 1945 Amerika Serikat memegang monopoli bom atom, sedangkan Uni Sovjet memiliki keunggulan dalam hal tentara konvensionil. Ketika dalam bulan September 1949 Uni Sovjet meledakkan bom atomnja, maka perim-

bangan antara Amerika Serikat dan negara ini berobah, karena hilangnja monopoli Amerika Serikat dan muntjulnja negara Republik Rakjat Tiongkok dalam bulan Oktober 1949. Sedjak waktu itu perasaan ketidak-amanan difihak Barat bertambah besar.

Dalam tahun 1952, Madjelis Umum PBB membentuk suatu Komisi Perlutjutan sendjata (Disarmament Comission), namun komisi ini dalam tugasnja tidaklah menghasilkan hal² jang kongkrit, selain membentuk suatu Panitia Ketjil jang terdiri dari wakil² Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis, Kanada dan Uni Sovjet.

Dalam tahun 1957 panitia ketjil tersebut diatas diperluas dengan duduknja wakil² dari 25 negara anggota PBB, tetapi karena usul Uni Sovjet jang menghendaki agar semua anggota PBB duduk dalam Komisi Perlutjutan Sendjata tersebut ditolak, maka negara² Blok Uni Sovjet memboikot sidang² jang diadakan oleh panitia tadi. Ketika dalam tahun 1958 usul Uni Sovjet diterima, barulah negara² blok Uni Sovjet kembali menghadiri sidang² panitia.

Dalam perundingan jang diadakan oleh ke-4 menteri luar negeri Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis dan Uni Sovjet pada tanggal 5 Agustus 1959, perlutjutan sendjata kembali dipersoalkan dan pada tanggal 7 September 1960 diumumkan pembentukan suatu Panitia 10 Negara jang terdiri dari 5 negara blok Sosialis dan 5 negara blok Barat. Panitia inilah jang sekarang diperluas mendjadi Panitia 18 negara, jaitu dengan ditambahnja 8 negara non-blok, jakni Birma, India, Republik Persatuan Arab, Ethiopia, Nigeria jang dapat dikatakan mewakili negara² Asia/Afrika jang berpolitik bebas, disamping Swedia, Brazilia dan Mexico.

Dalam pembitjaraan² terdahulu mengenai perlutjutan sendjata telah dikemukakan berbagai matjam usul oleh kedua-belah fihak. Dalam tahun 1955 misalnja Eisenhower mengusulkan apa jang dikenal dengan istilah „open skies proposals" dan dalam tahun 1958 Krustjov mengusulkan apa jang dinamakannja „general and complete disarmament" jang pada pokoknja menghendaki suatu persetudjuan jang mengandung penghapusan semua angkatan bersendjata, pemusnahan semua persendjataan, penghapusan semua pangkalan militer asing, pelarangan semua sendjata nuklir, penghentian pembuatan² sendjata, penghapusan semua dinas² kemiliteran dan anggaran² belandja militer serta latihan² militer.

Sebaliknja fihak Barat mengusulkan: pengurangan persendjataan sampai hanja tjukup untuk keperluan keamanan dalam negeri, penghapusan alat² dan sistim² pengiriman sendjata, penghantjuran sendjata² pemusnahan jang massal, penggunaan ruang angkasa untuk keperluan perdamaian dan tertjapainja suatu „dunia jang merdeka dan terbuka" guna menghindari serangan tiba².

Baik rentjana Uni Sovjet, maupun rentjana fihak Barat mempunjai beberapa hal jang bersamaan, misalnja masing² menghendaki agar perlutjutan dilaksanakan dibawah suatu tjara pengawasan, beberapa tahapan dalam pelaksanaannja jang mempunjai perimbangan, sehingga suatu golongan tidak memperoleh keuntungan militer pada suatu ketika terhadap golongan jang lain.

Namun disamping persamaan² tersebut terdapat perbedaan² pendapat jang sangat besar, jang hingga sekarang belum dapat dipetjahkan. Uni Sovjet menghendaki hanja satu persetudjuan jang meliputi semua bidang perlutjutan sendjata dengan ditetapkan lebih dahulu batas² waktu dari setiap fase perlutjutan sendjata tersebut. Usul Uni Sovjet ini tidak dapat diterima fihak Barat karena dianggap tidak realistis dan hanja mempunjai nilai slogan² propaganda dan penghambatan kearah kemadjuan jang sebenarnja dalam perlutjutan sendjata. Jang dikehendaki Barat ialah suatu program jang setingkat demi setingkat dapat memulai langkah2 jang segera dapat dilakukan dibawah pengawasan internasional jang effektif. Fase kemudian baru dilaksanakan setelah fase jang terdahulu terlaksana dengan memuaskan.

Dengan adanja pendapat ini, fihak Uni Sovjet menuduh, bahwa fihak Barat tidak ingin menghapuskan pangkalan2 militernja dinegara-negara fihak ketiga, tetapi hanja bersedia mengadakan pengawasan terhadap peluntjuran2 roket, jang berarti merupakan keuntungan bagi fihak Barat. Uni Sovjet menuduh Barat hanja menginginkan „Control over armaments" (pengawasan terhadap sendjata2) dan bukan „control over dis-armaments" (pengawasan terhadap perlutjutan sendjata2) dan dengan tjara pengawasan jang diusulkan Barat, dapat memata-matai keadaan dalam negeri Uni Sovjet.

Uni Sovjet kemudian mengusulkan djuga perubahan susunan Sekretariat dan Dewan Keamanan, sehingga negara2 sosialis dan negara² netral memperoleh perimbangan dalam badan ini dalam masalah2 perundingan perlutjutan

sendjata. Usul perubahan badan PBB ini tidak disetudjui oleh fihak Barat.

Demikianlah selama ini setiap perundingan jang diadakan oleh fihak Barat dengan Uni Sovjet mengenai perlutjutan sendjata menemui kegagalan, jang pada dasarnja disebabkan perasaan saling mentjurigai, sedangkan setiap tahun 120 miljar dollar dipergunakan oleh semua negara bagi persendjataan. Dari djumlah ini, 85% dipergunakan oleh Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis, Uni Sovjet, RRT dan Djerman Barat. Apa sadja jang dapat diusahakan dengan djumlah jang sedemikian besar itu bagi pembangunan dan kemadjuan tingkat hidup manusia agar manusia terlepas dari bahaja kemiskinan, kelaparan dan perasaan takut.

Seluruh ummat manusia didunia mengharapkan, agar Konperensi 17 Negara di Djenewa ini, menelorkan suatu persetudjuan perlutjutan sendjata jang lengkap, tertjakup didalamnja penghentian pertjobaan² sendjata nuklir, jang memuaskan semua fihak. Hal ini dapat terkabul, djika negara² besar jang berkepentingan benar² menghendaki agar suatu persetudjuan tertjapai.

* * *

. . . . . . siapa tidak mau hantjur-lebur, harus berdjuang mati²an, atau harus membanting-tulang habis²an! Karena itu djanganlah setengah-setengah, berdjuang membanting tulanglah seperti bukan manusia lagi, berdjuanglah mati matian, membanting-tulanglah habis²an seolah² ini Malaekat-malaekat jang menjerbu dari langit.

Djarek

INDUK KOPERASI KARET SEBAGAI ALAT REVOLUSI ALAT EKONOMI TERPIMPIN DAN ALAT PETANI KARET

Dari sambutan Menteri Koperasi Achmadi pada pembukaan Musjawarah Koperasi Karet seluruh Indonesia. jang diadakan di Djakarta tgl. 29 s/d 31 Maret 1962.

SAJA merasa sangat gembira, bahwa Sdr2 sekalian dan chususnja Sdr2 dari KOKSI dapat menjelenggarakan Musjawarah Koperasi Karet seluruh Indonesia pada bulan Maret tahun 1962 ini.

Sekalipun keadaan dalam membuat persiapan2 sangat sulit, akan tetapi Sdr2 telah berusaha sekuat2nja dan Sdr2 telah dapat menghasilkan suatu prestasi, dimana Koperasi Karet jang semula merupakan suatu Organisasi jang berserakan, pada hari2 jang akan datang ini akan merupakan suatu organisasi tunggal jang bulat.

Memang dua hari jad. ini merupakan saat jang bersedjarah bagi Koperasi Karet semuanja. Musjawarah ini diselenggarakan tidak lain dan tidak bukan sebagai suatu amanat dari pada Musjawarah, jang kita adakan pada

Menteri Koperasi Achmadi

kira2 satu tahun jang lampau. Membentuk Organisasi Koperasi Karet Seluruh Indonesia adalah djuga merupakan suatu langkah jang konkrit dimana anggota2 Koperasi Karet ikut serta mentjeburkan diri dan menjumbangkan dalam perdjuangan untuk kepentingan Triprogram Pemerintah.

Memang demikianlah idee jang utama, idee jang pokok, penjelenggaraan Musjawarah ini, ialah untuk membentuk Induk Koperasi Karet Indonesia, jang akan mendjadi aparatur u-

tama dari pada Petani Karet. tetapi djuga mendjadi aparatur Eko nomi Terpimpin untuk melaksanakan Triprogram Pemerintah.

Tahun 1962 ini adalah saat2 jang sangat menentukan bagi Triprogram itu, termasuk Trikomando. Regrouping jang baru lalu diadakan adalah suatu usaha untuk intensiveren kearah pelaksanaan pemenuhan Triprogram Pemerintah.

Oleh karena itu Transkopemada, jaitu Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa, sekalipun isinja statusnja tidak berubah, tetapi titik beratnja diletakkan pada Koperasi. Sekalipun Departemen Koperasi tidak meninggalkan tugas kewadjiban untuk Transmigrasi dan Pembangunan Masjarakat Desa, namun titik berat untuk intensiveren dan untuk memperbesar usaha kearah pelaksasaan Trikomando, ialah pada Koperasi.

Maka Departemen Koperasi dengan KOKSI sebagai aparatur nja mempunjai kewadjiban jang sangat berat dibidang distribusi kedalam Negeri dan dibidang bantuan kepada Departemen2 jang lain kearah ekspor.

Dibidang distribusi kedalam Negeri beberapa tindakan oleh KOKSI, chususnja oleh Induk Koperasi Konsumsi telah diadakan, dan kebidjaksanaan2 baru akan ditentukan, agar supaja distribusi Karet mempunjai peranan jang penting, agar supaja benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakjat, sehingga distribusi dapat merata dan adil.

Bibit jang baik mendatangkan hasil jang baik pula.

***

Dibidang lainnja exspor pokok daripada Negara Republik Indonesia adalah Kopra dan Karet.

Mengenai Induk Koperasi Kopra telah diadakan pembaharuan pengurusnja. Sekarang adalah tu-

Tanaman pohon karet dengan djarak teratur antara satu dan lainnja, agar mendapatkan hasil jang memuaskan.

*
**

gas kewadjiban kita untuk mengadakan suatu Organisasi tunggal. Organisasi jang bisa melaksanakan dan bisa membantu Pemerintah dibidang exspor Karet, sehingga tertjipta suatu suasana pimpinan perekonomian jang tunggal sehingga bisa tertjipta suatu garis Organisasi jang overzichtelijk, suatu garis Organisasi jang djelas dan tertib, agar dibidang ekspor Karet Pemerintah dapat menguasai seluruhnja.

KEDUDUKAN PETANI2 KARET RAKJAT DIBIDANG EKSPOR.

Bagaimanakah kedudukan sebenarnja petani2 atau Karet Rakjat dibidang ekspor daripada Republik Indonesia itu?

Menurut tjatatan dari Bank Indonesia maka ditahun — 1959/

1960 djumlah aandeel daripada Karet Rakjat dalam ekspor adalah ± 65%

Saudara2 mengerti betapa besar sebenarnja aandeel daripada petani Karet Rakjat dalam ekspor Karet Seluruh Indonesia. Tetapi sekalipun demikian dan sekalipun menurut Ketetapan2 MPRS projek Karet adalah merupakan projek B, projek untuk memberikan sumbangan kepada pembangunan Sosialisme Indonesia, namun sampai sekarang ini pengorganisasian belum begitu teratur, kalau boleh dikatakan tidak teratur sama sekali dipandang dari segi penghasilan daripada petani2 Karet itu sendiri.

Ini bukanlah suatu keanehan, tetapi ini adalah warisan2 dari pada struktur kolonialis jang kita dapat, bahwa memang mengenai petani2 karet pada chususnja dan petani produksi pada umumnja, produksi sangat sedikit dipandang daripada jang telah diberikan kepada masjarakat dan kepada Negara.
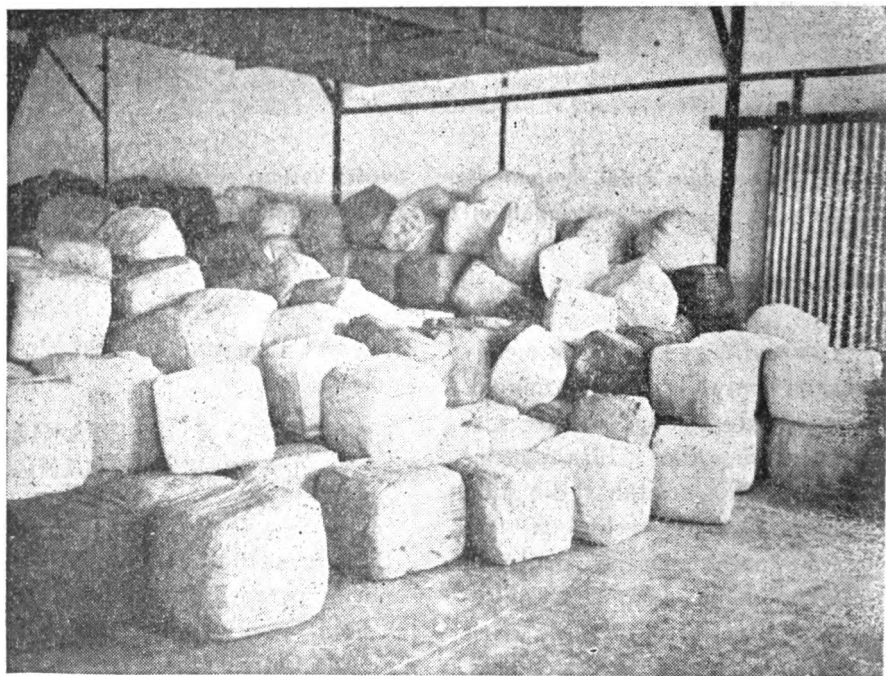
Karet, jang sudah siap untuk dikirim, disimpan dalam gudang.

Oleh karena itulah kita harus pikirkan dan kita harus mengusahakan bagaimanakah se-baik2nja, agar supaja produksi jang dihasilkan oleh para petani itu dapat memberikan hasil jang sebaiknja pada petani, supaja memghasilkan se-banjak2nja, dapat memberikan harga se-besar2nja, dapat memberikan kompensasi jang sebanjak2nja kepada para petani.

Oleh karena ini adalah suatu usaha Rakjat, maka dari itu masalah pengorganisasian, penguasaan daripada produksi pertanian karet itu diserahkan kepada para Petani sendiri. Bentuk Organisasi jang sesuai, bentuk jang tepat daripada Organisasi jang meliputi seluruh rakjat, jang meliputi petani karet, tidak lain dan tidak bukan adalah Koperasi.

Saja kira didalam memberikan sambutan saja ini tidaklah perlu saja mengemukakan persoalan2 landasan idiil dari koperasi, landasan hukum dari koperasi, karena tidak asing lagi bagi wakil2 daripada koperasi.

Sebenarnja, pokok persoalannja jang terletak dalam Koperasi Karet itu tidak lain dan tidak bukan, karena tidak ada satu organisasi tunggal daripada organinasi karet, tidak adanja penghubung antara koperasi karet jang satu dengan koperasi karet jang lain, tidak adanja penghubung antara koperasi karet dengan Pemerintah, tidak adanja penghubung antara koperasi karet dengan Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Oleh karena itulah timbul suatu idee dalam MUNASKOP, bahwa setjepat2nja Induk Koperasi Karet, Induk Koperasi Kopra, dibangun. Didalam rangka itu Saudara2 sekalian berkumpul dan saja minta dengan sangat agar supaja ada satu spirit dan satu semangat jang menjesuaikan diri dengan situasi pada saat ini. Situasi pada saat ini membutuhkan ketjepatan, membutuhkan suatu dinamika dan tidak membutuhkan pembitjaraan2 jang pandjang lebar, tetapi Pengurus Induk Koperasi Karet harus segera dibentuk, setelah dibentuk, direnungkan berdasarkan pikiran-pikiran daripada daerah-daerah dalam menentukan suatu kebidjaksanaan, hubungan dengan pemerintah bagaimana, hubungan dengan perusahaan negara bagaimana, hubungan dengan Swasta bagaimana.

Djanganlah Saudara2 mengadakan pembitjaraan2, se-akan2 ini suatu konperensi, dimana Saudara2 bisa mengemukakan

teori2 jang muluk2, itu djangan Saudara2, Triprogram dan Trikomando membutuhkan ketjepatan.

Oleh karena itu segera setelah membentuk Pengurus, kemudian Saudara2 membitjarakan tentang kebidjaksanaan jang ditempuh oleh Pengurus Induk ini untuk menentukan suatu kebidjaksanaan pokok bagi Pengurus untuk melaksanakan tugas2 daripada Koperasi Karet.

Seluruhnja ini saja minta pengertian dibidang organisasi.

Saudara2 segera organisir Induk Koperasi Karet, bentuk segera Pengurus Induk Koperasi Karet, setelah dibentuk segera menentukan kebidjaksanaan2 pokok dan saat itu pula Saudara2 harus segera dapat menguasai seluruh Indonesia.

Memang untuk melaksanakan tugas2 ini dibidang organisasi, dibidang administrasi, dibidang personil Saudara2 harus sesuaikan dengan tugas2 jang berhubungan dengan Induk Koperasi Karet itu. Dibidang organisasi harus ada keseragaman. Dalam administrasi harus ada keseragaman, ada perpendekan daripada administrasi, djangan sampai terdjadi birokrasi dalam organisasi dan administrasi jang keterlaluan. Bidang personil menghendaki suatu usaha, dimana personil jang memimpin ekonomi adalah orang-orang jang benar2 bisa berketjimpung dalam koperasi karet bersama rakjat, bersama dengan organisasi didaerah, jang dapat menjesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan.

Beberapa hari jang lalu telah saja peringatkan kepada Induk Koperasi Konsumsi, agar supaja Pengurus Induk Koperasi Konsumsi djangan sampai mendjadi salon cooperatoren, artinja terlalu banjak bitjara, formalitet2 dan upatjara2, itu djangan. Pada waktu ini saat bertindak. Musjawarah tentu diadakan, tetapi semuanja untuk memberikan tindakan Pengurus, untuk memberikan pengertian jang harus ada pada Pengurus. Chusus dibidang koperasi karet ini, saja minta Pengurus madju benar2 kedepan, memberikan pengertian kepada anggota2, Primer. petani2 daripada Koperasi ini.

Organisasi ini sesudah berdiri, maka pemikiran2 daripada pangkal sampai kepada udjungnja harus diadakan, jaitu pemikiran2 dibidang produksi; pemikiran2 dibidang produksi, jang berarti penjempurnaan daripada produksi karet, penjempurnaan daripada pohon2 karet dan adanja replanting.

Kemudian processing atau pengolahan daripada karet rakjat haruslah dikuasai benar2 oleh Koperasi Karet. diusahakan sedemikian rupa hingga penanaman, sedjak dari penanaman. penjempurnaan penanaman, pengolahan, hendaknja diusahakan oleh tiap2 Pusat Koperasi Karet. Hendaknja ada pengusahaan daripada processing itu tadi.

Dalam Pusat2 Koperasi Karet itu larinja karet kemana? Saudara2 dalam Gabungan dan nanti dalam Induk belum mempunjai kontrole setjara direct.

Oleh karena itu perlu sekali adanja kerdjasama jang sebaik2nja dengan Pemerintah, kerdjasama sebaik2nja dengan Departemen Perdagangan, dengan Departemen Pertanian dan sebagainja, dengan Perusahaan2 Negara dan dengan Swasta.

Induk Koperasi Karet merentjanakan suatu sistim perdagangan, penjaluran daripada hasil produksi dari karet dengan sebaik2nja, sehingga Saudara2 dari Gabungan dan Induk ini bisa menguasai produksi daripada karet rakjat. Segi2 pokok itu saja sampaikan agar supaja dibahas setjara mendetail kepada Pengurusnja.

Segi2 pokok itu saja sampaikan agar supaja dibahas setjara mendetail kepada Pengurusnja.

Penjempurnaan dibidang produksi, dibidang processing, dibibutuhkan suatu keahlian, membutuhkan suatu skill, jang tidak sedikit.

Oleh karena itu bagian Pengurus daripada Induk Koperasi Karet hendaknja demikian rupa, sehingga sekali lagi, seperti tiap2 kali saja kemukakan kepada organisasi2 Koperasi, hendaknja sebagai hasil usaha organisasi, pimpinan organisasi, pimpinan skill, baik administrasi maupun tehnik. Saja minta hal ini diperhatikan, oleh karena karet membutuhkan suatu usaha jang dapat memperbaiki baik kwalitas daripada karet itu sendiri maupun volume ekspor untuk kepentingan ekspor daripada karet itu sendiri.

Dengan demikian Induk Koperasi Karet saja harapkan dapat mendjadi alat daripada Ekonomi Terpimpin, dapat mendjadi alat daripada revolusi, dan dapat mendjadi alat daripada terutama petani2 karet itu sendiri.

Dengan demikian saja harap organisasi jang baru ini dapat speed-up produksi, dapat ikut serta dalam export-drive.

Saja minta agar Saudara2 bisa menundjukkan suatu kemampuan, bahwa koperasi adalah satu2nja organisasi daripada rakjat jang dapat dipakai untuk serta didalam membantu pembangunan masjarakat sosialisme Indonesia itu, chususnja sekarang, dimana Triprogram tidak bisa dipisah2kan dari Trikomando Rakjat, dimana pembangunan masjarakat Sosialisme sangat tergantung daripada devisen jang kita hasilkan. Saja minta sekali lagi kesungguhan daripada Induk Koperasi Karet, pengurus Induk Koperasi Karet. Kita mempunjai KOKSI jang akan koordineren kegiatan Saudara2 itu, baik dengan Koperasi Konsumsi baik dengan Koperasi Produksi jang lain maupun dengan Perusahaan2 Negara dan Pemerintah.

Oleh karena itu djangan sampai saudara2 sempit pikiran, tetapi Saudara2 lepaskan pikiran djauh, bahwa disamping itu rakjat, petani karet, djuga minta supaja kebutuhan hidupnja sehari-hari ditjukupi.

Oleh karena itulah Saudara2, hendaknja dalam Musjawarah diikutsertakan Saudara-saudara dari Induk Koperasi Konsumsi, dari dari Induk Koperasi Kopra dan sebagainja, agar supaja bidang konsumsi mendapat perhatian. Dari pemikiran dari Induk Koperasi Konsumsi dan dari I.K.K. Saudara2 bisa beladjar, beladjar karena Koperasi. Kopra telah mempunjai pengalaman, Koperasi Kopra telah mempunjai peladjaran, lama mereka berketjimpung dalam perdagangan baik didalam maupun diluar negeri.

Pesan saja jang terachir adalah pertanggungan djawab Saudara kepada pembangunan Sosialisme Indonesia, pertanggungan djawab Saudara2 kepada petani2 karet rakjat, pertanggungan djawab Saudara2 kepada organisasi Koperasi seluruhnja dan pertanggungan djawab jang tidak kurang ketjilnja adalah kepada Trikomando Rakjat.

Didalam tahun ini, tahun 1962, saja akui, bahwa Saudara2 baik dibidang organisasi, dibidang administrasi, maupun dibidang personil, tentu tidak akan sempurna; tidak djadi apa. Tetapi ingatlah, bahwa tahun 1962 adalah tahun penentuan bagi Irian Barat dengan penentuan sekedar kekurangan dibidang administrasi, personil, saja minta spirit, spirit untuk ikut serta, utk. menjumbangkan dalam perdjuangan Trikomando dengan ikut serta melaksanakan Triprogram daripada Ka

binet, dengan mengikut-sertakan rakjat.

Bagaimana posisimu, posisi kita sebagai organisasi koperasi dibidang Trikomando Rakjat? Djelas kita tidak bergerak di bidang militer, tetapi kita bergerak dibidang perekonomian. Tetapi didalam bidang perekonomian ditentukan hasil atau tidaknja merebut perdjuangan Irian Barat.

Saudara2 tidak perlu chawatir dan tidak perlu ragu2 atas perdjuangan Irian Barat. Djangan mengharap-harap bisa berhasilnja diplomasi. Panglima Besar, Pemimpin Besar selalu menjatakan, kita ingin menjelesaikan soal Irian Barat setjara damai, agar tidak mendjadikan korban2 jang tdak perlu, tetapi adjaran jang diberikan beliau kepada kita adalah, bahwa imperialisme pada dasarnja tidak akan memberikan djadjahannja begitu sadja kepada rakat jang didjadjah, melainkan harus kita rebut dengan kekerasan. Maka pada dasarnja kalau imperialisme mengadjak mau berunding, itu soalnja kekuatan. Kalau mereka resminja mau berunding, sebenarnja mereka belum mau berunding, menunda untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Oleh karena itu kita harus siap sedia. Kita harus mempertjepat segala usaha, agar supaja perekonomian kita bisa membantu benar2 perdjuangan Irian Barat, dengan pengertian, bahwa kita akan menghadapi perdjuangan Irian Barat dalam suatu keadaan jang paling djelek, jaitu peperangan total. Maka sekali lagi, djanganlah bimbang, djanganlah ragu2, tetapi kita harus menghadapi perdjuangan jang paling djelek, jaitu peperangan. Maka bagaimanapun terdjadi dengan diplomasi, bagaimanapun terdjadi dengan perdjuangan Irian Barat ini, sekali lagi djangan banjak bitjara, kita organisir Induk kita maupun rakjat setjara riil untuk penguasaan produksi se-banjak2nja dan kita ekspor se-banjak2nja.

Saja sengadja memberi sambutan setjara simple, jaitu mengemukakan kepada Saudara2, agar supaja Induk Koperasi Karet dipikirkan setjara simple, djangan muluk2, djangan terlalu ndjlimet pada saat kita sampai pada taraf jang menentukan.

Sekian sambutan saja. Dan dengan ini Musjawarah Koperasi Karet saja buka.

***

MASALAH PANGAN DAN MUSJAWARAH TANI FRONT NASIONAL

TAHUN 1962 adalah tahun penentuan bagi berhasil atau tidaknja Triprogram Pemerintah, jang meliputi sandang-pangan, keamanan dan pembebasan Irian Barat. Hal ini adalah suatu kepastian jang dinjatakan oleh Pemerintah sendiri.

Mengenai program keamanan dapat kita merasa puas, karena hasil pemulihan keamanan telah tampak dengan djelas. Program pembebasan Irian Barat sedang berdjalan dengan hebatnja dan bagi kita tampak djelas garis-garisnja jang menudju ke-penentuan dan penjelesaian. Tetapi mengenai program sandang-pangan harus dikatakan, bahwa usaha dibidang sandang hingga kini belum menundjukkan hasil jang baik.

Petani bersungguh-sungguh dengan diam-diam.
Bagaikan padi tumbuh setjara diam-diam.

Pada Ibu Pertiwi mari kita mengabdi.
Dengan bersemangat giat menanam padi.

Diantara ketiga bidang dalam Triprogram Pemerintah itu, bidang sandang-pangan adalah jang terpenting. Hal ini diinsjafi benar² oleh Pemerintah, maka didalam melaksanakan programnja, Pemerintah selalu memberikan prioritet pertama pada soal sandang-pangan.

Bahwa Pemerintah hingga saat ini belum berhasil memetjahkan masalah pangan didalam rangka Triprogram, adalah karena masalahnja sangat komplex dan rumit.

Kesungguhan niat Pemerintah didalam pemetjahan masalah pangan ini dapat ditundjukkan dalam usaha-usahanja seperti Operasi Gerakan Makmur, Self-supporting Beras dengan padi-sentranja dsb. Dengan terus terang memang harus diakui, bahwa hasil jang njata dari usaha² itu belum dapat dirasakan. Tetapi harus djuga kita akui, bahwa bagi tiap usaha, sungguhpun didalam teorinja baik sekali, didalam prakteknja sering harus berbenturan dengan berbagai kesulitan dan perkembangan², djustru didalam kemultikompleksan dari revolusi kita jang sedang berkobar ini.

DPA membahas

Tetapi djustru pula oleh karena kita ini ada didalam revolusi, segala usaha, segala perdjoangan tidak boleh mandek, tidak boleh terhenti. Maka pada hari² ini tampak kegiatan jang meninggi untuk mengatasi kesultan pangan jang menekan rakjat. Demikian pada awal bulan April Dewan Pertimbangan Agung mengadakan suatu rentetan sidang membahas masalah pangan sedalam-dalamnja. Sidang² DPA jang telah berlangsung tiga hari lamanja itu pada tanggal 5 April sore dengan dibentuknja sebuah Panitia Perumus Pertimbangan jang bertugas membuat pertimbangan ringkas dan konkrit mengenai harga pembelian dan pendjualan bahan makanan pokok. Panitia Perumus tsb. jang diketuai oleh Sujono Atmo, beranggotakan: D. N. Aidit, Manuaba, Saifuddin Zuchri, Letnan Djenderal Gatot Subroto, Asmu, A.M. Datuk, Henk Ngantung, Pandu Kartawiguna, Asmarahadi, Emma Puradiredja, Kasimo dan Siauw Giok Tjan.

Berbulan-bulan tjutjuran keringat.
Kini diberkahi rasa nikmat.

Didalam sidang perpandjangan pada tgl 6 April DPA chusus membitjarakan masalah beras dan mengambil keputusan memberikan kuasa kepada Panitia Perumus Pertimbangan DPA jang akan disampaikan kepada Pemerintah. Selandjutnja Panitia membuat perumusannja bersama dengan 3 orang Menteri, ja'ni Wk Menteri Pertama Dr Leimena, Wk Menteri Pertama Major Djenderal Suprajogi dan Menteri Pertanian/Agraria Mr Sadjarwo.

Perlu ditjatat suatu kedjadian penting mengingat vitalnja soal pangan dalam rangka ke-ekonomian Negara dalam keseluruhannja, ja'ni bahwa kini Presiden „turun tangan" untuk mengatasi kesulitan² ekonomi dengan diangkatnja beliau sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Kemudian pada tanggal 9 April pagi Sujono Atmo sebagai Ketua Panitia Perumus dengan disertai Wk Ketua DPA Mr Sartono telah menjampaikan naskah pertimbangan DPA, jang berisi pertimbangan² perihal penetapan harga pembelian padi dan harga pendjualan beras serta bagaimana mengikut sertakan masjarakat didalam pengawasan peredaran bahan makanan pokok.

Masjarakat di-ikut sertakan

Diketahui, bahwa masalah pangan, jang sangat kompleks, sulit dan vital itu tidak dapat dipetjahkan oleh Pemerintah sendiri sadja. Masjarakat harus djuga di-ikut sertakan

Oleh karenanja maka didalam rangka ini, Front Nasional, sebagai konsentrasi kekuatan masjarakat, telah menjelenggarakan musjawarah tani, jang berlangsung di Djakarta dari tgl. 12 hingga dengan tgl 14 April 1962.

Musjawarah Tani Pengurus Besar Front Nasional, jang didalam pokoknja membahas masalah² produksi pangan, pembelian padi Pemerintah dan distribusi kebutuhan pokok rakjat, di-ikuti oleh organisasi² tani anggota² Front Nasional organisasi² anggota jang berhubungan erat dengan masalah produksi pangan, maupun para ahli.

Mengingat saatnja dan pentingnja masalah jang dihadapi, diselenggarakannja musjawarah tersebut adalah tepat sekali. Dan menilik keputusan² musjawarah sebagai pokok² pikiran guna pelaksanaan selandjutnja, maka dapat dikatakan, bahwa musjawarah adalah berhasil.

Hasil Musjawarah Tani P.B. Front Nasional

Demikian menurut pengumuman mengenai Keputusan Musjawarah Tani Pengurus Besar Front Nasio-

nal tgl 12 s/d 14 April 1962, antara lain dinjatakan:

KEPUTUSAN[2]

Berlandaskan azas dan tudjuan Front Nasional, jakni Undang² Dasar 1945, Sosialisme à la Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia guna menjelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, membangun Semesta untuk mentjapai Masjarakat Adil dan Makmur serta mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Didorong oleh Trikomando Rakjat dimana peranan Front Nasional untuk menghimpun dan mempersatukan kekuatan² revolusioner dalam masjarakat, dalam hal ini kaum Tani sebagai salah satu soko guru jang penting dan pokok.

Maka Pengurus Besar Front Nasional telah mengusahakan adanja Musjawarah Tani di Djakarta tgl 12 s/d 14 April 1962 untuk memadjukan pikiran bersama dalam memetjahkan ketiga masalah, jaitu:

1. Meningkatkan Produksi Pangan.
2. Mensukseskan Pembelian Padi Pemerintah.
3. Melantjarkan Distribusi, kebutuhan pokok rakjat.

Hasil² dan kesimpulan Komisi² terhadap ketiga masalah tersebut telah disahkan oleh sidang musjawarah.

Kesimpulan pokok musjawarah adalah sbb.:

I. Bidang Produksi Pangan:

1. Mengusahakan terbentuknja Dewan Produksi Pertanian dengan ikut-sertanja wakil² organisasi Tani dan Buruh jang bersangkutan, anggota Front Nasional.

2. Meningkatkan daja Produksi dan mengamankan Desa, dengan tekanan pada pelaksanaan jang konsekwen Undang² Pokok Agraria dan Undang² Bagi Hasil. Serta memobilisasi seluruh tenaga Rakjat untuk dengan segala djalan meningkatkan Produksi pangan.

II. Pembelian Padi Pemerintah:

1. Menjokong dan melaksanakan pelaksanaan gerakan gotong-rojong pengumpulan padi sesuai dengan isi dan djiwa Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi APRI No. 11 tahun 1961 tanggal 13 Desember 1961.

2. Menganggap penting dukungan massa dan kontrol massa terhadap realisasi pembelian padi, dengan tekanan agar para petugas benar² memahami isi dan djiwa Instruksi tersebut, chususnja mengenai ketentuan² djatah, harga dan peraturan baru dari pada pembelian padi.

3. Mendesak dibentuknja suatu Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pembelian Padi sampai ke Desa² jang mengikut-sertakan organisasi² Tani dan Buruh jang bersangkutan jang ditundjuk Front Nasional.

III. Bidang Distribusi:

1. Sistim Distribusi jang adil dan merata chususnja terhadap 9 matjam bahan pokok jang ditetapkan dalam P.P. 140/1961: dengan menggunakan segala apparatuur distribusi jaitu Perusahaan Negara dan kooperasi dengan bantuan R.T./R.K.

2. Memperluas djaringan² serta memperbanjak dan mengerahkan alat² pengangkutan untuk mendjamin kelantjaran Distribusi.

3. Mengusahakan terbentuknja Dewan Pengawas Distribusi dari pusat sampai ke-desa² jang keanggotaannja terdiri atas wakil² Pemerintah, organisasi² Tani, dan organisasi² masa jang bersangkutan jang mendjadi anggota Front Nasional.

Musjawarah mupakat bulat mendukung pengangkatan Presiden sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi serta siap-siaga melaksanakan Komando Bung Karno.

KOMANDO OPERASI EKONOMI

Didalam mengikuti kegiatan-kegiatan dalam usaha memetjahkan masalah pangan, kita lihat berbagai langkah berentet sedjak „turun tangan"nja Presiden didalam bidang ekonomi. Presiden sebagai Panglima Besar Operasi Ekonomi pada tgl 21 April 1962 berhasil membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dengan Stafnja. Demikian sebagai Wakil Panglima Besar I diangkat Ir H. Djuanda dan sebagai Wakil Panglima Besar II Dr Subandrio. Sebagai Kepala Staf diangkat Mr Sumarno dari Bank Indonesia, sedangkan Dr Leimena adalah Wakil Kepala Stafnja Anggota² Staf ialah: Prof. Mr Moeh. Yamin. Chairul Saleh, Maj. Djen. Suprajogi, Dr Suharto, Mr Sadjarwo, Maj. Djen. Hidajat, Achmadi, Drs Khouw Bian Tie, Jusuf Muda Dalam, Darwis Tamin, Hutomo Supardan, Moh. Munir, Ir Surachman.

PENGUMPULAN PADI SETJARA GOTONG-ROJONG

Komando pertama dari Panglima Besar Operasi Ekonomi diutjapkan pada tgl 22 April 1962, ja'ni komando Pengumpulan padi setjara Gotong-rojong.

Komando tsb jang merupakan instruksi penertiban tidak sadja di-

dalam pekerdjaan pemungutan padi, tetapi djuga penertiban didalam soal distribusi, didalam pokoknja menitik-beratkan pelaksanaan pekerdjaan[2] tsb dengan tjara gotong-rojong antara petugas[2] Pemerintah dan masjarakat sendiri. Komando itu merupakan komando kerdja sesuai dengan Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961, jang dikeluarkan pada tgl 13 Desember 1961 jang menghendaki adanja dewan[2] pembelian dan distribusi padi di-daerah[2] tingkat I, tingkat II seterusnja di-desa[2] jang terdiri dari kepala daerah tingkat I, kepala daerah tingkat II, tjamat' kepala desa, instansi[2] jang mempunjai tugas dalam pembelian padi serta wakil[2] organisasi buruh, tani dan massa rakjat jang bersangkutan atas penundjukan Front Nasional.

Dewan[2] itu bertugas :

Pertama : dengan musjawarah dan gotong-rojong menetapkan djatah pengumpulan padi bagi desa sebagai unit kolektif serta djatah[2] untuk masing[2] pemilik padi, segala sesuatunja dilakukan dengan mengingat luas sawah, hasil padinja, serta kebutuhan sipemilik padi akan padi konsumsi.

Kedua: memusjawarahkan penetapan harga pembelian padi dalam imbangan dengan harga antjer[2] Pemerintah.

Ketiga: mengawasi semua pelaksanaan pengumpulan padi

Ke-empat: mengawasi distribusi beras.

Sesuai pula dengan ketentuan didalam Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961 itu oleh Presiden diperingatkan, bahwa harga padi kering desa harus seimbang dengan harga barang[2] keperluan pokok rakjat tani, sehingga terpelihara gairah kerdja untuk mempertinggi produksi padi.

Soal terpeliharanja gairah dan semangat kerdja kaum tani didalam produksi padi itu memang penting sekali untuk mendjamin segala usaha selandjutnja dalam bidang pangan. Sebaliknja pula usaha penertiban atas keperluan[2] pokok lain-lainnja perlu didjalankan setjara seimbang.

Menilik pengaturan waktunja, dikeluarkannja Komando Pengumpulan Padi setjara Gotong-rojong oleh Presiden/Panglima Besar Operasi Ekonomi pada saat ini memang tepat sekali. Waktunja menghadapi panen besar padi. Dasar[2] untuk bekerdja sudah dibuat oleh Dewan Pertimbangan Agung. Badan untuk mengatur pelaksanaannja telah dibentuk, ialah Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Massa dalam masjarakat telah disiapkan oleh Front Nasional dengan Musjawarah Taninja dan follow-up lain-lainnja.

Djadi kali ini dapatlah kiranja kita harapkan berhasilnja pemetjahan masalah pangan, djustru dengan ikut sertanja masjarakat sendiri didalam usaha ini.

Dengan bangga dia bawa pulang hasil banting tulang.
Laksana pahlawan menang dimedan djuang.

* * *

PELAKSANAAN TRIKOMANDO RAKJAT

Amanat² Presiden/Panglima Tertinggi Republik Indonesia.

Pada Hari Penerbangan Nasional 9 April 1962 Presiden-Panglima Tertinggi Republik Indonesia antara lain mengamanatkan sbb.:

1. Revolusi Indonesia adalah revolusi simultan jang meliputi banjak bidang. Perdjuangan pembebasan Irian Barat adalah satu unsur dari pada revolusi itu. Dengan demikian maka djanganlah ada jang mengartikan, bahwa kita boleh mendapatkan Irian Barat, tetapi kehilangan revolusi kita.

2. Perdjuangan pembebasan Irian Barat adalah kewadjiban nasional bagi kita. Kita tjinta damai, tetapi lebih tjinta pada kemerdekaan. Djika tjara damai dapat ditempuh untuk memperoleh kembali Irian Barat dalam tahun ini djuga, maka kitalah jang pertama2 akan menerimanja dengan senang hati, tetapi kalau tidak, maka kita akan menempuh segala djalan. Tri Komando Rakjat berdjalan terus.

3. Djanganlah orang, terutama imperialis, menjalahkan kita dengan menjatakan bahwa Indonesia melakukan agresi. Perdjuangan pembebasan Irian Barat adalah kewadjiban nasional, serupa dengan kewadjiban nasional
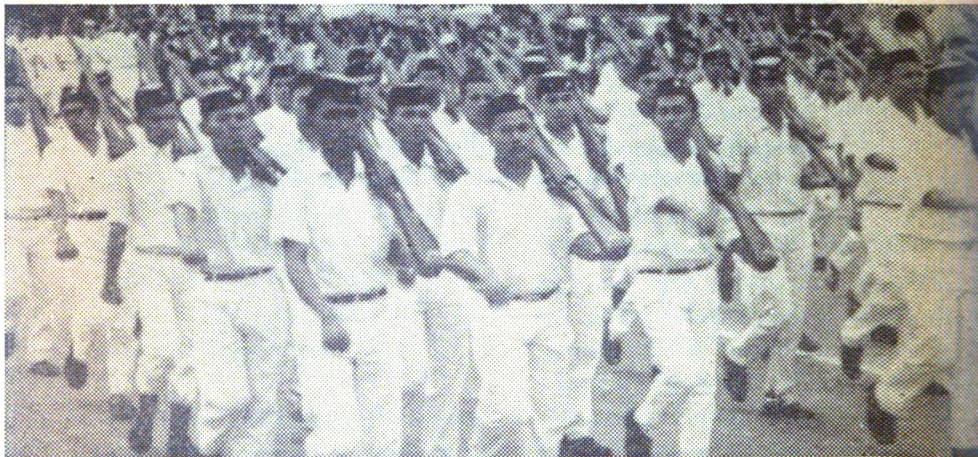
„Irian Barat harus kembali tahun ini djuga", demikian tekad Sukarelawan Mahasiswa ini.

tiap-tiap bangsa jang mana sadja untuk membebaskan wilajahnja sendiri. Kalau kita umpamanja menduduki Texas, maka Amerika Serikat berhak sepenuhnja untuk menggempur kita. Begitupun kalau umpamanja kita menduduki Limburg, djuga Belanda sepenuhnja berhak untuk menggempur kita dengan bom dan dinamit. Ini bukan agresi. Sebab itu maka djuga mendjadi kewadjiban nasional kita untuk membebaskan Irian Barat dengan djalan apa sadja. Dan inipun bukan agresi.

4. Menteri Luar Negeri Subandrio telah menjatakan, bahwa Indonesia pada prinsipnja dapat menerima usul jang telah dikemukakan oleh pihak ke-3 untuk menjelesaikan masalah Irian Barat dengan djalan damai. Pada prinsipnja artinja pada garis besarnja. Kami menunggu apa djawab Belanda.

5. Tri Komando Rakjat berdjalan terus. Kami telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersendjata, djadi termasuk Angkatan Udara, untuk bersiap, setiap waktu jang ditetapkan mendjalankan tugas kewadjiban membebaskan Irian Barat tanah air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda. Kamipun telah perintahkan kepada Rakjat Indonesia, djuga jang berada di Irian Barat, untuk melaksanakan Trikomando Rakjat itu.

*

Dalam suatu rapat umum dihalaman Gubernuran Palembang tanggal 10 April 1962, Presiden mengingatkan lagi, bahwa dalam prinsipnja kita dapat menjetudjui usul Bunker mengenai „tjara penjerahan Irian Barat kepada Indonesia". Tetapi dalam hubungan ini beliau menegaskan sbb: „Siapa bilang saja menerima djangka waktu dua tahun. Tidak! Kita tidak menerima djangka waktu itu, tetapi berpegang teguh pada pendirian, bahwa tahun ini djuga Irian Barat harus telah masuk kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Pemasukan Irian Barat dalam tahun ini djuga itu. bisa melalui pihak ketiga misalnja PBB dan lain2, bahkan setan sekalipun, tetapi djuga bisa dengan djalan kekerasan."

*

Di Daratan Irian Barat.

Dalam keterangannja kepada „Antara" di Surabaja, Wakil Gubernur Irian Barat Kolonel Pelaut Pamudji menjatakan, bahwa persiapan2 jang dilakukan oleh Pemerintah dan Angkatan Perangnja untuk mengusir Belanda dari wilajah Irian Barat, pada

waktu ini menggembirakan dan mejakinkan masjarakat, karena sudah mentjapai taraf jang menentukan.

Rakjat di daratan Irian Barat pada waktu ini sudah menunggu2 kedatangan tentera kita. Sedangkan perlawanan2 rakjat didaratan Irian Barat melawan Belanda tampak lebih hebat pada achir2 ini. Beberapa pedusunan dibawah pimpinan seorang radja, pada waktu ini setjara gigih melawan Belanda dengan hasil2 jang tjukup memuaskan.

Kepala Staf Operasi Pembebasan Irian Barat Major Djenderal Jani menerangkan kepada Pers baru-baru ini, bahwa Panglima Mandala telah selesai dengan segala persiapan untuk setiap waktu terdjun di Irian Barat.

Keterangan itu diberikan setelah Presiden/Panglima Besar Sukarno memimpin sidang Staf Operasi untuk mendengarkan laporan Panglima Mandala.

Dalam rapat tersebut Panglima Besar, chusus telah menanjakan kepada Panglima Mandala tentang kebenaran berita2 jang dilansir Belanda seperti disiarkan oleh Radio Australia, Radio Biak dan Hilversum, serta pengumuman Laksamana Muda Reeser, bahwa kekuatan pemuda2 kita di Irian Barat telah dihantjurkan. Dalam hubungan ini Panglima Mandala telah menjangkal kebenaran berita-berita tersebut. Djusteru sebaliknja dimana-mana kini timbul pemberontakan2 rakjat Irian Barat terhadap Belanda. Pemberontakan2 telah timbul dihampir setiap kota besar di Irian Barat. Dan Pemuda2 kita positip ada di Kotabaru, Danau Wissel, Kaimana, Gag dan Waigeo. Pamflet2 jang menjatakan pro R.I. tersebar dikota2 tsb.

•

Sorong

Satuan2 Gerilja jang terdiri dari putera2 asli Irian Barat, dewasa ini telah berhasil mendekati kota Sorong, Irian Barat, sehingga praktis kota itu sekarang terkepung oleh satuan2 gerilja rakjat asli Irian Barat tersebut.

Menurut berita2 jang dapat dikumpulkan oleh wartawan Antara, dari garis depan, satuan2 gerilja rakjat Irian Barat jang selama ini dengan gigih mengadakan serangan2 terhadap pasukan2 Belanda di Irian Barat, makin hari makin bertambah kuat.

Chusus dipulau Waigeo jang praktis sudah dikuasai seluruhnja oleh penduduk, kedudukan sa-

tuan2 gerilja tersebut sudah pula bertambah kuat.

*

Manokwari

Pada tgl. 15 April 1962 pagi rakjat Manokwari di Irian Barat telah mendesak kepada satuan2 jang ada disekitar tempat itu untuk segera mengadakan penjerbuan kepada semua pos2 pasukan Belanda.

Desakan itu disampaikan kepada satuan2 gerilja karena rakjat tidak tahan lagi dan semakin bentji serta marah terhadap tindakan2 pasukan Belanda jang melakukan tangkapan2 dan siksaan2 terhadap penduduk Irian Barat tanpa memilih bulu.

*

Dari Kotabaru dikabarkan bahwa penguasa Belanda ditempat itu semakin tjuriga, gelisah dan bingung karena peristiwa2 jang terus terdjadi dikalangan anggota2 polisi mereka sendiri. Ternjata telah timbul perpetjahan dan insiden2 serta sikap indisipliner jang berupa tidak lagi menurut kepada pimpinan atasannja. Banjak anggota2 polisi mereka jang melarikan diri dan kemudian bergabung dengan satuan2 gerilja kita.

*

Madju bahu-membahu, pemuda-pemudi bersatu !
Usir pendjadjah Belanda Dari Irian Barat Tanah Air kita !

Riau: 32312 Pemuda-pemudi Propinsi Riau, jang telah mendaftarkan diri untuk pembebasan Irian Barat, dengan semangat berkobar2 siap siaga diberangkatkan segera untuk mengusir Belanda pendjadjah dari Irian Barat. Mereka ini berasal dari: Kotapradja Pakanbaru, Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri dan Kab. Kepulauan Riau.

*

Tandjungpinang

Dari Tandjungpinang telah dikumpulkan sedjumlah 213 buah radio Transitor, 712 batterij, 9 helai bendera Merah Putih (diantaranja 3 buah berukuran raksasa) dan 30 yard kain bendera, beserta uang sebanjak Str. $ 10.545.48 untuk Dana Perdjuangan Irian Barat.

Panitia Persiapan Front Nasional anak tjabang Ketjamatan Batam Kepulauan Riau baru2 ini telah menerima pula 6 buah radio Transistor jang berasal dari pegawai2 Kepolisian, Pamongpradja dan pegawai2 lainnja serta Persatuan Kaum Wanita.

Dan dari Masjarakat umum disana telah dikumpulkan pula uang sebanjak Str. $ 3.814,10 untuk pembebasan Irian Barat.

*

Kalimantan Timur: Di Samarinda baru2 ini, telah dibentuk sebuah pasukan bernama „Pasukan Wartawan Perang", jang siap sedia untuk dikirim kegaris depan mengusir Belanda dari Irian Barat.

*

Sumatera Utara: Bataljon Karya I Sumatera Utara dalam waktu dekat ini segera akan diberangkatkan kegaris depan. Djumlah sukarelawan jang tergabung dalam Bataljon Karya I ini, ada 500 orang, diantaranja 25 orang inti dari T.N.I. Mereka sebelum diberangkatkan sedang giat dilatih.

Oleh PT Bahruni dan Fa Atjeh Kongsi Medan, telah diserahkan sumbangan masing2 Rp. 100.000,— dan sehelai bendera Sang Saka Merah Putih untuk diteruskan kepada Bataljon Sukarelawan Pembebasan Irian Barat Sumatera Utara jang berangkat kegaris depan.

*

Manado: Hingga bulan Maret jang baru lalu didaerah Kotapradja Manado telah tertjatat sedjumlah 3960 orang pasukan sukarelawan Pembebasan Irian Bara. Diantaranja terdapat 528 orang wanita.

*

Ambon: Sampai sekarang sudah terdaftar 10 kompi tenaga2

pasukan Tempur Irian Barat dan sekalian pendaftar2 itu menjatakan siap sedia diberangkatkan kegaris depan.

Disamping itu Hoa Kiao RRT Ternate telah menjiapkan daftar nama-nama para sukarelawan Tionghoa untuk pembebasan Irian Barat, jang terdiri dari anggota2 Hoa-Kiao jang dengan kesadaran siap sedia bersama2 rakjat Indonesia membebaskan Irian Barat.

*

Djawa Barat: Panglima Kodam VI Siliwangi Kolonel I. Adjie pada tanggal 17-4-1962, telah meresmikan dibentuknja Bataljon Sukarelawan Pembebasan Irian Barat Djawa Barat jang diberi nama „Jon Sukarelawan Padjadjaran I".

Jon Sukarelawan Padjadjaran I, terdiri dari 950 orang (5 Kompi).

*

Sumbawa: Didaerah Tk. II Sumbawa pendaftaran sukarelawan Irian Barat telah mentjapai 20.000 orang, pria dan wanita.

*

Sulawesi Tenggara:

Dilapangan Merdeka Bau2 Buton, baru2 ini telah diresmikan terbentuknja pasukan sukarelawan Pembebasan Irian Barat jang terdiri dari 16 pleton. Djuga di Ketjamatan Sampudjawa Daswati II Buton telah diresmikan jang beranggota sebanjak 416 orang terdiri dari pegawai2 Perusahaan Tambang Aspal Buton serta guru2 daerah.

*

Palembang.

Kepala Djawatan Koperasi Kotapradja Palembang, mendjelaskan bahwa atas kerdjasama antara Djawatan Koperasi dengan pusat2 Gerakan Koperasi dikota Palembang, baru2 ini telah diserahkan oleh Dana Sosial Koperasi, uang sebesar Rp. 13.500,- kepada Dana Perdjuangan Irian Barat.

*

Makassar.

Konsul RRT Makassar Pien Shou Chien telah menjumbangkan Rp. 200.000,— kepada Dana Perdjuangan Irian Barat. Dalam menjampaikan sumbangan itu Konsul RRT tersebut telah menjampaikan utjapan selamat kepada Pangdam XIV dan Gubernur Sulselra dalam rangka penanda tanganan Perdjandjian Persahabatan dan Persetudjuan Kerdjasama antara R.I. dan R.R.T.

*

Singapura:

Gelombang I sukarelawan warga negara Singapura, hari Djum'-

at tanggal 20 April 1962. telah mendarat di Kemajoran. Rombongan ini terdiri dari 34 pemuda dan 1 pemudi, berseragam abu2, berpitji hitam dengan simbol „Bebaskan Irian Barat".

Para sukarelawan dari Singapura ini rata2 berumur 25 tahun, sedang seorang pemudi jang turut serta berumur kira-kira 21 tahun, jang dengan semangat meluap2 menjatakan kehendaknja untuk bahu membahu dengan rekan-rekannja di Indonesia berdjuang menghantjurkan kolonialisme jang masih bertjokol di Irian Barat.

*

Amerika Serikat.

Konperensi mahasiswa Indonesia se Amerika Serikat jang dihadiri oleh tiga puluh kota di Amerika Serikat, dari tanggal 23 s/d 31 Des. jbl. telah berachir dengan putusan utk. melebur semua organisasi2 mahasiswa di A.S. mendjadi Persatuan mahasiswa di Amerika Serikat (PERMIAS), jang diketuai oleh: Djanner Sinaga, Dewanto Danusubroto dan Mafudi, dan lima orang wakil wilajah timur, barat, tengah.

Selandjutnja konperensi telah menentukan dibidang politik, Ekonomi dan Kebudajaan sosial pendidikan, dengan tegas mendukung Usdek, dan bersedia mendjadi pelopor ilmiah dalam pelaksanaan pembangunan semesta berentjana.

Mengenai Irian Barat, konperensi memutuskan: *Mendukung sepenuhnja Komando Presiden dan akan mengirimkan utusan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk menjampaikan resolusi untuk mendesak supaja Amerika Serikat dengan tegas menjokong perdjuangan Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah R.I.*

*

Negara2 lainnja:

Menteri/Sekretaris Umum Depertan Kolonel Achmadi mengenai rombongan Sukarelawan jang datang dari Singapura, mengatakan bahwa tidak sadja dari Singapura jang sudah banjak terdaftar, tetapi djuga dari berbagai negeri lain terutama dari Asia, Afrika dan Amerika Latin. Di Malaya, New Zealand. Djerman, Kanada, Amerika Serikat, Amerika Latin dan lain2 negara lagi. Sebahagian dari mereka akan menjusul pula tiba di Indonesia.

* * *

TRIKOMANDO RAKJAT DI DAERAH RIAU

Sedjak diumumkannja Trikomando Rakjat, oleh Presiden pada tanggal 19 Desember 1961 di Djokjakarta, sehari demi sehari semangat rakjat didaerah Riau semangkin memuntjak dan kesiap siagaan semangkin diperkuat. Lebih² lagi sesudah insiden jang terdjadi diperairan Kepulauan Aru, tanggal 15 - 1 - 1962, jang mengakibatkan tenggelamnja kapal patroli „Matjan Tutul", semangat tempur rakjat itu semangkin memuntjak. Tiap² hari pemuda² mendaftarkan diri didaerah masing² untuk mendjadi sukarelawan pembebasan Irian Barat, bahkan sampai tanggal 10-2-1962 telah terdaftar sedjumlah 21004 orang terdiri dari pria dan wanita, jaitu:

1.	Kotapradja Pakanbaru	2617	pria,	221	wanita	=	2838 orang
2.	Kabupaten Kampar	4426	pria,	10	wanita	=	4436 orang
3.	Kabupaten Indragiri	1000	pria,	—	wanita	=	1000 orang
4.	Kabupaten Bengkalis	10340	pria,	—	wanita	=	10340 orang
5.	Kab. Kepulauan Riau	2390	pria,	—	wanita	=	2390 orang
Djumlah		20773	pria,	231	wanita	=	21004 orang

Sampai pada dewasa ini pendaftaran masih terus mengalir dan siap untuk dilatih ataupun bertempur menghantjurkan imperialis Belanda di Irian Barat itu, dan memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Aktiviteit Djawatan Penerangan

Aktiviteit dan usaha² Pemerintah mengenai Trikomando Rakjat itu sungguh² mendapat sambutan jang ichlas dari penduduk. Dimana-mana Pemerintah setempat dan Djuru² Penerangan tetap berdampingan memberikan Penerangan kepada rakjat.

Oleh Djawatan Penerangan Propinsi Riau dan Djawatan Penerangan Kotapradja Pakanbaru, telah diadakan penerangan² di Mesdjid² dalam Kotapradja Pakanbaru, penerangan mana telah diberikan sedjak 15 s/d 26-1-1962 dengan bergiliran. Tiap² mesdjid dikundjungi oleh lebih kurang 300 orang.

Oleh Djapen Prop. Riau diadakan pula dua kali seminggu pidato radio mendjelaskan perkembangan Trikomando Rakjat tersebut.

Djapenkab. Indragiri telah dapat mengundjungi 7 Ketjamatan dan memberikan penerangan kepada rakjat. Tiap rapat jang diadakan ditiap² Ketjamatan itu selalu mendapat kundjungan dari lebih kurang 700 orang.

Demikian djuga Kabupaten² lainnja terus aktif memberikan penerangan didaerahnja masing².

Aktiviteit Partai² dan organisasi² rakjat

Dalam rangka menjambut Trikomando Rakjat itu. Partai² dan Organisasi² Pemuda dan lain² terus aktif menggerakkan Organisasinja masing² untuk menjambut dan melaksanakan Trikomando itu, mengeluarkan pendapat² lisan maupun tulisan jang menjatakan mendukung sepenuhnja Trikomando Rakjat tanggal 19-12-1961 dan memikul segala konsekwensinja, jang antara lain telah dikeluarkan oleh Panitia Per-

Sukarelawan Peladjar dari Kebumen terus dilatih dan siap ke Irian Barat.

siapan Front Nasional Tjabang Kepulauan Riau, dari P.K.I. Pemuda² dan lain² jang isinja satu sama lain tidak djauh bedanja.

Salah satu dari pernjataan itu, jang dikeluarkan oleh Panitia Persiapan Front Nasional Tjabang Kepulauan Riau adalah sbb:

PERNJATAAN

Rapat umum masjarakat Kepulauan Riau jang diselenggarakan oleh Front Nasional Tjabang Kepulauan Riau pada tanggal 19 Djanuari 1962 di Tandjung Pinang jang dihadiri oleh ± 5000 orang, setelah: Mendengarkan pidato Ketua Panitya Persiapan Front Nasional tjabang kepulauan Riau, sekitar Trikomando Rakjat jang diutjapkan oleh P.J.M. Presiden-Panglima Tertinggi-Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta.

Mengingat :

1. Bahwa kolonialis Belanda tidak mau menjerahkan daerah kita Irian Barat kepada Republik Indonesia.
2. Bahwa kolonialis Belanda telah menggunakan kekerasan sendjata terhadap Bangsa Indonesia jang berada di Irian Barat.

Menimbang :

1. Bahwa tidak ada djalan lain untuk membebaskan Irian Barat dari pada dengan djalan konfrontasi sendjata.
2. Bahwa adanja kesanggupan dan tekad jang bulat dari seluruh lapisan masjarakat Kepulauan Riau untuk melaksanakan *TRI KOMANDO RAKJAT.*

DENGAN SUARA BULAT MENJATAKAN:

1. Kami, masjarakat Kepulauan Riau menerima sepenuhnja Trikomando Rakjat jang dikomandokan oleh PJM Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogjakarta; dan siap siaga melaksanakan dengan kesungguhan hati.
2. Kami, Masjarakat Kepulauan Riau bersedia sewaktu-waktu dikirim ke Irian Barat untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih, melenjapkan Kolonialis Belanda dan mengembalikan daerah kita Irian

Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia.

3. Kami, masjarakat Kepulauan Riau mendesak supaja segera dilaksanakan mobilisasi umum.
4. Pernjataan ini akan kami ikuti dengan pelaksanaan jang penuh tanggung djawab.

Tandjung Pinang, 19 Djan. 1962
A.n. Seluruh Rakjat Daerah Kepulauan Riau
Panitia Persiapan Front Nasional Tjabang Kepulauan Riau.

Ketua
ttd
Muhammad Adnan Kasim

* * *

SUKARELAWAN GELOMBANG PERTAMA DARI KEBUMEN MENUDJU MEDAN BAKTI.

Tanggal 10-2-1962 jang lalu, gelombang pertama sukarelawan pembebasan Irian Barat telah diberangkatkan dari Kebumen menudju medan bakti. Rombongan telah diberangkatkan dengan upatjara dan diantar

Para Sukarelawan menudju medan Bakti diantar dengan upatjara dan do'a Restu seluruh Rakjat.

Setelah letih dengan latihan djasmaniah, sambil istirahat menerima latihan teori penggunaan sendjata.

*

oleh barisan² kehormatan jang terdiri dari Pasukan² angkatan bersendjata, Kepolisian, Pegawai² sipil, Peladjar² dan masjarakat umum.

Pada malam hari sebelum keberangkatan rombongan ini, telah diadakan resepsi bertempat digedong D.P.R.D. Daswati II Kebumen, dimana telah berbitjara antara lain, Komandan Garnizun, Bupati/Kepala Daerah Kebumen, dan Komandan KODIM, memberikan nasehat² dan do'a restu kepada rombongan jang akan diberangkatkan. Semoga rombongan selamat dan mendapat hasil jang memuaskan dalam menunaikan tugasnja, jaitu memasukkan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dalam Tahun ini djuga.

Selandjutnja dalam rangka realisasi Trikomando Rakjat, kini di Kabupaten Kebumen masih terus diadakan pendaftaran² sukarelawan. Dan disamping pendaftaran, latihan²pun terus dipergiat terhadap sukarelawan² jang telah terdaftar. Terhadap pegawai² Sipil, djuga terhadap peladjar². *(Djapenkab. Kebumen).*

* * *

Major T.S. Mardjans mewakili Tjatur Tunggal dan Rakjat Tapanuli Utara, menjampaikan pernjataan a.l.: „Siap mengorbankan segala sesuatu. untuk membebaskan Irian Barat".

*

RAKJAT TAPANULI UTARA DUKUNG TRIKOMANDO RAKJAT

Baru² ini dalam suatu rapat raksasa jang dihadiri oleh kira² 200.000 penduduk Tapanuli Utara, berkenaan dengan Trikomando Rakjat, atas nama potensi Nasional Kab. Tapanuli Utara, Tjatur Tunggal, Komandan Dim 0208, Major TS Mardjans Saragih, telah mengumumkan suatu pernjataan jang antara lain menjatakan:

1. Siap mengorbankan segala sesuatu jang ada pada kami ,morel maupun njawa untuk membebaskan Irian Barat dari belenggu pendjadjahan Belanda sehingga kembali kepangkuan Republik Indonesia sesuai dengan tjita² Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. Rakjat Kabupaten Tapanuli Utara tetap patuh/siap, bersatu padu, militant untuk merealisasi Komando Paduka J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I./Pemimpin Besar Revolusi Indonesia jang kramat itu.

3. Rakjat Tapanuli Utara mendoa kepada Tuhan Jang Maha Esa, supaja Paduka Jang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi A.P.R.I./Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, bersama-sama Bangsa Indonesia dilindungi, selama-lamanja dengan kemenangan difihak Bangsa Indonesia. *(Djapenkab. Tapanuli Utara R.M. Sitorus).*

*

INDOKTRINASI MANIPOL/USDEK TERHADAP EX PERMESTA

Pada tahun 1961 jang lalu, Kodam VII Djawa Tengah, menerima sedjumlah anggota ex Permesta, dari Kodam XIII Sulawesi, dalam rangka pemulihan kembali kesadaran Nasional kepada mereka itu.

Oleh Kodam VII, bekas anggota² Permesta tersebut, diserahkan kepada Korem 72, dan selandjutnja ditempatkan disebuah asrama, didesa Tjebongan Daerah Tingkat II Sleman, Jogjakarta, dibawah pimpinan Major Slamet dari Padim Sleman.

Sampai sekarang dalam asrama Tjebongan ini telah ditampung sebanjak 482 djiwa terdiri dari bekas T.N.I. dan para keluarganja.

Terhadap penghuni asrama tersebut sedjak 25 September 1961 telah diadakan pendidikan² atau sematjam kursus, jang diberikan oleh Korem
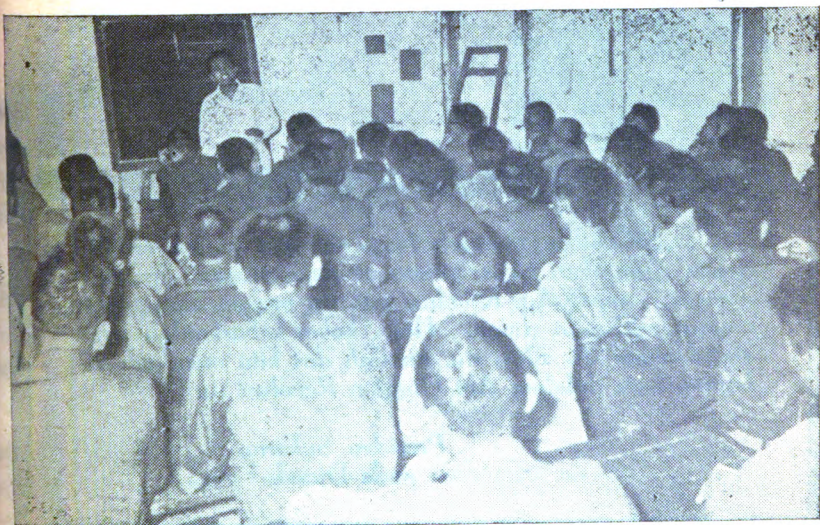
Ex Permesta diasrama Tjebongan sedang diindokrineer dengan Manipol.

72, dibantu oleh instansi² lainnja sesuai dengan bidangnja masing², jang diselenggarakan oleh Penad Paroh Skorem 72, pengasuh asrama dan Djapendi Jogjakarta.

Peladjaran² jang diberikan, meliputi: Latihan² kemiliteran, olah raga, Pendidikan rohani (agama/kepertjajaan), dan Indoktrinasi Manipol/Usdek. Pembanterasan buta-huruf diadakan djuga terhadap jang masih buta-huruf. Sedangkan anak² mereka disalurkan ke sekolah². SR, SMP, dll. sesuai dengan tingkatannja masing².

Ex T.N.I. tersebut, telah mengikuti peladjaran² jang diberikan dengan seksama, telah beberapa kali diadakan test, dan hasilnja memuaskan.

Maka dengan demikian, dapatlah diharapkan, bahwa dalam waktu singkat, saudara² bekas anggota Permesta ini akan dapat kembali mendjadi warga negara Indonesia jang baik, berguna didalam masjarakat, terutama didalam masa pembangunan sekarang ini. *(Djapendi Jogjakarta, Ketua Team Penerangan Manipol R. Soekandar).*

* * *

. . . . „Selesaikan masalah Nasional kita setjara revolusioner, gelorakan terus semangat revolusioner, djagalah djangan sampai Api Revolusi kita itu padam atau suram walau sedikitpun djuga. Hajo, kobar-kobarkanlah terus Api Unggun Revolusi itu, buatlah diri kita mendjadi sebatang kaju didalam Api Unggun Revolusi itu !"

Presiden Sukarno
pada Djarek.

BERITA KELUARGA

TELAH PULANG KERACHMATU'LLAH SAUDARA²
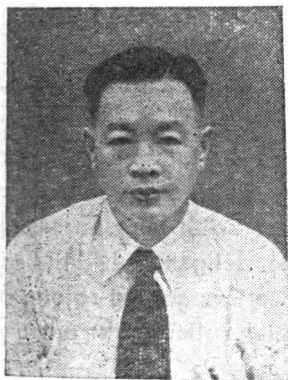
LIE TJAN FU

Djuru Tata Usaha/Djuru Potret pada Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Atjeh Kutaradja.

Meninggal pada tanggal 12-2-'62

* * *

TERLUDA SEMBIRING

Pengatur Penerangan pada Djawatan Penerangan Kabupaten Karo di Kabandjahe.

Meninggal pada tanggal 26-3-'62

Inna Lillahi wainna Ilaihi Rodjiun -

* * *

Perundang-undangan, Peraturan dan Pengumuman

Isinja :

a. Instruksi Presiden/Panglima tertinggi No. 11[1961 tentang Gerakan gotong-rojong pengumpulan padi.

b. Keputusan Presiden R.I. No. 26/Plm. T. tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI No. 11/1961 TENTANG GERAKAN GOTONG-ROJONG PENGUMPULAN PADI

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG R.I.

Menimbang :

a. bahwa beras adalah bahan pokok keperluan hidup rakjat dan oleh karena itu Pemerintah perlu mengusahakan adanja persediaan padi jang tjukup guna melajani keperluan masjarakat akan beras dengan harga jang lajak;

b. bahwa rakjat, terutama rakjat tani, bersama Pemerintah, perlu berusaha setjara aktif mendjalankan gotong-rojong dalam mengumpulkan persediaan padi termaksud, selaras dengan kenaikan produksi padi didalam negeri.;

c. bahwa, agar supaja usaha mengadakan persediaan padi termaksud berhasil baik, semua Instansi Pemerintah bersama rakjat, jang setjara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan padi dan beras, perlu setjara gotong-rojong dan berentjana bergerak mengumpulkan padi;

Mengingat:

1. pasal 4 ajat 1 dan pasal 33 ajat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;

Mendengar:

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 21 Nopember 1961;

MENGINSTRUKSIKAN:

I. 1. Menteri Distribusi,
   2. Menteri Produksi,
   3. Menteri-menteri Penghubung Organisasi Rakjat,
   4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
   5. Menteri Keuangan,
   6. Menteri Perdagangan,

7. Menteri Pertanian,
8. Menteri Keamanan Nasional,
9. Menteri Djaksa Agung,
10. Menteri Kepala Kepolisian Negara,
11. Menteri Perburuhan,
12. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa,
13. Menteri Penerangan,
14. Menteri Perindustrian Rakjat.
15. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
16. Menteri Perhubungan Laut,
17. Menteri Agraria,
18. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,

II. Dewan Bahan Makanan,

III. Komando Operasi Gerakan Makmur,

IV. Front Nasional, dan

V. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk mendjalankan gerakan gotong-rojong pengumpulan guna memperoleh persediaan padi sedjumlah 3½ djuta ton dalam tahun 1962, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PERTAMA:

Dewan Bahan Makanan menetapkan djatah padi jang perlu dikumpulkan oleh masing-masing Daerah Tingkat I guna memperoleh persediaan padi termaksud.

KEDUA:

Gubernur/Kepala Daerah tingkat I menetapkan djatah padi jang perlu dikumpulkan oleh masing-masing desa sebagai kesatuan kolektif jang didjiwai semangat gotong-rojong, berdasarkan penetapan djatah tersebut pada PERTAMA.

KETIGA:

Pemerintah membajar padi jang dikumpulkan dengan harga jang seimbang dengan harga barang-barang keperluan pokok rakjat tani, sehingga terpelihara gairah kerdja untuk mempertinggi produksi padi,

KEEMPAT:

Gubernur/Kepala Daerah tingkat I bertanggung-djawab tentang terkumpulnja djumlah padi seperti tersebut pada PERTAMA pada Presiden/Panglima Tertinggi.

KELIMA:

Dewan Bahan Makanan mengatur lebih landjut gerakan go-

tong-rojong pengumpulan padi dengan mendengar para Menteri, Komando Operasi Gerakan Makmur, Front Nasional dan Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, jang menerima instruksi ini.

KEENAM:

Untuk mendjamin berhasilnja pengumpulan padi, diikutsertakan seluruh "funds and forces" jang progresif.

KETUDJUH:

Pengumpulan padi dilakukan selama beberapa bulan dalam satu tahun, jang untuk masing2 daerah tingkat II akan ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, jang dalam hubungan ini selandjutnja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah menetapkan larangan pembelian padi setjara besar-besaran oleh fihak lain.

KEDELAPAN:

Pada dasarnja tiap daerah mendjalankan usaha pengumpulan padi untuk memenuhi pendjatahan beras bagi golongan karja (anggota Angkatan Perang, Polisi, Pegawai Negeri, Pekerdja Perkebunan dan Pertambangan) dalam daerahnja masing2.

KESEMBILAN:

Ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan Instruksi ini akan segera ditjabut atau diubah sedang hal2 jang belum ditetapkan dalam Instruksi ini diatur lebih landjut oleh Dewan Bahan Makanan.

KESEPULUH:

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 13 Desember 1961.

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik
Indonesia,

SUKARNO

Pendjelasan Atas Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi No: 11/1961 tentang Gerakan Gotong-rojong pengumpulan padi.

PENDJELASAN UMUM.

Setelah meneliti keadaan dan memperhatikan pendapat2, saran-saran dan kesanggupan2 dari pelbagai Lembaga Negara dan golongan serta lapisan masjarakat, ternjata bahwa persediaan padi belum mentjukupi keperluan.

Berhubung dengan itu dianggap perlu:

1. Diichtiarkan dengan segala daja-upaja untuk mengumpulkan sedjumlah padi produksi dalam Negeri jang tjukup, guna melajani keperluan masjarakat akan beras, dan jang selaras dengan kenaikan produksi padi didalam Negeri sehingga dengan demikian import beras dari luar Negeri, jang sangat memberatkan persediaan devisen Negara, setjara berangsur-angsur dapat dikurangi,

2. Diadakan gerakan gotong-rojong pengumpulan padi dengan mengerahkan saluran potensi jang ada pada Pemerintah dan Masjarakat, sehingga menghasilkan suatu sukses jang besar seperti halnja dengan usaha2 gotong-rojong dilain-lain bidang, baik dipusat maupun di-daerah2 dan desa2.

3. Dikeluarkan suatu Instruksi mengenai „GERAKAN GOTONG-ROJONG PENGUMPULAN PADI". untuk melantjarkan pengumpulan padi guna keperluan masjarakat akan beras.

PENDJELASAN KETENTUAN DEMI KETENTUAN.

KETENTUAN PERTAMA

Persediaan padi jang dipandang perlu diusahakan dalam tahun 1962 ditaksir berdjumlah 3½ djuta ton, jang sama dengan kira2 15% dari taksiran djumlah produksi padi dalam tahun tersebut.

Dewan Bahan Makanan menetapkan djatah2 jang perlu dikumpulkan oleh masing2 Daerah tingkat I guna memperoleh djumlah persediaan padi tersebut diatas dengan mengingat akan taksiran produksi Daerah masing2.

KETENTUAN KEDUA.

Dalam usaha mengumpulkan djatah padi jang ditetapkan baginja, desa sebagai unit kolektif menetapkan djatah2 untuk masing2 pemilik padi.

Dengan sendirinja penentuan djatah2 jang dimaksud diatas dilakukan dengan mengingat luas sawah, hasil padinja serta kebutuhan sipemilik padi akan padi konsumsi.

KETENTUAN KETIGA.

Dalam menentukan harga padi, Pemerintah memperhatikan

harga barang2 keperluan pokok rakjat tani lainnja seperti pupuk, bibit-unggul, gula, garam, ikan asin, minjak tanah, tekstil dan sebagainja.

KETENTUAN KEEMPAT.

Mengingat pentingnja Gerakan gotong-rojong pengumpulan padi ini, maka dipandang perlu menegaskan disini pertanggungan-djawab Gubernur/Kepala Daerah tingkat I kepada Presiden/Panglima Tertinggi.

Dalam menunaikan tugasnja se-hari2 dalam hal ini Gubernur/Kepala Daerah tingkat I mengindahkan instruksi2 dan sebagainja dari Dewan Bahan Makanan.

KETENTUAN KELIMA.

Untuk mentjapai sukses dalam Gerakan gotong-rojong pengumpulan padi ini, perlu diadakan tata-susunan jang sebaik-baiknja untuk mengatur ikut-sertanja:

a. Komando Operasi Gerakan Makmur, jang pada tingkat daerah-daerah tingkat I dalam hakekatnja berinti pada wewenang dan wibawa Tjatur Tunggal (Gubernur/Kepala Daerah tk. I, Komando ketentaraan, Kepala Kepolisian Komisariat dan Kepala Kedjaksaan Tinggi),

b. Seluruh potensi Rakjat dengan melalui Front Nasional dan

c. Lain-lain instansi, baik dipusat maupun didaerah, dalam kompetensi Menteri2 jang mendapat Instruksi ini.

KETENTUAN KEENAM.

Dalam "Funds and Forces" disini termasuk Koperasi2, pula antara lain pedagang2 beras, penggilingan2 padi, tengkulak2 dan sebagainja, jang bonafide dan progresif.

KETENTUAN KETUDJUH.

Pembelian padi itu dilakukan hanja dalam masa-masa panen padi, jang berbeda-beda waktunja didaerah-daerah.

KETENTUAN KEDELAPAN.

Untuk mengurangi beaja pengangkutan untuk mentjapai penggunaan jang effisien dari alat2 pengangkutan dan pertimbangan2 lain sebagainja, maka pada prinsipnja tiap2 daerah mendjalankan usaha pengumpulan padi untuk memenuhi pendjatahan beras bagi golongan karja dalam daerahnja masing-masing.

Sampai sekarang jang mendapat supply beras dari J.U.B.M.

ialah golongan2 karja (Anggota Angkatan Perang, Polisi, Pegawai Negeri dan Pekerdja Perkebunan dan Pertambangan).

KETENTUAN KESEMBILAN.

Jang dimaksud ialah terutama peraturan2 jang (dapat) menghambat gerakan gotong-rojong pengumpulan padi, baik jang berdasarkan ketentuan2 perundang-undangan biasa maupun berdasarkan Undang2 Keadaan Bahaja.

KETENTUAN KESEPULUH.

Sudah djelas.

PENDJELASAN TAMBAHAN.

Dalam instruksi ini jang dimaksud dengan padi adalah padi dan/atau gabah.

*

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 26/PLM. T. TH. 1962 TENTANG KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa didalam rangka pelaksanaan Tri Komando Rakjat dan pembebasan Irian Barat perlu diadakan Koordinasi dan integrasi dilapangan ekonomi;
2. bahwa untuk mentjapai maksud tersebut perlu segera dibentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;

Mengingat:

Pasal 4 ajat 1 dan pasal 33 Undang2 Dasar;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

PERTAMA:

Membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi jang susunannja sebagai berikut:

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia — Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,

1. Ir. H. Djuanda, Menteri Pertama — Wakil Panglima Besar;
2. Dr. Subandrio, Wakil Menteri Pertama — Wakil II Panglima Besar;
3. Mr. Sumarno, Menteri Urusan Bank Sentral — Kepala Staf;
4. Dr. J. Leimena, Wakil Menteri Pertama — Wakil Kepala Staf;

5. Sdr. Chaerul Saleh, Wakil Menteri Pertama — Anggota;
6. Prof. Mr. H. Moh. Yamin, Wakil Menteri Pertama — Anggota;
7. Major Djenderal Suprajogi, Wakil Menteri Pertama — Anggota;
8. Dr. Suharto, Menteri Perdagangan — Anggota;
9. Mr. Sadjarwo, Menteri Per tanian/Agraria — Anggota;
10. Lt. Djenderal Hidajat, Menteri d/p kepada Wakil Men teri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan — Anggota;
11. Kolonel Achmadi, Menteri Koperasi — Anggota;
12. Drs. Khouw Bian Tie, Bank Indonesia — Anggota;
13. T. Jusuf Muda Dalam, Bank Negara — Anggota;
14. Sdr. Darwis Tamin — Anggota;
15. Sdr. Hutomo Supardan, DPR/GR — Anggota;
16. Sdr. Mohd. Munir DPA — Anggota;
17. Ir. Surachman, Departemen Perdagangan — Anggota.

KEDUA:

Sekretariat Komando Tertinggi Operasi Ekonomi terdiri dari tudjuh orang sekretaris:

1. Kolonel Sujatmo;
2. Dr. Hadjidarmo Tjokronegoro;
3. Kolonel (P) Sudiarso;
4. Let. Kolonel Sukamto Sajidiman;
5. Let. Kolonel Jusuf Ramli;
6. Let. Kolonel Suhardiman;
7. Drs. Sakidjan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1960.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1962.

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik
Indonesia,
ttd.
SUKARNO

IRIAN BARAT

BOLEH PILIH TJARA INI atau INI

IRIAN BARAT

Mimbar PENERANGAN

TAHUN KE XIII No. 5

MEI 19

MIMBAR PENERANGAN

madjalah untuk djurupenerangan — diterbitkan oleh Deppen Djakarta

Berkala bulanan
Untuk Djurupenerang
Diselenggarakan oleh : Direktorat Publisitet & Penerangan Daerah Deppen

Dibantu oleh:
Para Djurupenerangan Pusat dan Daerah serta Para Pemuka dan Peminat masalah-masalah Penerangan

Alamat:
Redaksi/Administrasi
Merdeka Barat No. 9
Djakarta
Telepon
Redaksi : G. 820 pes. 34
Administrasi : O.P. 1190

DALAM NOMOR INI

GAMBAR KULIT

Salah satu hasil riil daripada Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama ialah Hotel Indonesia jang megah-indah.

1. *Hotel Indonesia dengan Tugu Selamat Datang (halaman I).*
2. *Lukisan dinding jang menghiasi salah satu ruangan Hotel Indonesia (halaman III).*

CRESCENDO TRIKORA

SEKALI Trikomando Rakjat diutjapkan pada tanggal 19 Desember 1961, berdjalanlah ia dengan irama jang menggelora, bercrescendo, berhari meninggi, memuntjak. Demikian didalam bulan Mei 1962, sangat terasalah nafas crescendo Trikora, mendjulang, gemuruh. Memang sepandjang bulan itu terdjadilah peristiwa2 jang menundjukkan betapa memuntjaknja perdjoangan Irian Barat. Untuk menjebutkan beberapa sadja, maka diantaranja ialah:

Hari Kebangkitan Nasional,
Hari Kemenangan Buruh,
Sidang Setiakawan Mahasiswa sedunia untuk Pembebasan Irian Barat,

Mulai berkibarnja Sang Merah-putih didaratan Irian Barat. Sesuai dengan kehendak saat, maka segala peristiwa jang disebutkan itu semuanja ditudjukan guna perdjoangan Irian Barat.

Semangat Kebangkitan Nasional untuk menunaikan sumpah membebaskan Irian Barat.

Semangat persatuan bangsa, semangat menghantam kolonialisme, semangat rela berkorban untuk tanah-air dan bangsa, jang dibawakan kepada kita oleh djiwa Kebangkitan Nasional, pada peringatan 20 Mei jang lalu telah bergelora lagi didalam dada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kali ini gelora semangat itu kita tudjukan untuk pelaksanaan Trikomando Rakjat, untuk menunaikan sumpah pembebasan Irian Barat dalam tahun 1962 djuga, didalam rangka penjelesaian revolusi nasional bangsa Indonesia.

*

Perdjoangan bangsa Indonesia menentang imperialisme dan kolonialisme jang telah berlangsung berabad-abad jang lampau, pada tgl. 20 Mei 1908 telah diberi bentuk jang lebih bulat, lebih kongkrit dengan bentuk berorganisasi. Dengan demikian semangat dan

MIMBAR PENERANGAN

madjalah untuk djurupenerangan — diterbitkan oleh Deppen Djakarta

Berkala bulanan
Untuk Djurupenerang
Diselenggarakan oleh :
Direktorat Publisitet & Penerangan Daerah
Deppen

Dibantu oleh:
Para Djurupenerangan Pusat dan Daerah serta Para Pemuka dan Peminat masalah-masalah Penerangan

Alamat :
Redaksi / Administrasi
Merdeka Barat No. 9
Djakarta
Telepon
Redaksi : G. 820 pes. 34
Administrasi : O.P. 1190

DALAM NOMOR INI

GAMBAR KULIT

Salah satu hasil riil daripada Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama ialah Hotel Indonesia jang megah-indah.

1. *Hotel Indonesia dengan Tugu Selamat Datang (halaman I).*
2. *Lukisan dinding jang menghiasi salah satu ruangan Hotel Indonesia (halaman III).*

CRESCENDO TRIKORA

SEKALI Trikomando Rakjat diutjapkan pada tanggal 19 Desember 1961, berdjalanlah ia dengan irama jang menggelora, bercrescendo, berhari meninggi, memuntjak. Demikian didalam bulan Mei 1962, sangat terasalah nafas crescendo Trikora, mendjulang, gemuruh. Memang sepandjang bulan itu terdjadilah peristiwa2 jang menundjukkan betapa memuntjaknja perdjoangan Irian Barat. Untuk menjebutkan beberapa sadja, maka diantaranja ialah:

- Hari Kebangkitan Nasional,
- Hari Kemenangan Buruh,
- Sidang Setiakawan Mahasiswa sedunia untuk Pembebasan Irian Barat,
- Mulai berkibarnja Sang Merah-putih didaratan Irian Barat.

Sesuai dengan kehendak saat, maka segala peristiwa jang disebutkan itu semuanja ditudjukan guna perdjoangan Irian Barat.

Semangat Kebangkitan Nasional untuk menunaikan sumpah membebaskan Irian Barat.

Semangat persatuan bangsa, semangat menghantam kolonialisme, semangat rela berkorban untuk tanah-air dan bangsa, jang dibawakan kepada kita oleh djiwa Kebangkitan Nasional, pada peringatan 20 Mei jang lalu telah bergelora lagi didalam dada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kali ini gelora semangat itu kita tudjukan untuk pelaksanaan Trikomando Rakjat, untuk menunaikan sumpah pembebasan Irian Barat dalam tahun 1962 djuga, didalam rangka penjelesaian revolusi nasional bangsa Indonesia.

*

Perdjoangan bangsa Indonesia menentang imperialisme dan kolonialisme jang telah berlangsung berabad-abad jang lampau, pada tgl. 20 Mei 1908 telah diberi bentuk jang lebih bulat, lebih kongkrit dengan bentuk berorganisasi. Dengan demikian semangat dan

tenaga perdjoangan bangsa pada tahun 1908 dipersatukan dan diberi arah jang lebih njata untuk mentjapai Indonesia Merdeka. Perdjoangan jang diberi bentuk baru rintisan 1908 telah membawa seluruh bangsa kepada alam merdeka. Kemerdekaan sebagai salah satu tudjuan perdjoangan telah tertjapai, tetapi perdjoangan melenjapkan imperialisme dan kolonialisme masih harus dilandjutkan, bahkan harus diperhebat.

Apabila 20 Mei 1908 telah memberikan gerak baru bagi perdjoangan bangsa, maka 19 Desember 1961 memberi tenaga dan darah baru untuk membasmi sisa-sisa kolonial ditanah air kita.

Buruh membela suatu prinsip didalam membebaskan Irian Barat.

Sesuai dengan usaha mentjurahkan segala potensi untuk Pembebasan Irian Barat, peringatan Hari Kemenangan Buruh 1 Mei 1962 jang lalu djuga ditudjukan untuk memperhebat pelaksanaan Trikomando Rakjat.

Memang tidak bisa disangkal betapa penting fungsi kaum buruh dalam perdjoangan melawan feodalisme, kapitalisme, melawan imperialisme, kolonialisme, pendek didalam perdjoangan menjelesaikan Revolusi Indonesia. Tidak dapat dibantah pentingnja fungsi kaum buruh didalam pelaksanaan Trikora, didalam perdjoangan Pembebasan Irian Barat. Produksi maupun pemutaran roda administrasi negara, dalam mana kaum buruh merupakan pendjaminnja, adalah faktor-faktor maha penting dalam perdjoangan, chususnja dalam perdjoangan bangsa pada saat ini.

Hari 1 Mei, Hari Kemenangan Buruh, telah memberikan kesadaran pada kaum buruh akan kedudukannja dalam masjarakat. Dan chusus hari 1 Mei 1962 di Indonesia telah memberikan kesadaran kepada kaum buruh Indonesia akan kedudukannja dan kewadjibannja dalam usaha Pembebasan Irian Barat, dalam pelaksanaan Trikora.

Sedjalan dengan kesadaran kaum buruh akan kedudukannja dalam masjarakat dan kesadaran akan kedudukannja serta kewadjibannja didalam perdjoangan bangsa dewasa ini, perlu djuga adanja kesadaran kaum buruh akan perlunja pengorganisasian tenaga buruh jang lebih sesuai pada saat ini. Didalam hal ini Resolusi Hari Buruh 1 Mei 1962 jang telah disampaikan kepada Presiden, selain berupa pernjataan-pernjataan mengenai Trikora, modal Belanda dan produksi serta ekonomi dalam negeri, djuga mengemukakan kehendak untuk segera mewudjudkan persatuan gabungan-gabungan Serikat Buruh Indonesia. Dengan demikian akan terdapat ketertiban dan daja jang lebih besar pada perdjoangan kaum buruh.

Sangat perlu diperhatikan pula ialah soal prinsip dalam perdjoangan buruh, seperti jang ditundjukkan kepada kita oleh Presiden Sukarno didalam pidato beliau menjambut peringatan 1 Mei 1962 jang lalu. Ditundjukkan kepada kita, bahwa perdjoangan kaum buruh adalah memperdjoangkan prinsip, bahwa manusia tidak boleh melakukan penghisapan atas manusia jang lain. Dan apabila kaum buruh Indonesia dewasa ini bersama seluruh bangsa Indonesia melakukan perdjoangan membebaskan Irian Barat, maka ini adalah pembelaan suatu prinsip, bahwa suatu bangsa tidak boleh ditindas oleh bangsa lain.

Opini dunia.

Trikora tidak sadja bergema di Indonesia. Perdjoangan Pembebasan Irian Barat mendapatkan resonansi disegenap pendjuru dunia.

*
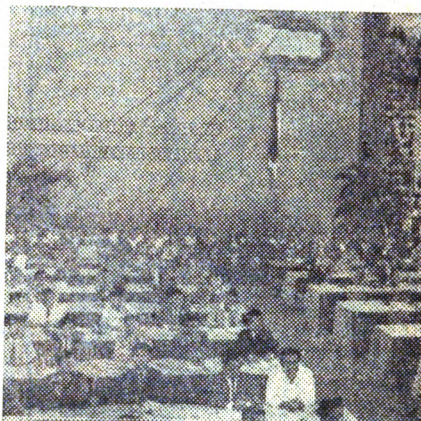
Berbagai negara, berbagai pihak didunia membenarkan perdjoangan bangsa Indonesia. Didalam bulan Mei 1962 djuga kita menjaksikan suatu peristiwa di Djakarta. Wakil-wakil mahasiswa dari seluruh dunia berkumpul di Senajan didalam suatu Sidang Setiakawan Mahasiswa sedunia untuk pembebasan Irian Barat. Mereka menjatakan menjokong perdjoangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat.

Para mahasiswa itu akan bersuara dinegeri mereka masing-masing dan

resonansi dari segenap pendjuru dunia sungguh mengeraskan crescendo Trikora.

*

Sang Merah-Putih didaratan Irian Barat.

*

Dari Teminabuan mulai terpantjang Sang Merah-putih didaratan Irian Barat. Geriljawan-geriljawan Indonesia, pelaksana Trikora, pada tanggal 21 Mei 1962 telah menguasai dengan penuh kota Teminabuan setelah melakukan pertempuran sengit melawan marinir-marinir Belanda.

Sedjak victori di Teminabuan makin banjaklah kabar datang dari daerah Mandala jang memberitakan sukses-sukses jang lebih besar dari pedjoang-pedjoang kita didaratan Irian Barat. Pihak Belanda disana mulai tahu kesungguhan tekad bangsa Indonesia. Belanda mulai melihat bahaja jang mengantjam mereka. Didalam keadaan setengah panik pemerintah Belanda di Irian Barat mulai melakukan pemindahan-pemindahan dan pengungsian-pengungsian penduduk Belanda dari berbagai tempat.

Demikian beberapa peristiwa jang terdjadi dalam bulan Mei 1962, jang menggambarkan gema crescendo Trikomando Rakjat bergemuruh untuk mentjapai optimanja nanti pada suatu saat.

* * *

KI HADJAR DEWANTARA BAPAK PENDIDIKAN NASIONAL 1889 — 1959

Motto : sepi ing pamrih rame ing gawe

"SEPI ing pamrih rame ing gawe" adalah sifat pribadi jang tampak njata pada diri pahlawan, pedjoang, tokoh nasional Ki Hadjar Dewantara, tjiri sepak terdjangnja dan tjiri perdjoangannja. Bagi Ki Hadjar mentjapai tjita-tjita adalah jang utama, bukan nama, kedudukan maupun kemewahan hidup. Sifat pribadi jang demikian itulah jang memberikan harkat jang tinggi kepada beliau sebagai tokoh nasional maupun kepada perdjoangan beliau.

Ki Hadjar Dewantara

Didalam perdjoangannja untuk kemerdekaan tanah-air Ki Hadjar memilih bidang kebudajaan sebagai alat dan memakai pendidikan sebagai saluran. Kebudajaan dan kesenian adalah salah satu sumber kekuatan bangsa, merupakan salah satu alat untuk menjatukan bangsa. Dan kita ketahui, bahwa kekuatan dan persatuan adalah beberapa sjarat diantara sjarat-sjarat jang penting bagi suatu bangsa guna melawan pendjadjahan.

Kesadaran nasional kulturil jang dengan sendirinja tidak lepas dari kesadaran nasional politis, karena tudjuan pokok adalah mengenjahkan kolonialisme, oleh Ki Hadjar didjadikan antithese terhadap segala thesis pendjadjahan. Melalui pendidikan diusahakan oleh Ki Hadjar agar kesadaran nasional kulturil bangsa Indonesia itu berkembang dan dengan demikian pula menanam benih bagi pertumbuhan menusia Indonesia jang mempunjai "own identity" dan "dignity" menghadapi kolonialisme.

Bahwa tiap perbuatan itu disamping menarik pudjian djuga menimbulkan kritik, demikian pula perdjoangan Ki Hadjar Dewantara pada saat itu tidak luput dari kritik. Oleh sementara orang dianggapnja perdjoangan Ki Hadjar dengan Taman Siswanja adalah kurang revolusioner. Dianggapnja seolah-olah gerak kebudajaannja hanja tertambat pada romantisme, lamunan keagungan Madjapahit, Sriwidjaja dsb, jang hanja dapat mengakibatkan zelfgenoegzaamheid dan egocentrisme. Dianggapnja, bahwa perdjoangan Ki Hadjar dengan pendidikan-pendidikan itu adalah terlalu tenang, seperti tenangnja suasana jang meliputi Pendopo Taman Siswa di Wirogunan Jogjakarta. Tetapi bagi jang mengetahui dapatlah ia mengatakan, bahwa didalam dan disekitar Pendopo jang tenang itu terdapat aktivitet jang hangat, bernjala semangat jang membara.

Untuk memberi penilaian apakah perdjoangan Ki Hadjar Dewantara itu revolusioner atau tidak, marilah kita hubungkan dengan utjapan seorang pemimpin revolusi besar Lenin, jang mengatakan, bahwa tjorak kebudajaan suatu bangsa ialah tjorak kebudajaan "ruling class", tjorak kebudajaan dari klas jang berkuasa. Djadi apabila Ki Hadjar berdjoang untuk menghadapkan suatu antithese terhadap "ruling class" (pendjadjah), perdjoangan itu adalah revolusioner.
Pun djangan dilupakan, bahwa usaha nasional dilapang pendidikan pada djaman itu adalah sangat tidak mudah, apalagi pendidikan jang bertjorak perdjoangan, karena pemerintah kolonial Belanda tidak segan-segan mengambil tindakan terhadap jang mereka namakan "wilde school" (sekolah liar) itu. Tidak usah lagi disebutkan kesulitan-kesulitan materiil jang harus diatasi oleh usaha pendidikan perdjoangan.

Oleh karena pendidikan didjaman kolonial oleh penguasa dikehendaki supaja dapat mendjamin atau sedikitnja harus sesuai dengan kepentingan kolonialisme, maka pendidikan, perdjoangan jang diusahakan oleh Ki Hadjar Dewanra itu harus berani memakai sistim-sistim tersendiri jang fundamentil-prinsipiil berlainan, tetapi jang sesuai dengan kepribadian nasional dan tjotjok dan praktis untuk keperluan perdjoangan dan untuk kemadjuan bangsa.
Sistim dan dasar-dasar pendidikan jang dipakai oleh Taman Siswa ternjata untuk sebagian besar tjotjok dan baik untuk didjadikan dasar pendidikan pada djaman merdeka sekarang ini.

Sistim pendidikan nasional sekarang, jang disebut sistim "Pan-

tjawardhana", terdiri dari 5 unsur, ja'ni:

a) Perkembangan tjinta bangsa dan tanah-air, moral nasional/internasional/keagamaan.
b) Perkembangan ketjerdasan.
c) Perkembangan emosionil/artistik atau rasa kehalusan dan keindahan lahir-bathin.
d) Perkembangan keprigelan atau keradjinan tangan.
e) Perkembangan djasmani.

Ternjata "Pantjawardhana" ini mendapatkan djiwanja dari sistim pendidikan Ki Hadjar Dewantara, jang tentu sadja akan diperkembangkan lebih sempurna lagi sesuai saat dan djamannja.

Sesuai dengan djasa perdjoangannja, sesuai dengan karyanja, kiranja tidak salah kalau Ki Hadjar Dewantara diberi nama Bapak Pendidikan Nasional. Dan tidak salah pula, bahwa Pemerintah Republik Indonesia didalam tahun 1959 menetapkan tanggal 2 MEI SEBAGAI HARI PENDIDIKAN NASIONAL, ja'ni didjatuhkan bertepatan dengan hari lahirnja Ki Hadjar Dewantara.

RIWAJAT HIDUP.

Suwardi — nama Ki Hadjar Dewantara baru dipakainja dalam tahun 1928 — demikian nama Ki Hadjar diwaktu ketjil, dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 di Jogjakarta, dari keluarga Pangeran Surjaningrat. Orang tua Suwardi adalah seorang bangsawan jang tidak begitu berada, tetapi jang taat pada agama, agama Islam, dan gemar pada seni dan menghargai falsafah-falsafah kuno jang berhubungan dengan falsafah Hindu. Didalam suasana keagamaan, falsafah kuno dan kesenian Suwardi dibesarkan.

Dari ketjil Suwardi menundjukkan sifat² jang istimewa dan jang menondjol ialah sifatnja jang agresip terhadap adat dan tata-tjara feodal jang bersifat perbudakan.

Suwardi mendapatkan pendidikannja pada Europese Lagere School (Sekolah Rendah Belanda). Pada tahun 1905, pada umur 14 tahun ia melandjutkan peladjarannja pada Stovia (sekolah dokter djawa) di Djakarta. Disinilah mulai ada perkembangan baru pada diri Suwardi. Di Djakarta ia mulai bergaul dengan peladjar² jang datang dari berbagai daerah Indonesia. Mulailah terbuka pikiran² baru dan timbullah kesadaran² baru, berbareng dengan kesadaran² jang timbul disebagian dunia, terutama di Asia dan Afrika dan kesadaran² jang timbul dikalangan bangsa Indonesia sendiri.

Dan djika pada tahun 1908 Budi Utomo lahir, didalamnja terdapat Suwardi Surjaningrat jang ikut aktip bergerak. Sekali ia

mengindjakkan kaki dilapang perdjoangan politik ia terus melangkah dan sewaktu Serikat Dagang Islam mendjelma mendjadi Serikat Islam dibawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto ia telah mendjadi ketua S.I. tjabang Bandung. Dalam tahun 1912 djuga ia bersama-sama Dr. Tjiptomangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker mendirikan Indische Partij.

Sebelum itu, kesulitan materiil telah memaksa Suwardi meninggalkan Stovia pada tahun 1909, jang selandjutnja harus mentjari nafkahnja diberbagai kalangan dan achirnja menemukan lapangan pada djurnalistik.

Disitulah keluar tulisan Suwardi jang terkenal, berdjudul „Als ik eens een Nederlander was" (djika aku seorang Belanda), dimana ia menjindir beleid pemerintah Belanda. Tulisan ini dengan beberapa tulisannja jang lain menjebabkan ia ditangkap oleh polisi pemerintah kolonial dalam tahun 1913. Pada tanggal 6 September 1913 Suwardi bersama Dr. Tjipto dan Dr. Douwes Dekker mulai diberangkatkan ketanah pengasingan mereka, ialah negeri Belanda.

Penghidupan Suwardi dengan isteri di Nederland adalah sulit. Sumber penghasilan dapat dikatakan tidak ada. Teman-teman seperdjoangan ditanah air selalu mengirimkan uang sekadarnja jang diperoleh dari fonds² jang dikumpulkan. Simpatisan² bangsa Belanda di Nederland seperti Troelstra, pemimpin Partij Sociaal Democraat Nederland, dan Dr. Abendanon memberi pertolongan dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Nederland menundjang sekadarnja.

Disamping keaktipannja dilapang djurnalistik dan didalam perhimpunan peladjar Indonesia dinegeri Belanda, Suwardi mulai mempeladjari ilmu pendidikan untuk mana ia berhasil mendapat idjazah. Ilmu pendidikan ini kiranja jang memberi ilham baru kepadanja didalam perdjoangannja.

1914 — 1918 Perang Dunia pertama mengamuk. Kedudukan Nederland gojah. Maka muntjullah „November Beloften" negeri Belanda jang terkenal. Sebelum itu pada tanggal 17 Agustus 1917 keputusan pengasingan atas Suwardi Surjaningrat ditjabut.

Dalam tahun 1919 ia dengan keluarganja, ja'ni isteri dan putranja jang sulung jang lahir dinegeri Belanda, pulang ke Indonesia.

Demikian ia mengindjak tanah air demikian pula ia madju berdjoang lagi. Kali ini mendjadi penulis Nationaal Indische Partij (N.I.P.).

Perang Dunia selesai. November Beloften terbukti omong kosong sadja. Kebidjaksanaan baru dalam pemerintahan didaerah djadjahan ternjata sama dengan diperkerasnja sikap terhadap perdjoangan-perdjoangan nasional. Dalam tahun 1920 Suwardi ditangkap dan dipendjarakan di Semarang, kemudian di Pekalongan.

Sekeluarnja dari pendjara, Suwardi Surjaningrat mulai membuka, lapangan baru dalam perdjuangan, ialah lapangan pendidikan.

TAMAN SISWA.

Pada tanggal 3 Djuni 1922 Taman Siswa berdiri.

Taman Siswa didirikan melihat suatu keharusan dalam keadaan jang dikarenakan pendjadjahan, ja'ni:

a. sedikit sekali djumlah anak-anak bangsa Indonesia jang mendapat kesempatan pendidikan.

b. pendidikan jang diadakan oleh pemerintah kolonial itu tidak untuk kemadjuan bangsa Indonesia, melainkan untuk kepentingan kelangsungan pendjadjahan Belanda, dengan tudjuan agar anak-anak nantinja mendjadi orang-orang jang setia dan sedia didjadjah selamalamanja.

Sedari berdirinja Taman Siswa harus berhadapan dengan berbagai kesulitan. Pihak jang berkuasa memandang lahirnja Taman Siswa sebagai satu bahaja jang akan menumbangkan kekuasaannja. Untuk mentjegah perkembangan perguruan-perguruan nasional jang dianggap membahajakan itu, Pemerintah Hindia Belanda didalam tahun 1932 mengeluarkan ordonansi jang terkenal, ialah „Wilde School Ordonansi (Sekolah Liar). Berbagai aturan dan keharusan dihadapkan kepada Taman Siswa dan sekolah-sekolah nasional lainnja.

Sewaktu ordonansi itu akan dilakukan, Ki Hadjar Dewantara mengirim kawat kepada Gupernur Djenderal Hindia Belanda, dimana diadjukan protes keras terhadap „Ordonansi Sekolah Liar"adan dinjatakan, bahwa Taman Siswa akan mengadakan perlawanan sekuat-kuatnja dan selama-lamanja.

Ternjata aksi ini tidak hanja di lakukan oleh Taman Siswa sadja, tetapi kemudian semua partai politik, organisasi² dari segala lapisan masjarakat menjatakan dibelakang Taman Siswa. Demikian hebatnja aksi rakjat, sehingga setelah mengalami penundaan, dalam tahun 1933 ordonansi itu ditjabut.

Pemerintah Hindia Belanda tidak berhenti disitu sadja, berbagai

djalan ditempuh untuk mematikan Taman Siswa. Kebanjakan tindakan-tindakan pemerintah kolonial itu lebih berat daripada ordonansi jang telah ditjabut itu.

Didalam djaman pendjadjahan Djepang Taman Siswa mengalami pukulan jang lebih hebat. Pemerintah pendudukan militer Djepang pada saat itu mengetahui benar bahaja Taman Siswa terhadap kekuasaannja. Maka penguasa pendudukan Djepang tidak memperbolehkan adanja sekolah-sekolah partikelir. Semua pendidikan hanja diselenggarakan oleh pemerintah militer Djepang. Sekolah-sekolah Taman Siswa diberbagai tempat dipaksa ditutup.

Apabila selama windu pertama setelah dilahirkannja Taman Siswa bekerdja dengan tidak banjak propaganda, maka setelah 8 tahun berdjalan Taman Siswa mempunja 58 buah tjabang tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa azas-azas dan perdjoangan Taman Siswa dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Taman Siswa tidak bertjorak Java-centrisch, atau ke-Djawa-djawaan seperti dikira oleh sementara orang, tetapi benar-benar sesuai dengan sifat „bhinneka tunggal ika". Demikian pada achir djaman pendjadjahan Belanda telah tersebar 200 buah lebih sekolah-sekolah Taman Siswa di Indonesia.

Azas kekeluargaan dan gotong-rojong jang didjundjung tinggi oleh Taman Siswa kiranja djuga mendjadi pengikat jang erat diantara murid-murid, guru, orang-tua murid, pengikut-pengikut Taman Siswa umumnja. Tidak tampak perbedaan dalam hubungan murid dan guru disekolah, dirumah maupun dalam masjarakat.

Achirnja panggilan perdjoangan-anlah jang kiranja memberikan kekuatan bagi para pedjoang didalam barisan Taman Siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pada waktu jang lampau, dimana mereka bersedia menempuh hidup setjara wadjar dan sederhana, stop untuk melakukan „pengabdian tanpa pamrih".

Demikian tiap tahun pada tanggal 2 Mei didalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, bangsa Indonesia mengenang kembali djasa dan perdjoangan Ki Hadjar Dewantara bagi Bangsa dan Negara.

* * *

Para Mahasiswa Sedunia dalam pertemuannja mendukung perdjuangan bangsa Indonesia, untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialis Belanda.

*

PERTEMUAN SETIA-KAWAN MAHASISWA SEDUNIA TENTANG IRIAN BARAT

PADA tanggal 23 Mei 1962, telah berachir Pertemuan Solidarita Mahasiswa Sedunia tentang Irian Barat dan Sidang Badan Eksekutif Gabungan Mahasiswa Sedunia (the International Student Solidarity Meeting on West Irian and the Executive Meeting of the Board of the International Union of Students).

Pada achir pertemuan telah dikeluarkan suatu pernjataan, jang menjokong dengan penuh perdjuangan bangsa Indonesia bagi pembebasan Irian Barat dan bahwa berlangsungnja terus pendudukan Irian Barat oleh kaum kolonialis Belanda „adalah suatu tjontoh dari sistim kolonial jang telah lapuk, dan suatu hal jang memalukan dizaman kita, jang harus dilenjapkan setjepat mungkin". Selandjutnja diserukan agar semua mahasiswa dari semua negara memberikan bantuan jang lebih njata kepada perdjuangan bangsa dan maha-

djalan ditempuh untuk mematikan Taman Siswa. Kebanjakan tindakan-tindakan pemerintah kolonial itu lebih berat daripada ordonansi jang telah ditjabut itu.

Didalam djaman pendjadjahan Djepang Taman Siswa mengalami pukulan jang lebih hebat. Pemerintah pendudukan militer Djepang pada saat itu mengetahui benar bahaja Taman Siswa terhadap kekuasaannja. Maka penguasa pendudukan Djepang tidak memperbolehkan adanja sekolah-sekolah partikelir. Semua pendidikan hanja diselenggarakan oleh pemerintah militer Djepang. Sekolah-sekolah Taman Siswa diberbagai tempat dipaksa ditutup.

Apabila selama windu pertama setelah dilahirkannja Taman Siswa bekerdja dengan tidak banjak propaganda, maka setelah 8 tahun berdjalan Taman Siswa mempunja 58 buah tjabang tersebar diseluruh Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa azas-azas dan perdjoangan Taman Siswa dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Taman Siswa tidak bertjorak Java-centrisch, atau ke-Djawa-djawaan seperti dikira oleh sementara orang, tetapi benar-benar sesuai dengan sifat „bhinneka tunggal ika". Demikian pada achir djaman pendjadjahan Belanda telah tersebar 200 buah lebih sekolah-sekolah Taman Siswa di Indonesia.

Azas kekeluargaan dan gotong-rojong jang didjundjung tinggi oleh Taman Siswa kiranja djuga mendjadi pengikat jang erat diantara murid-murid, guru, orang-tua murid, pengikut-pengikut Taman Siswa umumnja. Tidak tampak perbedaan dalam hubungan murid dan guru disekolah, dirumah maupun dalam masjarakat.

Achirnja panggilan perdjoangannlah jang kiranja memberikan kekuatan bagi para pedjoang didalam barisan Taman Siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pada waktu jang lampau, dimana mereka bersedia menempuh hidup setjara wadjar dan sederhana, stop untuk melakukan „pengabdian tanpa pamrih".

Demikian tiap tahun pada tanggal 2 Mei didalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, bangsa Indonesia mengenang kembali djasa dan perdjoangan Ki Hadjar Dewantara bagi Bangsa dan Negara.

* * *

Para Mahasiswa Sedunia dalam pertemuannja mendukung perdjuangan bangsa Indonesia, untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialis Belanda.

*

PERTEMUAN SETIA-KAWAN MAHASISWA SEDUNIA TENTANG IRIAN BARAT

PADA tanggal 23 Mei 1962, telah berachir Pertemuan Solidarita Mahasiswa Sedunia tentang Irian Barat dan Sidang Badan Eksekutif Gabungan Mahasiswa Sedunia (the International Student Solidarity Meeting on West Irian and the Executive Meeting of the Board of the International Union of Students).

Pada achir pertemuan telah dikeluarkan suatu pernjataan, jang menjokong dengan penuh perdjuangan bangsa Indonesia bagi pembebasan Irian Barat dan bahwa berlangsungnja terus pendudukan Irian Barat oleh kaum kolonialis Belanda „adalah suatu tjontoh dari sistim kolonial jang telah lapuk, dan suatu hal jang memalukan dizaman kita, jang harus dilenjapkan setjepat mungkin". Selandjutnja diserukan agar semua mahasiswa dari semua negara memberikan bantuan jang lebih njata kepada perdjuangan bangsa dan maha-

siswa Indonesia dalam membebaskan Irian Barat, dengan djalan mendesak pemerintah masing2 agar djangan membantu Belanda dengan peralatan perang dan agar tidak memberi izin bagi pengangkutan atau lalu-lintas melalui negara masing2 ke Irian Barat. Pertemuan djuga menjesalkan sikap Gabungan Mahasiswa Belanda jang berdiam diri atau malahan berichtiar membenarkan dari pada mengutuk politik kolonial pemerintah mereka tentang Irian Barat.

Pernjataan Selengkapnja Atas:

Atas prakarsa Perhimpunan Persatuan Mahasiswa Indonesia (PPMI) telah diusahakan Pertemuan Solidarita Mahasiswa Sedunia tentang Irian Barat bersama-sama dengan Gabungan Mahasiswa Sedunia (International Union of Students) di Djakarta sedjak tanggal 15 Mei 1962. Turut serta dalam pertemuan ini delegasi2 Gabungan2 Mahasiswa Nasional dari 35 negara, jaitu dari negara2 Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropah. Dalam upatjara pembukaan telah memberikan kata sambutan Presiden Sukarno dan Djenderal A.H. Nasution. Djuga dalam pertemuan2 jang dilangsungkan kemudian telah didengar laporan2 dari Menlu Dr. Subandrio, Mr Ali Sastroamidjojo, bekas ketua Konperensi AA di Bandung dalam tahun 1955, Ketua Front Pemuda, Delegasi Indonesia, IUS dan djuga dari delegasi2 jang turut serta dalam pertemuan. Selama berada di Djakarta para peserta dari luar Indonesia memperoleh kesempatan untuk mengenal bangsa Indonesia dan para mahasiswanja dan aspirasi2 mereka. Pertemuan telah menerima baik pernjataan berikut.

Pertemuan dengan suara bulat menjatakan, bahwa Irian Barat adalah bagian jang tak terpisahkan dari Indonesia. Perkosaan terhadap keadilan jang menjolok mata oleh kaum kolonialis Belanda jang dengan paksa menduduki bagian jang intregal dari Indonesia adalah suatu sistim kolonial jang telah lapuk dan sangat memalukan dizaman kita, dan karenanja harus setjepat mungkin dilenjapkan. Pada waktu ini djuga pertemuan menentukan, bahwa adanja pendudukan Belanda di Irian Barat adalah sebagian dari politik perang dan agressi dari angkatan kaum imperialis. Tetap bertahannja kaum imperialis Belanda di Irian Barat merupakan suatu an-

tjaman abadi bagi keamanan Republik Indonesia dan membahajakan perdamaian, baik di Asia Tenggara maupun diseluruh dunia. Para peserta dari luar Indonesia menjatakan, membantu rakjat dan mahasiswa Indonesia dalam tekad mereka membebaskan Irian Barat dengan segala daja dalam tahun ini djuga. Dalam hal ini termasuk, bahwa para peserta terutama sangat menghargai peranan para mahasiswa Indonesia jang aktif pada tingkatan perdjuangan bangsa Indonesia sekarang ini dengan djalan bahu-membahu bersama rakjat berdjuang untuk pembebasan Irian Barat dan dengan pembentukan suatu resimen mahasiswa serta lain sebagainja.

Dalam usahanja mempengaruhi pendapat umum dan untuk menghindari kutukan dunia, kaum kolonialis Belanda dan penjokong² imperialis mereka berichtiar menginternasionalisasikan Irian Barat, jang berarti kolonisasi kollektif oleh angkatan² kaum imperialis. Ini adalah perkosaan jang menjolok mata atas hak kudus semua rakjat didunia untuk hidup merdeka dalam suatu masjarakat dimana ada keadilan sosial dan perdamaian. Ketika usaha menginternasionalisasikan Irian Barat ini gagal, maka kaum kolonialis Belanda mempergunakan slogan² tentang hak penentuan nasib sendiri bagi rakjat di Irian Barat, dan mentjiptakan apa jang dinamakan „negara Papua". Pertemuan dengan tegas menjatakan, bahwa tudjuan kaum imperialis dengan siasat mereka memisahkan Irian Barat, sebagai suatu daerah jang tak terpisahkan, dari tanah air Indonesia untuk selama-lamanja, untuk kemudian didjadikan suatu pangkalan militer imperialis di Asia Tenggara, adalah membahajakan keamanan Republik Indonesia dan kemerdekaan nasional negara² Asia lainnja.

Pertemuan sangat menghargai langkah² tegas jang telah diambil oleh bangsa Indonesia dan para mahasiswanja dalam menghadapi usaha² litjik kaum imperialis. Langkah² tegas jang telah diambil oleh bangsa Indonesia tertjakup dalam Tri Komando Rakjat jang telah diumumkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961. Pertemuan menjatakan persetudjuannja tentang kesediaan Indonesia menjelesaikan persoalan Irian Barat melalui djalan damai dengan Belanda dan kesiap-siagaan untuk membebaskan Irian Barat dengan

djalan[2] lain djika kaum kolonialis Belanda menolak mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia.

Dewasa ini keadaan di Irian Barat sangat genting, sebagai akibat kegiatan[2] provokatif kolonialis Belanda jang diperkuat dengan bahan[2] persediaan perang dari NATO. Walaupun adanja permohonan[2] jang mendesak dari rakjat jang tjinta kemerdekaan dan perdamaian diseluruh dunia, namun kaum kolonialis Belanda tetap melandjutkan pengiriman[2] bantuan militer, kapal[2] perang dan sendjata[2] ke Irian Barat untuk mengintensifkan persediaan[2] perang mereka, dan tetap berkeras kepala menolak untuk melepaskan Irian Barat dari belenggu mereka.

Pertemuan mengutuk dengan sangat sikap keras kepala kaum kolonialis Belanda jang dibantu oleh Nato dan menjambut dengan baik usaha[2] rakjat dan mahasiswa Indonesia, terutama didaerah-daerah jang diduduki Belanda, jang sedang berdjuang dengan gagah berani dan terus-menerus bagi kemerdekaan tanah air mereka jang penuh.

Para peserta pertemuan menjokong pernjataan Presiden Sukarno pada tanggal 15 Mei 1962, jang mengemukakan bahwa:

„Semua perselisihan didunia sekarang mempunjai satu alasan dan satu sebab, dan ini adalah, bahwa didunia sekarang ada dua „blok" besar, jang saling bertentangan. Kekuatan[2] baru jang timbul untuk kemerdekaan, untuk keadilan, jang menentang kolonialisme, imperialisme, dan eksplotasi — kekuatan[2] baru ini jalah "the new emerging forces", jang semakin mendjadi besar dan besar dan semakin mendjadi kuat dan kuat. Tentunja kekuatan[2] lama jang telah tersusun, jaitu "the old established forces" kekuatan[2] kapitalisme, kolonialisme, feodalisme berichtiar menaklukkan kekuatan[2] baru itu. Inilah jang mendjadi latar-belakang sebenarnja dari segala perselisihan didunia sekarang."

„Perdjuangan kita menentang kolonialisme di Irian Barat dalam kenjataannja adalah suatu perdjuangan tidak sadja melawan imperialisme Belanda, tetapi suatu perdjuangan melawan seluruh imperialisme didunia. Imperialisme adalah suatu kesatuan-suatu kekuatan internasional".

„Apa jang dapat kita perbuat dalam menghadapi kekuatan imperialisme internasional ini?

jang dapat kita lakukan jaluh membentuk suatu kontra-kekuatan internasional terhadap imperialisme."

Pertemuan mentjatat dan menghargai kenjataan², bahwa demonstrasi setjara besar²an tentang solidarita dengan rakjat dan mahasiswa Indonesia bagi pembebasan Irian Barat telah terdjadi dibeberapa negara, bahkan djuga di Negeri Belanda, dimana sebagian dari pemuda Belanda menolak untuk mendjadi umpan meriam kaum kolonialis. Pertemuan menjatakan bantuan dan simpati mereka kepada demonstrasi² itu dan kepada orang² jang berpemandangan djauh di Negeri Belanda jang menjerukan penjerahan dengan segera daerah Irian Barat kepada Indonesia. Bersamaan dengan ini pertemuan menjesali sikap Gabungan Mahasiswa Belanda, jang seharusnja memberikan tjontoh tentang solidarita mahasiswa internasional dengan menjokong perdjuangan mahasiswa Indonesia dengan djalan mengutuk politik kolonialis pemerintah Belanda, tetapi malahan berdiam diri atau berichtiar membenarkan tindakan-tindakan pemerintah Belanda, hal mana berarti memberikan bantuan kepada politik kolonial, jang bertentangan dengan kepentingan para mahasiswa.

Pertemuan menjerukan kepada seluruh mahasiswa didunia untuk memberikan bantuan jang lebih berarti kepada rakjat dan mahasiswa Indonesia dengan tjara mendesak pemerintah masing² untuk djangan memberikan peralatan perang kepada Belanda dan tidak mengizinkan pengangkutan atau lalu-lintas melalui negara masing² ke Irian Barat dan djuga untuk memboycott setiap usaha Belanda jang bermaksud memperkuat kedudukan mereka di Irian Barat. Pertemuan djuga menjerukan kepada semua sahabat diseluruh dunia untuk memobilisasikan pendapat umum guna mendjamin sokongan moral jang setinggi mungkin dan bantuan material untuk sukses perdjuangan jang benar dari bangsa dan mahasiswa Indonesia bagi pembebasan Irian Barat seluruhnja dan untuk menginsafkan negara² jang telah membantu atau bermaksud membantu baik setjara langsung atau tidak langsung kaum kolonialis Belanda, agar membatalkan bantuan mereka. Para peserta pertemuan berpendapat bahwa kemenangan bangsa dan mahasiswa Indonesia dalam membebaskan Irian Barat

dari kaum kolonialis Belanda adalah kemenangan semua rakjat jang tjinta damai dan kemerdekaan diseluruh dunia. Demikianlah pernjataan lengkap jang telah diumumkan oleh Pertemuan Solidarita Mahasiswa Sedunia tentang Irian Barat dan Sidang Badan Eksekutif Gabungan Mahasiswa Sedunia dalam sidangnja jang terachir, jang telah berlangsung dari tanggal 15 Mei s/d 23 Mei 1962.

Amanat Presiden Sukarno:

***
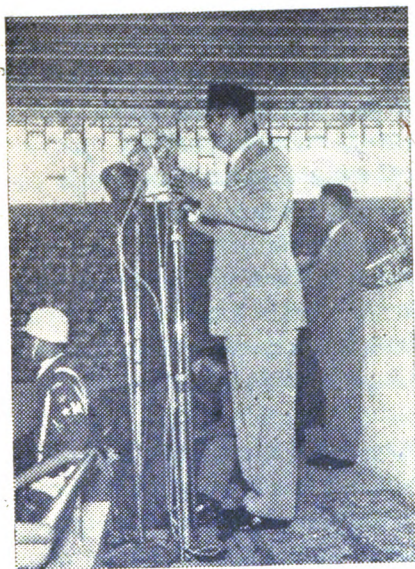
Dalam upatjara pembukaan „International Student Solidarity Meeting" pada tanggal 15 Mei 1962 Presiden Sukarno telah pula memberikan amanatnja jang a.l. mengemukakan, bahwa beliau berbitjara dengan hati-sanubari jang penuh tjinta kepada kemerdekaan, keadilan sosial tanpa penindasan manusia oleh manusia, perdamaian dunia, persahabatan umat manusia dan karenanja beliau jakin, bahwa bahasa beliau dapat dimengerti oleh semua peserta pertemuan. Setelah mengemukakan, bahwa revolusi Indonesia adalah suatu revolusi jang multi-kompleks, jaitu suatu revolusi nasional, politik, ekonomi, sosial, kebudajaan jang harus digerakkan serentak dan tidak setingkat demi setingkat, tetapi suatu revolusi simultan jang merupakan suatu revolusi gabungan dari banjak revolusi dalam suatu generasi, maka dapatlah dimengerti mengapa bangsa Indonesia banjak mempunjai musuh² dikalangan bangsa² jang ingin tetap mempertahankan imperialisme di Indonesia, jang ingin tetap mempertahankan Irian Barat dalam kekuasaannja, jang lebih suka akan sistim politik liberal, musuh² dikalangan kebudajaan jang ingin tetap menegakkan kebudajaan imperialis disini. Selandjutnja Presiden menegaskan, bahwa gagasan untuk mengadakan suatu Gabungan Internasional dari Mahasiswa² merupakan sua-

tu gagasan jang sangat besar dalam abad ke-20 ini, karena abad ini adalah dimana timbul perdjuangan antara kekuatan-kekuatan jang baru timbul didunia dengan kekuatan-kekuatan jang telah lama tersusun dan sengketa didunia sekarang ini mempunjai satu sebab dan satu akibat, jalah karena kekuatan² baru jang timbul, jaitu kekuatan² menentang kolonialisme, imperialisme, penghisapan, kapitalisme, kekuatan² baru jang timbul untuk kemerdekaan dan keadilan, semakin lama semakin kuat dan semakin besar, sehingga kekuatan² jang telah lama berdiri, jaitu kekuatan² kapitalisme, kolonialisme, imperialisme dan feodalisme berichtiar menguasai kekuatan² jang baru timbul itu. Presiden bergembira, bahwa semua mahasiswa jang turut dalam pertemuan ini berada dalam barisan kekuatan² baru itu dan karenanja harus bersatu, karena mempertahankan suatu gagasan dengan tegas dan keras, jaitu gagasan untuk kemerdekaan, martabat manusia, perdamaian dunia dan gagasan persahabatan umat manusia. Jang mendjiwai pertemuan ini ialah tjinta untuk kemerdekaan, keadilan, perdamaian, persahabatan umat manusia, tjinta segala sesuatu jang hidup dalam hati-sanubari setiap orang. Semua orang didunia ini menghendaki kemerdekaan, perdamaian, keadilan dan memimpikan hari esok jang baik, mentjita-tjitakan kehidupan baik bagi anak²nja dikemudian hari, baik ia kulit hitam, kuning ataupun sawo-matang, maupun ia berkulit putih. Itu sebabnja mengapa pada dasarnja umat manusia itu satu. Tentu ada orang² jang tidak menghendaki demikian. Mereka itulah kaum imperialis, kaum imperialis penghisap. Namun djumlah mereka tak banjak. Kita semua ketahui, bahwa imperialisme tidak bersifat nasional, imperialisme adalah sesuatu kekuatan internasional. Imperialisme Belanda di Irian Barat, atau imperialisme Belgia di Kongo, atau imperialisme Perantjis di Aldjazair atau imperialisme dimana sadja, berhubungan satu sama lain. Perdjuangan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme di Irian Barat, sebenarnja bukan sadja melawan imperialisme Belanda di Irian Barat, tetapi suatu perdjoangan melawan seluruh imperialisme didunia. Kemenangan Indonesia di Irian Barat adalah kemenangan semua pentjinta kemerdekaan didunia. Imperialisme berhubungan satu sama lain, jang merupakan suatu kekuatan internasional. Karenanja

kita djuga harus menggalang kekuatan tandingan internasional melawan imperialisme, jang tidak hanja terdiri dari bangsa Indonesia, tetapi jang merupakan suatu solidarita internasional dari bangsa² Indonesia, India, Pakistan, Philipina, Vietnam, Tiongkok, Rusia, Polandia, Italia, Perantjis, Belgia, Tunisia, Amerika Latin, bahkan djuga dari bangsa² Amerika dan Kanada. Semua bangsa jang tjinta kemerdekaan dan perdamaian hendaknja bersatu melawan imperialisme dunia. Itulah sebabnja mengapa beliau selalu memberi sokongan sepenuhnja kepada gerakan² internasional seperti ini, jaitu gerakan Gabungan Internasional dari Mahasiswa², karena ini merupakan sesuatu jang amat baik dalam sedjarah dan djuga merupakan lambang sedjarah. Lambang kemadjuan umat manusia — lambang kemenangan umat manusia — lambang kemenangan akan datangnja kemerdekaan, kemenangan datangnja keadilan sosial. Oleh sebab itu beliau menjetudjui pemimpin Tiongkok Mau Tse Tung, jang mengatakan, bahwa sekarang Angin Timur menguasai Angin Barat. Jang dimaksud dengan Angin Timur jalah angin kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, sedangkan jang dimaksud dengan Angin Barat jalah angin penindasan, ketidakadilan, imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan angin penghisapan manusia oleh manusia. Demikian antara lain amanat Presiden Sukarno pada upatjara pembukaan.

Prasaran Djenderal Nasution:

***
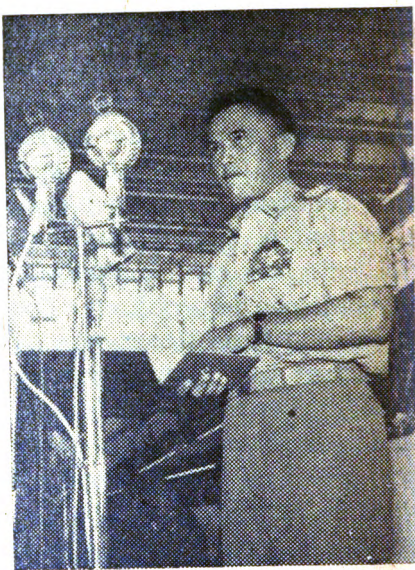
Dalam prasarannja jang diutjapkan sebelum amanat Presiden Sukarno dalam upatjara pembukaan Pertemuan Solidarita Mahasiswa Sedunia pada tanggal 15 Mei 1962 Djenderal Nasution a.l. mengemukakan tentang perdjuangan melawan kolonialisme, perdjuangan anti-kolo-

nialisme Indonesia dan tentang politik kolonialisme Belanda. Setelah menguraikan tentang gagalnja politik kolonialisme Belanda dimasa lalu, jaitu digulungnja negara² boneka Van Mook, maka Belanda kini meneruskan politik kolonialnja di Irian Barat, dan ingin membentuk disana satu negara boneka pula jang baru, negara boneka jang tidak akan mampu berdiri sendiri, baik politik maupun militer atau ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnja akan terus didjadjah dengan tjara jang tidak langsung. Apakah tanda dari pada suatu negara jang disebut neo-kolonialis? Tandanja jalah bahwa negara sematjam itu dipertahankan oleh bangsa jang lain; setiap negara neo-kolonialis jang dinjatakan merdeka selalu menanda-tangani suatu perdjandjian dengan bekas si kolonialis, dimana si bekas kolonialis itu diwadjibkan mempertahankan negara jang disebut merdeka tadi. Di Asia Tenggara dan terutama di Afrika adalah tempat-tempat dimana kaum kolonialis mendirikan negara² jang ketjil² demikian, supaja tidak tjukup kuat, memetjah-belah satu bangsa dan negara² tersebut jang karena ketjilnja tidak bisa berdiri sendiri-politik, ekonomi dan militer, sehingga dengan demikian harus mengadakan perdjandjian dengan pendjadjah, bahwa pendjadjah itulah jang bertanggung-djawab terhadap pertahanan dari pada negara² boneka itu dan inilah maksud Belanda di Indonesia selama ini dan sekarang di Irian Barat. Tentang hak "selfdetermination" Belanda bagi rakjat di Irian Barat, jalah dimaksud untuk mengambil hak „selfdetermination" itu dari rakjat di Irian Barat dan guna membentuk suatu wilajah Irian Barat untuk tempat imigrasi Belanda dan peranakan Indo-Belanda. Djelaslah hal ini adalah serupa dengan apa jang kita lihat misalnja di Afrika Selatan, jaitu mengambil hak pribumi dan memberikannja kepada imigrasi dari Eropah. Selandjutnja Djenderal Nasution mengemukakan tentang politik konfrontasi Indonesia dan tindakan² jang telah diambil dan akan didjalankan untuk membebaskan Irian Barat dari belenggu kolonialis Belanda, misalnja adanja TRIKORA jang telah disiarkan oleh Presiden Sukarno pada tgl. 19 Desember 1961, dan kalau tindakan² ini belum tjukup, maka Angkatan Perang Republik Indonesia siap-sedia untuk membebaskan Irian Barat, walaupun diharapkan agar masih dapat ditempuh djalan damai dalam

persoalan Irian Barat. Rakjat Indonesia tjinta damai, tapi lebih mentjintai kemerdekaan. Djenderal Nasution mengachiri prasarannja dengan harapan, agar para peserta pertemuan mengadjak bangsa dan mendesak pemerintah masing² memboikot Belanda, sebagai dukungan terhadap perdjuangan Bangsa Indonesia. Kalau tak dapat memboikot setjara total, boikotlah perhubungan Belanda dilaut dan udara, karena ini adalah penting bagi Belanda untuk dapat mengangkut peralatan perangnja ke Irian Barat. Demikian antara lain prasaran Djenderal Nasution.

***

Mari kita berdjalan terus, diatas dasar Manipol, diatas dasar USDEK, diatas dasar persatuan Indonesia jang berporoskan NASAKOM, diatas dasar segala perdjuangan kita, berdasarkan kepada "self-help". Pendek kata, hanja djikalau kejakinanku benar, hanja djikalau kita berdjalan sebagai jang sudah kita djalani ini djalan jang benar, kita akan dapat mentjapai apa jang diamanatkan oleh rakjat kepada kita, jaitu kemerdekaan Indonesia jang komplit, jang bebas-merdeka dari Sabang sampai ke Merauke, tersusun didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1962.

TUGAS DAN KEDUDUKAN PERS SEBAGAI ALAT PENEGAK REVOLUSI DAN PEMBANGUNAN PADA TARAF PENGEMBALIAN IRIAN BARAT

***

WAKIL Menteri Pertama/Meteri Penerangan Republik Indonesia Prof. Mr. Moh. Yamin pada tanggal 4 Mei 1962 bertempat di Paviljun Hotel Duta Indonesia telah mengadakan malam ramah-tamah dengan seluruh karyawan pers ibukota.

Dalam malam ramah-tamah itu Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan telah menguraikan mengenai *„tugas dan kedudukan para karyawan wartawan dengan persnja sebagai alat penegak revolusi dan pembangunan dalam taraf pembebasan Irian Barat dalam tahun 1962"*.

Dibawah ini dimuat pokok² uraian WMP/Menteri Penerangan tersebut.

Sedjarah pers nasional.

Berbitjara tentang sedjarah pers nasional diantara lain beliau menjatakan, bahwa sedjarah itu erat-erat terdjalin dengan perdjuangan nasional pada masa itu. Tegasnja fungsi daripada pers nasional dimasa pendjadjahan dahulu sudah merupakan penggugah semangat rakjat untuk bangun dan sedar memperdjuangkan tjita-tjita dan tudjuan nasional, jaitu mentjapai suatu Indonesia jang merdeka, bersatu dan berdaulat.

„Exorbitante rechten" sebagai alat penumpas gerakan nasionalis didjaman pendjadjahan tidak pernah menggentarkan para pedjuang dalam bidang pers, bahkan pembinaan pendapat umum untuk menentang kolonialisme tetap berdjalan terus dengan djalan dan tjara apapun.

Dinjatakan selandjutnja, beliau jakin bahwa diantara hadirin terdapat pula pedjuang-pedjuang dalam bidang pers jang pernah meringkuk dalam pendjara kolonial akibat exorbitante rechten itu. Kita lihat sekarang bahwa pengorbanan dan pengalaman mereka tidak sia-sia belaka. Malahan karena ketekunan dan tekad mereka dimasa perdjuangan itu, maka diwaktu perdjuangan kita memuntjak pada 17 Agustus 1945 dan memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada dunia sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat, bersiaplah sudah Rakjat Indonesia disegenap pelosok Tanah Air untuk ikut serta memikul tanggung-djawab daripada tindakan jang keramat

itu. Menurut tradisi perdjuangan sudah terbukti, bahwa pers nasional dan wartawan nasional termasuk penegak Proklamasi Kemerdekaan dan demokrasi.

Disinilah kita menjaksikan bukti dari pembinaan pendapat umum jang tegas-tegas menghasilkan kekuatan tindak berupa konkretisasi daripada tjita-tjita dan tudjuan jang diperdjuangkan dan dibimbing oleh para karyawan pers nasional didjaman jang lampau.

Fungsi pers dialam kemerdekaan

Pada waktu itu, didjaman pendjadjahan, pers perdjuangan nasional mendjalankan tugasnja dengan tidak mempunjai pengajoman apapun, jang ada hanja permusuhan belaka berupa ordonnantie-ordonnantie kolonial penindas suara rakjat. Sedjak tahun 1945 Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat memberikan pengajoman kepada pers perdjuangan nasional, pengajoman jang senantiasa disalurkan melalui Departemen Penerangan. Dialam kemerdekaan fungsi dan tugas pers nasional adalah lebih berat daripada dimasa jang lampau karena mempunjai tanggung-djawab jang tidak ringan, jaitu menjelesaikan revolusi dan membangun suatu masjarakat jang bergotong-rojong berdasarkan Pantja Sila.

Adakalanja bahwa meskipun Negara Republik Indonesia telah menjediakan alat pengajoman bagi pers Nasional, terdapat beberapa oknum-oknum dikalangan wartawan Indonesia jang mendjadi penumpang daripada kapal-kapal lain dari pada Departemen Penerangan.

Selandjutnja Menteri berharapan, bahwa para wartawan Indonesia supaja mendjadi penumpang daripada kapal induk, jaitu Departemen Penerangan. Kapal induk inilah jang djuga mendjadi alat pengajoman jang dimaksud tadi.

Peranan Departemen Penerangan

Ditegaskan pula peranan Departemen Penerangan selaku pengajom dan pembimbing pers nasional Indonesia jang antara lain sebagai berikut: Seorang pengarang Djerman jang hidup dibalik abad kedua puluh ini, jakni Aldabert Stifter pernah menulis: *"es ist die erste und heiligste Pflicht des Staates, die Erziehung seiner Burger, die sogenannte Menschwerdung des Menschen, in die Hand zu nehmen ...."* (adalah tugas utama dan mulia dari Negara untuk membina pendidikan Warganja, jaitu apa jang disebut menanam kesedaran dan tanggung-djawab sebagai warganegara jang sedjati). Tegasnja Departemen Penerangan berkewadji-

ban memberikan petundjuk-petundjuk dalam penjebaran kesadaran bernegara. Kesedaran bernegara ini membawa akibat jang meminta suatu rasa tanggung-djawab jang besar pula.

Pada taraf perdjuangan dewasa ini, kita tengah dalam penjelesaian Tri-Program Pemerintah, malahan kini kita sehari-hari bekerdja dalam alam suasana Tri-Komando Rakjat. Pelaksanaan Tri-Komando Rakjat ini dengan sesempurna-sempurnanja adalah termasuk suatu tanggung-djawab dan kesadaran sebagai warganegara Indonesia jang sedjati.

Dalam pada itu djangan pula kita lupakan bahwa tudjuan kita terachir adalah terlaksananja Amanat Penderitaan Rakjat, dan dalam hal ini kita tidak boleh gagal, karena kegagalan Revolusi akan membawa Rakjat kedalam suasana kontra-revolusi dan penderitaan jang sangat tjelaka.

Pada achirnja maka saja sebagai Menteri Penerangan jang berkejakinan penuh terhadap pers nasional dan para wartawan sebagai alat utama bagi pembentuk pendapat umum (public opinion) jang mendjadi soko-guru daripada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan bagi kelantjaran Revolusi Indonesia, supaja dunia pers, baik Nasional ataupun Internasional di Indonesia, mendjundjung tinggi kewadjiban luhur daripada kewartawanan untuk mengambil bagian jang penting dalam melantjarkan pemutaran roda revolusi.

Maka dengan memberi sumbangan ini, kita akan memperhatikan benar-benar kode kehormatan pers dan wartawan berdjalan menurut, kesusilaan dan kepribadian Bangsa Indonesia jang sedang ber-revolusi. Saja akan memperhatikan benar-benar supaja sumbangan itu berdjalan baik dengan memperhatikan peraturan² Negara dan kesusilaan kewartawanan.

Berita-berita jang bersemangat kontra-revolusioner atau anti-Indonesia akan diberantas dan ditekan habis-habisan dengan segala alat negara.

Selandjutnja saja akan memberikan kelonggaran2 bagi para wartawan dalam perkundjungannja kedaerah-daerah di Indonesia dan teristimewa kedaerah Mandala perdjuangan pembebasan Irian Barat.

Idjazah penghargaan.

Saja akan mengusulkan pula kepada Presiden/Panglima Tertinggi sebagai Panglima Besar Revolusi Indonesia supaja setiap tahun menjampaikan idjazah penghargaan pada wartawan dalam bidangnja masing-masing jang terbaik mendjalankan tugasnja seperti jang

saja terangkan diatas untuk kepentingan revolusi Indonesia dan terutama dalam tugas pembebasan dan pembangunan Irian Barat oleh Republik Indonesia.

Saja akan memperhatikan benar2 kelantjaran persuratkabaran, dibidang supply (peralatan), komunikasi, distribusi, transport, perumahan, sebagai alat mass-education. Djuga djadikanlah hendaknja Departemen Penerangan sebagai sumber bagi newsgetting dan checking centre dari pemberitaan dalam segala bidang untuk menaikkan taraf persuratkabaran di Republik Indonesia.

Kepada wartawan Nasional saja mengharapkan supaja mereka menghindarkan warna jang terlampau sefihak sehingga menimbulkan pada pembatja warna kepartaian jang menjampingkan kesatuan-nasional dan sedapat-dapatnja supaja kabar2 itu berwarna Nasional dalam kesatuan revolusi.

Selandjutnja kepada wartawan Internasional saja mengharapkan pula bahwa kabar2 djangan terlampau menggambarkan pertentangan blok sehingga menimbulkan kesan hendak memasukkan ketegangan internasional ke Indonesia. Berhubung dengan itu tidaklah saja melebihi permintaan saja kepada wartawan2 Nasional dan Internasional supaja menjesuaikan pemberitaannja dengan ukuran dan kepribadian Indonesia dibidang-bidang politik, ekonomi dan kebudajaan.

Tri-Komando Rakjat membebaskan tanah-air Indonesia jang bernama Irian Barat — bernama demikian karena terletak disebelah kulon meridian 141 Lintang Timur — dan pelaksanaan pembangunan semesta didjalankan setjara serentak, simultan, djuga dan malahan dalam tahun 1962 ini.

Kabar-kabar tentang kembalinja orang Indonesia ke Irian Barat ketempat seperti Waigeo, Gag, Fakfak, Kaimana dan Kotabaru dalam rangka pelaksanaan Tri-Komando Rakjat 19 Desember 1961 kian hari kian bertambah pesat dan santer, semangat pemberontakan kepada kolonialis Belanda diseluruh Irian Barat, dari Merauke sampai Kotabaru, disekeliling djazirah Vogelkop, memberi rintisan, akan berbunjinja lontjeng maut kolonialisme imperialisme Belanda dalam tahun 1962 ini djua. Seluruh 96 djuta Rakjat Indonesia sedjak kini sudah bertekad bulat akan mengibarkan Sang Merah Putih di Kotabaru, dipinggir danau Sentani dan dipesisir Barat Samudera Pasifik Barat didekat meridian 141 Lintang Timur dalam tahun 1962. Disanalah di Kotabaru itu kita Rakjat Indonesia akan berganti tahun dan ber-

idul fitri 1963. Kesanalah kita pergi hendak mendirikan dan membina pemerintah nasional Republik Indonesia dibawah kibaran Sang Merah Putih dan disanalah djuga kita melaksanakan pembangunan semesta disegala bidang kehidupan dan penghidupan untuk menaikkan taraf — peradaban Bangsa Indonesia kita sendiri ditanah Irian Barat bagi pembebasan 3/4 djuta orang Irian ditanah seluas negeri Perantjis di Eropah Barat!

Pembebasan Irian Barat dan Pembangunan Semesta adalah uratnadi Revolusi Indonesia dalam tahun 1962 ini!

Berbahagialah semua wartawan Nasional dan Internasional jang didalam hidup hidajahnja dapat memberi sumbangan jang diharapkan oleh Revolusi Republik Indonesia dalam menjelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai hasil perdjuangan kemerdekaan, berdasarkan Proklamasi kemerdekaan jang luhur dan jang kita djundjung tinggi. Achirnja Menteri menjerukan, marilah kita bekerdja serentak menggerakkan pena perdjuangan mendorongkan Revolusi dan menegakkan Proklamasi sebagai mahasumber kemerdekaan dan demokrasi terpimpin! Ambil bahagianlah seluruh wartawan dalam pembebasan tanah-air Irian Barat dalam delapan bulan kurang empat hari lagi jang mendatang dalam tahun 1962 ini djua!

* * *

Madat itu lebih berbahaja dari penjakit pes. Tetapi jang lebih berbahaja lagi daripada madat ialah „Buta Huruf”, karena tidak sadja merendahkan deradjat Bangsa, tapipun turut mematikan djiwa dan semangatnja.

R.A. Kartini

Brig. Djen. dr. Sumarno Sosroatmodjo,
Wk. Ketua I Pengurus Besar P.M.I.:

HARI PALANG MERAH SEDUNIA KE 99 DAN PALANG MERAH INDONESIA

PADA waktu kita sekarang sibuk dalam usaha untuk memasukkan Irian Barat kedalam kekuasaan Negara Republik Indonesia, kita harus melaksanakan terus pekerdjaan-pekerdjaan routine, malahan kita harus djuga mengusahakan agar hasil dari pekerdjaan-pekerdjaan routine ini sekarang lebih baik, lebih efisien, lebih tjepat dan lebih banjak berhasil.

Sebagaimana halnja djuga dengan perajaan Hari Buruh 1 Mei jang baru lalu, demikian djuga nanti dengan perajaan Kebangkitan Nasional 20 Mei j.a.d., Hari 8 Mei, Hari Palang Merah Sedunia ini perlu pula kita peringati.

Kita ingin mengadjak tiap-tiap teman seperdjuangan, tiap-tiap anggota pengurus Palang Merah, dari tjabang maupun dari pusat, untuk menjadari bahwa 99 tahun jang lalu, bukan merupakan suatu kebiasaan didalam peperangan, musuh jang luka, jang sakit, jang telah ditawan, jang terapung-apung ditengah laut, tidak berdaja lagi, mendapat perlakuan jang baik dari lawannja, mendapat perlakuan jang

* * *

patut, ditindjau dari segi peri kemanusiaan.

Pada waktu itu, merupakan hal jang biasa, djika seseorang jang luka, jang sakit, jang ditawan, jang terapung-apung dilaut, dibiarkan tidak mendapat pertolongan dari lawannja, hanja oleh karena tergolong musuhnja. Mereka dibiarkan berdarah sampai mati, mereka dibiarkan tidak terawat, mereka dibiarkan dalam keadaan jang sangat kotor, jang pada umumnja mengakibatkan lebih beratnja penderitaan dari lawan ini. Tidak sedikit diantara jang sakit, jang

luka, dan jang tertawan, oleh kerena penderitaan jang hebat ini ingin mati sadja, dari pada dianiaja atau dibiarkan dalam keadaan jang sangat menderita ini. Mereka lebih baik berontak dengan mempertaruhkan djiwanja dari pada dihina dan dapat perlakuan jang menurunkan martabat kemanusiaannja.

Pada masa demikianlah maka Henry Dunant 99 tahun jang lalu dapat mejakinkan dunia bahwa sikap demikian tidak patut ada, dan kita dapat digolongkan pada negara² jang biadab, djika sesuatu negara membiarkan warganegaranja melakukan hal² jang sudah mulai dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan.

Pada waktu itu maka persetudjuan antar negara jang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1864, merupakan kemenangan prinsip, bahwa setiap manusia jang tidak berdaja lagi, oleh karena sesuatu hal berhak mendapat bantuan dari sesamanja, malahan berhak mendapat pertolongan dari lawannja.

Sesudah itu hingga kini Palang Merah mendapat kemadjuan-kemadjuan, bukan orang jang luka, sakit, akibat pertempuran-pertempuran didarat sadja jang mendapat pertolongan dengan tidak membeda-bedakan apakah lawan atau kawan, tapi kemudian disusul dengan Konpensi ke-II jang disebut Konpensi maritim, jang mengatur orang jang luka dan sakit serta orang jang tidak berdaja terapung-apung dilaut, mendapat hak untuk mendapat bantuan jang sifat bantuan ini tidak membeda-bedakan antara lawan dan kawan.

Dalam tahun 1929 disusul dengan Konpensi ke-III jang mengatur perlakuan setjara perikemanusiaan terhadap tiap-tiap tawanan perang, sedangkan pada tahun 1949 disetudjui Konvensi Djenewa jang ke-IV, jang mengatur perlindungan terhadap rakjat sipil, jang tidak turut bertempur jang berada diwilajah jang diduduki oleh musuh.

Sekarang sedang dipersiapkan Konvensi Djenewa jang ke-V, ialah Peraturan Perlindungan Masjarakat.

Konvensi-konvensi tersebut diatas jang berkisar dilapangan perikemanusiaan ditudjukan untuk dapat melindungi orang-orang jang didalam keadaan perang disebut musuh, oleh karena tidak berdaja lagi berhubung dengan kekalahannja, atau berhubung dengan didudukinja tempat tinggalnja, sehingga tidak berdaja lagi.

Musuh ini tidak berdaja oleh karena luka, oleh karena terapung-apung dilaut, oleh karena kehilangan perlindungan dari pemerin-

tahnja, jang tidak ada lagi diwilajahnja itu.

Konvensi-konvensi ini memang merupakan kemadjuan didalam fikiran dunia tentang martabat manusia, tentang hak² dasar dari manusia, meskipun hanja berlaku pada waktu keadaan perang, pada waktu perang, dan pada tiap² pertempuran.

Akan tetapi peperangan-peperangan jang lalu membuktikan bahwa usaha Palang Merah ini sangat terbatas, sangat tergantung dari pada komandannja, tergantung dari panglimanja tergantung banjak hal lain, apakah usaha-usaha perikemanusiaan dilaksanakan menurut jang diinginkan oleh dunia, atau tidak.

Memang timbulnja idee, sehingga tersusun Konvensi-konvensi tadi, disebabkan djustru oleh karena perlakuan jang sewenang-wenang, perlakuan jang meliwati batas² perikemanusiaan pada waktu peperangan dan diwaktu pertempuran.

Memang Palang Merah lahir ditengah-tengah pertempuran, lahir oleh karena ingin turut serta dalam usaha untuk mengurangi penderitaan sesama manusia.

Akan tetapi selama masih ada peperangan, selama masih adapertempuran dengan keadaan-keadaan dan komandan jang beraneka warna, selama itu masih belum ada kepastian apakah penderitaan manusia akibat dari peperangan ini dapat dihilangkan.

Oleh karena itu dunia jang tjinta damai berpendapat, bahwa satu-satunja djalan untuk menghilangkan penderitaan-penderitaan tadi, mentjegah adanja peperangan, mentjegah sebab dari pada bentjana jang disebut perang tadi.

Akan tetapi njatanja pada masa sekarang dunia selalu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bimbang berhubung dengan adanja perang dingin dan sifat² baru dari sendjata perang pada dewasa ini, dan berhubung dengan perkembangan tjara perang jang semesta sekarang ini.

Oleh karena adanja konvensi-konvensi tadi, maka berkembanglah kegiatan² untuk mempersiapkan diri ditiap-tiap negara, supaja sebanjak mungkin dari warganegaranja mampu memberikan bantuan pertama terhadap tiap orang jang memerlukannja. Kegiatan² ini merupakan program jang utama dari Palang Merah.

Kita anggap ini sangat penting oleh karena kegiatan². ini, tidak sadja merupakan usaha realisasi dari arti perikemanusiaan, tetapi pula oleh karena kemampuan jang

didapat sebagai hasil dari kegiatan² jang merupakan terutama pendidikan² ketangkasan memberi bantuan pertama, dapat dipergunakan untuk memberi bantuan tidak sadja kepada korban pertempuran, tetapi djuga kepada korban tiap² bentjana, termasuk bentjana alam, setjara teratur, tjepat dan tepat.

Bagi kita bangsa Indonesia jang mempunjai Pantja Sila sebagai tjita-tjita bangsa, usaha-usaha Palang Merah sadja tidak tjukup untuk dapat memuaskan keinginan bangsa dalam merealisasikan usaha dalam lapangan perikemanusiaan.

Palang Merah sadja memang tidak mampu dan tidak berhak untuk mentjegah peperangan, sebagaimana tertjantum dalam mukadimah dari rentjana peraturan jang sedang dipersiapkan mengenai pembatasan bahaja jang mengantjam rakjat sipil pada waktu perang, atau disebut djuga Peraturan Perlindungan Masjarakat.

Pada Mukadimah tadi Palang Merah mengatakan:

> Djika seandainja Palang Merah mempunjai hak penuh untuk mengatur hubungan antara negara dan negara, maka perang sebagai tjara untuk menjelesaikan persengketaan antara negara akan dilarangnja.

Indonesia malahan berpendapat, tidak mudah perang dapat ditjegah, djika dunia jang ingin damai tidak insjaf akan sebab perang jang sebenarnja.

Banjak orang berpendapat bahwa sengketa antara negara jang berideologi berlainan dapat membahajakan adanja perang jang harus kita tjegah ini. Sebaliknja sedjarah dunia membuktikan, bahwa sengketa bersendjata jang dulu pernah timbul antara ideologi² jang tidak sama, selalu pada suatu waktu berhenti dengan sendirinja dan golongan² jang berideologi lain tadi, ternjata kemudian dapat hidup terus, berdampingan setjara damai, dan dapat bersama-sama memperdjuangkan keselamatan dan kesedjahteraan sesamanja. Sehingga kita berpendapat, sebagaimana halnja telah diutjapkan oleh PJM Presiden di P.B.B. maupun dimuka konperensi negara² bebas di Beograd jang baru lalu, bahwa bukan perbedaan ideologi jang sebenarnja menjebabkan adanja sengketa, menjebabkan adanja perang dingin didunia, akan tetapi kepentingan jang bertentangan antara bangsa², jang tidak bebas menentukan keinginannja untuk mendapatkan kesedjahteraannja, jang tertekan, jang dieksploitir dan golongan² jang tetap mau mendjadjah, jang tetap mau menguasai

golongan² manusia lainnja, setjara politis maupun ekonomis untuk terus-menerus memperkaja dirinja sendiri.

Tugas bangsa Indonesialah untuk mendjelaskan ini semua kepada dunia luar, dan tugas Indonesia pulalah untuk menghilangkan sisa², tjara menguasai, sisa² tjara penguasaan ini.

Pengalaman bertahun-tahun jang diderita oleh Indonesia sebagai bangsa jang terdjadjah, membuktikan, bahwa kemiskinan dan kemelaratan akibat dari pendjadjahan dan sistim penguasaan tadi, kerap kali melebihi penderitaan jang disebabkan oleh karena perang.

Desakan² Indonesia untuk setjara damai menjudahi pendjadjahan dan sistim penguasaan bangsa oleh golongan jang lainnja merupakan bukti bahwa Indonesia insjaf akan bahaja perang, tetapi sebaliknja Indonesia menginsjafi pula akan adanja penderitaan jang lebih hebat oleh karena pendjadjahan.

Ini merupakan satu bukti pula bahwa Indonesia setia pada ideologi bangsanja, ialah Pantja Sila jang mempunjai sendi perikemanusiaan.

Kita sebagai anggauta Palang Merah tetap bersedia melaksanakan usaha perikemanusiaan jg. ditentukan oleh Konvensi Djenewa, akan tetapi oleh karena kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui, bahwa usaha² jang ditentukan oleh Konvensi Djenewa tadi hanja merupakan usaha² minimum dalam lapangan perikemanusiaan, jang tidak mengenai soal pokok, maka kita ingin mentjegah adanja peperangan jang mengakibatkan penderitaan sesama manusia, oleh karena itu kita, sebagai bangsa Indonesia mengusahakan hilangnja pendjadjahan di Irian Barat tadi, sebanjak mungkin dengan setjara damai.

Tetapi sebaliknja bangsa Indonesia sedia dengan konfrontasi disegala bidang oleh karena insjaf bahwa hilangnja pendjadjahan merupakan usaha jang pokok untuk menghilangkan adanja penderitaan sesama manusia.

Dalam tahun ini kita sebagai anggauta Palang Merah bekerdja keras untuk membuktikan kemampuan kita dalam menjusun kesatuan Palang Merah Indonesia, membuktikan kemampuan dalam melaksanakan tugas² Palang Merah Indonesia, kemampuan dalam gerak tjepat, kemampuan dalam memberi pengertian tentang realisasi perikemanusiaan.

Sebagai rakjat Indonesia kita ikut berdjuang untuk membantu sesama manusia.

POKOK-POKOK TUGAS PALANG MERAH INDONESIA TERDIRI ATAS 3 BAGIAN:

1. Pelaksanaan Konpensi Djenewa I s/d IV diwaktu perang.
2. Membantu Negara: bantuan terhadap korban2 bentjana alam didalam dan diluar negeri, baik dalam waktu damai maupun dalam waktu perang.
3. Usaha-usaha pentjegah perang, usaha-usaha membina perdamaian bersumberkan tjita-tjita Nasional (Pantja Sila).

Usaha jang pertama adalah tugas minimum Palang Merah Indonesia; tugas kedua dan ketiga merupakan tugas Nasional, jang sudah lebih luas lagi dari pada jang pertama. Ketiga-tiganja adalah tugas Palang Merah Indonesia setjara keseluruhan.

Dalam gambar bentuknja demikian:

TUGAS PALANG MERAH INDONESIA DALAM GAMBAR
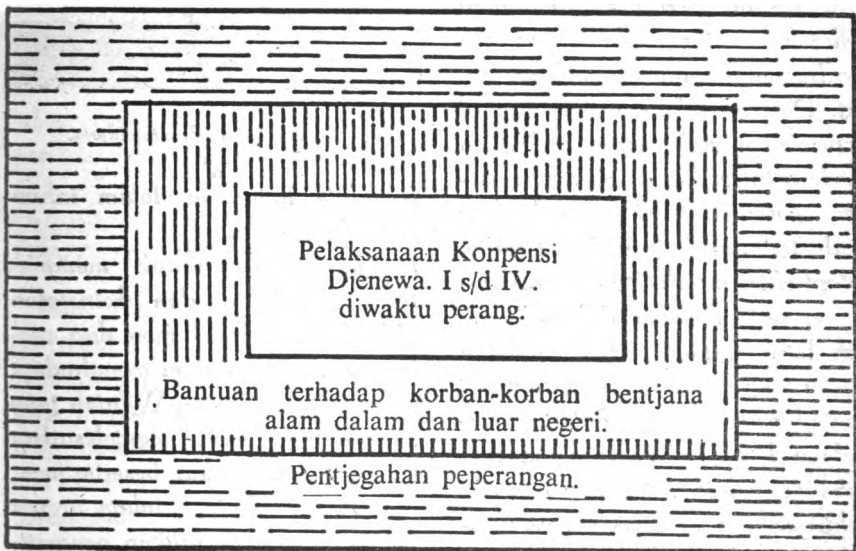
• • •

PERANG WILAJAH DAN PEMBINAAN WILAJAH DALAM RANGKA PERDJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Disusun oleh R. Soedomo Brodjomidjojo Peserta Latihan Kemiliteran Karjawan Djawa Tengah, Wakil Djapendi Jogjakarta.

PENDAHULUAN

Maksud daripada uraian sekitar masalah „Perang Wilajah dan Pembinaan Wilajah dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat" ini, tiada lain sekadar untuk menimbulkan dan meluaskan pengertian dikalangan masjarakat kita betapa perlunja pembinaan wilajah terutama dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat. Dan andaikata nanti timbul peperangan, maka perang didjaman modern ini sudah mendjadi semesta, perang total. Djadi ini tiada terbatas di Irian Barat sadja, tetapi akan mendjalar dan memandjang serta melebar didaerah-daerah lainnja. Dan sesuai dengan sistim jang kita anut, apabila nanti timbul perang, maka doktrin pembelaan kita jalah pembelaan pertahanan wilajah atau apa jang disebut doktrin „PERANG WILAJAH".

IRIAN BARAT harus kembali dalam wilajah kekuasaan Negara
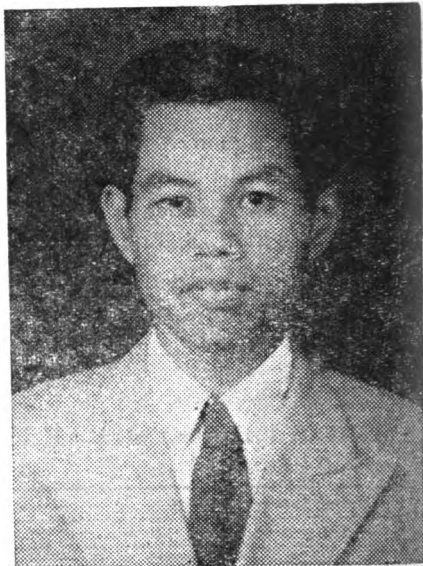
R. Soedomo Brodjowidjojo.

***

Republik Indonesia dalam tahun ini, tahun 1962.

Dengan harapan untuk mempertebal kesadaran dan keinsjafan akan haluan pertahanan dan perlawanan rakjat dalam menghadapi kemungkinan Perang Wilajah jang akan datang guna menjelesaikan sengketa Irian Barat beserta pembinaan wilajahnja, dalam uraian ini perlu pula disadjikan pengertian perang dan apa jang mendjadi politik pertahanan Negara kita sekedarnja.

Setiap warganegara Indonesia harus memberikan andil. Malahan sesuai dengan apa jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar kita, setiap warganegara berhak serta wadjib ikut serta didalam usaha pembelaan Negara. Oleh sebab itu sebagai inti daripada uraian ini adalah Pembinaan Wilajah sehubungan dengan Perang Wilajah jang mungkin akan meletus dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat, jang sangat memerlukan pengerahan tenaga dalam segala bidang, mobilisasi umum, manpower.

Chusus bagi rekan-rekan kita para Djurupenerang, semoga uraian ini dapat didjadikan sekedar tambahan bahan dalam menunaikan tugas mengabdi kepada masjarakat, Nusa dan Bangsa dalam menjelesaikan Revolusi Nasional.

PENGERTIAN INDONESIA TENTANG PERANG.

Bagi Negara Republik Indonesia telah dirumuskan pengertian akan perang, jaitu bahwa bila Indonesia berperang, itu karena ada jang menjerang atau lebih tegas lagi karena terpaksa. Lengkapnja perumusan pengertian bagi kita akan perang ini ialah sbb.:

- Perang adalah suatu hal jang dipaksakan bagi Bangsa Indonesia.
- Perang adalah tjara terachir dalam bidang politik jang dipergunakan oleh Pemerintah dan Bangsa Indonesia untuk memelihara keutuhan dan keamanan wilajah dan kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia.
- Perang memerlukan pengerahan meliputi segala usaha pekerdjaan dan kegiatan mengenai penjusunan, penambahan dan persiapan penggunaan potensi Rakjat guna pelaksanaan tugas pertahanan Negara.
- Berdasarkan pertimbangan keadaan geografi dan keamanan nasional kita, maka Indonesia menganut doktrin Perang Wilajah.

Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, didalam langkah2 persiapan perang wilajah jang dilaksanakan dimasa-masa damai ini, perlu sekali adanja usaha-usaha pembinaan wilajah jang terpimpin dan berentjana.

Seperti halnja dengan sistim pembelaan dari tiap-tiap negara jang disesuaikan, kongruen dengan politik dan ideologi daripada bangsa atau negara jang bersangkutan, maka bagi Negara kita jang berdasarkan Pantja Sila sebagai ideologi dan sumber hukum ketata-negaraan kita, djuga mempunjai pola pembelaan jang chas, jakni pola

pertahanan rakjat semesta jang bersumber pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara kita. Bahwa warganegara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Dengan demikian djelaslah, kita berperang hanja djika terpaksa dan dalam peperangan jang menganut sistim Perang Wilajah sangat dibutuhkan sukarelawan2, pengerahan dalam bidang2 tertentu, chususnja pengerahan tenaga manusia.

POLITIK PERTAHANAN R.I.

Diatas telah kami kemukakan, bahwa Indonesia berperang itu karena ada jang menjerang, halmana adalah merupakan djalan terachir untuk menjelesaikan pertikaian2 jang dipaksakan kepada Bangsa Indonesia jang tjinta damai. Bangsa Indonesia akan berperang bila terpaksa atau diserang, artinja Indonesia tidak agressif, djadi Indonesia tidak akan mulai menjerang, bila tidak diserang terlebih dahulu. Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pantja Sila dan mendjalankan politik bebas dan aktif. Dasar Negara Pantja Sila inilah jang mendjiwai dan mentjerminkan dasar daripada politik pertahanan Indonesia mendjadi sbb.:

a). bersifat defensif aktif, tetapi tidak agressif.

b). berdasarkan non-aliansi.

c). mendasarkan pertahanan Indonesia atas kekuatan sendiri.

d). sifat pertahanan negara bersifat pertahanan rakjat, sebagaimana tertjantum dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1954.

Empat dasar politik pertahanan Indonesia inilah jang perlu sekali mendapat pendjelasan berhubung dengan perdjuangan pembebasan Irian Barat, terutama sifat pertahanan Negara Indonesia.

Sebagaimana diatas telah diketengahkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII pasal 30 menjebutkan, bahwa tiap warganegara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Sjarat2 tentang pembelaan tersebut diatur dengan Undang-Undang, ialah Undang-Undang No. 29/1954 jang menjebutkan, bahwa pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakjat jang teratur dan jang diselenggarakan dibawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia. Hak dan kewadjiban warganegara untuk turut serta dalam pertahanan Negara dapat dilakukan dalam bentuk2:

* Rakjat jang terlatih untuk mendjalankan perlawanan.
* Angkatan Perang jang terdiri dari mereka jang masuknja berdasarkan perdjandjian sukarela

ALBUM

PENERANGAN

Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1962 di Istana Negara Presiden Sukarno memberikan tanda² penghargaan dan penghormatan kepada beberapa djanda pahlawan dan pahlawan jang telah berdjasa besar.

*
**

Presiden Sukarno sedang memberikan amanat pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 1962 di Istana Negara.

Presiden Sukarno sedang menerima Resolusi Buruh pada peringatan 1 Mei 1962.

*
**
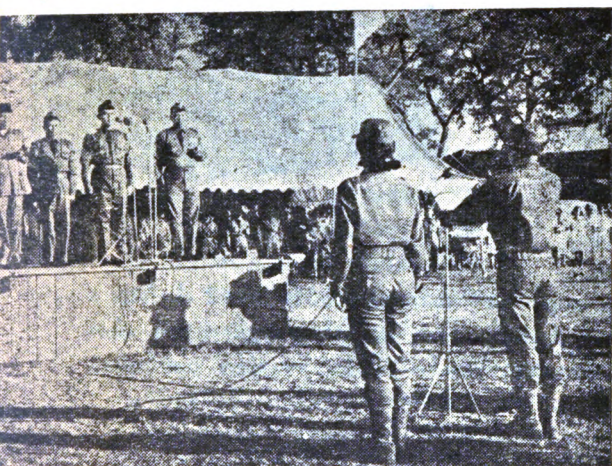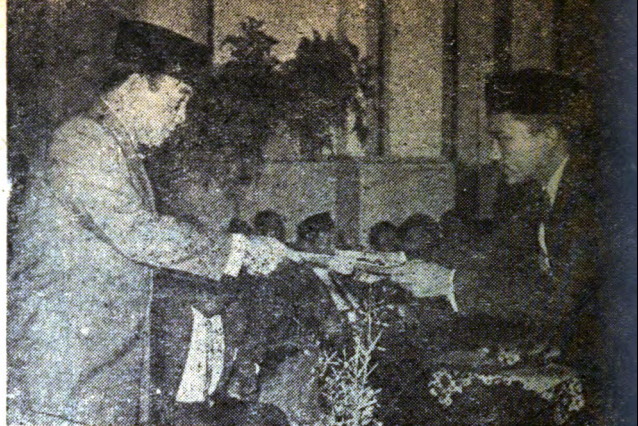
Saat pelantikan Resimen Mahadjaya oleh MKN/Kasad Djen. A.H. Nasution.

*
**

Setelah pelantikan Resimen Mahadjaya Djen. A.H. Nasution melakukan inspeksi barisan.
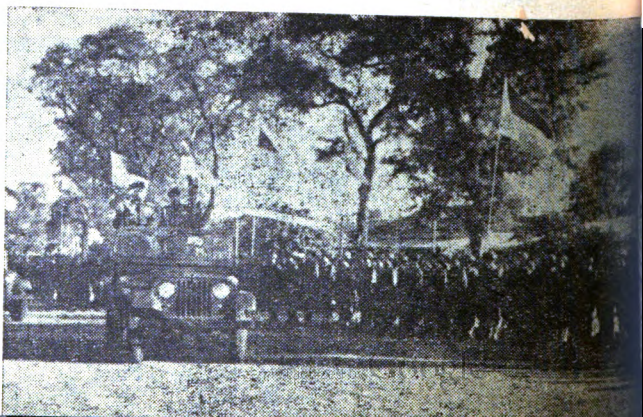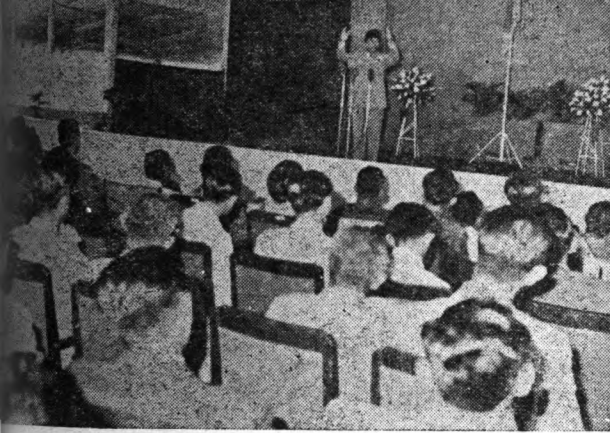
Presiden Sukarno sedang memberikan wedjangan kepada para dosen dan mahasiswa Akademi Pelajaran Niaga Veteran di Gedung Agung Jogjakarta.

**
*

*

Bapak Menteri Penerangan Prof. Mr. Muh. Yamin beramah-tamah dengan Pers Jogjakarta di Gedung Agung sewaktu berkundjung ke Jogjakarta tgl. 5 s/d 9 April 1962.

*

**
*

Para Djurupenerang seluruh Djawa Tengah dan D.I. Jogjakarta sedang mendengarkan petuah-petuah dari Bapak Menpen di Gedung Agung Jogjakarta.

Bapak Menpen sedang menguraikan persoalan Irian Barat di Gedung Agung Jogjakarta.

***
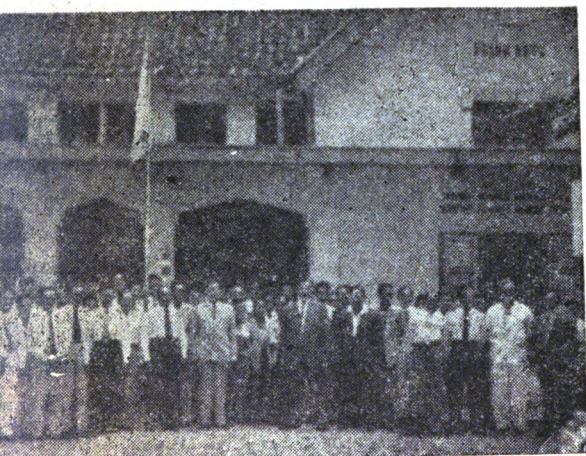
Bapak Menpen dengan rombongan bergambar bersama-sama dengan pegawai-pegawai Djapenkab. Klaten tgl. 8-4-1962.

*

***

Bapak Menpen memberikan kata-kata fatwanja kepada para pegawai Djapen di Jogjakarta.

dan mereka jang masuknja berdasarkan wadjib militer.

Selain itu masih diperlengkapi lagi dengan beberapa Undang2 dan Peraturan, misalnja Undang2 Wadjib Militer No. 40/1960, Undang2 Wadjib Latih (masih berupa rentjana), Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Pertahanan Perlawanan Rakjat atau P3R (masih berupa rentjana) dan Instruksi Penguasa Perang Pusat tentang Organisasi Pertahanan Rakjat.

Mengenai Organisasi Pertahanan Rakjat adalah merupakan landasan jang penting untuk terwudjudnja pertahanan rakjat jang teratur, karena O.P.R. ini mengandung unsur² pengerahan tenaga jang maksimal (mobilisasi) dengan tugas didaerah tidak/belum aman membantu alat² kekuasaan negara dalam bidang keamanan setjara aktif dan didaerah aman menjelenggarakan kelantjaran dan kepentingan masjarakat dilapangan keamanan, perekonomian dan pembangunan, terutama masjarakat desa. Sehubungan dengan itu, mengenai masalah pemanggilan dan pengerahannja semua warganegara Indonesia dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara guna perdjuangan pembebasan Irian Barat, oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang R.I. pada tanggal 6 Pebruari 1962 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1962 jang berlaku surut hingga tgl. 19 Desember 1961, jaitu hari tanggal diutjapkannja KOMANDO RAKJAT, jang pada pokoknja berisi perintah jang ditudjukan kepada rakjat Indonesia, djuga jang berada didaerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri-Komando, jaitu I. Gagalkanlah pembentukan „Negara Boneka Papua" buatan Belanda-kolonial, II. Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, III. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Sebagai follow-up Komando Rakjat itu, dalam PERPU ini antara lain dinjatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia, baik laki2 maupun wanita, jang berumur antara 18 sampai 48 tahun dapat diwadjibkan untuk mendjalankan kewadjiban² dalam rangka penjelenggaraan pertahanan sipil, serta kewadjiban untuk mengikuti latihan2 jang berhubungan dengan kewadjiban itu. Setiap warganegara, baik laki2 maupun wanita, jang berumur antara 18 sampai dengan 40 tahun, dapat diwadjibkan mendjalankan kewadjiban2 untuk membantu kesatuan2 Angkatan Perang pada chususnja dan Angkatan Bersendjata pada

umumnja dalam melakukan pertempuran-pertempuran, baik dalam bentuk perlawanan rakjat aktif, maupun dalam bentuk tjadangan umum jang terlatih teratur, berikut segala kewadjiban guna mengikuti latihan2 jang diperlukan.

KONSEPSI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pertahanan berarti perlawanan atau perlindungan terhadap setiap atau semua bentuk dari serangan musuh dengan menggunakan semua alat dan tjara jang tersedia. Sementara itu harus diambil imbangan tertentu antara luas negara dan kekuatan tentaranja. Untuk mewudjudkan suatu pertahanan jang kokoh, sebagai sjarat mutlak harus diperhatikan sungguh2 luas daerah jang akan dipertahankan. Guna pertahanan negara kita jang selandjutnja disebut Pertahanan Wilajah jang luas, jang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan daerah territoir lautan jang luas, maka diperlukan Angkatan Perang jang harmonis, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara jang berintikan kesatuan2 mobil dipusat dan pertahanan territorial didaerah2.

Negara Republik Indonesia mendjalankan politik nasional jang didasarkan kepada penjusunan kekuatan nasional, jang terdiri atas perdjalinan daripada unsur2 dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan militer. Untuk mentjapai tudjuan nasionalnja, maka keluar didasarkan atas politik bebas aktif dan kedalam ditudjukan untuk mentjapai stabilisasi dalam segala lapangan. Sedjiwa dengan politik nasional negara kita, maka ada beberapa faktor strategis pula jang perlu diperhatikan dalam penjusunan suatu konsep pertahanan, jang mendjadi pedoman bagi pembinaan dan penjelenggaraan perang wilajah jang akan dihadapi, jang dengan sendirinja mendjadi pegangan pula bagi pembinaan wilajahnja. Dari luar konsepsi pertahanan kita didasarkan atas perhitungan/pertimbangan daripada kemungkinan2 jang dapat terdjadi dan merupakan bahaja serangan musuh dalam bentuk perang dingin, perang terbatas, serangan terbatas dan perang umum. Dari dalam konsepsi didasarkan atas pertimbangan dan perhitungan dalam menghadapi tantangan2 dalam bentuk tantangan2 keamanan/pemberontakan dalam negeri, stabilisasi disegala lapangan dan perdjuangan pembebasan Irian Barat. Dengan demikian konsepsi politik pertahanan kita mempunjai kebidjaksanaan keluar maupun kedalam menjiapkan dan menjediakan kekuatan untuk mendukung dan menghadapi akibat2 daripada poli-

tik bebas dan aktif, perdjuangan pembebasan Irian Barat, dan keamanan dalam negeri, serta pembangunan nasional kearah Indonesia jang kuat, adil dan makmur. Setjara tegasnja, keluar dalam rangka politik bebas aktif kita tidak mau dipaksa oleh negara siapapun, kita tidak mau mengikat diri pada pakta2 militer, kita tetap ingin damai dengan segala bangsa, dalam segala lapangan. Sedangkan kedalam, kita melaksanakan kesiapan rakjat dengan djalan membangkitkan kesadaran dan menumbuhkan kesanggupan menghadapi kemungkinan bahaja serangan, sebagai akibat politik tersebut diatas dan keamanan dalam negeri, dengan menggunakan sumber2 kekajaan alam untuk keperluan tersebut.

Sebagai ringkasan daripada kebidjaksanaan politik pertahanan kita jang bertjorak defensif aktif tidak agressif dapatlah dikatakan, bahwa:

- Indonesia harus sanggup mempertahankan sendiri wilajahnja dari Sabang sampai Merauke.
- Dalam melaksanakan pertahanan wilajahnja dengan kekuatan sendiri.
- Tidak mau menjerang negara lain dan hanja berperang bila diserang.
- Selalu berpendirian ingin memelihara sikap damai dengan segala bangsa.

Tegasnja, politik pertahanan kita ialah mendjalankan, melantjarkan dan mengamankan Manipol, bertjorak defensif aktif dan tidak agressif dengan penggunaan kekuatan nasional disesuaikan kepada kemampuan2 jang dapat kita tjapai setjara maksimal mengingat keadaan dan waktu.

PERANG WILAJAH

Diatas telah kami kemukakan, bahwa bagi kita perang adalah mengandung unsur2 terpaksa, politik, pengerahan dengan sistim perang wilajah. Dengan memperhatikan beberapa faktor serta penilaiannja dalam politik pertahanan kita jang dapat mempengaruhinja djelaslah, bahwa matjam perang jang kita pilih itu adalah Perang Wilajah.

Adapun jang dimaksud dengan Perang Wilajah ini ialah bentuk perang jang bersifat semesta, jang menggunakan seluruh kekuatan nasional setjara semesta (total), agar dengan pembalasan umum (counter-offensive) dapat menentukan kesudahan perang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Untuk lebih djelasnja, pengertian Perang Wilajah ini dapat disimpulkan sbb.:

- dengan wilajah dimaksudkan wilajah negara jang mentjakup bumi, laut dan udara.

* *pengertian kekuatan nasional dimaksud kemampuan nasional dalam bidang2 militer, politik, ekonomi, sosial, spirituil dan industri.*
* *semesta (total) diartikan semesta dalam objek, subjek dan methode.*
* *dengan kekuatan militer maupun militant dimaksudkan seluruh kekuatan nasional jang setjara total langsung dapat dipergunakan untuk kepentingan pertahanan, dengan mengutamakan kekuatan militer sebagai unsur kekuatannja.*
* *serangan balasan umum (counter-offensive) diartikan serangan balas jang tidak hanja terbatas didalam wilajah negara sendiri.*

Perang Wilajah ini didalam pelaksanaannja adalah mengadakan perlawanan setjara terus-menerus oleh kekuatan2 besar maupun ketjil dengan sembojan tidak mau menjerah serta bertindak setjara kenjal (flexible) dan dibawah pimpinan jang kontinu. Jang terpenting adalah kita tidak mengenal frontlijn (garis depan). Frontlijn ditentukan oleh kita sendiri menurut waktu dan keadaan.

Strategi dipusatkan dan pelaksanaan operasinja, dalam hal ini kampanje dan pertempuran, didesentralisir.

Kita harus mempergunakan ruang dan waktu setjara kenjal dan dengan demikian tjiri2 (karakteristik) Perang Wilajah adalah perang besar-besaran, teratur dan modern dengan memperhatikan prinsip2 perang, jang mempunjai komando sentral dan pelaksanaan2 jang didesentralisir, tidak terikat pada batas2 jang dipergunakan dalam perang regulair-konvensionil.

Selandjutnja Perang Wilajah ini dilakukan dalam tiga fase, ialah pertama fase jang bersifat strategis defensif, kedua fase pengikatan dan konsolidasi Wehrkreise dan ketiga fase serangan balas (strategis offensif).

Fase pertama: bersifat frontal strategis defensif, ditudjukan untuk menghantjurkan atau menghalau musuh dengan pertempuran2 jang menentukan serta mengadakan operasi2 strategis dengan tudjuan mengatjau-balaukan kekuatan tempur musuh, menghambat gerakan2 dengan maksud memperoleh ruang dan waktu untuk mendjamin keutuhan kita untuk beralih kefase pengikatan dan konsolidasi Wehrkreise bila diperlukan.

Fase kedua: fase pengikatan dan konsolidasi Wehrkreise, suatu fase peralihan dari fase frontal karena musuh dapat menerobos dan menduduki wilajah, dalam mana di-

adakan usaha2 dan kegiatan dengan tudjuan menentang setjara terus-menerus kekuatan musuh dan mengadakan konsolidasi untuk mendjamin kelangsungan kemerdekaan Negara dan Bangsa (aksi gerilja).

Fase ketiga: fase siasat serangan balas (strategis offensif), ditudjukan setelah dapat mengadakan konsolidasi kekuatan, mengadakan serangan balas sebagai tindakan terachir untuk kesudahan perang.

Prinsip pertahanan wilajah ini kalau diresumir lagi ialah tidak mengenal menjerah, tidak mengenal frontlijn dan mempunjai fase2 konvensionil, gerilja, dan kembali kekonvensionil, baik didalam active maupun non-active situation.

PEMBINAAN WILAJAH

Pemerintah Republik Indonesia mengulurkan tangan bersedia menjelesaikan Irian Barat tanpa pertumpahan darah, apabila pemerintah Belanda bersedia berunding dengan kita atas dasar penjerahan pemerintahan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dan sebagai konsekwensi daripada pelaksanaan Tri Komando Rakjat, kalau Belanda masih tetap mau melandjutkan kolonialisme di Tanah Air kita Irian Barat, dengan memetjah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, kita terpaksa menempuh djalan lain. Dan alternatif jang harus kita tempuh tiada lain ialah perang. Jang harus mendjadi perhatian kita jalah kalau timbul perang, jang mendjadi adjang peperangan kemungkinan tidak hanja terbatas diterritorial Irian Barat sadja, tetapi djuga dapat merembet dan mendjalar di-daerah² lainnja.

Oleh sebab itu dan mengingat pula faktor² lainnja serta azas² politik pertahanan kita, bila Belanda masih tetap membandel, berkepala batu, bersitegang hendak melandjutkan pendjadjahannja ditanah air kita Irian Barat, tiada lain akan timbul perang dengan sistim Perang Wilajah. Dan sebagai akibat daripada sistim Perang Wilajah jang akan datang dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat jang mendjadi program Kabinet Kerdja dan mendjadi tudjuan djangka pendek Revolusi kita harus kembali kedalam wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia tahun 1962 ini, maka sangat penting sekali adanja pembinaan wilajah. Kita harus mempersiapkan kemampuan daripada wilajah dan isinja guna pelaksanaan kemungkinan perang pembebasan Irian Barat. Guna perang pembebasan Irian Barat ini kita akan menggunakan kekuatan dan kemampuan nasional dalam bidang2 pertahanan dan perlawanan serta bidang2

lainnja ialah politik, ekonomi, sosial, spirituil dan materiil.

Unsur pembinaan wilajah dalam pertahanan negara kita guna menghadapi perang jang mungkin akan datang ini adalah merupakan suatu faktor utama jang perlu disiapkan setjara teratur. Dikatakan mendjadi faktor utama oleh karena keadaan struktur sosial, ekonomi dan politik penduduk daripada masjarakat Indonesia, jang perlu dikembangkan sedemikian rupa kemampuannja buat kepentingan keamanan dan pertahanan negara dalam menjelesaikan Revolusi Nasional, merebut kembali Irian Barat.

Wilajah Republik Indonesia jang terdiri dari kurang lebih 3.000 kepulauan besar ketjil jang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan kruisposisi:

- *djembatan antara Asia dan Australia.*
- *saluran antara semudra Hindia dan Pasifik.*
- *garis komunikasi SEATO melalui Indonesia.*

Mengingat kedudukan Indonesia jang demikian itu, Indonesia harus mempunjai pertahanan jang kuat sekali. Dengan keadaan geografis sematjam ini, dilihat dari segi pertahanan chususnja dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat, wilajah Indonesia ini harus diusahakan dibagi-bagi mendjadi beberapa wilajah pertahanan jang akan merupakan centrum dan landasan untuk meneruskan perlawanan bagi kegiatan² pasukan regulair dan pasukan perlawanan rakjat.

Bagian2 wilajah pertahanan tersebut merupakan kompartimen2 strategis jang didalam menjelenggarakan perlawanan mempunjai dua unsur pokok, jaitu unsur perlawanan oleh kesatuan2 regulair dan unsur perlawanan dari pasukan² perlawanan rakjat. Kedua unsur perlawanan ini meliputi kekuatan2 dibidang politik, ekonomi, sosial, psychologi dan militer.

Agar tiap wilajah dapat berdiri sendiri mengadakan perlawanan dan selfsupporting untuk membela perlawanan dalam menghadapi perang wilajah dalam arti jang luas, maka suatu hal jang chusus diperlukan ialah adanja pembinaan-pembinaan sbb.:

a). membina dan mengendalikan WILAJAH itu, agar mampu selfsupporting dalam masa perang untuk membekali perlawanan-perlawanan jang luas dalam wilajah itu.

b). membina dan mengendalikan MANUSIA-MANUSIA didalam wilajah itu, untuk mengadakan perlawanan dan pertahanan.

c). *membina dan mengendalikan PEMERINTAH dalam keadaan darurat dalam rangka Undang-Undang Keadaan Bahaja, agar usaha-usaha tersebut diatas dapat terselenggara dan diamankan.*

Tegasnja pembinaan wilajah sehubungan dengan perang wilajah dalam rangka perdjuangan pembebasan Irian Barat adalah dukungan territorial seluas-luasnja, wilajah dan segala isinja digerakkan. Pembinaan terhadap unsur wilajah dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan logistik; pembinaan terhadap unsur manusia dengan aspek ideologi, psychologi dan pengerahan segala usaha pekerdjaan dan kegiatan mengenai perentjanaan, penjusunan, penambahan dan persiapan penggunaan potensi Rakjat, sukarelawan, guna pelaksanaan tugas pertahanan negara menjelesaikan pembebasan Irian Barat. Kewibawaan Pemerintah harus tetap dirasakan oleh masjarakat sekalipun seandainja sesuatu daerah diduduki oleh lawan.

Kita harus menjadari, bahwa perang wilajah dalam rangka penjelesaian pembebasan Irian Barat sangat diperlukan adanja daja ketahanan, memperkuat garis depan dan garis belakang. Oleh karena itu guna pertahanan dan perlawanan kita, serasi pengertian bagi Indonesia tentang perang, dibutuhkan adanja kesiap-siagaan, tidak hanja bagi Angkatan Perang sadja, akan tetapi sangat dibutuhkannja pengerahan tenaga seluruh rakjat dan dalam segala bidang. Sedjiwa dengan Undang-Undang Dasar 1945 setiap warganegara berhak dan wadjib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Demikian djuga serasi dengan ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS, politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandaskan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperintjian dan berpangkal kepada kekuatan rakjat. Pertahanan kita bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme jang diwudjudkan dalam bentuk pertahanan semesta oleh Rakjat terlatih dan Angkatan Perang inti dengan sistim personil wadjib bela umum, jakni tentara sukarela jang diberi status hukum oleh kewenangan Undang-Undang Wadjib Militer, Wadjib Latih bagi Rakjat dll. dalam rangka wadjib bela umum jang berlaku bagi tiap warganegara.

Home-front atau garis belakang besar pengaruhnja terhadap operasi² jang dilantjarkan difront. Weerbaarheid atau daja ketahanan, kesiap-siagaan masjarakat dalam menghadapi segala kemungkinan harus dipupuk, dibina dan ditingkatkan. Dengan demikian djelas-

lah, bahwa Irian Barat memanggil-manggil kita, seluruh rakjat, pemuda-pemudi, tua-muda. Pendek kata pengerahan tenaga rakjat, demi perdjuangan pembebasan Irian Barat. Dengan djalan apapun dan konsekwensi jang bagaimana pun, sesuai dengan program Kabinet Kerdja dan jang mendjadi tudjuan djangka pendek Irian Barat harus segera kembali kedalam wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia dalam tahun 1962 ini.

PENUTUP.

Berhubung dengan diperlukannja kesiap-siagaan rakjat pengerahan meliputi segala usaha pekerdjaan dan kegiatan mengenai penjusunan, penambahan dan persiapan penggunaan potensi rakjat dalam rangka pembinaan wilajah sehubungan dengan perang wilajah jang kemungkinan besar akan meletus, maka Djurupenerang mempunjai tugas jang tidak ringan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan wilajah atau desa. Djurupenerang antara lain mempunjai tugas mengutamakan indoktrinasi pertahanan sipil, pembinaan terhadap objek jg. menjangkut selfsupporting beras, operasi gerakan makmur dan gerakan koperasi, serta pembinaan keamanan dan pengamanan desa. Dalam bidang mental Djurupenerang harus memberikan dan membina pengetahuan dan pengertian kepada penduduk masalah pertahanan dan pembangunan nasional, membina dan membangkitkan public opnion jang sehat.

Pendek kata para Djurupenerang, terutama sehubungan dengan pembinaan wilajah dalam rangka mentjapai tudjuan nasional, chususnja pembebasan Irian Barat jang harus segera kembali dalam wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia dalam tahun 1962 ini, harus lebih giat, sesuai dengan lambang obor penerangan, laksana api nan tak kundjung padam, membina wilajah dan masjarakat serta segala isinja.

* * *

KOPERASI PERUMAHAN

Oleh : G. Hutapea.

DALAM bulan Nopember 1960 Gubernur Kepala Daerah Djakarta Raya telah mengeluarkan pengumuman tentang pembangunan rumah2 minimum oleh perusahaan2 bagi buruh2nja. Maksudnja jang utama adalah untuk memperbaiki keadaan perumahan di Djakarta Raya, terutama bagi buruh² perusahaan² swasta dalam bidang perindustrian.

Untuk itu diatur kerdja-sama antara Pemerintah dan rakjat, dalam hal mana Pemerintah Daerah membantu mendapatkan tanah dan bahan2 bangunan tertentu. Biaja untuk rumah minimum ini ditaksir antara Rp. 95.000 dan Rp. 450.000. Pengusaha2 swasta jang memerlukan harus menjetorkan Rp. 50.000, djumlah mana nanti akan diperhitungkan dengan harga rumah.

JAJASAN PEBMANGUNAN PERUMAHAN.

Disamping itu perlu djuga diketahui, bahwa pada bulan Oktober 1961 telah dibentuk pula Jajasan Pembangunan Perumahan Indonesia di Djakarta.

Maksud dan tudjuan untuk melaksanakan pembangunan rumah2 rakjat jang comfortable, tahan lama, harga murah, memenuhi norma2 kesusilaan dan kesehatan. Rumah2 itu dapat disewakan, didjual tunai atau didjual setjara beli-sewa (setjara angsuran) kepada jang berhasrat untuk memilikinja. Rumah2 jang akan didirikan mempunjai beberapa type, dan harganja meliputi antara Rp. 120.000 s/d. Rp. 350.000 menurut type dan luas. Tanah2 untuk itu sudah disediakan. Sjarat2 pembelian dengan angsuran antara lain, harus membajar pertama kali sedikitnja 30% dari harga rumah jang akan dibeli. Sisanja dapat diangsur dalam waktu paling lama 15 tahun.

PENGELUARAN BESAR AKIBAT KESULITAN PERUMAHAN.

Mengingat sangat banjaknja Pemerintah harus mengeluarkan biaja setiap tahun untuk membajar ongkos sewa penginapan pegawai2nja di Hotel atau Losemen, kesempatan itu sungguh baik direnungkan untuk membantu pegawai2. Selain menghemat biaja anggaran belandja jang begitu besar, djuga untuk membantu pegawai2 memiliki rumah sendiri.

Kesempatan itu, patut mendapat pemikiran jang mendalam bagi

Perkumpulan2 Koperasi, chususnja Koperasi Pegawai Negeri.

Apakah tidak mungkin diadakan Koperasi Perumahan oleh pegawai2 negeri sendiri atau P.K. P.N. membentuk suatu usaha pembangunan perumahan bagi pegawai negeri? Pembiajaan iang selalu mendjadi persoalan selama ini, umpamanja bisa diperdjuangkan dengan memakai uang rapel atau simpanan2 wadjib jang disimpan Pemerintah. Soal organisasi bisa dimintakan bantuan dari Djawatan Koperasi Pusat, jang menurut keterangan jang diperoleh sedang disusun peraturan2nja setjara perkoperasian. Untuk itu akan dimintakan bantuan ahli2 bangunan.

Bahwa Perkumpulan Koperasi banjak berdjasa dalam pemetjahan perumahan sesudah perang dunia kedua dapat dilihat dari kegiatan2 koperasi diluar negeri.

Selain Pemerintah harus mengeluarkan anggaran belandja jang besar untuk pemondokan pegawai tersebut, djuga pegawai2 sendiri mengalami penderitaan lahir-bathin akibat kekurangan perumahan. Pederitaan itu dapat digambarkan sbb.:

a. Pegawai-pegawai jang telah mendapat rumah dari Pemerintah. Kalau rumah jang didapat itu tjukup besar, tdak mengapa. Tetapi biasanja pegawai mendapat satu dua ruangan sadja dalam sebuah rumah, jang didiami dengan keluarga-keluarga lain. Kalau keluarga pegawai itu besar, atjapkali anggota-anggota keluarganja terpaksa hidup terpisah. Hidup terpisah selamanja makan biaja jang lebih besar. Adakalanja pegawai terpaksa hidup bersama dengan anggota-anggota keluarganja dalam satu ruangan. Kalau diantara anggota-anggota keluarga itu ada jang sudah besar atau dewasa, maka tjara hidup bersama demikian bertentangan dengan dasar-dasar pendidikan dan kesusilaan.

Disamping itu ada lagi masalah perabot rumah-tangga. Untuk membeli perkakas rumah dengan tunai, selalu uang tidak tjukup. Maka terpaksalah dibeli setjara angsuran atau sewa-beli dengan harga jang lebih tinggi dari biasa. Djalan lain ialah memindjam uang dari Bank Rakjat Indonesia. Djalan ini tidak banjak memberi pertolongan, sebab djumlah uang jang dapat dipindjam paling banjak dua kali gadji pokok. Sedangkan harga satu matjam per-

kakas rumah sadja tiga atau empat kali tingginja dari pada gadji pokok seorang pegawai biasa, belum lagi pengeluaran untuk makanan, pakaian, d.l.l.

b. Pegawai ditempat penginapan.

Pegawai jang tinggal dihotel bersama anak isterinja senantiasa menghadapi berbagai ragam masalah. Ditindjau dari segi pendidikan anak, hidup setjara demikian terang merugikan. Lagi pula perasaan tidak bebas. Makanan hotel belum tentu sesuai dengan keinginan. Untuk memenuhi keinginan ini terpaksa selalu dikeluarkan biaja extra.

c. Pegawai jang mendapat rumah dengan usaha sendiri.

Mendapatkan tempat tinggal dengan usaha sendiri berarti harus mengeluarkan uang istimewa, jang lazim disebut uang kuntji. Biasanja pegawai itu baru mungkin berbuat demikian, kalau ia ada barang perhiasan jang dapat didjadikan uang. Suatu pengorbanan, sebab rumah itu bukan mendjadi miliknja. tetapi ia tetap harus membajar sewanja tiap bulan. Setelah mendapat rumah, timbul lagi masalah perabotnja, seperti jang telah disebut diatas, dan masalah-masalah penghidupan lainnja.

d. Pegawai jang menumpang pada induk-semang.

Pegawai ini biasanja terpaksa hidup terpisah dari keluarganja. Benar ia mendapat tundjangan uang dari Pemerintah, tetapi hidup seperti itu tidak djarang membawa akibat jang buruk, diantaranja kerusakan budi achlak. Pertjeraian sering bersumber pada hidup terpisah itu. Kalau induk-semang itu hidup pula dari keuntungan pembajaran uang makan dari orang-orang jang tinggal padanja, tentulah ia mengatur segalanja, supaja ia tetap mendapat untung. Misalnja makanan disederhanakan supaja hemat. Akibatnja, pegawai itu sering djadjan diluar.

Selalu pula ia meninggalkan rumah untuk mendjauhkan hidup jang sunji. Semuanja ini hanja akan memperbesar biaja penghidupan pegawai itu. Semangat bekerdja dapat berkurang karenanja.

Sekarang bagaimanakah ichtiar untuk mendapatkan djawaban terhadap masalah kesulitan perumahan para pegawai negeri dewasa ini?

Bagaimana pula keadaannja nanti kalau pegawai-pegawai tersebut sudah pensiun, apalagi

kalau mereka masih menginap di-hotel atau losemen ?

Memang menurut peraturan jang berlaku, mereka boleh kembali ketempat asalnja atas biaja Pemerintah. Kalau mereka disana mempunjai rumah sendiri, masih lumajan. Kalau tidak ?

Dinegara-negara lainpun mengalami persoalan perumahan ini, terlebih didaerah-daerah pertempuran diwaktu perang dunia jang lalu. Untuk memetjahkan persoalan perumahan ini, pada bulan Oktober 1960 di Paris telah diadakan suatu konperensi internasional dari perkumpulan-perkumpulan koperasi perumahan. Jang turut ambil bagian, selain negara-negara Barat djuga negara-negara dari Eropa Timur dan Asia.

Indonesia pada waktu itu mengirimkan djuga delegasi jang terdiri dari R.P. Soeroso dan Mr. Soebiakto (Kepala Djawatan Koperasi Pusat).

Tudjuan pertemuan internasional ini adalah untuk mengkonfrontir masalah-masalah dan pengalaman-pengalaman koperasi perumahan, chususnja gerakan Koperasi dinegara masing-masing. Jang dikemukakan tidak hanja soal pengalaman-pengalaman, djuga soal organisasi dan pembiajaannja. Ada baiknja kita sadur laporan-laporan singkat itu, sekedar sebagai bahan perbandingan dan pedoman bagi gerakan koperasi di Indonesia dalam turut kelak memetjahkan pembangunan perumahan rakjat.

Para utusan berpendapat, walaupun dasar dan haluan negaranja masing-masing berlainan, bahwa gerakan koperasi dapat bertahan terus dalam sedjarahnja sedjak dipelopori di Rochdale (Inggeris) pada tahun 1844. Koperasi jang pada permulaannja timbul sebagai koperasi konsumsi, produksi, kini telah dapat pula berkembang sebagai koperasi perumahan.

Memang masih perlu penelitian jang mendalam diberbagai-bagai negara jang telah madju gerakan koperasi perumahannja, seperti dalam bidang organisasi, dan pembiajaannja, namun demikian telah membuktikan bahwa koperasi baru itu banjak berdjasa dalam turut membangun perumahan rakjat.

ORGANISASI DAN PEMBIAJAAN.

Soal pembiajaan pada umumnja merupakan masalah besar disemua negara. Di Djerman Barat umpamanja jang koperasi perumahannja tadinja bekerdja atas

kekuatan sendiri, sesuai dengan dasar-dasar ekonomi jang berlaku dinegara itu, kini sedang dipikirkan apakah koperasi itu akan minta atau tidak bantuan Pemerintah untuk tambahan modal. Dapat dipaparkan bahwa dinegara itu terdapat 3350 annemer pembangunan perumahan dan diantaranja ada 1700 koperasi pembangunan perumaran dan telah berhasil mendirikan 700.000 rumah.

Di Polandia jang koperasi perumahan didirikan pada tahun 1959, telah berhasil mendirikan rumah-rumah untuk buruh di kota-kota besar dan kini telah mulai beroperasi didaerah pertanian untuk mendirikan rumah-rumah rakjat/kaum buruh tani Rumah-rumah jang didirikan djuga dilengkapi dengan prabot/perkakas rumah. Disamping membangun rumah, djuga diusahakan pemeliharaan rumah-rumah, mendirikan sekolah-sekolah, klinik-klinik, dan tempat penitipan anak-anak bagi keluarga jang suami-isteri bekerdja.

Pada umumnja dinegara Barat maupun Timur, Pemerintah turut aktip mengawasi usaha-usaha pembangunan itu dan apabila dikehendaki dapat memberikan petundjuk jang berguna dan mendapat pasilitet dalam berbagai soal. Umpamanja soal-soal pindjaman-pindjaman dapat diperdjuangkan dengan bunga jang rendah dan pembajaran dalam djangka pandjang.

Demikian djuga dapat dipikul sebagian dari ongkos-ongkos pembiajaan itu. Dan kalau perlu dapat memberikan garansi untuk mendapatkan pindjaman dari Bank. Pemerintah memberikaan bantuannja karena soal perumahan adalah merupakan masalah nasional jang harus dipetjahkan bersama rakjat.

Bagi keluarga jang pendapatannja agak kurang, dapat diberikan sewa jang ringan, dengan mendapat subsidi dari Pemerintah.

Adapun mengenai organisasi dan tjara pengumpulan modal, pada umumnja serupa dengan koperasi biasa kita sudah ketahui.

Di Singapore djuga sudah ada Koperasi Perumahan Pegawai Negeri jang berdiri sedjak tahun 1949.

Suatu tjontoh dari tjara pembiajaan pembangunan rumah dari perkumpulan koperasi itu dapat dipaparkan sebagai berikut:

30% mendapat pindjaman dari Pemerintah.

30% dipindjam dari Bank.

40% dibajar oleh anggota sen-

diri jang hendak mendirikan rumah.

Uang pindjaman itu bunganja 4½% setahun dan dapat diangsur dalam 15 tahun. Sjarat-sjarat lain ialah besarnja pindjaman disesuaikan dengan penghasilan pegawai. Umpamanja, pegawai jang berpenghasilan Str. $ 600 sebulan dapat mendirikan rumah seharga Str. $ 10.000.

Suatu hal jang menarik, untuk pengumpulan modal ialah diadakannja djuga pindjaman-pindjaman umum, baik dari anggota maupun dari bukan anggota dengan bunga 4½%. Dapat dibajar kembali sesudah 6 bulan.

Demikianlah beberapa tjatatan jang kiranja berguna dalam kita turut membangun Koperasi Perumahan Indonesia.

* * *

Kita punja djandji, bahwa sebelum ajam djantan berkokok pada tanggal 1 Djanuari 1963 dengan resmi bendera Sang Merah Putih akan berkibar diseluruh Irian Barat dari kepulauan Radja Ampat sampai Merauke.

Presiden pada peringatan
Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1962.

TRIKOMANDO RAKJAT DI PARE-PARE

Didalam rangka merealisasi Trikomando Rakjat, dan dalam rangka kewaspadaan Nasional, di Pare-pare umumnja dan di Korem II Mattirowali E chususnja pada bulan Djanuari 1962 telah dibentuk dua djennis corps, jaitu: Corps Wadjib Militer dan Corps Pasukan Sukarelawan.

Pegawai-pegawai Djawatan Penerangan Kabupaten Pare-pare pun dalam hal ini tidak mau ketinggalan dan telah turut mengikuti latihan-latihan militer, jang diadakan terhadap mereka. Sebagian dari mereka ini telah mendaftarkan diri sebagai Pasukan Sukarela dan sebahagian memasuki Wadjib Latih Militer.

Disamping tugas mengikuti latihan-latihan militer sebagai diterangkan diatas, mereka tidak pula melupakan tugasnja. Dan turut aktif memberikan penerangan-penerangan/peladjaran-peladjaran tentang Manipol/Usdek, Pantja Sila dan lain-lain, terhadap para sukarelawan-sukarelawan jang mengikuti latihan militer tersebut. Maka setelah para sukarelawan itu selesai mengikuti latihan-latihannja, mereka telah pula lengkap dibekali dengan Manipol/Usdek, Pantja Sila dan lain-lain pengetahuan, sehingga mereka merasa lebih tebal rasa tanggung djawabnja terhadap Nusa dan Bangsa, termasuk didalamnja pembebasan Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Dan mengembalikannja kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia. *(Djapenkab. Pare-pare, Andi Someng).*

*

RAPAT INTERDEPARTEMENTAL DAN TJATUR TUNGGAL SE-SUMATERA DI BUKITTINGGI.

Bukittinggi kota jang terbersih di Sumatera Barat, jang hawanja dingin sehat, dengan djam Gedang dan ngarainja jang indah telah mendapat kehormatan selaku kota penjelenggara dan tempat berlangsungnja rapat Interdepartemental
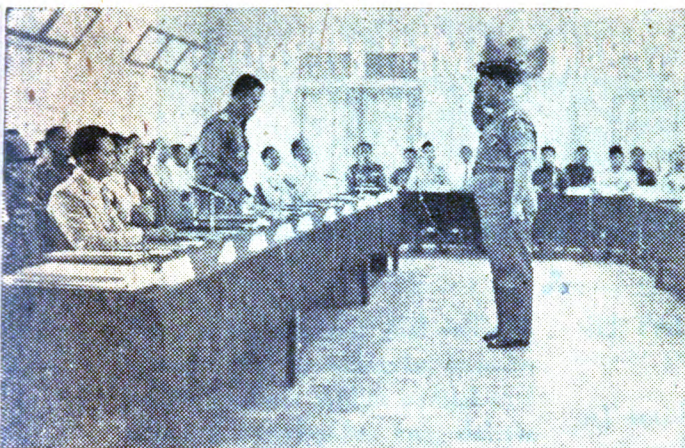
Dejah Sumatera Brig. Djen. Suprapto menjampaikan laporan kepada MKN. Djen. A.H. Nasution.

***

dan Tjatur Tunggal se-Sumatera, baru² ini.
Rapat ini mengambil tempat diruangan Gedung Negara TRI ARGA, jang belum berapa lama diresmikan pemakaiannja.

Rapat ini dihadiri oleh MKN/KASAD Djenderal A.H. Nasution, Menteri/Djaksa Agung Mr. Gunawan, beserta wakil dari Departemen2 lainnja, dan dari Peperti hadir Let. Kol. Mr. Sutjipto.

Pedjabat² se-Sumatera jg. hadir: Dejah Sumatera Brigdjen Suprapto, Tjatur Tunggal dari Daerah-daerah Tk. I dan penindjau lainnja.

Rapat hari pertama, pembukaannja dipimpin oleh MKN/KASAD Djenderal A.H. Nasution, diikuti oleh uraian dan pendjelasan tudjuan rapat oleh Dejah Sumatera Brigdjen. Suprapto, kemudian briefing dari Menteri atau wakilnja.

Gub. Sumatera Barat disertai oleh masjarakat dengan pakaian adat, menjambut MK N. Djend. A.H. Nasution, dilapangan terbang Tabing.

***

Dalam amanatnja MKN/KASAD antara lain menjatakan bahwa tahun 1962 adalah tahun ke III dan tahun terachir menjelesaikan Tri-Program Pemerintah jang meliputi Sandang Pangan, Keamanan dan pengembalian Irian Barat kedalam wilajah Kekuasaan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu ditekankan, agar rapat dapat lebih menjempurnakan rentjana-rentjana tepat, untuk menghadapi tahun 1962. Tri-Program Pemerintah akan terlihat hasilnja pada achir tahun 1962 ini, baik dibidang follow-up keamanan maupun dibidang mental dan material. Rehabilisasi daerah sangatlah pentingnja, terutama bagi Sumatera jg. dibidang keamanan telah dapat dipulihkan. Dengan adanja rapat ini masjarakat Sumatera chususnja mengharapkan buah jang bermanfaat jang akan langsung dapat dinikmati masjarakat daerah ini. Djuga MKN/KASAD menekankan perlu supaja petugas-tugas dapat meretool tjara berpikirnja sehingga tiap tindakan hendaknja menudju dan mentjiptakan normalisasi disegala bidang.

Selandjutnja dalam rapat ini beberapa Menteri/Wakilnja turut pula memberikan pemandangan-pemandangan jang berharga dan penting.

Pada malamnja dilandjutkan rapat kedua, dan besoknja rapat ketiga, jang ditutup oleh MKN/KASAD dan diteruskan dengan rapat chusus Tjatur Tunggal se-Sumatera dipimpin oleh Dejah Sumatera Brigdjen. Suprapto. *(Djapenprop-Sumatera Barat, Kep. Bahagian Pers dan Publisitet Nasir Noer).*
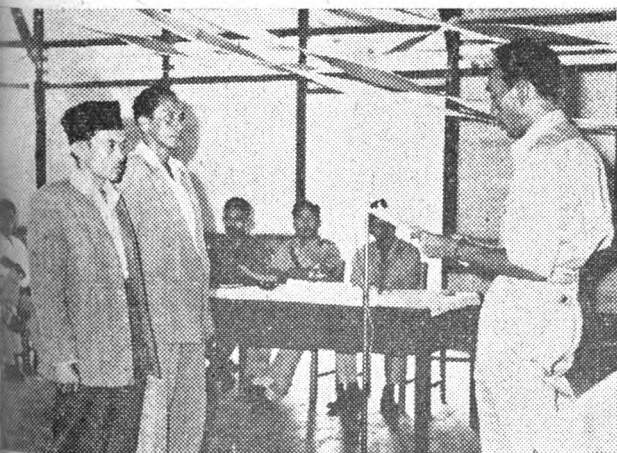
Kep. Djapenkab. dan kep. bgn Penmob. Tanah Datar, dilantik.

Para Pegawai Djapenko Padang Pandjang, dengan pimpinan baru, dan Tjatur Tunggal, sehabis timbang-terima.
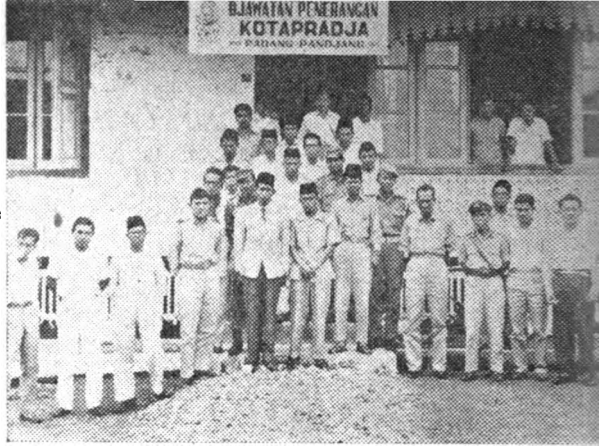
PELANTIKAN KEPALA DJAPENKAB/KO JANG BARU

Mendjelang memasuki tahun 1962 dan dalam rangka pelaksanaan Tour of Duty dalam lingkungan Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Barat berturut-turut selama bulan Desember 1961 Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Barat telah melantik Nurbin St. Mangkuto/Kepala Bhg. Penmob Djapenko Padang mendjadi Kepala Djapenko Padang Pandjang, M. J. Dt. Tuma Alam/Kepala Djapenko Padang Pandjang mendjadi Kepala Djapenkab Tanah Datar; S.P. Baharuddin/Kepala Bhg. Pers & Publisitet Djapenkab Lima Puluh Kota mendjadi Kepala Djapenkab Pesisir Selatan, Anwar Said Dt. Tan Dilangit/Kepala Djapenkab Pesisir Selatan mendjadi Kepala Djapenkab Sawah Lunto Sidjundjung, Bachtiar R/Kepala Seksi Penra Djapen-
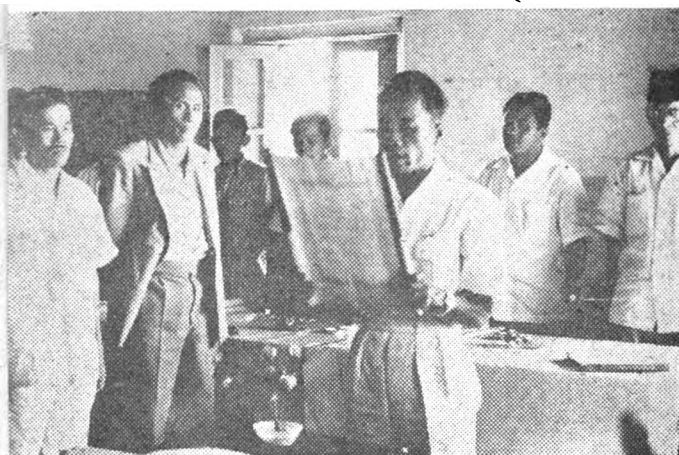
Mengutjapkan Pantja Setya Pegawai Negeri dengan chidmad, untuk membulatkan tekad, dan membangkitkan semangat baru, setelah pelantikan kep. Djapenkab. Agam.

Kenang2an setelah timbang-terima kep. Djapenkab Pasaman. Mengenang djasa-pimpinan lama dan menjatakan tekad dan pikiran dengan pimpinan baru.

*

prop Sumbar mendjadi Kepala Djapenkab Agam, Iljas Saman/Kepala Bhg. Penmob Djapenkab Padang Pariaman mendjadi Kepala Djapenkab Pasaman, Ismail Tk. Maradjo/Kepala Djapenkab Agam mendjadi Kepala Djapenkab Lima Puluh Kota.

Pada pelantikan-pelantikan jang berdjalan penuh berkesan itu. Daranin/Kepala Djapenprop Sumbar selalu menjatakan terima kasih atas kerdja-sama jang baik dan bimbingan dari Tjatur Tunggal setempat kepada Kepala Djapen-kab/ko jang lama, djuga mengharapkan agar semangat jang demikian tetap dilandjutkan dengan Kepala Djapenkab/ko jang baru. Dalam pada itu, chusus ditudjukan kepada segenap warga Penerangan jang menghadiri pelantikan Kepala Djapenkab/ko-nja jang baru, dipesankan untuk selalu memelihara dan memupuk hubungan dan kerdja-sama jang rapi antara sesama petugas Penerangan, sehingga oleh aparatur negara maupun masjarakat Djawatan Penerangan dianggap sebagai alat dan

*
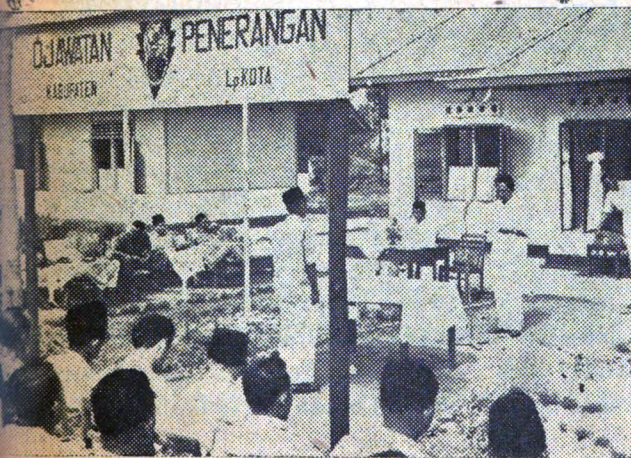
Kep. Djapenkab Lima Puluh Kota dilantik.

Penjerahan Radio Transistor dari Gerakan Koperasi Jogjakarta jang diwakili oleh Drs Suharto, kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, telah diterima oleh wakil hepala Daerah tsb.

abdi negara jang penting dan tetap dibutuhkan, terutama dalam melaksanakan penerangan-penerangan Haluan Negara Manipol/Usdek dengan berpedoman pada Pantja Bakti Deppen.

Upatjara pelantikan tsb. berdjalan chidmat dengan penandatanganan naskah timbang-terima oleh pedjabat lama dan baru dihadapan Kepala Djapenprop Sumbar, pengutjapan Pantja Satya Pegawai Negeri kata-kata perpisahan dan perkenalan oleh pedjabat lama dan baru serta pidato sambutan oleh Tjatur Tunggal setempat.

Dalam pada itu ditambahkan bahwa setiap upatjara pelantikan Kepala Djapenkab/ko jang baru tersebut antara lain dihadiri oleh Kepala Djapenprop Sumbar beserta staf, djuga para undangan seperti Kepala/wakil Djawatan/Instansi Sipil/Militer dan seluruh pegawai Djapenkab/Ko setempat. *(Djapenprop. Sumatera Barat Kep. Bahagian Pers/Publisitet Nasir Nur).*

PENJERAHAN 95 RADIO TRANSISTOR KEPADA PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Pada tgl. 16 April 1962 j.l. telah diserahkan oleh Gerakan Koperasi Seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta sedjumlah 95 buah pesawat radio transistor.

Gerakan Koperasi diwakili oleh Sdr. Drs. Soeharto dan Pemerintah Daerah diwakili oleh Wakil

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta. Hadir dalam upatjara tersebut wakil-wakil instansi dan wakil-wakil organisasi Koperasi dari Jogjakarta.

Sesudah upatjara dilaksanakan menjusul upatjara penjerahan sedjumlah battery oleh Dinas Pertambangan Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Pemerintah Daerah.

Dalam kata sambutannja maka Wakil Kepala Daerah mengutjapkan terima kasih jang sebesar-besarnja. Penjerahan ini adalah merupakan tanda kasih dari Rakjat Jogjakarta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Kepala Djapendi Jogjakarta menjampaikan harapan, mudah-mudahan usaha sematjam ini dapat disusul lagi dalam waktu-waktu jang akan datang sehingga nanti penduduk pelosok Jogjakarta dapat mendengarkan semua siaran-siaran baik dari Daerah maupun dari Pusat.

Menurut rentjana segala pengurusan tentang penggunaan pesawat tersebut akan dilaksanakan oleh Djawatan Penerangan, dalam hal ini Djawatan Penerangan Ketjamatan. *(Djapendi Jogjakarta, Kepala Bahagian Pers/Publisitet R. Soekandar).*

*

Sdr. Kepala Djapenprop. Nusa Tenggara inipun ikut latihan kemiliteran

BERITA KELUARGA

Telah pulang ke Rachmatullah:

MANGGASSINGI DG. KULLE

Pedjabat Kepala Kantor Penerangan Ketjamatan Binamu, Daerah Tk II Djeneponto Takalar.
Meninggal pada tgl. 28-3-1962.

MASLAN

Peg. Djapen Ketj. Kemlagi Daerah Tk. II Modjokerto.
Meninggal pada tgl. 10-5-1962

Inna Lillahi wainna Ilaihi Rodjiun.

*
**

Perundang-undangan, Peraturan dan Pengumuman

Isinja :

a. *Keputusan Presiden R.I. No. 163 th. 1962.*

b. *Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Economi No. Instr. 1/Ko. T.O.E. Th. 1962.*

c. *Idem No. Instr. 2/Ko. T.O.E. Th. 1962.*

d. *Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Economi tentang garis-garis besar pimpinan Economi Nasional, dalam tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat.*

e. *Pengumuman Pemerintah tentang penundaan pemilihan umum*

KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
No. 163 TAHUN 1963.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa berhubung telah diadakan susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja, perlu menindjau kembali susunan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi;

Mengingat :

1. Pasal 3 ajat (2) dan (3) Undang2 No. 23 Prp. 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 — Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang2 No. 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 — Tambahan Lembaran Negara No. 2113);

2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 7);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 th. '62 tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja dan tanggal 10 Maret 1962 No. 102;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mentjabut Keputusan2 Presiden No. 103/M tahun 1960, No. 105/M tahun 1960.

KEDUA :

Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 mengangkat sebagai:

1. Deputy I Peperti, merangkap anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri Pertama Ir. H. Djuanda.
2. Deputy II Peperti, merangkap anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Djenderal TNI A. H. Nasution;
3. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri Laksamana Muda Udara Tituler Dr. Subandrio;
4. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri Mr. Sahardjo;
5. Anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ipik Gandamana;
6. Anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri Kepala Staf Angkatan Darat Djenderal TNI A. H. Nasution;
7. Anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri Kepala Staf Angkatan, Laut, Laksamana Muda E. Martadinata;
8. Anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri Kepala Staf Angkatan Udara. Laksamana Muda Udara, Omar Dani;
9. Anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara, Sukarno Djojonegoro;
10. Anggota Badan Pembantu Peperti — Menteri diperbantukan kepada Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan. Letnan Djenleral TNI Hidajat;
11. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi, Major Djenderal TNI Suprajogi;
12. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S. — Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Chaerul Saleh;
13. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri

Pertama Urusan Distribusi, Dr. J. Leimena;

14. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama Urusan Keuangan, Notohamiprodjo;

15. Anggota Badan Pembantu Peperti — Wakil Menteri Pertama Urusan Chusus, Prop Mr H. Muhamad Yamin.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1962.

Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik
Indonesia,

ttd.

SUKARNO

*

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
No. Instr. 1/Ko. T.O.E. Th. 1962

TENTANG

PERANTJANGAN PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA 1962

Kami, Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,

Berdasarkan Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang Garis-garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional dalam tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat seperti termaktub pada angka V mengenai anggaran belandja sedjumlah 22 ribu 195 djuta rupiah didalam tangan Presiden sebagai Mandataris M.P.R.S. untuk membelandjai projek-projek pembangunan Semesta Berentjana Tahun 1962, dengan ini

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada Wakil Menteri Pertama/Ketua Depernas dengan mendengar Badan Kerdja Depernas dan para Menteri jang bersangkutan menjusun rantjangan prioritas projek-projek pembangunan untuk kami laksanakan dalam tahun pembebasan Irian Barat 1962 dan menjampaikan rantjangan prioritas itu kepada kami sebelum tanggal 30 Djuni 1962.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1962.

Presiden Republik Indonesia/
Panglima Besar Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi,

ttd.

S u k a r n o.

*

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. Instr. 2/Ko. T.O.E. Th. 1962
TENTANG
MEMPERKUAT FRONT EKONOMI 1962

Presiden Republik Indonesia/
Panglima Besar Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi,

Menimbang :

1. bahwa perlu mengeluarkan instruksi tentang memperkuat Front Ekonomi 1962 sesuai dengan Amanat kami tentang „Garis-garis Besar Pimpinan Ekonomi Nasional dalam tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat";
2. bahwa ada beberapa hal jang harus diselesaikan segera;

Mengingat :

1. Pasal 4 ajat (1), pasal 17 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26/PLM. T tahun 1962 tentang Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;

MEMUTUSKAN

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA :

I. Menteri Pertama, para Wakil Menteri Pertama dan Menteri-menteri bersama-sama dengan;

II. Kepala/Wakil Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan para Anggota Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi;

SUPAJA :

Dalam bidang kewenangan masing-masing mengambil tindakan-tindakan dan mengatur hal-hal untuk melaksanakan keputusan-keputusan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, sebagai berikut:

1. Menitik-beratkan pembangunan koperasi produsen-petani, pada taraf pertama ditudjukan pada karet rakjat;
2. Menghentikan rintangan-rintangan lalu-lintas barang-barang dalam sesuatu daerah, antar-daerah dan antar-pulau serta antar-negara. Semua peraturan-peraturan pusat dan lokal jang merupakan rintangan-rintangan itu harus dihilangkan;
3. Mewadjibkan kepada perusahaan-perusahaan remilling dan rumah-rumah asap supaja mendjual barang-barangnja hanja kepada exportir-exportir dan pemakai-pemakai karet didalam negeri jang terdaftar;
4. Djangka waktu penjimpanan barang-barang di veem-veem dibatasi, sedangkan „opslagbewijzen" hanja dapat dipindah-tangankan satu kali;

Penjimpangan² mengakibatkan barang-barang tersebut djatuh ditangan Pemerintah;

5. Check-price barang-barang ekspor jang lemah hanja merupakan harga antjar-antjar, sedangkan harga pendjualan jang sebenarnja ditentukan achirnja oleh instansi jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas pertimbangan panitya hasil bumi di Eropa dan/atau konsulat-konsulat Republik Indonesia dinegeri-negeri lain bersama-sama dengan perwakilan L.A.A.P.-L.N.;

6. Harga-harga barang essensiil asal dari impor maupun hasil produksi dalam negeri seperti termaksud didalam pendjelasan, tetap dikendalikan;

7. Para pendjabat jang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi/keuangan diharuskan setjara berkala melakukan „tour of duty" atau „tour of area" menurut petundjuk Menteri-menteri jang bersangkutan;

8. Daja beli jang berada pada penanam modal institutionil seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, badan-badan tabungan dan sebagainja untuk sebagian harus ditanam dalam Surat Berharga Negara;

9. Kepada daja beli jang berada pada masjarakat jang disalurkan untuk usaha-usaha produktip diberikan:

a. djaminan, bahwa jang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan padjak;
b. „tax exemption" untuk djangka waktu 3 tahun kepada jang bersangkutan setelah kesatuan produksinja menghatsilkan;
c. keringanan dalam perhitungan penjusutan, komponen harga dan bea masuk;

10. Membuka kesempatan untuk menarik pindjaman atau kredit atas dasar „production sharing" dengan sjarat-sjarat bahwa:

a. milik dan management berada dari semula ditangan Indonesia;
b. pembajaran kembali dilakukan dari hasil produksi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 18 Mei 1962
Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi,
ttd.

S u k a r n o

PENDJELASAN

I. UMUM.

1. a. Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 18 Mei 1962 telah memberikan Amanat tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional

dalam tahun 1962 men-djelang pembebasan Irian Barat. Dengan Amanat itu telah diletakkan pokok-pokok sebagai landasan perkembangan ekonomi dalam tahun 1962 jang akan dilaksanakan tahap demi tahap.

Diatas landasan itulah dikeluarkan Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, nomor Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962, untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 oleh sebab itu pelaksanaan Instruksi harus sesuai dengan pokok-pokok jang telah di Amanat-kan.

b. Instruksi tersebut adalah Komando Operasionil dibidang ekonomi, jaitu untuk melaksanakan operasi ekonomi tahap pertama tahun ini jang akan disusul oleh Instruksi-instruksi lainnja untuk tahap-tahap selandjutnja sesuai dengan urgensi;

c. Komando tersebut ditudjukan kepada seluruh Aparatur Pemerintah untuk melaksanakannja dengan segera dan dengan mengingat segala peraturan jang berlaku, untuk dipergunakan, diubah ataupun dihapuskan;

2. Hal-hal jang bersangkutan dengan Instruksi ini akan diatur lebih landjut oleh Kepala Staf/Wakil Kepala Staf dan Anggota anggota Staf Operasi Ekonomi bersama-sama dengan Menteri-menteri jang bersangkutan.

3. Departemen-departemen dan badan-badan lain jang ditugaskan melaksanakan Instruksi ini diwadjibkan memberi laporan setjara berkala kepada Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

II. CHUSUS, tentang isi Instruksi.

Tentang nomor 1 : Sudah tjukup djelas.

Tentang nomor 2 : Sudah tjukup djelas.

Tentang nomor 3 : Dalam hal ini segala transaksi pendjualan harus dilakukan dengan perdjandjian djual-beli setjara tertulis dan bermeterai.

Tentang nomor 4 : Sudah tjukup djelas.

Tentang nomor 5 : Sudah tjukup djelas.

Tentang nomor 6 : Barang-barang essensiil jang dimaksud disini adalah :

A. Barang-barang impor:

1. Beras,
2. Ikan asin,
3. Susu baji,
4. Benang tenun,
5. Tekstil kasar: cambrics, drill kasar, black and white yeans,

poplin polos dan kembang (benang 140 per sq. inch), white shirting, grey shirting, printed shirting.
6. Kapas kasar,
7. Benang djahit,
8. Pupuk,
9. Karung guni/tali guni,
10. Kertas koran/kertas tulis,
11. Spare parts untuk segala djenis mesin,
12. Truck dan bus,
13. Ban,
14. Tinplate,
15. Bahan dan obat-obatan tertentu,
16. Bahan-bahan penting jang dipergunakan untuk produksi barang-barang ekspor, misalnja mierenzuur.

B. Barang-barang hasil dalam negeri:

1. Beras,
2. Garam,
3. Gula pasir,
4. Ikan asin,
5. Minjak kelapa/goreng,
6. Benang tenun,
7. Tekstil,
8. Batik sandang,
9. Kopra,
10. Minjak tanah dan hasil minjak lainnja dari Maskapai Minjak,
11. Sabun tjutji,
12. Ban,
13. Karung guni,
14. Beberapa matjam obat-obatan.

Nomor 7 s/d nomor 10 : Sudah tjukup djelas.

•

AMANAT PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI TENTANG GARIS-GARIS BESAR PIMPINAN EKONOMI NASIONAL DALAM TAHUN 1962 MENDJELANG PEMBEBASAN IRIAN BARAT.

Kami Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi :

1. Mengingat bahwa perdjuangan Pembebasan Irian Barat dalam tingkatan Revolusi Indonesia sekarang meminta kesedaran dan kewaspadaan jang mendalam dari seluruh Rakjat Indonesia dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan diberbagai bidang;

2. Jakin bahwa potensi dan kemampuan ekonomi Bangsa Indonesia tjukup kuat untuk menghadapi segala pengorbanan jang dibebankan oleh Revolusi pada waktu ini, kepentingan pembinaan front ekonomi jang kokoh, untuk meringankan dan meratakan segala beban jang dipikul oleh Bangsa Indonesia pula untuk menanam landasan dalam menudju kearah keseimbangan antara penerimaan

dan pembeajaan anggaran belandja Republik Indonesia bersandar pada haluan Negara jang sudah ditetapkan oleh M.P.R.S., maka kami menetapkan garis-garis besar ekonomi nasional jang terpimpin dalam tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat:

I. Memperhebat produksi bahan makanan, terutama Beras, djagung dan ketela untuk konsumsi dalam Negara dengan segala daja upaja. Untuk mentjapai maksud itu seluruh potensi Rakjat diikut sertakan.

Memperhebat produksi pertanian, hasil industri dan pertambangan untuk memperbesar ekspor guna mentjapai keseimbangan antara pembeajaan dan pendapatan, kelebihan ekspor dari pada impor, sehingga terwudjud penambahan devisen Negara dalam tahun perdjoangan pembebasan Irian Barat 1962.

Mendjalankan dengan segera program dibidang perminjakan, kaju dan perikanan dan melaksanakan pendjualan karet, kopra, timah dan bauxits menudju blok manapun djuga, kedua-duanja untuk memperkuat devisen Republik Indonesia dewasa ini.

Mengadakan tindakan-tindakan memprodusir import-substitutes dan mempergunakan alat-alat produksi jang telah ada setjara maksimal.

II. Mendjadikan sjarat mutlak bagi perdjoangan dan Rakjat dalam tahun 1962 ini, supaja aparat komunikasi dan distribusi menjampaikan barang jang dibutuhkan Rakjat dan perdjoangan tepat pada tempat dan waktunja, sehingga urusan komunikasi dan transport antar daerah dan dengan daerah Mandala diselenggarakan dengan tjukup dan efisien.

III. Mendjalankan politik moneter jang riil dan konkrit dalam rangka keuangan Negara jang sehat dan berhubungan dengan keharusan memperhemat pengeluaran anggaran belandja routine dan memperhemat pemakaian devisen Negara istimewa pada tahun 1962, maka pemakaian devisen itu dilaksanakan demikian, bahwa lebih dulu disisihkan bagi pembeajaan perdjoangan pembebasan Irian Barat dan sisanja disediakan untuk alokasi homefront jang dilaksanakan menurut prioritas:

a. *Pangan,* berupa beras. Tanpa menjebut soal sandang, maka djika sekiranja tekstil jang diimpor tidak tjukup, tambahannja harus ditjari atau diperoleh dengan mempertinggi produksi dalam negeri.

b. *Kemudian* untuk bahan-bahan baku dan penolong, spareparts dan sebagainja jang diperlukan

untuk mempertahankan tingkat produksi dari alat-alat produksi jang sudah ada, demi untuk menghindarkan unemployment alat-alat produksi dengan termasuk kedalamnja unemployment kaum buruh.

c. *Achirnja* sisa untuk afronding dan penambah alat-alat produksi jang sudah ada.

IV. Menggunakan kredit dari luar negeri untuk membeajai keperluan diatas (a, b dan c), dengan keinsjafan bahwa projek-projek didasarkan atas pemilikan Indonesia dan management dengan pembajaran dari produksi (production sharing), jang pada hakekatnja tidak membawa keharusan pembajaran down-payment.

Bilamana down-payment disjaratkan oleh kredit lain, supaja diselenggarakan grace period jang sesuai dengan keadaan neratja pembajaran kita.

V. Membeajakan anggaran belandja 22 ribu 195 djuta rupiah, jang dengan undang-undang disampaikan kedalam tangan Presiden sebagai mandataris M.P.R.S. untuk membelandjai projek-projek pembangunan semesta berentjana untuk tahun 1962 dengan mengingat ketentuan-ketentuan mengenai pemakaian devisa Negara seperti tersebut pada angka III dan IV, sekalipun menghadapi deficit-spending dengan ketentuan bahwa anggaran routine paling sedikit harus seimbang dan supaja dilaksanakan kebidjaksanaan fiscal jang sehat.

VI. Dalam Rangka Amanat ini kami tetapkan pelaksanaan landreform dan koperasi, dan pembangunan desa serta menggunakan sedemikian besarnja „funds and forces" termasuk domestic capital dalam suatu program darurat jang ringkas dan tangkas untuk segera dilaksanakan dalam tahun 1962 ini, djuga mendjelang pembebasan Irian Barat, supaja tertjapai apa jang ditegaskan dalam Amanat kami ini, demi kesedjahteraan Rakjat dan pembebasan tanah air Irian Barat.

VII. Demi kelantjaran dan daja guna produksi, ekspor, pembangunan serta pemakaian devisa Negara, kami Insja Allah tidak enggan-enggan melenjapkan peraturan-peraturan jang berbelit-belit dan menghindarkan tindakan-tindakan penghambat jang menghalangi pelaksanaan kebidjaksanaan jang kita tetapkan garis-garis besarnja diatas dalam rangka pelaksanaan Sosialisme Indonesia.

Djakarta, 18 Mei 1962.
Presiden/Panglima Besar
Komando Tertinggi Operasi
Ekonomi.
ttd.
S U K A R N O

*

PENGUMUMAN PEMERINTAH tentang PENUNDAAN PEMILIHAH UMUM

Diutjapkan oleh Menteri Pertama Ir. H. Djuanda pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Istana Negara pada tgl. 20 Mei 1962.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, jaitu pada tanggal 20 Mai 1962, saja ingin mengumumkan suatu putusan jang penting, jang baru-baru ini diambil oleh Pemerintah, jang perlu diketahui oleh segenap warganegara Repuplik Indonesia, baik jang berada didalam Negeri, maupun jang berada diluar Negeri.

Pada tanggal 16 Februari 1962 Pemerintah telah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong suatu Rantjangan Undang-undang tentang penjusunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I dan tingkat II, jang penting artinja bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Rantjangan Undang-undang tersebut pada tanggal 19 April 1962 ditarik kembali oleh P.J.M. Presiden untuk kemudian diadjukan kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnja pada tanggal 16 dan 17 Mai jang baru lalu.

Dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung itu P.J.M. Presiden mendjelaskan setjara tegas bahwa pada dewasa ini perlu ditjapai pengerahan maximal daripada potensi nasional jang bersatu padu dan daja-tempur Rakjat untuk menjempurnakan dan memperhebat pelaksanaan Tri-komando Rakjat tentang pembebasan tanah air kita, Irian Barat.

Berhubung dengan itu dipandang tidak mungkin untuk mengadakan pemilihan umum tanpa mengurangi konsentrasi potensi nasional dan daja-tempur Rakjat itu, jang sangat diperlukan untuk menjelesaikan salah satu tjita2 jang penting dari Revolusi Nasional kita, jakni mengembalikan bagian dari Tanah Air kita, Irian Barat, kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dalam tahun 1962 ini djuga.

Setelah membahas persoalan ini setjara mendalam, maka Dewan Pertimbangan Agung mempertimbangkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan suatu Pengumuman mengenai penundaan pemilihan umum, jang lengkapnja berbunji sebagai berikut.

KEBULATAN SIKAP PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM.

Kita Rakjat Indonesia sudah bertekad bulat, sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakjat, untuk membebaskan Irian Barat dalam tahun 1962 ini djuga. Perdjoangan untuk pembebasan Irian Barat adalah perdjoangan untuk kemenangan suatu prinsip, jaitu penghapusan kolonialisme dari muka bumi.

Pemerintah Indonesia sudah setjara maximal berusaha untuk menjelesaikan masalah Irian Barat dengan djalan damai. Tetapi ternjata bahwa niat baik kita ini tidak diperdulikan oleh pihak Belanda. Malahan pihak Belanda terus-menerus memperbesar kekuatan militernja di Irian Barat. Sebagai akibat dari sikap kepalabatu kaum kolonialis Belanda ini, perdjoangan pembebasan Irian Barat pada dewasa ini sudah meningkat tinggi baik politis maupun physik.

Tingkat perdjoangan pembebasan Irian Barat dewasa ini menuntut pengerahan maximal daripada potensi nasional dan dajatempur Rakjat. Segala jang dapat mengurangi dan merintangi pengerahan ini harus dihindarkan atau ditjegah.

Kita Rakjat Indonesia sudah bertekad bulat untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin, jaitu kedaulatan Rakjat jang berdasarkan hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan.

Kita sedar, sesedar-sedarnja, bahwa sistim Demokrasi Terpimpin kita tidak bisa dipisahkan dari Pemilihan Umum, karena hanja dengan inilah dapat diaktifkan ikut-sertanja Rakjat dalam segala persoalan kenegaraan.

Tetapi sedar akan tugas pokok kita sekarang, dan demi pengerahan maximal potensi nasional serta daja-tempur Rakjat dewasa ini dan sedikitpun tidak mengurangi arti pentingnja Pemilihan Umum untuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah, kita memutuskan untuk sementara menunda Pemilihan Umum dan tidak melangsungkan Pemilihan Umum dalam tahun 1962, sampai kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan Republik Indonesia dalam tahun 1962 ini djuga.

Untuk menjiapkan Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum dibentuk sebuah Panitia Negara.

Untuk meningkatkan daja-tempur Rakjat dan Pemerintah Indonesia jang setinggi-tingginja sesuai dengan Tri-komando Rakjat, kita bertekad untuk mentjiptakan iklim politik jang sebaik-baiknja

dengan djalan lebih memperhebat kegotong-rojongan nasional dalam segala bidang, memperhebat Indoktrinasi Manipol, retooling organisasi dan personalia setjara lebih aktif dan konsekwen, memperluas hak-hak Demokrasi dan mengusahakan perbaikan tingkat hidup Rakjat sebagai sjarat utama untuk melaksanakan social control dan social support antara lain dengan mengikut-sertakan pers nasional dan lebih memperkokoh setia-kawan internasional serta mempertinggi kewaspadaan nasional.

Demikianlah kebulatan sikap kita dalam hubungan dengan penundaan Pemilihan Umum untuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah menghadapi perdjoangan pembebasan Irian Barat dewasa ini.

Djakarta, 17 Mai 1962.

Saudara-saudara jang terhormat,

Setelah menelaah pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Agung jang saja batjakan tadi, maka Pemerintah menjatakan persetudjuannja sepenuhnja terhadap pertimbangan itu.

Tentang Panitia Negara untuk menjiapkan Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum itu d[illegible] jang harus menampung dan m[illegible] nelaah semua keinginan masjar[illegible] kat dalam soal ini, P.J.M. Pre[illegible] den akan mengadakan pengum[illegible] man.

Saudara-saudara jang terhorma[illegible]

Demikianlah putusan penti[illegible] jang telah diambil oleh Pemeri[illegible] tah Republik Indonesia.

Pada Hari Kebangkitan Nas[illegible] nal jang kita peringati sekaran[illegible] Pemerintah mengadjak segen[illegible] Rakjat Indonesia dari Saban[illegible] sampai Merauke dan jang bera[illegible] diluar Tanah Air, untuk memb[illegible] latkan sikap menunda pemiliha[illegible] umum sampai kembalinja Iria[illegible] Barat kepangkuan Ibu Pertiwi.

Semoga Allah s.w.t. memberi[illegible] kan karunia rachmat-Nja ata[illegible] perdjoangan nasional kita me[illegible] ngembalikan Irian-Barat kedalam[illegible] wilajah kekuasaan Negara Kesa[illegible] tuan Republik Indonesia dalam[illegible] tahun 1962 ini djuga.

Sekian.

Terima kasih.

Djakarta, 20 Mai 1962
Menteri Pertama Republik
Indonesia,

(DJUANDA).

* * *

Mimbar PENERANGAN

API NAN TAK KUNDJUNG PADAM

TAHUN KE XIII No. 6/7

DJUNI/DJULI 1962

MIMBAR PENERANGAN

madjalah untuk djurupenerang

diterbitkan oleh Deppen Djakarta

Berkala bulanan
Untuk Djurupenerang
Diselenggarakan oleh :
Direktorat Publisitet &
Penerangan Daerah
Deppen

Dibantu oleh:

Para Djurupenerangan Pusat dan Daerah serta Para Pemuka dan Peminat masalah-masalah Penerangan

Alamat:
Redaksi/Administrasi
Merdeka Barat No. 9
Djakarta
Telepon
Redaksi': G. 820 pes. 34
Administrasi : O.P. 1190

DALAM NOMOR INI

GAMBAR KULIT

Mata dan telinga rakjat Indonesia diarahkan pada peresmian Stadion Utama Senajan jang megah dan medjadi kebanggaan Nasional itu dan sebentar lagi akan digunakan untuk Asian Games ke IV. Suasana pada saat pembukaan Stadion tersebut.

IRIAN BARAT

BUKAN TERRA INCOGNITA BAGI BANGSA INDONESIA

Didjaman Belanda Irian Barat betul-betul merupakan „terra incognita", merupakan „tanah jang tidak dikenal" bagi dunia maupun bagi bangsa Indonesia. Dalam djaman itu Irian Barat hanja dikenal oleh beberapa orang pemerintahan Belanda, pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha Belanda, beberapa orang awak kapal K.P.M. dan kapal-kapal Belanda lainnja, para pedjoang nasional kita jang diasingkan ke Digul.

Ketjuali beberapa tempat jang merupakan sumber-sumber ekonomi, Irian Barat selama 350 tahun, bahkan hingga sekarangpun tetap merupakan hutan belukar dan rawa-rawa.

Tetapi sedjak 17 Agustus 1945 timbullah perhatian jang besar dari bangsa Indonesia atas Irian Barat. Perhatian besar itu terhalang karena Belanda tetap menduduki wilajah Irian Barat hingga kini. Setelah Trikora diutjapkan maka penghalang-penghalang dan penutup-penutup jang diadakan oleh Belanda sekaligus ditembus oleh rakjat Indonesia. Tri-komando Rakjat

telah membuka pintu Irian Barat untuk dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia.

Bagi mereka jang belum berkesempatan berkenalan langsung dengan bagian tanah-air kita Irian Barat, kami sadjikan beberapa tjatatan dan fakta mengenai wilajah itu.

Pulau Irian adalah pulau kedua jang terbesar didunia. Pulau jang terbesar adalah Greenland dekat Kutub Utara. Garis budjur Timur 141° membelah dua pulau ini; jang bagian Timur termasuk daerah Australia dan jang bagian Barat, terkenal sebagai Irian Barat, adalah wilajah Republik Indonesia.

Untuk dapat membajangkan berapa besar daerah Irian Barat itu, mari kita bandingkan angka-angka ini: luas daerah Irian Barat adalah 3 kali luas Pulau Djawa. Djika luas Negeri Belanda adalah ¼ Pulau Djawa (sebenarnja lebih ketjil lagi), Irian Barat adalah 13 kali Nederland.

Djika Goa, daerah India jang baru sadja dibebaskan dari pen-

Pendjadjahan Belanda di Irian Barat membuat rakjat hidup melarat.

Pasukan R.P.K.A.D., jang merupakan momok bagi lawan, siap siaga menantikan komando terachir untuk merebut Irian Barat.

*

dudukan Portugis, adalah l.k. 3000 km² luasnja, maka luas daerah Irian Barat 380.000 Km², djadi Irian Barat adalah l.k. 125 × Goa. Belum terhitung luas pulau-pulau jang mengelilingi daratan, seperti Pulau Misool, Pulau Salawati, Pulau Waigeo, Pulau Nomfoor, Pulau Biak, Pulau Japen dll.

Penduduknja, jang berdjumlah belum sampai 1 djuta (antara 700.000 dan 1 djuta), jang sebagian besar masih belum mentjapai tingkat perkembangan jang lajak, tentu sadja daerahnja belum mentjapai kemadjuan semestinja. Segala tanggung-djawab adalah pada pihak Belanda, jang telah mendjadi penguasa disana selama lebih dari 350 tahun hingga kini.

Ditengah pulau, memandjang dari Barat ke Timur terdapat deretan pegunungan, ja'ni antaranja pegunungan Nassau, pegunungan Oranje dengan puntjak-puntjaknja jang sangat tinggi, seperti puntjak Carstensz (5040 meter), puntjak Juliana (4720 meter), puntjak Idenburg (4655 meter). — Beberapa nama ini berasal dari djaman jang tidak baik, sehingga nanti tentu akan diberikan nama-nama jang sesuai. — Puntjak-puntjak jang tinggi-tinggi itu, karena tingginja selalu diliputi oleh saldju.

Djadi kalau kita ingin melihat saldju kita tidak usah pergi ke Eropah atau kenegara-negara lain jang berhawa dingin, tetapi kita kelak bisa berpariwisata ke Irian Barat sadja.

Daerah jang besar ini beruntung sekali mempunjai beberapa sungai jang besar. Sungai-sungai itu merupakan djalan perhubungan jang paling baik dan paling murah, karena telah disediakan oleh alam. Tinggal kita menjediakan kapal-kapal serta perahu-perahu. Sungai-sungai itu akan lebih penting artinja nanti sebagai urat-nadi perekonomian dalam daerah ini.

Sungai Membrano jang bermuara dipantai utara dapat dilajari oleh kapal sampai kurang lebih 450 km. Sungai besar jang menudju kepantai Selatan ialah Sungai Digul, jang djuga dapat dilajari kapal-kapal sampai djauh kehulu.

Selain dari kedua sungai itu terdapat banjak sungai-sungai lain, jang pada saat ini dipergunakan sebagai djalan oleh para geriljawan kita, tetapi nanti djuga akan merupakan djalan lalu-lintas ekonomi jang penting.

Irian Barat jang terdekat antara Benua Australia dan Pilipina terus kedaratan Asia dan terletak ditepi Samudra Pacific, baginja ada kemungkinan untuk mendjadi pusat hubungan jang penting, apabila pada perkembangan kemakmuran jang baik didaerah ini. Maka jakinlah kita, tempat-tempat jang mempunjai pelabuhan akan mengalami perkembangan jang pesat. Pelabuhan-pelabuhan jang baik dipantai Utara adalah Serui, Manokwari, Sarmi dan Kotabaru. Sorong, Ba-

Tudjuh orang Mahasiswa asal Irian Barat jang berkundjung di Indonesia beramah-tamah dengan salah seorang tokoh dari Irian Barat, Silas Papare dirumahnja di Kebajoran Baru Djakarta.
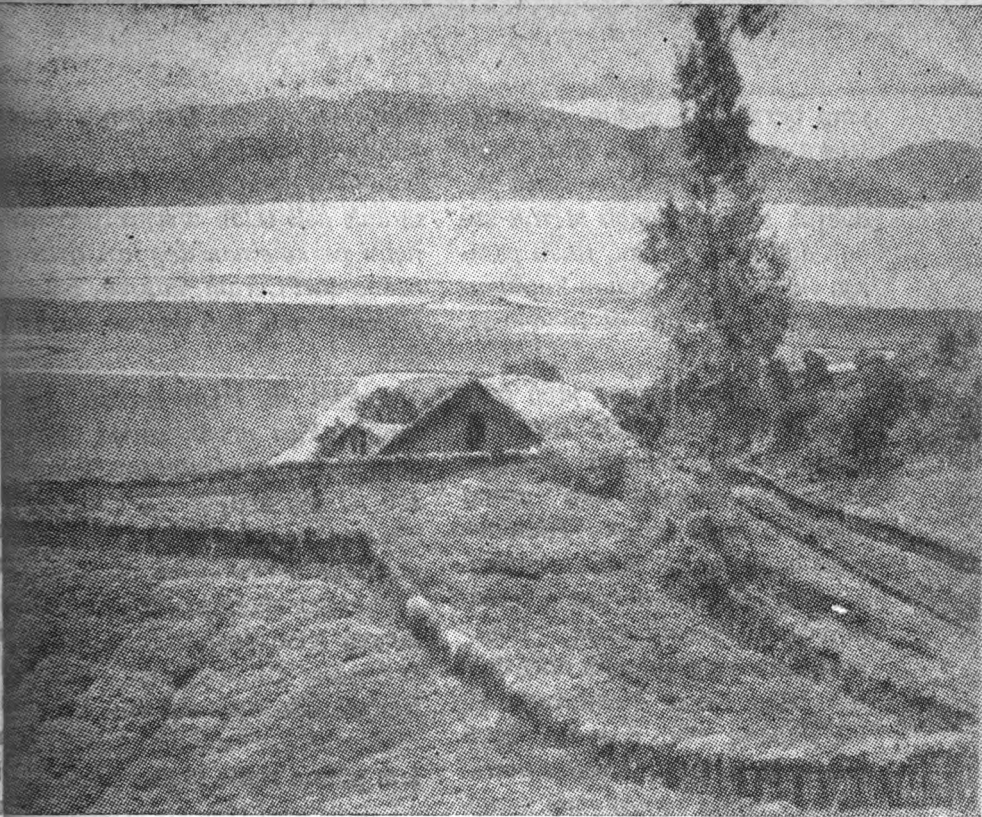
Danau Wisselmehr di Irian ***Barat.***

bo, Kokas, Kaimana dan Fak-fak adalah pelabuhan-pelabuhan dipantai Barat, sedangkan pelabuhan dipantai Selatan adalah Merauke.

Kalau kita melihat pada pulau-pulau dalam gugusan Nusa Tenggara, maka pulau-pulau itu makin ke Timur makin kurang mendapat hudjan. Keadaan itu dapat dilihat pada keadaan tanah dan pertaniannja. Makin ke Timur makin kurang usaha pertanian, makin banjak padang-padang rumput. Tetapi bagi Irian Barat keadaannja lain. Disini tumbuh-tumbuhan lebat sekali, karena tanahnja memang subur dan hudjan tjukup banjak. Maka untuk usaha pertanian banjak sekali kemungkinan-kemungkinannja. Tinggal adanja tenaga dan tangan jang mengerdjakan.

Pada saat ini pada umumnja pertanian di Irian Barat dilakukan oleh penduduk setjara pertanian liar, ja'ni tjotjok-tanam

jang berpindah-pindah. Dipantai Utara antara Sungai Kasi dan Sungai Waar Mangen serta didaerah sekitar Tanah Merah sudah ada persawahan. Hasil padinja tidak kalah dengan kepulauan-kepulauan lain di Indonesia.

Mata pentjaharian jang penting bagi penduduk dipantai-pantai adalah sebagai nelajan, sedangkan dipedalaman orang mentjari hasil hutan. Diantara hasil-hasil hutan jang penting-penting ialah gandarukem (gomkopal), kulit-kulit kaju. Hasil-hasil laut jang specific dari daerah Irian Barat diantaranja ialah tripang, sirip ikan hiu, kulit penju. Hasil-hasil tersebut merupakan barang export jang menghasilkan deviezen bagi Negara.

Adapun bumi Irian Barat kita ketahui mengandung bahan-bahan jang penting. Diantaranja jang njata sudah digali dan diambil hasilnja oleh Belanda ialah minjak-bumi. Selandjutnja masih menunggu penggalian ialah bahan-bahan penting seperti mangaan, nikkel, batu-bara dan djuga ada emas.

Penduduk Irian Barat terdiri dari berbagai suku jang mempunjai logat bahasa sendiri-sendiri, tetapi pada umumnja bahasa Indonesia dipergunakan dan dimengerti didaerah-daerah pantai. Didaerah pantai, terutama disepandjang pantai Barat dan dikota-kota jang agak besar penduduk asli telah tertjampur dengan perkawinan dengan orang-orang dari Ceram, Tidore, Bugis, Makasar dan dari daerah-daerah lain.

Rakjat di Irian Barat, jang hingga kini masih sadja hidup dalam alam pendudukan Belanda sebenarnja sedjak 17 Agustus 1945 telah mendjadi rakjat jang merdeka bersama rakjat Indonesia keseluruhannja, karena Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu meliputi daerah Nederlands-Indie dahulu, seperti ditegaskan Presiden Sukarno dalam pidato radio beliau pada tgl. 18 Agustus 1945.

7 Orang mahasiswa asal Irian Barat jang sedang mengundjungi Ibukota Rep. Indonesia.

Bahwa Irian Barat dengan wilajah Indonesia lainnja itu selalu merupakan kesatuan, merupakan satu unit, itu dibuktikan oleh sedjarah. Dalam hal ini Wakil Menteri Pertama, Menteri Penerangan Prof. Mr H. Muhammad Yamin sewaktu bertjeramah dihadapan para juris pada tgl. 6 April 1962 di Jogjakarta setjara plastis menggambarkan, bahwa pajung kedatukan Sriwidjaja berkembang meliputi wilajah Nusantara jang menurut ketentuan alam terdiri dari 8 kepulauan, ja'ni Semenandjung, Sumatera, Djawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Demikian pula didjaman Madjapahit, kedaulatan Madjapahit meliputi kesatuan tersebut, jang didalamnja termasuk Irian Barat. Demikian, menurut gambaran Pak Yamin, pajung kedaulatan jang berkembang luas didjaman Sriwidjaja dan Madjapahit itu tertutup tidak berkembang didjaman pendjadjahan Belanda. Tetapi berkembang kembali sebagai hasil perdjoangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam mana berkembangnja pajung kedaulatan itu tidak seluas seperti didjaman jang lampau, melainkan hanja seluas Nederlands-Indie.

Proklamasi 17 Agustus 1945 tegas menjatakan kedaulatan Republik Indonesia meliputi djuga wilajah Irian Barat. Pendudukan Belanda menghalangi kekuasaan de facto Republik Indonesia atas wilajah itu. Trikora menghantjurkan penghalang itu, menerobos segala penutup jang diadakan oleh Belanda.

Sukarelawan dari segala pendjuru Indonesia sekarang dengan kedua kakinja berpidjak dibumi daratan Irian Barat. Mereka menduduki kantong-kantong, mengepung kota Sorong, Fak-fak, Merauke dll. Dari laut terus-menerus didaratkan, dari udara tetap diterdjunkan geriljawan-geriljawan pembebas Irian Barat. Kegiatan pembebasan ini tetap meninggi dengan tidak dipengaruhi oleh djalannja usaha-usaha penjelesaian dengan perundingan. Bahkan berita-berita achir mengatakan, bahwa tentara Belanda makin repot keadaannja. Dikabarkan berkali-kali adanja korban-korban serdadu Belanda djatuh didekat kota-kota karena serangan-serangan gerilja kita.

Didalam melakukan tugasnja para pedjoang kita didaratan Irian Barat mendapat keuntungan besar berupa bantuan sepenuhnja dari penduduk asli. Mereka itu ikut aktip berdjoang djuga sebagai penundjuk djalan,

jang berpindah-pindah. Dipantai Utara antara Sungai Kasi dan Sungai Waar Mangen serta didaerah sekitar Tanah Merah sudah ada persawahan. Hasil padinja tidak kalah dengan kepulauan-kepulauan lain di Indonesia.

Mata pentjaharian jang penting bagi penduduk dipantai-pantai adalah sebagai nelajan, sedangkan dipedalaman orang mentjari hasil hutan. Diantara hasil-hasil hutan jang penting-penting ialah gandarukem (gomkopal), kulit-kulit kaju. Hasil-hasil laut jang specific dari daerah Irian Barat diantaranja ialah tripang, sirip ikan hiu, kulit penju. Hasil-hasil tersebut merupakan barang export jang menghasilkan deviezen bagi Negara.

Adapun bumi Irian Barat kita ketahui mengandung bahan-bahan jang penting. Diantaranja jang njata sudah digali dan diambil hasilnja oleh Belanda ialah minjak-bumi. Selandjutnja masih menunggu penggalian ialah bahan-bahan penting seperti mangaan, nikkel, batu-bara dan djuga ada emas.

Penduduk Irian Barat terdiri dari berbagai suku jang mempunjai logat bahasa sendiri-sendiri, tetapi pada umumnja bahasa Indonesia dipergunakan dan dimengerti didaerah-daerah pantai. Didaerah pantai, terutama disepandjang pantai Barat dan dikota-kota jang agak besar penduduk asli telah tertjampur dengan perkawinan dengan orang-orang dari Ceram, Tidore, Bugis, Makasar dan dari daerah-daerah lain.

Rakjat di Irian Barat, jang hingga kini masih sadja hidup dalam alam pendudukan Belanda sebenarnja sedjak 17 Agustus 1945 telah mendjadi rakjat jang merdeka bersama rakjat Indonesia keseluruhannja, karena Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu meliputi daerah Nederlands-Indie dahulu, seperti ditegaskan Presiden Sukarno dalam pidato radio beliau pada tgl. 18 Agustus 1945.

7 Orang mahasiswa asal Irian Barat jang sedang mengundjungi Ibukota Rep. Indonesia.

Bahwa Irian Barat dengan wilajah Indonesia lainnja itu selalu merupakan kesatuan, merupakan satu unit, itu dibuktikan oleh sedjarah. Dalam hal ini Wakil Menteri Pertama, Menteri Penerangan Prof. Mr H. Muhammad Yamin sewaktu bertjeramah dihadapan para juris pada tgl. 6 April 1962 di Jogjakarta setjara plastis menggambarkan, bahwa pajung kedatukan Sriwidjaja berkembang meliputi wilajah Nusantara jang menurut ketentuan alam terdiri dari 8 kepulauan, ja'ni Semenandjung, Sumatera, Djawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Demikian pula didjaman Madjapahit, kedaulatan Madjapahit meliputi kesatuan tersebut, jang didalamnja termasuk Irian Barat. Demikian, menurut gambaran Pak Yamin, pajung kedaulatan jang berkembang luas didjaman Sriwidjaja dan Madjapahit itu tertutup tidak berkembang didjaman pendjadjahan Belanda. Tetapi berkembang kembali sebagai hasil perdjoangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam mana berkembangnja pajung kedaulatan itu tidak seluas seperti didjaman jang lampau, melainkan hanja seluas Nederlands-Indie.

Proklamasi 17 Agustus 1945 tegas menjatakan kedaulatan Republik Indonesia meliputi djuga wilajah Irian Barat. Pendudukan Belanda menghalangi kekuasaan de facto Republik Indonesia atas wilajah itu. Trikora menghantjurkan penghalang itu, menerobos segala penutup jang diadakan oleh Belanda.

Sukarelawan dari segala pendjuru Indonesia sekarang dengan kedua kakinja berpidjak dibumi daratan Irian Barat. Mereka menduduki kantong-kantong, mengepung kota Sorong, Fak-fak, Merauke dll. Dari laut terus-menerus didaratkan, dari udara tetap diterdjunkan geriljawan-geriljawan pembebas Irian Barat. Kegiatan pembebasan ini tetap meninggi dengan tidak dipengaruhi oleh djalannja usaha-usaha penjelesaian dengan perundingan. Bahkan berita-berita achir mengatakan, bahwa tentara Belanda makin repot keadaannja. Dikabarkan berkali-kali adanja korban-korban serdadu Belanda djatuh didekat kota-kota karena serangan-serangan gerilja kita.

Didalam melakukan tugasnja para pedjoang kita didaratan Irian Barat mendapat keuntungan besar berupa bantuan sepenuhnja dari penduduk asli. Mereka itu ikut aktip berdjoang djuga sebagai penundjuk djalan,

sebagai pengajuh dan pengemudi perahu-perahu, jang dipergunakan para geriljawan menjusup kali-kali dan rawa-rawa.

Djadi ramalan pihak Belanda jang mengatakan, bahwa para geriljawan kita akan berantakan dihutan belukar Irian Barat dan akan dimusuhi oleh penduduk asli, ternjata tidak benar. Didaratan Irian Barat geriljawan kita bergerak seperti ikan dalam air, meskipun didalam keadaan jang berat.

Djadi Hikmah jang kita dapat dari Trikora, selain dari hasil bebasnja wilajah Irian Barat dari pendjadjahan dalam tahun 1962 ini, djuga berupa suatu hasil kenjataan, bahwa sekaligus Irian Barat tidak lagi merupakan „terra incognita", tidak lagi merupakan „tanah jang tidak dikenal" bagi rakjat Indonesia.
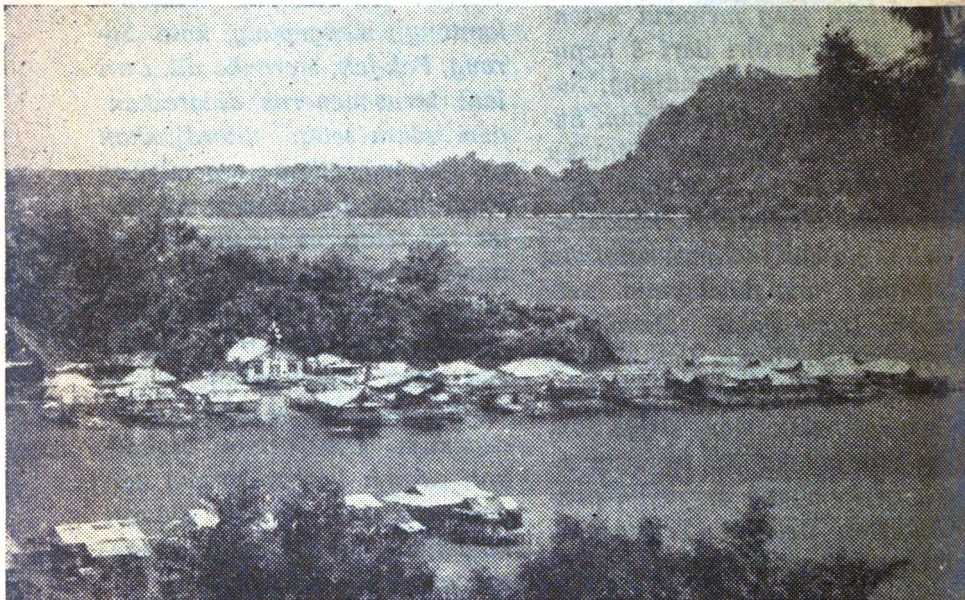
Pemandangan di Kotabaru, dimana kaum kolonialis Belanda mendjalankan politik „devide et impera"-nja jang kita kenal itu.
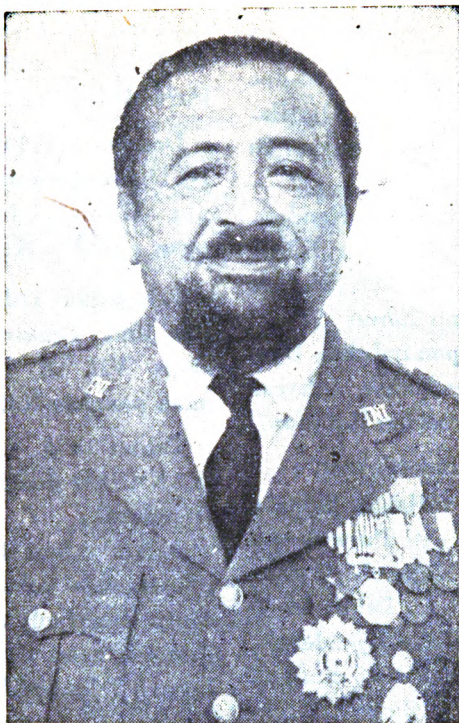
IN MEMORIAM:

LETDJEN GATOT SOEBROTO

Pada tgl. 11-6-1962 pk. 04.40 telah wafat WAKASAD Let. Djend. Gatot Soebroto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, setelah menderita sakit beberapa lamanja.

Dengan tiadanja lagi Let. Djend. Gatot Soebroto ditengah-tengah kita Angkatan Darat chususnja dan seluruh Angkatan Bersendjata dan Bangsa Indonesia pada umumnja kehilangan salah seorang pahlawannja, kepada siapa Presiden/Panglima Tertinggi telah menjampaikan penghormatan terachir dan menaikkan pangkatnja mendjadi Djenderal Anumerta serta menetapkan almarhum sebagai Tokoh Nasional.

Inna Lillahi wa inna Ilaihi Rodjiun.

RIWAJAT HIDUP ALMARHUM

Djenderal (Anumerta) Gatot Soebroto dilahirkan di Djatilawang/Purwokero pada tanggal 10 Oktober 1909.

Beliau tamat Sekolah Rendah, kemudian Sekolah Kader KNIL bulan Desember 1928 dan Sekolah Polisi di Sukabumi tahun 1934.

Selama masa pendudukan Djepang beliau mendjabat sebagai Dai Dantyo (Komandan Bataljon).

Dalam masa Kemerdekaan :

Tahun 1945 mendjabat Kepala Staf Divisi ke-V di Purwokerto dengan pangkat Kolonel. Tahun 1946—1948 Panglima Divisi ke-V di Purwokerto (Major Djenderal).

Dalam bulan Mei 1948 Panglima Corps Polisi Militer. Bulan Desember 1948 disamping djabatannja sebagai Panglima Divisi II di Surakarta djuga mendjabat Gubernur Militer Daerah Istimewa II jang meliputi Semarang, Purwokero, Surakarta, Madiun.

Desember 1949 Panglima Divisi III Diponegoro merangkap Gubernur Militer Djawa Tengah dengan pangkat Kolonel.

Tahun 1951 s/d 17 Oktober 1952 Panglima Tentara dan Territorium VII di Makasar dengan ngan pangkat Kolonel.

Tahun 1956 diangkat sebagai WAKASAD dengan pangkat Maj. Djenderal.

Dalam tahun 1960 disamping djabatannja sebagai WAKASAD djuga mendjadi anggauta Dewan Pertimbangan Agung, pangkat Letnan Djenderal.

Dengan keputusan Presiden, telah dinaikkan pangkatnja sebagai Djenderal Anumerta.

P. J. M. Presiden/ Panglima Tertinggi beserta empat Kepala Staf memberikan penghormatan terachir.........
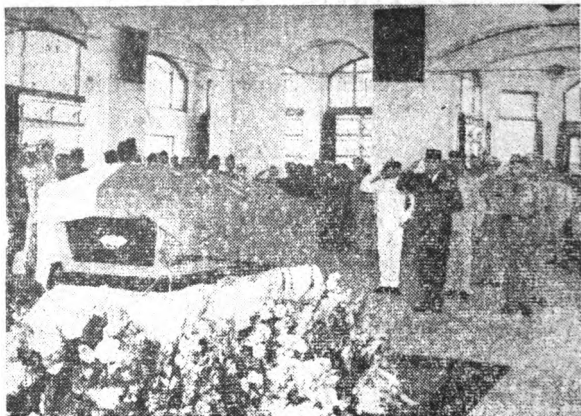
Tanda² djasa : Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Gerilja, Bintang Sewindu Angkatan Perang, Satyalantjana Kesetiaan, Satyalantjana Aksi Militer kesatu, Satyalantjana Aksi Militer kedua, Gerakan Operasi I/Madiun (P.K.I.), Gerakan Operasi Militer II/A.P.R.A./Belanda, Gerakan Operasi Militer IV/D.I. — T.I.I. di Makasar, Bintang Militer kelas satu dari Yugoslavia, Lentjana Peringatan 1 Agustus RRT, Bintang Philippine Legion of Honor.

Djenderal Gatot Soebroto meninggalkan seorang isteri dan 6 orang putera-puteri, jang tertua berumur 14 tahun dan jang terketjil berumur 5½ tahun.

Para perwira tinggi setjara bergiliran mendjaga djenazah almarhum ketika disemajamkan di Aula Mabad, didepan sekali tampak Dubes Indonesia untuk Australia Brig. Djen Suadi.

* * *
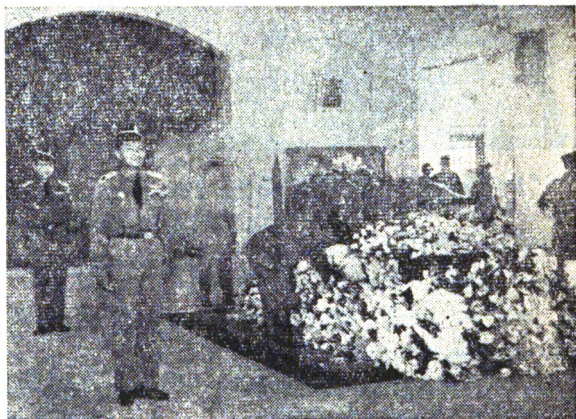
Pengguntingan pita oleh Presiden Sukarno disaat peresmian Stadion Utama Senajan.

ASIAN GAMES IV

ARTI ASIAN GAMES IV UNTUK INDONESIA

Untuk dapat meneliti setjara wadjar sampai beberapa besar manfaat dari pada penjelenggaraan ASIAN GAMES di Indonesia bagi Bangsa dan Negara Indonesia, maka peristiwa internasional ini djanganlah dilihat dari segi keolahragaan semata-mata, apalagi keolahragaan dalam arti jang sempit, tetapi hendaknja diperhatikan dan diperhitungkan djuga semua faktor jang langsung maupun tidak langsung ada hubungannja jang erat dengan penjelenggaraan ASIAN GAMES.

Hendaknja djangan pula dikesampingkan, segala perspektif jang terdapat didlm. ASIAN GAMES guna pembangunan dan kemadjuan Bangsa Indonesia dibidang fisik dan mental, tali-temalinja hubungan antara penjelenggaraan ASIAN GAMES dan pembangunan Indonesia dibidang so-

sial, ekonomi, kebudajaan, hubungan internasional, dan lain sebagainja.

Dalam garis besar soal-soal jang mengenai ASIAN GAMES antara lain sebagai berikut :

1. Pengaruh pembangunan projek-projek ASIAN GAMES terhadap pembangunan Negara.
2. Pengaruh pembangunan projek-projek ASIAN GAMES terhadap pembangunan kota Djakarta.
3. Pengaruh ASIAN GAMES terhadap pembangunan Olahraga.
4. Pengaruh ASIAN GAMES didalam kehidupan Rakjat.
5. Arti ASIAN GAMES dari segi materiil lainnja.
6. Pengaruh ASIAN GAMES terhadap hubungan internasional.
7. Perspektif dalam bidang politis,

Pengaruh Pembangunan Terhadap Pembangunan Negara.

Untuk pembangunan bangunan jang diperlukan untuk ASIAN GAMES, termasuk HOTEL INDONESIA dan PRESS HOUSE, dibutuhkan pengerahan tenaga-tenaga ahli bangunan dan 30.000 tenaga buruh jang terlatih selama waktu kira-kira 3 tahun untuk membangun itu, dan selain itu peningkatan mutu bekerdja tenaga buruh dengan pendidikan tambahan, serta latihan sistim baru pembangunan projek-projek besar dengan peralatan besar jang baru pula. Pengalaman jang diperoleh akan sangat besar manfaatnja bagi pembangunan Indonesia dikemudian hari. Dalam bidang organisasi pekerdjaan besar akan diperoleh pula pengalaman jang sangat berharga. Kebutuhan bahan bangunan dalam djumlah besar berarti pemberian pekerdjaan dipelbagai lapangan selama masa pembangunan itu.

Pengaruh Pembangunan Terhadap Pembangunan Djakarta

Sesudah ASIAN GAMES dilangsungkan, kompleks PERKAMPUNGAN INTERNASIONAL atau PERKAMPUNGAN OLAH RAGAWAN akan merupakan kota ketjil jang modern dengan beratus-ratus rumah baru dan lain-lain gedung besar.

HOTEL INDONESIA jang termodern dan terbesar di Indonesia akan menambah keindahan kota dan memungkinkan penampungan pengundjung² luar negeri lebih banjak, jang berarti penambahan pendapatan deviezen untuk Negara.

Besar pula manfaatnja pembangunan djalan baru jang lebar jang menghubungkan Djatinegara dengan djalan Tanggerang, pele-
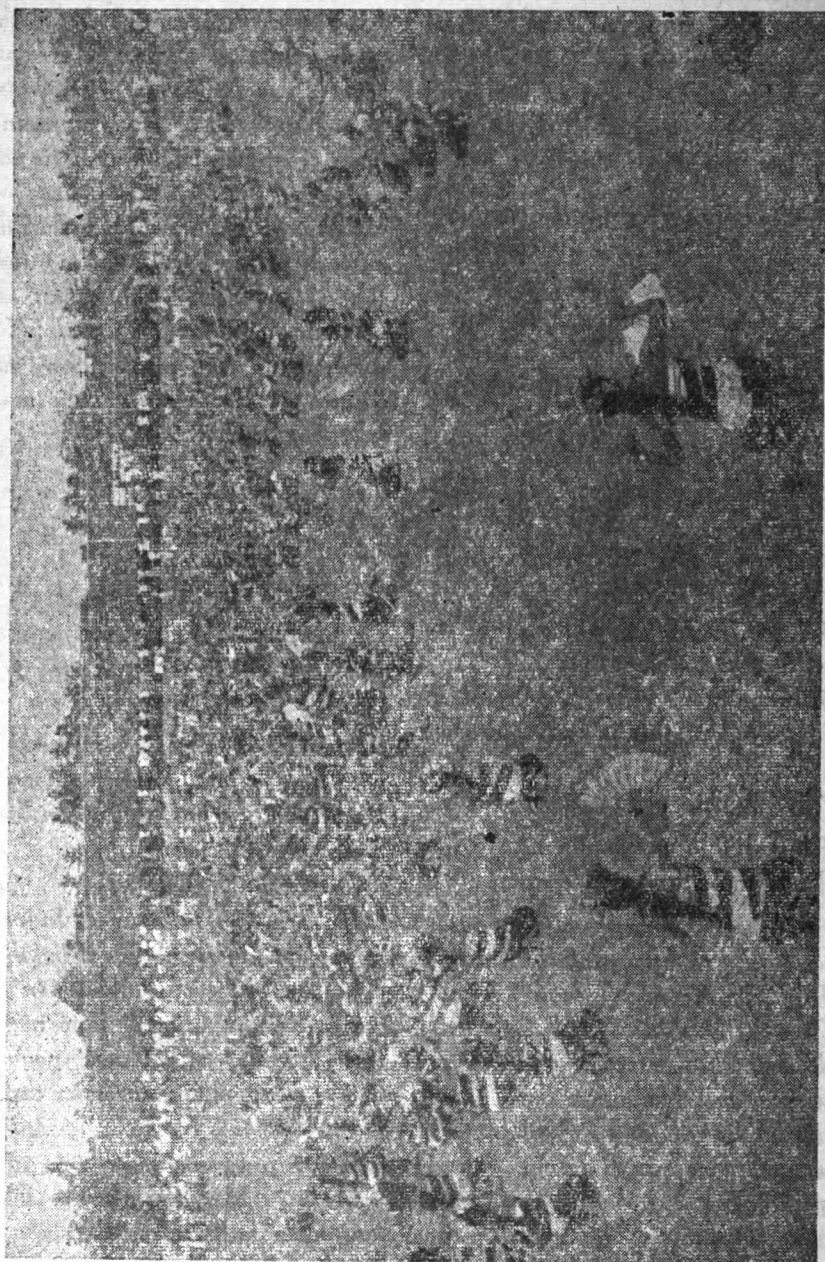
Tari Pendet untuk Asian Games IV telah dipersiapkan di Bali. Pada tanggal 28-7-1962 telah diadakan latihan lengkap jang per-

baran dan perindahan djalan Djenderal Sudirman, pelebaran beberapa djembatan, dan lain-lain. Pembangunan-pembangunan itu tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat apabila ASIAN GAMES tidak dilangsungkan di Djakarta.

Tempat penampungan penduduk jang dipindahkan akan merupakan model kampung jang sederhana, jang memenuhi sjarat kesehatan dan kebutuhan hidup masjarakat jang baik dan teratur.

Pengaruh Asian Games Terhadap Pembangunan Olahraga.

Untuk penjelenggaraan perlombaan-perlombaan jang bertaraf internasional, harus disiapkan organisasi jang bertaraf internasional pula. Keharusan membentuk organisasi jang demikian itu akan membangkitkan semangat berorganisasi jang baik diseluruh Indonesia, jang berarti meningkatnja mutu dalam lapangan organisasi jang sangat bermanfaat pula bagi kemadjuan olahraga dikemudian hari.

Sebagai tuan rumah, Indonesia harus dapat mengadjukan wakil-wakilnja jang bermutu tinggi dalam tiap-tiap perlombaan, dan untuk itu harus dilakukan penggemblengan para pemuda dan pemudi didalam lapangan olahraga setjara berentjana, sistematis dan masaal. Konsekwensi daripada keharusan itu diperlukan pembangunan pusat latihan (training centre), pelatih-pelatih dari dalam dan luar negeri sebanjak mungkin, memperbanjak pertandingan² internasional didalam negeri dan mengirimkan rombongan² olahraga keluar negeri.

Pengaruh Asian Games Didalam Kehidupan Rakjat

Penjelenggaraan Asian Games mendorong pelbagai matjam daja kreasi dalam lapangan kebudajaan setjara luas, memadjukan kegiatan rakjat dalam lapangan perindustrian dan keradjinan rakjat dan pula memadjukan turisme. Demikianlah maka pada pembukaan dan penutupan ASIAN GAMES akan dilakukan demonstrasi tarian nasional setjara massaal, pertundjukan kesenian pameran kebudajaan (art exhibition), kreasi barang-barang souvenir, dan lain-lain.

Arti Asian Games Dari Segi Materiil Lainnja.

Dari segi materiil lainnja penjelenggaraan ASIAN GAMES itu membawa beberapa keuntungan. Sembilan puluh lima prosen dari biaja jang dikeluarkan merupakan investasi dalam seksi pembangunan berupa rumah tinggal, sportvenues,

alat telekomunikasi, kendaraan bermotor, alat tenaga listrik, djalan-djalan baru, djembatan baru dan lain-lain, jang kesemuanja itu merupakan pula kekajaan nasional. Kalau dibuat neratjanja sesudah ASIAN GAMES maka akan dilihat neratja jang menggembirakan Tanah jang sudah diolah, baik dikompleks ASIAN GAMES maupun didaerah penampungan, dipinggir djalan baru dll. mendjadi daerah kelas satu jang lebih tinggi harganja dari semula, harga rumah dan lain-lain bangunan serta sport-venues akan sangat tinggi, padjak upah dan padjak keuntungan akan lebih banjak masuk, dan lain-lain.

Pengaruh Asian Games terhadap Hubungan Internasional.

Datangnja wakil-wakil dari 22 negara Asia jang terdiri dari pelbagai golongan masjarakat akan menambah pengetahuan mereka terhadap Indonesia dan akan bertambah besar pula simpati mereka terhadap perdjuangan Bangsa Indonesia. Pada saat ASIAN GAMES berlangsung tiap hari Indonesia akan mendjadi pusat perhatian seluruh dunia, sehingga nama Indonesia akan lebih terkenal lagi. Djuga rakjat Indonesia akan mengenal para

Wakil P.M./Menteri Perdagangan Uni Sovjet Anastas Mikojan sedang berpidato pada peresmian Stadion Utama Senajan.

peserta dari pelbagai negara itu dari dekat, sehingga menambah pula pengertian rakjat Indonesia tentang bangsa-bangsa lain. Pertemuan-pertemuan internasional itu akan mempererat hubungan Indonesia dengan Negara-negara Asia lainnja.

Perspektif Dalam Bidang Politis.

Indonesia adalah salah satu Negara pendiri (founder) atau sponsor ASIAN GAMES disamping 8 Negara lainnja, jang terbentuk pada saat Indonesia dibela oleh Negara-negara Asia dalam ASIAN CONFERENCE di New Delhi. Konperensi jang dilangsungkan pada bulan Maret 1949 itu bersemangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, membantu perdjuangan rakjat Indonesia dan bertudjuan menggalang kekuatan Bangsa-bangsa Asia dan memupuk solidarita Asia. Empat dari Negara-negara pendiri itu, jaitu India, Pakistan, Sailan, Indonesia, adalah pula Negara-negara sponsor KONPERENSI ASIA-AFRIKA jang dilangsungkan di Bandung dalam tahun 1955.

Maka sudah sewadjarnjalah apabila Indonesia menjumbangkan tenaganja kepada ASIAN GAMES, karena tjita-tjita ASIAN GAMES untuk memperkokoh persatuan Asia dengan djalan olahraga, termasuk salah satu prinsip persetudjuan Konperensi Asia-Afrika. Sudah sewadjarnja pulalah apabila Bangsa Indonesia sangat berhasrat untuk menerima ASIAN GAMES ditanah airnja. Baik dari segi kewadjiban moril terhadap Negara-negara jang pernah membantu perdjuangan Indonesia melawan Belanda dalam tahun 1949 maupun terhadap keputusan-keputusan Konperensi Asia-Afrika pada tahun 1955, maka kepertjajaan Negara-negara Asia kepada Indonesia untuk bertindak sebagai tuan rumah untuk perajaan ASIAN GAMES ke-IV, harus diterima dengan penuh rasa tanggung-djawab dan dengan segala kemampuan jang ada pada Bangsa Indonesia.

Beberapa Negara merendahkan kemampuan kita dan pernah kita dengar utjapan: „Lontjeng kematian ASIAN GAMES akan berbunji di Djakarta dalam tahun 1962". Tantangan itu harus kita terima dengan segala konsekwensinja. Pemerintah jakin bahwa kita akan menjelenggarakan ASIAN GAMES setaraf dengan penjelenggaraan oleh lain-lain Negara, dan pandangan dunia jang kurang baik terhadap
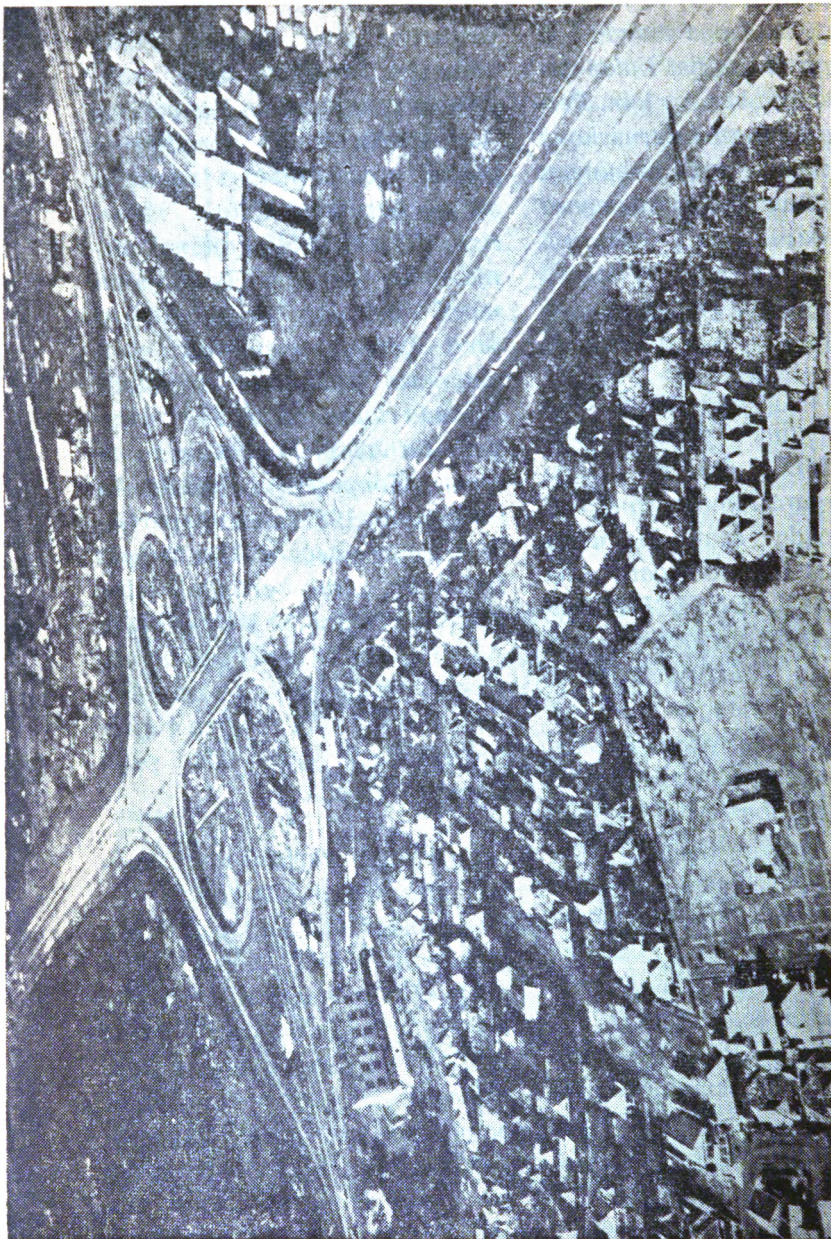
Djambatan Daun Semanggi jang baru dibangun, dimana dua djalan besar bersilang, jaitu Djl. Djenderal Soedirman (dari kiri kekanan atas) dengan Djakarta By-Pass Slipi — Mampang Prapatan (dari kanan kekiri atas).

Bangsa Indonesia akan sekaligus berubah.

Keuntungan jang kita peroleh dari ASIAN GAMES dipelbagai lapangan, nasional maupun internasional, tidak dapat dinilai dengan uang tetapi terang djauh lebih besar harganja daripada biaja jang dikeluarkan untuk keperluan itu.

Sumbangan Olahragawan Kita.

Didalam pergerakan kebangsaan melawan pendadjah Belanda, gerakan olahraga nasional kita untuk merebut kekuasaan Belanda dilapangan olahraga merupakan kekuatan jang tidak ketjil didalam memupuk dan membina kesadaran dan rasa kebangsaan rakjat Indonesia.

Didalam revolusi physik tahun-tahun 1945-1950 konsentrasi gerakan olahraga jang terwudjud dalam PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) ke-I tahun 1948, ternjata telah melahirkan satu tradisi Bangsa Indonesia jang baru dan sangat besar manfaatnja, jaitu penggalangan persatuan Bangsa sebagai kelandjutan daripada manifestasi SUMPAH PEMUDA tanggal 28 Oktober 1928. Tradisi itu sekarang dirajakan sangat meriah tiap 4 tahun sekali.

Gerakan olahraga adalah satu-satunja gerakan rakjat jang sampai sekarang masih tetap bersatu dan belum pernah mengalami perpetjahan. Dalam lapangan olahraga kita hanja mengenal satu organisasi induk, jaitu KOMITE OLYMPIADE INDONESIA (K.O.I.), jang mengatur dan mengkoordinir semua kegiatan olahraga di Indonesia.

Prestasi jang baik dibidang olahraga mengharumkan nama Bangsa dan Negara, misalnja kemenangan jang tertjapai oleh bulutangkis kita dalam kedjuaraan dunia di Singapura dan dalam mempertahankan kedjuaraan kita dalam memperebutkan THOMAS CUP dalam tahun 1961, di Istana Olahraga Senajan Djakarta, dan djuga hasil jang gemilang jang diperoleh kesebelasan nasional kita di OLYMPIADE MELBOURNE tahun 1956 melawan kesebelasan Uni Sovjet.

•

PEMBANGUNAN DLM. RANGKA PERSIAPAN ASIAN GAMES IV.

Telah mendjadi keputusan Pemerintah Republik Indonesia, bahwa: „Perajaan Asian Games IV di Djakarta harus dilaksanakan demikian rupa, sehingga mendjadi kebanggaan nasional Bangsa Indonesia serta dapat menanamkan dasar-dasar jang

akan membawa kemadjuan-kemadjuan dikemudian hari kepada pembangunan Negara dalam arti jang seluas-luasnja, baik dari segi materiil, maupun dari segi physik, moril dan mental, serta pula mempererat hubungan baik Indonesia dengan Negara-negara Asia berdasarkan pengertian dan simpati Negara-negara tersebut kepada perdjuangan dan tjita-tjita kehidupan Bangsa Indonesia".

Dengan berpedoman pada pendirian pemerintah tersebut dan mengingat pula akan ketentuan-ketentuan keharusan adanja penjelenggaraan:

1. *Perlombaan-perlombaan dalam pelbagai djenis olahraga, jang djenis dan djumlah minimalnja telah ditetapkan.*
2. *Perkampungan internasional, jang harus dapat memberi akomodasi penginapan dan makanan jang lajak kepada semua peserta dan officials dan disamping itu dapat memberi kesempatan untuk beristirahat dan berlatih (warming up) dengan setjukupnja sesuai dengan keperluan seorang peserta didalam menjiapkan diri untuk perlombaan-perlombaan.*
3. *Penampungan para penonton*

Pemandangan dikala Stadion Utama Senajan diresmikan (General Rehearsal) pada tgl. 21-7-1962.

jang sebaik-baiknja ditiap gelanggang olahraga, sehingga djumlah penonton jang besar bagaimanapun djuga tidak akan dapat mengganggu djalannja perlombaan-perlombaan.

4. Fasilitet jang lajak kepada para peserta dan officials dari semua negara untuk dapat ikut merajakan Asian Games, sehingga semua keperluan jang berhubungan dengan Asian Games mendapat pelajanan jang sebaik-baiknja. Maka untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan jang tersebut diatas dan supaja Asian Games ke-IV jang akan diadakan di Djakarta dari tanggal 24 Agustus sampai tanggal 4 Sept. 1962 berlangsung dengan tjemerlang, maka dibangunlah gelanggang-gelanggang olahraga (sportvenues) dan gedung-gedung baru sebagai dibawah ini:

I. PUSAT OLAHRAGA SENAJAN.

Pusat Olahraga Senajan meliputi daerah selebar 225 hektar, dimana dibangun tudjuh buah gelanggang olahraga jang penting, jakni:

1. Stadion Utama (Main Stadium)

a. kapasitet akomodasi penonton: 100.000 (semua tertutup).

b. untuk atjara-atjara:
 — upatjara pembukaan dan penutupan
 — demonstrasi massaal (kesenian Indonesia)
 — sepakbola (semi finale dan finale)
 — atletik

Lapangan sepakbola berukuran internasional (70 X 105 meter). Cinder track untuk atletik sepandjang 400 meter dengan 8 djalur. Floodlight untuk pertandingan-pertandingan dimalam hari.

Tribune utama terdiri atas:
 — 500 tempat untuk tamu-tamu kehormatan
 — 2000 tempat untuk tamu-tamu lain
 — 2500 tempat untuk para peserta
 — 1000 tempat untuk pers dll.

Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

2. Istana Olahraga (Sport Palace)

a. kapasitet akomodasi penonton: 10.000 (gedung tertutup)

b. untuk atjara-atjara.

— bulutangkis (badminton)
— tennis medja (table tennis)
— basketball, dan lain-lain perlombaan indoors.

Court berukuran 26 × 49 m.
Selesai: dalam bulan Djuni 1961.

3. *Stadion Renang (Swimming Stadium)*
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 8000 (sepertiga tertutup).*
   b. *untuk atjara-atjara:*
      — renang (swimming)
      — lontjat indah (diving)
      — polo air (waterpolo)

   Kolam renang dengan 8 djalur, berukuran 21 × 50 m.
   Kolam lontjat indah, berukuran 21 × 25 meter, dengan papan-papan setinggi 3, 5, 7½ dan 10 meter.
   Floodlight untuk pertandingan-pertandingan dimalam hari.
   Selesai: dalam bulan Desember 1961.

4. *Stadion Tennis (Tennis Stadium)*
   Terdiri dari:
   A. *Centre-court*
      a. *kapasitet akomodasi penonton: 6000 (sepertiga tertutup)*
      b. *untuk atjara-atjara:*
         — tennis (semi finale dan finale)
         — volleyball (semi finale dan finale)
         — tindju (boxing).

   Double court, berukuran 48 × 48 meter.
   Floodlight untuk pertandingan-pertandingan dimalam hari.
   Selesai: dalam bulan Desember 1961.

   B. *Tennis courts*
   Terdiri dari 6 double courts (djadi semuanja 12 courts)
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 3000 (terbuka) (akomodasi penonton untuk masing-masing double court: 500)*
   b. *untuk atjara-atjara: tennis (pendahuluan)*

   Selesai: dalam bulan Djuni 1962.

5. *Stadion Atletik dan Hockey (Athletics and Hockey Stadium)*
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 25.000 (tribune tertutup: 5000)*
   b. *untuk atjara-atjara:*
      — atletik
      — hockey
      — sepakbola, permainan bola lainnja.

   Lapangan berukuran 70 ×

105 meter. Cinder track untuk atletik sepandjang 400 meter dengan 8 djalur.
Floodlight untuk pertandingan-pertandingan dimalam hari.
Selesai: dalam bulan Mei 1962.

6. *Lapang Volleyball (Volleyball Court)*
Terdiri dari 4 double courts (djadi semuanja 8 courts).
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 4000*
   (akomodasi penonton untuk masing-masing double court: 1000)
   b. *untuk atjara-atjara volleyball (pendahuluan)*
Selesai: dalam bulan Djuni 1962.

7. *Gedung Basketball (Basketball Hall)*
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 4000 (gedung tertutup)*
   b. *untuk atjara-atara:*
   — *basketball*
   — *perlombaan indoors lainnja.*
Court berukuran: 30 × 40 meter.
Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

Berhubung banjaknja peserta jang pada waktu bersamaan harus diberi kesempatan berlatih, maka disekitar Pusat Olahraga Senajan itu dibangun pula 5 buah lapangan-lapangan latihan (training fields).

Selain bangunan-bangunan baru tersebut diatas diperlukan pula perbaikan dan/atau penjempurnaan sportvenues jang sudah ada, jang akan diperlukan untuk perlombaan-perlombaan pendahuluan atau latihan-latihan:

1. *Stadion Ikada (Ikada Stadium)*
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 45000 (Tribune Barat: 16000*
   Tribune Timur: 7000
   Tribune duduk terbuka Utara dan Selatan masing-masing: 6000
   Tempat berdiri di Utara dan Selatan masing-masing: 5000)
   b. *untuk atjara-atjara:*
   — *sepakbola (pendahuluan)*
   — *atletik*
   Sedjak tahun 1951 telah dipakai untuk pertandingan sepakbola internasional.

2. *Gedung Olahraga Ikada (Ikada Sport Hall)*
   a. *kapasitet akomodasi penonton: 5000 (gedung tertutup)*
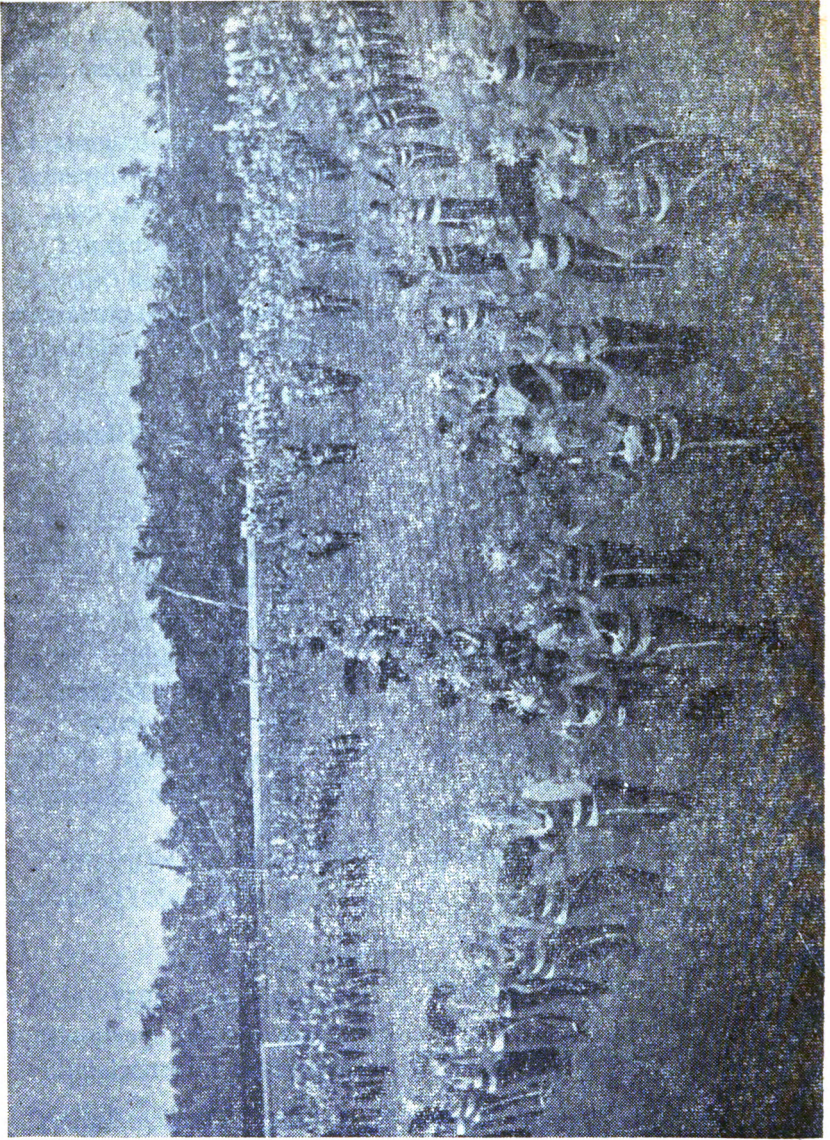
b. untuk atjara-atjara: — untuk latihan-latihan dan dimana perlu untuk perlombaan-perlombaan indoors pendahuluan.

3. Kolam-kolam Renang (Swimming Pools)
   A. Manggarai: untuk latihan-latihan.
   B. Tjikini : untuk latihan-latihan.

4. Lapangan Sepakbola Menteng (Menteng Football Field)
   Di Menteng: untuk latihan-latihan.

5. Lapangan Menembak Tjibubur (Tjibubur Shooting Range)
   Diperlukan untuk perlombaan-perlombaan menembak.

II. PERKAMPUNGAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL VILLAGE)

Untuk penampungan djumlah peserta jang demikian besar dari negara-negara anggota Federasi Asian Games, diperlukan 2 buah perkampungan:

1. Perkampungan Pria

   Terdiri dari 350 buah rumah, masing-masing untuk 6 orang.

   Seluruh perkampungan ini dapat didiami oleh 2.500 orang.

   Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

   Dalam perkampungan ini diadakan: 2 buah ruang makan (dining hall), masing-masing untuk keperluan makan 400 orang pada waktu bersamaan. Sebuah rumah sakit, dan lapangan-lapangan untuk berlatih (warming up) dan rekreasi.

2. Perkampungan Wanita

   Terdiri dari sebuah flat 8-tingkat, jang dapat didiami sekurang-kurangnja oleh 350 orang wanita.

   Didirikan pula sebuah ruang makan (dining hall) untuk 100 orang.

   Selesai: dalam bulan Mei 1962.

3. Gedung Administrasi Perkampungan.

   Gedung ini didirikan untuk management dan administrasi jang berhubungan dengan segala urusan Perkampungan Internasional.

   Gedung ini mempunjai ruangan-ruangan untuk:

   — Djawatan pos, telegrap dan telepon.
   — Bank
   — Souvenir shops
   — Barber shops
   — Beauty salon
   — International restaurant

Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

4. *Taman Persahabatan (Garden of Friendship)*
   Taman ini berada dilapangan pemisah antara perkampungan pria dan wanita, jang lebarnja 5 hectare. Taman ini dilengkapi dengan telaga indah mungil, pelbagai kiosk untuk refreshment, jang dibentuk menurut tjorak kebudajaan negara-negara Asia, bangku-bangku duduk untuk mengaso, teater terbuka untuk pertundjukan kesenian, serta ditanami pohon-pohon dan bunga-bunga jang aneka warna dari seluruh daerah Indonesia. Taman ini disediakan untuk tempat rekreasi, baik bagi pria maupun wanita peserta Asian Games.

Seluruh kompleks perkampungan-perkampungan ini terletak hanja 200 meter djauhnja dari Pusat Olahraga Senajan, sehingga djarak jang sedemikian dekat itu dapat ditempuh dengan berdjalan kaki.

III. BANGUNAN-BANGUNAN LAIN

1. *Information Centre (Pusat Penerangan)*
   Terletak kira-kira 300 meter dari Pusat Olahraga dan terdiri dari gedung-gedung untuk:
   a. *Pelajanan Pers dan Fasilita.*
   b. *Pelajanan Foto dan Publisitet.*
   c. *Publikasi.*
   d. *Penjelenggaraan Radio dan Televisi.*
   e. *Penjelenggaraan dan Pelajanan Film.*
   f. *Restoran untuk Pers.*
   g. *Penerangan Umum.*
   Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

2. *Organizing Committee Building.*
   Gedung bertingkat tiga ini dibangun dekat Pusat Olahraga, untuk mempermudah hubungan antara para delegasi Asian Games dan Organizing Committee.
   Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

3. *International Guest House.*
   Gedung bertingkat tiga ini dibangun dekat Perkampungan Internasional dan Pusat Olahraga, untuk tempat kediaman dan konperensi bagi:
   — *anggota-anggota A.G.F. Council (Dewan Federasi Asian Games)*
   — *anggota-anggota I.O.C. (Komite Olympiade Indonesia).*

— anggota-anggota International Federations (Federasi-federasi internasional).

— anggota-anggota N.O.C. (Komite-komite Olympiade Nasional).

Gedung ini mempunjai 64 kamar tidur, ruang makan, restoran, ruang-ruang konperensi, ruang bibliotik, ruang rekreasi dll.
Selesai: dalam bulan Djuni 1962.

4. *Press House*
Gedung bertingkat enam, dibangun dekat Hotel Indonesia, terutama untuk kediaman para wartawan, luar dan dalam negeri, termasuk reporter-reporter radio, film dan televisi, mempunjai 60 kamar tidur.

Gedung ini diperlengkapi dengan: ruang-ruang pers, ruang-ruang Konperensi, restoran, ruang-ruang rekreasi, dan sebuah teater untuk 500 orang untuk pertundjukan film dan kesenian.

Gedung ini djuga diperlengkapi dengan kantor pos, telepon dan telegrap, dan mempunjai hubungan telex dan telepon dengan Pusat Olahraga.

Selesai: dalam bulan Djuli 1962.

5. *Hotel Indonesia*
Hotel hypermodern, bertingkat 14, terletak di Djalan Thamrin, mempunjai 420 kamar jang air-conditioned, dan sebuah kolam renang.
Selesai: dalam bulan Djuli 1962.
Didekat Hotel ini didirikan ditengah-tengah rotonde jang berupa kolam di Djalan Thamrin, sebuah Tugu Selamat Datang jang indah.

IV. DJALAN-DJALAN RAYA

a. *Djalan raya Slipi — Mampang Prapatan*
Djalan raya ini menghubungkan Grogol disebelah Barat dengan Djatinegara disebelah Timur, pandjangnja 14½ km, terbagi atas 4 djalur, jakni 2 djalur untuk lalu-lintas tjepat, dan 2 djalur untuk lalu-lintas lambat.
Djalan raya ini melintasi djalan raya Djenderal Soedirman melalui djembatan daun semanggi (Cloverleaf bridge).

b. *Djalan Thamrin — Djalan Djenderal Soedirman*
Djalan raya ini menghubungkan kota Djakarta bagian Utara dengan Pusat Olahraga Senajan, dan dengan

kota satelit disebelah Selatan, Kebajoran.
Untuk keperluan Asian Games dan menampung keramaian lalu-lintas antara Djakarta dan kotabaru Kebajoran, maka djalan raya ini diperlebar sehingga lebarnja 50 meter.

c. Djakarta By-pass
Djalan-raya tjepat jang modern ini ialah djalan memintas (by-pass) menghubungkan Tandjung Priok dengan Tjililitan, pintasan jang pandjangnja 17,9 kilometer. Djalan ini dibuat disebelah Timur kota Djakarta, dalam arah Utara-Selatan, dengan demikian kendaraan-kendaraan jang langsung dari Tandjung Priok kearah Bogor, Bandung dll. tidak lagi masuk kekota Djakarta, sehingga mengurangi pula keramaian lalu-lintas dalam Ibukota. Selesai: dalam bulan Agustus 1962.

* * *
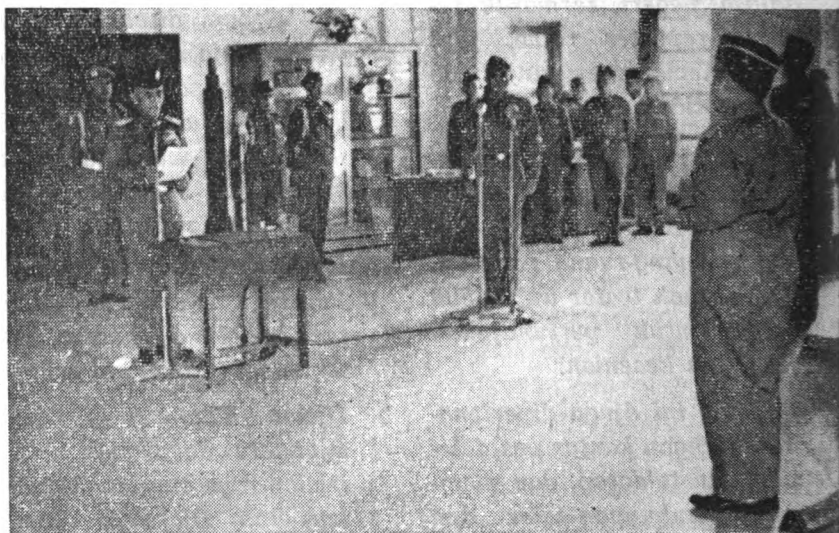
Timbang-terima Kasad dari Djenderal A. H. Nasution kepada Kasad baru Maj. Djen. A. Jani di Aula M.B.A.D. tgl. 25-6-'62.

Prof. Mr. Dr. Soekanto :

SEDIKIT TENTANG HAL-ICHWAL KOTA DJAKARTA SAMPAI LAHIRNJA REPUBLIK INDONESIA.

(I)

Dari Redaksi :

Dalam rangka Peringatan Ulang tahun Ke-435 Kota Djakarta pada bulan Djuni ini, kepada para Djurupenerang kami sadjikan pedato Prof. Mr. Dr. Soekamto diutjapkan di depan sidang istimewa Dewan Perwakilan Kota Sementara (D.P.K.S.) Djakarta pada tgl. 22-6-1956 berkenaan dengan perajaan memperingati kota Djakarta berusia 429 tahun, ja'ni suatu pidato jang menguraikan sedjarah selajang pandang daripada kota Djakarta.

Sedjarah kota Djakarta ini kami anggap patut diketahui oleh para Djurupenerang chususnja dan oleh chalajak ramai pada umumnja, oleh karena kota Djakarta ini bukan sadja Ibukota Republik Indonesia tapipun merupakan kota keramat bagi segenap Bangsa Indonesia sebagai :

1. *Kota lahirnja Boedi Utomo pada tgl. 20-5-1908 sebagai titik-tolak perdjoangan nasional setjara terorganisasi melawan imperialisme dan kolonialisme (Hari Kebangkitan Nasional).*
2. *Kota Sumpah Pemuda dan untuk pertama kali diperdengarkannja lagu Indonesia Raya pada tgl. 28-10-1928.*
3. *Kota lahirnja Pantjasila pada tgl. 22-6-1945.*
4. *Kota Proklamasi 17-8-1945.*
5. *Kota lahirnja Manifesto Politik (Manipol/Usdek) tgl. 17-8-1959 dan Resopim tgl. 17-8-1961.*

Saudara² jang termormat
Saudara² penduduk Djakarta Raya !

Dalam tjeramah jang saja utjapkan pada tg. 22 Djuni tahun jang lalu didepan konperensi pendahuluan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, saja telah kemukakan bahwa dengan djalan rekonstruksi kita dapat menganggap hari 22 Djuni 1527 sebagai Hari Lahir nama Djajakarta jang diberikan kepada tempat jang kita diami ini. Kepada Jang Berwadjib diserahkan apakah hari itu dapat deresmikan.

Seperti Saudara² telah mengetahui, pada permulaan tahun ini, dengan keputusan Dewan Perwakilan Kota sementara Djakarta Raya tg. 23 Pebruari 1956, diputuskan, bahwa tanggal 22 Djuni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahir kota Djakarta.

Perkenankanlah saja tjatat disini, bahwa tidak hanja tanggal 22 Djuni ialah hari bersedjarah, akan tetapi djuga hari 23 Pebruari 1956, oleh sebab pada hari ini dinjatakan, berapa besarnja kesadaran Nasional Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja, jang terbukti dari konsiderans keputusan tersebut. Konsiderans itu toh berbunji:

Mengingat bahwa kemampuan mengenai dan menghargai sedjarah adalah sjarat utama untuk mentjapai kesadaran dan mendalamkan keinsjafan bangsa serta mengenal pribadi sendiri.

Begitulah Saudara² sekalian. Dengan keputusan jang resmi itu bangsa Indonesia sekarang mempunjai peringatan lahir Ibukotanja, jang tidak hanja mempunjai arti-Nasional akan tetapipun arti-Internasional. Apabila beberapa negara didunia ini dapat memperingati hari lahir Ibukotanja, Negara Indonesia — walaupun masih muda akan tetapi mempunjai budaja jang sudah tua — sekarang djuga dapat merajakan hari lahir Capitalnja.

Djika saja dahulu (pada tg 22 Djuni 1955) — berdasarkan penjelidikan jang tertulis dalam karangan „Dari Djajakarta ke Djakarta" — menguraikan pertjobaan saja untuk menemukan hari lahir nama Djajakarta untuk tempat jang didiami kita semua ini, sekarang saja tjoba membentangkan hal-ichwal kota Djajakarta jang berachir dengan kota Djakarta, artinja, sampai dibentuknja Republik Indonesia. Tentu sadja berhubung dengan waktunja, pembentangan ini hanja dapat diberikan selajang pandang.

Sebagai pendahuluan saja kemukakan disini, bahwa ada jang menanjakan kenapa karangan tersebut dimulai dengan Djakarta dan diachiri dengan Djajakarta; dengan perkataan lain: kenapa dari djaman sekarang menudju kedjaman dulu dan tidak: dari Djajakarta ke Djakarta atau dari djaman dulu sampai sekarang?.

Memang pada umumnja penulis² tentang sedjarah mulai dengan djaman dahulu menudju kedjaman sekarang. Akan tetapi sistim jang sebaliknja dalam ilmu pengetahuan sedjarah djuga diakui, malahan sistim ini adalah sistim jang modern.

Lain dari itu. Dalam hal Djajakarta ini, jang harus diketemukan ialah sesuatu dalam djaman dahulu. Probleemnja ialah suatu hari dalam tahun 1527. Menurut pendapat saja: Lebih logis dan lebih mudah ialah untuk mulai dengan djaman sekarang jang diketahui menudju kedjurusan djaman sebelumnja untuk berachir dalam djaman tudjuan kita jang tidak diketahui tetapi jang ingin diketahuinja.

Dengan mengetahui lahir nama Djajakarta bagi wilajah jang didiami kita ini, kita sekarang dapat menguraikan hal-ichwal kota kita dari dahulu sampai sekarang.

Sebelum nama Djajakarta diberikan diwilajah jang kita diami ini, dipantai laut Djawa berada suatu tempat jang dinamai Sunda Kelapa.

Mungkin tempat ini sudah ada dalam djaman Sriwidjaja Singasari (± 1300 dan sebelumnja), pastilah bahwa dalam djaman Madjapahit (± 1300 — ± 1400) — periodisering ini serta jang berikutnja dilihat dari sudut Indonesia jang sangat luas — Sunda Kelapa adalah suatu tempat pelabuhan Keradjaan Pedjadjaran.

Dalam masa Keradjaan² Islam (± 1400 — ± 1500) dimana keradjaan² ini mempunjai peranan utama, Sunda Kelapa belum merupakan suatu pelabuhan jang berarti. belum mempunjai perdagangan jang luas, walaupun disebabkan oleh perdagangan meritja jang diangkut oleh, perahu² Tionghoa Pedjadjaran agak makmur. Letaknja tidak dalam djalandagang dari Maluku kedjurusan Barat, jang pada masa itu melalui Malaka.

Baru dalam masa Atjeh — Mataram — Makassar — (± 1500 — ± 1700), keadaan berubah, setelah bangsa Portugis dalam tahun 1511 merebut Malaka dan pada tahun 1521 Pasei.

Apakah akibat² perebutan itu? Pedagang² Moslim terpaksa atau dipaksa mentjari djalan lain dan dengan sendirinja meninggalkan route Selat Malaka. Sedari saat itu perdagangan dilakukan melalui Selat Sunda; pulau Djawa mulai berarti dalam perdaganan luas. Pedagang² sendiri meninggalkan atau melarikan diri dari Malaka untuk menghuni dengan sendirinja antaranja ditepi laut dipulau Djawa. Salah satu tempat jang didatangi oleh mereka untuk bertempat tinggal ialah Sunda Kelapa. Begitulah Sunda Kelapa mendjadi suatu pelabuhan jang mempunjai perdagangan luas.

Kita tidak akan membentangkan dengan pandjang-lebar peristiwa² jang telah terdjadi sesudah tahun 1521. Tjukuplah kiranja dengan singkat sadja.

Gubernur Portugis di Malaka Jorge d'Alboquerque jang melihat keadaan jang baik itu di Sunda Kelapa berusaha unuk mendapat hubungan dagang dengan Pedjadjaran.

Pada tanggal 21 Agustus 1522 dengan perantaraan Henrique Leme telah dibuat ruatu perdjandjian antara Pedjadjaran dengan Portugis. Dalam perdjandjian itu orang Portugis diberikan idjin untuk membangun suatu benteng („sterkte") di Sunda Kelapa, sedangkan Sunda menerima barang² jang dibutuhkan. Selandjutnja orang Portugis akan mendapat meritja menurut keinginannja. Suatu batu peringatan sebagai tanda penetapan dan pengakuan dari perdjandjian tersebut ditanam disebelah kanan (timur) kuala kali Tjiliwung didaerah Sunda Kelapa.

P a d a t a h u n 1 5 2 7 (k i r a² a c h i r b u l a n P e b r u a r i) S u n d a K e l a p a d i r e b u t o r a n g M o s l i m d i p i m p i n o l e h F a l a t e h a n.

Pada kira² pertengahan bulan Maret 1527 berlabuh di Sunda Kelapa Franrisco de Sa' dengan maksud untuk membangun benteng atas perdjandjian 21 Agustus 1522. Ia tidak mengetahui bahwa jang berkuasa ditempat itu bukan Pedjadjaran lagi akan tetapi orang Moslim. Achirnja orang Portugis dipukul mundur oleh orang Muslim. Francisco de Sa' jang mendapat kerugian dipaksa untuk kembali ke Malaka.

Pada kira² tanggal 22 Djuni, setelah kemenangan jang sempurna, kemenangan jang sepenuhnja („volbrachte zege") jaitu atas orang² jang memeluk agama Hindu dan djuga atas orang Portugis musuh jang sangat dibentji oleh

orang Moslim nama Sunda Kelapa diganti dengan nama Djajakarta („volbrachte zege").

Pada tanggal 22 Djuni 1527 — 429 tahun jang lampau mulailah sedjarah kota Djajakarta dengan singkat Djakarta (nama kota kita sekarang ini), sedjarah mana mempunjai ups and downs.

Rupa-rupanja sampai dibentuknja Keradjaan Banten, perintah di Djajakarta dipegang oleh Falatehan.

Seperti kita mengetahui, Falatehan — jang kemudian disebut Sunan Gunung Djati — menurunkan radja² di Banten dan Tjirebon.

Radja jang pertama di Banten ialah Maulana Hasanuddin alias Pangeran Sabakingking jang bertachta ± 1550 ± 1570.

Kemudian Falatehan mengundurkan diri dari Djajakarta untuk menjerahkan daerah itu dalam tangan Keradjaan Banten.

Banten, sebagai tempat kediaman radja, mendjadi penting; Djajakarta mundur nilainja baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat perdagangan. Ditjeritakan, bahwa selaku tempat tinggal di Djajakarta tidak menarik. Didaerahnja terdapat banjak rawa.

Kedjurusan laut rawa², kedjurusan pedalaman belukar, dan selainnja hutan belukar, tempat hidup binatang² buas. Penduduknja oleh karena itu sangat ketjil djumlahnja. Herankah kita bahwa bahan² tentang keadaan di Djajakarta pada djaman itu amat sedikit, oleh karena sebagai tempat tidak begitu berarti? Herankan kita, karena itu orang Belanda pada achir ahun 1596 (Nopember) tidak langsung datang di Djajakarta akan tetapi setelah berlabuh selama 4 bulan di Banten, oleh sebab Banten pada waktu itu lebih penting daripada Djajakarta.

Ketika orang² Belanda mula² datang di Djajakarta, sebagai kepala pemerintahan ditempatkan disitu seorang Pangeran Djakatra atau Djakatra (menurut sebutan Belanda) seorang anggauta keluarga radja Banten. Beliau ialah putra Ratu Bagus Angke — djuga

stperti Pangeran tersebut seorang radja — bawahan („vazal") dari keradjaan Banten—dengan Ratu Pembajun.

Ratu Pembajun ini ialah putri Hasanuddin (radja Banten, putranja Sunan Gunung Djati) dengan anak perempuan Pangeran Trenggana dari Demak. Djadi Ratu Bagus Angke ialah menantu Hasanurdin; ia diambil menantu oleh karena djasa²nja. Menurut Sedjarah Banten Rantê², Ratu Bagus Angke ini adalah putera Ki Mas Wisesa Adimarta.

Dari sebab itu Pangeran Djakatra djuga disebut: Kawis Adimarta, diambil dari kakenja Ki Mas Wisesa Adimarta. Dalam karangan² orang Belanda, Pangeran Djakatra tersebut dinamai Widjajakrama.

Kedatangan² orang Belanda di Djajakarta (1596, 1599, 1602, 1605, 1607) tidak memberikan tanda², bahwa mereka ingin mempunjai pangkalan jang agak pasti di Djajakarta. Tempat tidak menarik perhatiannja; Pelabuhan ini hanja dianggap sebagai tempat memuat air, makanan dsb. sadja bagi keperluan dalam perdjalanan dan selandjutnja untuk mmebeli arak. Ini berarti, bahwa dalam masa itu di Djajakarta sudah ada orang Tionghoa.

Akan tetapi, dalam tahun 1610 pikiran mereka berubah.

Dalam tahun 1603 Van Verwijck, atas nama Kompeni (V.O.C.), suatu badan perdagangan jang dibentuk dalam tahun 1602, mendapat idjin untuk mendirikan suatu bangunan dari batu di Banten. Lain dari itu, suatu benteng lain tidak diperbolehkan.

„Factorij" ini senantiasa dalam keadaan gontjang, takut kebakaran atau dibakar. takut ketjurian atau kena rampok. Selain itu kantor Kompeni ini mengalami banjak kesukaran, oleh sebab Banten adalah suatu tempat jang tak sehat. Lagi pula, bea meritja („pepertollen") ditentukan dengan sewenang-wenang oleh Banten.

Berbuhung dengan rintangan dan kesukaran jang begitu banjak, Jacques l'Hermite: „president" kantor Banten itu bermaksud untuk memindahkan „factorij"-nja ke Djajakarta, meskipun tempatnja tidak menarik, karena letaknja dipintu keluar-masuk batas Barat-Timur dan Timur-Barat. Ketahuilah bahwa Belanda dalam tahun 1605 telah membuat benteng Victoria di Ambon untuk dipakainja sebagai pangkalan, akan tetapi oleh karena Ambon letaknja begitu djauh kedjurusan Timur, mata mereka didjatuhkan toh ke-

pada Djakarta, berhubung dengan letaknja jang sangat baik.

Begitulah, dalam bulan Nopember 1610 Jarques l'Hermite tersebut berhasil membuat suatu perdjandjian dengan Pangeran Djakarta, jang — walaupun diubah — dapat disjahkan oleh gubernurdjendral Pieter Both pada bulan Djanuari 1611. Berdasarkan perdjandjian ini Kompeni dapat idjin untuk berdagang. Selain dari itu — inilah fasal jang sangat penting — Kompeni memperoleh suatu pekarangan disebelah Timur Tjiliwung, sebesar 50 × 50 "vadem" (1 "vadem" = 1,88 M) untuk mendirikan bangunan dengan pembajaran 1200 Real. Dalam tahun 1612 berdiri ditanah itu suatu gudang dari batu jang diberikan nama „Nassau". Dengan didirikan bangunan ini Kompeni mendapat pangkalan-pasti diwilajah Djajakarta jang pertama-tamanja. Kita tjatat 1612. Kemudian dengan berangsur-angsur orang Belanda membuka sajapnja: dalam tahun 1617 bangunan „Nauritius"; dalam tahun 1618 diadakan suatu galangan kapal dan suatu rumah sakit, semua dilindungi oleh meriam²t dipulau „Onrust"; dalam achir tahun 1618 digempur dan dibakar "factorij" Inggris jang dalam sementara dibangun disebelah Barat Tjiliwung bersama-sama dengan rumah² penduduk asli dan penduduk Tionghoa disekitarnja dan mengusir orang Inggris dari tempat itu.

Oleh karena orang Inggris mengundurkan diri dari Djakarta, benteng Belanda dalam keadaan selamat, sebab perlawanan dari fihak Djakarta sendiri tidak ada. Kompeni, jang mengetahui keadaan itu, pada tg. 15 Pebruari 1619 mengadakan pesta dan keramaian. Pada malamnja, ketika keramaian dilandjutkan terdengar dari rumah Pangeran Djakerta orang berteriak dan mendjerit. Kemudian ternjata, bahwa Pangeran tersebut ditawan dan di angkut oleh orang Banten utk. dibawa kedaerah Banten. Peristiwa ini terdjadi pada tg. Peb. 1619.

Sedjak Pangeran Djakerta dipanggil kembali ke Banten orang Banten tidak meninggalkan Djajakerta dan tetap berdiam ditempat itu. Selama keadaan ini belum di rubah, keadaan sedemikian itu ialah berbahaja bagi Jan Pieterzoon Coen, pemimpin Kompeni pada waktu itu. Dan djika ia pada suatu hari diharuskan meninggalmendjadikan tempat itu suatu kan Djajakarta, bermaksud untuk "volkomen colonie" jang masih terpendam dalam hati-sanubarinja, akan lenjap samasekali. Dari

itu Coen berusaha mentjari bantuan dari Maluku. Dengan 1000 pradjurit ia mendarat di Djajakarta, mengusir orang Banten, membakar dan merebut kota itu. Penduduk asli, orang² Djajakarta tulen, jang kebanjakan diantaranja meninggalkan tempat itu, melarikan diri kedjurusan pedalaman, mereka takut kepada orang Kompeni, jang telah memperlihat-tindak-tanduk jang tidak senonoh baik di Djajakarta sendiri maupun di Banten beberapa tahun jang lalu, sehingga mereka diusir dari tempat jang belakangan itu jang hanja sebagian ketjil sadja tinggal di Djajakarta.

Begitulah Saudara² sekalian.

Riwajat Djajakarta telah berachir. Riwajat, „Volkomen colonie" seperti dikatakan oleh Coen, dimulai. Diatas runtuh-runtuhan tempat itu didirikan suatu tanda. peringatan dari permulaan pendjadjahan dipulau Djawa. Tugu peringatan ditanam dan dibangunkan didaerah dimana dulu Djajakara berada. Ini mulai berlangsung pada tg. 30 Mei 1619, hari musnahnja Djajakarta, dan tugu itu disebut: Batavia. Bagi kita, hari 30 Mei 1619 adalah hari berkabung.

Apakah dengan muntjulnja Batavia terbit suatu djaman baru? Bagi daerah jang dulu dinamai Djajakarta pemerintahan asli memang diganti dengan pemerintahan asing dan apa jang bersangkutan.

Bagi Indonesia pada umumnja masih berada kekuasaan besar dari Atjeh Mataram-Makassar.

Di Djawa meskipun Keradjaan keradjaan Banten dan Tjirebon tidak boleh diabaikan, Keradjaan Mataram masih mempunjai peranan penting; Mataram tidak rela, bahkan dengan hati jang luka, melihat orang asing bersarang didaerah pulau Djawa.

Pada waktu itu, jang memegang pemerintahan di Mataram ialah Sultan Agung (1613-1645). Ia merasa terantjam oleh Kompeni. jang mendapat wilajah dekat — bahkan dalam — daerah²nja disebelah barat. Ketahuilah bahwa sebagian dari Djawa-Barat (termasuk seluruh Priangan) adalah propinsi dari Mataram, sedangkan Keradjaan Tjirebon dipengaruhinja.

Dipihak Belanda — sesungguhnja dipihak Coen — telah direntjanakan dalam tahun 1619, sesudah Djajakarta direbut dan „dimusnahkan", bahwa batas² daerah Kompeni ialah kali² Tjitarum dan Tjisadane terus kedjurusan selatan sampai samudra India.

Pendirian jang berlawanan ini tentu sadja mengadakan bentrokan. Inilah salah suatu alasan untuk mengadakan penjelesaian Perserikatan Bangsa² pada waktu itu belum ditjipta, Dewan Keamanan belum masuk dalam pikiran. Perselisihan antara Mataram dan Kompeni djadi diselesaikan sadja dengan sendjata.

Pada tahun 1628 dan tahun 1629 diadakan oleh Mataram pengepungan atas Batavia. Pengepungan itu sajang sekali gagal. Salah suatu sebab dari penggagalan itu adalah bahwa karena dalam kalangan Mataram tidak ada kesatuan penuh. Ada jang tidak memberikan perlawanan, ada djuga jang menjokong Kompeni bagi kepentingan sendiri.

Akan tetapi, kemenangan Kompeni djuga bukan djasanja Kompeni 100%. Sebagian jang terbesar dipikul oleh tentara jang terdiri dari orang² Djepang.

Bagaimanapun djuga, kegagalan Mataram dalam peperangan ini mendorong Sultan Agung untuk merobah taktiknja. Dengan Priangan djustru mendapat perhatiannja sebagai wilajah pertahanan dan penjerbuan terhadap Kompeni. Dan disini Sultan Agung melakukan reorganisasi. Tindakan² jang diambilnja adalah suatu sistim jg. dipikirkan matang² dengan maksud untuk mengadakan suatu palang pintu terhadap Kompeni di montjonegoronja dibagian barat.

Tindakan² apakah diambilnja ? Misalnja : Ia memberikan perintah untuk mengembalikan rakjat jang telah meninggalkan daerahnja dan melarikan diri sebagai akibat peperangan. Ia berhentikan seorang gubernur untuk wilajah iang begitu luas. Ia bagi daerah Priangan (ketjuali Galuh) atas wlajah²: Sukapura, Bandung, Parakanmuntjang, Sumedang (termasuk Limbangan) dengan menempatkan disitu masing² kepala kepalanja sendiri.

Memang, mengembalikan rakjat kewilajahnja masing² pada waktu itu memperkuat pertahanan, oleh karena mereka mengetahui selukbeluk dalam wilajahnja. Memang, penguasaan atas daerah jang begitu luas pada waktu itu sukar di djalankan oleh seorang sadja. Dan apabila kita melihat peta Periangan, kita harus mengakui, bahwa pembagian atas wilajah² tersebut memang berdasar keadaan alam ("natuurlijke gestelheid van de daerah"), dan rakjatnja.

Pendek kata, dengan tindakan² tersebut, pertahanan dapat diperkuat dengan setjara "natuurlijk".
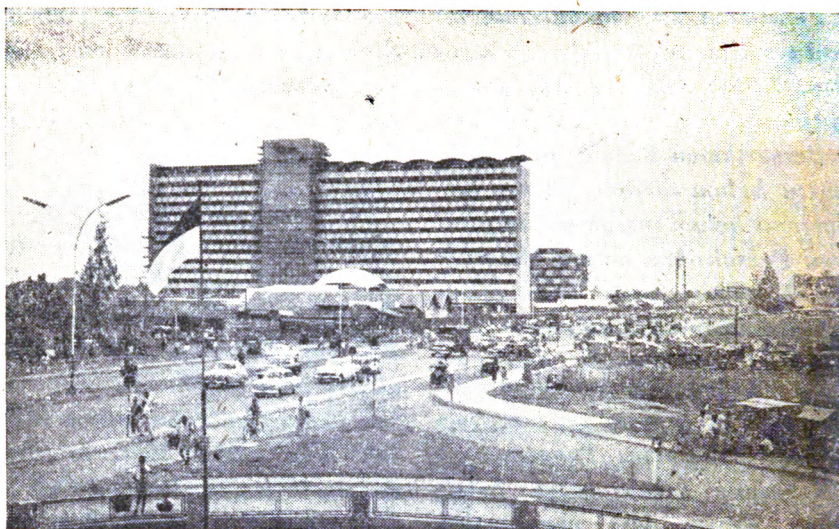
Hotel Indonesia jang megah indah dilihat dari Wisma Lokantara.

*

Sajang sekali Planning jang direntjanakan tidak semua dapat dilaksanakan oleh Sultan Agung. Ia wafat djauh sebelumnja (1645).

Sekarang kita hanja dapat mengeluarkan pertanjaan: Apakah akan terdjadi terhadap Batavia dan bagaimanakah sedjarah akan berdjalan, djika Sultan Agung diberikan pandjang umur untuk melaksanakan rantjangannja?

Diatas telah dikemukakan, bahwa jang berdjasa dalam mempertahankan kota Batavia ialah terutama pradjurit² Djepang.

Untuk mengerti bedanja orang Djepang di Batavia kita harus kembali pada masa sebelum tahun 1616, djadi masih didjaman Djajakarta.

Dengan maksud apa mereka datang ditempat itu, kita tidak mengetahui benar; mungkin untuk berdagang, mungkin djuga untuk keperluan lain. Pastilah bahwa dalam tahun 1616 sudah ada Kapten Djepang: dalam tahun 1623 penduduk Djepang bisa mengadakan „tentara" sedjumlah 130 orang.

Bagaimana bangsa² ini dapat menjesuaikan diri — seperti kita telah mengalaminja dalam djaman Nippon — ternjata dari hidupnja seorang Djepang bernama Simon Simonsz van den Heyden van Fi-

rando, jang dalam djaman Kompeni tidak hanja mendjadi "opperkoopman, Sjahbandar, en "Licentmeester" di Batavia, akan tetapi duga mendjadi "Diaken, Ouderling, Boedelmeester, Weesmeester". Ia wafat dalam tahun 1673 sebagai "burgerkoopman".

Disamping bangsa Djepang, akan tetapi lebih dahulu berada di Djajakarta, ialah orang Tionghoa. Mereka sudah berdiam ditempat itu sebelum datangnja orang Belanda. Diatas kita telah mengatakan, bahwa mereka bekerdja sebagai pembuat arak jg. sangat disukai oleh orang Kompeni.

Orang Asing lain jang berada di Batavia ialah: bangsa Moor (India), bangsa Jentief (India).

Seperti kita mengetahui, ketika Batavia didirkan sebagian terbesar penduduk aslinja menjebar kedjurusan pedalaman. Untuk mengisi kota ini Coen mendatangkan: orang Banda, orang Bali, orang Bugis, orang Melaju, orang Sumbawa, orang Bima, orang Makassar.

Dan ditambah dengan orang Mardijker, orang Maxties, orang Padang, orang Belanda, penduduk Batavia dalam djaman Kompeni sudah merupakan suatu masjarakat jang sangat berwarna.

Bagaimanakah pemerintahan Kompeni di Batavia selama tahun² jang pertama. ?

Sudah tidak usah dibentangkan lagi, bahwa golongan Belanda mempunjai peranan dikota itu. Pegawai dari tingkatan tinggi sampai tingkatan rendah pada umum-

Spanduk² sepandjang Merdeka Selatan di-hari² perajaan ulangtahun ke-435 Kota Djakarta raja.

nja adalah bangsa Belanda. Pemerintahan atas golongan² diserahkan pada umumnja kepada kepala-kepala golongan² masing².

Dari itu terdapat; Kapten Djepang, Kapten Tionghoa, Majoor Moor, Kapten Banda, Kapten Bali, Kapten Bugis, Kapten Makassar, Kapten Melaju, „kapitein der Papangers", dsb.

Antara pendjabat2 tersebut jang didjundjung tinggi ialah Kepala ("Overhoofd") alias Kapten penduduk Tionghoa, Apa sebab? Oleh karena Kompeni dalam hal tenaga pekerdja, dalam hal keuangan, seringkali banjak minta sokongan dari golongan ini.

Apa lagi pada permulaan berdirinja kota Batavia. Bangunan² harus didirikan untuk pradjurit², untuk perumahan², untuk pegawai, untuk pendjara², untuk beberapa gudang dsb; djalan² harus dibuat, parit² digali, rawa² dikeringkan dan diuruk. Suatu „kasteel", suatu benteng-kerdja dan pusat organisasi Kompeni jang kuat serta tembok²nja, dan kubu² untuk mendjaga dan mempertahankan Batavia harus dibangunkan. Ini semua makan beaja jang tidak sedikit. Rupa-rupanja penduduk Tionghoa dalam djaman Coen sudah mempunjai rol atas penghidupan-ekonomi dikota Batavia, djadi pada umumnja tertarik oleh perdagangan, berlainan daripada golongan² lain, jang masing² sebagian besar termasuk dalam lapangan kepradjuritan. Apakah mereka dipaksa memperbuat pertahanan, ataukah dengan sukarela mendjadi pradjurit ataukah terpaksa mendjadi anggauta tentara dengan maksud untuk meloloskan diri dari kedudukan sebagai budak-belian itu tak diketahui benar, njatalah bahwa golongan² lain ini, tidak suka berdagang.

Djadi, kedalam Kompeni perhatikan pembangunan.

Dan terdapat luar? Batavia harus djuga waspada. Musuh² Kompeni masih mengintai, baik orang Portugis maupun Banten dan Mataram.

Nah, didalam kota Batavia itu dibuat rentjana² bagaimana lawan² itu harus dilemahkan.

Batavia masih mempunjai rentjananja Coen; rentjana ini harus dilaksanakan dengan tidak melihat djarak waktunja.

Kurang-lebih satu tahun setelah Sultan Agung meninggal dunia. Djika andaikata Sultan Agung masih hidup, saja jakin bahwa suatu perdjandjian jang begitu rupa tidak akan terdjadi. Akan

tetapi putra-penggantinja jaitu Amangkurat I mudah dibudjuknja.

Akan tetapi, inilah tidak tjukup; watak murka Batavia ingin lebih dari itu. Dalam tahun itu djuga segera setelah Amangkurat I meninggal dunia dan segera setelah Amangkurat II bertachta, Belanda telah berhasil memperluas apa jang telah didapatnja dengan perdjandjian tersebut dalam perdjandjian baru pada tg. 19 dan 20 Oktober 1677. Dalam perdjandjian ini kekuasaan Kompeni ditetapkan mengenai: Tangerang dan Grendeng, Kampung Baru (Bogor), Krawang, Wanajasa, Adiarsa, Tjiasem, Pamanukan, Pegaden, Tjiandjur, Djampang, Tjiblogon, Tjikalong, Bandung, Timbanganten, Batulajang, Parakanmuntjang.

Kekuasaan Mataram di Djawa Barat hanja masih ada terhadap Sumedang, Limbangan, Sukapura, dan Garut.

Apa sebabnja politik Batavia mendapat sukses begiu rupa ?

Dengan singkat didjawab disini, bahwa kesatuan dikeradjaan Mataram sesudah wafatnja Sultan Agung tidak terdapat lagi disebabkan oleh perselisihan antara kita dengan kita dan pemegang pemerintahan seperti Amangkurat I dan Amangkurat II tidak mempunjai watak-kuat, sedang pemegang pemerintahan di Batavia dapat menarik hatsil dari keadaan itu dengan diplomasi jang amat litjin dan mengadu domba.

Dengan tjara sedemikian Batavia mempunjai, dimulai kira-kira pada permulaan abad ke-18, peranan utama dikepulauan Indonesia.

(Bersambung)

MENJAMBUT ALDJAZAIR MERDEKA

Bahwa pada achirnja kekuatan² baru dalam abad ke-20 ini, jaitu kekuatan2 jang berdjuang untuk kemerdekaan dan keadilan sosial, jang dinamakan oleh Presiden Sukarno "the new emerging forces", akan menjikat habis "the old established forces" — jaitu kekuatan² jang mempertahankan kolonialisme/imperialisme, telah dibuktikan pula oleh sedjarah dengan persetudjuan jang telah ditjapai antara Pemerintah Perantjis dan wakil² Front Pembebasan Aldjazair dikota Evian pada achir bulan Maret jang lalu. Persetudjuan Evian ini terpaksa diterima oleh fihak Perantjis, karena gempuran² jang bertambah lama bertambah hebat dari para pedjuang kemerdekaan Aldjazair, jang menempatkan satuan² tentara kolonial Perantjis dalam posisi jang sungguh mengchawatirkan. Persetudjuan² Evian ini telah diterima baik djuga oleh Komite Nasional Revolusioner Aldjazair jang terdiri dari 54 anggota diantaranja duduk pelbagai perwira serta komandan² wilajah dari Tentara Pembebasan Nasional Aldjazair.

Seperti diketahui, Persetudjuan Evian adalah suatu persetudjuan gentjatan sendjata antara fihak Perantjis dan Aldjazair jang disusul oleh suatu referendum untuk menentukan hari kemudian Aldjazair. Hasil² referendum telah menundjukkan, bahwa lebih dari 99% rakjat Aldjazair jang terdiri, baik dari orang² Aldjazairia, maupun dari orang² Perantjis jang turut memberikan suara dalam referendum tersebut, menjatakan setudju mendirikan suatu negara Aldjazair merdeka dan dengan demikian kemerdekaan Aldjazair setjara resmi diformalisasikan.

Guna mengetahui betapa hebatnja perdjuangan rakjat Aldjazair, baiklah kita menoleh kebelakang dan meneliti kembali perdjuangan mati²an patriot² Aldjazair jang telah berlangsung selama ± 8 tahun itu.

Riwajat Tantara Pembebas Nasional Aldjazair.

Terbentuknja Tentara Pembebas Nasional Aldjazair dimulai dengan ledakan² dibeberapa tempat di Aldjazair pada tanggal 1 Nopember 1954 antara djam 01.00 dan 02.00. Pos² militer dan polisi Perantjis diserang dengan tiba². Begitu djuga gudang² sendjata, sedangkan titik² strategis dan ekonomis jang penting di-

hantjurkan, jaitu djembatan², stasion² radio, djalan² kereta-api, kantor² tilpon, kilang² dan gudang² bensin.

Njata sekali bahwa perbuatan² tersebut bukanlah perbuatan kaum perampok, karena direntjanakan setjara tjermat dan dikendalikan oleh satu tangan. Benar, jang beraksi itu jalah Tentara Pembebas Nasional Aldjazair, L'Armee de Liberation Nationale. Tentara jang baru didirikan pada malam itu djuga, lantas mengeluarkan dari markas-besarnja komando serangan pertama. Satuan² jang beraksi di Constantine, Philippeville, Bona, Souk Ahras, mundur kedaerah pegunungan disekitar Aures, dekat perbatasan Tunisia. Jang bergerak disekitar kota Aldjazair (Cité d'Algiers) menjingkir kepegunungan Kabyle, 50 mil dari daerah pesisir. Didaerah-daerah ini satuan² TPNA disambut dengan hati terbuka oleh rakjat. Dimulailah perang kemerdekaan Aldjazair jang berlangsung ± 8 tahun lamanja. Perang ini adalah perang antara si lemah dengan si kuat (lemah dalam arti persendjataan, bukan semangat) Karenanja, sedjak semula sudah ditetapkan, bahwa jang akan dipakai ialah taktik gerilja.

Untuk menghadapi tentara TPNA jang ketjil tapi gagah-perwira ini, kaum kolonialis Perantjis melemparkan 50.000 peradjurit jang terlatih baik dan masih segar kedalam pertempuran. Pasukan² Perantjis ini ditarik dari Vietnam dan Djerman. Walaupun djumlah pasukan² Parantjis semakin ditambah, namun keadaannja tidaklah bertambah baik, bahkan sebaliknja. Hal ini terbukti dari fakta² berikut. Pada awal peperangan djumlah TPNA 3000 orang dengan sendjata² ringan dan otomatik dilawan oleh 50.000 serdadu kolonial jang kemudian ditambah terus hingga mentjapai angka lebih dari 300.000 orang dengan persendjataan berat dan kapal² terbang. Angka 300.000 kemudian mendjadi setangah djuta, tapi apa hasilnja? TPNA memperbesar diri sampai 40.000 kemudian dua kali ini. Daerah² kekuasaan de facto Pemerintah Sementara Republik Aldjazair kian meluas. Selama 3 tahun berperang TPNA berhasil menguasai ⅓ daerah Aldjazair, jakni daerah² disekitar Aures, daerah² pantai dekat Bone dan Philippeville, daerah dekat Tlemcen jang berbatasan dengan Maghribi dan banjak lagi kantong² jang luas. Daerah² bebas ini diorganisasikan dalam "zone Liberee" jaitu daerah jang telah dibebaskan. Daerah tingkat dua

jalah daerah dimana laskar² gerilja mendjadikan aksi² berat dan daerah² ini terbentang disepandjang daerah jang berpenduduk relatif rapat dari perbatasan di Barat, sampai diperbatasan Timur. Tingkat ketiga adalah daerah² jang diduduki oleh tentara Perantjis, dalam istilah TPNA daerah "relative insecurity". Kedua daerah jang disebut belakangan ini boleh dikatakan "darul harb", jaitu daerah perang.

Putjuk pimpinan TPNA dipegang oleh suatu dewan, djadi merupakan suatu pimpinan jang kolektif. Komando umum TPNA telah membagi-bagi seluruh Aldjazair dalam 6 propinsi militer, masing² propinsi dikepalai oleh seorang kolonel jang selain mendjadi gubernur militer, djuga djadi panglima perang. Tudjuan perang kemerdekaan jang dilantjarkan, tidak sadja untuk mengalahkan musuh, tapi djuga mesti memenangkan kasih sajang rakjat kepada TPNA. Oleh sebab itu pada tiap² kesatuan ditempatkan seorang komisaris politik (commissaire politique), seperti jang terdapat djuga dalam tentara Rusia, Yugoslavia dan RRT. Tugas dari komisaris politik ini jalah memberi penerangan² kepada para peradjurit dan djuga rakjat setempat akan tudjuan perdjuangan dan guna mendjaga moral para pedjuang.

Dalam TPNA terdapat orang² dari segala lapisan masjarakat. Bangsawan, kaum intelek, mahasiswa, buruh, pedagang, tani dll. dan semuanja memegang djabatan sesuai dengan bakat masing². Misalnja ada jang mendjadi Korps Bulan Merah (tanda bulan merah adalah ekwivalen dengan tanda palang merah, karena sebagai suatu negara Islam tanda palang salib tak dipakai dan diganti dengan tanda bulan merah). Anggota² korps ini mengadjarkan kepada penduduk tentang hygiene dan mengorganisasikan gerakan pembebasan buta-huruf. Tapi ada djuga jang turut bertempur, djadi anggota regu² sabotase (ingat ke-3 dara Djamilah — Bouhired, Bouphasa dan Bouazza). TPNA adalah benar² tentara rakjat, karena saling beri dan bantu dengan rakjat. Saling beri dan bantu inilah jang mendjadi tjiri chas TPNA. Peradjurit² membagi ransum mereka jang tak banjak itu dengan kaum fellah (petani) jang melarat. Sebaliknja Pak Tani dengan gembira mendjadi penundjuk atau mata² TPNA.

Guna mengetahui kehebatan TPNA baiklah perhatikan pen-

dapat² dan pernjataan² orang² asing seperti Thomas Hodgkins jang dimuat dalam "Manchester Guardian" tanggal 31 Djuli 1957 dan mengemukakan, bahwa TPNA sekarang merupakan suatu kekuatan jang effisien, berdisiplin dengan komando dan strategi jang tunggal (The Algerian National Army is now an efficient, disciplined force, with a united command dan strategy). Arnold Beichman dalam "Newsweek" tanggal 29 Djuli 1957 menjatakan, bahwa dari apa jang ia lihat, TPNA memiliki disiplin, tenaga manusia, sendjata, komando dan semangat (From what I saw, it had dicipline, manpower, weapons, command and spirit).

TPNA jang dimulai dengan 3000 orang tidak terlatih dan hanja memiliki keberanian, sekarang berdjumlah 150.000 orang jang telah siap-siaga untuk bertempur dan terbagi dalam puluhan resimen² infanteri, artileri, kavaleri, korps² perhubungan, peralatan, perbekalan, pendidikan rohani-djasmani dan korps² zeni. Djawatan rahasia TPNA dapat menandingi „Deuxieme Bureau" (Dinas rahasia tentara Perantjis). Bahkan kini TPNA telah memiliki angkatan udara dan laut, walaupun masih ketjil, namun mempunjai hari depan jang baik. Perwira² jang memimpin TPNA memperoleh latihan di Mesir, Tunisia dan beberapa negara sahabat lainnja, sedangkan tenaga peradjurit dan bintara tersedia banjak dan tak pernah berkurang, malahan berlimpah-limpah. Djatuh satu sepuluh madju. Memang suatu peperangan kemerdekaan meminta korban, namun fihak Perantjispun selama peperangan jang berlangsung 8 tahun itu telah kehilangan lk. 25.000 orang atau lebih dari satu divisi jang sempurna. Duapertiga dari angkatan udaranja ditempatkan di Aldjazair, djuga beberapa flotila kapal perang.

Apa tugas TPNA setelah persetudjuan Evian? Menurut persetudjuan tersebut, TPNA akan menggantikan tentara ekspedisi Perantjis (termasuk legiun asingnja) jang akan ditarik setjara berangsur-angsur dari Aldjazair.
Tahya Al-Djazair — Hidup Aldjazair.

Kemerdekaan Aldjazair merupakan hasil perdjuangan patriot Aldjazair dengan pengorbanan² jang tak terkirakan hebatnja. Tidak sedikit korban jang telah diberikan rakjat Aldjazair untuk membangun rumah Aldjazair

merdeka, dan djustru karena pengorbanan itulah seluruh dunia angkat topi bagi bangsa Aldjazair sambil menjatakan hormat jang sebesar-besarnja. Dalam hubungan ini bangsa Indonesia dengan sendirinja tidak mau ketinggalan dengan mengutjapkan selamat kepada para pedjuang Aldjazair jang telah mendapat sukses dalam perdjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Bangsa Indonesia mempunjai kepentingan jang tidak ketjil terhadap Aldjazair merdeka, karena Aldjazair merupakan salah satu mata-rantai dalam untaian persahabatan Asia-Afrika. Berdirinja Aldjazair merdeka berarti bertambahnja kekuatan Negara² Asia-Afrika dan kekuatan anti-kolonialisme lebih diperkuat lagi, sebab telah dibuktikan, bahwa rakjat Aldjazair merupakan pedjuang² jang militant dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Itulah sebabnja maka dikatakan bahwa bangsa Indonesia mempunjai kepentingan jang tidak ketjil terhadap Aldjazair merdeka. Bukan sadja persahabatan jang abadi, tetapi untuk kepentingan jang mempunjai sendi jang lebih mendalam, dalam rangka perdjuangan melenjapkan kolonialisme dan imperialisme dari muka-bumi kita ini. Hal² ini perlu ditekankan, karena dihari-hari mendjelang berdirinja Aldjazair merdeka, udara mendung mulai menutupi suasana gembira rakjat Aldjazair dengan timbulnja perbedaan pandangan dan pendapat antara beberapa pemimpin Aldjazair. Perselisihan pendapat antara Ben Bella dan Ben Kedda semoga segera dapat diselesaikan, karena disamping kemenangan bangsa Aldjazair jang dapat dirasakan djuga sebagai kemenangan bangsa Indonesia, maka kesulitan² jang kini dihadapi bangsa Aldjazair dirasakan djuga sebagai kesulitan² bangsa Indonesia.

Rakjat Indonesia menjambut kemerdekaan Aldjazair dengan do'a dan harapan, agar para pemimpin Aldjazair dapat kembali mengutuhkan pandangan dan pendirian, demi kepentingan jang lebih besar dalam rangka usaha lebih memperkuat barisan negara² Asia-Afrika dan barisan pedjuang anti kolonialisme dan imperialisme.

Tahya Al-Djazair — Hidup Aldjazair !

* * *

ANTARA SAHABAT DENGAN SAHABAT

Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan menjaranken „Republik Kotagalogan

*

REPUBLIK Philipina baru-baru ini telah melangkah lagi menudju kemadjuan, ja'ni dengan merobah hari kemerdekaan negaranja dari tanggal 4 Djuli mendjadi tanggal 12 Djuli.

Perubahan ini diadakan, karena tanggal 12 Djuli sebagai hari kemerdekaan Philipina dianggapnja lebih tepat sebab pada tanggal 12 Djuli 1898 pahlawan Philipina, Emilio Aguinaldo telah memproklamirkan kemerdekaan tanah-airnja.

Dalam pada itu, semendjak presiden baru Philipina, Presiden Diosdado Macapagal memegang pimpinan, memang tampak njata hasrat beliau agar negara dan bangsanja menemukan kembali nilai-nilai kepribadiannja jg. baik.

Maka kita lihat pula makin besarnja hasrat rakjat Philipina untuk memakai bahasa nasional jang berdasarkan bahasa Tagalog. Dan konon kabarnja kini bahasa tagalog pun telah mendjadi bahasa persatuan disana.

Demikian pada tanggal 20 Djuni 1962 Duta Besar Philipina untuk Indonesia jang baru, tuan Narciso G Reyes berkenan mengadakan kundjungan kehormatan kepada Wakil Menteri Pertama/Menteri Penerangan Prof. Mr. Muhamad Yamin di Departemen Penerangan. Didalam pertemuan itu antara lain dibitjarakan soal-soal jang berhubungan dengan kemadjuan bangsa Philipina dan sedjarahnja.

Maka didalam pertemuan ini Prof. Mr. Muhamad Yamin menjarankan nama „Republik Katagalogan" untuk Republik Philipina. Saran ini diberikan oleh beliau sebagai sahabat dan teman bangsa Philipina.

Nama Philipina, menurut Menteri Muhamad Yamin, memang mengingatkan kepada radja Philips dari Spanjol jang pernah mendjadjah Philipina dahulu. Pula, menurut beliau, pendapatnja itu adalah sedjadjar dengan bahasa Tagalog jang sekarang sudah mendjadi bahasa persatuan rakjat Philipina. Beliau terangkan djuga, bahwa pahlawan Jose Rizal pernah pula memakai bahasa Tagalog sebagai bahasa konstitusi pertama.

Ternjata pendapat Menteri Prof. Mr. Muhamad Yamin itu

mendapat perhatian di Philipina, setidak-tidaknja ada kalangan² rakjat Philipina jang menjetudjui perobahan nama bagi negaranja. Demikian ketua dari suatu perkumpulan „Taniw" ja'ni perkumpulan jang bertudjuan memadjukan bahasa nasional Philipina jang berdasarkan bahasa Tagalog, didalam pernjataannja menjetudjui usul Prof. Mr. Muhamad Yamin dan menerangkan, bahwa usul Menteri Yamin itu mempunjai dasar linguistik, karena bahasa-bahasa jang dipakai di Philipina itu termasuk kelompok Tagala. Dan tjabang Tagala adalah dari rumpun bahasa Indonesia jang termasuk dalam keluarga bahasa-bahasa Austronesia.

Untuk menundjukkan bagaimana dekatnja bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia, disini disadjikan Pidato J.M. Duta Besar Philipina untuk Indonesia, sewaktu beliau menjerahkan Surat-surat Kepertjajaan kepada Presiden Sukarno.

Talumpati ni G. Narciso G. Reyes nang ipasakamáy niya Sa Kanyang Kamahalan, Pangulong Sukarño ng Indonesya, ang Katibayan ng kanyang pangka-Sugong Di-Pangkaraniwan at May na Kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas sa Republika ng Indonesya

Ika ng Abril, 1962

Sa Inyong Kamahalan :

Lubis ko pong ikinararangal na ipasakamay ninyo ang Liham ng Pagtitiwala ng Kanyang Kamahalan, ang Pangulo ng Pilipinas, na nagpapatunay sa king pangka-Sugong Di Pangkaraniwan at May Ganap na Kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas sa Republika ng Indonesya, kalakip ng Liham ng Pagpapabalik sa aking Kagalanggalang na Hinalinhan.

Sa mula 't mula pa'y naging taos pusong hangad ng Pamahalaan at Bayang Pilipino na magkaroon ng pinakamahigpit na pakikipagkaibigan sa kanilang dakilang kapit-bayang Indonesya. Alinsunod sa hangaring iyon ay lagi ke pong sisikapin, habang nanunungkulan ako sa inyong mahal na Bayan, na gawin ang lahat nang nararapat upang pagyamanin at pagibayuhin ang tibay ng pagkakaibigan at mabuting pagtitinginang nag-ugnay sa dalawa nating magkaratig na bansa sa buong panahon ng kanilang nakatalang kasaysayan.

Lubos po ang aking pananalig sa pagtupad ng aking tungkulin sapagka't alam kong ang Indonesya at Pilipinas ay hindi lamang mabuting magkapit-bayan kungdi magkamag-anak pa sa lahi; bukod diyan ay magkaisá sila sa kanilang buongpuso at walang hanggang pagmamahal sa kalayaan, sa kapayapaan at sa likás na dangal ng Tao, pagkakaisang-loob na higit na matatag at makapangyarihan kaysa buklod ng pagkakapit-bayan at pagkakamag-anak.

Umaasa po ako na sa panunuparan sa aking tungkulin ay magiging marapat akong pagbigyan ng tulong na minabuting ipagkaloob ng Pamahalaan ng Republika ng Indonesya sa aking Kagalanggalang na Hinalinhan.

Sa ganang akin po naman ay ikinararangal kong ipangako sa Inyong Kamahalan ang lubusan kong pagtulong sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kakapanan ng dalam nating bayan.

Sa pagkakataong ito ay ikinararangal ko rin pong maging tagapaghatid sa inyo ng malugod na pagbati at taimtim na hangarin ng Pangulo ng Pilipinas at ng Bayang Pilipino na magkamit ang Inyong Kamahalan at ang Bayang Indonesya ng angkop na kaligayahan, at matiwasay na katayuan.

Pidato Tuan Narciso G Reyes waktu menjampaikan Surat-surat Kepertjajaan kepada Paduka Jang Mulia Presiden Sukarno, sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Republik Philipina untuk Republik Indonesia

Aprl 1962

Paduka Jang Mulia,

Saja mendapat kehormatan besar untuk menjampaikan Surat-surat Kepertjajaan dari Paduka Jang Mulia dari Presiden Philipina, jang menundjuk saja sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Republik Philipina untuk Republik Indonesia, bersamaan dengan Surat Pemanggilan Kembali jang terhormat Rekan jang saja gantikan.

Terlebih dahulu saja persembahkan kepada Paduka Jang Mulia hasrat Pemerintah dan Rakjat Philipina jang selalu ingin bersahabat dan berhubungan erat dengan tetangganja jang besar Indonesia.

Senada dengan hasrat itu, maka akan selalu mendjadi usaha saja selama waktu tugas saja di Negeri jang tertjinta ini, untuk melakukan segala sesuatu jang perlu untuk memupuk dan mengembangkan ikatan-ikatan persahabatan,

suasana baik dan ketetanggaan jang baik, jang menghubungkan kedua bangsa kita ini sepandjang sedjarah besar jang lampau.

Saja hadapi tugas saja dengan kepertjajaan berdasarkan pengetahuan, bahwa rakjat Indonesia dan Philipina adalah tetangga jang baik, tidak sadja, tetapi mereka adalah seketurunan dan bahwa sama-sama mendjundjung tinggi kemerdekaan, perdamaian dan harkat kemanusiaan, jang mempersatukan kita dengan tali pengertian dan kesamaan tudjuan, jang djauh lebih kuat daripada ketetanggaan jang baik dan persamaan keturunan.

Harapan saja jang saja kandung ialah bahwa didalam saja melakukan tugas saja memperoleh kebahagiaan bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia seperti halnja dengan jang terhormat Rekan jang saja gantikan.

Bagi saja. saja mendapat kehormatan besar utk. mempersembahkan kepada Paduka Jang Mulia kesediaan saja untuk bekerdja dalam segala soal jang menjangkut kepentingan bersama kedua Negara kita.

Selandjutnja saja djuga memperoleh kehormatan besar untuk pada peristiwa ini dapat membawakan salam hangat dan utjapan do'a dari Presiden Philipina dan Rakjat Philipina kepada Paduka Jang Mulia dan Rakjat Indonesia untuk kebahagiaan, kesedjahteraan dan keselamatan.

* * *

Suatu Revolusi hanja dapat berlangsung dan berachir setjara baik, djika ada:
Satu pimpinan Revolusi jang revolusioner,
Satu Ideologi dan Konsepsi Nasional jang revolusioner, djelas, tegas, terperintji.

(Djarek)

„FILM SEBUAH ALAT PERDJUANGAN"

Sambutan wakil Dep. Penerangan Harjoto Joedoatmodjo pada Seminar Film Mahasiswa di Bandung, tgl. 17 Djuni 1962.

Djikalau kita hendak memberi arti kepada film sebagai alat jang berguna bagi masjarakat dan bangsa, maka lebih dahulu kita perlu menemukan titik-tolak jang berdasarkan kepada tjita² masjarakat dan bangsa kita. Tjita² masjarakat dan bangsa kita sudah djelas, jaitu membangunkan suatu masjarakat adil-makmur, masjarakat sosialis Indonesia, dengan melalui Revolusi nasional jang berpantja-muka, jang multi-complex.

Dalam perdjuangan menjelesaikan Revolusi itu kita memerlukan banjak alat, mental dan fisik, jang semua harus dapat dikerahkan dan dipergunakan untuk memperkuat daja djuang, jang dapat saling isi-mengisi dan bantu-membantu kearah kemenangan atau tudjuan achir perdjuangan kita.

Djenis film jang sekarang sedang akan Sdr2 seminarkan, dapat pula didjadikan salah satu ja djuang dan daja tempur bangsa kita diwaktu sekarang ataupun di-waktu2 jang akan datang.

Oleh karena itu film, baru berarti bagi Sdr2, bagi rakjat dan bangsa kita, apabila kita dapat mendudukkan alat film ini pada tempat jang dapat memenuhi kebutuhan dan panggilan Revolusi kita jang multicomplex.

Bahkan saja njatakan disini, bahwa Seminar ini dapat dikatakan berhasil, hanja apabila ia berhasil melahirkan fikiran² dan idee² tentang bagaimana mendudukkan film sebagai alat Revolusi; bagaimana mendjalankan Dasar/Tudjuan dan Kewadjiban dalam Revolusi dalam film, bagaimana mendjelaskan dalam bentuk jang bersifat audo-visul itu/Tiga Segi Kerangka daripada Revolusi, bagaimana udjud presentation daripada masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila; pendek kata, bagaimana mendjadikan film itu alat indoktrinasi massa daripada seluruh Konsepsi Revolusi. Dalam taraf perdjuangan jang sekarang, kita menghadapi pelaksanaan dari salah satu dari Ketiga Segi Kerangka Revolusi, jakni penghapusan kolonialisme didaratan Irian Barat. Sudah tentu seminar ini pun tidak boleh dan tidak bisa melepaskan pelaksanaan Trikora sekarang da

ri rangka Seminar ini. Ini adalah tuntutan suasana, tuntutan taraf Revolusi dewasa ini.

Film² jang dibuat oleh Departemen Penerangan, dasar produksinja non-commercieel, menitikberatkan kepada film sebagai medium mass communication, sebagai alat penerangan dan atau pendidikan.

Orang kadang² menamakannja itu film² propaganda. Ini tidak mendjadi apa, sebab dalam artinja jang baik, kami akan merasa senang apabila PFN berhasil mempropagandakan semangat, tjita² dan hasil perdjuangan bangsa kita semendjak kita memiliki kemerdekaan kita kembali sebagai bangsa.

Dan kita boleh pula merasa bangga dan sjukur apabila film² Indonesia, baik jang dibuat oleh Pemerintah ataupun Swasta, dapat mempropagandakan kehidupan bangsa kita jg. sedang berevolusi, mempropagandakan kekajaan dan keindahan tanah-air kita, mempropagandakan tjara hidup bangsa Indonesia jang berkebudajaan tinggi, dan tidak lupa djuga mempropagandakan manusia Indonesia baru jang ber-Manipol-USDEK.

Memang telah dirasakan oleh para achli film dimanapun djuga, bahwa membuat film propaganda jang baik, tidak mudah. Lebih sukar lagi ialah, djikalau jang disebut baik itu harus pula disertai dengan sukses dibidang keuangan bagi pembuatanja.

Seminar ini akan membatasi diri kepada soal² jang berhubungan dengan film² penerangan dan pendidikan atau film² dokumenter. Djenis film itu pada umumnja tidak menjoalkan keuntungan keuangan, singkatnja tidak mentjari uang. Pertanjaan2 jang harus dikemukakan sebelum sesuatu produksi dimulai ialah bagaimana tjara jang se-baik²nja untuk membuat film itu agar benar² berhasil memberi penerangan dengan tjara jang djelas dan mudah dimengerti.

Terang itu akan minta pengertian para pembuatnja tentang tehnik dan ilmu penerangan, tentang penerangan audio-visuil, mentjari djawaban bagaimana menjcsun soal jang hendak diterangkan, dalam urutan gambar jang dapat bartjeritera sendiri, atau tentang memberi penerangan dgn menggunakan film atau gambar² jang bergerak sebagai alatnja.

Film² dokumenter jang banjak sekali dibuat di Eropa dan Amerika Serikat pada waktu Perang Dunia ke-II, telah berhasil dapat melenjapkan keragu-raguan, betapa efektifnja medium tersebut dalam usaha membimbing dan mempengaruhi pendapat umum.

Dilapangan pendidikan, penjelidikan² membuktikan, bahwa orang dapat mempeladjari sesuatu proses sedikitnja 33% lebih tjepat, sesudah ia melihat proses itu didemonstrasikan melalui film.

Diwaktu² krisis akibat peperangan, dwaktu rakjat harus berdjuang dengan segala kekuatan lahirbatin, film² dokumenter amat besar arti dan sumbangannja dalam memupuk dan mempertinggi semangat rakjat di-negara² jang sedang berdjuang mati-matian. Film² dokumenter di-saat² seperti itu mentjapai puntjaknja jang amat gemilang.

Tetapi sesudah perdamaian dan kemakmuran kembali datang, film² dokumenter mengalami djaman surut dan makin menurun. Meskipun masih banjak jg harus dipeladjari dan di-terang²kan tentang dunia ini dan tentang penghuninja, tetapi karjawan2 film dokumenter tidak lagi dapat berdiri dibarisan depan untuk mengatakannja. Mereka terdesak oleh kaum pengusaha film djenis lain jang mengadjak orang banjak melupakan perang, melupakan djaman berdjuang jang penuh sengsara dan derita.

Rakjat Indonesia sekarang ini sedang terlibat dalam perdjuangan besar, dengan segala akibatnja. Semangat rakjat harus dipelihara dan dipertinggi. Kalau di Indonesia inipun film dokumenter ingin disebut berarti dan langsung dapat menjumbangkan dharmanja sebagai alat perdjuangan, maka kita harus memperhatikan bagaimana film2 dokumenter dibuat di Eropa dan di Amerika pada waktu mereka djuga sedang terlibat dalam perdjuangan mati-matian untuk menang perang.

Djuga di Hollywood waktu itu para pengusaha film dan artis film serentak bergerak, membuat film2 dokumenter dan semi-dokumenter, jang langsung mempertinggi potensi perdjuangan bangsa dan negaranja. Tjorak film tjeritera made in Hollywood kemudian dipengaruhi oleh stijl dokumenter itu, jang melahirkan djuga apa jang disebut "PSEUDO-DOCUMENTERIES" atau film dokumenter-tiruan. Suatu bukti bahwa film dokumenter sebelum itu pernah memegang peranan penting dalam kehidupan masjarakat, sehingga kalau sesuatu film hendak menarik banjak penonton, maka perlu ia diberi tjorak dokumenter, dengan menggunakan latar belakang jang authentik.

Perhatian para Mahasiswa kepada masalah film penerangan dan pendidikan ini sungguh menggembirakan.

Kiranja seperti kami, Sdr2. djuga lebih tertarik oleh arti dan pengaruh jang dapat ditimbulkan oleh film dokumenter chususnja, daripada film² jang hanja menjenangkan sadja atau jang hanja menghibur sadja.

Kita semua mengetahui dan mengakui bahwa film mempunjai daja pengaruh jang lebih besar dan lebih kuat dalam hati dan fikiran publik, daripada hasil seni lain jang manapun djuga. Kenjataan ini membuat para pentjinta kebudajaan agak kuatir dan sedih. Disamping itu harus disesalkan, bahwa hanja sedikit jang tjukup menginsjafi bahaja² jang sukar dielakkan sebagai akibat dari kenjataan tadi.

Apabila kita lalai atau tidak mau mempeladjari hukum² dan kemungkinan-kemungkinannja dengan hati-hati, kita tidak akan dapat lagi mengendalikan alat terkuat untuk mempengaruhi massa ini, jang pernah ditjiptakan oleh manusia dalam sedjarah kebudajaannja.

Film telah mendjadi "POPULAR ART" dalam abad kita ini. Suatu bentuk seni baru jang sekali-gus djuga suatu industri jang dapat berkembang setjara luas dan pesat. Persoalan mendidik publik—dalam hal ini penonton film —, kearah appresiasi jang lebih baik dan lebih kritis, mendjadilah persoalan mendjaga dan menjelamatkan kesehatan mental rakjat dan bangsa².

Akan tetapi kenjataan menundjukkan, bahwa kita pada umumnja belum berhasil untuk benar² berusaha memperdalam pengertian kita tentang "film art" jang masih sangat muda ini, tetapi jang setjara tjepat telah berkembang sangat luas, dan jang pengaruhnja terasa benar didalam kehidupan rakjat sehari-hari disuatu masjarakat jang modern.

Pengertian AESTHETICS tentang film, misalnja, tidak dimasukkan dalam mata peladjaran resmi mengenai ART APRECIATION.

Akademi² dan Universitas² mempunjai seksi² untuk kesusasteraan dan lain² kesenian, tetapi umumnja tidak mempunjai seksi untuk film sebagai bentuk seni baru.

Akademi Seni pertama, jang memasukkan teori seni film didalam curriculum, baru dibuka di Praha dalam tahun 1947.

Buku² peladjaran disekolah menengah membitjarakan berbagai matjam kesenian, tetapi tidak ada satupun jang menjinggung soal film. Berdjuta² orang mendengar tentang aestheticnja seni sastera dan seni lukis, tetapi jang tidak pernah menggunakan pengetahuannja itu karena mere-

ka tidak membatja buku² dan tidak melihat lukisan². Sebaliknja berdjuta² orang jang sering sekali melihat film dibiarkan tanpa pimpinan, tanpa pedoman, tidak ada jang mengadjar mereka tentang film preciation, tentang bagaimana menilai sesuatu film.

Keluhan itu diutjapkan oleh seorang achli kritik film jang pertama, BELA BALAZS, 40 tahun jang lampau. Balazs menjerukan perlunja ada tingkatan kebudajaan jang umum, bukan sekedar pengetahuan chusus dibidang film. Orang jang tidak mempunjai konsepsi sedikitpun tentang sastera dan musik tidak akan dipandang sebagai terpeladjar. Orang jang tak pernah mendengar tentang Beethoven dan Michelangelo tak akan dapat diterima dikalangannja kaum budajawan. Tetapi djikalau orang tidak mempunjai pengertian sedikitpun tentang film art, dan tak pernah mendengar namanja DAVID WARK GRIFFITH, ia masih dapat lulus sebagai welleducated manusia budaja.

Film sebagai bentuk seni baru jang terpenting diabad kita, mendjadi makin istimewa, karena orang se-akanè tidak perlu mengetahui tentang sesuatunja sedikitpun djuga. Dan sesudah 40 tahun berlalu, keluhan² tsb. masih sangat keras terdengarnja.

Balazs berpendapat, bahwa sebelum seni film terdapat dalam tiap text-book tentang sedjarah kesenian dan tentang easthetics, sebelum seni film, atau jang ia sebut „art of the film" mempunjai kursi dalam universitas² dan mempunjai tempat dalam curriculum di-sekolah² menengah, kita tidak akan dapat menanamkan FILM-MINDEDNESS itu kedalam kesadarannja generasi kita, tak akan dapat membuat generasi kita menginsjafi dan menjadari betapa suatu perkembangan artistic telah terdjadi setjara pesat dan hebat dalam abad kita.

Seni, kata Balazs, mendidik dan memperbaiki rasa-keindahan publik. Rasa keindahan jang makin baik, menghendaki dan memberikan kemungkinan kearah perkembangan kesenian keting-kat-tingkat jang lebih tinggi. Dalam hal *seni film. demikian pula* halnja, bahkan lebih daripada bentuk seni lainnja.

Tetapi bagi film, kekurangan appresiasi jang wadjar, dapat membunuh, tidak sadja para artis terutama, tetapi karja seni itu sendiri, dan dapat mentjekiknja mati sebelum ia lahir.

Sdr2., pengundjung Seminar jth. Sebagai peminat seni film, Sdri² kiranja akan dapat mengudji kebenaran kata² Bela Balazs itu, jang namanja amat terkenal

sebagai achli teori film jang banjak berpengalaman, tidak sadja di Eropa, tetapi djuga dibenua Amerika. Dalil²nja jg sangat penting itu baru 30 tahun kemudian disalin kedalam bahasa Inggris (1952), sesudah banjak universitas mulai mengadjarkan teori film dai pengetahuan² mengenai film.

Film dokumenter, apakah ia chusus dibuat untuk keperluan penerangan dan pendidikan, jang sekarang amat menarik Sdr² pengundjung Seminar ini, berkembang dan tidaknja, madju-mundurnja dan mati-hidupnja antara lain tergantung pula kepada appreasi jang wadjar.

Seminar Film Mahasiswa ini adalah salah satu bukti, bahwa dikalangan masjarakat kita njata ada perhatian jang actief, ada proper appreciation, jang semoga dapat mendorong-madju perfilman Indonesia dan masalah film² dokumenter chususnja, sehingga film² itu dapat bermanfaat sebagai alat perdjuangan bangsa kita.

Sebagai penutup uraian saja, saja hendak mengemukakan pendapat dua orang achli film dokumenter jang terkenal, jaitu *John Grierson dan Njonja Flaherty.*

Berkata Grierson antara lain : „Kekuatan film dokumenter ialah terletak kepada kemampuannja untuk menimbulkan pengertian ditengah-tengah dunia jang makin complex ini dengan djalan mengungkapkan hubungan antara manusia dengan masjarakatnja".

Sdr². itulah konsep Grierson tentang missi atau kewadjiban-sutjinja tiap pembuat film dokumenter disegala djaman. Film dokumenter sering djuga disebut film facta atau "fact film", jang menggambarkan realitas dan fakta² jang kadang2 amat pahitnja.

Tetapi menurut achli-achli film jang lain, film-film dokumenter sebaiknja lebih mengutamakan "meaning" atau arti, daripada "facts" atau fakta². Ini dapat djuga kita setudjui. Misalnja, dalam film² dokumenter tentang perdjuangan bangsa Indonesia, dimana didalamnja ditundjukkan dengan terus terang fakta² jang penuh derita dan pengorbanan, kita harus pula berhasil mendjelaskan dengan tegas arti daripada perdjuangan, untuk apa kita bersedia berkorban dan menderita.

Njonja Fluherty menamakan film² dokumenter sebagai *"Films of Life"*, — Life atau kehidupan jg dibuat penuh arti atau "meaningful" oleh Sang Artis jang kreatif. Kalau sekarang film² dokumenter sedang mengalami saat surutnja, itu dianggap hanja

bersifat sementara. Film2 dokumenter merupakan suatu bentuk film jang teramat penting untuk lenjap samasekali dari lajar putih.

Sdr² para Mahasiswa jang sedang berseminar di Bandung ini dapat merupakan sekelompok pembela atau pendjaga akan kelangsungan hidup film² dokumenter. Bahkan saja harap dapat mendjadi tenaga² pendorong jang utama kearah perkembangan film² dokumenter di Indonesia.

Sekian sambutan saja. Tak lupa saja utjapkan „Selamat Berseminar", „Selamat Bekerdja".

Terima kasih.

Djakarta, 16 Djuni 1962.

* * *

Pelantikan Panitia Negara mengenai R.U.U. Pemilihan Umum di Istana Bogor tanggal 2-7-'62.

djalan serta bertekad bulat dalam melaksanakan sistim ekonomi gotong-rojong menudju masjarakat adil-makmur, disamping berdjuang membebaskan Tanah Air dari belenggu pendjadjahan, kita jakin bahwa perdjuangan pemngan berlakunja Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (L.N. No. 139 tahun 1958) tentang Perkumpulan Koperasi, dapat dilihat bahwa sebahagian besar dari gagasan Kongres Koperasi itu, kini sudah terlaksana.

Seperti diketahui keputusan² Kongres Koperasi jang pertama pada bulan Djuli 1947, adalah sbb.:

1. *Dibentuknja Sentral Organisasi Koperasi Rakjat Indonesia (SOKRI) jang berkedudukan di Tasikmalaja.*
2. *Azas Koperasi ialah gotong-rojong.*
3. *Kemakmuran rakjat harus dilaksanakan berdasarkan U.U.D. sebagaimana tertjantum dalam pasal 33, dengan koperasi rakjat sebagai alat pelaksana.*
4. *Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi dikalangan rakjat, pengurus, dan pegawai Koperasi serta dikalangan masjarakat.*
5. *Distribusi barang² penting harus diselenggarakan oleh koperasi.*
6. *Didjadikan tanggal 12 Djuli mendjadi „Hari Koperasi Indonesia" jang pada tiap tahun harus diperingati.*

Bukti² dari terlaksananja keputusan2 itu dapat dikemukakan sbb.:

Keputusan pertama tentang Sentral Organisasi.

Walaupun bukan Sentral Organisasi Koperasi Rakjat Indonesia (S.O.K.R.I.) jang terbentuk, dan tidak berkedudukan di Tasikmalaja, akan tetapi gagasan perlunja ada Sentral Organisasi Koperasi Indonesia sudah terlaksana dengan terbentuknja Dewan Koperasi Indonesia (D.K.I.) dalam Kongres Koperasi Seluruh Indonesia di Bandung pada tahun 1953 dan mula2 berkedudukan di Bandung. Sebelum dan sesudah Dewan Koperasi Indonesia, telah berdiri beberapa Sentral Koperasi seluruh Indonesia misalnja Gabungan P.K.P.N. seluruh Indonesia, G.K.B.I., I.K.K.I. Pusat2 Koperasi itu bekerdja dalam lapangan tertentu menudju spesialisasi jang organisasinja meliputi seluruh Indonesia.

Dan dalam Musjawarah Nasional Koperasi (Munaskop) pertama, dari tanggal 21 sd. 27 April 1961 di Surabaja, telah terwudjud pula satu organisasi besar jaitu Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (K.O.K.S.I.). Dengan berdirinja K.O.K.S.I., maka D.K.I. menjatakan membubarkan diri.

Keputusan kedua tentang Azas Koperasi.

Keputusan mengenai azas koperasi, ialah gotong-rojong, jg. mana dalam U.U. Koperasi No. 79 tahun 1958, dalam ps. 2 ajat 1, huruf a, dengan tegas ditjantumkan :

(1) Koperasi ialah suatu perkum-

Pelantikan anggota² Denas Koksi oleh Presiden Sukarno di Istana Negara.
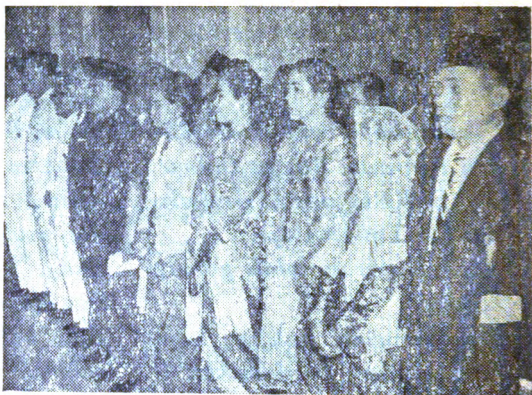
pulan jang beranggota orang2 atau badan2 hukum jang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan2 sbb.:

a. berazas kekeluargaan (gotong-rojong).

Keputusan ketiga tentang Alat Pelaksana.

Diktum daripada U.U. Koperasi baru itu, berbunji :

Sesuai dengan U.U.D. pasal 33, perekonomian rakjat Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan tjita2 tersebut dapat dilaksanakan dan tertjapainja setjara langsung dan teratur dengan djalan memberi bimbingan kepada rakjat kearah hidup berkoperasi.

Dan dalam pendjelasan umum dari Undang2 itu dengan tegas dinjatakan, djustru untuk menggantikan peraturan² Koperasi dalam ordonansi tahun 1933 No. 108 dan tahun 1949 No. 179 maka U.U. Koperasi baru itu sangat penting karena peraturan² diatas tidak memenuhi azas2 dan tudjuan negara Republik Indonesia seperti tertjantum dalam U.U.D. ps. 33.

Djadi U.U. Koperasi No. 79 tahun 1958 itu adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari U.U. D.S. ps. 38 atau ps. 33 dari U.U.D. 1945.

Dan kalau diteliti isi keputusan-keputusan Munaskop diatas tentang landasan idiil dan peranan koperasi Indonesia, ternjata djiwa dan makna keputusan itu sedjalan dengan keputusan ketiga dari Kongres Koperasi pada tahun 1947 itu. Diputuskan bahwa peranan koperasi Indonesia dalam pembangunan merupakan :

a) Alat untuk melaksanakan eko-

nomi terpimpin.

b) *Sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.*

c) *Dasar untuk mengatur perekonomian rakjat.*

Keputusan keempat tentang Pendidikan Koperasi.

Memperhebat pendidikan Koperasi, sudah mendjadi tudjuan dari tiap perkumpulan Koperasi. Dalam Kongres Koperasi di Bandung pada tahun 1953, sudah dibentuk Lembaga Pendidikan Koperasi. Lembaga ini sudah mengeluarkan kursus2 tertulis. Dalam tiap anggaran Dasar ada ditjantumkan pembagian tertentu jang diambil dari keuntungan untuk dana-pendidikan.

Perkumpulan² Koperasi sendiri djuga sudah banjak jang turut melaksanakan usaha² pendidikan dan penerangan koperasi dan mengeluarkan penerbitan. Umpamanja Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta Raya, pada tiap tahun mengadakan kursus koperasi, tjeramah2 Koperasi dan penerbitan madjallah „Warta Koperasi". Demikian djuga G.K.B.I. dengan madjalah „Batik". Induk Koperasi Kopera Indonesia (I.K.K.I.) dengan madjallah „Kopra" dan Dewan Koperasi Indonesia (D.K.I.) jang dulu dengan penerbitan „Koperasi". Kini kesatuan Organsasi Koperasi Seluruh Indonesia (K.O.K.S.I.) telah menerbitkan tengah bulanan „Bulitin Koperasi".

Dalam peraturan Menteri P.P.K. No. 44055]Kab. tgl. 3 Agustus 1955, sudah ditjantumkan tentang rentjana diadakan mata peladjaran Koperasi di-sekolah².

Dan hasil Seminar Pendidikan Koperasi pada tgl. 27 s/d 29 Desember 1958 di Djokjakarta telah mendesak kepada Kementerian P.P.K. agar paling lambat mulai tahun peladjaran 1960/1961 telah diadakan Sekolah Ekonomi tingkat atas djurusan Koperasi. Lamanja peladjaran 4 tahun dengan tudjuan menghasilkan tenaga pembimbing usaha dan organsasi gerakan Koperasi jang berpengetahuan tjukup.

Dan kini telah berdiri Sekolah Koperasi Menengah Atas Negeri di Semarang, Surakarta, Madiun, Bandung, Jogjakarta, Surabaja, jang mendapat sokongan penuh dari Departemen Koperasi.

Djuga Akademi Koperasi dalam tahun 1961 sudah dibuka di Djakarta dan Jokjakarta.

Menurut keputusan Kepala Djawatan Koperasi tertanggal 17 Djuli 1960, dalam mengisi usaha² dalam Anggaran Dasar, tiap² Koperasi, harus diisi dengan usaha² pendidikan Koperasi. Dan untuk itu, disediakan Dana Pendidikan

jang pada umumnja diambilkan 5% dari sisa-hasil.

Kerdja sama Menteri Koperasi dan Menteri P.D.K., telah dituang berupa keputusan bersama tentang usaha² pendidikan koperasi dalam tahun 1960.

Keputusan kelima tentang Distributie.

Mengenai distribusi barang2 penting harus diselenggarakan oleh koperasi memang kini sedang dalam pelaksanaan. Umpamanja sadja, beras Pemerintah untuk pegawai negeri sudah diserahkan penjalurannja pada Koperasi Pegawai Negeri. Dan injeksi beras untuk rakjatpun sudah ada sebagian jang diserahkan kepada Koperasi Rakjat, stperti di Djakarta djuga Persatuan Koperasi Rakjat Djakarta Raya (P.K.R.D.) turut ambil bagian. Tidak dapat dilupakan, bahwa pendjualan tekstil pampasan perang Djepang diserahkan kepada Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Jang penting lagi, import dan pendjualan mori dan bahan2 batik lainnja diserahkan kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (G.K.B.I.) jang telah memperoleh keuntungan djutaan rupiah pada tiap tahun. Di Djawa Barat pembelian padi rakjat,, pada umumnja diserahkan Pemerintah pada Koperasi Rakjat. Dan dengan keluarnja PP 140 tahun 1961, maka 9 matjam bahan pokok harus disalurkan melalui Koperasi.

Keputusan ke-enam tentang Hari Koperasi.

Tanggal 12 Djuli sudah didjadikan „Hari Koperasi Indonesia" dan diperingati pada tiap tahun oleh pentjinta dan warga Koperasi diseluruh Indonesia. Walaupun belum didjadikan hari nasional, tetapi kebiasaan ini lambat-laun tentu akan mendjadi hukum tertulis kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tentang pengakuan itu kelak tentunja bergantung pada kegiatan dan keinsjafan gerakan Koperasi sendiri.

Dan menurut surat-keputusan Menteri Transkopemada tgl. 30 Nopember 1960, hari koperasi tahun 1960, adalah Hari Koperasi ke-XIII. Menundjukkan bahwa hari Koperasi pertama adalah tahun 1947, maka Hari Koperasi jang ke-XV.

TEMPAT LAHIRNJA „HARI KOPERASI"

Demikian sekedar tjatatan, betapa tadjamnja penglihatan dan pandangan saudara2 warga Koperasi dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama itu di Tasikmalaja, 15 tahun jl. Sajang keputusan2 itu, kurang diperhatikan

pada waktu sekarang, sedangkan hasil karya kongres itu pada tiap tahun sedjak tahun 1951 diperingati dan didjadikan pedoman dalam perdjuangan perkembangan Koperasi. Bukankah Hari Koperasi itu adalah tjiptaan mereka?

Untuk menghargai tjita2 Kongres Koperasi pertama jang menjebarkan „Hari Koperasi" itu, sebenarnja gedung tempat kongres pertama itu patut dimiliki oleh Gerakan Koperasi untuk didjadikan monumen berharga. Gedung itu djuga mempunja sedjarah dalam revolusi kemerdekaan, karena pada tgl. 13 Djuli 1947, sesudah diputuskan tentang Hari Koperasi pada tgl. 12 Djuli 1947 itu, sekitar gedung itu dibom Belanda, sehingga tempat Kongres terpaksa dipindahkan kelain tempat. Untung tidak ada korban manusia,, menurut keterangan jang diperoleh. Mengenai tjatatan ini, patut diselidiki dengan seksama agar ada dokumentasi sedjarah untuk anak-tjutju kita dihari datang.

Kalau dalam mempeladjari dasar2 Koperasi Dunia, tokoh2 Koperasi tidak pernah melupakan nama kota ketjil di Inggeris, jaitu Rochdale. Tahun berapa dan berapa banjak buruh² tenun jang berhasil menjusun dasar² koperasi jang dinamakan Rochdale principles itu, bagaimana penderitaan mereka, siapa ketua koperasi pada waktu itu, tokoh2 Koperasi kita selalu hafal. Sebutan perhimpunan "The Equitable Pioneers Society", mendjadi tjontoh jang harus dipeladjari dan ditiru dalam segala hal.

Apakah sedjarah kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaja itu tidak patut diselidiki dan diperingati pada tiap „Hari Koperasi? Dalam mempeladjari gerakan Koperasi Indonesia nama kota ketjil Tasikmalaja patut ditjatat, sebagaimana kita selalu disuruh mengenal kota ketjil Rochdale di Inggeris, kalau mempeladjari gerakan koperasi sedunia.

*

P.K.P.N. DJAKARTA-RAYA 10 TAHUN

Dalam bulan Djuni 1962 genaplah usia Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta Raya (P.K.P.N. D.R.) 10 tahun, jaitu dari bulan Djuni 1952, sampai bulan Djuni 1962. Suatu usia jang sebenarnja masih muda, tetapi untuk tjatatan sedjarah perkembangan Koperasi Indonesia, ada baiknja kita lukiskan sekedar perkembangan Koperasi Pegawai Negeri itu. Dalam hal ini baiklah kita batasi dengan sikap Pemerintah terhadap Koperasi Pegawai Negeri itu dan sekedar penga-

laman P.K.P.N. sendiri. Dengan berdirinja P.K.P.N. di Djakarta, maka di lain daerah pun, menjusul Pusat² Koperasi Pegawai Negeri.

Sikap Pemerintah terhadap Koperasi Pegawai Negeri.

Kalau pada tahun 1844 di Rochdale (Inggeris) kaum buruh berhasil mendirikan koperasi konsumsi karena kesulitan hidup disebabkan tekenan² atau penghisapan kaum madjikan, maka di Indonesia djustru Pemerintah mengandjurkan pembentukan Koperasi Pegawai Negeri untuk sekedar meringankan penghidupan pegawai, karena kenaikan gadji jang diterima selalu dirintangi oleh kenaikan harga bahan² pokok. Harga barang² pokok kebutuhan sehari-hari tidak stabil, sedangkan Pemerintah tidak dapat memikirkan untuk setiap kali menaikkan gadji pegawai negeri, sebab harus memperhatikan pula soal² lain jang djuga memerlukan pengedaran uang negara.

Berhubung dengan itu Pemerintah sedjak 1952 memberikan perhatian kepada pembangunan Koperasi² Pegawai negeri.

Demikianlah pada tgl. 6 Mei 1952 dibawah pimpinan Menteri Urusan Pegawai R.P. Soeroso di Djakarta diadakan pertemuan dengan wakil² Kementerian untuk merundingkan kemungkinan mendirikan Koperasi Pegawai Negeri di Djakarta dan di daerah².

Pada tgl. 20 Mei 1952 diadakan rapat jang kedua dan rapat jang ketiga pada tgl. 5 Djuni 1952. Baharu pada rapat jang keempat jaitu pada TGL. 12 DJUNI 1952 DISAHKAN BERDIRINJA PU-

Rapat tahunan anggota P.K.P.N. Djakarta Raya tgl. 28-6-'62 di Gedung Pemuda.
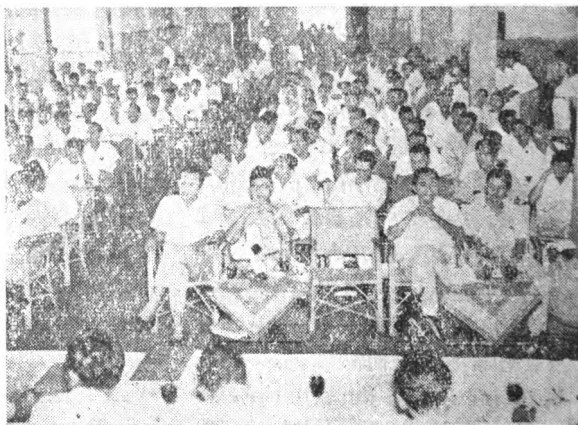
SAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI DJAKARTA RAYA. Berkat kerdja-sama jang baik serta kesungguhan Pengurus untuk melantjarkan Koperasi Pegawai Negeri itu, maka pada tgl. 18 September 1953 P.K.P.N. Djakarta Raya didaftarkan dengan Badan Hukum No. 845.

Dalam bulan September 1954 Pemerintah telah memutuskan untuk lebih membantu penjelenggaraan Koperasi Pegawai Negeri, maka pada tgl. 22 Nopember 1954 dengan No. 18/R.I./1954 Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo telah mengeluarkan surat-edaran jang isnja antara lain tentang mendapatkan barang² jang lebih murah, alat², ruangan dan transport barang².

Dengan djalan memberikan harga pokok kepada Koperasi Pegawai Negeri itu, diharapkan dapat menekan harga pasar.

Selandjunja dari Kepala² Djawatan diharapkan bantuannja untuk turut mengawsi dan memberi petundjuk bagi kelandjutan djalannja Koperasi Pegawai Negeri, antara lain memotong gadji pegawai unuk pembelian barang² koperasi. Djuga dari Djawatan Koperasi diharapkan bimbingan dan pengawasan.

Kalau Koperasi Pegawai Negeri chususnja gerakan koperasi Indonesia selama ini bergerak atas dasar Undang² Koperasi No. 179 tahun 1949 tgl. 7 Djuli 1949 bikinan kolonial, maka pada tgl. 19 Oktober 1958 disahkanlah Undang² No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi jang sesuai dengan alam kemerdekaan.

Berhubung dengan kembalinja ke U.U.D 1945 dengan Dekrit Presiden pada 5 Djuli 1959 dan mengingat pula Manifesto Politik (Manipol) Presiden R.I. pada tgl. 17 Agustus 1959, dimana koperasi harus diberikan peranan penting antara lain sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan Sosialisme Indonesia, maka pada tgl. 9 Desember 1959 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Ggerakan Koperasi. Dalam P.P. No. 60 itu antara lain ditjantumkan tentang Pendjenisan Koperasi jang didasarkan pada golongan dan funksi ekonomi. Dasar pendjenisan ini ditekankan pada lapangan usaha dan] atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi.

Pada waktu itu timbullah tafsiran dan propaganda jang mengatakan bahwa Koperasi Pegawai Negeri harus bubar, karena tidak sesuai lagi dengan P.P. No. 60 itu. Katanja, Koperasi Pegawai Negari bekerdja ditempat dimana

anggota²nja bekerdja. Tidak bekerdja ditempat dimana anggota tinggal. Ditambahkan lagi bahwa Koperasi Pegawai Negeri itu bekerdja hanja untun golongannja dan tidak untuk umum, serta usaha² jang didjalankan bermatjam djenis (konsumsi, simpan-pindjam dan produksi). Malahan ada pedjabat resmi jang dengan tegas mempropagandakan bahwa Koperasi Pegawai Negeri dalam tahun 1960 sudah harus bubar. Koperasi iu boleh berdiri terus, tetapi hanja sebagai Koperasi Simpan-pindjam.

Untunglah pada tgl. 12 Djanuari 1961 dengan No. 226]Pendaf. Kepala Djawatan Koperasi Pusat Mr. Soebiakto mengeluarkan surat-edaran tentang penafsiran deerah kerdja. Djelas dinjatakan bahwa daerah bekerdja bagi koperasi funksionil seperti buruh] pegawai]Veteran sulit sekali menjatukan pengertian daerah bekerdja dengan kesatuan administrasi. Bahkan untuk golongan funksionil faktor² seperti Corpsgees sangat menentukan dan perlu mendapat perhatian. Djadi tidak selamanja daerah bekerdja itu sama dengan kesatuan administrasi seperti desa, daerah Tingkat II dst. Kemungkinan penjimpangan terbuka. Penjimpangan itu didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti segi perusahaan (efisiensi perusahaan), kesatuan Sosial (Corpsgeest) dsb.

Lebih djauh dalam surat-edarannja tertanggal 12 Djanuari 1961 dengan No. 227]Pendaf di djelaskan bahwa daerah bekerdja koperasi golongan funksionil didasarkan pada :

1. *Tempat pekerdjaan atau perusahaan.*
2. *Departemen, Djawatan dan Kantor².*
3. *Ikatan Sosial lainnja ketjuali ikatan politik.,*

Patut direnungkan djuga, bhw. untuk mengisi USAHA² DALAM ANGGARAN DASAR KOPERASI PEGAWAI NEGERI, menurut surat-edaran Djawatan Koperasi Pusat tertanggal 18 Djuli 1960 No. 2887]Pendaf., ditjantumkan:

a. *mewadjibkan dan menggiatkan anggota untuk menjimpan pada Koperasi setjara teratur ;*
b. *memberikan pindjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan jang bermanfaat:*
c. *mendjalankan tugas penjaluran barang-barang kebutuhan pokok jang diperlukan oleh anggota-anggota ;*
d. *menambah pengetahuan anggota tentang ke-koperasian.*

Suatu tindakan radikal revolusioner dalam sedjarah perkembangan Koperasi Pegawai Negeri dapat ditjatat dengan keluarnja Peraturan Bersama Menteri Transkopemada dan Meneri P.O.R. No. 8 tahun 1961]No. P.I.]M.[Dispr.[61,

tertanggal 1 Agustus 1961 tentang Penjaluran Bahan² Pokok Keperluan sehari-hari kepada Pegawai Negeri. Dalam pasal 3 ditjantumkan antara lain bahwa penjaluran bahan² pokok bagi pegawai negeri, jang digadji menurut P.G.P.N., dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri, jang disahkan oleh Djawatan Koperasi. Adapun mengenai organisasi penjalur itu, dalam pasal 4, diutarakan sbb.:

1. a. *Pada dasarnja ditiap Kantor/Djawatan]Departemen didirikan satu koperasi pegawai negeri.*
   b. *semua pegawai negeri wadjib mendjadi anggota koperasi dikantornja masing².*
2. *Djikalau disuatu Kantor]Djawatan[Departemen djumlah pegawai negerinja tidak tjukup banjak untuk mendirikan suatu koperasi, maka beberapa Kantor]Djawatan/Departemen bersama dapat mendirikan satu koperasi menurut ketentuan bersama antara Djawatan Koperasi dan Kantor/Djawatan] Departemen itu.*
3. *Ditiap Daerah Tingkat II didirikan Pusat Koperasi Pegawai Negeri dan semua Koperasi Pegawai Negeri jang terdapat di Daerah Tingkat II tersebut diwadjibkan mendjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Negeri di dalam daerahnja masing².*
4. *Chusus untuk Daerah Tingkat I Djakarta-Raya berlaku ketentuan bahwa di Daerah tersebut tjukup didirikan satu Pusat Koperasi Pegawai Negeri Djakarta-Raya jang diperlakukan setingkat dengan Gabungan Koperasi Pegawai Negeri Daerah Tingkat I lainnja.*

Kalau kita ikuti Peraturan Bersama diatas dengan seksama, kita mempunjai kejakinan penuh bahwa kedudukan Koperasi Pegawai Negeri sudah tjukup teguh. Maka kita sungguh heran mendengar adanja berita dalam Antara pada tgl. 15 Djanuari 1962 jang dilantjarkan oleh pedjabat tertentu, bahwa mulai 1 April 1962 oleh Pemerintah akan diadaakan penertiban dalam penjaluran barang² jang tidak lagi melalui koperasi funksionil, tetapi akan didjalankan melalui koperasi² di R.K. masing-masing. Keterangan ini memang mendekati dengan Keputusan Gubernur Kepala Da-

erah Chusus Ibukota Djakarta-Raya No. 21]7-Ek/62 tertanggal 3 Februari 1962 tentang Penjempurnaan Penjaluran Beras Pmerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta-Raya. Peraturan ini disetudjui dan disahkan oleh Menteri P.O.R.

Menurut pengumuman Gubernur/Kepala Daerah No. 11]7-Ek 62 tertanggal 1 Maret 1962, demi kelantjaran penjaluran, penertiban dan pengawasan maka untuk SEMENTARA WAKTU, chusus untuk golongan funksionel (Karyawan Pemerintah) akan tetap mengambil djatah berasnja ditempat-tempat kerdja atau kantornja masing².

Keputusan Gubernur/Kepala Daerah diatas, kalau sekiranja didjalankan terus, djauh berbeda dengan sikap Pemerintah dari waktu berdirinja P.K.P.N. sampai tahun 1962.

Suatu masalah jang mungkin tidak diperhitungkan, bagaimana tjara memotong gadji pegawai untuk membajar barang² jang dibeli melalui koperasi di R.K.² mengingat keadaan keuangan pegawai² negeri pada umumnja belum tentu dapat membajar atau menebus barang keperluan dengan tunai. Belum lagi dipikirkan soal kelangsungan hidup perusahaan Koperasi Pegawai Negeri, efisiensi perusahaan dan kesatuan sosial (corpgeest). Faktor² jang menen-

Menteri Urusan Koperasi Achmadi, memberikan tjeramah Koperasi kepada masjarakat dan warga Koperasi Bogor, bertempat di Gedung Nasional Bogor.

tukan lantjarnja dan kelangsungan hidupnja Koperasi Pegawai Negeri.

Sekedar pengalaman P.K.P.N.

Dalam pada itu, patut djuga di tjatat bahwa selama ini ada djuga instansi² jang kurang memperhatikan pembangunan Koperasi Pegawai Negeri, karena sikap pimpinan dari Instansi itu meragukan. Dan dikalangan pegawai² sendiri sering djuga terdapat:

a. *Sikap tidak tahu menahu, masa bodoh, atjuh tak atjuh, karena memang belum pernah berkoperasi, atau mungkin kurang pengertian tentang Koperasi dan ada djuga karena mempunjai pengalaman jang pahit dalam berkoperasi. Karena kesalahan atau kurang djudjurnja pengurus koperasi, koperasilah jang disalahkan.*

b. *Sikap pendirian tertentu, karena dipengaruhi kaum Kapitalis, atau perusahaan perseorangan jang hanja memikirkan diri sendiri.*

c. *Dalam sikap ini, termasuk pula pegawai² jang dipengaruhi idielogie tertentu, bahwa Pemerintahlah jang harus melaksanakan distribusi itu.*

Unuk golongan pegawai² ini, memang perlu sekali adanja usaha-usaha penerangan dan pendidikan.

Untuk melaksanakan tjita² K. P.N. tentu memerlukan organisasi jang besar, efisien dan teratur. Dan bagi pegawai² negeri, harus mengerdjakan itu semua disamping tugas dalam kantor Pemerintah. Dan tugas pengurus koperasi terlebih berat lagi karena pengalaman kantor sadja, tidak tjukup untuk membikin sukses pekerdjaan. Unuk tugas koperasi itu, selain soal² administrasi, diperlukan djuga pengalaman dan pengetahuan berdagang (djual-beli), management, soal² moneter (keuangan), disamping pengetahuan perkoperasian. Tidak hanja pengetahuan perkoperasian sadja, djuga jang terpenting: keinsjafan] kesadaran berkoperasi. Semua ini memerlukan waktu dan kesabaran, sebab Cooperation is educations.

Maka soal penerangan dan pendidikan djuga menghendaki pemikiran tersendiri. Memang untuk usaha² penerangan sudah diadakan penerbitan serta tjeramah² sedjak tahun 1953. Dan sedjak tahun 1955 sudah diusahakan kursus-kursus Koperasi Pegawai Negeri dan kini masih berlangsung terus.

Didalam tahun 1956 P.K.P.N. pernah harus mendjual persediaan tekstilnja 25% dibawah harga pokok pembelian karena tidak

laku. Pada waku itu kebetulan ada bandjir tekstil dipasaran dan harganjapun djatuh, maka pendjualan tekstil P.K.P.N. matjet. Modal mendjadi beku sedangkan modal koperasi kurang. Maka tekstil tersebut terpaksa didjual dengan rugi kepada anggota, agar modal bisa berputar terus.

Didalam th. 1958 minjak tanah sulit, P.K.P.N. berusaha dan mendapat lisensi dari Stanvac. Mendadak sontak setelah minjaknja diambil oleh P.K.P.N., diluar diluar bandjr minjak tanah. Dan didalam bulan Agustus 1959 terdjadilah suatu malapetaka jang tak dapat dilupakan oleh kita sekalian jaitu: UANG SANERING. Tidak sedikit „Gadjah² Koperasi Pegawai Negeri jang bergelimpangan".

Semua pengalaman diatas perlu djuga sekali² diketengaahkan agar kita sekalian mendapat gambaran dalam garis besar tentang kesulitan² jang dihadapi. Maksudnja lain tidak, bahwa soal tugas distribusi beras itu, sebenarnja tidaklah merupakan pekerdjaan besar lagi mengingat pengalaman P.K.P.N. selama ini.

Tetapi jang senantiasa mendjadi persoalan², ialah soal modal dan pengangkutan. Unsur² usaha lain seperti sumber barang, tenaga buruh, sebenarnja sudah dapat dipetjahkan karena J.U.B.M. adalah merupakan sumber beras dan pasarannja terdjamin jaitu masjakat pegawai negeri dan tenaga pegawai² koperasi tjukup.

Telah sama² diketahui, menurut Anggaran Dasar P.K.P.N., modal diperusahaan terdiri dari :

a. uang simpanan², seperti simpanan pokok, wadjib dan manasuka.
b. uang simpanan dari orang atau Badan lain.
c. lain² penerimaan jang tidak disangka.

Karena kurang keinsjafan berkoperasi seperti diuraikan diatas, masuknja simpanan² tidaklah lantjar. Badan usaha dapat berputar, karena adanja pindjaman² dari Bank Indonesia, Pemerintah dan penerimaan lain² seperti ketungan jang diperoleh tiap² tahun, karena keuntungan tidak dibagikan kepada anggota², tetapi diatur berupa simpanan² sesuai dengan keinginan anggota²nja.

Pada waktu sekarang ini, dengan adanja peraturan baru, bahwa hanja Bank Koperasi, Tani dan Nelajan sadja jang boleh memindjamkan kepada Koperasi, mana kredit itu sudah ditutup] dihentikan oleh Bank Indonesia dan ditjoba memindahkan ke B. K.T.N.

Kepala Djawatan Koperasi Kota/Kab. Bogor atas nama Menteri Urusan Koperasi, menjerahkan piala Kotapradja terbaik perkembangan koperasinja, kepada Walikota/Ketua Bapengkop Kotapradja Bogor, jang telah mendjadi djuara antar Kotapradja seluruh Indonesia.

*

Kiranja sjarat² memindjam dari B.K.T.N. itu tidaklah semudah sebagaimana dibajangkan. Sjarat²nja masih tetap seperti sedia kala dengan djaminan² tertentu. Tidak boleh lagi berupa garansi Pemetah.

Dan jang paling mengherankan lagi, perdjandjian pindjaman itu harus ditanda tangani dimuka notaris jang tentu memerlukan waktu dan perongkosan lagi.

Alangkah baiknja kiranja dapat diperhatikan dan melaksankaan keputusan Munaskop I di Surabaja baru² ini, jang mengenai perkreditan, diputuskan antara lain sbb. :

a. Djaminan atas kredit Pemerintah berdasarkan modal investasi ditambah simpanan simpanan berentjana. Mobilisasi modal dari masjarakat jang diatur undang² dan modal jang dikumpulkan lewat Koperasi, dipergunakan utk. projek² Koperasi.

b. Unuk penjelenggaraan perkreditan pada Koperasi perlu dikemukakan norma² baru dan perkoperasian. Norma² baru tentang perkreditan kepada Koperasi² sejogjanja tidak djauh berbeda dengan norma² perkreditan kepada perusahaan Negara disegi sjarat² perbangan.

Dalam hubungan inilah kiranja tepatlah kalau sekranja simpanan² wadjib dan berentjana jang diatur dalam P.G.P.N. 1961 (Peraturan Gadji Pegawai jang baru), dapat djuga dipergunakan untuk usaha² Koperasi Pegawai Negeri. Bukankah pegawai² negeri itu dengan sendirinja sudah mendjadi anggota Koperas Pegawai Negeri, menurut peraturan bersama diatas itu?

Dan mereka sudah melaksanakan simpanan² berentjana pada tiap bulan.

Diatas telah digambarkan sebagian kesulitan² selain permodalan djuga tentang pengangkutan. Telah diuraikan diatas, tentang surat edaran Pemerintah pada th. 1954 itu jang memuat djuga tentang

pemakaian kendaraan bermotor kepunjaan Pemerintah setjara tjuma². Dalam prakteknja selama ini, tidaklah terlaksana sebagaimana diharapkan. Kalau sekiranja maksud surat-edaran itu tertjapai, banjaklah keuangan jang dapa diperbaiki.

Pada waktu sekarang ini persoalan itu sangat mendesak lagi, karena barang² pokok harus sampai kepada sipemakai (konsumen) dengan harga terpimpin. Untuk mendjamin harga dan lantjarnja pemindahan bahan² itu, faktor pengangkutan pegang peranan penting.

Berhubung dengan kesukaran² akan alat² pengangkutan, dan sesuai pula dengan kesimpulan Rapat Team Kerdja Pilot Projek Distribusi Djakarta-Raya, maka utk. dapat melajani 479 buah kantor dengan djumlah kl. 390.000 pegawai negeri berikut keluarganja dari 333 instansi Pemerintah dalam hal mendistribuser barang² kebutuhan pokok setjara tepat, tjepat dan teratur, maka sangat dibutuhkan tambahan truck. Truck² ini nanti akan disewakan kepada koperasi primair dengan ongkos sewa terpimpin pula.

Demikianlah sekedar gambaran setjara ringkas dan pengalaman menundjukkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri tetap siap siaga untuk melakukan tugas distribusi beras dan bahan² pokok lainnja kepada pegawai negeri. Dan kepada Saudara² petugas² P.K.P.N. serta semua Koperasi Pegawai Negeri diserukan agar benar² mempunjai rasa tanggung djawab penuh terhadap kepertjajaan jang diberikan Pemerintah kepada kita sekalian selama 10 tahun ini. Semoga langsung hidupnja Koperasi Pegawai Negeri.

* * *

Salah satu tjiri daripada orang jang betul-betul revolusioner, jalah satunja kata dengan perbuatan, satunja mulut dengan tindakan. Orang revolusioner jang tidak bersatu kata dan parbuatan, orang revolusioner jang demikian adalah orang revolusioner gadungan!

(Djarek)

SANDIWARA PENTAS SATU BABAK

„P E R T I W I"

Oleh: M.I. Rahman S.

SEKAPUR SIRIH DARI PENGGUBAH.

Sebagai salam-hormat kepada para pahlawan jang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik jang telah gugur dimedan-bhakti maupun jang masih hidup, kupersembahkan gubahan „Pertiwi" ini kepada chalajak ramai.

Semoga babak kedua „Ampera" dan babak ketiga „Trikora" sebagai sambungannja dapat menjusul pada waktunja.

Segala saran dan ketjaman untuk perbaikan gubahan ini senantiasa kunantikan.

Achirulkalam kuserukan kembali kata² terachir dari pahlawan Jos Soedarso dari dasar lautan Irian Barat: „Kobarkan terus semangat perlawanan!"

Pentas — *gelap-gulita.*

Ruangan gedong : *tjahaja remang², sehingga tidak mempengaruhi keadaan pentas.*

Tape-recorder : *sajup² sampai memperdengarkan lagu² mars tentara Belanda dan tentara Djepang, silih berganti. Kemudian disusul dengan bunji ledakan bom, dentuman meriam, tembakan² brengun, mitraljur, senapan, pistol dsb ....*

kembang api diterbangkan dari kiri kekanan dan dari kanan kekiri pentas jang masih gelap-gulita itu.

Lampu-lampu *didepan lajar belakang, ditengah-*

tengah pentas, dipermainkan begitu rupa melalui stop-contact, sehingga merupakan tjahaja[2] api dari sendjata[2] jang menembakkan peluru[2]nja.

Sound-effect : *setelah selesai dipertundjukkan/diper-dengarkan suasana dari peperangan Asia Tenggara, lagu[2] mars tentara Djepang makin lama makin djelas terdengar, kemudian berangsur-angsur lenjap.*

Pentas : *jang dalam keadaan gelap-gulita itu, setelah lagu[2] mars tentara Djepang berachir, sudah berobah mendjadi rimba dengan gunung sebagai latar belakangnja. Dikaki gunung tersebut, rebah tersungkur Ibu Pertiwi dengan rantai[2] belenggu jang terputus dikaki dan ditangannja.*

Lampu-lampu : *menjoroti sinar pagi hari kearah pentas.*

Sound-effect Tape-recorder : *memperdengarkan kokok-ajam, disusul dengan bunji bedug dan suara azan subuh.*

Ibu Pertiwi (bergerak, kemudian duduk) : *„Beratus-ratus tahun lamanja pantja-indera dan djiwa-ragaku terbelenggu. Ja, terbelenggu diluar kemauan dan kekuasaanku .... Aku Pertiwi ...., tiga setengah abad terikat-erat oleh belenggu jang njaris mematikan ini!*

Ibu Pertiwi (bangkit, tegak, dan mentjoba melepaskan sisa[2] belenggu ditangan dan dikakinja) : *Kini aku telah bangkit, bangun kembali, aku tak berkehendak lagi didjadjah oleh siapapun djuga dan bahwa belenggu pendjadahan jang telah menghinakan aku selama beberapa ratus tahun, telah dilempar-lenjapkan dari persadaku.*

-Aku sadar se-sadar²nja akan kehendak kemerdekaan, putera-puteriku siap-sedia dan sanggup untuk menghadapi dan membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan segala akibat²nja serta dengan tekad bulat untuk tidak hendak takluk, menjerah atau mundur setapak kakipun. Putera-puteriku jang menuntut bela akan kebebasanku tak gentar walaupun banjak jang diasingkan dan disiksa, mati dipangkuanku. Darah perdjuangan jang terus mengalir diseluruh tubuhnja merupakan arus revolusi jang tak dapat dibendung.

Bagaikan topan jang mengamuk, membebaskanku.
Ja, taufan takdir Illahi jang membebaskan aku dari rantai belenggu pendjadjahan!

Ibu Pertiwi :
(berlutut, sudjut menjembah Tuhan)

Ja Allah! Tiada lain jang kusembah, melainkan Engkau! Engkaulah jang telah membebaskan aku .... Aku Pertiwi, Ibu Indonesia!

Lampu sorot

1. *Sinar MERAH menudju kearah Ibu Pertiwi jang bergerak bangkit, bangun melepaskan sisa² belenggu jang masih ketinggalan melekat dikedua belah tangan dan kakinja.*
2. *Sinar HIDJAU menggantikan sinar merah tadi, menudju kearah Ibu Pertiwi jang sedang berlutut menjembah Tuhan, kemudian berangsur-angsur menjinar keseluruh pentas, dimana Ibu Pertiwi sedang melihat sekelilingnja untuk mentjari putera-puterinja diseluruh*

pendjuru Tanah Air dan Pantja Benua.

Tape-recorder : *memperdengarkan lagu „Rajuan Pulau Kelapa" per-lahan² kemudian berangsur-angsur keras dan djelas, achirnja menghilang perlahan-lahan.*

Ibu Pertiwi (melihat kesekelilingnja untuk mentjari putera-puterinja) : *„Mana ...., mana putera-puteriku? Dimanakah mereka? Wahai putera-puteriku, ketahuilah bahwa sekarang aku bebas merdeka!*

Lampu-sorot : *3. Sinar KUNING berturut-turut menudju kearah putera-puteri Pertiwi jang bergantian datang menemui Ibunja.*

Nasrun : *„Ibu, ibu .... Ini aku, Bu .... Aku Nasrun! Kini rantai belenggu sudah putus, Bu? Mari Nasrun bantu melepaskan gelang² belenggu badja itu!"*

Ibu Pertiwi : *„Nasrun, anakku .... Bersjukurlah pada Tuhan Jang Maha Kuasa jang sudah membebaskan Ibumu. Laksanakan terus tjita²mu, bulatkan tekad-kemauanmu untuk melandjutkan perdjuangan jang belum selesai ini ...."*

Ahmad (sambil menarik tangan Komariah) : *„Mari sini! Lihat! Belenggu jang mengikat Ibu selama ini sudah putus. Lekas laksanakan tugasmu!"*

Komariah (berlutut pada Ibu Pertiwi) : *„Ibu .... Ibu sudah bebas? Tidak terikat lagi, Bu?"*

Ibu Pertiwi : *„Ja, anakku. Tapi .... kau lihat dikaki dan tangan Ibu masih ada belenggu jang memberati gerak langkahku."*

Nasrun : *„Idjinkanlah, Bu, aku akan pergi mengerahkan kawan2ku buat pembebasan Ibu."*

Ahmad
(tegak, lalu pergi) : *„Akupun idjinkan pergi, Bu, memanggil teman2ku untuk menolong Ibu."*

Komariah : *„Pergilah kalian memanggil kawan2, aku mendjaga Ibu."*

Nasrun
(datang ditempat Ibu Pertiwi dan berlutut) : *„Ibu, teman2 telah berkumpul dan siap sedia untuk menolong Ibu. Ibu .... arus revolusi telah datang memerdekakan Ibu. Sekaranglah sa'atnja kita menjingsingkan lengan badju buat menjambut masa merdeka".*

Komariah
(setudju) : *„Memang benar. Tepat waktunja! Kewadjiban kita bersama membela Ibu, akupun sebagai seorang wanita tak mau ketinggalan, ikut memikul konsekwensi kemerdekaan!"*

Achmad
(tiba ditempat Ibu Pertiwi bersama kawan2nja). : *„Saudara2 sekalian, sekarang kita semua telah berkumpul disini. Marilah kita utjapkan IKRAR bersama dihadapan Ibu ...." (Sumpah Pemuda).*

Ibu Pertiwi : *„Anak2ku sekalian, Ibu bangga melihat kamu sekalian bersepakat seia-sekata dan bersatu-padu untuk melaksanakan tjita2 kita bersama Negara Indonesia jang Djaja, Adil dan Makmur. Kerdjakanlah kewadjiban masing2, demi kebangkitan kita semua!"*

Nasrun
dan kawan2nja : *„Baik, Ibu. Kita berdjandji akan terus melaksanakan kewadjiban kita atas sumpah jang telah kita utjapkan ......! Akan kita pertahankan tiap2 djengkal tanah air kita, sampai tetes darah jang penghabisan."*

Lampu-lampu	:	*semua serentak dipadamkan, sehingga seluruh pentas dan gedung gelap-gulita.*
Tape-recorder Sound Effect	:	*segera memperdengarkan lagu „SATU NUSA SATU BANGSA" DENGAN TEGAS.*
Narator	:	*menjelingi lagu „SATU NUSA SATU BANGSA", segera mengumumkan:* *''P R O K L A M A S I''* *„KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENJATAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA. HAL-HAL JANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASAAN, DAN LAIN-LAIN DISELENGGARAKAN DENGAN TJARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPOH JANG SESINGKAT-SINGKATNJA.* *Djakarta, 17 Agustus 1945.* *WAKIL-WAKIL BANGSA INDONESIA:* *SOEKARNO—HATTA.*
Tape-recorder (Sound Effect)	:	*segera memperdengarkan lagu kebangsaan „INDONESIA RAYA", setelah selesai pembatjaan „Proklamasi" tersebut.*
Lampu-lampu		*semua dinjalakan kembali.*
Pentas/lajar	:	*nampak sebagai „Gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Djakarta. Dihalamannja berkibar ditiang bendera "Dwi-Warna" dan tugu kemerdekaan menondjol didepan sekali, (lajar jang terlukis sedemikian rupa).*
Pentas	:	*gelap seluruhnja, sedangkan ruangan gedung berada dalam keadaan hampir gelap*

Sajup² sampai diperdengarkan njanjian² tentara Sekutu, makin lama makin djelas.

Lampu-lampu : *a. tjahaja pagi, kemudian*
b. tjahaja siang, lalu
c. tjahaja malam.

Tape-recorder : *memperdengarkan pidato radio Pelopor Tjak Tom, jang berapi-api „Bertempur terus! Betapa djuga djadinja, kita takkan menjerah?" (Pidato jang membakar semangat Rakjat Indonesia untuk menggempur setiap musuh jang mengindjakkan kakinja dibumi Indonesia).*

Pidato jang dimulai dengan pekik „MERDEKA"! selalu diachiri dengan utjapan „Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!" (Sekali Merdeka, tetap Merdeka!).

Ibu Pertiwi (setelah mendengar pidato tjak Tom). : *„Telah kudengar pidatomu, Patriot! Suaramu lantang-terang, utjapanmu djelas tegas! Semoga didengar oleh Saudara²mu. Masih segar dalam ingatan Ibu, bahwa detik dan peristiwa dalam tahun '45 ini berdjalan terus. Tjamkanlah:*

17 Agust. *Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.*
19 Sept. *Insiden penurunan bende-*
29 Sept. *Tentara Serikat (Inggeris), mendarat di Djakarta dibawah pimpinan Djenderal Christison.*
1 Okt. *Sesudah bertempur, achirnja markas tentara Dje-*

pang di Surabaja menjerah kepada Rakjat.

25 Okt.	*Djenderal Christison kewalahan meladeni Patriot² kita dan dia minta berunding dengan ajahmu Karna Djajawidjaja.* *Tetapi apakah jang terdjadi? Ia tidak menepati djandjinja. Tentara Inggeris mendarat terus di Surabaja, Semarang dan ....*

Kemudian Ibu saksikan pada tangggal:

29 Okt.	*Pimpinan tentara Inggeris minta kepada ajahmu Karna Djajawidjaja untuk menghentikan pertempuran itu. Dan Saudara²mu di Surabaja taat, patuh pada Komando ajahmu. Achirnja tertjapai perletakan sendjata.*

Dua hari kemudian, pada tanggal:

31 Okt.	*Djenderal Inggeris Christison dengan resmi mengakui T.K.R. di Djawa, tetapi .... pimpinan tentara Inggeris Brigadir Djenderal Mallabi dinjatakan hilang. Ibu ulangi, „hilang" dalam pertempuran di Surabaja!*

Dan dalam bulan Nopember '45 mulai njata kehendak pendjadjah. Ibu lihat pada tanggal:

	1 Nop.	*Pertempuran berkobar dimana-mana. Untuk kedua kalinja Ajahmu Karna Djadjawidjaja diminta bantuannja oleh pimpinan tentara Inggeris untuk menghentikan pertempuran. Tapi sungguhpun begitu .... dasar pendjadjah tak tahu diri, tak tahu membalas budi .... Delapan hari kemudian Ibu mendengar ada peristiwa di Surabaja ...."*

Lampu-sorot : *menjoroti sinar merah kearah Ibu Pertiwi guna menampakkan mimiknja, ketika mendengar suara musuh.*

Tape-recorder : *Ultimatum Djen. Maj. E.C. Mansergh: „Semua Pemimpin Indonesia, termasuk Pemimpin² Gerakan Pemuda, Kepala Polisi dan Kepala Radio Surabaja harus melaporkan diri di Bataviaweg pada tanggal 9 Nopember '45 djam 18.00.*

Mereka harus datang seorang demi seorang dengan membawa sendjata² jang mereka punjai.
Sendjata² tersebut harus mereka letakkan disuatu tempat jang berdjarak 100 Yard (± 91,4 m) dari tempat pertemuan. Dari situ orang Indonesia jang dimaksudkan harus menghadap dengan „angkat tangan" dan kemudian akan dilindungi ....
Mereka harus bersedia menandatangani suatu pernjataan menjerah dengan tiada bersjarat ....

Apabila ini tidak dipenuhi oleh rakjat Indonesia, maka tentara Inggeris akan menggunakan seluruh Angkatannja (Darat, Laut dan Udara) untuk menggempur kota Surabaja."

Surabaja, 9 Nop. 1945
Pimpinan Tentara Sekutu.
t.t.d.
Dj. Mj. E.C. Mansergh.

Tape-recorder (Manggalajuda) : *„Apa? Ultimatum? Antjaman dalam rumah tanggaku?*
Ha, ha, ha!

INDONESIA NEVER AGAIN THE LIFE-BLOOD OF ANY NATION!
We fight for the right of self-determination!

We fight for democraci! WE HAVE ONLY TO WIN!!!"

Tape-recorder : *memperdengarkan lagu "Madju tak Gentar" dengan djelas tegas.*

Tape-recorder (Manggalajuda) : *„Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdeka!*
PERINTAH HARIAN: Kepada semua Pradjurit T.K.R. dan Patriot Indonesia dengan ini kuperintahkan: SERBU! Hantjurkan kubu² pertahanan musuh! Bumi-hanguskan semua jang harus tinggal! Selesai."

Panglima T.K.R. Indonesia
t.t.d.
MANGGALAJUDA

Ibu Pertiwi : *„Kudengar perintahmu Panglima. Memang benar, tiada djalan lain hanja*

bertempur; betapapun djuga djadinja kita takkan menjerah!

Ketahuilah, bahwa kematian Brig. Djen. Mallaby adalah berita jang hanja diatur oleh tentara Belanda dengan maksud agar pertempuran berkobar terus. Belanda dapat mempergunakan pasukan Sekutu untuk kepentingan imperialismenja, mengagitir tentara Sekutu Barat, agar pasukan Sekutu suka menindas gerakan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, hai putera-puteriku, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bertjermin bangkai".

Tape-recorder : *memperdengarkan bunji kapal udara, tank dan lain² jang disusul dengan bunji ledakan bom, meriam, mitraljur dan diiringi oleh djerit-tangis manusia.*

Tape-recorder : *sajup² sampai memperdengarkan lagu „Gugur Bunga Ditaman Bakti".*

Narrator : *selama lagu „Gugur Bunga Ditaman Bakti" diperdengarkan, mendeklamasikan sebahagian dari sadjak „Antara Krawang-Bekasi":*

„...... Kami tjuma tulang-tulang berserakan,
tapi adalah kepunjaan-mu,
kaulah lagi jang tentukan nilai tulang² berserakan,
ataukah djiwa kami melajang untuk kemerdekaan,

kemenangan dan harapan,
atau tidak untuk apa-apa,
kaulah sekarang jang berkata,

kami tidak tahu,
kami tidak lagi bisa berkata,
kami bitjara padamu dalam hening di-malam sepi,
djika dada rasa hampa dan djam din-ding jang berdetak,
kenang, kenanglah kami,
teruskan, teruskanlah djiwa kami .....”

* * *

Pada tgl. 27-6-’62 bertempat diruangan kerdja J.M. Menteri Perhubungan Laut telah dilakukan pelantikan anggota² Dewan Perusahaan Pusat Departemen Perhubungan Laut dalam lingkungan B.P.U. Pelajaran Niaga dan B.P.U. Maritim.
Para anggota jang diambil sumpah (dari kiri kekanan): R. Prawoto Poerwodo, Kepala Biro Penerangan dan Hubungan Masjarakat Dep. Perhubungan Laut; J.M. Menteri Perburuhan Ahem Erningpradja; J.M. Menteri Perhubungan Laut Ir. Abdulmuttalib Danudiningrat; J.M. Menteri/Sekdjen Front Nasional Soedibjo; A. Munir, Anggota D.P.A.; Wakil (Deputy) Menteri/K.S.A.L. Brig. Djen. K.K.O. Sja’af; Pembantu Utama Menteri Perhubungan Laut Kolonel (Pel) Srijono Prodjosukanto.

KEGIATAN² DJAWATAN PENERANGAN KABUPATEN LEBAK

Indoktrinasi Manipol Usdek kepada Buruh.

Sedjak tanggal 23 sampai dengan 16 April 1962, Djawatan Penerangan Kabupaten Lebak di Rangkasbitung telah mengadakan Indoktrinasi Manipol/Usdek kepada buruh² perkebunan jang ada di Daerah Tingkat II Lebak Rangkasbitung, jang diselenggarakan oleh bagian Penerangan Mobil Djapen terdiri dari saudara² : D. Sukardja (Kepala rombongan), M. Sastrawidjaja dan M. Hirwoto.

Indoktrinasi tersebut bermaksud, agar buruh² perkebunan itu mempunjai rasa tanggung djawab terhadap pelaksanaan Garis² Besar Haluan Negara, jang harus dilaksanaka oleh seluruh rakjat Indonesia termasuk buruh² perusahaan jang sangat vitaal itu. Menimbulkan kesadaran dan keinsjafan para buruh perkebunan, agar melaksanakan tugasnja dengan sungguh², sehingga dapat mempertinggi produksi.

Atjara² jang dikemukakan terhadap buruh² tersebut jalah:

1. Sdr. M. Hirwoto mendjelaskan tentang sedjarah pendjadjahan dari djaman Belanda sampai djaman Djepang. Djaman Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, dan lahirnja Manifesto Politik R.I. tanggal 17 Agustus 1959.

2. Sdr. M. Sastrawidjaja menguraikan tentang Pelaksanaan Manipol/Usdek, sifat gotong-rojong jang ada pada Kooperasi sebagai landasan dari Ekonomi terpimpin, Operasi Gerakan Makmur, pembanterasan Buta Huruf, menghidarkan wabah penjakit, dan tentang pelaksanaan Trikomando Rakjat pembebasan Irian Barat.

3. Sdr. D. Sukardja sebagai pemimpin rombongan, mengupas sari² dari Manifesto Politik anta

ra lain tentang: Pembentukan Negara Kesatuan dari Sabang sampai Merauke, Pembentukan Masjarakat Adil dan Makmur, Pembentukan persahabatan jang baik antara Indonesia dengan semua negara² di Dunia, untuk mewudjudkan perdamaian jang abadi. Djuga telah diuraikan tentang kekajaan alam Indonesia, dan mengandjurkan untuk memelihara dan menggali kekajaan alam itu. Mempertinggi produksi kerdja untuk memperoleh Divisen dan guna melaksanakan Pembangunan Nasional semesta berentjana.

Buruh² jang telah menerima indoktrinasi itu jalah buruh² dari perkebunan Tjikadu, Tjisalak, Pasir Agunan, Silalangu, Sampangpeundeuj, Bantardjaja, Gunung Tunggal, Tjisadang, Tjileles, Tosari, Tjikareo, Kiara Pajung dan Tjitjaringin.

Pengusaha dan buruh² perkebunan itu merasa sangat berterima kasih karena mereka telah mendapat penerangan² tersebut.

Melaksanakan Pembebasan Buta Huruf.

Dengan mengambil tempat diruangan Pendopo Kabupaten Lebak, pada tanggal 29 Mei '62, oleh Bupati Kepala Daerah, selaku Komando Gerakan Operasi Penjempurnaan Pembebasan Buta Huruf, (K.G.O.P.P.B.H.), didaerah Tingkat II Lebak, telah diadakan rapat dengan seluruh Instansi, Partai/Organisasi massa dan orang² terkemuka.

Rapat tersebut diadakan dalam rangka pelaksanaan Instruksi No. 2, K.G.O.P.P.B.H. Daerah Tingkat II. Lebak dengan mendrop petugas² ke tiap² Ketjamatan untuk mengawasi gerakan pembebasan Buta Huruf jang akan diadakan serentak mulai tanggal 5 s/d 16 Djuni 1962.

Petugas² jang akan didrop ke ketjamatan² itu, terdiri dari Kepala² Djawatan, Potensi Karya dalam hubungan Front Nasional dan orang² terkemuka, sehingga seluruh potensi karyawan se Kabupaten Lebak turut bertang gung djawab dalam pelaksanaan K.G.O.P.P.B.H. ini.

Ditiap2 desa akan diadakan pos² beladjar dengan maximal tiap² desa mempunjai 2 pos, tertentu untuk mengadakan testing terhadap rakjat² desa. Para pengadjar di Ketjamatan² dan desa² telah dikerahkan tenaga² dari Djuru² Penerang Ketjamatan, petugas² istansi, O.P.R.², dan orang² terkemuka jang mempunjai kesanggupan

untuk melaksanakan gerakan pembebasan Buta Huruf dengan tjara kerdja jang revolusioner.

Di Daerah Tingkat II Lebak, jang meliputi 15 Ketjamatan, baru 3 Ketjamatan jang telah bebas Buta Huruf, jaitu : Ketjamatan Rangkasbitung, Lewidamar dan Sadjira. Djumlah jang masih buta huruf ada sebanjak 49.104 orang jang terbagi² dalam 12 Ketjamatan lagi.

Dengan djalan mengerahkan seluruh tenaga untuk menjempurnakan Pembebasan buta huruf ini, dapatlah diharapkan bahwa Proklamasi Bebas Buta Huruf, jang akan dilaksanakan nanti dapat berdjalan dengan tepat, dan dengan pertanggung djawaban dari seluruh karyawan, dan orang² terkemuka dari Kabupaten Lebak.

Coaching pembelian padi Pemerintah.

Untuk kelantjaran pembelian padi Pemerintah dengan tjara gotong-rojong, di Daerah Tingkat II Lebak, telah dibentuk Team Coaching, untuk memberikan latihan² terhadap Team² Sub Ariskusi di Ketjamatan² jang **terdiri dari :**

1. Ketua Pelda Moh. Arif dari P.D.M.
2. Anggota : a. D. Sukardja dari Djapenkab., b. Eman Nurjani dan Djuchdi Sulaeman dari Djawatan Pertanian, dan c. Atje Natakusumah dari Djawatan Koperasi

Pembagian tugas dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Padi Pemerintah dan Kesiap Siagaan mental dan Spirituil oleh D. Sukardja.
2. S.S.B./O.P.S.S.B./K.P.P. oleh Eman Nurjani.
3. Visuil Arde dan S.S.B.M. oleh Sulaeman Djuchdi.
4. Pendirian Koperasi Penghasil Padi oleh Atjeh Natakusumah.
5. Pelopor dan tidakan oleh Pelda Moh. Arif.

Team Coaching telah mendjalankan tugasnja di Kewedananan : Gunung Kentjana, Rangkasbitung, Malingping dan Lewidamar. Sebagaimana jang telah ditentukan, target padi dari Daerah Tingkat II Lebak, sedjumlah 15.000 ton jang harus ditjapai dalam panen tahun 1962.

(Djapenkab. Lebak, Kep. Bag. Penmob D. Sukordju).
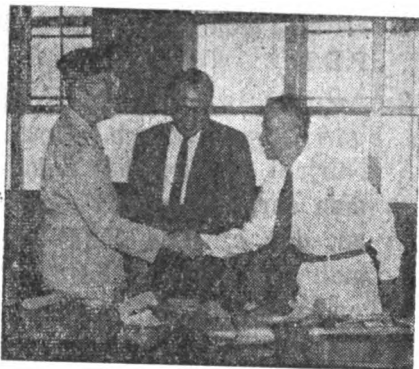
Kepala Djapen Propinsi Sumatera Utara jang baru Mr. Sukadi, diperkenalkan dengan Wali kota Medan Basrah Lubis.

*

PERKENALAN di MEDAN PERPISAHAN DAN

Oleh Djawatan Penerangan Kotapradja Medan pada tanggal 18 Mei 1962 telah diadakan suatu pertemuan ramah-tamah diruangan sidang Balai Kota Medan jang dihadiri oleh selain pegawai² Djawatan Penerangan Kotapradja Medan, djuga kelihatan hadlir sedjumlah wakil² pesurat-kabaran dikota ini, Walikota Kepala Daerah Medan, Kepala Penerangan Agama Kotapradja Medan, Kepala Bahagian Penmob. Djawatan Penerangan Propinsi Sumatra Utara Djontari Damanik B.A., dan Kepala Djapenkab. Nias C. Marpaung.

Pertemuan ramah-tamah ini jang dipimpin oleh Kepala Bahagian Tata Usaha Djapenko-I Medan H.T. Sianturi adalah mengandung dua segi jang disekaliguskan jaitu pertemuan perpisahan dengan Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatra Utara K. Tjokrosentono jang disebabkan telah mendapat hak pensiun akan meninggalkan djawatannja dan kedua adalah pertemuan perkenalan dengan kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatra Utara jang baru Mr. Soekadi.

Dalam pertemuan jang sungguh berkesan dan meninggalkan kenang²an baik ini oleh keluarga Djawatan Penerangan Kotapradja Medan telah diserahkan tanda-mata, baik kepada K. Tjokrosentono jang akan meninggalkan Djawatannja be-

Salam perkenalan dan perpisahan berlangsung dalam suasana riang gembira

rupa sehelai sarong plekat, badju, sebuah kupiah dan sebuah tasbih (sebagai perlengkapan menudju sjurga), maupun kepada Mr. Soekadi jang akan memimpin Djawatan Penerangan Propinsi Sumatra Utara, berupa sebuah tongkat-komando dan sebuah pulpen (sebagai perlengkapan pimpinan), sementara Kepala Djapenkab. Nias C. Marpaung atas nama keluarga Djapenkab. Nias telah menjerahkan pula tanda mata jang berupa sebuah kipas kepada K. Tjokrosentono untuk disampaikan kepada Nj. K. Tjokrosentono jang telah berdjasa memberi semangat kerdja dan mendampingi suaminja selama mendjalankan tugasnja.

Kepala Djawatan Penerangan Kotapradja Medan Roestam-Thaib dalam kata sepatah-duanja antara lain mengatakan bahwa pertemuan jang diadakan oleh keluarga Djawatan Penerangan Kotapradja I Medan ini adalah timbul dari rasa hati jang tulus ichlas mengingat perhubungan baik jang terdjalin selama ini antara K. Tjokrosentono selaku Kepala Djapensu dengan Djawatan Penerangan Kotapradja I Medan disamping sebagai pernjataan kami didalam pertemuan ini mengharap-

Kepala Djapenpropsu jang baru menerima tanda mata dari keluarga Djapenko Medan.

kan pula bimbingan dan tuntunan dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatra Utara jang baru Mr. Soekadi.

K. Tjokrosentono dalam kata perpisahannja mengatakan bahwa sungguhpun berpisah dalam bidang jang satu tetapi kita tetap akan bertemu dalam bidang jang lain. Diharapkannja agar pegawai Djawatan Penerangan Kotapradja 1 Medan terus menerus bergiat mempertinggi daja kerdjanja, demi untuk melaksanakan tugas² jang ditimpakan kepada kita disamping terus menerus pula menambah ilmu pengetahuan guna memperlengkapi diri.

Mr. Soekadi dalam kata perkenalannja menjatakan merasa sangat terharu atas sambutan pegawai² Djawatan Penerangan Kotapradja I Medan ini terhadap dirinja dan ini menambah-

Kepala Djapenpropsu jang lama sedang menerima kenang2an.

*

kan kepertjajaan kepadanja bahwa tugas² penerangan jang harus dibawakan ditengah2 masjarakat berkat kerdja sama jang baik dapat dengan mudah dilantjarkan.

Selandjutnja dikatakan bahwa para karyawan Penerangan harus memiliki 3 fungsi jang satu sama lain berhubungan rapat, jaitu **fungsi Sosio-informatif, fungsi Sosio-edukatif dan fungsi Sosio-dinamika**.

Walikota Kepala Daerah Medan Basjrah Lubis jang djuga memberikan kata sambutannja mengharapkan dan mengadjak agar pegawai² Penerangan dapat memberikan tenaga²nja jang lebih banjak lagi dari jang sudah² serta dapat lebih tjepat lagi mengatasi sesuatu persoalan jang timbul di-tengah² masjarakat dengan djalan memberikan pendjelasan² jang dihadjatkan pada saat² persoalan itu muntjul.

Dapat ditambahkan bahwa sebelum Walikota Kepala Daerah Medan Basjrah Lubis menjampaikan kata sambutannja terlebih dahulu salah seorang dari wakil² pers telah turut pula memberikan kata² sambutannja.

Pertemuan ramah-tamah ini diachiri dengan pembatjaan Doa-Selamat kepada jang pergi/datang jang dilakukan oleh Kepala Penerangan Agama Kotapradja Medan H. Abdullah Ali. *(Djapen Kotapradja I Medan Kepala Bgn. Pers Publisiet Hasan Hadji).*

*

TIMBANG TERIMA KEPALA DJAWATAN PENERANGAN R.I PROPINSI MALUKU

Timbang terima pimpinan Djawatan Penerangan R.I Propinsi Maluku, dari tangan Sdr. Hartono kepada Sdr. I.P. Latumahina B.A. telah dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1962, bertempat dikantor Djapen. R.I. Propinsi Maluku. Upatjara dihadiri oleh Kepala² Studio R.R.I Ambon, Pertjetakan Negara Ambon, dan seluruh pegawai² Djapen Propinsi Maluku.

Setelah Nota Deppen tangal 2 Mei 1962 No. 409, mengenai pelaksanaan Timbang-terima ini dibatjakan dan penandatanganan naskah timbang-terima, maka Kepala Djapen Propinsi Maluku jang lama sdr. Hartono mengutjapkan kata perpisahannja jang antara lain menjatakan sebagai berikut: „Saja telah bertugas pada Djapen Propinsi Maluku selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Karena segala sesuatu dalam hubungan timbang-terima ini diadakan setjara mendadak, maka saja minta maaf atas segala kekurangan jang nampak pada saat ini.

Pada kesempatan ini, saja tidak akan banjak memberikan kesan², tetapi perlu diingatkan bahwa kita sekarang berada pada tingkat penjelesaian revolusi untuk membebaskan Irian Barat.

Dilihat dari sudut patriotiek, maka mutasi terhadap diri saja ini adalah diluar keinginan saja, karena didaerah ini, kita dapat berbuat banjak untuk kepentingan pembebasan Irian Barat. Kepada para pegawai dimintakan perhatian tentang 2 hal jaitu:

1. Supaja menitik beratkan perhatian terhadap soal² pokok guna pembebasan Irian Barat.
2. Supaja hal² jang tidak pokok djangan didjadikan sebab, sehingga mengurangi kelantjaran perdjuangan untuk pembebasan Irian Barat itu.

Saja andjurkan pula, supaja para pegawai menghindarkan diri dari soal² ketjil jang bisa mengakibatkan pertentangan antara satu dengan jang lain. Utamakanlah kepentingan Nasional, dari pada kepentingan golongan atau perseorangan.

Kepada saudara I.P. Latumahina B.A saja utjapkan selamat atas kepertjaan jang diberikan oleh pusat kepada saudara untuk memimpin Djawatan ini, serta diharapkan supaja saudara dapat melandjutkan pimpinan untuk kelantjaran Djawatan Penerangan ini". Demikian beliau.

Kepala Djawatan jang baru sdr. I.P. Latumahina B.A. dalam kata sambutannja menjatakan, bahwa apa jang terdjadi sekarang ini adalah melaksanakan instruksi Departemen Penerangan. Pergantian pimpinan adalah soal biasa. Ada masa datang ada masa pergi.

Tindakan jang diambil oleh Deppen dalam hubungan ini a-

dalah semata[2] untuk kepentingan Djapen Propinsi Maluku ini, mengingat bahwa sdr. Hartono pada waktu belakangan ini mempunjai tugas jang terlalu berat, jaitu memimpin dua djawatan (Djapen R.I. Propinsi Maluku dan Pertjetakan Negara).

Dalam hubungannja dengan perdjuangan Pembebasan Irian Barat, beliau mendjelaskan, bahwa tugas Djawatan Penerangan pada dewasa ini, adalah sangat penting. Karena itu maka diharapkan dari seluruh pegawai, agar dapat menjesuaikan diri dengan sifat perdjuangan pada waktu sekarang, serta menjadari tentang pentingnja posisi Djapen pada tingkat Revolusi jang sedang berlangsung ini. Djawatan Penerangan adalah alat Revolusi jang sangat vital.

Kepada sdr. Hartono jang masih tetap Kepala Pertjetakan Negara, diharapkan suatu kerdja sama jang baik, mengingat kelantjaran pekerdjaan Djapen sebagian besarnja adalah tergantung dari pekerdjaan pertjetakan Negara. Demikian saudara itu.

Timbang terima ini diadakan dalam suatu upatjara jang sangat sederhana, mengingat segala sesuatu sekarang harus dilaksanakan setjara tjepat, sesuai dengan irama revolusi jang sedang bergelora sekarang ini. (Djapen Propinsi Maluku M. Mulawat).

* * *

Gotong-rojong bukan sekedar satu sifat kepribdaian Indonesia! Gotong-rojong adalah djuga satu keharusan dalam perdjuangan melawan imperialisme dan kapitalisme, baik zaman dahulu, maupun dizaman sekarang. Tanpa mempraktekkan samenbundeling van alle revolutionaire krachten untuk digempurkan kepada imperialisme dan kapitalisme itu, djanganlah ada harapan perdjuangan bisa menang! *(Djarek)*

BERITA KELUARGA

Telah pulang kerachmatu'llah :

RAMAWI IBRAHIM,

Kepala Bagian Pers dan Publisitet Djawatan Penerangan Kabupaten Solok.
Meninggal pada tanggal 26 Mei 1962.

*
**

*
**

SUPARNO TIRTOWIDJOJO,

Perakit Penerangan Tk. I, pada Bagian Pers dan Publisitet Djawatan Penerangan Kabupaten Sukohardjo.
Meninggal pada hari Rabu tgl. 13 Djuni 1962, dirumahnja desa Kentongredjo Kelurahan Pakisan, Ass. Tjawas.
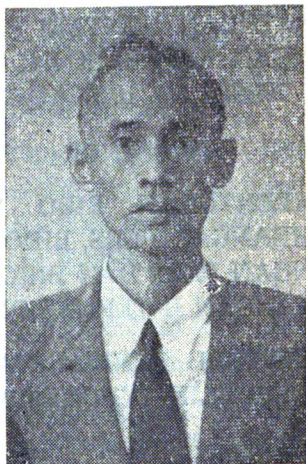
Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Ro-dji'un.

* * *

PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN DAN PENGUMUMAN

Isi:

PERATURAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONENESIA No. 10/SK/M/62

TENTANG

PEMBENTUKAN BIRO PERKEMBANGAN PERS, BIRO HUBUNGAN PERS DAN BIRO PENERANGAN INTERNASIONAL.

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

a. bahwa sedjak tahun 1945 Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat memberikan pengajoman dan bimbingan kepada Pers Perdjoangan Nasional.

b. bahwa pengajoman dan bimbingan tersebut senantiasa disalurkan melalui Departemen Penerangan.

c. bahwa diperlukan suatu landasan bekerdja jang memungkinkan penjempurnaan tugas pers sebagai alat revolusi dan pembangunan semesta disegala bidang.

Mengingat :

a. Pidato J.M. Menteri Penerangan pada tanggal 4 Mei 1962 didepan para Karyawan

Pers Nasional dan Internasional.

b. Peraturan Menteri Muda Penerangan R.I. tgl. 1 Desember 1959 No. 1/SK/MM/59 tentang susunan organisasi Departemen Penerangan.

MEMUTUSKAN

Dengan membatalkan peraturan dan keputusan-keputusan lain jang bertentangan dengan keputusan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG TUGAS KEWADJIBAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO PERKEMBANGAN PERS, BIRO HUBUNGAN PERS DAN BIRO PENERANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

TUGAS KEWADJIBAN

A. *Biro Perkembangan Pers mempunjai tugas kewadjiban:*

I. Memperkembangkan Perusahaan Pers dengan meregistrir dan membimbing perkembangan Perusahaan-perusahaan Pers.

II. Membimbing Pers dengan memberikan fasilita kepada Pers dan memberikan bimbingan kearah peninggian mutu Pers serta perkembangan Pers Sosialis Indonesia.

III. Membagi dan mengawasi kertas koran dengan mengatur pembagian serta mengadakan pengawasan terhadap pemakaiannja.

B. *Biro Hubungan Pers mempunjai tugas kewadjiban:*

I. Mengadakan hubungan dan observasi terhadap Pers Nasional dan memberikan bahan-bahan berudjud berita dan lain-lain.

II. Memberikan fasilita kepada jang mengadakan hubungan serta pengawasan terhadap Wartawan-wartawan Asing di Indonesia serta meneliti isi Harian-harian Asing jang masuk Indonesia.

III. Menjelenggarakan ichtisar berita² dan tadjuk rentjana pers dan radio dalam dan luar negeri.

C. *Biro Penerangan International mempunjai tugas kewadjiban:*

I. Menjelenggarakan hubungan dan memberi penerangan kepada/serta meneliti usaha penerangan dari Perwakilan-perwakilan Asing serta Perusahaan² Asing di Indonesia.

II. Meneliti isi madjalah-madjalah luar negeri jang bersangkutan dengan Indonesia dan menjiapkan karangan-karangan dan bahan-bahan visuil untuk madjalah-madjalah luar negeri serta Perwakilan Republik Indonesia Bagian Penerangan (I.S.I.).

III. Menjelenggarakan penerbitan-penerbitan untuk konsumsi luar negeri dan dalam negeri.

Pasal 2.

SUSUNAN ORGANISASI

Biro Perkembangan Pers meliputi:

I. Bagian Perkembangan Perusahaan Pers.
II. Bagian Bimbingan Pers.
III. Bagian Pembagian dan Pengawasan Kertas Koran.
IV. Bagian Sekretariat.

Biro Hubungan Pers meliputi:

I. Bagian Pers Nasional.
II. Bagian Pers Asing.
III. Bagian Ichtisar Pers dan Radio.
IV. Bagian Sekretariat.

Biro Penerangan Internasional meliputi:

I. Bagian Foreign Relations.
II. Bagian Internasional Opinion and Research.
III. Bagian Foreign Publicity.
IV. Bagian Sekretariat.

Pasal 3.

PENENTUAN SEKSI-SEKSI.

Pembagian Bagian-bagian tersebut diatas dalam seksi-seksi serta tugas kewadjiban, seksi-seksi ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Penerangan atas usul para Kepala Biro masing-masing tersebut diatas.

Pasal 4.

PEMBENTUKAN BAGIAN-BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI BARU.

Menteri Penerangan menurut keperluan dapat memperluas atau mempersempit Bagian-bagian/Seksi-seksi atau membentuk Bagian-bagian/Seksi-seksi baru.

Pasal 5.

PENUTUP.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Mei 1962
MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
(Prof. Mr. Muh. Yamin)

*

PERATURAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA No. 20/SK/M/'62.

tentang

KOMANDO PENGGERAK KARYAWAN DEPARTEMEN PENERANGAN

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA.

MENGINGAT:

1. Tingkat-meningkatnja Revolusi Bangsa Indonesia pada Umumnja;
2. Tri Komando Rakjat pada chususnja;
3. Fungsi dan tugas Departemen Penerangan dalam hubungan 1 dan 2 tersebut diatas;
4. Tri Guna Bhakti sebagai telah digariskan dalam surat edaran tanggal 30 April 1962.

MENIMBANG:

bahwa perlu dibentuk badan jang membantu memelihara dan membina potensi para karyawan Departemen Penerangan agar segenap tenaga Departemen Penerangan dari pusat dan tjabang-tjabangnja selalu siaga dan segar untuk mendjalankan tugas-tugasnja, dalam tingkat-meningkatnja Revolusi Bangsa Indonesia pada umumnja, Tri Komando Rakjat pada chususnja. segala sesuatu sebagai digariskan dalam surat edaran tanggal 30 April 1962 jang berintikan „Tri Guna Bhakti".

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

Peraturan tentang pembentukan „KOMANDO PENGGERAK KARYAWAN DEPARTEMEN PENERANGAN" (K.P.K. DEPPEN).

Pasal 1.

Di Departemen Penerangan diadakan „K.P.K. Deppen".

Pasal 2.

Tugas kewadjiban.

K.P.K. Deppen bertugas:

a. Membantu Pimpinan Departemen Penerangan dalam memelihara dan membina potensi segenap pegawai Departemen Penerangan agar tetap siaga dan segar untuk mendjalankan tugas-tugasnja dalam tingkat-meningkatnja Revolusi Bangsa Indonesia pada umumnja, Tri Komando Rakjat chususnja segala sesuatu sebagai telah digariskan dalam surat edaran tanggal 30 April 1962 jang berintikan „Tri Guna Bhakti".

b. Memberi Pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran kepada pimpinan Departemen Penerangan mengenai perbaikan-perbaikan dalam tubuh Departemen Penerangan dan kekeluargaan antara warga-warga Departemen Penerangan untuk mentjapai martabat jang lebih tinggi.

c. Dalam melaksanakan tugasnja, K.P.K. Deppen bekerdja sama dengan Serikat-Serikat Buruh di Departemen Penerangan dan Badan Kontak Angkatan 45 Departemen Penerangan.

Pasal 3.

Pimpinan dan susunan.

a. K.P.K. Deppen Pusat terdiri dari suatu staf umum jang terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, 8 orang anggota dan dibantu oleh suatu staf Sekretariat.

b. Anggota-anggota Staf Umum ini ditetapkan oleh Menteri Penerangan.

Pasal 4.

Staf Umum bertanggung-djawab kepada Menteri Penerangan.

Pasal 5.

Di Kantor Departemen Penerangan Pusat dan di Tjabang-tjabang Dinas Departemen Penerangan jaitu:

Studio-studio R.R.I., P.F.N., Pertjetakan-pertjetakan Negara, Djawatan-djawatan Penerangan Daswati I dan II diadakan Komando Penggerak Karyawan Deppen.

Pasal 6.

Pimpinan Komando-komando K.P.K. Tjabang terdiri dari Kepala Dinas sebagai Ketua dan 2 anggota disahkan oleh Staf Umum di Pusat.

Pasal 7.

Untuk pelaksanaan usaha-usaha di Komando-komando K.P.K. Deppen Pusat dan Tjabang-tjabang diadakan:

a. Staf Latihan Kemiliteran Pegawai Sipil (L.K.P.S.).
b. Staf Apel dan Upatjara penaikan Bendera.
c. Staf Olah Raga, Kesenian dan Rekreasi.
d. Staf Kewanitaan.
e. Staf Kursus-kursus, tjeramah-tjeramah dan peringatan-peringatan nasional.

Pasal 8.

a. Hal-hal jang belum ditetapkan dalam peraturan ini, diatur dalam peraturan tersendiri.

b. Hal-hal atau peraturan jang terdahulu jang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan ini, dengan ini ditiadakan.

Pasal 9.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung tanggal 20 Mei 1962.

Ditetapkan di: Djakarta.
pada tanggal: 24 Djuli 1962.

MENTERI PENERANGAN;
ttd.
(Prof. Mr H. Muh. Yamin).

*

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA.
No. 18/SK/M/62.

tentang

PEMBUBARAN PANITIA2 DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENERANGAN.

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

a. bahwa banjaknja panitia2 dalam lingkungan Departemen Penerangan pada hakekatnja mengurangi tanggungdjawab para petugas dan penanggung djawab dari Direktorat, Biro serta Bagian jang bersangkutan.
b. bahwa pembentukan panitia2 hanja diperlukan bilamana ada tugas chusus jang kiranja tidak dapat diatasi oleh Direktorat, Biro serta Bagian jang bersangkutan.

MENGINGAT :

a. normalisasi pelaksanaan tugas kewadjiban Direktorat, Biro dan Bagian dari Departemen Penerangan.
b. penghematan waktu, tenaga dan biaja untuk keperluan sidang2 dari panitia2.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

I. Membubarkan panitia-panitia jang tersebut didalam lampiran pada surat Keputusan ini serta menjerahkan tugas panitia-panitia tersebut kepada Direktorat, Biro serta Bagian dari Departemen Penerangan jang bersangkutan.

II. Memerintahkan segera diadakannja timbang-terima antara Panitia2 tersebut dengan Direktorat, Biro serta Bagian jang bersangkutan mengenai pekerdjaan panitia2 jang sedang didalam penjelesaian.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta.
pada tanggal: 21 Djuni 1962.

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(Prof. Mr H. Muh. Yamin).

**
*

PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA PADA TINGKAT TERTINGGI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG:

bahwa dalam menjelenggarakan pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan pokok-pokok organisasi daripada Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;

MEMBATJA:

1. Memorandum Panitia 6 mengenai „Penjempurnaan Organisasi dan Administrasi Aparatur Negara pada tingkat tertinggi" tertanggal 30 Djanuari 1962, jang disampaikan kepada kami pada tanggal 13 Pebruari 1962;

2. Surat Panitia Retooling Aparatur Negara kepada kami tertanggal 15 Maret 1962 No. 12/Org./K/62 Rahasia;

MENGINGAT:

1. Pasal 4 ajat 1, pasal 5 ajat 2 dan pasal 17 Undang-undang Dasar;

2. Instruksi Presiden R.I. No. 4 dan No. 5 tahun 1960;

3. Keputusan Presiden R.I. No. 94 tahun 1962;

MENDENGAR:

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 12 dan 19 Djuni 1962;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA PADA TINGKAT TERTINGGI

sebagai berikut:

BAB I
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 1.

Presiden membentuk suatu Ke-

menterian Negara atau Kabinet jang terdiri atas seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Pertama, beberapa orang Wakil Menteri Pertama dan beberapa orang Menteri.

Pasal 2.

Presiden adalah Perdana Menteri.

Pasal 3.

Atas petundjuk Presiden//Perdana Menteri, maka Menteri Pertama memimpin Kabinet sehari-hari.

Pasal 4.

Presiden dapat menundjuk diantara para Wakil Menteri Pertama seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama untuk mewakili Menteri Pertama, apabila ia berhalangan.

Pasal 5.

Organisasi Kementerian Negara disusun berdasarkan pembagian pemerintahan Negara dalam 8 bidang pemerintahan, jaitu:

1. Bidang Luar Negeri,
2. Bidang Dalam Negeri,
3. Bidang Pertahanan/Keamanan.
4. Bidang Produksi.
5. Bidang Distribusi,
6. Bidang Keuangan,
7. Bidang Kesedjahteraan Rakjat dan
8. Bidang Chusus.

Pasal 6.

Tiap-tiap Bidang Pemerintahan dikoordinir oleh seorang Wakil Menteri Pertama, jang mewakili Presiden/Perdana Menteri dibidangnja masing-masing, dan meliputi satu atau beberapa bagian pemerintahan atau departemen pemerintahan, jang dipimpin oleh seorang Menteri.

Pasal 7.

Menteri-menteri bertugas :

a. memimpin suatu bagian pemerintahan jang berbentuk Departemen,
b. memimpin suatu bagian pemerintahan jang tidak berbentuk Departemen, atau
c. mendjalankan tugas-tugas chusus dalam pemerintahan Negara jang diserahkan kepadanja oleh Presiden/Perdana Menteri.

BAB II
TENTANG BIDANG PEMERINTAHAN.

Pasal 8.

Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri memimpin Menteri/Departemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

Pasal 9.

Wakil Menteri Pertama Bi-

dang Dalam Negeri mengkoordinir:

1. Menteri/Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,
2. Menteri/Departemen Kehakiman dan
3. Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 10.

Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan mengkoordinir :

1. Menteri/Departemen Angkatan Darat,
2. Menteri/Departemen Angkatan Laut,
3. Menteri/Departemen Angkatan Udara,
4. Menteri/Departemen Angkatan Kepolisian Negara,
5. Menteri/Departemen Urusan Veteran, dan
6. Menteri/Departemen Kedjaksaan.

Pasal 11.

Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi mengkoordinir :

1. Menteri/Departemen Pertanian/Agraria,
2. Menteri/Departemen Perburuhan,
3. Menteri/Departemen Pekerdjaan Umum & Tenaga,
4. Menteri/Departemen Perindustrian Dasar & Pertambangan,
5. Menteri/Departemen Perindustrian Rakjat, dan
6. Menteri/Departemen Urusan Research Nasional.

Pasal 12.

Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi mengkoordinir :

1. Menteri/Departemen Perdagangan,
2. Menteri/Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata,
3. Menteri/Departemen Perhubungan Laut,
4. Menteri/Departemen Perhubungan Udara, dan
5. Menteri/Departemen Koperasi.

Pasal 13.

Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan mengkoordinir:

1. Menteri/Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan & Pengawasan,
2. Menteri Urusan Anggaran Negara dan
3. Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 14

Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat mengkoordinir :

1. Menteri/Departemen Agama,

2. Menteri/Departemen Sosial,
3. Menteri/Departemen Kesedjahteraan,
4. Menteri/Departemen Pendidikan Dasar & Kebudajaan,
5. Menteri/Departemen Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan, dan
6. Menteri/Departemen Olah Raga.

Pasal 15.

Wakil Menteri Pertama Bidang Chusus mengkoordinir:
1. Menteri/Departemen Penerangan,
2. Menteri Penghubung DPR/MPR/DPA/Depernas,
3. Menteri / Sekretaris Djenderal Front Nasional, dan
4. Menteri Penghubung Alim Ulama.

Pasal 16.

Tiap-tiap Wakil Menteri Pertama dibantu oleh seorang atau beberapa orang Sekretaris menurut keperluan masing-masing Bidang Pemerintahan, misalnja untuk urusan-urusan perentjanaan, anggaran dan pengawasan.

Pasal 17.

(1) Sekretaris dari para Wakil Menteri Pertama termaksud pada pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Pertama menurut peraturan pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang berlaku, atas usul Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan.

(2) Djumlah Sekretaris dan djumlah pegawai Wakil Menteri Pertama ditentukan oleh Menteri Pertama, setelah mendengar Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan.

BAB III
TENTANG DEPARTEMEN PEMERINTAHAN

Pasal 18.

Tiap-tiap Departemen terdiri atas satuan-satuan organisasi dengan nama:

a. Direktorat untuk fungsi-fungsi pelaksana dan
b. Biro untuk fungsi-fungsi administratif.

Pasal 19.

Tiap-tiap Direktorat dan Biro dapat dibagi dalam Bagian-bagian, jang masing-masing dapat dibagi pula dalam Seksi-seksi.

Pasal 20.

Menteri jang memimpin suatu Departemen dibantu oleh sekurang-kurangnja dua orang Kuasa Menteri menurut keperluan masing-masing Departemen misalnja untuk urusan-urusan pelaksanaan teknis dan administratif.

Pasal 21.

(1) Menteri jang tidak memimpin suatu Departemen dibantu oleh seorang sekretaris Menteri.

(2) Presiden dapat memperlakukan ketentuan dalam pasal 20 terhadap seorang Menteri termaksud pada ajat (1) pasal ini berhubung dengan luasnja/pentingnja tugas jang dibebankan kepadanja.

Pasal 22.

(1) Kuasa Menteri dan Sekretaris Menteri termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Pertama menurut peraturan pengangkatan dan pemberhentian pegawai jang berlaku, atas usul Menteri jang bersangkutan.

(2) Djumlah Kuasa Menteri, Sekretaris Menteri dan pegawai Menteri termaksud pada pasal 20 dan pasal 21 ditentukan oleh Menteri Pertama, setelah mendengar Wakil Pertama jang bersangkutan.

BAB IV
TENTANG BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI.

Pasal 23.

Dengan Keputusan Presiden maka dibawah Presiden, Menteri Pertama, Wakil Menteri dapat ditempatkan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi lain daripada jang termaksud pada pasal 8 sampai/dengan pasal 15 diatas.

BAB V
TENTANG MUSJAWARAH PIMPINAN NEGARA.

Pasal 24.

Pada waktu-waktu dianggap perlu maka Presiden dapat mengadakan Musjawarah Pimpinan Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, jaitu:

1. Kabinet,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (M.P.R.S.),
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong (D.P.R.-G.R.),
4. Dewan Pertimbangan Agung (D.P.A.) dan
5. Dewan Perantjang Nasional (Depernas).

Pasal 25.

Musjawarah Pimpinan Negara dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan:

1. Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama.
2. Ketua dan para Wakil Ketua M.P.R.S.

3. Ketua dan para Wakil Ketua D.P.R.-G.R.,
4. Wakil Ketua D.P.A.,
5. Ketua Depernas.

BAB VI

TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.

(1) Untuk membantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Perdana Menteri dalam pekerdjaannja sehari-hari dibentuk suatu Sekretariat Negara jang dipimpin oleh seorang Sekretaris Negara, dengan di bantu oleh seorang Wakil Sekretaris Negara. Merdeka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sekretaris Negara mempunjai kedudukan sebagai Menteri.

(2) Pekerdjaan kepaniteraan bagi Kabinet dan Musjawarah Pimpinan Negara dilakukan oleh Sekretariat Negara.

Pasal 27.

(1) Sekretariat Negara berada langsung dibawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Perdana Menteri.

(2) Menteri Pertama ikut-serta memimpin dan mengawasi Sekretariat Negara.

Pasal 28.

Sekretariat Negara meliputi:

1. Sekretariat Negara bentuk lama termasuk Sekretariat Militer Presiden, dan Rumah Tangga Presiden;
2. Biro Administrasi dan Organisasi (Biro I);
3. Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro II);
4. Biro Politik dan Keamanan (Biro III);
5. Biro Kesedjahteraan Rakjat (Biro IV);
6. Biro Musjawarah (Biro V);
7. Biro Tanda Kehormatan (Biro VI).

Kesatuan Tjakrabirawa hanja administratif termasuk Sekretariat Negara.

BAB VII

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29.

Soal-soal organisasi Kabinet, Bidang-bidang Pemerintahan, Departemen-departemen Pemerintahan, Badan-badan Pemerintahan Tertinggi, Musjawarah Pimpinan Negara dan Sekretariat Negara, jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 30.

(1) Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaga Negara tahun 1952 No. 26) tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia tidak berlaku lagi terhitung mulai hari tanggal berlakunja Peraturan Presiden ini.

(2) Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 tentang Sekretariat Negara dan Sekretaris Negara disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

(3) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan peng undangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1962
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1962
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MOH. ICHSAN.

PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 1962

TENTANG

PEDOMAN KERDJA ADMINISTRATIF (PERATURAN TATA-TERTIB) APARATUR PEMERINTAH NEGARA PADA TINGKAT TERTINGGI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG:
bahwa dalam menjelenggarakan pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan suatu pedoman kerdja administratif (peraturan tata-tertib) bagi Aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;

MEMBATJA:
Memorandum Panitia 6 mengenai "Penjempurnaan Organisasi dan administrasi Aparatur pada tingkat tertinggi" tertanggal 30 Djanuari 1962, jang disampaikan kepada kami pada tanggal 13 Pebruari 1962;

MENGINGAT:
1. pasal-pasal 4. 5 dan 17 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;

MENDENGAR:

Musjawarah Kabinet Kerdja 1962;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN KERDJA ADMINISTRATIF (PERATURAN TATA-TERTIB) APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA PADA TINGKAT TERTINGGI.
sebagai berikut.

BAB I
TENTANG PEMERINTAHAN NEGARA.

Pasal 1.

Pemerintahan Negara diselenggarakan oleh Kementerian Negara atau Kabinet dengan Presiden selaku Perdana Menteri, dan para Menteri.

Pasal 2.

Presiden selaku Perdana Menteri:

a. memegang pimpinan pemerintahan Negara;
b. menetapkan kebidjaksanaan Pemerintah.

Pasal 3.

Menteri Pertama bertugas:

a. memberikan pimpinan dalam pemerintahan Negara sehari-hari / routine / administratif atas petundjuk Presiden/Perdana Menteri.
b. mengkoordinir pekerdjaan para Wakil Menteri Pertama.

Pasal 4.

Wilajah kekuasaan pemerintahan Negara dibagi dalam 8 Bidang pemerintahan, jaitu:

1. Bidang luar negeri,
2. Bidang dalam negeri,
3. Bidang pertahanan/keamanan,
4. Bidang produksi,
5. Bilang distribusi.
6. Bidang keuangan,
7. Bidang kesedjahteraan rakjat dan
8. Bidang chusus,

jang masing-masing dikoordinir oleh seorang Wakil Menteri Pertama, jang mewakili Presiden/ Perdana Menteri dibidangnja masing-masing.

Pasal 5.

Wakil Menteri Pertama bertugas:

a. menetapkan kebidjaksanaan politik untuk Bidangnja, dengan mengindahkan kebidjaksanaan Pemerintah jang ditetapkan oleh Presiden/ Perdana Menteri, dan setelah bermusjawarah dengan

para Menteri jang termasuk dalam bidangnja;

b. mengkoordinir pekerdjaan para Menteri jang termasuk dalam bidangnja;

c. menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang ditugaskan oleh Presiden/Perdana Menteri atau Menteri Pertama kepadanja.

Pasal 6.

Tiap-tiap Bidang Pemerintahan termasuk pada pasal 4 dibagi dalam bagian-bagian pemerintahan atau departemen-departemen pemerintahan jang berbentuk Departemen atau tidak. dan jang masing-masing dipimpin oleh seorang Menteri.

Pasal 7.

Menteri bertugas:

a. menetapkan kebidjaksanaan politik untuk bagian pemerintahannja atau departemen pemerintahannja dengan mengindahkan kebidjaksanaan Pemerintah jang ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri dan kabidjaksaan politik jang ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan;

b. memimpin dan mengkoordinir pekerdjaan para Kuasa Menteri atau Sekretaris Menteri jang membantu Menteri dalam menunaikan tugasnja sehari - hari/routine/administratif;

c. menjelesaikan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang ditugaskan oleh Presiden/Perdana Menteri. Menteri, Menteri Pertama atau Wakil Menteri Pertama kepadanja.

Pasal 8.

(1) Segala hubungan antara Presiden dan para Menteri, begitu pula antara para Menteri. baik setjara perseorangan maupun dengan suratmenjurat, harus dilakukan dengan mengindahkan garis-garis hierarchi sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terdahulu, jang dari atas kebawah melalui berturut-turut Presiden/Perdana Menteri, Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama dan Menteri.

(2) Segala hubungan lain daripada jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini harus segera diberitahukan oleh pihak jang bawah kepada pihak atau pihak-pihak jang diperatas.

BAB II
TENTANG MUSJAWARAH KABINET.

Pasal 9.

Dalam menjelenggarakan pemerintahan Negara maka Presiden/Perdana Menteri dapat mengadakan:

a. Musjawarah Paripurna Kabinet, jang dihadiri oleh Menteri Pertama, para Wakil Menteri Pertama, para Menteri dan para Pimpinan M.P.R.S., DPR-GR, DPA dan Deparnas jang berkedudukan Wakil Menteri Pertama atau Menteri;

b. Musjawarah Kabinet, jang dihadiri oleh Menteri Pertama dan para Wakil Menteri Pertama, begitu pula oleh seorang atau beberapa orang Menteri jang dipandang perlu.

Pasal 10.

Semua Musjawarah Kabinet termaksud pada pasal 9 diatas dapat diadakan pula Menteri Pertama untuk kepentingan penjelenggaraan pemerintahan negara sehari-hari. Semua Musjawarah Kabinet ini dapat dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri.

Pasal 11.

(1) Dalam Musjawarah-musjawarah Kabinet tersebut dimusjawarahkan masalah-masalah politik, militer, sosial-ekonomis, sosial-kulturil dan lain-lain jang prinsipiil dan penting bagi seluruh pemerintahan Negara atau bagian terbesar pemerintahan Negara.

(2) Dalam soal-soal termaksud pada ajat (1) pasal ini termasuk soal Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dan lain-lain peraturan Negara jang prinsipiil dan penting bagi seluruh atau bagian terbesar pemerintahan Negara, jang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

(3) Presiden menentukan apakah tentang masalah-masalah termaksud pada ajat (1) pasal ini perlu dimintakan pertimbangan dulu dari:

a. Musjawarah Pimpinan Negara,

b. Pimpinan M.P.R.S., a.l. tentang Rantjangan Undang-undang jang penting sekali,

c. D.P.A., a.l. tentang Rantjangan Undang-undang jang penting dan

jang penting sekali, atau

d. Badan Kerdja Depernas, a.l. tentang Rantjangan Undang-udang jang mengenai pembangunan.

Pasal 12.

(1) Atjara, waktu dan tempat Musjawarah-musjawarah Kabinet termaksud pada pasal 9 ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri atau Menteri Pertama.

(2) Musjawarah-musjawarah Kabinet termaksud pada 9 huruf b dapat diadakan oleh Menteri Pertama satu kali seminggu dan selandjutnja setiap kali dianggap perlu oleh Presiden/Perdana Menteri Pertama.

BAB III

TENTANG RAPAT-KERDJA KABINET.

Pasal 13.

(1) Untuk memusjawarahkan masalah-masalah politis, militer, sosial-ekonomis, sosial-kulturil dan lain-lain jang prinsipiil dan penting bagi satu atau beberapa bidang pemerintahan Negara, maka Menteri Pertama dapat mengadakan rapat kerdja Kabinet, jang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertama atau para Wakil Menteri Pertama jang bersangkutan, begitu pula oleh Menteri-menteri jang dipandang perlu.

(2) Dalam soal-soal termaksud pada ajat (1) pasal ini termasuk rantjangan-rantjangan Peraturan Negara jang prinsipiil dan penting bagi satu atau beberapa bidang pemerintahan Negara jang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 14.

Rapat2 Kerdja Kabinet termaksud pada pasal 13 dapat dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri.

Pasal 15.

Atjara, waktu dan tempat Rapat-rapat Kerdja Kabinet tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Pertama.

BAB IV

TENTANG RAPAT KERDJA MENTERI.

Pasal 16.

Untuk menunaikan tugasnja sehari-hari maka tiap-tiap Wakil Menteri Pertama dapat mengadakan Rapat Kerdja Menteri, jang dihadiri oleh semua, bebe-

rapa orang atau seorang Menteri jang termasuk dalam Bidangnja masing-masing.

Pasal 17.

Rapat-rapat Kerdja Menteri termaksud pada pasal 16 dapat dipimpin atau dihadiri setiap waktu oleh Presiden/Perdana Menteri atau oleh Menteri Pertama.

Pasal 18.

(1) Dalam rapat-rapat Kerdja Menteri tersebut diatas dapat diundang lain-lain Wakil Menteri Pertama atau Menteri-menteri dari lain-lain Bidang jang bersangkutan.
(2) Undangan kepada Menteri-menteri dari lain-lain Bidang seperti termaksud pada ajat (1) pasal ini harus diketahui oleh atau disampaikan melalui Wakil Menteri Pertama Menteri Pertama jang bersangkutan.

Pasal 19.

(1) Dalam rapat-rapat Kerdja Menteri tersebut diatas dimusjawarahkan soal-soal routine/administratif jang penting, jang dapat digolongkan dalam Pekerdjaan sehari-hari seorang atau beberapa orang Wakil Menteri Pertama atau beberapa orang Menteri.
(2) Dalam soal-soal termaksud pada ajat (1) pasal ini termasuk rantjangan-rantjangan Peraturan Negara jang bersifat routine/administratif jang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 20.

Atjara, waktu dan tempat Rapat-rapat Kerdja Menteri tersebut diatas ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama jang mengambil inisiatif untuk itu.

BAB V
TENTANG MUSJAWARAH PIMPINAN NEGARA.

Pasal 21.

Musjawarah Pimpinan Negara membitjarakan soal-soal politik nasional dan internasional jang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia atau mengenai pimpinan umum Negara Republik Indones'a. dan lain-lain soal jang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 22.

Atjara. waktu dan tempat Musjawarah Pimpinan Negara

ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB VI
TENTANG KOMISI-KOMISI.

Pasal 23.

Untuk membantu atau memberi pertimbangan kepada Presiden/Perdana Menteri. Menteri Pertama, seorang Wakil Menteri Pertama seorang Menteri, Kabinet atau Musjawarah Pimpinan Negara dalam menjelesaikan suatu persoalan jang tertentu dapat dibentuk suatu Komisi, baik jang bersifat tetap maupun jang bersifat sementara

Pasal 24.

Komisi-komisi termaksud pada pasal 23 dapat terdiri atas:

a) Pedjabat-pedjabat Negara bertingkat Menteri;
b) Pedjabat-pedjabat Negara bertingkat Menteri bersama-sama dengan pedjabat-pedjabat Negara lain dan/atau orang-orang bukan pedjabat Negara;
c) Pedjabat-pedjabat Negara jang tidak bertingkat Menteri;
d) Pedjabat-pedjabat Negara jang tidak bertingkat Menteri bersama-sama dengan orang-orang bukan pedjabat Negara;
c) Orang-orang bukan pedjabat Negara.

Pasal 25.

(1) Komisi-komisi tersebut diatas dapat berbentuk:

a. Panitia ad hoc Kabinet, djika terdiri atas Pedjabat-pedjabat Negara bertingkat Menteri;
b. Panitia Negara, djika diadakan untuk menghadapi suatu masalah jang prinsipiil dan penting;
c. Panitia Interdepartemental, djika diadakan untuk menghadapi suatu masalah administrtif, jang mengenai lebih dari satu Departemen Pemerintahan;
d. Panitia Departemental, djika diadakan untuk menghadapi suatu masalah administratif jang mengenai satu Departemen Pemerintahan.

(2) Nama Komisi-komisi termaksud pada ajat (1) pasal ini ditetapkan oleh Presiden/Perdana Menteri, Pertama, Wakil Menteri Pertama atau Menteri jang membentuknja.

BAB VII
TENTANG PERMUSJAWARAHAN.

Pasal 26.

Segala permusjawarahan da-

lam Musjawarah (paripurna) Kabinet Rapat Kerdja Kabinet, Rapat Kerdja Menteri, Musjawarah Pimpinan Negara dan Komisi-komisi bersifat rahasia dan dilakukan dengan semangat gotong rojong dalam suasana persaudaraan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan menudju permufakatan.

Pasal 27.

Dengan seizin pimpinan permusjawaratan dapat diikut — sertakan dalam seluruh atau sebagian dari permusjawaratan seorang atau beberapa orang bukan anggota permusjawaratan untuk membantu atau mewakili seorang Anggota permusjawaratan atau untuk memberi keterangan/nasehat mengenai sesuatu soal tertentu.

Pasal 28.

(1) Segala putusan jang diambil dalam permusjawaratan ditetapkan oleh pimpinan permusjawaratan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam permusjawaratan.

(2) Putusan-putusan termaksud pada ajat (1) pasal ini harus ditaati oleh setiap anggota permusjawaratan jang bersangkutan.

Pasal 29.

Pengumuman-pengumuman mengenai sesuatu permusjawaratan dilakukan oleh pimpinan permusjarawaratan jang bersangkutan atau oleh Menteri Penerangan atas permintaan pimpinan permusjawaratan itu.

BAB VIII
TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 30.

Dalam menunaikan tugasnja, jaitu membantu Presiden/Perdana Menteri dalam pekerdjaannja sehari-hari, maka Sekretariat Negara harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Kerdja Administratif jang berikut.

Pasal 31.

Untuk menunaikan tugas termaksud pada pasal 30, maka para Sekretariat dan Biro dalam Sekretariat Negara diserahi pekerdjaan-pekerdjaan sebagai berikut:

1) Sekretariat Negara bentuk lama mengurus:

a. Perundang-undangan dan soal-soal jang berhubungan dengan peraturan2 Negara;
b. Surat-surat jang bersifat sipil jang disediakan kepada

pribadi Presiden dan segala pekerdjaan lain jang tidak termasuk tugas Sekretariat, atau Biro tersebut dalam ajat-ajat selandjutnja dari pasal ini atau jang chusus ditugaskan kepadanja oleh Presiden:

c. Soal-soal upatjara kepresidenan, perdjalanan2 dan keuangan Presiden:

d. Soal-soal hubungan antara Presiden dan pers, radio dan televisi (Press Officer Presiden):

c. Soal-soal kesehatan pribadi Presiden, keluarga Presiden dan keluarga para petugas Sekretariat Negara jang ditentukan oleh Presiden (Dokter Pribadi Presiden).

2) Sekretariat Militer Presiden mengurus:

Surat-surat jang bersifat militer dan kepolisian jang disediakan kepada pribadi Presiden dan segala pekerdjaan lain jang bersifat militer dan kepolisian jang ditugaskan kepadanja oleh Presiden.

2) Rumah Tangga Presiden mengurus:

a. Istana-istana dan lain-lain gedung-gedung, kendaraan-kendaraan, alat-alat dan sebagainja, jang tersedia untuk Presiden;

b. Soal-soal kerumah tanggaan Presiden.

4) Tugas Kesatuan Tjakrabirawa dan Staf Adjudan Presiden diatur tersendiri.

5) Biro Administrasi dan Organisasi (Biro I) mengurus;

a. Soal-soal administrasi, organisasi dan personalia seluruh Aparatur sipil Negara;

b. Soal-soal anggaran pendapatan dan belandja Negara bagi semua Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi jang ditempatkan langsung dibawah Presiden dan Menteri Pertama.

6) Biro Ekonomi dan Keuangan (Biro II) mengurus:

Segala soal dibidang-bidang produksi, distribusi dan keuangan.

7. Biro Politik dan Keamanan (Biro III) mengurus:

Segala soal dibidang-bidang luar negeri, dalam negeri dan pertahanan/keamanan.

8) Biro Kesedjahteraan Rakjat (Biro IV) mengurus:

Segala soal dibidang kesedjahteraan rakjat.

9) Biro Musjawarah (Biro V) mengurus:

Segala soal jang bertalian

dengan permusjawaratan-permusjawaratan dalam Musjawarah Pimpinan Negara, Kabinet dan lain-lain Lembaga Negara Tertinggi.

10) Biro Tanda Kehormatan (Biro VI) mengurus:

Segala soal jang bertalian dengan penganugerahan bintang, satyalantjana dan lain-lain tanda djasa/penghargaan.

BAB IX TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 32.

Soal-soal tatakerdja administratif Kabinet, Bidang-bidang Pemerintahan, Departemen-departemen Pemerintahan, Badan-badan Pemerintahan Tertinggi, Musjawarah Pimpinan Negara, Komisi-komisi dan Sekretariat Negara jang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau jang memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 33.

(1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

(2) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 99) tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Menteri tidak berlaku lagi terhitung mulai hari tanggal berlakunja Peraturan Presiden ini.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 26 Djuli 1962,
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta.
pada tanggal 27 Djuli 1962,
SEKRETARIS NEGARA
ttd.
MOH. ICHSAN.

•

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 1962 TENTANG

KETENTUAN2 UNTUK MEMPERGIAT RETOOLING PEGAWAI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENDJATA SERTA MEMPERTJEPAT PELAKSANAAN REORGANISASI APARATUR NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG:

a. bahwa berhubung dengan retooling aparatur Negara dan regrouping Kabinet Kerdja perlu dipergiat usaha retooling personalia militer, polisi dan sipil serta dipertjepat pelaksanaan reorganisasi apartur Negara:

b. bahwa perlu diadakan ketentuan2 dalam bidang penghasilan pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata, jang selain akan memperlantjar usaha2 retooling dan reorganisasi tersebut diatas, akan pula memberikan djaminan jang lajak bagi penghidupan mereka jang terkena, jaitu jang minta berhenti. diberhentikan dan/atau dibebaskan dari tugas pekerdjaannja;

MENGINGAT:

1. Undang2 No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 74);
2. Undang2 No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263);
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 27);
4. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 158);
5. Peraturan Pemerintah No. 229 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 305);
6. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 38);
7. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 39);
8. Instruksi Presiden No. 4 tahun 1960;
9. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1960;
10. Instruksi Presiden No. 9 tahun 1961;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada Menteri2 dan Pembesar2 jang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata untuk mempergiat retooling personalia militer, polisi dan sipil dan mempertjepat pelaksanaan reorganisasi aparatur Negara menurut:

I. Peraturan2 jang berlaku mengenai retooling personalia militer, polisi dan sipil dan mengenai reorganisasi aparatur Negara; dan

II. Ketentuan2 dibawah ini:

Pasal 1.

Pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata, jang karena retooling personalia militer, polisi dan sipil dan/atau reorganisasi aparatur negara, tenaganja tidak diperlukan lagi dan perlu diberhentikan, selama waktu paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dibebaskan dari tugas pekerdjaan.

Pasal 2.

Selama waktu pembebasan dari tugas kepada pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata:

a) diberikan penghasilan (gadji-pokok dan tundjangan2 jang berhubungan dengan gadji-pokok) jang sama djumlahnja dengan penghasilannja pada waktu ia dibebaskan dari tugasnja;
b) tetap diberikan distribusi bahan2 keperluan se-hari2 dan fasilita kesehatan, jang ditetapkan bagi lain2 pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata;
c) tetap diakui fasilita perumahan, jang telah diterima;
d) tidak diberikan lagi fasilita pengangkutan.

Pasal 3.

Waktu selama pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata dibebaskan dari tugas dihitung penuh sebagai masa-kerdja untuk perhitungan pensiun.

Pasal 4.

Apabila pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata termaksud pada pasal 1 dan 2 sebelum ia dibebaskan dari tugas telah mentjapai hak-pensiun penuh (dengan mendapat pokok-pensiun sebanjak 50% gadji-pokok gadji aktip), maka sesudah 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas ia baru diberhentikan dengan hak-pensiun.

Pasal 5.

(1) Apabila pegawai sipil dan anggota Angkatan Bersendjata termaksud pada pasal 1 dan 2 selama waktu ia dibebaskan dari tugas mentjapai hak-pensiun penuh, maka ia diberhentikan dengan hak pensiun pada saat ia mentjapai pokok-pensiun maksimum itu.

(2) Apabila saat mentjapai pokok-pensiun penuh termaksud pada ajat (1) pasal ini djatuh dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah hari tanggal pembebasan dari tugasnja, maka pemberhentian dengan hak-pensiun itu dilakukan (enam) bulan sesudah dari tanggal pembebasan dari tugasnja.

Pasal 6.

Apabila pegawai sipil dan ang-

gota Angkatan Bersendjata termaksud pada pasal 1 dan 2 sesudah waktu 2 (dua) tahun dibebaskan dari tugas belum dapat diberhentikan dengan hak-pensiun menurut peraturan2 jang berlaku, maka kepadanja diberikan tundjangan berupa uang-tunggu menurut pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 239 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 305).

Pasal 7.

Instruksi ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1962.

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
SUKARNO.

*

PERTIMBANGAN
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG KEPADA PEMERINTAH TENTANG MEMPERTJEPAT PELAKSANAAN INSTRUKSI DAN AMANAT PRESIDEN/ PANGLIMA TERTINGGI NO. 04/III/'62.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG, DALAM SIDANGNJA PADA TANGGAL 4 DAN 5 DJULI 1962, SETELAH: MENGINGAT:

adanja kenjataan bahwa sering terdjadi Instruksi dan Amanat Presiden/Panglima Tertinggi tidak lantjar djalannja, antara lain disebabkan oleh karena pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer, chususnja pedjabat-pedjabat jang bersangkutan belum mengetahui Instruksi dan Amanat tersebut atau belum mengetahuinja atas dasar saluran-saluran hierarchis formil;

MENIMBANG:

bahwa hal jang demikian ini tidak boleh dibiarkan, apalagi dalam masa pelaksanaan Trikora;

M E M U T U S K A N :

Mempertimbangkan kepada Pemerintah, agar supaja:

I. Tiap-tiap Instruksi dan Amanat Presiden/Panglima Tertinggi disiarkan in-extenso seluas-luasnja dan setjepat-tjepatnja melalui Radio Republik Indonesia dan lain-lain alat penghubung massa.

II. Pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer segera bertindak melaksanakan Instruksi dan

Amanat tersebut, jang telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia dan lain-lain alat penghubung massa, tanpa menunggu adanja instruksi atas dasar saluran administrasi.

III. Terhadap pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer jang tidak menghiraukan siaran-siaran termaksud sub. I dan tidak melaksanakan Instruksi dan Amanat tersebut, diambil tindakan djabatan atau diretool.

IV. Pemerintah mengandjurkan kepada seluruh lapisan masjarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Instruksi-instruksi dan Amanat-amanat tersebut dan mengadjukan pendapat-pendapatnja melewati saluran-saluran alat-alat Negara, Front Nasional, Partai-partai serta Organisasi-organisasi massa lainnja.

Djakarta, 5 Djuli 1962.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG,
ttd.
SUKARNO.

*

KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TENTANG PENGHARGAAN DAN SALUUT KEPADA PARA PEDJOANG ANGKATAN BERSENDJATA DAN SUKARELAWAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

No. 05/III/'62.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG, DALAM SIDANGNJA PADA TANGGAL 4 DAN 5 DJULI 1962. SETELAH:

mempeladjari setjara sungguh-sungguh dan mendalam situasi perdjoangan Trikora jang meningkat sekarang ini,

MEMUTUSKAN:

menjatakan penghargaan dan saluut jang setinggi-tingginja kepada para pedjoang Angkatan Bersendjata dan Sukarelawan Pembebas Irian Barat, jang telah memberikan pengabdian dan pengorbanan setjara njata didataran Irian Barat untuk mengembalikan Irian Barat dalam tahun 1962 ini djuga kedalam kekuasaan Republik Indonesia.

Djakarta, 5 Djuli 1962.
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG,
ttd.
SUKARNO.

***

Lampiran: Surat keputusan Menteri Penerangan tgl. 21 Djuni 1962 No: 18/SK/M/62.

	Nama Panitia		S. K.	Direktorat/Biro/Bagian
1.	Staf chusus untuk menjempurnakan siaran Pemerintah.	No. tgl.	3/SK/M/61 25-2-1961	Direktorat Publisitet dan Penerangan Daerah.
2.	Panitia Pembelian	No. tgl.	5/SK/M/61 17-2-1961	Direktorat Tata Usaha.
3.	Panitia Ad Hoc Retooling Departemen Penerangan.	No. tgl.	6/SK/M/61 25-2-1961	Tugasnja dianggap telah selesai.
4.	Panitia Bantuan Pers.	No. tgl.	9/SK/M/61 12-4-1961	Biro Parkembangan Perusahaan Pers.
5.	Panitia Pelaksanaan Pentjetakan dan Penjebaran Pola Pembangunan Nasional Semesta.	No. tgl.	15/SK/M/61 20-6-1961	Badan Pimpinan Umum Perusahaan / Pertjetakan Negara.
6.	Panitia Kerdjasama Departemen Penerangan/D.P.R.-G.R.	No. tgl.	33/SK/M/61 1-11-1961	Tugasnja dianggap telah selesai.
7.	Panitia Perluasan Penerbitan Deppen.	No. tgl.	4/SK/M/62 26-1-1960	Direktorat Publisitet dan Penerangan Daerah.
8.	Panitia Perumahan Dep. Pen.	No. tgl.	35/SK/M/60 10-10-1960	Tugasnja dianggap telah selesai.

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA.
t.t.d.
(Prof. Mr H. Muh. Yamin).

* * *
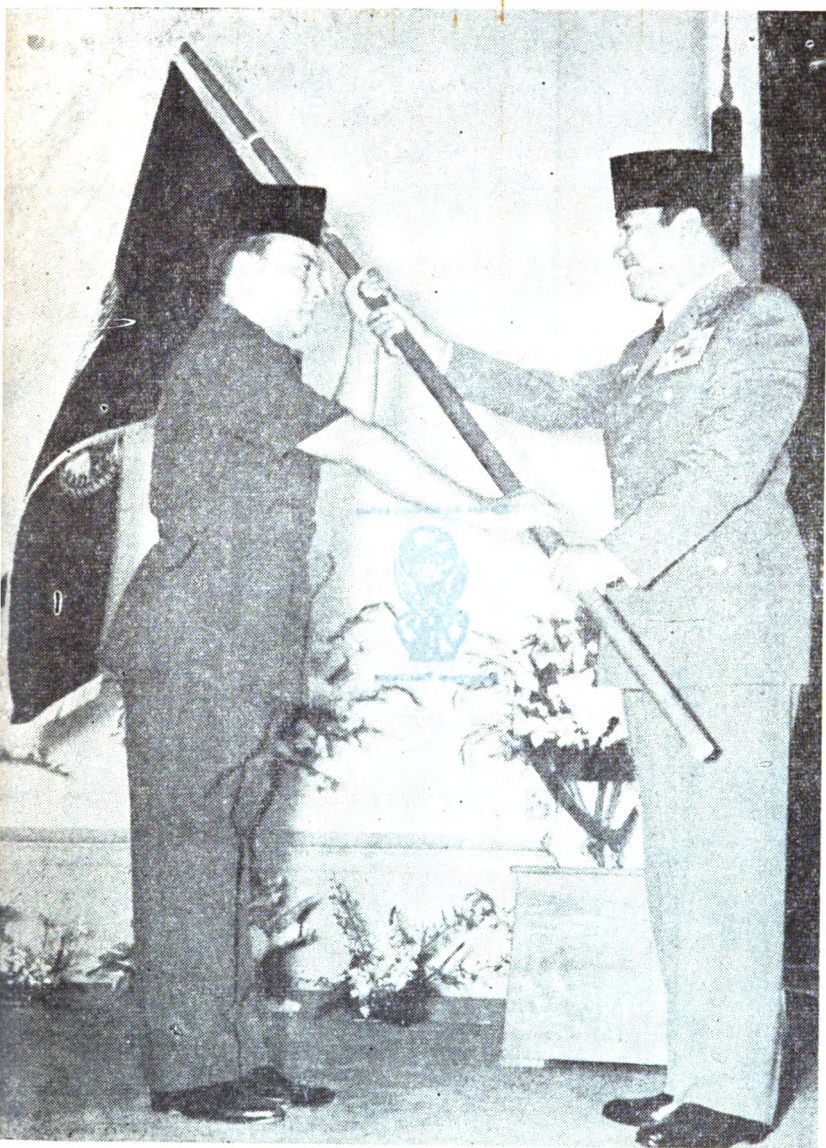
Penjerahan Pandji Koperasi Indonesia oleh Presiden Sukarno/ Panglima Tertinggi Koperasi Indonesia, kepada Menteri Koperasi Achmadi, pada peringatan Hari Koperasi tgl. 12-7-1962.